PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LKPJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Marilah kita memanjatkan segenap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2015 ini dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ Tahun 2015 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2015. Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2015 merupakan bagian dari periode tahun ketiga atas pelaksanaan RPJMD DIY tahun 2012-2017. Keberhasilan pelaksanaan APBD DIY Tahun 2015 ditentukan berdasarkan capaian sasaran pembangunan dan pelaksanaan program kegiatan yang telah disepakati bersama sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2012-2017. Pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran 2015 menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Cakupan LKPJ Tahun 2015 terdiri atas: arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan urusan keistimewaan, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Adapun penyampaian laporan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam LKPJ Tahun 2015, merupakan amanat atas pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mendalami atas hasil penyelenggaraan urusan pembangunan yang dilakukan Pemda DIY, sudah banyak hasil yang telah dicapai, meskipun harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sebagaimana terlihat pada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan hasil pembahasan dengan DPRD diharapkan menjadi rekomendasi yang penting untuk melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan di DIY pada tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, materi dalam LKPJ ini, juga memberikan deskripsi mengenai tingkat efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Pemda DIY selama tahun 2015, termasuk menjadi pijakan penting untuk melakukan perencanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Demikian LKPJ Tahun 2015 ini disusun untuk bisa menjadi pijakan arah pembangunan daerah ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan lindungan bagi kita semua untuk senantiasa menuju masa depan yang lebih baik.

Terima Kasih

Yogyakarta, Maret 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **xix**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxx**

BAB 1 PENDAHULUAN **1-1**

1.1 DASAR HUKUM 1-1

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH 1-5

1.2.1 Kondisi Geografis Daerah 1-5

1.2.1.1 Batas Administrasi 1-5

1.2.1.2 Luas Wilayah 1-6

1.2.1.3 Topografi 1-7

1.2.2 Gambaran Umum Demografi 1-8

1.2.2.1 Jumlah Penduduk 1-8

1.2.2.2 Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan 1-11

1.2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia 1-16

1.2.2.4 Pendidikan 1-18

1.2.2.5 Penduduk Miskin 1-20

1.2.3 Kondisi Ekonomi Daerah 1-21

1.2.3.1 Sektor Unggulan 1-21

A. Sektor Industri Pengolahan 1-23

B. Sektor Pertanian 1-23

1. Tanaman Pangan 1-24

2. Kelautan dan Perikanan 1-25

3. Hortikultura 1-27

4. Perkebunan 1-28
5. Peternakan 1-30
6. Kehutanan 1-31
C. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....1-34
D. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1-35
1.2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi 1-36
1.3 SISTEMATIKA.....1-42
BAB 2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY.....2-1
2.1 VISI DAN MISI JANGKA PANJANG 2-1
2.1.1 Visi Jangka Panjang 2-1
2.1.2 Misi Jangka Panjang.....2-1
2.2 FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....2-2
2.2.1 Dasar Filosofi 2-2
2.2.2 Visi.....2-7
2.2.3 Misi 2-9
2.2.4 Tujuan 2-11
2.2.5 Sasaran.....2-11
2.3 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2012 - 2017 2-13
2.3.1 Strategi.....2-13
2.3.2 Arah Kebijakan Daerah.....2-15
2.3.3 Program.....2-16
2.3.4 Indikator.....2-25
2.4 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 2-35
2.4.1 Tema Pembangunan Daerah.....2-35
2.4.2 Prioritas Pembangunan Daerah.....2-42

BAB 3 KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIY 3-1

3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....3-3

3.1.1 Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah.....3-3

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan.....3-4

3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah 3-5

A. Pajak Daerah 3-6

B. Hasil Retribusi Daerah.....3-7

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....3-8

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3-8

3.1.2.2 Dana Perimbangan.....3-11

3.1.2.3 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 3-11

3.1.2.4 Dana Alokasi Umum.....3-12

3.1.2.5 Dana Alokasi Khusus 3-12

3.1.2.6 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....3-13

A. Pendapatan Hibah 3-13

B. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3-14

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....3-15

3.2.1 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah.....3-15

3.2.2 Target dan Realisasi Belanja.....3-17

3.2.2.1 Belanja Tidak Langsung 3-17

A. Belanja Pegawai.....3-18

B. Belanja Hibah 3-18

C. Belanja Bantuan Sosial.....3-19

D. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 3-20

E. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 3-21
F. Belanja Tidak Terduga.....3-22
3.2.2.2 Belanja Langsung 3-22
3.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI 3-26
3.3.1 Permasalahan 3-26
3.3.2 Solusi 3-27
3.4 PEMBIAYAAN DAERAH 3-28
3.4.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah.....3-28
3.4.2 Target dan Realisasi Pembiayaan 3-29
3.4.2.1 Penerimaan Pembiayaan.....3-29
3.4.2.2 Pengeluaran Pembiayaan.....3-29
3.5 PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN.....3-29
3.5.1 Kinerja BUMD 3-29
3.5.1.1 Bank Pembangunan Daerah DIY 3-29
3.5.1.2 PT. Anindya Mitra Internasional (AMI).....3-31
3.5.1.3 PT. Taru Martani 3-32
3.5.1.4 Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP).....3-32
3.6 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3-33
3.6.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah.....3-34
3.6.1.1 Dasar Hukum Pelaksanaan 3-34
3.6.1.2 Tantangan dan Permasalahan 3-35
3.6.1.3 Upaya-upaya Yang Dilaksanakan 3-36
3.6.1.4 Capaian.....3-36
3.6.2 Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY 3-37
3.6.3 Penghapusan 3-39

3.6.3.1 Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 3-39

A. Penjualan 3-39

B. Hibah....3-42

3.6.3.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah....3-43

3.6.3.3 Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)....3-44

3.6.4 Pendayagunaan Barang Daerah 3-46

3.6.4.1 Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3-46

3.6.4.2 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah 3-57

A. Rehabilitasi Kantor dan Rumah Daerah 3-57

B. Penjaminan Barang Milik Daerah 3-58

BAB 4 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DIY 4-1

4.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMDA DIY PADA 2015 4-1

4.2 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 4-7

4.2.1 Urusan Pendidikan....4-7

4.2.1.1 Kondisi Umum....4-7

4.2.1.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-11

4.2.1.3 Permasalahan dan Solusi....4-11

4.2.2 Urusan Kesehatan....4-12

4.2.2.1 Kondisi Umum....4-12

4.2.2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-19

4.2.2.3 Permasalahan dan Solusi....4-20

4.2.3 Urusan Lingkungan Hidup 4-22
4.2.3.1 Kondisi Umum.....4-22
4.2.3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015.....4-26
4.2.3.3 Permasalahan dan Solusi.....4-26
4.2.4 Urusan Pekerjaan Umum 4-27
4.2.4.1 Kondisi Umum.....4-27
A. Aksesibilitas Jalan di Wilayah Provinsi.....4-28
B. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 4-30
C. Persentase Penduduk Berakses Sanitasi yang Layak.....4-30
D. Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.....4-32
4.2.4.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-32
4.2.4.3 Permasalahan dan Solusi.....4-32
4.2.5 Urusan Penataan Ruang.....4-33
4.2.5.1 Kondisi Umum.....4-33
4.2.5.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-36
4.2.5.3 Permasalahan dan Solusi.....4-36
4.2.6 Urusan Perencanaan Pembangunan 4-37
4.2.6.1 Kondisi Umum.....4-37
4.2.6.2 Program/ Kegiatan Reguler Tahun Anggaran 2015 4-39
4.2.6.3 Permasalahan dan Solusi.....4-40
4.2.7 Urusan Perumahan 4-41
4.2.7.1 Kondisi Umum.....4-41
4.2.7.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-43
4.2.7.3 Permasalahan dan Solusi.....4-43

4.2.8 Urusan Kepemudaan dan Olahraga 4-43
4.2.8.1 Kondisi Umum 4-43
4.2.8.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-45
4.2.8.3 Permasalahan dan Solusi 4-45
4.2.9 Urusan Penanaman Modal 4-46
4.2.9.1 Kondisi Umum 4-46
4.2.9.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-49
4.2.9.3 Permasalahan dan Solusi 4-51
4.2.10 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4-51
4.2.10.1 Kondisi Umum 4-51
4.2.10.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-53
4.2.10.3 Permasalahan dan Solusi 4-53
4.2.11 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 4-54
4.2.11.1 Kondisi Umum 4-54
4.2.11.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-56
4.2.11.3 Permasalahan dan Solusi 4-56
4.2.12 Urusan Ketenagakerjaan 4-58
4.2.12.1 Kondisi Umum 4-58
4.2.12.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-60
4.2.12.3 Permasalahan dan solusi 4-60
4.2.13 Urusan Ketahanan Pangan 4-61
4.2.13.1 Kondisi Umum 4-61
4.2.13.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-65
4.2.13.3 Permasalahan dan Solusi 4-65

4.2.14 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4-67
4.2.14.1 Kondisi Umum....4-67
4.2.14.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-70
4.2.14.3 Permasalahan dan Solusi....4-70
4.2.15 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 4-71
4.2.15.1 Kondisi Umum....4-71
4.2.15.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-73
4.2.15.3 Permasalahan dan Solusi....4-74
4.2.16 Urusan Perhubungan 4-74
4.2.16.1 Kondisi Umum....4-74
4.2.16.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-78
4.2.16.3 Permasalahan dan Solusi....4-78
4.2.17 Urusan Komunikasi dan Informatika 4-79
4.2.17.1 Kondisi Umum....4-79
4.2.17.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-81
4.2.17.3 Permasalahan dan Solusi....4-81
4.2.18 Urusan Pertanahan 4-82
4.2.18.1 Kondisi Umum....4-82
4.2.18.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-83
4.2.18.3 Permasalahan dan Solusi....4-83
4.2.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri....4-83
4.2.19.1 Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 4-83
A. Kondisi Umum 4-83
B. Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-87
C. Permasalahan dan Solusi 4-87

4.2.19.2 Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4-87

A. Kondisi Umum 4-87

B. Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-90

C. Permasalahan dan Solusi 4-90

4.2.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....4-91

4.2.20.1 Sub Urusan Otonomi Daerah.....4-91

A. Kondisi Umum 4-91

B. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-92

C. Permasalahan dan Solusi 4-92

4.2.20.2 Sub Urusan Pemerintahan Umum 4-93

A. Fasilitas Pemerintahan.....4-93

1) Kondisi Umum 4-93

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-95

3) Permasalahan dan Solusi 4-95

B. Kelembagaan.....4-96

1) Kondisi Umum 4-96

2) Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-98

3) Permasalahan dan Solusi 4-98

C. Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum 4-98

1) Kondisi Umum 4-98

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-106

3) Permasalahan dan Solusi 4-107

D. Fasilitas DPRD 4-107
1) Kondisi Umum 4-107
2) Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-110
3) Permasalahan dan Solusi 4-111
E. Fasilitas Kesra 4-111
1) Kondisi Umum 4-111
2) Program dan Kegiatan 2015 4-113
3) Permasalahan dan Solusi 4-113
F. Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4-113
1) Kondisi Umum 4-113
2) Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-114
3) Permasalahan dan Solusi 4-115
G. Fasilitas Administrasi Pembangunan 4-115
1) Kondisi Umum 4-115
2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-117
3) Permasalahan dan Solusi 4-118
H. Fasilitas Umum Humas dan Protokol 4-119
1) Kondisi Umum 4-119
2) Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-123
3) Permasalahan dan Solusi 4-123
I. Fasilitas Pengawasan 4-124
1) Kondisi Umum 4-124
2) Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-126
3) Permasalahan dan Solusi 4-126

J. Penanggulangan Bencana 4-127
1) Kondisi Umum 4-127
2) Program Kegiatan Tahun 2015 4-128
3) Permasalahan dan Solusi 4-128
4.2.20.3 Fasilitas Administrasi Keuangan Daerah 4-129
A. Kondisi Umum 4-129
B. Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-133
C. Permasalahan dan Solusi 4-133
4.2.20.4 Pendidikan dan Pelatihan.....4-134
A. Kondisi Umum 4-134
B. Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-136
C. Permasalahan dan Solusi 4-136
4.2.20.5 Kepegawaian Daerah 4-137
A. Kondisi Umum 4-137
B. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-140
C. Permasalahan dan Solusi 4-141
4.2.20.6 Persandian.....4-142
A. Kondisi Umum 4-142
B. Permasalahan dan Solusi 4-143
4.2.21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4-144
4.2.21.1 Kondisi umum.....4-144
4.2.21.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-147
4.2.21.3 Permasalahan dan Solusi.....4-147

4.2.22 Urusan Sosial 4-147
4.2.22.1 Kondisi Umum 4-147
4.2.22.2 Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-152
4.2.22.3 Permasalahan dan Solusi 4-153
4.2.23 Urusan Kebudayaan 4-154
4.2.23.1 Kondisi Umum 4-154
4.2.23.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-158
4.2.23.3 Permasalahan dan Solusi 4-158
4.2.24 Urusan Statistik 4-159
4.2.24.1 Kondisi Umum 4-159
4.2.24.2 Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-161
4.2.24.3 Permasalahan dan Solusi 4-161
4.2.25 Urusan Kearsipan 4-162
4.2.25.1 Kondisi Umum 4-162
4.2.25.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-164
4.2.26 Urusan Perpustakaan 4-164
4.2.26.1 Kondisi Umum 4-164
4.2.26.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-166
4.3 URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 4-166
4.3.1 Urusan Pariwisata 4-166
4.3.1.1 Kondisi Umum 4-166
4.3.1.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-170
4.3.1.3 Permasalahan dan Solusi 4-171
4.3.2 Urusan Kelautan dan Perikanan 4-172
4.3.2.1 Kondisi Umum 4-172
4.3.2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-177
4.3.2.3 Permasalahan dan Solusi 4-178

4.3.3 Urusan Pertanian 4-179
4.3.3.1 Kondisi Umum 4-179
4.3.3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015 4-183
4.3.3.3 Permasalahan dan Solusi 4-184
4.3.4 Urusan Kehutanan 4-185
4.3.4.1 Kondisi Umum 4-185
4.3.4.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-188
4.3.4.3 Permasalahan dan Solusi 4-189
4.3.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 4-190
4.3.5.1 Kondisi Umum 4-190
4.3.5.2 Program dan Kegiatan TahunAnggaran 2015 4-193
4.3.5.3 Permasalahan dan Solusi 4-193
4.3.6 Urusan Perindustrian 4-193
4.3.6.1 Kondisi Umum 4-193
4.3.6.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-195
4.3.6.3 Permasalahan dan Solusi 4-195
4.3.7 Urusan Perdagangan 4-196
4.3.7.1 Kondisi Umum 4-196
4.3.7.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-198
4.3.7.3 Permasalahan dan Solusi 4-198
4.3.8 Urusan Ketransmigrasian 4-199
4.3.8.1 Kondisi Umum 4-199
4.3.8.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 4-200
4.3.8.3 Permasalahan dan Solusi 4-201

BAB 5 PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY 5-1

5.1 URUSAN KELEMBAGAAN.....5-5

5.1.1 Kondisi Umum 5-5

5.1.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015.....5-6

5.1.3 Permasalahan dan Solusi 5-7

5.2 URUSAN KEBUDAYAAN 5-7

5.2.1 Kondisi Umum 5-7

5.2.2 Program dan dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 5-8

5.2.3 Permasalahan dan Solusi 5-13

5.3 URUSAN PERTANAHAN 5-14

5.3.1 Kondisi Umum 5-14

5.3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015 5-15

5.3.3 Permasalahan dan Solusi 5-17

5.4 URUSAN TATA RUANG 5-17

5.4.1 Kondisi Umum 5-17

5.4.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015.....5-18

5.4.3 Permasalahan dan Solusi 5-20

BAB 6 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 6-1

6.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....6-1

6.1.1 Dasar Hukum 6-1

6.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....6-3

6.1.3 SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.....6-4

6.1.3.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....6-5

6.1.3.2 Dinas Pertanian DIY.....6-8

6.1.3.3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.....6-12

6.1.3.4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY.....6-18
6.1.3.5 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.....6-21
6.2 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI GUBERNUR KE KABUPATEN/ KOTA.....6-25
BAB 7 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH.....7-1
7.1 KERJASAMA ANTAR DAERAH.....7-1
7.1.1 Kerjasama Antar-Daerah.....7-1
7.1.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....7-6
7.2 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.....7-14
7.2.1 Kebijakan dan Kegiatan.....7-14
7.2.2 Permasalahan dan Solusi.....7-17
7.3 PEMBINAAN BATAS DAERAH.....7-17
7.3.1 Kebijakan dan Kegiatan.....7-17
7.4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....7-35
7.4.1 Kebijakan dan Kegiatan.....7-35
7.4.2 Permasalahan dan Solusi.....7-40
7.5 PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.....7-40
7.5.1 Kebijakan dan Kegiatan.....7-40
7.5.2 Permasalahan dan Solusi.....7-47
7.6 TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH.....7-49
7.6.1 Lembaga Ombudsman Daerah (LOD).....7-49
7.6.2 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).....7-55
7.6.3 Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY.....7-58
7.6.4 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).....7-61
7.6.5 Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY.....7-64
7.6.6 Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).....7-69
7.6.7 Palang Merah Indonesia (PMI).....7-71

7.6.8 Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY.....7-72

7.6.9 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY.....7-74

7.6.10 Komisi Informasi DIY.....7-80

7.6.11 Trans Jogja.....7-87

BAB 8 PENUTUP.....**8-1**

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di DIY, 2015 1-8

Tabel 1.2 Proyeksi Penduduk Tahun 2015 (Berdasarkan SP 2000) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY (x 1000) 1-9

Tabel 1.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan di DIY, 2013-2015 1-12

Tabel 1.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2013-Agustus 2015 1-13

Tabel 1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Pendidikan, Agustus 2015 1-14

Tabel 1.6 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/ Kota di DIY, 2014 1-18

Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY 2015 1-19

Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah, 2012-2015 1-20

Tabel 1.9 Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB DIY, Tahun 2010-2015 (%) 1-22

Tabel 1.10 Perkembangan IKM di DIY, 2011-2015 1-23

Tabel 1.11 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan, 2014-2015 1-24

Tabel 1.12 Jumlah Kapal Perikanan di DIY, 2014-2015 (Unit) 1-26

Tabel 1.13 Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY, 2014-2015 1-28

Tabel 1.14 Produksi Komoditas Perkebunan DIY, 2011-2015 1-29

Tabel 1.15 Populasi Ternak DIY, 2014 - 2015 1-31

Tabel 1.16 Produksi Minyak Kayu Putih di DIY, 2011-2015 1-34

Tabel 1.17 Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY, 2011-2015 1-35

Tabel 1.18 Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditas di DIY, 2011-2015 (Juta US$) 1-35

Tabel 1.19 Nilai Impor Berdasarkan Komoditas di DIY, 2011-2015 (Juta US$) 1-36

Tabel 1.20 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015 1-37

Tabel 1.21 Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2013-2014 (Juta Rupiah) 1-38

Tabel 1.22 Kontribusi Sektor terhadap PDRB DIY, 2014-2015 (%) 1-39

Tabel 1.23 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran, 2014-2015 1-40

Tabel 1.24 Nilai PDRB Per Kapita DIY, 2010-2015 (Juta Rp) 1-41

Tabel 1.25 Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 1-41

Tabel 2.1 Tujuan yang hendak dicapai 2-11

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Pembangunan di DIY 2-12

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Gubernur 2-25

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY 2-26

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan DIY 2-26

Tabel 2.6 Indikator Kinerja RSJ GRHASIA DIY 2-27

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2-27

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 2-27

Tabel 2.9 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi DIY 2-27

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY 2-28

Tabel 2.11 Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY 2-28

Tabel 2.12 Indikator Kinerja Dinas Sosial DIY 2-29

Tabel 2.13 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY 2-29

Tabel 2.14 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY 2-30

Tabel 2.15 Indikator Kinerja Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY 2-30

Tabel 2.16 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan DIY 2-30

Tabel 2.17 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat DIY 2-30

Tabel 2.18 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 2-31

Tabel 2.19 Indikator Kinerja SATPOL PP DIY 2-31

Tabel 2.20 Indikator Kinerja BIRO Tata Pemerintahan SETDA DIY.....2-31

Tabel 2.21 Indikator Kinerja Utama (IKU) BIRO HUKUM SETDA DIY 2-31

Tabel 2.22 Indikator Kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda DIY 2-31

Tabel 2.23 Indikator Kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY 2-31

Tabel 2.24 Indikator Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY DIY 2-32

Tabel 2.25 Indikator Kinerja Biro Organisasi Setda DIY.....2-32

Tabel 2.26 Indikator Kinerja Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY.....2-32

Tabel 2.27 Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY 2-32

Tabel 2.28 Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DIY 2-33

Tabel 2.29 Indikator Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY.....2-33

Tabel 2.30 Indikator Kinerja INSPEKTORAT DIY 2-33

Tabel 2.31 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah DIY 2-33

Tabel 2.32 Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY 2-33

Tabel 2.33 Indikator Kinerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY 2-33

Tabel 2.34 Indikator Kinerja Dinas Pertanian DIY 2-34

Tabel 2.35 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY 2-34

Tabel 2.36 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata DIY 2-34

Tabel 2.37 Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 2-34

Tabel 2.38 Tahapan dan Strategi RPJPD Lima Tahunan (2005-2025) 2-37

Tabel 3.1 Komposisi Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) 3-5

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-6

Tabel 3.3 Realisasi Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) 3-7

Tabel 3.4 Realisasi Retribusi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) 3-7

Tabel 3.5 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-8

Tabel 3.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-10

Tabel 3.7 Realisasi Dana Perimbangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-11

Tabel 3.8 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-12

Tabel 3.9 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) 3-13

Tabel 3.10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-13

Tabel 3.11 Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-14

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-17

Tabel 3.13 Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-17

Tabel 3.14 Realisasi Belanja Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-18

Tabel 3.15 Realisasi Belanja Hibah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-19

Tabel 3.16 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-20

Tabel 3.17 Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-20

Tabel 3.18 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-21

Tabel 3.19 Realisasi Belanja Langsung Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-23

Tabel 3.20 Realisasi Belanja Langsung (Non Dana Keistimewaan) Menurut SKPD DIY Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-24

Tabel 3.21 Realisasi Belanja Langsung (Dana Keistimewaan) Menurut SKPD DIY Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....3-24

Tabel 3.22 Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2014 (Saldo Awal 2015) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.....3-36

Tabel 3.23 Tanah Milik Pemerintah Daerah DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2015.....3-38

Tabel 3.24 Warkah Tanah Pemerintah Daerah DIY Pada Tahun 2015.....3-38

Tabel 3.25 Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/ atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa.....3-47

Tabel 3.26 Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Sewa.....3-51

Tabel 3.27 Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai.....3-53

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2015.....4-2

Tabel 4.2 Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan 4-7

Tabel 4.3 Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru.....4-8

Tabel 4.4 Jumlah Perguruan Tinggi 4-8

Tabel 4.5 Lembaga, Peserta, dan Pendidik Pendidikan Non Formal.....4-8

Tabel 4.6 Rasio Siswa Per Sekolah, Rasio Siswa Per Guru, dan Rasio Siswa Per Kelas 4-9

Tabel 4.7 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni 4-9

Tabel 4.8 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2015.....4-9

Tabel 4.9 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2015 4-14

Tabel 4.10 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015.....4-24

Tabel 4.11 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2015.....4-28

Tabel 4.12 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2015 4-29

Tabel 4.13 Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Pada Sistem IPAL Terpusat Sewon Sampai Dengan Tahun 2015 4-31

Tabel 4.14 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2015.....4-35

Tabel 4.15 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2015.....4-38

Tabel 4.16 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2015.....4-42

Tabel 4.17 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 4-44

Tabel 4.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PMTB DIY, 2010-2015 (%).....4-47

Tabel 4.19 Perkembangan Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2011-2015 4-48

Tabel 4.20 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2015 4-48

Tabel 4.21 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2011-2015 4-51

Tabel 4.22 Perkembangan Jumlah UKM menurut skala usaha Tahun 2011-2015 4-52

Tabel 4.23 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi & UKM Tahun 2014-2015 serta Capaian 2015 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) 4-52

Tabel 4.24 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014-2015 serta Capaian 2015 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) 4-55

Tabel 4.25 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2015 4-58

Tabel 4.26 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2015 4-62

Tabel 4.27 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 4-68

Tabel 4.28 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015 4-72

Tabel 4.29 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015 4-75

Tabel 4.30 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi & Informatika Tahun 2015 4-80

Tabel 4.31 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2015 4-82

Tabel 4.32 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesbangpoldagri Tahun 2015 4-86

Tabel 4.33 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2015 4-88

Tabel 4.34 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah, Fasilitasi Pemerintah Tahun 2015 4-92

Tabel 4.35 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum, Fasilitasi Pemerintah Tahun 2015 4-94

Tabel 4.36 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2015 4-97

Tabel 4.37 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013-2015 serta Capaian 2015 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) 4-100

Tabel 4.38 Kegiatan pembahasan raperda menjadi perda oleh Pemda DIY pada 2015 4-101

Tabel 4.39 Indikator dan Capaian Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum pada Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. 4-109

Tabel 4.40 Indikator dan Capaian Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum pada Biro Adm Kesra & Kemasyarakatan Setda DIY Tahun 2015. 4-112

Tabel 4.41 Target dan Realisasi Kinerja Fasilitasi Perekonomian & Sumberdaya Alam Tahun 2015 4-114

Tabel 4.42 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum pada Biro Administrasi Pembangunan tahun 2015 4-116

Tabel 4.43 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2015 4-120

Tabel 4.44 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Inspektorat Tahun 2015 4-125

Tabel 4.45 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada BPBD DIY Tahun 2015 4-127

Tabel 4.46 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pengawasan, Fasilitasi Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2015) 4-131

Tabel 4.47 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2014-2015 serta Capaian 2015 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) 4-135

Tabel 4.48 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2014-2015 serta Capaian 2015 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017) 4-139

Tabel 4.49 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Persandian Tahun 2015 4-142

Tabel 4.50 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015 4-145

Tabel 4.51 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2015 4-149

Tabel 4.52 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015 4-155

Tabel 5.53 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Statistik Tahun 2015 4-160

Tabel 5.54 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013-2014 serta capaian 2015 terhadap Target Akhir RPJMD (2017) 4-162

Tabel 5.55 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015 4-165

Tabel 4.56 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2015 4-169

Tabel 4.57 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 4-174

Tabel 4.58 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2015 4-180

Tabel 4.59 Produksi Hortikultura Unggulan di DIY Tahun 2014-2015 4-181

Tabel 4.60 NTP 2015 dibandingkan 2014 4-183

Tabel 4.61 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Status dan Kewilayahan Tahun 2015 4-186

Tabel 4.62 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2015 4-187

Tabel 4.63 Target dan Realisasi Kinerja Urusan ESDM Tahun 2015 4-192

Tabel 4.64 Perkembangan IKM di DIY 4-194

Tabel 4.65 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015 4-194

Tabel 4.66 Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2011-2015 4-196

Tabel 4.67 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2015 4-197

Tabel 4.68 Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2012-2015 4-199

Tabel 4.69 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2015 4-200

Tabel 5.1 Dana Keistimewaan DIY Tahun 2015, sesuai Urusan 5-4

Tabel 5.2 Rekapitulasi Kinerja Urusan Kebudayaan 5-9

Tabel 5.3 Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan 5-15

Tabel 5.4 Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Ruang.....5-18

Tabel 6.1 Kementerian dan Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 6-4

Tabel 6.2 Program/ Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2015 6-6

Tabel 6.3 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Tahun 2015.....6-7

Tabel 6.4 Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015.....6-9

Tabel 6.5 Target dan Realisasi TA 2015 6-14

Tabel 6.6 Cakupan Perjanjian Kinerja Penyelenggaraan Jalan TA 2015 6-16

Tabel 6.7 Target dan Realisasi Pelaksanaan Jalan TA 2015 6-16

Tabel 6.8 Pengukuran Kinerja Dinas PUP dan ESDM Tahun 2015 6-17

Tabel 6.9 Target dan Realisasi Pelaksanaan Jalan TA 2015 6-18

Tabel 6.10 Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2015 6-19

Tabel 6.11 Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2015.....6-20

Tabel 6.12 Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014 - 2015 6-23

Tabel 6.13 Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2015 6-24

Tabel 6.14 Alokasi dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Gubernur DIY Kepada Kabupaten/ Kota Tahun 2015 6-28

Tabel 6.15 Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Yogyakarta TA 2015 6-29

Tabel 6.16 Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Yogyakarta TA 2015 6-31

Tabel 6.17 Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kulon Progo TA 2015.....6-33

Tabel 6.18 Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Gunungkidul TA 2015.....6-34

Tabel 6.19 Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Sleman TA 2015 6-37

Tabel 7.1 Daftar Rincian Naskah Kesepakatan yang Ditindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Pada Tahun 2015 7-9

Tabel 7.2 Permendagri tentang Batas Daerah di DIY 7-18

Tabel 7.3 Hasil Pembangunan Pilar Batas dalam rangka Perapatan Tanda Batas DIY- Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2015 7-23

Tabel 7.4 Pelaksanaan Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2013 7-27

Tabel 7.5 Frekuensi Kejadian Bencana di DIY tahun 2012-2015.....7-36

Tabel 7.6 Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja DIY.....7-47

Tabel 7.7 Laporan kepada LOD (Periode: 9 Januari-25 Desember 2015).....7-51

Tabel 7.8 Kinerja Penanganan Kasus (Periode: 9 Januari-25 Desember 2015) 7-51

Tabel 7.9 Data Pemilih Pilkada tahun 2015 7-63

Tabel 7.10 Data Perbandingan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Pilkada 7-63

Tabel 7.11 Lembaga Penyiaran yang mengajukan Proses Perizinan.....7-76

Tabel 7.12 Lembaga Penyiaran Yang Telah Mendapatkan IPP 7-76

Tabel 7.13 Penanganan Sengketa 7-85

Tabel 7.14 Jumlah Load Factor dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2009-2015 7-89

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Peta Administrasi DIY 1-5

Gambar 1.2 Proporsi Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/ Kota 1-6

Gambar 1.3 Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/ Kota (%), 2014 1-9

Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Menurut Kabupaten/ Kota (%), 2014-2015 1-10

Gambar 1.5 Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/ Kota (Jiwa/km^2), 2014-2015 1-11

Gambar 1.6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2015.....1-12

Gambar 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Di Tingkat Nasional, Februari 2010-Agustus 2014 (%).....1-15

Gambar 1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/ Kota Di DIY, Agustus 2013-Agustus 2015 (%) 1-16

Gambar 1.9 Perbandingan IPM DIY dengan Metode Perhitungan Baru dan Lama, 2010-2014 1-17

Gambar 1.10 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Dengan Metode Baru, 2010-2014.....1-17

Gambar 1.11 Peta Persebaran Hasil Hutan 1-32

Gambar 1.12 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2005-2015 (%).....1-36

Gambar 2.1 Sumbu Filosofi Yogyakarta.....2-5

Gambar 2.2 Posisi Dokumen RKPD 2015 terhadap Dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2012-2017 2-35

Gambar 2.3 Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2012-2017 2-38

Gambar 2.4 Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis dengan Key Word Tema Tahun 2015.....2-41

Gambar 4.1 Pembukaan OSN Tingkat Nasional 4-7

Gambar 4.2 *Talkshow*: Mengembalikan Martabat ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) 4-13

Gambar 4.3 Kegiatan *Mertikali*-Padat Karya Bersih Sungai 4-22

Gambar 4.4 Peningkatan Kemandirian dan Kepeloporan Pemuda Tahun 2015 4-44

Gambar 4.5 Penandatangan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Pelestarian *Geopark* Gunungsewu 4-47

Gambar 4.6 Peresmian LDPM Patalan, Jetis, Bantul pada November 2015 4-61

Gambar 4.7 Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu sebagai upaya perlindungan terhadap Ibu dan Anak 4-67

Gambar 4.8 Bakti Sosial Pemasangan Alat Kontrasepsi 4-71

Gambar 4.9 Operasi Miras sebagai bentuk kegiatan penanganan Penyakit Masayarakat (PEKAT) 4-88

Gambar 4.10 Sosialisasi Urtujab 4-96

Gambar 4.11 Diskusi Lembaga Ombudsman DIY tentang BPJS Kesehatan 4-98

Gambar 4.12 Rapat Paripurna Istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015 4-108

Gambar 4.13 Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang PMK RI tentang Penguatan Peran Keluarga 4-111

Gambar 4.14 Kegiatan Jumpa Pers Tim TPID DIY dengan wartawan berkaitan dengan Pantauan Harga Pangan yang difasilitasi oleh Bagian Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY di *Press Room* Humas Pemda DIY 4-119

Gambar 4.15 Sertifikat Akreditasi Penyelenggaraan Program Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 4-134

Gambar 4.16 Pra TNI Manunggal Membanguan Desa (TMMD) 4-144

Gambar 4.17 UEP Lanjut Usia Terlantar 4-148

Gambar 4.18 Penyelamatan Arsip Statis ke 3 (SOPD) ke BPAD DIY 4-162

Gambar 4.19 Peresmian Gedung Perpustakaan " Grhatama Pustaka" Karangjambe, Banguntapan, Bantul.....4-165

Gambar 4.20 Perkembangan Kunjungan Wisatawan di DIY 2011-2015 4-167

Gambar 4.21 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan di DIY 2011-2015 4-169

Gambar 4.22 Bimtek Nelayan.....4-172

Gambar 4.23 Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY 2010-2015.....4-173

Gambar 4.24 Sebaran Vegetasi Hutan Di DIY 4-186

Gambar 4.25 Pemberian Penghargaan Energi Prabawa 2015 kepada Pemerintah Daerah DIY 4-191

Gambar 5.1 Anggaran dan Realisasi Keuangan Dana Keistimewan Tahun Anggaran 2013-2015 5-3

Gambar 5.2 Realisasi Fisik Per Urusan Pada 2014 & 2015 5-4

Gambar 5.3 Realisasi Keuangan Per Urusan Pada 2014 dan 2015 5-5

Gambar 5.4 Kegiatan Urusan Kelembagaan ada Biro Organisasi Setda DIY berupa Sosialisasi Rapergub pola hubungan kerja 5-6

Gambar 5.5 Upacara Adat Bersih Desa, Rintisan Desa Budaya Tukseno, Sentolo, Kulon Progo.....5-11

Gambar 5.6 Kegiatan Pengembangan Perfilman Daerah: Bulan Sinema Jogja 2015; 5-11

Gambar 5.7 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan & Kadipaten 5-16

Gambar 5.8 Inventarisasi Tanah Desa.....5-16

Gambar 5.9 Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imaginer): Pembangunan Parkir Portabel, Taman Parkir Abu Bakar Ali di Utara Hotel Inna Garuda 5-20

Gambar 7.1 Ilustrasi Batas Daerah dan Wilayah Perbatasan 7-19

Gambar 7.2 Contoh Pilar Batas yang Terpasang.....7-25

Gambar 7.3 Suasana Pelaksanaan Sosialisasi Permendagri Nomor 83 Tahun 2013 7-28

Gambar 7.4 Contoh Hasil Pekerjaan *Database* Pilar Batas antara Kabupaten Kulonprogo DIY dengan Kabupaten Purworejo 7-34

Gambar 7.5 Konsep *Buy The Service* 7-88

1 Bab Pendahuluan

1.1 DASAR HUKUM

Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang melintasi dinamika ruang dan waktu, yang jauh sejak republik ini belum berdiri. Kedudukan awal DIY berawal dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Kesepakatan *Palihan Nagari*, yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti 1755. Sejak saat itu, suatu sistem pemerintahan yang teratur telah berjalan dan kemudian berkembang mengikuti perjalanan sejarah, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang dikenal sebagai Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo yang bergelar Adipati Ario Paku Alam I.

Pemerintah Kolonial Belanda saat itu mengakui kedaulatan Kasultanan maupun Kadipaten sejak berdirinya. Pada masa kolonial, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zelfbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan

para pejabatnya. Pada 1 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Bowono IX mengambil alih seluruh tugas Pepatih Dalem yang sebelumnya dijabat Patih Danurejo VIII, karena pensiun dan sejak saat itu fungsi patih selanjutnya dirangkap sendiri oleh Sultan Hamengku Buwono IX.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Keunikan perjalanan historis Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah

setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada pemerintah provinsi, sebagaimana juga ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah.

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ tahun 2015 secara lebih detail meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015.

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1 Kondisi Geografis Daerah

1.2.1.1 Batas Administrasi

Secara geografis, DIY terletak pada bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
- Kabupaten Boyolali di sebelah Utara

Gambar 1.1 Peta Administrasi DIY
(Sumber: Bappeda DIY, 2013)

DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan, dengan perincian:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa;
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa;
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa;
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.

1.2.1.2 Luas Wilayah

DIY posisinya terletak diantara 7°.33' - 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00'- 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). DIY merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta dengan luas per kabupaten/ kota adalah sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%);
3. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40%);
4. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%);
5. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%).

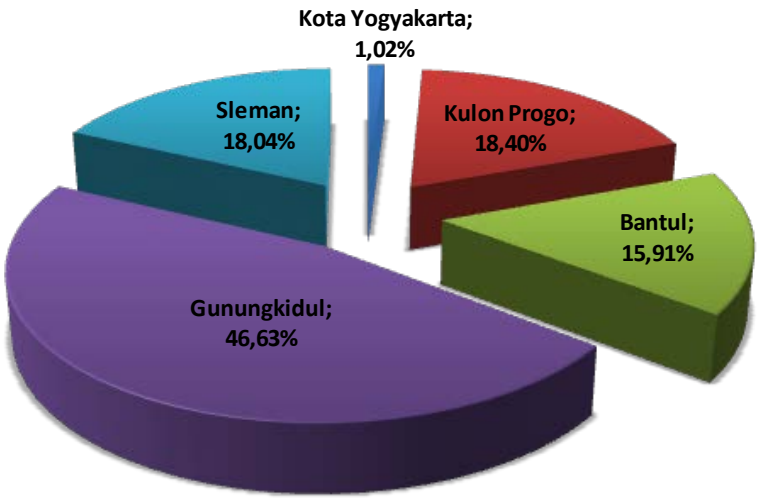

Gambar 1.2 Proporsi Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/ Kota

1.2.1.3 Topografi

Distribusi luas sebesar 65,65% dari wilayah DIY terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500-999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m. Berdasarkan satuan fisiografis, DIY terdiri atas:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150-700m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ±582,81 km², ketinggian 80-2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ±215,62 km², ketinggian 0-80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir.Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ±706,25 km², ketinggian 0-572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

4. Dilihat dari jenis tanah, dari 3.185,80 km² luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09% merupakan tanah Regosol, 12,38% tanah Lathosol, 10,97% tanah Grumusol, 10,84% tanah Mediteran, 3,19% Alluvial dan 2,47% adalah tanah jenis Renzina.

1.2.2 Gambaran Umum Demografi

1.2.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2015 sebanyak 3.679.176 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.818.765 orang dan perempuan sebanyak 1860.411 orang. Dalam kurun waktu 2011-2015 jumlah penduduk DIY meningkat 4.82% atau sebesar 169.179 orang; lebih banyak dari tahun 2010 sebesar 3.457.491 orang.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di DIY, 2015

Kabupaten/ Kota	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio (%)
Kota Yogyakarta	201.082	211.622	412.704	95
Bantul	481.510	490.001	971.511	98
Kulon Progo	202.435	209.763	412.198	97
Gunungkidul	345.370	369.912	715.282	93
Sleman	588.368	579.113	1.167.481	102
DIY	**1.818.765**	**1.860.411**	**3.679.176**	**98**

Sumber: DIY Dalam Angka 2015, BPS DIY

Persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/ Kota tahun 2014 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.167.481 orang (31.73%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sebanyak 971.511 orang (26,40%), Kabupaten Gunungkidul sebanyak 715.282 orang (19,44%), Kabupaten Kulon Progo sebanyak 412.198 orang (11.20%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 412.704 orang (11,22%). Keberadaan Kabupaten Sleman dan Bantul sebagai pusat studi dan bisnis mampu menarik penduduk untuk bermigrasi ke kabupaten ini, sehingga banyak permukiman baru yang dikembangkan di kedua daerah tersebut.

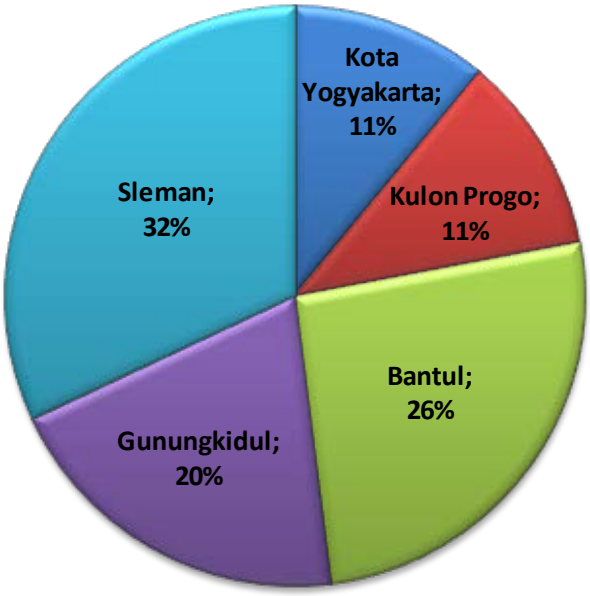

Gambar 1.3 Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/ Kota (%), 2014
(Sumber: Data Strategis DIY 2015, BPS DIY)

Komposisi penduduk DIY masih didominasi oleh penduduk usia muda atau kelompok usia produktif (20-24 tahun) sebesar 311,2 ribu orang dan (25-29 tahun) sebesar 300,9 ribu orang. Hal ini menjadi modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY, sekaligus menjadi tantangan untuk menciptakan lapangan usaha yang dapat menampung tenaga kerja tersebut.

Tabel 1.2 Proyeksi Penduduk Tahun 2015 (Berdasarkan SP 2000) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY (x 1000)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	140,1	134,1	272,6
4-9	137,1	129,6	262,9
10-14	134,6	127,9	259,8
15-19	134,7	130,4	268,4
20-24	156,7	152,7	311,2
25-29	157,9	150,5	300,9
30-34	138,6	137,4	273,5
35-39	131,6	134,3	264,1
40-44	129,8	134,3	264,3
45-49	125,8	133,4	256,5
50-54	113,2	122,9	230,5
55-59	96,7	102,7	192,4

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
60-64	74,3	78,5	145,4
65-69	52,4	61,2	110,1
70-74	39,5	50,0	90,6
75+	55,8	80,5	133,9
Jumlah	**1.818,8**	**1.860,4**	**3.637,1**

Sumber: DIY Dalam Angka 2015, BPS DIY

Laju pertumbuhan penduduk DIY tahun 2015 sebesar 1,19% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 1,20%. Dua wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Bantulpada tahun 2015 sebesar 1,33% dan Kota Yogyakarta sebesar 1,27%. Tiga daerah lainnya memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul.

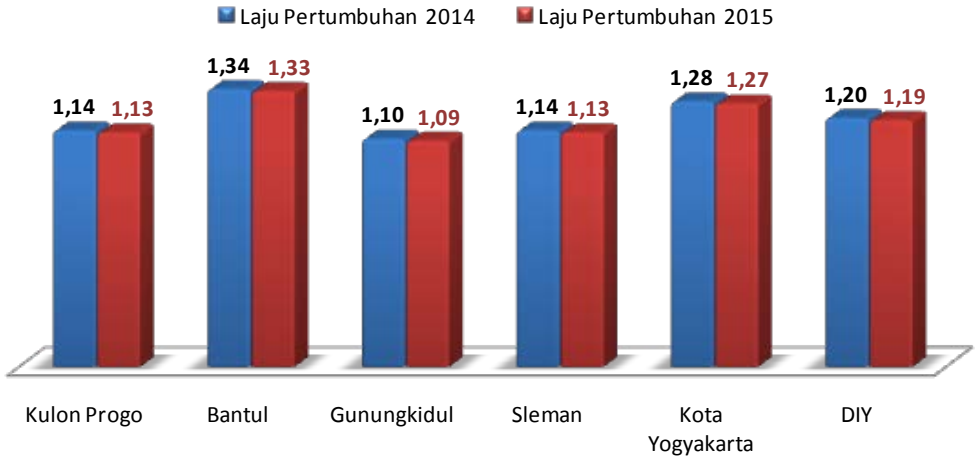

Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Menurut Kabupaten/ Kota (%), 2014-2015
(Sumber: Data Strategis DIY 2015, BPS DIY)

Laju pertumbuhan penduduk pada semua kabupaten/ kota di wilayah DIY pada 2015 mengalami penurunan. Rerata penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,01 poin untuk setiap kabupaten/ kota. Hal itu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk cenderung stagnan.

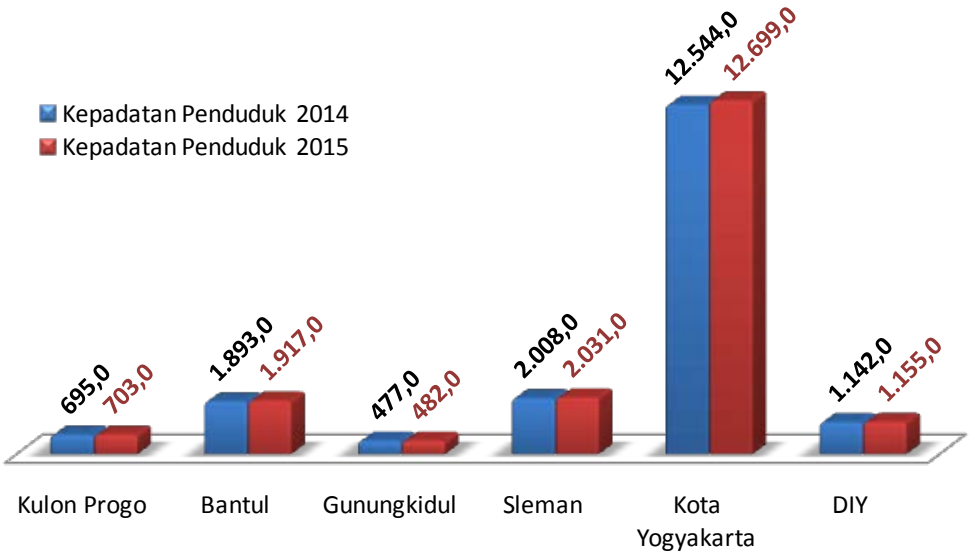

Gambar 1.5 Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/ Kota (Jiwa/km^2), 2014-2015
(Sumber: Data Strategis DIY 2015, BPS DIY)

Meskipun laju pertumbuhan penduduk mengalami stagnasi, namun kepadatan penduduk semakin meningkat. Kepadatan penduduk di DIY pada 2015 meningkat 13 orang per km^2 selama satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Tiga wilayah yang mengalami penambahan tingkat kepadatan penduduk adalah Kota Yogyakarta (bertambah 155 jiwa/km^2), Kabupaten Bantul (bertambah 24jiwa/km^2), dan Kabupaten Sleman (bertambah 23 jiwa/km^2). Meskipun demikian, wilayah dengan kepadatan terbesar adalah kota Yogyakarta, yakni 12.699 jiwa/km^2. Sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah adalah kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Laju peningkatan kepadatan penduduk pada dua kabupaten tersebut cukup rendah, bahkan di bawah rerata kepadatan penduduk di DIY pada 2014-2015. Hal itu menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di DIY cenderung timpang, dengan berpusat pada wilayah Kota Yogyakarta.

1.2.2.2 Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja DIY menurut data BPS pada tahun 2015 sebanyak 1.971.463 orang atau sebesar 68,38% dari total penduduk DIY berumur 15 tahun ke atas. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2015 ini mengalami penurunan sebesar 51.998orang dibandingkan tahun 2014 yang sebanyak 2.023.461 orang.

Tabel 1.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan di DIY, 2013-2015

Kegiatan	2013		2014		2015	
	Orang	%	Orang	%	Orang	%
Angkatan Kerja	**1.949.243**	**69,29**	**2.023.461**	**71,05**	**1.971.463**	**68,38**
1. Bekerja	1.886.071	67,05	1.956.043	68,69	1.891.218	65,60
2. Pengangguran	63.172	2,24	67.418	2,36	80.245	2,78
Bukan Angkatan Kerja	**863.845**	**30,71**	**824.293**	**28,95**	**911.517**	**31,62**
1. Sekolah	201.760	7,17	270.545	9,50	297.972	10,34
2. Mengurus Rumah Tangga	479.109	17,04	439.522	15,44	475.397	16,49
3. Lainnya	182.976	6,50	114.226	4,01	138.148	4,79
Jumlah	**2.813.088**	**100,00**	**2.847.754**	**100,00**	**2.882.980**	**100,00**

Sumber: BPS Sakernas Agustus 2015, diolah Pusdatinaker

Berdasarkan data total angkatan kerja di DIY tahun 2015, sebanyak 95,93% merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 4,07% merupakan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan membandingkan antara jumlah pengangguran dengan angkatan kerja.

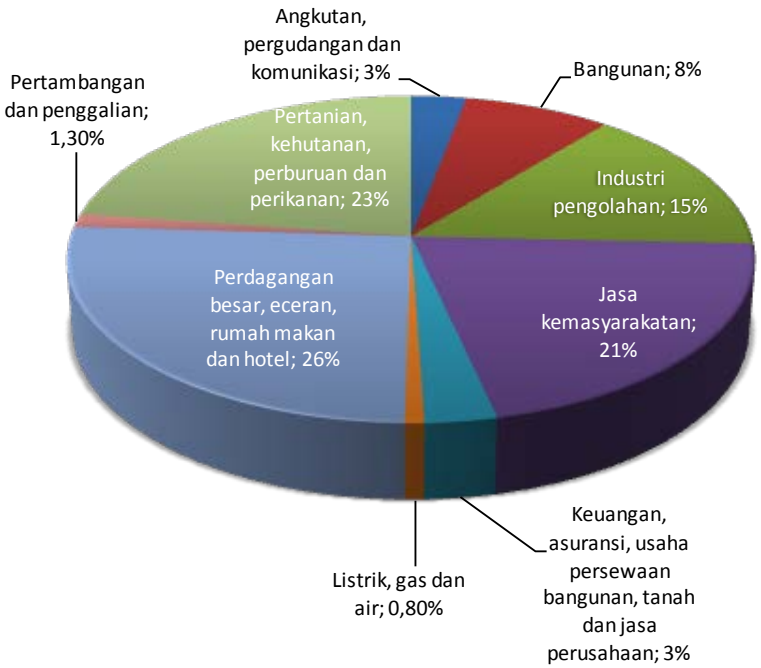

Gambar 1.6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2015
(Sumber: BPS Sakernas Agustus 2015, diolah Pusdatinaker)

Selama periode 2013-2015 komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utamanya tidak banyak mengalami perubahan. Pada periode Agustus 2015, empat sektor yang relatif banyak menyerap tenaga kerja di DIY adalah sektor perdagangan,rumah makan, dan hotel 26%, sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 23%, sektor jasa kemasyarakatan 21% dan sektor industri pengolahan 15%. Sektor-sektor yang lain menyerap tenaga kerja relatif rendah, dan yang paling rendah adalah sektor listrik, gas, dan air sebesar 0,8%.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2013-Agustus 2015

Status Pekerjaan Utama	2013		2014		2015	
	Feb	Agst	Feb	Agst	Feb	Agst
Berusaha sendiri	13,52	12,92	12,14	13,92	15,06	15,54
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	20,15	19,83	19,97	16,59	15,01	14,04
Berusaha dibantu buruh tetap	4,10	4,57	4,10	3,90	3,92	3,48
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	39,75	39,46	41,81	43,22	41,94	45,31
Pekerja bebas	8,74	7,12	5,13	7,62	9,46	9,72
Pekerja keluarga/ tak dibayar	13,73	16,10	16,85	14,75	14,61	11,92
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS DIY, Sakernas 2015, diolah Pusdatinaker

Menurut status pekerjaan utamanya, penduduk usia 15 tahun keatas sebagian bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pada periode Agustus tahun 2015 menunjukkan jumlah penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 45,31% sementara jumlah penduduk yang berusaha sendiri sebanyak 15,54%, penduduk yang bekerja sebagai buruh tidak tetapsebanyak 14,04%, pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 11,92%, pekerja bebas sebanyak 9,72%, dan penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 3,48%.

Jumlah penduduk yang berusaha sendiri cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan tingkat kemandirian yang semakin tinggi dan tidak bergantung dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tabel 1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Pendidikan, Agustus 2015

Kelompok Umur (tahun)	Pendidikan					
	SD	SLTP	SLTA	DI-III	S1-3	Total
15-24	27,77	22,38	48,75	69,29	78,60	40,80
25-34	73,39	70,39	78,20	85,15	92,36	78,32
35-44	81,40	81,59	85,63	90,07	95,82	84,95
45-44	82,29	85,69	80,13	78,39	91,03	83,21
55+	59,73	66,31	49,47	47,44	74,22	59,59
Total	**67,17**	**59,36**	**68,85**	**76,34**	**89,23**	**68,38**

Sumber: BPS DIY, Sakernas 2015, diolah Pusdatinaker

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukan bahwa TPAK di DIY adalah sebesar 68,38%, angka tersebut lebih rendah 2,67 point jika dibandingkan keadaan Agustus 2014 yang besarnya 71,05%.

TPAK yang paling tinggi berdasarkan pendidikan adalah penduduk dengan tingkat pendidikan S1-S3 sebesar 89,23%, sedangkan yang paling rendah adalah penduduk dengan pendidikan SLPT sebesar 59,36%. TPAK tertinggi berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia 35-44 tahun sebesar 84,95% dan kelompok usia 45-54 tahun sebesar 83,21%. Yang paling rendah adalah TPAK kelompok usia 15-24 tahun sebesar 40,80%. Pada kelompok usia ini sebagian besar masih melanjutkan pendidikan sehingga TPAKnya rendah.

Secara umum, TPAK relatif tinggi pada tingkat pendidikan SD dan perguruan tinggi. Pada umumnya penduduk dengan pendidikan sangat rendah cenderung menerima pekerjaan apa saja, sehingga TPAK-nya relatif tinggi. Sementara pada kelompok angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SLTP/ SLTA mulai memilih pekerjaan sehingga TPAK-nya lebih rendah.Pada tingkat pendidikan yang relatif tinggi(perguruan tinggi) TPAK-nya tampak tinggi, meskipun pekerjaan yang dilakukan belum tentu sesuai dengan tingkat pendidikannya.

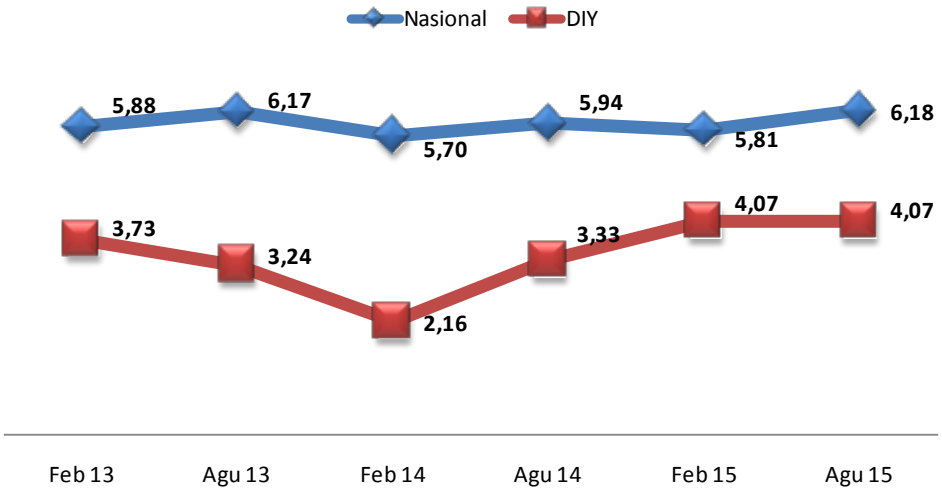

Gambar 1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Di Tingkat Nasional, Februari 2010-Agustus 2014 (%)
(Sumber: BPS, Sakernas 2015, diolah Pusdatinaker)

Selama periode 2013-2015 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 TPT DIY pada Agustus 2015 tercatat sebesar 4,07%, paling tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional TPT DIY tergolong rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/ kota di DIY selama periode Agustus 2013-Agustus 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 TPT tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 5,52% dan terendah di kabupaten Gunungkidul yaitu 2,90%.

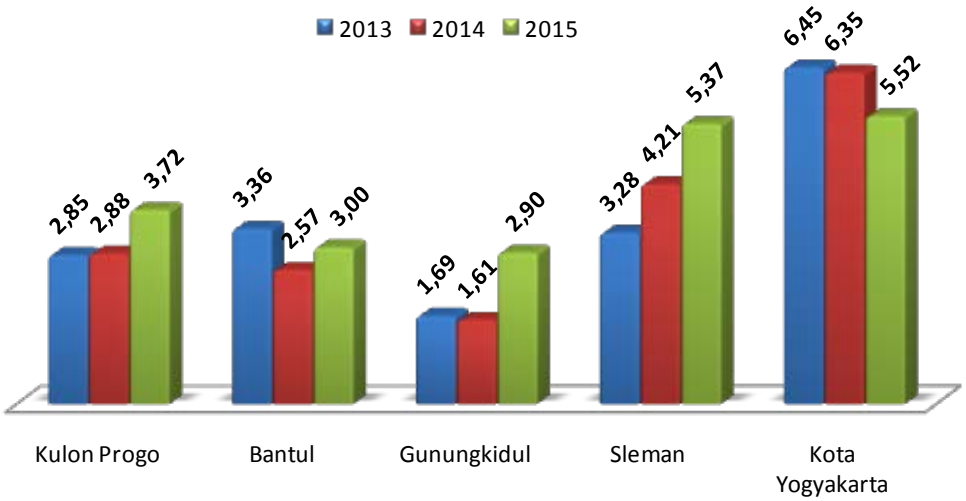

Gambar 1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/ Kota Di DIY, Agustus 2013-Agustus 2015 (%)
(Sumber: BPS, Sakernas 2015, diolah Pusdatinaker)

Tingkat Pengangguran Terbuka didominasi oleh kelompok usia 15-24 tahun sebesar 20%. Rendahnya kualitas pendidikan kelompok usia 15-19 tahun menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Pada kelompok usia usia 20-24 tahun termasuk yang berpendidikan tinggi, namun lebih memilih menganggur untuk menunggu pekerjaan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya atau kurangnya pengalaman kerja.

1.2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur capaian pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang

dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

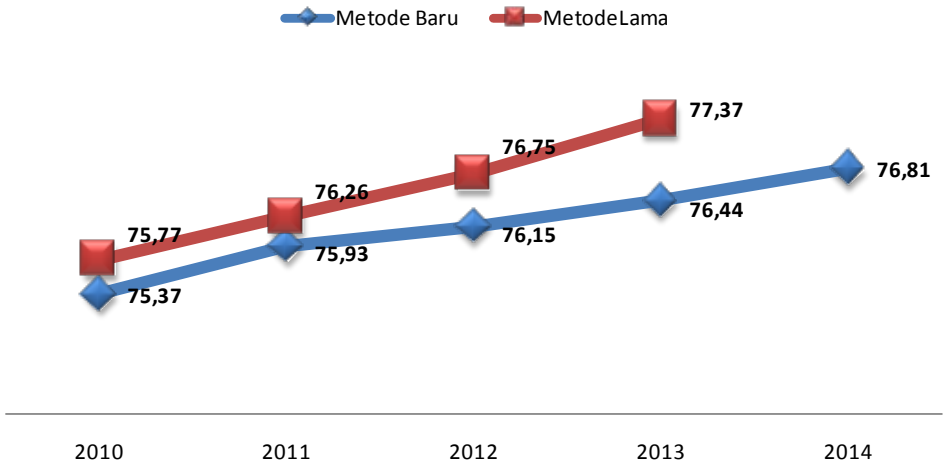

Gambar 1.9 Perbandingan IPM DIY dengan Metode Perhitungan Baru dan Lama, 2010-2014
(Sumber: Statistik Indonesia 2014,BPS, diolah)

Mulai tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metode baru yang dihitung secara *series* mulai tahun 2010-2014 Perubahan penghitungan IPM metode baru terletak pada dimensi pengetahuan dimana pada metode baru menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Penghitungan IPM baru menggunakan rata-rata geometrik sementara penghitungan IPM lama menggunakan rata-rata aritmatik.

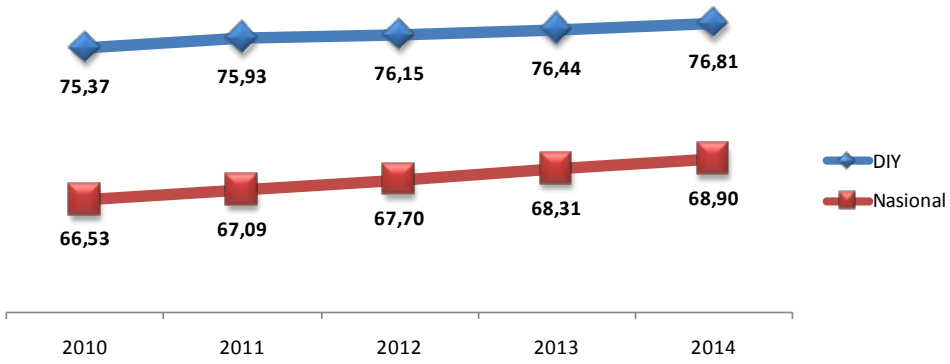

Gambar 1.10 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Dengan Metode Baru, 2010-2014
(Sumber: Statistik Indonesia 2014 ,BPS, diolah)

Dengan metode perhitungan baru tersebut, nilai rata-rata nilai IPM DIY maupun nasional menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan metode perhitungan lama. Namun rata-rata IPM DIY tahun 2014 sebesar 76,81 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata IPM Nasional sebesar 68,90.

Tabel 1.6 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/ Kota di DIY, 2014

Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (%)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (000 Rp)	IPM	Peringkat IPM
Kulon Progo	74,90	13,27	8,20	8.480	70,68	4
Bantul	73,24	14,62	8,74	13.921	77,11	3
Gunungkidul	73,39	12,82	6,45	8.235	67,03	5
Sleman	74,47	15,64	10,28	14.170	80,73	2
Kota Yogyakarta	74,05	15,97	11,39	16.755	83,78	1
DIY	**74,50**	**14,85**	**8,84**	**12.294**	**76,81**	**2**

Sumber: DIY Dalam Angka 2015, BPS DIY

IPM menurut Kabupaten/ Kota di DIY tahun 2014 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan angka IPM sebesar 83,78 diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 80,73, Kabupaten Bantul sebesar 77,11, Kabupaten Kulon Progo sebesar 70,68 dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 67,03.

1.2.2.4 Pendidikan

Jumlah penduduk menurut usia sekolah di DIY pada tahun 2015 adalah sebanyak 585.963 orang atau sebesar 16,11% dari total jumlah penduduk DIY yang jumlahnya 3.637.116 orang. Penduduk usia sekolah terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman sebesar 164.060 orang (28%) diikuti Kabupaten Bantul sebesar 146.403 orang (24,99%), Kabupaten Gunungkidul sebesar 125.983 orang (21,50%), Kota Yogyakarta sebanyak 79,382 orang (13,55%) dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 70.135 orang (11,97%).

Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY 2015

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Seluruhnya	Penduduk Menurut Usia Sekolah				
			07-12	13 - 15	16 - 18	Jumlah	%
1	Bantul	968.632	73.520	35.969	36.914	146.403	24,99
2	Sleman	1.163.970	80.645	40.450	42.965	164.060	28,00
3	Gunungkidul	698.825	62.230	30.181	33.572	125.983	21,50
4	Kulon Progo	405.222	34.909	17.171	18.055	70.135	11,97
5	Yogyakarta	400.467	32.466	17.684	29.232	79.382	13,55
	Jumlah	**3.637.116**	**283.770**	**141.455**	**160.738**	**585.963**	**100**

Sumber: BPS DIY; Profil Pendidikan Tahun 2014/2015, Disdikpora DIY (diolah)

Tolak ukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah indikator mutu pendidikan, yang antara lain dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DIY pada tahun 2015 menunjukkan angka sebesar 96,15%. APK TK/RA pada tahun 2015 sebesar 60,98%. Sedangkan APM SD/ MI tahun 2015 sebesar 96,71% dan APK SD/ MI sebesar 109,22%. Besaran angka APK dan APM yang hampir sama tersebut, menggambarkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada data jumlah siswa dan penduduk yang bersekolah pada tahun 2015.

APK SMP/ MTs pada tahun 2014 sebesar 115,76%, dan di tahun 2015 mengalami penurunanmenjadi 115,63% atau turun sebesar 0,13%. Sedangkan APM SMP /MTs tahun 2015 sebesar 84,34%, mengalami kenaikan 0,02% dibanding dengan tahun 2014 yang menunjukkan angka sebesar 84,32%. Angka putus sekolah SMP/ MTs di DIY saat ini sangat kecil yakni hanya 0,19%. Masih adanya anak yang putus sekolah tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sosial ekonomi dari orang tua/ masyarakat dan faktor lingkungan.

APK Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/ MA), pada tahun 2014 APK menunjukkan angka sebesar 90,46% kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 93,02%. Untuk APM SMA/ MA pada tahun 2014 sebesar 64,89%, mengalami kenaikan menjadi sebesar 65,24% pada tahun 2015.

Pendukung akses pelayanan dan kualitas pendidikan adalah infrastruktur pendidikan. Jumlah SD/ MI negeri maupun swasta di DIY adalah 2.009 unit. Sedangkan jumlah SMP/ MTs negeri maupun swasta ada 530 unit, jumlah SMA/

MA sebanyak 207 unit baik negeri dan swasta, SMK 230 sekolah negeri dan swasta, TK sejumlah 2.302 sekolah negeri dan swasta, dan 76 SLB baik negeri maupun swasta. Pada tahun 2015, di DIY terdapat 129 perguruan tinggi, terdiri atas Universitas 21 buah, Institut 6 buah, SekolahTinggi 49 buah, Politeknik 10 buah, dan Akademi 41 buah.

1.2.2.5 Penduduk Miskin

Selama periode 2012-2015 persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 15,88% pada Tahun 2012 menjadi 13,16% pada tahun 2015. Sedangkan jika dilihat penurunan dari Tahun 2014 ke Tahun 2015, sebesar 1,39% atau sebanyak 47,03 ribu orang. Jumlah penduduk miskin tahun 2015 di wilayah kota/ urban sebanyak 292,64 ribu orang atau 11,93%, sedangkan penduduk miskin di wilayah desa/ rural sebanyak 192,91 ribu orang atau sebesar 15,62%.

Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2015 adalah Rp347.721,00 per kapita per bulan, naik 8,31% jika dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang garis kemiskinannya sebesar Rp321.056,00 per kapita per bulan. Terjadinya peningkatan garis kemiskinan ini sejalan dengan terjadinya inflasi sebesar 5,23% pada periode September 2014 ke September 2015.

Tabel 1.8 Jumlah Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah, 2012-2015

Tahun	Kota/ Urban		Desa/ Rural		Jumlah Total	
	Jumlah (000)	%thd penduduk Kota	Jumlah (000)	%thd penduduk Desa	Jumlah (000)	% thd penduduk DIY
2012	305,34	13,13	259,39	21,76	565,73	15,88
2013	329,65	13,73	212,30	17,62	541,95	15,03
2014	324,43	13,36	208,15	16,88	532,59	14,55
2015	292,64	11,93	192,91	15,62	485,56	13,16

Sumber: Berita Resmi Statistik- Januari 2016, BPS DIY

Dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan, pada 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan lebih rendah dari pada perkotaan. Pada bulan 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perdesaan mencapai 1,89, sementara di daerah perkotaan mencapai 2,09. Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan 0,33 sementara di daerah perkotaan mencapai 0,51. Hal ini berarti perbedaan rata-rata

pengeluaran konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin di daerah perdesaan juga lebih sempit dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

1.2.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan daerah. Dari gambaran kondisi perekonomian daerah dapat diketahui usaha-usaha yang menopang kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di DIY, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk DIY namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

1.2.3.1 Sektor Unggulan

Sektor unggulan dalam laporan ini didasarkan pada kontribusi terhadap perekonomian DIY. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB DIY. Suatu sektor dikatakan sektor unggulan apabila nilai PDRB sektor tersebut dari waktu ke waktu secara konsisten berkontribusi besar pada nilai PDRB DIY. Berdasarkan data perkembangan kontribusi sektor terhadap nilai PDRB DIY selama 2010-2015, diketahui bahwa sektor yang secara konsisten memiliki kontribusi yang relatif besar pada nilai PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tabel 1.9 Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB DIY, Tahun 2010-2015 (%)

	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,21	10,94	11,19	11,13	10,52	10,70
2	Pertambangan dan Penggalian	0,63	0,64	0,60	0,58	0,58	0,57
3	Industri Pengolahan	14,25	14,40	13,26	13,62	13,59	13,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,13	0,12	0,10	0,10	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	9,56	9,51	9,52	9,49	9,40	9,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,96	8,14	8,30	8,17	8,27	8,23
8	Transportasi dan Pergudangan	5,65	5,50	5,51	5,63	5,72	5,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,87	9,05	9,32	9,75	10,04	10,24
10	Informasi dan Komunikasi	9,56	9,39	9,49	8,92	8,51	8,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,15	3,38	3,49	3,73	3,88	3,97
12	Real Estat	6,95	6,85	7,03	6,85	7,00	7,05
13	Jasa Perusahaan	1,12	1,10	1,08	1,01	1,03	1,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,39	7,32	7,68	7,89	8,07	8,23
15	Jasa Pendidikan	8,39	8,48	8,24	8,03	8,19	8,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,38	2,45	2,50	2,47	2,45	2,52
17	Jasa lainnya	2,66	2,62	2,57	2,53	2,53	2,55
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS DIY

A. Sektor Industri Pengolahan

Industri di DIY didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Jumlah IKM di DIY pada tahun 2015 sebanyak 88.637 unit usaha mengalami peningkatan 2,96% jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebanyak 86.087 unit usaha. Unit usaha tersebut meliputi Industri Pangan, Sandang dan Kulit, Kimia dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika, dan Industri Kerajinan. Jumlah unit usaha terbanyak adalah industri Pangan kemudian diikuti Industri Kerajinan.

Sektor Industri di DIY mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor tersebut pada tahun 2015 tercatat menyerap 326.669 tenaga kerja, meningkat 2,45% dari tahun 2014 yang menyerap sebanyak 318.858 tenaga kerja.

Tabel 1.10 Perkembangan IKM di DIY, 2011-2015

IKM	2011	2012	2013	2014	2015
Unit usaha (UU)	80.056	82.344	84.234	86.087	88.637
Tenaga kerja (orang)	295.461	301.385	310.173	318.858	326.669
Nilai investasi (Rp Milyar)	1.003.678	1.151.820	1.064.180	1.151.443	1.187.754
Nilai produksi (Rp Milyar)	3.053.031	3.500.662	3.294.485	3.399.909	3.489.769
Nilai bahan baku & penolong (Rp Milyar)	1.352.479	1.369.114	1.449.435	1.524.806	1.550.832

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2016

Pada tahun 2015 total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp1.550.832 Milyar. Sementara itu, untuk Nilai Produksi ditaksir berjumlah sebesar Rp3.489.769 Milyar. Dengan demikian nilai tambah produk IKM di DIY yang merupakan selisih antara nilai produksi (*output*) dengan nilai bahan baku dan bahan penolong lainnya bernilai sebesar Rp1.938.937 Milyar pada tahun 2014. Nilai tambah tersebut meningkat sekitar 3,4% dibandingkan dengan tahun 2014. Nilai tambah yang terus meningkat dapat digunakan sebagai modal untuk bersaing dengan industri luar.

B. Sektor Pertanian

Sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang besar, karena sebagian besar wilayah DIY khususnya di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Sleman masih

merupakan lahan pertanian dengan karakteristik yang berbeda. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha pertanianpun cukup besar.

1. Tanaman Pangan

Komoditas padi memiliki peran sebagai bahan pangan strategis. Karena peran strategis tersebut maka produksi dan harga dikendalikan oleh Pemerintah. Selain Padi masih ada dua komoditas lainnya yang memiliki peran strategis yaitu jagung dan kedelai, sebagai bahan baku industri dan sebagai pakan ternak.

Tabel 1.11 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan, 2014-2015

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ha)		Produksi (ton)	
		2014	2015*	2014	2015*	2014	2015*
1	Padi Sawah	115.667	111.996	62,18	64,74	719.194	725.016
2	Padi Ladang	43.236	42.811	46,35	46,33	200.379	198.327
3	Padi	158.903	154.807	57,87	59,64	919.573	923.343
4	Jagung	67.657	65.465	46,15	44,85	312.236	293.606
5	Kedelai	16.337	13.948	11,98	12,83	19.579	17.892
6	Kacang Tanah	67.532	71.582	10,60	11,35	71.582	81.227
7	Kacang Hijau	439	403	5,95	5,91	261	238
8	Ubi Kayu	56.120	55.754	157,69	158,04	884.931	881.131
9	Ubi Jalar	409	437	128,04	131,67	5.237	5.754
10	Sorghum	452	138	3,21	3,15	145	44

Keterangan: Angka Tetap 2014, * Angka Ramalan II = 2015

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2016

Catatan produksi berdasarkan Angka Ramalan II tahun 2015, produksi padi naik dari tahun 2014. Kenaikan ini disumbang oleh produksi padi sawah yang mencapai 725.016 ton atau 5.822 ton (0,81%) lebih tinggi dari angka produksi tahun 2014. Untuk padi ladang produksinya lebih rendah 2.052 ton dari tahun 2014 (-1,02%.). Kenaikan produksi padi sawah terjadi karena upaya khusus (UPSUS), melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP PTT), rehabilitasi jaringan irigasi tersier, bantuan benih, pupuk urea dan NPK. Catatan angka produksi jagung dan kedelai tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014. Penurunan produksi jagung karena adanya peralihan komoditas ke tanaman kacang tanah, sedangkan untuk produksi tanaman kedelai terkait dengan minat tanam dan harga kedelai yang kurang menarik bagi petani.

2. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan mempunyai potensi yang sangat besar untuk penigkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan merupakan harapan masa depan utama yang menjadi tumpuan dalam wilayah selatan di DIY, sebagaimana termaktub dalam filosofi "*Among Tani Dagang Layar*" yaitu putar kemudi ke visi maritim. Mengarahkan dan menjadikan pusat perekonomian ke wilayah selatan dengan mengembangkan pusat industri kecil dan agribisnis di pesisir selatan/ pedesaan serta mewujudkan industri kelautan perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan (Pansela) merupakan pilihan strategis yang harus diwujudkan.

Sektor kelautan dan perikanan berperan penting dalam kehidupan masyarakat DIY. Konsumsi produk kelautan dan perikanan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Di sisi lain, penerapan budaya kelautan perikanan dalam kehidupan masyarakat diharapkan mampu menjadi tumpuan yang mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, nelayan, serta pengolah dan pemasar ikan sehingga dapat menyokong kesejahteraan masyarakat DIY secara umum. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan perekonomian daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor terkait lainnya.

Pada aspek perikanan budidaya, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keterbatasan luas lahan dibanding dengan provinsi lain mampu meningkatkan produksi perikanan budidayanya baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Selain itu peningkatan produksi perikanan budidaya juga didukung oleh aplikasi teknologi budidaya.

Sementara itu, pada aspek perikanan tangkap, potensi kelautan dan perikanan DIY meliputi wilayah pesisir dan laut yang membentang dari Gunungkidul sampai dengan Kulon Progo kurang lebih 113 km dengan potensi ikan yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun. Sedangkan potensi lestari untuk Samudra Hindia sebesar 906.340 ton per tahun. Peningkatan produksi perikanan tangkap didukung dengan optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng. Di sisi lain, potensi perikanan tangkap yang selama ini

memiliki potensi unggulan adalah komoditas perikanan tangkap yang berasal dari perairan umum, seperti: sungai, telaga, maupun embung. Dukungan sarpras untuk produksi perikanan tangkap juga dioptimalkan melalui penambahan jumlah kapal. Adapun jumlah kapal yang dapat beroperasional melebihi 12 mil arah laut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.12 Jumlah Kapal Perikanan di DIY, 2014-2015 (Unit)

Ukuran Kapal	2014	2015
< 10 GT	304	505
≥ 10 GT	18	24

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2016

Operasionalisasi kapal 30 GT di DIY masih mengalami sejumlah tantangan, antara lain kesiapan sumberdaya manusia Kelompok Usaha Bersama (KUB) penerima kapal yang belum mampu mengoperasionalkan kapal secara mandiri. Namun ada juga KUB yang berprestasi yaitu KUB Projomino (Bantul VII) yang mendapat penghargaan dari Kementerian Kelautan Perikanan sebagai KUB pengelola kapal Inka Mina terbaik II tingkat nasional. Keberhasilan pengelolaan kapal ini diharap dapat dijadikan sebagai *best practice* dan dapat direplikasikan pola pengelolaannya ke KUB pengelola kapal Inka Mina lainnya. Upaya-upaya yang telah ditempuh dalam rangka meningkatkan kapasitas KUB penerima kapal meliputi pelatihan dan pemagangan, serta pendampingan oleh awak kapal dari luar daerah.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menunjukkan laju pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap dari tahun 2010 hingga tahun 2015 sebesar 11,75%. Demikian halnya, produksi perikanan budidaya juga menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2010 hingga tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar 43,74%.

Jumlah produksi perikanan di DIY didominasi oleh produksi perikanan budidaya yang sebagian besar dihasilkan dari budidaya di kolam. Sementara produksi perikanan budidaya di tambak, sawah, jaring apung, dan telaga kontribusinya belum signifikan. Produksi perikanan budidaya yang selalu meningkat menunjukkan bahwa minat masyarakat semakin meningkat. Komoditas unggulan

perikanan budidaya di DIY yaitu ikan lele, nila, gurami, mas, udang galah, udang vaname. Upaya-upaya meningkatkan kualitas induk ikan nila dan ikan mas telah dilakukan dengan dirilisnya ikan nila merah NILASA dan ikan mas merah NAJAWA. Upaya untuk meningkatkan produksi budidaya dan menjamin keamanan pangan hasil perikanan budidaya telah dilakukan dengan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB).

3. Hortikultura

Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura dilakukan dengan penambahan areal tanam, penerapan teknologi dan peningkatan ketersediaan sarana prasarana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air pada musim kemarau. Pada tahun 2015, Pemerintah juga memberikan fasilitasi kepada para petani cabai rawit dan cabai merah agar mampu berproduksi pada musim hujan. Dasar pemikiran tersebut adalah pada musim hujan harga cabai relatif tinggi sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani cabai. Pada musim hujan, para petani memerlukan sarana pelindung (*rain shelter*). Penyediaan fasilitas berupa sarana produksi dan *rain shelter*, para petani cabai diharapkan dapat melakukan penanaman pada bulan September sampai Oktober sehingga dapat panen pada bulan November sampai Januari, dengan harapan harga jual pada bulan tersebut relatif lebih tinggi.

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah Daerah DIY mendorong para petani hortikultura untuk meningkatkan kualitas produksinya. Upaya tersebut dilakukan dengan penerapan cara berbudidaya yang baik (sesuai GAP-SOP), untuk semua komoditas hortikultura. Oleh karena itu kedua komoditas ini menjadi prioritas utama dalam program kegiatan hortikultura baik melalui dana APBD maupun APBN. Komoditas hortikultura lain yang menjadi unggulan DIY adalah salak, pisang, biofarmaka dan tanaman hias masih menjadi skala prioritas untuk pengembangannya.Luas panen dan produksi tanaman hortikultura pada tahun 2014 dan tahun 2015 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.13 Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY, 2014-2015

No	Komoditas	Luas Panen			Produksi		
		Satuan	2014	2015*	Satuan	2014	2015*
1	Cabai besar	ha	2.791	2.310	Ton	17.759	23.189
2	Cabai rawit	ha	956	817	Ton	3.168	3.239
3	Bawang merah	ha	1.287	1.029	Ton	12.359	8.783
4	Salak	rumpun	5.829.257	5.287.277	Ton	75.751	73.282
5	Pisang	rumpun	1.085.152	1.140.055	Ton	56.061	52.548
6	Jahe	m^2	1.669.449	2.319.732	Ton	3.374	4.614
7	Krisan	m^2	65.328	68.047	Tangkai	4.121.064	5.312.785

Keterangan: Angka Tetap 2014, * Angka Sementara = 2015

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa produksi cabai besar pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 30% dibandingkan tahun 2014 walaupun luas panennya mengalami penurunan, demikian pula dengan cabai rawit. Hal tersebut sebagai akibat dari petani semakin sadar dalam menerapkan budidaya cabai secara baik dan benar karena selalu diberikan sosialisasi tentang GAP/ SOP.

Untuk produksi bawang merah tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 29% dari tahun 2014, karena penurunan luas panen di sentra produksi Kabupaten Bantul akibat banjir pada bulan Maret sampai April 2015 sehingga sebagian tanaman bawang merah mengalami puso. Produksi salak tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4%, disebabkan oleh penurunan luas panen dan siklus produksi tahunan. Produksi jahe mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya luas panen, disebabkan harga jahe relatif konstan dibanding komoditas biofarmaka yang lain, sehingga petani beralih ke komoditas jahe. Bantuan Pemerintah pada tahun 2015 untuk komoditas krisan meningkat, hal ini untuk mendukung Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tujuan wisata.

4. Perkebunan

Luas areal perkebunan tahun 2015 tercatat 75.656,52 ha, dengan luas areal tanaman tahunan 70.033,09 ha dan areal tanaman semusim 5.623,43 ha. Usaha tani komoditas tanaman perkebunan di DIY seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat petani dalam bentuk perkebunan rakyat, sehingga peningkatan maupun penurunan luas areal komoditas tanaman perkebunan terjadi sangat fluktuatif menyesuaikan situasi kondisi pasar dan bergantung pada keputusan petani dalam memilih komoditas tanaman yang diusahakan, utamanya tanaman

semusim. Hal ini dijamin/ sesuai Undang Undang Nomor 12 tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman Pertanian.

Pembangunan agribisnis perkebunan telah mampu menumbuhkan sentra-sentra produksi komoditas perkebunan, dan akan dikembangkan lebih lanjut melalui pengutuhan populasi tanaman sesuai skala ekonomis usaha. Pola pengembangan/ pengutuhan tegakan tanaman tersebut melalui kegiatan rehabilitasi, peremajaan, maupun intensifikasi. Pengelolaan kebun di lapangan dilakukan dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau koperasi, untuk selanjutnya bermitra usaha dengan pihak lain dengan pendekatan agribisnis utuh, berdaya saing dan berkelanjutan.

Pengembangan perkebunan DIY difokuskan pada 5 (lima) komoditas unggulan yaitu kelapa, kakao, kopi, jambu mete, dan tebu, Sedangkan komoditas non unggulan namun banyak berkontribusi sebagai penyumbang produksi perkebunan antara lain: mendong, tembakau rakyat, nilam, serta cengkeh. Kawasan sentra produksi komoditas perkebunan kelapa, kopi, kakao dan nilam berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, untuk komoditas perkebunan jambu mete, kelapa dan kakao berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas perkebunan khususnya tanaman semusim seperti tembakau, mendong dan tebu banyak terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Tabel 1.14 Produksi Komoditas Perkebunan DIY, 2011-2015

No.	Komoditas	Produksi (ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kelapa	56.148,83	54.711	55.752,71	53.775,40	58.725,92
2.	Kopi	362,34	801,09	1073,09	865,23	766,00
3.	Jambu mete	576,61	470	260,63	452,36	567,90
4.	Kakao	1.142,63	1353	1.124,10	1.597,67	2.540,79
5.	Tebu	15.812,18	17.649	15.960,80	14.896,78	11.251,80

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2015 (diolah)

Produksi komoditas unggulan perkebunan di DIY sejumlah 73.851,80 ton, sedangkan produksi seluruh komoditas perkebunan pada tahun 2015 adalah sejumlah 82.379,82 ton. Dari data tersebut ada kenaikan produksi sejumlah 2.295,34 ton (2,87%), apabila dibandingkan produksi tahun 2014 sejumlah 80.084,48 ton. Namun demikian kenaikan produksi perkebunan belum dapat

memenuhi target produksi tahun 2015 yaitu sejumlah 88.000 ton. Hal ini sebagai akibat adanya alih fungsi lahan baik pemanfaatan lahan untuk pembangunan sektor lain maupun peralihan pemanfaatan lahan dari lahan perkebunan menjadi usaha tani komoditas non perkebunan, disamping juga akibat adanya perubahan/ anomali iklim yang sulit diprediksi pada beberapa tahun terakhir.

Di sektor hilir yaitu subsistem agribisnis pengolahan hasil, capaian pembangunan perkebunan tahun 2015 dalam rangka peningkatan daya saing, produk binaan dari komoditas perkebunan antara lain: pembangunan unit fermentasi pengujian biji kakao, untuk produksi gula semut Kulon Progo telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) dan telah memasuki pasar ekspor. Komoditas lain yang mendapat sertifikasi produk organik adalah komoditas jambu mete di Gunungkidul dan gula kelapa di Kulon Progo.

5. Peternakan

Komoditas strategis peternakan di DIY adalah sapi potong untuk mendukung Program kecukupan pangan asal hewan dan agribisnis peternakan. Kawasan pengembangan sapi potong berada di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman. Tahun 2015 Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai sentra pembibitan sapi Peranakan Ongole (PO), kondisi saat ini 45% sampai 48% dari populasi sapi potong di DIY berada di Kabupaten Gunungkidul. Data populasi sapi potong di DIY tahun 2014 dibandingkan dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Populasi sapi potong tahun 2015 naik 6,87% dibanding dengan tahun 2014. Kenaikan populasi sapi potong disebabkan adanya kegiatan optimalisasi inseminasi buatan (IB), insentif sapi betina bunting, pelarangan pemotongan sapi betina produktif dan kegiatan penunjang lain seperti penanggulangan penyakit gangguan reproduksi, gerakan pengembangan pakan berkualitas dan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk Hijauan Makanan Ternak (HMT), serta memberikan motivasi peternak untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam meningkatkan populasi ternak sapi.

Sapi perah, kambing dan itik menjadi komoditas unggulan DIY. Sentra produksi utama sapi perah berada di Kabupaten Sleman sentra populasi kambing berada di kabupaten Kulon Progo (terutama jenis kambing PE) dan kabupaten Gunungkidul

sedangkan sentra populasi itik berada di kabupaten Bantul dan kabupaten Sleman. Data populasi sapi perah, kambing dan itik tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.15 Populasi Ternak DIY, 2014 - 2015

No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2014	2015*
1.	Sapi Potong	302.011	322.775
2.	Sapi Perah	3.990	4.044
3.	Kambing	386.198	397.125
4.	Itik	553.668	567.881

Keterangan: Angka Tetap 2014, * Angka Sementara = 2015

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi sapi perah pada tahun 2015 meningkat 1,36% dibandingkan dengan tahun 2014. Penyebab naiknya populasi ini adalah adanya kegiatan *Village Breeding Stock*/ VBC sehingga menjaga agar induk kering bunting dan bakal calon pedet tidak keluar daerah. Selain itu juga ada kegiatan uji zuriat yang menjadi salah satu upaya percepatan produksi bibit dengan menghasilkan pejantan unggul sebagai penghasil bibit sapi perah yang cocok dengan kondisi dan agroklimat di Indonesia.

Populasi kambing pada tahun 2015 mengalami kenaikan 2,84% dibanding tahun 2014, hal ini disebabkan adanya upaya-upaya penanganan kesehatan kambing, bantuan di sentra pembibitan kambing, peningkatan kualitas pakan baik hijauan maupun pakan penguat/ konsentrat, dan peningkatan manajemen pemeliharaan dengan sistem kandang “panggung”.

Populasi itik pada tahun 2015 mengalami kenaikan 2,57% dibanding tahun 2014. Peningkatan ini didukung oleh kegiatan pengembangan ternak itik di sentra pengembangan Itik Turi di Kabupaten Bantul. Tahun 2015 Itik Turi ditetapkan sebagai plasma nutfah di DIY. Ternak itik merupakan salah satu ternak sebagai penghasil telur dan daging sehingga ternak itik dapat berkontribusi sebagai penyumbang kebutuhan bahan pangan yang bergizi bagi masyarakat.

6. Kehutanan

Pembangunan hutan DIY khususnya hutan rakyat sangat dinamis dan menunjukkan peningkatan yang cukup baik, ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan fungsi

hutan sebagai penyangga kehidupan sudah menampakkan hasil. DIY memiliki kawasan hutan negara saat ini seluas 18.715,064 ha atau setara dengan 5,87%,dari total luas wilayah DIY 3.185,18 km².

Pengelolaan hutan negara dilaksanakan oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 2.356,464 ha, sedangkan yang dikelola SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY seluas 16.358,60 ha. Menurut fungsi dan status hutan, maka hutan yang dikelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dapat dirinci sebagai berikut: Hutan Produksi (HP) seluas 13.411,70 ha, Hutan Lindung (HL) 2.312,80 ha dan Hutan Konservasi (HK) berupa Taman Hutan Raya seluas 634,1 ha.

Vegetasi wilayah hutan di DIY secara umum terdiri dari beberapa jenis antara lain jati, kayu putih, sono keling, pinus, kenanga, mahoni, kemiri, *gliricidea*, akasia, dan bambu dengan luas yang bervariasi. Sedangkan vegetasi dominan yang diusahakan pada lahan hutan negara adalah jenis jati, kayu putih dan pinus, sehingga berpotensi untuk menghasilkan produksi kayu dan non kayu.

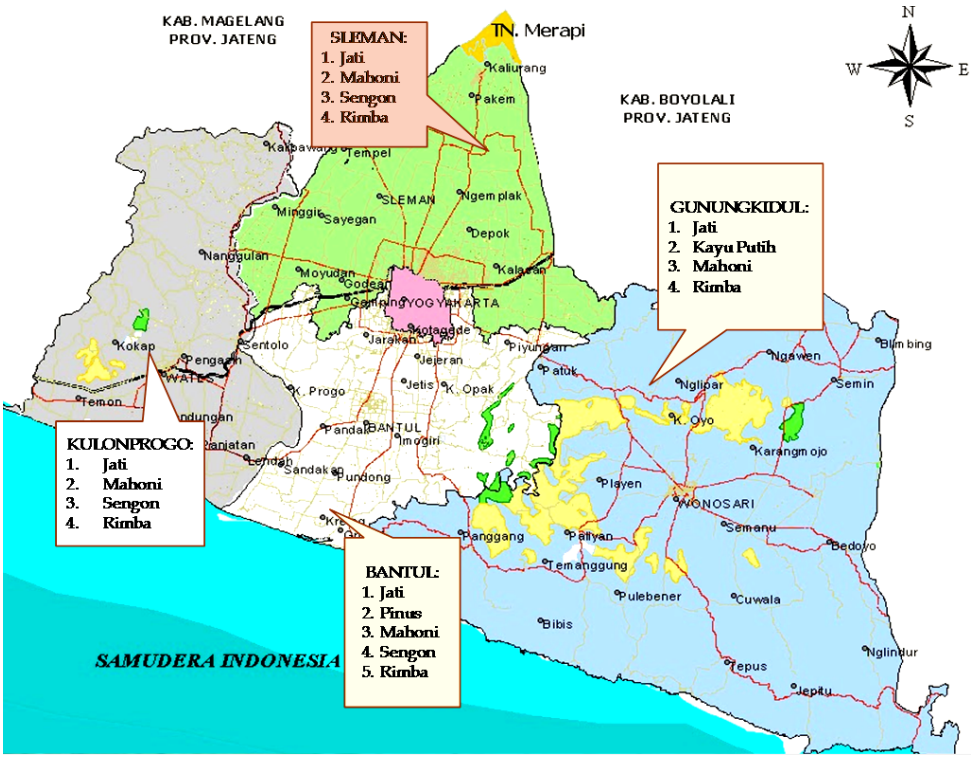

Gambar 1.11 Peta Persebaran Hasil Hutan

Produksi hasil hutan kayu, berasal dari tebangan yang sudah direncanakan, tebangan tak tersangka akibat adanya gangguan hutan yang berupa pencurian dan barang buktinya dapat diselamatkan, kebakaran, bencana alam, serta tegakan tinggal jati yang potensinya masih relatih kecil. Potensi produksi hasil hutan unggulan yang cukup besar justru berupa produksi hasil hutan bukan kayu, yaitu minyak kayu putih.

Pengolahan daun kayu putih terdapat di empat unit Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP), yaitu Sendang Mole, Gelaran, Dlingo, dan Kediwung. Sedangkan potensi hutan kayu putih yang menghasilkan daun kayu putih seluas 3.828,96 ha tersebar di kawasan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, yang terbagi lima Bagian Daerah Hutan (BDH), yaitu BDH Karangmojo dengan luas 2.204,16 ha, BDH Playen dengan luas 1.020,30 ha, BDH Paliyan seluas 376,50 ha, BDH Kulon Progo-Bantul seluas 203,00ha dan BDH Panggang seluas 25 ha.

Model pengelolaan tanaman kayu putih dilakukan dengan pola kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai upaya penanganan kemiskinan, dan sekaligus memberikan pembinaan kepadamasyarakat bahwa dalam mengusahakan hutan agar tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Wujud dari pemberdayaan antara lain mengikutsertakan petani/ kelompok tani hutan sebagai *pesanggem* dalam pemungutan dan pengangkutan hasil daun kayu putih pada saat panen, sehingga masyarakat pesanggem mendapat kompensasi berupa upah pungutan dan angkut.

Kontribusi kehutanan dalam pencapaian swasembada pangan di DIY cukup besar dengan menghasilkan sekitar 33.878,65 ton per tahun komoditas tanaman pangan yaitu jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, dan padi. Hal ini secara teknis dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengusahakan tanaman pangan dengan pola tumpangsari. Usaha tani di wilayah hutan melibatkan masyarakat petani sekitar hutan sebagai pesanggem sejumlah 9.981 orang yang tergabung dalam 132 kelompok tani hutan (KTH). Gambaran produksi minyak kayu putih pada tahun 2011-2015, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.16 Produksi Minyak Kayu Putih di DIY, 2011-2015

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2011	44.681	44.957	6.110.306.400
2012	46.138	46.321	7.581.090.000
2013	47.633	44.669	7.330.657.000
2014	47.633	47.641	9.973.126.000
2015	43.785	43.825	8.374.957.500

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari penjualan minyak kayu putih pada tahun 2015 sebesar Rp8.374.957.500,00. Apabila dibandingkan dengan PAD tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 16,02%. Penurunan PAD disebabkan adanya penurunan harga lelang minyak kayu putih per liter yang hanya mencapai Rp191.100,-/liter.

Sesuai hasil inventarisasi tanaman kayu putih pada tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah pohon per hektar rata-rata sebanyak 1.600 pohon dengan rata-rata produksi per satuan pohon sebesar 1,1 kg. Upaya peningkatan produksi daun kayu putih terus dilakukan dengan upaya rehabilitasi dan pengkayaan, sehingga tercapai populasi ideal tanaman 3.330 pohon per hektar.

C. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 5,77% dalam struktur PDRB DIY. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati peringkat ketiga dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2015. Pertumbuhan disektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diantaranya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2015, termasuk kegiatan Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE).

Sementara itu, selama kurun waktu 2011-2015 jumlah wisatawan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel bersertifikasi sebanyak 3.346.180 orang dengan rincian wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 254.213 orang dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 3.091.967 orang. Jumlah kunjungan wisatawan tersebut meningkatpada tahun 2015 sebanyak 776.025 orang (23,19%) menjadi

sebanyak 3.346.180 orang dengan rincian wisman 308.485 orang dan wisnus 3.813.720 orang.

Tabel 1.17 Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY, 2011-2015

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/ LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2011	169.565	1.438.629	1.608.194	8.693	1,98	1,72
2012	202.518	2.013.314	2.215.832	12.904	1,82	1,56
2013	235.888	2.602.074	2.837.962	13.695	1,90	1,59
2014	254.213	3.091.967	3.346.180	12.829	1,95	1,58
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016

D. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Perdagangan DIY didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor. Dilihat dari besarnya nilai ekspor, komoditas unggulan DIY meliputi pakaian jadi tekstil, sarung tangan kulit, STK sintetis, mebel kayu, kerajinan kertas dan kerajinan batu.

Tabel 1.18 Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditas di DIY, 2011-2015 (Juta US$)

No	Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pakaian Jadi Tekstil	47,07	46,79	66,88	49,77	56,88
2	Sarung Tangan Kulit	21,75	19,63	22,19	35,56	26,37
3	STK Sintetis	16,21	16,39	13,07	11,87	9,47
4	Mebel Kayu	16,38	26,89	23,26	37,45	54,42
5	Minyak Atsiri	6,91	2,77	3,21	7,29	15
6	Kerajinan Batu	0	3,06	3,07	5,13	5,59
7	Kerajiinan Kertas	3,93	3,9	3,27	2,62	3,76

Sumber: Disperindakop dan UKM DIY, 2016

Sementara itu, empat komoditas impor terbesar yang masuk ke DIY dari tahun 2011 sampai dengan 2015 berupa tekstil, spare part mesin pertanian, aksesoris garmen dan kulit disamak.

Tabel 1.19 Nilai Impor Berdasarkan Komoditas di DIY, 2011-2015 (Juta US$)

No	Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1	*Spare Part* Mesin Pertanian	55,34	4,25	0,09	19,97	3,02
2	Tekstil	12,74	7,69	4,79	4,62	2,54
3	Kulit Disamak	5,85	0,54	0	0,002	0,03
4	Logo	0,74	0,19	0	0	0
5	Aksesoris Garmen	0,69	0,34	0,18	0,27	0,10
6	Plastik	0,18	0,05	0,04	0,38	0,007

Sumber: Disperindakop dan UKM DIY, 2016

1.2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2005-2015 cenderung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,83%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,49%, dan setelah itu mengalami penurunan. Pertumbuhan pada tahun 2014 meskipun menurun dibanding tahun 2013, namun masih cukup tinggi dengan angka sebesar 5,18%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 4,94%.

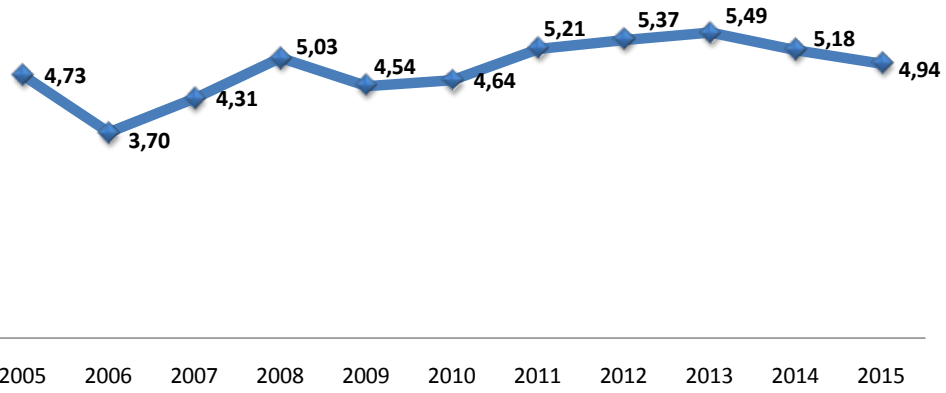

Gambar 1.12 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2005-2015 (%)
(Sumber: BPS DIY)

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor perekonomian. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh peningkatan nilai tambah pada semua lapangan usaha selain listrik dan gas. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2015 adalah sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,27% diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 8,00%, sektor jasa perusahaan sebesar 7,31%, sektor jasa pendidikan sebesar

7,28% dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,15%, sedangkan sektor yang mengalami kontraksi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar -1,32%.

Kinerja pertumbuhan sektor-sektor pembentuk PDRB tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dikatakan mengalami penurunan. Meski mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2015, namun sebagian besar pertumbuhannya lebih rendah dibanding tahun 2014. Dari keseluruhan sektor, hanya empat sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (naik 4,70% dari tahun 2014), sektor jasa lainnya (naik 2,72%), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (naik 0,5%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (naik 0,39%). Sektor lain di luar keempat sektor yang disebutkan, nilai pertumbuhan tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014.

Tabel 1.20 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,63	5,13	2,26	-2,10	2,60
2	Pertambangan dan Penggalian	7,28	1,67	3,92	2,11	0,12
3	Industri Pengolahan	5,39	-2,84	6,87	3,82	1,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,63	10,20	6,22	3,53	(1,32)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,31	3,46	0,95	3,91	2,90
6	Konstruksi	4,85	4,46	4,94	5,65	4,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,12	8,66	5,26	5,69	6,19
8	Transportasi dan Pergudangan	3,94	4,73	6,10	3,80	3,73
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,69	6,82	7,13	6,79	5,77
10	Informasi dan Komunikasi	9,55	10,74	6,22	6,13	5,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,33	3,23	11,90	7,89	8,27
12	Real Estat	4,47	8,88	4,01	7,77	6,45
13	Jasa Perusahaan	6,57	7,99	3,27	7,61	7,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	4,64	7,49	4,94	5,90	5,18
15	Jasa Pendidikan	7,62	5,26	4,58	7,91	7,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,52	9,18	7,00	7,65	7,15
17	Jasa lainnya	6,83	4,28	4,86	5,29	8,00
	DIY	5,21	5,37	5,49	5,18	4,94

Sumber: BPS DIY

Nilai PDRB di DIY tahun 2015 atas dasar berlaku mencapai 101.396.117 juta rupiah atau sebesar 83.461.574 juta rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010. Nilai pada tahun 2015 tersebut mengalami peningkatan sebesar 8.566.787 juta rupiah (atau sebesar 9,22%) dibandingkan tahun 2014.

Tabel 1.21 Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2013-2014 (Juta Rupiah)

	Lapangan Usaha	2014		2015	
		ADH Berlaku	ADH Konstan	ADH Berlaku	ADH Konstan
1	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	9.769.112	7.508.980	10.848.369	7.703.978
2	Pertambangan dan Penggalian	537.599	470.735	573.133	471.323
3	Industri Pengolahan	12.614.921	10.469.637	13.236.292	10.652.525
4	Pengadaan Listrik & Gas	89.669	121.268	92.610	119.663
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	102.670	82.855	109.697	85.260
6	Konstruksi	8.722.682	7.508.543	9.499.917	7.826.701
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7.681.035	6.540.108	8.342.646	6.944.903
8	Transportasi & Pergudangan	5.313.233	4.377.850	5.755.748	4.541.309
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.323.242	7.414.021	10.383.391	7.842.132
10	Informasi & Komunikasi	7.897.507	8.458.713	8.244.242	8.891.145
11	Jasa Keuangan & Asuransi	3.602.561	2.826.934	4.028.358	3.060.733
12	Real Estat	6.497.271	5.735.457	7.143.655	6.105.126
13	Jasa Perusahaan	956.391	924.042	1.048.359	991.564
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.492.246	5.971.986	8.348.234	6.281.580
15	Jasa Pendidikan	7.600.855	6.938.845	8.598.744	7.444.277
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.276.361	2.062.979	2.553.551	2.210.406
17	Jasa lainnya	2.351.975	2.119.326	2.589.171	2.288.950
	PDRB DIY	**92.829.330**	**79.532.277**	**101.396.117**	**83.461.574**

Sumber: BPS DIY

Struktur perekonomian DIY tahun 2015 yang diukur dari distribusi persentase PDRB atas harga berlaku menunjukkan tidak ada lapangan usaha yang secara mencolok mendominasi perekonomian DIY. Empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB DIY tahun 2015 adalah sektor industri pengolahan,

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor konstruksi. Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2015 di DIY tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Meskipun kontribusi beberapa sektor mengalami perubahan, namun masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan, penyediaan akomodasi dan minuman, serta sektor jasa. Kontribusi sektor industri pengolahan menempati urutan tertinggi dengan nilai kontribusi sebesar 13,05%, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 10,70%, penyediaan akomodasi dan makan minum 10,24%, konstruksi 9,37%, jasa pendidikan 8,48%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib masing-masing sebesar 8,23%, sektor informasi dan komunikasi 8,13%. Sektor dengan kontribusi paling kecil adalah pengadaan listrik dan gas dengan nilai kontribusi 0,09%.

Tabel 1.22 Kontribusi Sektor terhadap PDRB DIY, 2014-2015 (%)

	Lapangan Usaha	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,52	10,70
2	Pertambangan dan Penggalian	0,58	0,57
3	Industri Pengolahan	13,59	13,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11
6	Konstruksi	9,40	9,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,27	8,23
8	Transportasi dan Pergudangan	5,72	5,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,04	10,24
10	Informasi dan Komunikasi	8,51	8,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88	3,97
12	Real Estat	7,00	7,05
13	Jasa Perusahaan	1,03	1,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,07	8,23
15	Jasa Pendidikan	8,19	8,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,45	2,52
17	Jasa lainnya	2,53	2,55
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00

Sumber: BPS DIY

Sementara itu, nilai dan laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 menunjukkan kontribusi terbesar berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 68.608.884 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau sebesar 50.329.799 juta rupiah atas dasar harga konstan. Dengan nilai tersebut, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB DIY tahun 2015 sebesar 67,66%. Pengeluaran terbesar kedua dalam pembentukan PDRB DIY sisi pengeluaran adalah pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dengan share sebesar 30,51%, dengan nilai sebesar 30.935.037 juta rupiah (atas dasar harga berlaku) atau 22.286.615 juta rupiah (atas dasar harga konstan tahun 2010). Sementara itu, pengeluaran konsumsi LNPRT dan perubahan inventori merupakan sektor penyumbang terendah dalam pembentukan PDRB DIY sisi pengeluaran. Dilihat dari pertumbuhannya, impor luar negeri tumbuh sebesar 15,46% menempati posisi tertinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor luar negeri relatif kecil sebesar 3,15%.

Tabel 1.23 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran, 2014-2015

No	Komponen Pengeluaran	2014			2015		
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	Laju Pertum-buhan (%)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	Laju Pertum-buhan (%)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62.805.013	47.991.757	5,08	68.608.884	50.329.799	4,87
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.948.427	2.317.123	10,58	3.171.193	2.384.374	2,90
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15.347.428	12.056.063	4,35	16.947.017	12.697.848	5,32
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27.744.794	21.358.622	5,78	30.935.037	22.286.615	4,34
5	Perubahan Inventori	980.197	930.599	11,78	1.180.158	974.645	4,73
6	Ekspor Luar Negeri	5.465.423	4.278.248	20,80	6.259.714	4.413.223	3,15
7	Impor Luar Negeri	4.085.245	3.228.540	44,03	5.066.145	3.727.716	15,46
8	Net Ekspor Antar Daerah	(18.376.708)	(6.171.595)	2,77	(20.639.740)	(5.897.213)	-4,45
	PDRB DIY	92.829.330	79.532.277	5,18	101.396.117	83.461.574	4,94

Sumber: BPS DIY

Nilai PDRB per kapita di DIY atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 mencapai 27,56 juta rupiah atau meningkat 7,99%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang besarnya 25,52 juta rupiah. Sementara itu jika dilihat dari harga konstan, PDRB per kapita DIY pada tahun 2015 mencapai 22,68 juta rupiah atau lebih tinggi 0,81% dari tahun 2014 yang besarnya 21,87 juta rupiah.

Tabel 1.24 Nilai PDRB Per Kapita DIY, 2010-2015 (Juta Rp)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
2010	18,65	18,65
2011	20,33	19,39
2012	21,74	20,18
2013	23,62	21,04
2014	25,52	21,87
2015	27,56	22,68

Sumber: BPS DIY

Laju inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2015 sebesar 3,09%. Angka inflasi tahun 2015 ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2014 yang besarnya 6,59%. Laju inflasi 2015 sebagian besar berasal dari kelompok sandang (5,87%), makanan jadi minuman, rokok dan tembakau (5,04%), bahan makanan (4,64%), perumahan (4,41%), dan kesehatan (4,21%). Sementara itu, kelompok transpor dan komunikasi mengalami deflasi sebesar 2,51%, dimana pada tahun 2014 kelompok ini memiliki andil yang cukup signifikan dalam menyumbang inflasi di Kota Yogyakarta.

Tabel 1.25 Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015

No	Kelompok Pengeluaran	2012	2013	2014	2015
	Umum	4,31	7,32	6,59	3,09
1	Bahan Makanan	8,1	12,31	7,7	4,64
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,9	8,15	2,95	5,04
3	Perumahan	2,99	5,18	8,92	4,41
4	Sandang	3,56	0	3,61	5,87
5	Kesehatan	1,93	3,08	5,49	4,21
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	1,43	3,17	2,37	1,36
7	Transpor dan Komunikasi	1,3	10,45	9,36	-2,51

Sumber: BPS DIY

1.3 SISTEMATIKA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2015 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan umum mengenai dasar hukum, sejarah keistimewaan DIY, gambaran umum daerah meliputi kondisi geografis daerah, gambaran umum demografi, dan kondisi ekonomi daerah.

Bab II Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah DIY

Memuat visi dan misi daerah, strategi dan kebijakan daerah, prioritas pembangunan daerah.

Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah DIY

Memuat pengelolaan pendapatan daerah, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, target dan realisasi pendapatan daerah dan permasalahan serta solusinya, dan pengelolaan belanja daerah, yaitu kebijakan umum keuangan daerah, serta target dan realisasi belanja daerah.

Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan DIY

Berisi pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja fisik pada kegiatan yang bersumber dari APBD DIY.

Bab V Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

Berisi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan Keistimewaan DIY.

Bab VI Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Berisi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan.

Bab VII Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Berisi pelaksanaan kerja sama antar-daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan lain-lain.

Bab VIII Penutup

Berisi mengenai kesimpulan ringkas dari penyusunan LKPJ DIY Tahun 2015.

Bab 2 Kebijakan Pembangungan Pemerintah Daerah DIY

2.1 VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

2.1.1 Visi Jangka Panjang

Arah visi pembangunan DIY yang akan dicapai sembilan tahun mendatang adalah mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

2.1.2 Misi Jangka Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

a. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
b. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
c. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
d. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

2.2 FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

2.2.1 Dasar Filosofi

Pembangunan daerah DIY dilandasi oleh filosofi adiluhung yang menjadi panutan bagi kehidupan masyarakat, yaitu ***Hamemayu Hayuning Bawana***, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya yang berdimensi berkelanjutan. Esensi nilai budaya merupakan hasil ***cipta, karsa dan rasa***, yang diyakini sebagai sesuatu yang *azali*, berlaku umum, dipedomani, dan memiliki nilai manfaat. Demikian halnya nilai luhur budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang ***gumregah*** dengan kondisi ***gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup, kerta raharja***. Dengan kata lain, tatanan masyarakat tersebut merupakan proses budaya yang akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreatifitas-inovatif.

Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta, perlu mendudukkan enam nilai dasar budaya (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) yang menjadi rujukan deskriptif dan preskriptif yang dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta. Pijakan yang dianut sebagai landasan kebudayaan di DIY adalah enam nilai dasar budaya dalam konteks keistimewaan Yogyakarta. Keenam nilai tersebut didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif, yang selanjutnya dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.

Hamemayu Hayuning Bawana memiliki makna sangat kompleks, karena Bawana sendiri dipahami sebagai yang *tangible* dan *intangible* serta sebagai *bawana alit* dan *bawana ageng*. Dalam pemahaman seperti itu, maka konsep ini memiliki kapasitas luas menjadi pedoman hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (negara). Konsep luhur

ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sangkan Paraning Dumadi dimulai dari keyakinan bahwa Tuhan merupakan asal-muasal sesuatu dan tempat kembalinya segala sesuatu. Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan *(mulih mula mulanira)*. Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya *(jagad gedhé; makro kosmos)*, termasuk manusia *(jagad cilik; mikro kosmos)*, dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun *(tan kena kinaya apa)*. Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara *(owah gingsir ing kanyatan, mobah mosiking kahanan)*, bahkan manusia hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air *(urip iku bebasan mung mampir ngombé)*, sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati *(Kasunyatan Jati)* yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal maupun tiada berakhir.

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada satu satuan kenyataan (unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Manunggaling Tuhan dengan Manusia akan mengakibatkan ketentraman.

Konsep ini menjadi inspirasi *Manunggaling Kawula lan Gusti* yang berdimensi vertikal dan horizontal. *Manunggaling Kawula Gusti* dapat dimaknai dari sisi kepemimpinan yang merakyat dan disisi lain dapat dimaknai sebagai *piwulang* simbol ketataruangan. *Manunggaling Kawula Gusti* memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dalam hal kepemimpinan, makna *Manunggaling Kawula Gusti* adalah mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin dan kapan kita

dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin.

Tekad Sri Sultan Hamengku Buwono IX, "Tahta Untuk Rakyat" dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep *Manunggaling Kawula Gusti*, karena pada prinsipnya keduanya menyandang semangat yang sama, yakni semangat keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat, antara Kraton dan Rakyat. Sri Sultan HB X sebagai raja dan penerus Kasultanan Yogyakarta meneguhkan kembali tekad Tahta Bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, wujud komitmen Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam konteks keberpihakan Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Oleh karena itu, Tahta Untuk Rakyat juga harus dipahami sebagai penyikapan Kraton yang diungkapkan dengan bahasa sederhana *Hamangku, Hamengku, Hamengkoni*. Dengan demikian, Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam konsep filosofis *Manunggaling Kawula Gusti*. Keberadaan Kraton senantiasa ada karena adanya rakyat, sementara rakyat memerlukan dukungan Kraton agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari ketidakadilan dan keterpurukan. Kraton tidak akan ragu-ragu memperlihatkan keberpihakan terhadap Rakyat, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa-masa revolusi dulu.

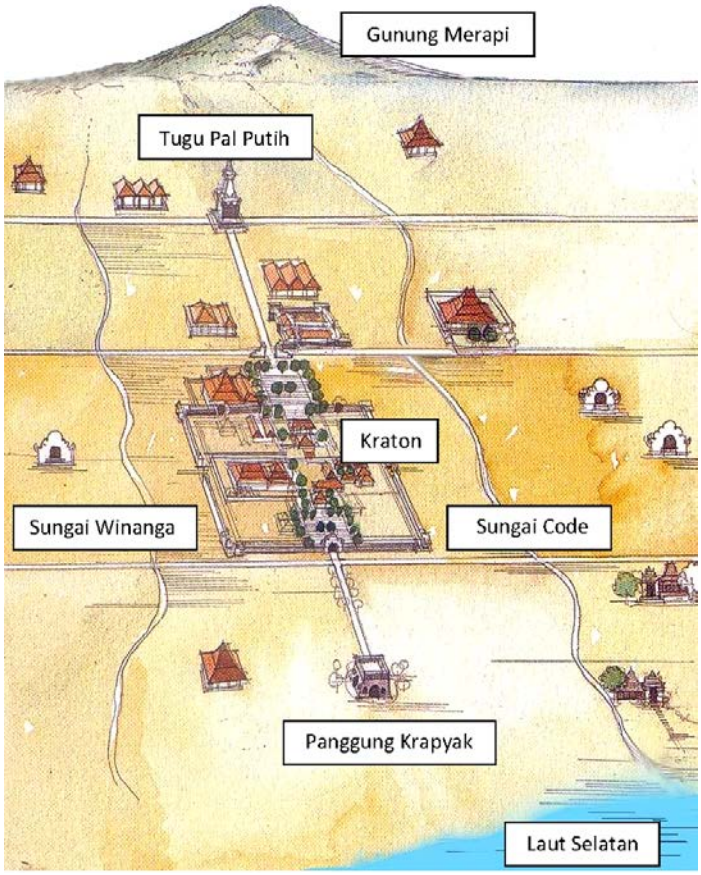

Gambar 2.1 Sumbu Filosofi Yogyakarta

Falsafah *Golong Gilig* merupakan konsep pemikiran yang awalnya berperan untuk memberikan spirit perjuangan melawan penindasan. Konsep ini melambangkan menyatunya cipta, rasa dan karsa yang dengan tulus ikhlas untuk memohon hidayah kepada Tuhan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga melambangkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau *Manunggaling Kawula-Gusti*.

Sawiji, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan konsentrasi harus diarahkan ke tujuan atau visi itu. *Greget*, bermakna dinamik dan semangat yang harus disalurkan melalui jalan Allah SWT dan diarahkan ke tujuan melalui saluran yang wajar. *Sengguh*, bermakna kebanggaan dan kepercayaan penuh pada pribadinya untuk mencapai tujuan namun tidak disertai kesombongan. *Ora Mingkuh*, bermakna bertanggung jawab

menghadapi halangan dan kesulitan yang timbul dalam perjalanan menuju ke tujuan (cita-cita). Konsep di atas menyandang makna mengenai kesatupaduan antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan tanggungjawab sosial untuk membangun bangsa dan negara dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan juga konsep dasar pembentukan inti kota. *Catur Gatra Tunggal* yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid, alun-alun, dan pasar merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dengan perkataan lain, apabila elemen-elemen inti kota tersebut diabaikan, maka inti keistimewaan Yogyakarta secara tata ruang fisik akan terabaikan juga.

Konsep ini tidak lepas dari keberadaan sumbu imajiner Gunung Merapi–Laut Selatan. Yogyakarta adalah kota yang mengambil rujukan tema perennial (abadi) berupa alam (gunung-laut) dan kemudian membangun filosofi *humanism metaphoric* di atasnya. Keberadaan sumbu imaginer dari Gunung Merapi–Laut Selatan dan sumbu filosofis antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak telah menghamparkan *cultural landscape* (pusaka saujana, sejauh mata memandang).

Pathok Negara, adalah salah satu konsep penting yang memberikan nilai keistimewaan tata ruang Yogyakarta, yang tidak hanya sekedar ditandai dengan dibangunnya empat sosok masjid bersejarah (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan, dan Dongkelan), melainkan juga memberikan tuntunan teritori spasial yang di dalamnya secara implisit menyandang nilai pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan agama Islam, dan tentu saja pengembangan pengaruh politik kasultanan. Secara spasial, *Pathok Negara* telah membangkitkan satuan-satuan permukiman baru yang terus berkembang sampai saat ini.

Masjid *Pathok Negara* yang tersebar di empat penjuru pinggiran Kota Yogyakarta berfungsi sebagai benteng pertahanan secara sosial kemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena kawasan masjid-masjid *Pathok Negara* tersebut berfungsi sebagai kawasan keagamaan sekaligus kawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para ulama yang berada di Masjid *Pathok Negara* tersebut adalah para ahli di bidang agama dan perekonomian. Pengaruh sosial yang buruk dari luar dapat ditangkal oleh kawasan-kawasan tersebut, selaku garda depan terhadap anasir-anasir asing.

Secara ringkas *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga), maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Secara filosofis, konsepsual dan substansial Hamemayu Hayuning Bawana sejalan dengan konsep *sustainable development, sustainable human development, dan empowerment*. Demikian juga halnya dengan konsep Takhta Untuk Rakyat dan *Manunggaling Kawulo Gusti* sejalan dengan konsep-konsep demokrasi dan partisipatori. Konsep *Pathok Nagara* sejalan dengan konsep *green belt* dalam pembangunan kota modern. Konsep Catur Gatra Tunggal dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad pertengahan yang menyimbolkan centrum dan identitas dan sampai saat ini masih dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep *Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh*, sejalan dengan spirit atau semangat *Bushido* (menekankan kesederhanaan, kesetiaan, kekuatan, dan kehormatan) telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen dalam membangun negara dan bangsanya.

2.2.2 Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dibangun berdasarkan pemahaman filosofis, serta berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang *adiluhung*, sehingga Visi Jangka Menengah (2012-2017) Daerah Istimewa Yogyakarta diuraikan sebagai berikut:

“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih ***berkarakter***, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang ***berbudaya*** dimaknai bahwa budaya lokal memiliki ketahanan dalam menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal *(local wisdom)* dan keunggulan lokal *(local genius)*. Berbudaya juga dimaknai sebagai proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesis budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang ***maju*** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi terjadinya peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang ***mandiri*** adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya *(self-help)*, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan *civil society* yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. *Civil society* yang mampu mencegah

otoritas negara tidak memasuki *domain society* secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.

Lebih lanjut Daerah Istimewa Yogyakarta yang ***sejahtera*** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan, sedangkan ***Menyongsong Peradaban Baru*** dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.

2.2.3 Misi

Misi dicanangkan sebagai implementasi mengenai upaya mewujudkan Visi. Misi memberikan pedoman, arah, sekaligus batasan dalam proses pencapaian tujuan. Untuk itu, untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2) Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4) Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Misi membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dipandang sebagai misi yang utama dalam mewujudkan *jalma manungsa kang utama* atau pembangunan yang berpusat kepada manusia dan kemanusiaan. Untuk itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. Selain itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, misi pertama ini dipijak untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

Misi menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatan daya saing pariwisata dan sektor riil yang mendorong produktifitas, guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan.Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktifitas masyarakat agar rakyat lebih diperankan sebagai subyek pembangunan yangproduktif, inovatif, berdayasaing, dan kreatif, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mampu menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan pembangunan dan menurunkan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif pada era persaingan global.

Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimaknai sebagai misi yang difokuskan untuk mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan *good and clean governance*. Perwujudan itu ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah, diartikan sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhannnya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui prasarana dan sarana daerah yang memadai dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Untuk itu, penyediaan layanan publik yang berkualitas menjadi *urgent* untuk

menemukenali ketersediaan sarpras yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.2.4 Tujuan

Mengacu pada visi dan misi pembangunan jangka menengah untuk periode 2012-2017, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan yang hendak dicapai

Misi 1: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	**Tujuan:** a. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya; b. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter; c. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup.
Misi 2: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	**Tujuan:** a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. b. Mewujudkan peningatan daya saing pariwisata.
Misi 3: Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	**Tujuan:** Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif
Misi 4: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan tujuan	**Tujuan:** a. Mewujudkan pelayanan publik. b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

2.2.5 Sasaran

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah 2012-2017 tersebut, maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut,berikut indikator kinerja pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Pembangunan di DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan peningkatan Pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.	1. Peran serta & apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.
Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter.	1. Melek huruf masyarakat meningkat. 2. Aksesibilitas pendidikan meningkat. 3. Daya saing pendidikan meningkat.	Angka Melek huruf. Ratarata lama sekolah. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.
Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.	1. Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup.
Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	1. Pendapatan masyarakat meningkat 2. Ketimpangan antar-wilayah menurun 3. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Pendapatan per kapita per tahun Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah. Indeks Ketimpangan Pendapatan.
Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.	1. Kunjungan wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara meningkat 2. Lama tinggal wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara meningkat	Jumlah wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara Lama tinggal wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.	1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Opini pemeriksaan BPK.
Mewujudkan peningkatkan pelayanan publik.	1. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan	*Load factor* angkutan perkotaan meningkat.

Tujuan	Sasaran	Indikator
Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang	1. Kualitas lingkungan hidup meningkat 2. Pemanfaatan Ruang terkendali	Persentase peningkatankualitas lingkungan. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/ Kota dan RTRW Provinsi meningkat.

2.3 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2012 - 2017

Sebagaimana visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya, dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Untuk mempermudah pencapaian operasional kebijakan dalam kinerja program, maka dirumuskan indikator sebagai tolok ukur kinerja yang diharapkan menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah.

2.3.1 Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Strategi untuk mencapai misi: *Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, yaitu:
   a. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.
   b. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
   c. Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin.
   d. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.

e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.

2. Strategi untuk mencapai misi: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, yaitu:
   a. Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan.
   b. Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif.
   c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.
   d. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat.
   e. Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar pelaku wisata.

3. Strategi untuk mencapai misi: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, yaitu:
   a. Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.
   b. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.

4. Strategi untuk mencapai misi: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, yaitu:
   a. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.
   b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.
   c. Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.3.2 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan di bawah ini:

1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.
   b. Meningkatkan Angka Melek Huruf.
   c. Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah, dan peningkatan Daya Saing Pendidikan.
   d. Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.
   e. Meningkatkan Angka Harapan Hidup.
2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan pendapatan per kapita per tahun.
   b. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antar Wilayah.
   c. Mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita mayarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan.
   d. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan jumlah wisatawan mancanegara.
   e. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan lama tinggal wisatawan mancanegara.

3. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
   b. Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dan peningkatan akses di pedesaan.
   b. Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan.
   c. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/ Kota dan RTRW Provinsi.

2.3.3 Program

Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan dengan dukungan strategi dan kebijakan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan sejumlah program pembangunan menurut urusan, yaitu:

1. Program untuk mendukung pencapaian Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
   a. Urusan Pendidikan
      1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
      2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
      3) Program Pendidikan Menengah
      4) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
      5) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
      6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
      7) Program Pendidikan Tinggi
      8) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
      9) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
      10) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya

11) Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan
12) Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan

b. Urusan Pemuda dan Olah Raga
1) Program Peningkatan Prestasi Olah Raga
2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga
4) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
5) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

c. Urusan Perpustakaan
1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
3) Program Pengembangan Budaya Baca

d. Urusan Kearsipan
1) Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip
2) Program peningkatan kualitas layanan informasi

e. Urusan Kesehatan
1) Program Pembinaan Kesehatan Ibu
2) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan
3) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapelkes
4) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
5) Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
8) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
9) Program Pembinaan Kesehatan Lansia
10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
11) Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita
12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapel Jamkesos
13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia
14) Program Pembiayaan kesehatan
15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSKP Respira
16) Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata

f. Urusan Keluarga Berencana
   1) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
   2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
   3) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
   4) Program Pengembangan Bina Keluarga
   5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR
   6) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS.

g. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
   2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak
   3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
   4) Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan
   5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
   6) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan
   7) Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan

h. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
   2) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
   3) Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa
   4) Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
   5) Program peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa
   6) Program peningkatan Prasarana/ Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa

i. Urusan Tenaga Kerja
   1) Program pelayanan, pengawasan lembaga ketenagakerjaan

j. Urusan Kebudayaan
   1) Program Pengembangan Nilai Budaya
   2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
   3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
   4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
   5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

2. Program untuk mendukung pencapaian Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:
   a. Urusan Pemuda dan Olah Raga
      1) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
   b. Urusan Pekerjaan Umum
      1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
      2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
      3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
      4) Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur
      5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
      6) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
      7) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
   c. Urusan Perumahan
      1) Program Pengembangan Perumahan
      2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
   d. Urusan Tenaga Kerja
      1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
      2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
      3) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan
      4) Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
   e. Urusan Energi, Sumber Daya, Mineral
      1) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenaga-listrikan
      2) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar;
      3) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi;
      4) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.
   f. Urusan Pariwisata
      1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
      2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
      3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
      4) Program Pengembangan Desa Wisata

g. Urusan Penanaman Modal
   1) Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Investasi
   2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
   3) Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

h. Urusan Ketahanan Pangan
   1) Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
   2) Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
   3) Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
   4) Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan
   5) Program Pemberdayaan Penyuluhan

i. Urusan Pertanian
   1) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
   2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
   3) Program PeningkatanProduksi Pertanian TanamanPangan
   4) Program PeningkatanProduksi Hortikultura
   5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

j. Urusan Kehutanan
   1) Program Peningkatan Produksi Perkebunan
   2) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
   3) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
   4) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

k. Urusan Kelautan dan Perikanan
   1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
   2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
   3) Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar
   4) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
   5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
   6) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan

l. Urusan Perindustrian
   1) Program Pengembangan IKM
   2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3) Program Pengembangan Industri Kreatif

m. Urusan Transmigrasi

1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

3. Program untuk mendukung pencapaian Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, adalah sebagai berikut:

a. Urusan Umum

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

b. Urusan Pekerjaan Umum

1) Program Pelayanan Jasa Pengujian
2) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
3) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum

c. Urusan Perencanaan Pembangunan

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
3) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
5) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
6) Program Pengendalian Pembangunan Daerah

d. Urusan Statistik

1) Program Pengembangan Statistik Daerah

e. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2) Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi
3) Program Pembinaan dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, dan Frekuensi

f. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Program Pendidikan Politik Masyarakat
2) Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat

3) Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7) Program Penegakan Perda dan Perkada
8) Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada

g. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Program Peningkatan Pelayanan Publik
2) Program Kerjasama Informasi Dengan *Mass Media*
3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4) Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
5) Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan
6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
7) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
8) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
9) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
10) Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
11) Program pencegahan dini bencana
12) Program penanggulangan korban bencana
13) Program Pemulihan Pasca-bencana
14) Program Peningkatan Pendapatan Daerah
15) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
16) Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah
17) Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro
18) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
19) Program Pendidikan Kedinasan
20) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
21) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

22) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
23) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum
24) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
25) Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar-daerah
26) Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
27) Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan
28) Program Penelitian dan Pengembangan
29) Program Pengembangan Kehidupan Beragama
30) Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
31) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

h. Urusan Kearsipan
   1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

4. Program untuk mendukung pencapaian Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, adalah sebagai berikut:
   a. Urusan Perhubungan
      1) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
      2) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
      3) Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal
      4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
      5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
      6) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
      7) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi
      8) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
      9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
   b. Urusan Tata Ruang
      1) Program Pemanfaatan Ruang;
      2) Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY;
      3) Program Perencanaan Tata Ruang;
      4) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan;
      5) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
   c. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
      1) Program pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pendayagunaan air tanah

2) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
3) Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan

d. Urusan Kehutanan
1) Program Penataan Kawasan Hutan
2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

e. Urusan Kelautan dan Perikanan
1) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan SDA
2) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiran iklim laut

f. Urusan Lingkungan Hidup
1) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

g. Urusan Pekerjaan Umum
1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
2) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
4) Program PenyediaandanPengelolaan Air Baku
5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
6) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
7) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
8) Program PengelolaanPersampahan
9) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
10) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
11) Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan
12) Program Pengendalian Banjir

13) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi

h. Urusan Perumahan

1) Program Pengembangan Perumahan

2) Program Pengurangan Kawasan Kumuh

2.3.4 Indikator

Indikator kinerja daerah ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada dimensi: kesejahteraan, pemerataan, produktifitas, layanan, dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan. Indikator Kinerja Utama Gubernur dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Gubernur

No	Indikator Sasaran	2015
1.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	67,28%
2.	Angka Melek huruf.	93,85%
3.	Rata-rata lama sekolah.	10,80 Tahun
4.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	10%
5.	Angka Harapan Hidup.	73,81 Tahun
6.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK).	7,80 jt
7.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	0,4465
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	0,2898
9.	Jumlah wisatawan nusantara.	3.581.860 orang
	Jumlah wisatawan mancanegara.	261.053 orang
10.	Lama tinggal wisatawan nusantara.	2,30 hari
	Lama tinggal wisatawan mancanegara.	2,35 hari
11.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	A
12.	Opini pemeriksaan BPK.	WTP
13.	*Load factor* angkutan perkotaan meningkat.	38,57%
14.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	9,43%
15.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/ Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	64,25%

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Peningkatan layanan pendidikan non formal dan Informal	orang	8.000
2	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,80
3	Persentase sekolah yang mengiimplementasi-kan pendidikan berkarakter dan sinergis dengan kebutuhan pembangunan	%	29,17
4	Jumlah peserta didik yang mendapat pelayanan pendidikan teknik terstandar	peserta	1904
5	Prestasi Cabang Olahraga	peringkat	13
6	Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	sentra	13
7	Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/ pemberdayaan pemuda	%	100
8	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	%	74,71
9	Peningkatan jumlah kelompok wirausaha muda	kelompok	365

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	%	48,4
2	Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	%	99
3	Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama (KN1)	%	98,5
4	Persentase cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	98
5	Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL)	%	73,55
6	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	%	7,5
7	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	%	64,44
8	Persentase kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat	%	74,36
9	Persentase Rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan	%	72,6
10	Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapeljamkesos	%	88,00
11	Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan	%	69,00
12	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	%	79

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
13	Persentase Pemenuhan Laboratorium Kesehatan Tipe Utama	%	80,00

Tabel 2.6 Indikator Kinerja RSJ GRHASIA DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase penderita gangguan jiwa yang ditangani di RSJ Grhasia DIY	%	8,62

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi	%	86
2	Penduduk berakses Energi	%	92
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	7,25
4	Persentase penduduk berakses air minum	%	80,85
5	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	%	83,33
6	Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak	%	80
7	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dengan RTRW provinsi	%	81,20
8	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dengan RTRW provinsi	%	48,05

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%	13,94
2	Persentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	%	97
3	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	%	84

Tabel 2.9 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	urusan/ bidang	12
2	Persentase penyediaan jaringan IT di Pemda DIY	%	80
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat	%	70

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
4	Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan	%	25,2
5	Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan	%	83
6	Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	%	40
7	*Load factor* Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta	%	38,57
8	Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Transportasi di DIY	%	44,17
9	Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda	%	40

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Badan Lingkungan Hidup DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase Peningkatan kualitas udara	%	6,76
2	Persentase Peningkatan kualitas air	%	11,21
3	Peningkatan akses informasi lingkungan hidup	jenis	9

Tabel 2.11 Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase Peningkatan partisipasi perempuan di bidang pemerintah, swasta dan politik	%	47,97
2	Persentase pembinaan organisasi perempuan	%	75,14
3	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio	0,42
4	Persentase penurunan pernikahan usia di bawah 20 tahun	%	0,510
5	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif	%	80,22
6	Persentase lembaga Bina Keluarga Berkatagori Percontohan	%	23,00
7	Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes	%	34,43
8	Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat	%	32,08
9	Persentase tahapan keluarga sejahtera	%	44,10
10	Persentase desa yang telah memiliki profil	%	70

Tabel 2.12 Indikator Kinerja Dinas Sosial DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.	%	73,24
2	Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penanggulangan PMKS dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	%	100
3	Persentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat	%	55,02
4	Persentase anak bermasalah sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial	%	27,20
5	Persentase Fakir Miskin, Korban Tindak Kekerasan dan Para Tuna Sosial yang mengalami peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial.	%	9,8

Tabel 2.13 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3	%	30,30
2	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	%	25,00
3	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	%	20,77
4	Persentase lembaga yang terstandardisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku	%	48,35
5	Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	65
6	Persentase besaran transmigran yang ditempatkan	%	20

Tabel 2.14 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif dan UKM	%	4
2	Nilai sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY	Rupiah	6.077.411
3	Nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB DIY	Juta Rupiah	3.271.732
4	Jumlah UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang	unit	234.000

Tabel 2.15 Indikator Kinerja Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII	orang	78.741
2	Nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	Juta Rupiah	22.120.635
3	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	%	65

Tabel 2.16 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase Jumlah Organisasi Budaya dan Desa Budaya Kategori Maju	unit	24
2	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	15
3	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	%	40
4	Persentase implementasi hasil kesepakatan	%	15
5	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) tidak bergerak yang tertangani	%	50

Tabel 2.17 Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase penurunan konflik	Persen	33
2	Kasus ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	Kasus	5
3	Persentase korban tertolong dalam kejadian kecelakaan di Gunung, Laut, Waduk dan Sungai	Persen	84,90

Tabel 2.18 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Indeks Ketahanan Daerah	angka	50

Tabel 2.19 Indikator Kinerja SATPOL PP DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kasus	290
2	Peningkatan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah DIY	%	26

Tabel 2.20 Indikator Kinerja BIRO Tata Pemerintahan SETDA DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	%	96
2	Bidang SG, PAG, dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum	%	10.535
3	Persentase bahan rumusan kebijakan pemerintahan	%	100

Tabel 2.21 Indikator Kinerja BIRO HUKUM SETDA DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase Rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum	%	100
2	Persentase layanandan bantuan hukum serta layanan informasi hukum	%	96

Tabel 2.22 Indikator Kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase pelaksanaan kehidupan beragama	%	100
2	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	%	36,45

Tabel 2.23 Indikator Kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi	%	36,45

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
	kebijakan		

Tabel 2.24 Indikator Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	%	36,45
2	Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	%	100

Tabel 2.25 Indikator Kinerja Biro Organisasi Setda DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	85
2	Persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	%	85

Tabel 2.26 Indikator Kinerja Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase SKPD terlayani tata kearsipan berbasis TI	%	100
2	Kualitas pelayanan yang tanggap, cepat dan tepat	%	95
3	Penataan Kawasan Kompleks Kepatihan	%	80
4	Kelancaran Pelayanan keprotokolan	%	95
5	Aktivitas Pemda dalam media massa dan jejaring dengan pemangku kepentingan	%	80
6	Sandiman yang memiliki kompetensi persandian profesi dari sandi negara	%	60

Tabel 2.27 Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase perda, perdais pembahasan anggaran dan LKPJ Gubernur yang terselesaikan tepat waktu	%	94,5

Tabel 2.28 Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	51,31
2	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah	%	100
3	Persentase pendapatan BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	18,34
4	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan	%	11,71

Tabel 2.29 Indikator Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Nilai Akreditasi Badan Diklat (1 = A, 2 = B, 3 = C)	klasifikasi	2

Tabel 2.30 Indikator Kinerja INSPEKTORAT DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	%	5

Tabel 2.31 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase kualitas manajemen Sumber Daya Aparatur	%	79,03

Tabel 2.32 Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	84,6
2	Persentase Jumlah Penyuluh yang meningkat kapasitasnya	%	74

Tabel 2.33 Indikator Kinerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya	%	11
2	Persentase arsip yang dimanfaatkan	%	20
3	Persentase Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	%	20

Tabel 2.34 Indikator Kinerja Dinas Pertanian DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Jumlah Produksi tanaman pangan	ton	2.356.600
2	Jumlah populasi ternak	animal unit	700.516
3	Persentase Peningkatan NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan	%	1,7*

Tabel 2.35 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Peningkatan produksi Hasil Hutan	%	5,59
2	NTP sektor perkebunan	%	128
3	Produksi tanaman perkebunan	ton	88.000
4	Persentase Luas Hutan	%	27,63

Tabel 2.36 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Jumlah wisatawan nusantara	orang	3.581.860
2	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	261,053
3	Lama tinggal wisatawan nusantara	hari	2,3
4	Lama tinggal wisatawan mancanegara	hari	2,35

Tabel 2.37 Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

No	Indikator Sasaran	Satuan	2015
1	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	rasio	0,11
2	Jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiran iklim	orang	1.530
3	Produksi perikanan budidaya dan tangkap	ton	77.400
4	NTP sektor perikanan meningkat	%	116,89
5	Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	dokumen	300

2.4 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

2.4.1 Tema Pembangunan Daerah

Pemilihan Tema Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 ditentukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

   Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.

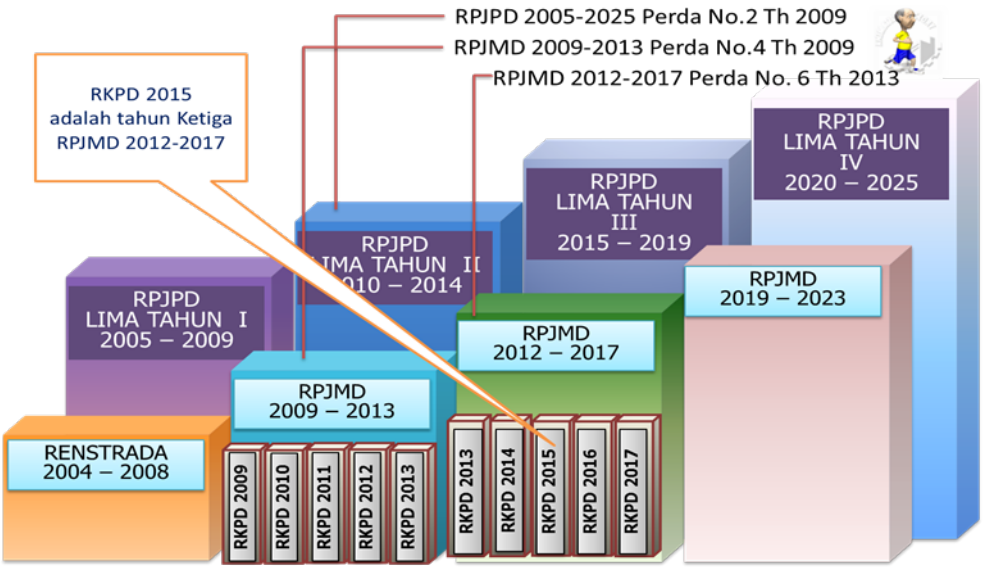

Gambar 2.2 Posisi Dokumen RKPD 2015 terhadap Dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2012-2017

2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2009-2029

   Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap II (2015-2019) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029, dalam rangka mewujudkan struktur ruang provinsi dan sistem transportasi yang meliputi:

   a. Perwujudan Sistem Perkotaan Provinsi
   b. Perwujudan sistem transportasi DIY
   c. Perwujudan Sistem prasarana lainnya
   d. Perwujudan kawasan lindung nasional dan provinsi
   e. Perwujudan kawasan budidaya
   f. Perwujudan pengembangan kawasan strategis nasional dan provinsi

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 -2017

   Pembangunan Daerah Tahun 2015 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2012-2017 untuk mewujudkan visi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru. Tahapan Tahun 2015 sebagaimana dalam tahapan indikasi tema tahunan RPJMD 2012-2017 adalah mendayagunakan dan menguatkan (SDM unggul, kemiskinan dan pengangguran menurun, ekonomi tumbuh, pemerataan perekonomian serta infrastruktur mantap.

   Skenario tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah. Tahapan dan strategi Tahun 2012-2017 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2009-2013, dimana tahun terakhir RPJMD 2009-2013 akan menjadi tahun awal Tahapan dan strategi Tahun 2012-2017. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2009-2013, maka tahapan dan strategi Tahun 2012-2017 tidak terlepas dari tahapan RPJPD Lima Tahun II dan tahapan RPJPD Lima Tahun III.

Tabel 2.38 Tahapan dan Strategi RPJPD Lima Tahunan (2005-2025)

RPJPD Lima Tahun I (2005-2009)	RPJPD Lima Tahun II (2010-2014)	RPJPD Lima Tahun III (2015-2019)	RPJPD Lima Tahun IV (2020-2025)
Pembangunan sarana & prasarana dasar keunggulan daerah, & persiapan dasar kompe-tensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi ekonomi dan industri unggulan	Pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect & forward effect*) untuk men-dorong kemajuan daerah & melanjut-kan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta meng-gerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan	Pendayagunaan kapasitas keunggul-an daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keung-gulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah	Penguatan upaya pencapaian keung-gulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta expansi perekono-mian dan industri berbasis keunggul-an daerah yang didukung dengan ketersediaan energi
Keyword: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar	*Keyword:* Membangun/melan jutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan	*Keyword:* Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun	*Keyword:* Menguatkan dan mengop-timalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita

Tahapan secara umum Tahun 2012-2017 dengan memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dapat digambarkan sebagai berikut.

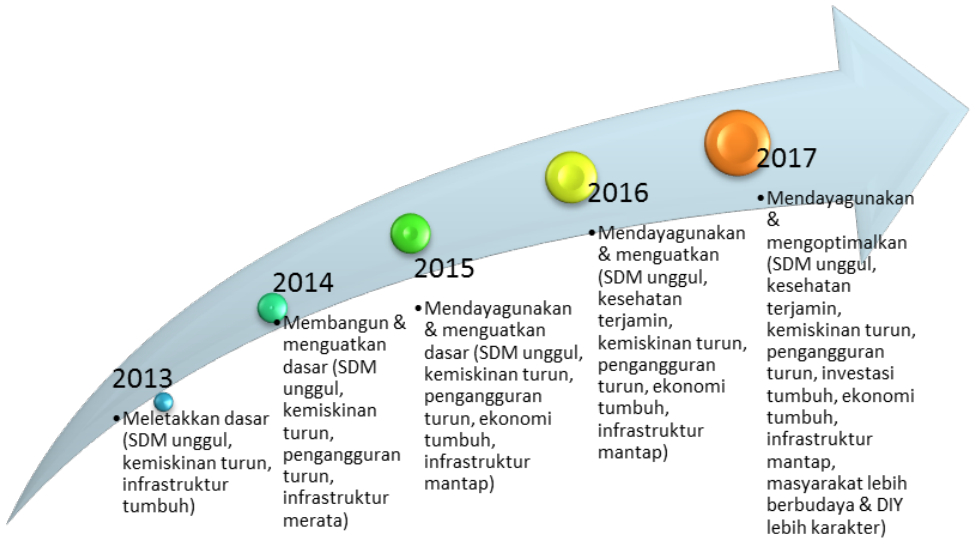

Gambar 2.3 Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2012-2017

4. Tema Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015

   Tema Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015 adalah "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan". Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berkeadilan pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan.

5. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 18/K/DPRD/2014, point-point arahan DPRD adalah sebagai berikut:

   a. Berkenaan dengan pembangunan ekonomi, diharapkan untuk mencari terobosan-terobosan dalam rangka peningkatan invenstasi dan mengoptimalkan potensi daerah.

b. Tingginya Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki DIY tentunya perlu dipertahankan bahkan terus ditingkatkan terutama terkait dengan angka melek huruf karena sebagai daerah pendidikan maka sudah sewajarnya jika DIY dapat membuat semua penduduk DIY melek huruf. Selain itu tingginya angka harapan hidup yang berkorelasi dengan indikator kesehatan juga harus terus dijaga dan ditingkatkan diantaranya dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki serta mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DIY.

c. Upaya penurunan kemiskinan sudah sangat diperlukan terobosan-terobosan baru, mengingat sudah beberapa tahun angka kemiskinan di DIY termasuk yang tertinggi di Indonesia dan berada di atas angka kemiskinan nasional. Diperlukan adanya kebijakan dan program yang langsung ditujukan dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga miskin.

d. Melihat strategisnya sektor pariwisata bagi DIY maka diperlukan kebijakan dan program untuk menjaga dan meningkatkan daya tarik sektor pariwisata DIY agar dapat sebagai destinasi wisata utama di Indonesia. Meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke DIY dengan memberikan fasilitas-fasilitas akses dan mudah dijangkau.

6. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani:

   1) Sinergi Penanggulangan Kemiskinan, Angka kemiskinan masih diatas rata-rata nasional dimana DIY (15,03%) dan nasional sebesar (11,47%) pada tahun 2013.

   2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY, Pertumbuhan ekonomi DIY (5,4%) masih dibawah nasional (5,78%) per tahun 2013.

   3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelayanan publik:

      - Cakupan Kunjungan penduduk miskin pada fasilitas kesehatan masih sangat rendah (0,49%).
      - Ketimpangan regional antar wilayah dengan menggunakan angka Williamson terjadi peningkatan ketimpangan 0,4524 (Tahun 2012) menjadi 0,4547 (Tahun 2013*).

- Ketimpangan pendapatan antar masyarakat berdasar Gini Rasio masih dirata-rata nasional dimana DIY sebesar (0,439) dan nasional (0,413) pada tahun 2013.
- Pemenuhan pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.

4) Pengelolaan resiko Bencana,
   - Peningkatan terhadap adaptasi dan mitigasi bencana bagi masyarakat.
   - Kawasan rawan bencana alam di DIY perdasarkan Peraturan Daerah DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW meliputi kawasan rawan letusan gunung berapi, Kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, kekeringan, dan gempa bumi.
5) Peningkatan keekonomian keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan hidup.
   - Status mutu kualitas lingkungan yang semakin mengancam kelestarian dan kesinambungan pemanfaatan alam. Kualitas nilai baku 9 sungai di DIY yang dalam kondisi tercemar pada tahun 2012 dengan metode storet (merupakan salah satu metode untuk mengetahui status mutu air dengan membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air menggunakan sistem nilai dari US-EPA). Kualitas air tanah yang juga mengalami degrasi terutama dikarenakan adanya kandungan mangan, bakteri *coliform* dan bakteri *coli* tinja.
   - Luas laju tanah sawah yang terkonversi setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama dilahan-lahan produktif.

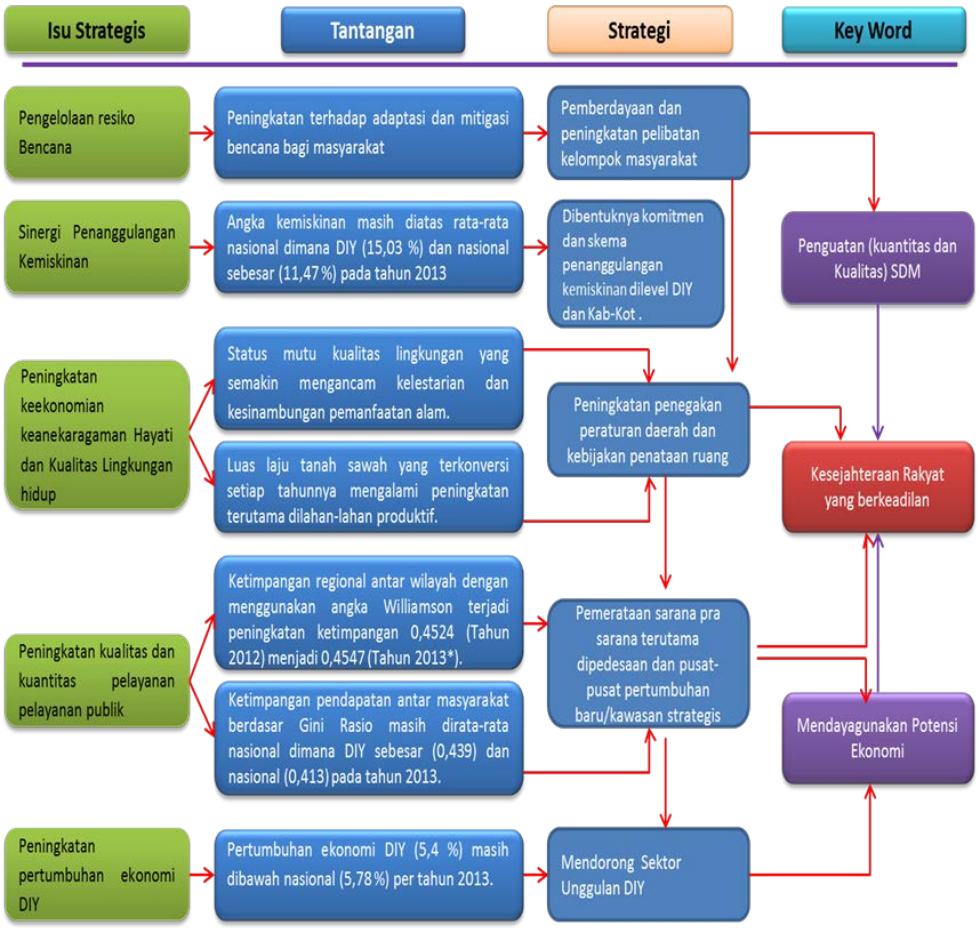

Gambar 2.4 Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis dengan Key Word Tema Tahun 2015

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka tema pembangunan DIY pada tahun 2015 adalah: **"Menguatkan SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan"**. Definisi dari menguatkan SDM, baik kuantitas dan kualitas SDM, melalui pelaku: masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan aparatur pemerintahan; dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan DIY yang semakin kompleks. Mendayagunakan Potensi Ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang optimal terutama pada sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kualitas lingkungan. Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan, yang terukur dari sisi

pengurangan kesenjangan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar regional kewilayahan.

2.4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi DIY Tahun 2015 adalah:

1. Sosial Budaya
   Prioritas ini ditetapkan dalam rangka:
   a. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya;
   b. Memupuk apresiasi masyarakat terhadap penghargaan dan partisipasi terhadap pengembangan serta pelestarian kebudayaan;
   c. Menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan;
   d. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
   e. Kualitas pengelolaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
   f. Pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat;
   g. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan penduduk meningkat;
   h. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat meningkat.
2. Ekonomi
   Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang progresif.
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
   Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui:
   a. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan
   b. Peningkatan Melek Huruf
   c. Daya Saing Pendidikan meningkat.
4. Hukum dan Aparatur;
   Prioritas ini ditetapkan untuk meningkatkan:
   a. Kinerja pemerintah daerah
   b. Pengelolaan keuangan daerah

5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;
   Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pengembangan wilayah yang relatif tertinggal dan miskin, diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Termasuk dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin ketersediaan energi yang berkesinambungan.
6. Penyediaan Sarana dan Prasrana;
   Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan layanan publik baik di sisi kualitas maupun kuantitasnya, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan, serta dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat.
7. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana;
   Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Bab 3

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah DIY

Perumusan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah. Penyelarasan program pembangunan ditiap tingkatan pemerintahan mutlak dilakukan sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan akan mampu mendorong pertumbuhan di tiap lokasi dan titik konsentrasi pembangunan di daerah, dengan demikian setiap visi pemerintahan daerah yang tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat akan efektif untuk terwujud.

Alasan klasik yang selalu dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan adalah keterbatasan penyediaan anggaran, hal yang menjadi penyumbang kondisi tersebut antara lain:

1. Keterbatasan dalam pengkoleksian objek-objek pendapatan di daerah karena Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersifat *closed list* sehingga daerah mengalami kesulitan dalam memperluas objek pendapatan daerah;
2. Belanja aparatur lebih besar dibandingkan belanja yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat;
3. Persepsi SKPD berpendapatan yang kurang memberikan ruang pada sektor-sektor yang mampu memberikan kontribusi pendapatan daerah;
4. Tolok ukur kinerja yang berorientasi *output*; dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara bertahap dari tahun ke tahun diarahkan untuk lebih memantabkan manajemen pengelolaan keuangan dan peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah serta tentu

memperhatikan respon dan reaksi masyarakat akan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari seluruh proses dan mekanisme pengelolaan keuangan negara sehingga rujukan utama dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setelah itu secara operasional pengelolaan keuangan daerah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan setiap lima tahun setelah itu masuk dalam tahapan dokumen perencanaan tahunan yakni penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/ PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Struktur APBD Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Sesuai dengan peraturan perundangan dimaksud, struktur APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 terdiri atas: (1) Pendapatan; (2) Belanja; dan (3) Pembiayaan.

Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga; dan (2) Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, dan Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

3.1.1 Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,15% (data 2010-2014) dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah rata-rata sebesar 49,57%, hal ini menunjukan bahwa kontribusi anggaran pendapatan yang bersumber dari pusat masih tinggi terhadap pembiyaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perluasan jenis pajak dan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan tidak merangsang masyarakat untuk taat dan bersedia untuk membayar, selain itu justru dapat menimbulkan keengganan investor untuk menanamkan modalnya dan merelokasi usahanya kedaerah lain yang memberikan kesejukan dalam memberikan insentif terhadap para pengusaha. Kendala-kendala yang cukup signifikan ini tentu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap elemen dalam struktur pemerintahan daerah dan harus berpikir cerdas agar bagaimana tujuan dan sasaran

pembangunan dapat terwujud sekaligus mampu memberikan kontribusi pembiayaan daerah yang memadai.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dan terus menerus akan dilakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain dengan:

1. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat;
2. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
3. Memberikan inisiasi kepada SKPD agar mengelola dan mengoptimalkan barang milik daerah yang menjadi kewenangannya;
4. Mendorong peningkatan kinerja BUMD agar mampu memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah;
5. Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar porsi dana transfer pusat ke daerah meningkat dari tahun ke tahun;
6. Mendorong SKPD-SKPD agar ikut serta melakukan optimalisasi pendapatan daerah sesuai kewenangan.

Selain upaya-upaya tersebut di atas juga dilakukan peningkatan koordinasi dengan SKPD-SKPD berpendapatan untuk selalu dan terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan penerimaan pendapatan daerah baik meliputi rehabilitasi/pemeliharaan obyek pendapatan daerah, mekanisme pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah, pembinaan sumber daya manusia maupun aplikasi software pengelolaan pendapatan daerah. Bagi SKPD berpendapatan juga didorong untuk mendukung program pemerintah dalam upaya memberikan iklim yang kondusif untuk investasi dan perkembangan dunia usaha.

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2015 sebagaimana tertuang di dalam Pertanggungjawaban APBD DIY Tahun Anggaran 2015 (*inaudited BPK*) adalah sebesar Rp3.357.761.886.230,77 (anggaran setelah perubahan APBD 2015) dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.400.014.811.776,00. Dari angka target dan realisasi

pendapatan tersebut dapat diketahui bahwa capaian realisasi pendapatan Tahun 2015 mencapai target yang ditentukan atau sebesar 101,26%. Rincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Komposisi Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	1.518.860.030.656,77	1.593.110.769.594,00	104,89
2	Dana Perimbangan	1.056.608.866.160,00	1.021.886.268.197,00	96,71
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	782.292.989.414,00	785.017.773.985,00	100,35
	Jumlah	**3.157.761.886.230,77**	**3.400.014.811.776,00**	**101,26**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

Adapun rincian dari masing-masing komponen pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah dengan mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, selain itu semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dan transfer pusat ke daerah. Peran pendapatan asli daerah sangat vital dalam pembangunan daerah, namun demikian sektor pajak daerah masih menempati urutan teratas dalam memberikan kontribusi terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Hasil Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp1.518.860.030.656,77 dan dapat direalisasikan lebih besar dari yang direncanakan semula yaitu sebesar Rp1.593.110.769.594,00 atau tercapai sebesar 104,89%.

Rincian Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	1.347.894.743.697,00	1.397.772.209.370,00	103,70
2	Hasil Retribusi Daerah	43.088.502.025,00	45.811.953.262,71	106,32
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52.604.081.931,77	52.502.631.979,68	99,81
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	75.272.703.003,00	97.023.974.981,61	128,90
Jumlah		**1.518.860.030.656,77**	**1.593.110.769.594,00**	**104,89**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa komponen-komponen yang mendukung Pendapatan Asli Daerah telah mampu mencapai target dari rencana yang sudah ditetapkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2015, bahkan pencapaiannya melampaui target atau di atas 100%.

A. Pajak Daerah

Seperti umumnya pada level provinsi, pajak daerah khususnya penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan topangan utama dalam memberikan sumbangan terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah, namun demikian ke depan ketergantungan terhadap jenis pendapatan ini secara perlahan dikurangi mengingat kapasitas jalan dan issue global tentang kesehatan lingkungan.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah terdiri atas 16 jenis, yang meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan 11 jenis yang dapat dipungut oleh kabupaten/ kota.

Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Pajak Rokok, direncanakan sebesar Rp1.347.894.743.697,00 dan realisasinya sebesar Rp1.397.772.209.370,00 atau mencapai sebesar 103,70%.

Rincian target dan realisasi Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Realisasi Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	556.007.692.000,00	580.298.749.000,00	104,37
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	403.990.936.000,00	411.908.125.820,00	101,94
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	215.000.000.000,00	234.213.042.995,00	108,94
4	Pajak Air Permukaan	180.000.000,00	277.381.200,00	154,10
5	Pajak Rokok	172.716.115.697,00	171.074.910.355,00	99,05
Jumlah		**1.347.894.743.697,00**	**1.397.772.209.370,00**	**103,70**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

B. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan yang direncanakan dari hasil retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp43.088.502.025,00 Sementara realisasinya adalah sebesar Rp45.811.953.262,71 atau tercapai sebesar 106,32%. Rincian target realisasi Retribusi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Realisasi Retribusi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	6.050.955.660,00	6.336.414.859,00	104,72
2	Retribusi Jasa Usaha	36.079.456.365,00	38.487.692.603,71	106,67
3	Retribusi Perizinan Tertentu	958.090.000,00	987.845.800,00	103,11
Jumlah		**43.088.502.025,00**	**45.811.953.262,71**	**106,32**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan milik daerah (BUMD), perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, yaitu: PD Taru Martani, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, PT. Anindya Mitra Internasional (AMI), PT. Yogya Indah Sejahtera (YIS), PT Asuransi Bangun Askrida, dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Pendapatan yang direncanakan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp52.604.081.931,77 dan hasil direalisasikan sebesar Rp52.502.631.979,68 atau tercapai sebesar 99,81%. Rincian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PD Taru Martani	493.211.000,00	493.207.600,00	99,99
2	Bank Pembangunan Daerah (BPD)	46.643.980.857,77	46.643.980.857,77	100,00
3	PT Anindya Mitra Internasional (AMI)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
4	PT Yogya Indah Sejahtera (YIS)	455.000.000,00	455.000.000,00	100,00
5	PT Asuransi Bangun Askrida	98.388.147,00	195.274.664,00	198,47
6	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	4.413.501.827,00	4.215.168.857,91	95,51
Jumlah		**52.604.081.831,77**	**52.502.631.979,68**	**99,81**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Regulasi yang mendasari penerimaan pendapatan ini adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah sebagai mandat Pasal 286 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas:

1. Pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/ cicilan;
2. Pendapatan dari Jasa Giro;
3. Pendapatan bunga Deposito;
4. Pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;
5. Pendapatan dari penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah;
6. Pendapatan dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh SKPD;
8. Pendapatan denda pajak;
9. Pendapatan denda retribusi;
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. Pendapatan dari pengembalian;
12. Pendapatan dari penyelenggaraan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
14. Pendapatan jasa layanan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
15. Pendapatan dari pengelolaan dana bergulir;
16. Pendapatan dari dana pembinaan dan jasa produksi Pengelolaan BUKP;
17. Pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
18. Pendapatan dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan dan jaminan pemeliharaan pada proses pengadaan dan pelaksanaan barang dan jasa;
19. Pendapatan dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; dan
20. Pendapatan dari denda lain-lain.

Pendapatan yang direncanakan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp75.272.703.003,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp97.023.974.981,61 atau tercapai sebesar 128,90%. Rincian realisasi pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.947.325.900,00	3.348.288.921,00	113,60
2	Penerimaan Jasa Giro	9.690.000.000,00	12.957.505.231,91	133,72
3	Pendapatan Bunga Deposito	20.000.000.000,00	30.340.659.699,02	151,70
4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	11.406.769,00	783.646.246,81	870,01
5	Pendapatan Denda Retribusi	603.590,00	7.092.870,00	1.175.11
6	Pendapatan dari Pengembalian	362.525.209,00	861.202.254,00	237,56
7	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8.960.436.000,00	8.679.169.000,00	96,86
8	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	136.437.900,00	270.187.900,00	198,03
9	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	20.178.812.050,00	22.715.677.908,00	112,57
10	Pendapatan dari pengelolaan BUKP	314.490.200,00	406.090.883,72	129,13
11	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.575.682.250,00	7.089.298.490,00	107,81
12	Pendapat Denda Lain-lain	2.317.390.635,00	2.658.529.062,00	114,72
13	Tindak Lanjut Hasil Temuan	600.000.000,00	1.439.636.041,71	239.939,34
14	Lain-Lain	3.776.992.500,00	5.466.990.473.24	144,74
Jumlah		**75.272.703.003,00**	**97.023.974.981,61**	**128,90**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

3.1.2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan diberikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan/kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas: (i) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak; (ii) Dana Alokasi Umum; dan (iii) Dana Alokasi Khusus. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp1.056.608.866.160,00 Sementara realisasinya sebesar Rp1.021.886.268.197,00 atau tercapai sebesar 96,71%. Rincian Dana Perimbangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Realisasi Dana Perimbangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	96.980.104.160,00	62.257.506.197,00	64,20
2	Dana Alokasi Umum	920.544.722.000,00	920.544.722.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	39.084.040.000,00	39.084.040.000,00	100,00
Jumlah		**1.056.608.866.160,00**	**1.021.886.268.197,00**	**96,71**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

Rincian penerimaan dari komponen Dana Perimbangan dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.2.3 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Pos penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah DIY terdiri dari: (i) Bagi Hasil Pajak; (ii) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam; dan (iii) Bagi Hasil Cukai. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp96.980.104.160 Sementara realisasinya sebesar Rp62.257.506.197 atau tercapai sebesar 64,20%. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak	89.282.965.000,00	52.873.989.500,00	59,22
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	148.863.397,00	2.240.864.697,00	1.505,32
3	Bagi Hasil Cukai	7.548.275.763,00	7.142.652.000,00	94,63
Jumlah		**96.980.104.160,00**	**62.257.506.197,00**	**64,20**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

3.1.2.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari DAU pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp920.544.722.000,00 dan realisasinya sebesar Rp920.544.722.000,00 atau mencapai 100% (sebelum dilakukan audit oleh BPK RI).

3.1.2.5 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. DAK yang diterima oleh Pemerintah Daerah DIY pada Tahun Anggaran 2015 diperuntukkan bagi: (i) Infrastruktur Jalan; (ii) Infrastruktur Irigasi; (iii) Kelautan dan Perikanan; (iv) Pertanian; (v) Kehutanan; dan (vi) Keselamatan Transportasi Darat. Penerimaan Daerah DIY yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp39.084.040.000,00 dan realisasinya sebesar sebesar Rp39.084.040.000,00 atau mencapai 100%.

Adapun perincian DAK pada Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kesehatan	1.698.780.000,00	1.698.780.000,00	100,00
2	Infrastruktur Jalan	14.366.070.000,00	14.366.070.000,00	100,00
3	Infrastruktur Irigasi	9.617.600.000,00	9.617.600.000,00	100,00
4	Kelautan dan Perikanan	4.440.510.000,00	4.440.510.000,00	100,00
5	Pertanian	6.673.750.000,00	6.673.750.000,00	100,00
6	Kehutanan	1.133.070.000,00	1.133.070.000,00	100,00
7	Keselamatan Transportasi Darat	1.154.260.000,00	1.154.260.000,00	100,00
Jumlah		**39.084.040.000,00**	**39.084.040.000,00**	**100,00**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

3.1.2.6 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Daerah DIY yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pada Tahun Anggaran 2015, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp782.292.989.414,00 sementara realisasinya sebesar Rp785.017.773.985,00 atau tercapai sebesar 101,35%. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	9.015.333.475,00	11.740.118.046,00	130,22
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	773.277.655.939,00	773.277.655.939,00	100,00
Jumlah		**782.292.989.414,00**	**785.017.773.985,00**	**101,35**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

Rincian realisasi penerimaan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Hibah

Pos penerimaan dari Pendapatan Hibah berasal dari badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri dan luar negeri. Pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp9.015.333.475,00 dan capaian realisasinya adalah sebesar

Rp11.740.118.046,00 atau tercapai sebesar 130,22%. Angka realisasi ini adalah angka realisasi sebelum dilakukan audit oleh BPK RI.

B. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Pos penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berasal dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus (dana keistimewaan). Dana Keistimewaan adalah implementasi dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dana dimaksud dialokasikan untuk membiayai kewenangan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus direncanakan sebesar Rp773.277.655.939,00 dan terealisasi sebesar Rp773.277.655.939,00 atau tercapai sebesar 100%. Rincian realisasi penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Penyesuaian	373.026.750.000,00	373.026.750.000,00	100
2	Dana Otonomi Khusus	400.250.905.939,00	400.250.905.939,00	100
Jumlah		**773.277.655.939,00**	**773.277.655.939,00**	**100**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

Kendala dan langkah tindak pemecahan persoalan dalam optimalisasi pendapatan daerah

Secara umum target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah mampu mencapai target yang ditetapkan, namun demikian dalam rangka lebih memacu peningkatan pendapatan tentu harus pula mengurai kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh SKPD berpendapatan. Kendala yang dihadapi antara lain:

1. Sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang ada di SKPD berpendapatan masih tradisional dan kurang terpelihara;
2. Beberapa lokasi sumber pendapatan daerah berada jauh dari pusat manajemen sehingga rentang kendali pengawasan dan pengendalian lemah;

Berdasarkan kendala tersebut di atas, secara bertahap telah dilakukan upaya perbaikan antara lain:

1. Memberikan pelatihan dan koordinasi intensif kepada bedahara penerimaan dan pengelola obyek pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan fungsi dan tanggungjawabnya, serta secara bertahap memenuhi kebutuhan anggaran.
2. Menyusun dan mengembangan aplikasi STS online berbasis accrual pada SIPKD untuk memudahkan menatausahakan pendapatan daerah;

Selain itu dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran PKB/ BBNKB oleh wajib pajak, telah dilakukan upaya untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya yakni dengan membuka gerai di pusat perbelanjaan, gerai *drive thru*, SMS 9600, bus samsat keliling, system online kesamsatan, dan juga dalam even-even perayaan sekaten dan hari jadi kabupaten/ kota. Sedangkan untuk perimbangan keuangan dilakukan koordinasi intensif ke pemerintah pusat maupun kantor regional di daerah agar porsi bagi hasil maupun transfer dari pusat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

3.2.1 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja daerah pada tahun 2015 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Anggaran belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memerhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, dimana keluaran tersebut seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2013 Pemda DIY pertama kali mendapatkan Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Keistimewaan Daerah Istimewa Yoyakarta. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan;
5. Tata Ruang.

3.2.2 Target dan Realisasi Belanja

Kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.806.092.624.463,02 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selanjutnya dari anggaran yang telah direncanakan tersebut terealisasi sebesar Rp3.496.425.502.266,45, atau terserap sebesar 91,86%. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.875.147.190.222,67	1.810.940.126.778,80	96,58
2	Belanja Langsung	1.930.945.434.240,35	1.685.485.375.487,65	87,29
Jumlah		**3.806.092.624.463,02**	**3.496.425.502.266,45**	**91,86**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

3.2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: (i)Belanja Pegawai; (ii) Belanja Hibah; (iii) Belanja Bantuan Sosial; (iv) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa; (v) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa; dan (vi) Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp1.875.147.190.222,67 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.810.940.126.778,00 atau terserap sebesar 96,58%. Realisasi/ penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	554.645.445.603,00	540.817.461.612,00	97,51
2	Belanja Hibah	582.804.703.282,00	562.260.178.868,00	96,47
3	Belanja Bantuan Sosial	9.134.490.000,00	7.073.500.000,00	77,44
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	596.060.006.789,90	583.092.613.250,80	97,82

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	122.414.452.940,00	117.696.373.048,00	96,15
6	Belanja Tidak Terduga	10.088.091.607,77	0,00	0,00
Jumlah		**1.875.147.190.222,67**	**1.810.940.126.778,80**	**96,58**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

A. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk membiayai gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri Sipil ,dan kenaikan gaji, pemberian gaji ketiga belas, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai. Alokasi anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp554.645.445.603,00 dan direalisasikan sebesar Rp540.817.461.612,00 atau 97,51%. Secara rinci realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14 Realisasi Belanja Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	428.239.610.203,00	415.509.566.222,00	97,03
2	Tambahan Penghasilan PNS	81.352.271.500,00	80.688.580.949,00	99,18
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH	8.172.000.000,00	8.145.000.000,00	99,67
4	Biaya Insentif Pajak Daerah	35.597.845.840,00	35.218.083.841,00	98,93
5	Biaya Insentif Retribusi Daerah	1.283.718.060,00	1.256.230.600,00	97,86
Jumlah		**554.645.445.603,00**	**540.817.461.612,00**	**97,51**

Sumber: DPPKA DIY, 2015

B. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggran Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp582.804.703.282,00 yang dipergunakan untuk belanja

hibah kepada masyarakat. Dari anggaran yang telah direncanakan tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp562.260.178.868,00 atau 96,47%.

Tabel 3.15 Realisasi Belanja Hibah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah Urusan Pendidikan	523.694.772.307,00	516.707.835.000,00	98,67
2	Hibah Urusan Kesehatan	850.000.000,00	850.000.000,00	100
3	Hibah Urusan Sosial	1.583.100.000,00	1.561.100.000,00	98,61
4	Hibah Urusan Kebudayaan (Keistimewaan)	17.905.624.025,00	17.905.624.025,00	100
5	Hibah Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	25.000.000,00	25.000.000,00	100
6	Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	3.750.000.000,00	3.380.000.000,00	90,13
7	Hibah Urusan Ketahanan Pangan	2.470.000.000,00	2.210.000.000,00	89,47
8	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	775.000.000,00	775.000.000,00	100
9	Hibah Urusan Komunikasi & Informatika	1.800.000.000,00	1.794.612.893,00	100
10	Hibah Urusan Pertanian	225.000.000,00	225.000.000,00	100
11	Hibah Urusan Kehutanan	1.000.750.000,00	1.000.750.000,00	100
12	Hibah Kepada Organisasi Sosial, Sosial Lainnya	2.000.000.000,00	0	0
13	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	10.000.000.000,00	7.850.000.000,00	78,50
14	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	8.750.200.000,00	0	0
15	Hibah Urusan Keistimewaan	7.9750256.950,00	7.975.256.950,00	100
Jumlah		**582.804.703.282,00**	**562.260.178.868,00**	**96,47**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

C. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan Sosial digunakan untuk meningkatkanb kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, yang diberikan kepada kelompok/ anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/ tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar

Rp9.134.490.000 realisasi anggaran sebesar Rp7.073.500.000 atau sebesar 77,44%. Secara rinci realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/ atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	1.160.990.000,00	0	0
2	Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan	7.973.500.000,00	7.073.500.000,00	88,71
Jumlah		**9.134.490.000,00**	**7.073.500.000,00**	**77,44**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

D. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota dan pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/ realisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tahun Anggaran 2015, Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp596.060.006.789,90 dan realiasasi anggaran sebesar Rp583.092.613.250,80 atau mencapai 97,82%. Secara rinci realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17 Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	111.691.710.209,19	109.896.115.250,34	98,39
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	130.830.367.106,29	127.655.949.157,89	97,57
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	70.705.811.431,70	68.912.031.906,03	97,46
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul	81.085.400.715,16	78.539.123.335,45	96,86
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	201.746.717.327,56	198.089.393.601,09	98,19
Jumlah		**596.060.006.789,90**	**583.092.613.250,80**	**97,82**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

E. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/ atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangandapat bersifat umum dan bersifat khusus. Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi kabupaten/ kota dan atau pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Yang Pemanfaatannya ditetapkan oleh pemerintah daerah. yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota. Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp122.414.452.940,00 dan direalisasikan sebesar Rp117.696.373.048,00 atau sebesar 96,15%. Rincian realisasi belanja bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota**			
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta	2.500.000.000,00	2.499.987.000,00	99,99
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100
	Jumlah	**15.000.000.000,00**	**14.999.987.000,00**	**99,99**
B.	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa**	**1.710.000.000,00**	**1.710.000.000,00**	**100**
	Jumlah	**1.710.000.000,00**	**1.710.000.000,00**	**100**

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
C.	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda/Pemdes Lainnya**	**2.165.000.000,00**	**2.165.000.000,00**	**100**
	Jumlah	**2.165.000.000,00**	**2.165.000.000,00**	**100**
D.	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/ Kota Yang Bersifat Khusus**			
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus	8.752.750.000,00	7.425.350.000,00	84,83
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus	29.297.100.000,00	28.160.700.000,00	96,12
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus	12.449.900.000,00	12.449.900.000,00	100
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus	25.313.025.000,00	25.008.225.000,00	98,80
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus	26.366.550.000,00	24.627.950.000,00	93,41
	Jumlah	**102.179.325.000,00**	**97.672.125.000,00**	**95,59**
E.	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**	**1.360.127.940,00**	**1.149.261.048,00**	**84,50**
	Jumlah	**1.360.127.940,00**	**1.149.261.048,00**	**84,50**
	Jumlah Total	**122.414.452.940,00**	**117.696.373.048,00**	**96,15**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

F. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/ kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2015, Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp10.088.091.607,77 dan terealisasi sebesar Rp0,00.

3.2.2.2 Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik

Belanja Langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Alokasi Anggaran belanja langsung pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.930.945.434.240,35. Dari anggaran sejumlah tersebut, yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.685.485.375.487,65 atau terserap sebesar 87,29%. Secara rinci realisasi/ penyerapan anggaran Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19 Realisasi Belanja Langsung Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	139.328.480.233,00	128.971.492.274,00	92,57
2	Belanja Barang & Jasa	1.059.085.052.193,25	928.950.949.598,65	87,71
3	Belanja Modal	732.531.901.814,10	627.602.185.565,00	85,68
Jumlah		**1.930.945.434.240,35**	**1.685.524.627.437,65**	**87,29**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan Dana Keistimewaan untuk membiayai program-program pendukung keistimewaan. Kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp547.450.000.000,00 dengan rincian dianggarkan Belanja Langsung sebesar Rp521.569.119.025,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp25.880.880.975,00. Rincian penyerapan Dana Keistimewaan sebesar Rp477.494.515.166,00 dengan rincian melalui Belanja Langsung sebesar Rp451.613.634.191,00 dan melalui Belanja Hibah sebesar Rp25.880.880.975,00.

Anggaran Belanja Langsung sejumlah Rp1.930.945.434.240,35, di dalamnya terdapat anggaran dana keistimewaan sebesar Rp521.569.119.025,00 sehingga Anggaran Belanja Langsung Non Dana Keistimewaan adalah sebesar Rp1.409.376.315.215,35 dan realisasi sebesar Rp1.233.871.741.296,65 atau 87,54%. Anggaran dan realisasi Belanja Langsung masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20 Realisasi Belanja Langsung (Non Dana Keistimewaan) Menurut SKPD DIY Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	199.658.313.096,00	179.793.562.376,00	90,05
2	Dinas Kesehatan	141.828.018.664,25	105.432.509.926,00	73,34
3	Rumah Sakit Grhasia	29.365.384.111,71	21.808.064.689,00	74,26
4	Dinas PU, Perum dan Energi SDM	329.286.060.538,00	306.456.416.846,00	93,07
5	BAPEDA	15.580.442.600,00	14.206.100.721,00	91,18
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	105.886.986.168,00	92.442.834.357,00	87,30
7	Badan Lingkungan Hidup	14.132.889.025,00	12.949.636.828,00	91,63
8	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	23.665.958.500,00	20.480.244.358,00	86,54
9	Dinas Sosial	46.976.025.659,17	41.684.939.621,00	88,54
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	43.603.139.174,00	40.846.938.612,00	93,68
11	Disperindagkop	21.080.785.650,00	19.533.762.482,00	92,66
12	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	11.675.860.000,00	10.991.524.671,00	94,14
13	Dinas Kebudayaan	6.081.281.700,00	4.838.331.818,00	79,56
14	Badan Kesbanglinmas	8.629.333.984,00	8.382.380.400,00	97,14
15	Satuan Polisi Pamong Praja	3.519.013.360,00	3.340.703.300,00	94,93
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.431.544.820,00	12.660.444.658,00	94,26
17	Sekretariat Daerah	58.709.027.101,22	51.077.646.677,29	87,00
18	Sekretariat DPRD	40.060.175.200,00	35.294.103.754,00	88,10
19	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	71.205.492.890,00	48.434.692.119,36	68,02
20	Badan Pendidikan dan Pelatihan	17.923.957.450,00	15.784.205.297,00	88,06
21	Inspektorat	5.708.793.150,00	5.549.050.370,00	97,20
22	Badan Kepegawaian Daerah	22.925.236.600,00	18.645.063.154,00	81,33
23	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	9.555.674.420,00	6.836.927.847,00	71,55
24	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	46.022.092.200,00	43.382.702.518,00	94,26
25	Dinas Pertanian	30.867.146.679,00	28.568.094.614,00	92,55
26	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	21.959.102.652,00	20.373.210.996,00	92,78
27	Dinas Pariwisata	18.787.632.600,00	17.530.651.759,00	93,31
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.250.947.223,00	46.546.996.528,00	90,82
Jumlah		**1.409.376.315.215,35**	**1.233.871.741.296,65**	**87,55**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

Tabel 3.21 Realisasi Belanja Langsung (Dana Keistimewaan) Menurut SKPD DIY Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Urusan Kelembagaan			
1	Biro Organisasi	1.650.000.000,00	1.476.455.568,00	89,48
	Urusan Kebudayaan			
1	Dinas Kebudayaan	245.618.896.170,00	201.309.054.985,00	81,96
2	Museum Sonobudoyo	11.524.418.600,00	10.935.247.296,00	94,89

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	21.425.694.025,00	20.027.102.812,00	93,47
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	17.578.339.000,00	15.823.904.088,00	90,02
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	17.918.617.700,00	15.539.260.757,00	86,72
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman	7.965.205.200,00	6.801.478.775,00	85,39
7	Dinas Pariwasata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta	10.757.880.925,00	6.943.397.118,00	64,54
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	12.217.203.000,00	10.675.282.715,00	87,38
9	Dinas Kesehatan	323.117.500,00	287.286.420,00	88,91
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.307.428.500,00	14.304.539.470,00	99,98
11	Badan Lingkungan Hidup	2.026.624.600,00	1.989.241.950,00	98,16
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	135.000.000,00	127.524.400,00	94,46
13	Disperindagkop	8.110.374.000,00	7.459.909.000,00	91,98
14	Kantor Perwakilan Daerah	4.793.281.000,00	4.140.648.000,00	86,38
15	Badan Kesbanglinmas	288.715.800,00	277.798.900,00	96,22
16	Biro Hukum	750.000.000,00	623.315.600,00	83,11
17	Biro Administrasi Pembangunan	692.278.000,00	681.403.250,00	98,43
18	Biro Umum, Humas dan Protokol	5.956.092.000,00	5.405.468.000,00	90,76
19	Badan Pendidikan dan pelatihan	285.868.300,00	282.041.300,00	98,66
20	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.210.000.000,00	1.032.221.843,00	85,31
21	Dinas Pariwisata	12.138.518.000,00	11.821.148.600,00	97,39
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.235.406.710,00	3.276.584.410,00	77,36
23	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	248.000.000,00	143.283.650,00	57,78
24	Biro Tata Pemerintahan Setda Yogyakarta	3.750.000.000,00	58.912.200,00	1,57
25	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo	10.574.805.000,00	10.556.908,00	99,83
26	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY	5.968.235.970,00	5.791.958.500,00	97,05
	Urusan Pertanahan			
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	2.668.514.000,00	2.234.701.575,00	83,74
2	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo	1.421.137.000,00	1.283.144.525,00	90,29
3	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	1.810.526.000,00	1.728.103.300,00	95,45
4	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul	2.575.287.000,00	2.285.991.700,00	88,77
5	Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman	1.526.391.000,00	1.397.335.700,00	91,55
6	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta	598.145.000,00	461.109.250,00	77,09

No	SKPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Urusan Tata Ruang			
1	Dinas PU, Perum dan Energi SDM	92.673.187.700,00	90.859.114.365,00	98,04
2	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.815.149.000,00	11.544.017.519,00	97,71
3	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	1.200.000.000,00	384.421.000,00	32,04
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta	3.000.000.000,00	2.136.845.000,00	71,23
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman	1.267.035.000,00	1.220.997.000,00	96,37
6	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo	1.651.421.000,00	1.642.557.850,00	99,46
7	Dinas Perhubungan, Kominfo Kabupaten Kulon Progo	193.516.000,00	193.516.000,00	100,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul	1.375.524.800,00	1.280.864.500,00	93,12
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	924.166.500,00	791.041.500,00	85,60
10	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul	300.000.000,00	259.376.775,00	86,46
	Jumlah	**547.450.000.000,00**	**477.494.515.166,00**	**87,22**

Sumber: DPPKA DIY, 2016

Anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2015 sebesar Rp547.450.000.000,00 tersebut dianggarkan pada Belanja Langsung sebesar Rp521.569.119.025,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp25.880.880.975,00 sedangkan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan Tahun 2015 sebesar Rp477.494.515.166,00 melalui Belanja Langsung sebesar Rp451.613.634.191,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp25.880.880.975,00.

3.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

3.3.1 Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dan implementasi belanja daerah antara lain:

1. Pengalokasian belanja daerah yang terkait dengan kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

   Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di DIY, APBD DIY telah dialokasikan anggaran belanja untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui mekanisme APBD Kabupaten/ kota. Pada pelaksanaannya terjadi perbedaan persepsi/ penafsiran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, terkait dengan pengalokasian anggaran belanja pada rekening bantuan keuangan bersifat khusus pada APBD DIY dan pengalokasian pada rekening bantuan sosial pada APBD Kabupaten/ Kota. Perbedaan penafsiran terhadap penempatan alokasi anggaran belanja menimbulkan tarik ulur kepentingan dalam menentukan prioritas belanja.
2. Antisipasi yang kurang akurat terhadap permasalahan masyarakat sebagai akibat dari penafsiran kewenangan dan produk-produk hukum yang belum lengkap antar SKPD, antara SKPD dengan instansi sektoral maupun antara SKPD Pemerintah DIY dengan SKPD Kabupaten/ Kota.
3. Pengelolaan Dana Keistimewaan

   Pelaksanaan program kegiatan dan keuangan dana keistimewaan pada tahun anggaran 2015 masih mengalami kendala, antara lain regulasi urusan Keistimewaan, kesiapan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/ kota terkait dengan pengambilan keputusan dan pola koordinasi, serta belum ada pembatasan waktu verifikasi laporan kinerja.

3.3.2 Solusi

1. Belanja daerah disusun berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Alokasi belanja diperuntukkan sesuai dengan kewenangan dan dipergunakan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum, mengembangkan sistem jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran belanja daerah harus diperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian sasaran maupun target sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan anggaran belanja juga dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku dengan memberikan kepastian regulasi sebagai payung hukumnya.

2. Dioptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD, antara SKPD dengan instansi sektoral maupun antara SKPD Pemerintah DIY dengan SKPD Kabupaten/ Kota berkaitan kewenangan dan perkembangan regulasi.
3. Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dilakukan dengan peningkatan koordinasi antar *stakeholder*, menyusun regulasi baru dan merealisasikan program kegiatan sesuai dengan kemampuan pelaksana, dan mengusulkan batasan pelaksanaan verifikasi laporan kinerja ke Pemerintah.

3.4 PEMBIAYAAN DAERAH

3.4.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan umum pembiayaan tahun 2015 antara lain:

1. Mengalokasikan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMD.
2. Tetap menjaga defisit anggaran dengan memperhatikan batas maksimal defisit anggaran dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD.
3. Memanfaatkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan perhitungan dan perkiraan yang rasional.

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban, serta guna menjaga kredibilitas Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.4.2 Target dan Realisasi Pembiayaan

3.4.2.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pada Tahun Anggaran 2015 Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp498.330.738.232,25 dan direalisasikan sebesar Rp511.093.118.507,25 atau sebesar 102,56%.

3.4.2.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2015, Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp50.000.000.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut, yang direalisasikan adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 100%.

3.5 PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN

3.5.1 Kinerja BUMD

3.5.1.1 Bank Pembangunan Daerah DIY

Hasil pengelolaan PT. Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp46.643.980.857,77 dapat direalisasikan sebesar Rp46.643.980.857,77 atau 100,00% dan meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp43.220.540.695,00. Hasil pengelolaan PT. Bank Pembangunan Daerah tersebut merupakan deviden hasil operasi perusahaan tahun buku 2014, dimana total aset sebesar Rp7.821.133.227.052,00 dana pihak ketiga sebesar

Rp6.849.542.419.478,00 modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp559.485.000.000,00 dan laba bersih sebesar Rp156.162.697.087,00. Modal disetor Pemda DIY sebesar Rp233.500.000.000,00 sehingga rasio bagian laba terhadap penyertaan modal sebesar 19,98%, lebih kecil dibandingkan tahun lalu sebesar 23,55%. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2014 sebesar Rp50.000.000.000,00 yang dicairkan pada akhir tahun.

Pada tahun 2015 telah dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp50.000.000.000,00 sehingga modal disetor dan ditempatkan penuh dari Pemda DIY menjadi sebesar Rp283.500.000.000,00 atau 55,59% dari modal dasar yang harus dipenuhi Pemda DIY sebesar Rp510.000.000.000,00. Sisa modal yang belum disertakan sebesar Rp226.500.000.000,00 yang ditargetkan untuk dipenuhi paling lambat tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, dimana Bank dengan modal inti di bawah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dibatasi kegiatannya, maka pemenuhan modal dasar oleh masing-masing pemegang saham menjadi perhatian serius.

Saat ini modal inti PT. Bank Pembangunan Daerah DIY masih berada pada BUKU 1, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Kegiatan usaha yang diperkenankan adalah penghimpunan dan penyaluran dana, *trade finance*, kegiatan keagenan dan kerjasama, sistem pembayaran dan *e-banking* dengan cakupan terbatas, penyertaan modal sementara dalam penyelamatan kredit, serta jasa lainnya dalam rupiah (*Basic Bank Service*).

Untuk pemenuhan kekurangan modal dasar sebesar Rp226.500.000.000,00 Pemda DIY telah melakukan perubahan Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan perubahan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Pada Tahun Anggaran 2016 telah direncanakan melalui APBD Tahun 2016 penyertaan modal kepada PT. Bank

Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp133.000.000.000,00 dan akan dicairkan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2016, sedangkan kekurangan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp93.500.000.000,00 akan dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2016.

3.5.1.2 PT. Anindya Mitra Internasional (AMI)

Hasil pengelolaan PT. Anindya Mitra Internasional pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp500.000.000,00 atau 100% meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp400.000.000,00. Hasil pengelolaan PT. Anindya Mitra Internasional tersebut merupakan deviden hasil operasi perusahaan tahun buku 2014, dimana total aset sebesar Rp36.410.514.544,00, total kewajiban sebesar Rp17.881.676.207,00 dan total ekuitas sebesar Rp18.528.838.337,00. Modal disetor Pemda DIY sebesar Rp20.444.000.000,00 sehingga rasio bagian laba terhadap penyertaan modal sebesar 2,45%, lebih besar dibanding tahun lalu sebesar 1,96%.

Pendapatan Usaha pada tahun buku 2014 sebesar Rp7.039.677.530,00 mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebesar Rp5.935.526.678,00. Adapun unit usaha penyumbang pendapatan adalah sebagai berikut:

Holding	Rp	1.036.883.333,00	atau	14,73%
Unit Percetakan	Rp	171.487.750,00	atau	2,44%
Unit Pertambangan	Rp	1.331.716.208,00	atau	18,92%
Unit Pariwisata	Rp	972.192.831,00	atau	13,81%
Unit Sagan Resto	Rp	804.040.462,00	atau	11,42%
Unit Realty	Rp	1.611.443.097,00	atau	22,89%
Unit Transportasi	Rp	1.111.913.849,00	atau	15,79%

Laba kotor yang dihasilkan pada Tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun lalu di mana pada Tahun 2013 sebesar Rp4.550.433.702,00 dan pada Tahun 2014 menjadi sebesar Rp5.468.586.814,00. Namun beban usaha juga meningkat di mana pada Tahun 2013 sebesar Rp5.538.737.358,00 menjadi sebesar Rp8.094.837.079,00 pada Tahun 2014 sehingga mengakibatkan pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 mengalami rugi usaha sebesar Rp988.303.656,00 pada Tahun 2013 dan sebesar Rp2.626.250.265,00. Dengan adanya pendapatan lain-lain bersih pada Tahun 2014

sebesar Rp9.630.338.554,00 dan pada Tahun 2013 sebesar Rp483.925.492,00 maka laba bersih yang dihasilkan pada Tahun 2014 sebesar Rp7.004.088.290,00 dan pada Tahun 2013 masih rugi sebesar Rp504.378.164,00.

3.5.1.3 PT. Taru Martani

Hasil pengelolaan PD. Taru Martani pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp493.211.100,00 dapat direalisasikan sebesar Rp493.207.600,00 atau 100% meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu hanya sebesar Rp40.404.234,00. Hasil pengelolaan PD. Taru Martani tersebut adalah deviden hasil operasi perusahaan tahun buku 2014, dimana total aset sebesar Rp20.281.234.614,00, total kewajiban sebesar Rp3.541.493.765,00 dan ekuitas sebesar Rp16.739.740.849,00. Adapun penyertaan modal Pemda DIY sebesar Rp15.842.500.000,00 maka rasio deviden terhadap penyertaan modal pada Tahun 2014 sebesar 3,11% meningkat dibanding tahun lalu 0,26%.

Pendapatan usaha bersih pada Tahun 2014 yang berupa penjualan cerutu dan tembakau shag sebesar Rp9.583.564.091,00 mengalami penurunan dibanding Tahun 2013 sebesar Rp11.541.641.212,00 namun laba bersih yang dihasilkan pada tahun buku 2014 sebesar Rp850.120.799,00 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2013 yang rugi sebesar Rp120.082.293,00. Hal ini disebabkan pada Tahun 2014 memperoleh pendapatan di luar usaha yang berupa pendapatan bunga, jasa giro, selisih kurs valuta asing dan pendapatan lainnya sebesar Rp584.604.723,00 sedangkan pada Tahun 2013 terdapat beban diluar usaha yang antara lain selisih kurs, bunga pinjaman dan lainnya sebesar Rp967.845.713,00.

3.5.1.4 Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Perdesaan Provinsi DIY, lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan perekonomian perdesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat perdesaan, dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan murah. Hasil pengelolaan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp4.413.501.827,00 direalisasikan sebesar Rp4.275.708.908,79 atau 96,88% meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp4.150.563.156,00.

Tidak tercapainya rencana dan realisasi hasil pengelolaan BUKP ini antara lain disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang pengelola di beberapa BUKP yang mengakibatkan kerugian. Jumlah BUKP rugi mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2013 terdapat 10 BUKP dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 12 BUKP. Di samping itu, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang diberikan waktu untuk menyesuaikan paling lambat tanggal 8 Januari 2016, meresahkan para pengelola BUKP. Karena apabila tidak dapat menyesuaikan maka BUKP tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Adapun dana masyarakat yang dihimpun pada Tahun 2014 sebesar Rp109.446.006.272,00 atau 61,02% dari total aset. Hal ini menjadi perhatian serius Pemda DIY dan pada Tahun 2016 akan segera dilakukan penataan kelembagaan BUKP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.6 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Penerapan otonomi Daerah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Agar tujuan mulia tersebut dapat tercapai, maka suatu Pemerintah Daerah yang baik akan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Dalam kerangka ini, salah satu elemen pentingnya adalah pengelolaan barang milik daerah karena sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pengertian uang termasuk didalamnya berupa barang yang dapat dijadikan Barang Milik Negara/ Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan barang Daerah berpedoman dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan barang milik Daerah.

1. Berbagai tantangan dan respon tentunya telah dilakukan sebagai upaya nyata yang sistematis dan menyeluruh utamanya Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah telah menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan barang milik daerah dan tentunya secara seksama masing-masing SKPD/ Unit Kerja melakukan/

melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang dengan mempedomani Peraturan Gubernur dimaksud.

2. Manajemen Barang daerah seperti kita lihat saat ini telah berkembang cukup pesat, bermula dengan orientasi yang statis, berkembang menjadi dinamis, inisiatif dan strategis.
   a. Orientasi yang statis, dengan memperhatikan kontrol biaya pengadaan, pemeliharaan/ perawatan dan penggunaan.
   b. Dinamis sudah melakukan kegiatan proaktif manajemen, diketahui nilai barang, akuntabilitas pengelolaan, sudah dilakukan optimalisasi pemanfaatan barang.
3. Strategi manajemen telah dilakukan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik dengan meliputi kegiatan antara lain:
   a. Melakukan inventarisasi dengan baik
   b. Dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektif.
   c. Monitoring dan evaluasi.

3.6.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pada Tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

3.6.1.1 Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 38);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 74).

3.6.1.2 Tantangan dan Permasalahan

Untuk memudahkan pencatatan serta pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) secara akurat dan cepat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan suatu aplikasi sistem informasi manajemen barang milik daerah yang bernama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang terintegrasi antar SKPD secara on-line. Aplikasi ini mulai digunakan sepenuhnya pada Tahun Anggaran 2014, dimana pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Namun aplikasi SIPKD Modul Aset ini baru dapat memisahkan antara Aset Tetap Intra Komptabel, Aset Tetap Ekstra Komptabel dan Aset Tetap Lainnya sehingga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengembangkan aplikasi SIPKD Modul Aset,

untuk meningkatkan kualitas pengendalian dalam pengelolaan aset serta mendukung percepatan penghimpunan dan kompilasi laporan aset, termasuk di dalamnya fitur penyusutan aset dan integrasi dengan SIPKD Keuangan.

3.6.1.3 Upaya-upaya Yang Dilaksanakan

Atas permasalahan tersebut diatas untuk menyajikan nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Neraca masih menggunakan cara manual yang diolah dari aplikasi SIPKD Modul Aset. Sehingga terus menerus melakukan pendampingan kepada kepada pengurus barang dan petugas akuntansi SKPD/ Unit Kerja dalam penyusunan laporan keuangan SKPD per-Triwulan dalam tahun 2015.

3.6.1.4 Capaian

Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui DPPKA DIY telah melakukan pendampingan kepada pengurus barang dan petugas akuntansi SKPD/ Unit Kerja dalam penyusunan laporan inventaris barang milik daerah khususnya untuk persiapan akrual, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.22 Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2014 (Saldo Awal 2015) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	INSTANSI	JUMLAH BARANG	NILAI ASET (Rp)
1	Sekretariat DPRD	3.187	594.478.172.714
2	Biro Tata Pemerintahan	1.688	8.671.164.420
3	Biro Hukum	6.674	4.488.102.863
4	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat & Kemasyarakatan	439	1.538.645.675
5	Biro Administrasi Perekonomian & Sumber Daya Alam	679	1.153.046.191
6	Biro Administrasi Pembangunan	676	1.614.774.928
7	Biro Organisasi	496	1.251.266.948
8	Biro Umum, Humas & Protokol	8.118	37.159.591.695
9	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & Energi Sumber Daya Mineral	8.307	2.866.339.238.019
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	7.853	212.572.877.277
11	Dinas Kesehatan	12.538	81.101.227.764
12	RS. Grhasia	6.443	49.595.087.438
13	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	196.744	411.299.189.111
14	Dinas Kebudayaan	88.564	118.123.159.049
15	Dinas Sosial	17.788	130.873.184.042

NO	INSTANSI	JUMLAH BARANG	NILAI ASET (Rp)
16	Badan Pemberdayaan Perempuan & Masyarakat	1.283	6.466.134.561
17	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	11.545	33.502.014.206
18	Dinas Pertanian	10.187	153.536.471.765
19	Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan	1.402	10.869.005.155
20	Dinas Kehutanan & Perkebunan	8.036	83.966.484.578
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.810	113.766.511.019
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah	5.437	45.368.883.358
23	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset	10.970	515.451.325.233
24	Inspektorat DIY	1.801	8.293.816.620
25	BAPPEDA	5.436	11.991.528.698
26	Badan Lingkungan Hidup	2.245	8.832.217.848
27	Dinas Pariwisata	846	4.706.963.107
28	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	1.447	6.042.709.982
29	Satuan Polisi Pamong Praja	1.237	3.630.796.855
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.080	93.565.185.361
31	Badan Kepegawaian Daerah	4.166	21.395.720.989
32	Badan Pendidikan dan Pelatihan	14.165	32.613.070.835
33	Badan Kerjasama & Penanaman Modal Daerah	5.396	27.318.103.887
34	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah	4.080	93.565.185.361
	JUMLAH	**460.874**	**5.729.888.054.615**

Catatan: untuk akumulasi penyusutan secara manual baru dalam proses pengerjaan

3.6.2 Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY

Pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Daerah DIY melalui DPPKA DIY kegiatan Peningkatan Status Hak Atas Tanah, hal ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian status kepemilikan atas tanah-tanah yang dikuasai dan tercatat di daftar inventaris barang Pemerintah DIY. Pada Tahun Anggaran 2015 menargetkan pensertifikatan 7 bidang tanah dan 125 warkah sertifikat tanah, namun telah terealisasi sebanyak 14 bidang tanah yang terdiri dari 11 bidang tanah telah selesai disertifikat dan masih dalam proses sebanyak 3 bidang, serta telah terealisasi 95 warkah sertifikat tanah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.23 Tanah Milik Pemerintah Daerah DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2015

No	Lokasi	Luas (m^2)	Keterangan
1	Cangkringan, Sleman	9.550	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor: P.00176
2	Cangkringan, Sleman	2.221	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor: P.00175
3	Cangkringan, Sleman	2.680	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor: P.00174
4	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	15.550	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor: P.00063
5	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	6.855	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor: P.00062
6	Panembahan, Kraton, Yogyakarta	8.530	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor: P.00012
7	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 dan 3 Yogyakarta	1.000	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor: P.00062
8	Jl. Trikora No. 4 Yogyakarta	173	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor: P.00061
9	Jl. Parangtritis, Timbulharjo, Sewon, Bantul	4.433	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor: P.00105
10	Bangkrung, Tridadi, Sleman	201	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor: P.00177
11	Kepek, Wonosari, Gunung Kidul	3.448	Sudah Hak Pakai An. Pemerintah Daerah DIY Nomor: P.00135
12	Kedungpoh, Nglipar, Gunung Kidul	15.000	Dalam Proses Pengukuran
13	Pengkol, Imogiri, Bantul	8.000	Dalam Proses Permohonan Hak
14	Jl. Tunjung No. 2 Baciro, Gondokusuman Yogyakarta	855	Dalam Proses Permohonan Hak

Tabel 3.24 Warkah Tanah Pemerintah Daerah DIY Pada Tahun 2015

No.	Kab/ Kota	Jumlah Warkah Tanah
1	Kota Yogyakarta	11
2	Kabupaten Kulon Progo	18
3	Kabupaten Gunung Kidul	19
4	Kabupaten Bantul	22
5	Kabupaten Sleman	25
Jumlah		**95**

Sumber: DPPKA DIY, 2015

Kegiatan Warkah Tanah Pemerintah Daerah DIY yakni kegiatan melengkapi data pendukung Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah DIY dari proses pengukuran sampai dengan terbit Sertifikat Hak Pakai. Kegiatan pem-warkah-an ini

sebagai bentuk salah satu Pengamanan Barang Milik Daerah yakni untuk mengantisipasi apabila ada pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap tanah-tanah Pemda DIY tersebut.

Salah satu kendala dalam melaksanakan proses pensertifikatan tanah yakni kekurangan data pendukung yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Daerah DIY.

Upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu menelusur dan mencari dokumen-dokumen yang diperlukan apabila tidak diketemukan dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait proses pensertifikatan tanah, seperti Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Desa.

3.6.3 Penghapusan

3.6.3.1 Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Dalam tahun 2015 ini terdapat beberapa SKPD yang merencanakan untuk melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak bisa digunakan kembali ataupun berkurang kemanfaatannya, dan dikarenakan adanya pengembangan kantor sehingga apabila tidak dihapus dari daftar barang milik daerah maka akan berakibat dapat menimbulkan biaya perawatan yang begitu besar.Usulan penghapusan yang telah diusulkan oleh masing-masing SKPPD berupa barang inventaris perlengkapan kantor lainnya, kendaraan dinas operasional, bangunan gedung, sisa bongkaran bangunan dan hewan ternak afkir yang tidak dapat berproduksi kembali.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah disebutkan bahwa Barang Milik Negara/ Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/ daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara Penjualan, Hibah, Tukar Menukar dan Penyertaan Modal.

A. Penjualan

Salah satu dari bentuk pemindahtanganan adalah penjualan Barang Milik Daerah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Sebagai bentuk kegiatan pemindahtanganan melalui penjualan ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya mendasarkan pada:

a. Pembentukan Tim Penjualan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 25/TIM/2014 tanggal 4 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2015. Tim penjualan Barang Milik Daerah ini akan melakukan penilaian dan penaksiran harga penjualan barang milik daerah setelah mengetahui bahwa barang milik daerah yang akan dipindahtangankan melalui penjualan masih mempunyai nilai ekonomis. Dengan dasar inilah maka Tim Penjualan Barang Milik Daerah melakukan perhitungan harga limit penjualan.
b. Melaksanakan Penjualan Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung kepada Masyarakat Umum. Penjualan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, mendasarkan:
    1) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/KEP/2015 Tanggal 10 Februari 2015 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung di Jalan Langensari, Pengok, Gondokusuman, Yogyakarta.
    2) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30/KEP/2015 Tanggal 10 Februari 2015 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung di Jalan Kusumanegara Nomor 168 Yogyakarta.
    3) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/KEP/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung di Jaranan, Panggungharjo, Sewon, Bantul.
    4) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 46/KEP/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung di Jalan Sorowajan Baru No.1 Banguntapan, Bantul
    5) Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2015 Tanggal 27 Maret 2015 tentang Persetujuan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa bangunan Gedung di Jalan Gondosuli nomor 6 Yogyakarta.

6) Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 104/KEP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa bangunan Gedung Eks.Panti Sosial Bina Netra Sadewa di Jalan Parangtritis km 5 Panggungharjo, Sewon, Bantul.
7) Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 106/KEP/2015 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pada UPTD Balai Pengembangan Bibit Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian di Sumber Agung, Jetis, Bantul.

c. Melaksanakan Penjualan Barang Milik Daerah Selain tanah dan Bangunan kepada Masyarakat Umum. Penjualan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, mendasarkan:
1) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115/KEP/2015 Tanggal 25 Mei 2015 tentang Persetujuan pemindahtanganan dan Penghapusan barang Milik Daerah Berupa Hewan Ternak Pada UPTD Balai Pengembangan Bibit Pakan ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian.
2) Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 169/KEP/2015 Tanggal 15 Juli 2015 tentang Persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia di Jalan Kaliurang KM 7 Yogyakarta.
3) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 193/KEP/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa 2(dua) Buah Tower lampu Stadion Mandala Krida pada UPTD Balai Pemuda dan Olahraga.

d. Melaksanakan Penjualan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris dan Perlengkapan Kantor lainnya kepada Masyarakat Umum. Penjualan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, mendasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 268/KEP/2015 tanggal 16 Nopember 2015 tentang Persetujuan pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya Tahun Anggaran 2015.

e. Melaksanakan Penjualan Barang Milik Daerah dengan lelang melalui KPKNL berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2(dua) dan Roda 4(empat) kepada Masyarakat Umum. Penjualan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, mendasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 257/KEP/2014 tentang Persetujuan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa kendaraan Dinas Operasional Daeri Daftar Barang Pengguna dan/ atau Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2014.

B. Hibah

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

a. Membentuk Tim dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 6/SEKDA/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2015
b. Melaksanakan Proses Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Ambulance kepada RSUD Wates Kulon Progo, RSUD Wonosari Gunungkidul dan RSUD Panembahan Senopati Bantul. Pelaksanaan hibah mendasar pada:
    1) Keputusan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/KEP/2015 Tanggal 10 Februari 2015 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun 2015.
    2) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 180/KEP/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang perubahan Atas Keputusan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 27/KEP/2015 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun 2015.
c. Melaksanakan Proses hibah Barang Milik Daerah berupa Papan Visual (Papan Billboard Peduli Lingkungan) kepada kelompok Peduli Lingkungan. Pelaksanaan hibah barang milik daerah ini mendasar pada Keputusan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 160/KEP/2015 Tanggal 15 Juli 2015 tentang Persetujuan hibah Barang Milik Daerah Berupa Papan Visual Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Masyarakat Tahun 2015.

d. Melaksanakan proses hibah barang milik daerah berupa tanah kepada pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan hibah ini mendasar pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97/KEP/2015 Tanggal 23 April 2015 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah sawah Yang Berlokasi di Beji, Wates, Kulon Progo Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

e. Melaksanakan hibah barang milik daerah selain tanah dan bangunan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Adapun pelaksanaan hibah barang milik daerah mendasarkan pada:
   1) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/KEP/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kepada pemerintah Kabupaten/ Kota.
   2) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/KEP/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun 2015.
   3) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93/KEP/2015 Tanggal 15 April 2015 tentang Persetujuan hibah Barang Milik Daerah Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2015.

3.6.3.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan Barang Milik Daerah kegiatan yang telah dilaksanakan:

a. Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 26/TIM/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah tahun anggaran 2015
b. Mengirimkan Surat Edaran Gubernur Nomor 933/09308 Tanggal 8 oktober 2015 tentang Penghapusan Barang Inventaris Tahun Anggaran 2015.
c. Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Selalu pengelola Barang Milik daerah sebagai dasar penghapusan Barang Milik daerah dari daftar BMD. Adapun keputusan Sekretaris Daerah Daerah istimewa Yogyakarta tang telah diterbitkan antara lain:
    1) Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 42/SEKDA/VII/2015 Tanggan 6 Juli 2015 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah.
    2) Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 55/SEKDA/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Daeri Daftar Barang Milik Daerah.
    3) Keputusan Sekretaris Daerah daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 54/SEKDA/X/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah.

3.6.3.3 Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang/keuangan milik daerah Bendaharawan dalam ketugasannya apabila terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian melalui proses Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan terhadap Pegawai dalam kedudukannya sebagai Bukan Bendaharawan dan karena perbuatannya melanggar hukum sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian maka kepadanya dapat dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Untuk mendukung kegiatan sebagaimana tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Gubernur Nomor 6/KEP/2015 tanggal 7 Januari 2015 dan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Nomor 931/00546/PBD Tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Nomor 931/04199/PBD Tanggal 8 Juni 2015.

   Adapun yang dilakukan oleh Tim adalah menindaklanjuti Hasil Pemeriksaaan Khusus dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pelaksanaan penyelesaian TP-TGR, yaitu:

   1. Kepada Non Pegawai Negeri Sipil selama tahun 2015.
      - Sejak awal penagihan (TA. 2009) sebanyak 61 orang, sampai dengan akhir tahun 2015 masih perlu melakukan penyelesaian/ penagihan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.
      - Tahun 2015 melaksanakan penagihan terhadap 1 (satu) orang Non PNS dan sampai dengan akhir tahun 2015 masih perlu melakukan penyelesaian/ penagihan sebanyak 1 (satu) orang (belum melakukan penyelesaian/ pelunasan).
   2. Kepada Pegawai Negeri Sipil dalam tahun 2015.
      - Tahun 2015 pada bulan Mei telah terjadi kehilangan barang milik daerah berupa Toyota Kijang Innova G Minibus/ MP dan status penggunaan barang milik daerah tersebut berada di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat DIY dengan melakukan pemeriksaan dan sebagain Hasil pemeriksaan telah dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus X.020/20/PK/2015 Tanggal 15 Juli 2015. Selanjutnya terkait dengan kerugian Daerah sebagaimana dimaksut, telah ditindaklanjuti dengan Sidang Majelis

Pertimbangan Tuntuntan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan Upaya Damai, hasil dari upaya damai adalah yang bersangkutan (subyek yang menyebabkan adanya kerugian Daerah) bersedia untuk mengembalikan kerugian Daerah dengan cara melakukan pembayaran secara angsuran per semester selama 4 semester. Hal tersebut dibuktian dengan ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak No 024/02256/S Tanggal 19 Agustus 2015. Pengembalian Kerugian Daerah untuk Semester I mulai 1 September 2015 s/d 28 Februari 2016.

b. Membuat Laporan Gubernur mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Keuangan Daerah dengan surat No. 931/0619 Tgl. 22 Januari 2014 untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemda DIY Semester II per 31 Desember 2014 dan surat No. 931/7443 Tgl. 22 Juli 2015 untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemda DIY Semester I per 30 Juni 2015.

3.6.4 Pendayagunaan Barang Daerah

3.6.4.1 Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, pengaturan terhadap pemanfataan barang milik daerah menjadi lebih dinamis dan terarah seiring perkembangan dan dinamika pengelolaan keuangan daerah.

Pemanfaatan itu sendiri merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sebagaimana Pasal 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara:

a. Sewa
b. Pinjam pakai
c. Kerjasama Pemanfaatan
d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

Pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, meliputi:

A. Barang milik daerah berupa Tanah dan/ atau Bangunan yang dimanfaatkan melalui sewa ada sebanyak 45 (empat puluh lima) bidang sebagaimana tersaji pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25 Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/ atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	LOKASI	PENYEWA	REALISASI PENDAPATAN SEWA 2015 (Rp)	KETERANGAN
1	Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo	PT. Formula Land	52.900.000	-
2	Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD	104.186.250	-
3	Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo	PT. Amarta Karya	21.091.000	-
4	Tanah dan Bangunan Eks Diklat Perindustrian, Malangan, Ring Road Selatan	Yayasan YAB	47.300.000	-
5	Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji	Yayasan Wira Husada	108.817.000	-
6	Tanah dan Bangunan Eks Gudang pangan sbl timur Jl. Abubakar Ali	Sunarti	14.000.000	-
7	Tanah bekas OG No.16 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Pemdes Sumbermulyo	3.250.000	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2014-2019)
8	Tanah di pantai Glagah, Kulon Progo	Sumantoyo	2.357.900	-
9	Tanah dan Bangunan eks Rumah Dinas Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	BUKP Gondokusuman	16.500.000	-
10	Tanah di Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Dharmapala	2.431.000	-
11	Tanah & Bangunan di Jl. Jenggotan	PT. Cemara Gading	15.000.000	-

No	LOKASI	PENYEWA	REALISASI PENDAPATAN SEWA 2015 (Rp)	KETERANGAN
12	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	9.166.000	-
13	Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta	dr. Soedarman	9.922.500	-
14	Tanah di Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki	10.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2015-2017)
15	Tanah dan Bangunan di Kedongkiron,Dongkelan, Yogyakarta	UD. Surya Tani	8.228.000	-
16	Tanah di Ambarketawang, Jl. Jogja - Wates, Sleman	Mulyono	2.126.200	-
		Hadi P/ Sukani	-	(sudah dibayar pada tahun 2014)
		Tri Ruhananto	3.980.600	
		Surib	9.421.200	
17	Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Kelompok Tani Tirto Manunggaal	-	(sudah dibayar pada tahun 2014)
18	Tanah dan Bangunan JEC	PT. Buanaland Agung	2.542.210.000	-
19	Lahan Parkir Basement Malioboro Mall	PT. Yogya Indah Sejahtera	1.118.148.800	Terdiri dari: Sewa Tahun III tahap 3 Rp319.775.700 Sewa Tahun IV tahap 1&2 Rp798.373.100
20	Tanah di Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman	Suyanto	-	Berakhir tgl 25 Juni 2015 (Sewa sudah dibayar tahun 2014)
21	Tanah di Jl. Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta	CV. Cipta Anugerah Pratama	-	(sudah dibayar pada tahun 2014)
22	Tanah dan Bangunan di Jl. Jenggotan, Pingit, Jetis, Yogyakarta	Badan Anti Korupsi	8.100.000	-
23	Tanah di Jl. Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	Talenta Body Repair	16.179.000	-
24	Tanah di Jl. Kenari (Eduhotel)	SMK 6 Yogyakarta	9.500.000	-
25	Tanah di Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yogyakarta	Suka Astuti	600.000	-
		Tien Setiantoro	2.676.000	-

No	LOKASI	PENYEWA	REALISASI PENDAPATAN SEWA 2015 (Rp)	KETERANGAN
		Roos Ani	700.000	(Pembayaran 11/2015-08/2016)
		Sumartiningsih	1.130.000	(Pembayaran 11/2015-08/2016)
		Aris Purnomo	684.000	-
26	Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman	Anik Suharmini	2.684.000	(Pembayaran 01/2015-11/2015)
		Sri Wahyu	3.904.000	(Pembayaran 01/2015-04/2016)
27	Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	R. RB Aria Putra	9.600.000	-
28	Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul	YB. Pratomo	14.641.000	-
29	Tanah dan bangunan di Komplek Colombo No.56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala DS.	27.500.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2015-2017)
30	Tanah dan bangunan di Wanujoyo Lor, Piyungan, Bantul	Marmuji	1.693.000	-
31	Tanah dan bangunan di Jl. Janti (Bekas KPU dan Dinas Pertambangan)	PT. Buanaland Agung	199.650.000	-
32	Tanah di Halaman DIPARDA	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	10.890.000	-
33	Tanah dan bangunan di Jl. Janti (Eks Dinas Gedung Pertambangan)	PT. Anindya Mitra Internasional	88.000.000	Pembayaran utk 01/01/2015-31/12/2015
		PT. Anindya Mitra Internasional	105.500.000	Pembayaran utk 01/01/2016-31/12/2016
34	Tanah di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo	825.000	-
35	Tanah di Telan, Denokan, Trimulyo, Jetis, Bantul	Mudjijana	-	(sudah dibayar pada tahun 2014)
36	Tanah di Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta (eks bioskop Indra)	Paguyuban Pemuda Margo Mulyo	20.000.000	-

No	LOKASI	PENYEWA	REALISASI PENDAPATAN SEWA 2015 (Rp)	KETERANGAN
37	Tanah dan bangunan di Jl. DI. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	*Early Childhood Care and Development Resource Center* (ECCD-RC)	-	(sudah dibayar pada tahun 2014)
38	Tanah dan bangunan di Logandeng, Playen, Gunungkidul (eks PPK)	Anna Gunawan Atmaja	11.000.000	-
39	Tanah dan bangunan di Komplek Griya Permata Hijau D1 Purwomartani, Kalasan, Sleman	Desey Irianto	-	(sudah dibayar pada tahun 2014)
40	Tanah dan bangunan di Jl. Tunjung No. 2 Baciro	RM. Soepomo Sastrowinoto	5.500.000	Pembayaran utk 01/12/2014-30/11/2015
		Setio Agus Samapto, SH	12.000.000	Pembayaran utk 01/12/2015-30/11/2016
41	Tanah eks Tanah Kas Desa Wates (71 Bidang Tanah)	Pemkab Kulon Progo	128.630.000	Pembayaran utk 01/07/2015-30/06/2016
		Pemkab Kulon Progo	80.875.900	Penerimaan sewa sebelum 01/07/2014
42	Tanah dan bangunan di Unit VII Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta	PT. MAC Sarana Djaya	227.500.000	
43	Tanah dan bangunan di Jl. Bima No. 25 A Jurugentong, Banguntapan	Dedi Kuswara	6.000.000	-
44	Tanah dan bangunan di Jl. Sriti No. 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta	2.500.000	-
45	Tanah dan bangunan di Jn. Gedongan Baru I Nomor A.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Wishnu Wirawan, SH	3.462.000	-

B. Barang milik daerah berupa Rumah Daerah yang dimanfaatkan melalui sewa sebagaimana tersaji pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26 Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	LOKASI	PENYEWA	REALISASI PENDAPATAN SEWA 2015 (Rp)	KET
1	Jl. Kusumanegara Nomor 168 E Yogyakarta	Suroyo	3.713.400	-
2	Jl. Kusumanegara Nomor 168 H Yogyakarta	Sugiyanta, SIP	2.030.400	-
3	Jl. Colombo Nomor 58 Yogyakarta	Drs. Biwara Yuswantana, MSi	2.781.600	-
4	Jl. Colombo Nomor 59 Yogyakarta	Mrabawani Ati	3.480.000	-
5	Jl. Colombo Nomor 60 Yogyakarta	Ir. Syahbenol Hasibuan	6.894.800	-
6	Jl. Colombo Nomor 61 Yogyakarta	Sugistiati	3.294.000	-
7	Jl. Janturan Nomor 29 Yogyakarta	Iwan Kurniawan, S.STPar	2.792.400	-
8	Jl. Janturan Nomor 29 A Yogyakarta	Asmita	2.792.400	-
9	Jl. Warung Boto Nomor 917 Yogyakarta	Mujiono, SH	1.904.000	-
10	Jl. Warung Boto Nomor 918 Yogyakarta	Drs. Sarana Tamtama Yuda	1.496.000	-
11	Jl. Sriti Nomor 20 A Demangan, Yogyakarta	Ir. Roby Indrajit	2.264.000	-
12	Jl. Sriti Nomor 20 C Demangan, Yogyakarta	Bambang Hermanto, SH, M.Hum	4.920.000	-
13	Jl. Sriti Nomor 20 D Demangan, Yogyakarta	Rudy Sulistyono, SH	2.488.800	-
14	Jl. Bima Nomor 25 Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Kemiyem Sumarni, B.Sc	5.714.400	-
15	Jl. Bima Nomor 25 B Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Dra. Mulyati Yunipratiwi, M.Si	1.413.500	-
16	Jl. Bima Nomor 25 C Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Muh. Guntari, SH	1.878.000	-
17	Jl. D.I. Panjaitan No. 74 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Ny. Djaenab Murniati	7.540.800	-
18	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (1)	Lucia Andri Susintowati	4.384.900	-
19	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (2)	Jaka Surana, SE	4.047.600	-
20	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Siti Mukaronah	2.286.000	-

No	LOKASI	PENYEWA	REALISASI PENDAPATAN SEWA 2015 (Rp)	KET
21	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Ir. Gunawan Wibisono	2.286.000	-
22	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Ir. Gatot Nursinggih, MP	2.367.600	-
23	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Eko Supriyanto, SH	2.535.000	-
24	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Tri Mulyadi, S. Hut, MP	2.286.000	-
25	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Agus Dwi Anggraito	2.286.000	-
26	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Hasan Khoiri, A.Md	3.103.200	-
27	Randubelang No.40 RT.02/RW.08 Bangunharjo, Sewon, Bantul	Saimin	1.429.200	-
28	Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)	Suhartati	2.994.000	-
29	Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)	Mashudi	748.500	-
30	Panggungharjo, Sewon, Bantul (4)	Gutik Lestarna, SPT	2.994.000	-
31	Panggungharjo, Sewon, Bantul (5)	Wahyuningsih	2.994.000	-
32	Asrama Transito, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta (2)	E. Bargiyah	1.631.700	-
33	Asrama Transito, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta (3)	Sukirdi, S.Sos	2.175.600	-
34	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Ny. Sudirman	2.992.000	-
35	Jalan Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman	Yasrizal, S.Sos, M.Si	1.840.300	-
36	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Parjono	263.400	-
37	Jl. Sagan III No. 4 Yogyakarta	Dra. Suhartuti Soetopo, Apoth.Mapp.Sc	5.803.200	-
38	Jl. Panembahan Romo Nomor 65 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Dra. Rahayu Endang Pujiati	4.570.000	-

C. Barang Milik Daerah yang dioptimalkan melalui pinjam pakai sebanyak 69 (enam puluh sembilan) bidang tanah/bangunan, yang terangkum dalam 37 (tiga puluh tujuh) perjanjian pinjam pakai, sebagai berikut:

Tabel 3.27 Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai

No	LOKASI	Peminjam
1	Tanah-tanah di Kabupaten Kulonprogo, 5 obyek: a. Tanah yang terletak di Hargorejo, Kokap, Kulonprogo b. Tanah yang terletak di Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo c. Tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulonprogo seluas 1.555 m^2 d. Tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulonprogo seluas 2.590 m^2 e. Tanah yang terletak di Kulwaru, Wates, Kulonprogo	Pemkab Kulon Progo
2	Tanah-tanah di Kabupaten Kulon Progo, 3 obyek: a. Tanah di Jl. Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo seluas 1.425 m^2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.8 Seri AH.196049 Tanggal 31 Juli 1996 dan seluas 1.255 m^2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.10 Seri AI.951715 Tanggal 11 November 1997 b. Tanah di Jl. Khudori Nomor 49 Wates, Kulon Progo seluas 641 m^2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.7 Seri B.1859289 Tanggal 24 Maret 1987 c. Wates, Kulon Progo seluas 450 m^2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.26 Seri AH.196047 Tanggal 19 April 1996	Pemkab Kulon Progo
3	12 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Kulonprogo (eks TKD Wates), 12 obyek	Pemkab Kulon Progo
4	Tanah yang terletak di Desa Pengasih, Pengasih, Kulon Progo seluas 10.000 m^2 dari luas keseluruhan 46.200 m^2 sesuai Sertifikat No. P.14 Seri AB548997 Tanggal 10 Februari 1993, 1 obyek.	Pemkab Kulon Progo
5	Tanah di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas $\pm$ 429 m^2 dari seluruh luas tanah $\pm$ 2.244 m^2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.19 Seri AR.721913 Tanggal 1 Juni 2001, 1 obyek.	Pemerintah Kab Sleman
6	Tanah di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas $\pm$ 1.298 m^2 dari seluruh luas tanah $\pm$ 2.244 m^2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.19 Seri AR.721913 Tanggal 1 Juni 2001, 1 obyek.	Pemdes Bokoharjo
7	Tanah yang terletak di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, 1 obyek.	Pemkab Sleman
8	Tanah di Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul dan di Desa Gatak, Kelurahan Bokoharjo, Kcamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, 2 obyek.	Detasemen Zeni
9	Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sleman, 6 obyek: a. Tanah dan bangunan yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman seluas 10.040 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1858618 Tanggal 18 Juli 1987 b. Tanah dan bangunan yang terletak di Pendowoharjo, Sleman seluas 2.510 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.4 Seri B.1858625 Tanggal 18 Juli 1987 c. Tanah dan bangunan yang terletak di Sumberagung, Moyudan, Sleman seluas 9.510 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873598 Tanggal 22 September 1987	Pemkab Sleman

No	LOKASI	Peminjam
	d. Tanah dan bangunan yang terletak di Pendowoharjo, Sleman seluas 5.705 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3 Seri B.1873599 Tanggal 08 September 1987 e. Tanah dan bangunan yang terletak di Margodadi, Seyegan, Sleman seluas 6.770 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873600 Tanggal 22 September 1987 f. Tanah dan bangunan yang terletak di Bimomartani, Ngemplak, Sleman seluas 9.910 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 B.8979481 Tanggal 17 Juni 1988	
10	Sebagian tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Wisma PU Kaliurang, Kabupaten Sleman seluas $\pm$ 64 m^2, 1 obyek.	BBWS Serayu Opak
11	Sebagian tanah yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman tanah seluas $\pm$ 585,4 m^2 dari luas keseluruhan $\pm$ 5.800 m^2 sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 166 Seri AX 216169, tanggal17 April 2006, 1 obyek.	Kemenhub RI
12	Tanah dan bangunan Milik Daerah yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman tanah seluas $\pm$ 20.785 m^2 sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Seri AH 443787, tanggal 21 Maret 1997 dan bangunan seluas 2.485,16 m^2, 1 obyek.	Kemen PU RI
13	Tanah yang terletak di Dusun Gesikan IV Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul seluas 12.000 m^2 dari keseluruhan luas tanah 47.597 m^2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.1 seri B.8578015 tanggal 1 Juni 1988	PemKab Bantul
14	Kendaraan jenis Sedan, Merk/Type Toyota New Camry 3.OV/AT, Tahun 2004, 2995 CC, Nomor Polisi AB 92, Nomor Rangka MR 053-XK 3044, Nomor Mesin IMZ-1694200, Nomor BPKB, Warna Abu-abu Metalite, 1 obyek.	Polda DIY
15	Tanah seluas 41,7 m x 15,5 m di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor P.76/Smk, 1 obyek.	Balai PMD
16	Bangunan lantai atas sebelah selatan eks Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta, 1 obyek.	Kartamantul
17	Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta, seluas $\pm$ 1.380 m^2 dari luas keseluruhan $\pm$ 6.775 m^2 sesuai sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988, 1 obyek.	BNN DIY
18	Kendaraan Operasional Minibus/MP Suzuki/GC 415 V-APV STD, 1 unit.	BNN DIY
19	Tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta, 1 obyek.	ISI Yogyakarta
20	Sebagian tanah dan bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Resort KSDA Kota Yogyakarta di Baciro seluas $\pm$ 100 m^2 kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, 1 obyek.	BKSDA Yogyakarta
21	Sebagian tanah dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jl. Malioboro Nomor 56 Yogyakarta, seluas 235 m^2 dari luas seluruhnya seluas 8.472 m^2, 1 obyek.	Pemkot Yogyakarta (UPT Malioboro)
22	Kendaraan Dinas, 15 unit	KPU
23	a. Barang-barang Inventaris, 1 unit b. Tanah yang terletak di Jl. Ipda Tut Hasrono 47, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 1 obyek	KPU
24	bangunan yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta seluas 90 m^2, 1 obyek.	Kemenag Kota Yogyakarta

No	LOKASI	Peminjam
25	Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mergangsan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta seluas ± 2.250 m^2 dari luas keseluruhan ± 6.775 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803, tanggal 17 Juni 1988, 1 obyek.	BPN DIY
26	Tanah seluas 8.877 m^2 dari luas keseluruhan 29.841 m^2 sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor P.5/Bnr seri B 8972861 tanggal 26 September 1987 yang terletak di Jalan Kyai Mojo Pingit, Yogyakarta, 1 obyek.	Kemenkes RI
27	Tanah yang terletak di Jl. Brigjen Katamso Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta seluas ± 1.000 m^2 dari seluruh luas tanah ± 6.775m^2 sesuai Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 tgl 17 Juni 1988, 1 obyek.	BPS Kota Yogyakarta
28	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Faridan Muridan Noto 21 Kotabaru, Yogyakarta, 1 obyek.	Lembaga Sandi
29	Balai Benih Induk (BBI) Perikanan Krapyak dan Balai Benih (BBI) Perikanan Gesikan, Kabupaten Bantul beserta daftar barang inventaris lainnya, 1 obyek.	Pemkab Bantul
30	Tanah dan bangunan eks UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY, 1 obyek: Tanah dan bangunan eks UPT kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY yang terletak di Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	Pemkab Bantul
31	Tanah seluas 2.542 m^2 dan bangunan seluas 1.740 m^2 di Jalan Wiyoro Lor Nomor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul, sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor P.00011 seri AX 620551 tanggal 18 Desember 2006, 1 obyek.	Balai BTKLPP
32	Tanah di Kabupaten Bantul, 4 obyek: a. Tanah di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu seluas 2.755 m^2 untuk kantor Kecamatan Sedayu. b. Tanah di Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.204 m^2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.0003 seri AN.372362 untuk Kecamatan Sanden. c. Tanah di Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.824 m^2 sesuai sertifikat Nomor P.0006 seri AN.370599 untuk Puskesmas Sanden d. Tanah di Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 2.159 m^2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.0005 seri AN 372361 untuk Sekolah Dasar Negeri I Sanden.	Pemkab Bantul
33	Tanah dan Bangunan di Kabupaten Gunungkidul, 1 obyek: Tanah dan bangunan di Desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul.	Pemkab Gunungkidul
34	Tanah-tanah di Kabupaten Gunungkidul, 10 obyek: a. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 1.663 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 seri AB.538626 tanggal 08/07/1991 b. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 593 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 seri AB.538627 tanggal 08/07/1991 c. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 102 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00004 seri AB.740783 tanggal 17/04/1993	Pemkab Gunungkidul

No	LOKASI	Peminjam
	d. Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 65 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 seri AD.740785 tanggal 17/04/1993 e. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 637 m^2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.00002 seri AD.728434 tanggal 18/01/1993 f. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 146 m^2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.0003 seri AD.7284354 tanggal 18/01/1993 g. Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 468 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AD.728433 Tanggal 18/01/1993 h. Tanah yang terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul seluas 22.502 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00005 Seri AH.457048 Tanggal 01/08/1996 i. Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 21.151 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AH.457559 Tanggal 03/09/1996 j. Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 9.696 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AH.457049 Tanggal 31/08/1996	
35	Sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kedung Poh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 2.035 m^2 dari total luas keseluruhan 6.677 m^2 sesuai Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00001 Seri AL.145170 tanggal 29 April 2009, 1 obyek.	Pemkab Gunungkidul
36	Serat *Fiber Optic* sebanyak 12 core dari 96 core	Pemkot Yogyakarta
37	a. Tanah yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta tanah seluas 104 m^2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Gnk Seri B.8190750 b. Tanah yang terletak di Jl Veteran Kel Muja Muju, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta seluas 770 m2 sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor P.47/Mju seri AF 477470 tanggal 11 Mare 1997 c. Tanah yang terletak di Jalan Kyai Mojo, Kel Bener, Kec Tegalrejo, Kota Yogyakarta seluas 749 m2 sesuai dengan sertifikat Hak Pakai No P.8/Bnrseri B 8834959 tanggal 12 Jan 1988	Pemkot Yogyakarta

D. Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/ atau bangunan yang dimanfaatkan melalui bentuk Bangun Guna Serah sebanyak 1 (satu) bidang, yaitu Tanah di Jl. Malioboro dengan PT. YIS selama 30 tahun dengan kontribusi pada tahun 2015 sebesar Rp455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), sesuai dengan:

1. Akta Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53.

2. Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl.Malioboro Yogyakarta tanggal 12 September 1992 Nomor 665.2/3076 tanggal 8 Desember 1993.
3. Addendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan pengelolaan Malioboro Hotel di Jl.Malioboro Yogyakarta anggal 12 September 1992 Nomor 199/KPTS/1998 tanggal 14 Agustus 1998.

3.6.4.2 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah

A. Rehabilitasi Kantor dan Rumah Daerah

Kegiatan Rehabilitasi kantor dan rumah daerah sebelumnya diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh CV. Citra Reka Graha, kemudian untuk konstruksi rehabilitasi dilakukan oleh CV. Aneka Nugraha. Pagu anggaran yang disediakan APBD 2015 sebesar Rp190.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp188.600.000,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan rehabilitas rumah dinas sebanyak 4 (empat) unit, yaitu:

1) Rumah Dinas di Jalan Puri Sumberadi Asri A5 Mlati sebesar Rp54.788.000,-
2) Rumah Dinas di Jalan Janturan No 29 Yogyakarta sebesar Rp34.683.000,-
3) Rumah Dinas di Krapyak, Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul sebesar Rp49.465.000,-
4) Rumah Dinas di Jalan Sidikan No 88 Yogyakarta sebesar Rp49.664.000,-

Berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015, pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBD 2015 dilakukan rehabilitasi gedung kantor untuk persiapan organisasi perangkat daerah baru. Rehabilitasi dilakukan pada gedung eks KPU dan gedung Eks Perindagkop di Jalan Janti Wonocatur Banguntapan Bantul yang akan digunakan untuk kantor SATPOL PP dan kantor BKPM DIY, serta rehabilitasi eks BPAD Jln Tentara Rakyat Mataran untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Belanja yang terealisasi adalah sebagai berikut:

1) Belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp29.850.000.- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Digunakan untuk mengangkut barang-barang inventaris dari OPD yang pindah tempat, diantaranya:
   a. Kantor SATPOL PP DIY dari komplek Kepatihan ke gedung Eks KPU di Jalan Janti banguntapan Bantul.
   b. Bagian Linmas BAKESBANGLINMAS dari Jalan Jendral Sudirman ke gedung Eks KPU di Jalan Janti Banguntapan Bantul
   c. Bidang Koperasi DISPERINDAGKOP dari Jalan Kusumanegara ke Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta
   d. Bidang KOMINFO dari Jalan Babarsari ke Jalan Brigadir Jenderal Katamso Yogyakarta
   e. Bidang Tata Ruang dari Bumijo ke eks BPAD Jalan Tentara Rakyat Mataram 4 Yogyakarta
   f. Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan dari Komplek Kepatihan ke eks BPAD Jalan Tentara Rakyat Mataran 4 Yogyakarta.
   g. ULP dari unit I ke unit VII komplek Kepatihan Yogyakarta.
2) Belanja Penyambungan dan Instalasi Listrik sebesar Rp67.919.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah). Digunakan untuk penyambungan listrik baru untuk 2 (dua) gedung yaitu gedung eks KPU dan gedung eks Perindagkop masing-masing 11.000 KVa.
3) Belanja Rehabilitasi gedung kantor Pemerintah sebesar Rp197.944.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Digunakan untuk rehabilitasi berupa pengecetan dan perbaikan ringan dari 2 (dua) unit gedung yaitu gedung eks KPU dan gedung Eks Perindagkop di Jalan Janti Banguntapan Bantul.

B. Penjaminan Barang Milik Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 45 ayat (2) bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pada APBD 2015 tersedia dana sebesar Rp878.750.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan penjaminan barang milik daerah serta penilaian sebagian bangunan milik Pemda DIY untuk tujuan asuransi.

Untuk penilaian bangunan yang akan diasuransikan pada tahun 2015 telah dilakukan penilaian terhadap gedung milik Pemda DIY yang berada di Komplek Kepatihan dan di Sekretariat DPRD di Jl. Malioboro Yogyakarta oleh KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta. Sedangkan untuk asuransi, pemilihan dilakukan dengan cara lelang sederhana, dengan rincian hasil sebagai berikut:

1) Penjaminan Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 milik Pemda DIY, dimenangkan oleh PT Asuransi Himalaya Pelindung dengan pertanggungan berupa 112 kendaraan dengan pertanggungan all risk dan 17 kendaraan dengan pertanggungan *Total Loss Only* dengan nilai premi sebesar Rp392.208.155,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) untuk masa pertanggungan 18 Juni 2015 sampai dengan 18 Juni 2016.
2) Penjaminan Gedung, dimenangkan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia dengan pertanggungan berupa 51 gedung dengan pertanggungan kebakaran dan 55 gedung dengan pertanggungan gempa bumi dengan nilai premi sebesar Rp431.279.258,36 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah) untuk masa pertanggungan 18 Juni 2015 sampai dengan 18 Juni 2016.

4 Bab Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan DIY

4.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMDA DIY PADA 2015

Implementasi pembangunan daerah yang dilakukan pada tahun 2015 merupakan tahun ketiga pada periode RPJMD DIY 2012-2017. APBD tahun 2015 disusun berdasar RKPD tahun 2015 yang merupakan penjabaran dengan target kinerja yang diukur berdasar RPJMD tahun 2012-2017 *review*. Upaya *review* terhadap RPJMD DIY Tahun 2012-2017 dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah target sasaran yang sudah terlampaui hingga akhir tahun perencanaan. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan target sasaran Pemda DIY hingga sasaran program yang mendukungnya, dalam rangka melakukan percepatan pembangunan daerah, terutama pada tahun 2015 hingga 2017.

Sebagaimana kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2015 telah melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah, yang merupakan penjabaran dari visi-misi pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran Pemda DIY merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Berkaitan dengan adanya *review* RPJMD DIY sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan beberapa penyesuaian target indikator pada Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY pada tahun 2015-2017, untuk semakin memacu keberhasilan pembangunan daerah yang menuntut pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan memiliki aspek kemanfaatan kepada masyarakat secara signifikan. Adapun pencapaian sasaran yang merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan di DIY pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Derajat Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	%	65,73	67,28	69,04	102,62
2.	Angka melek huruf	%	93,68	93,85	94,44	100,63
3.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,46	10,8	8,84	-
4.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	%	5	10	15,77	157,70
5.	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,74	73,81	74,5	100,93
6.	Pendapatan per kapita per tahun	Juta Rupiah	7,10	7,8	22,68	-
7.	Indek Ketimpangan Antar-Wilayah	Indeks Williamson	0,4479	0,4465	0,4480	99,66
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	0,43	0,2898	0,43	51,62
9.	Jumlah wisatawan nusantara	Orang (wisnus)	3.091.967	3.581.860	3.813.720	106,47
10.	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang (wisman)	254.213	261.053	380.485	145,75
11.	Lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,58	2,3	1,85	80,43
12.	Lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	1,95	2,35	2,07	88,09
13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	Nilai (Kemen PAN & RB)	2	2	2	100,00
14.	Opini Pemeriksaan BPK; (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)	Opini Pemeriksaan BPK	1	1	1	100,00
15.	*Load factor* angkutan perkotaan	%	37,82	38,57	39,05	101,24
16.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	%	6,29	9,43	9,17	97,24
17.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat	%	64,21	64,25	64,36	100,17

Sumber: Analisis Bappeda, 2016

Berdasarkan capaian sasaran kinerja Pemda DIY pada tahun 2015 menunjukkan bahwa indikator yang memiliki persentase capaian ≥ 100% sebanyak 11 indikator dari total 17 indikator. Sedangkan 6 indikator belum tercapai, atau tingkat capaiannya berada pada aras < 100%, namun kinerja indikator tersebut menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya secara dominan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara umum, capaian indikator sasaran Pemda DIY pada tahun 2015, memiliki progres yang lebih baik dengan

pertimbangan adanya pencapaian sasaran yang lebih baik dibandingkan capaian pada tahun 2014. Untuk itu, dukungan program yang memiliki signifikasi terhadap pencapaian *outcame* sasaran, sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran sebagaimana target yang sudah ditentukan. Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung atas keberhasilan pencapaian sasaran Pemda DIY.

Meski demikian, terdapat dua indikator yang capaiannya tidak dapat diperbandingkan dengan target maupun capaian tahun sebelumnya. Kedua indikator tersebut adalah rerata lama sekolah dan pendapatan (PDRB) per kapita. Capaian dua indikator rerata lama sekolah dan pendapatan per kapita pada tahun 2015, sebagaimana rilis BPS, memiliki metode perhitungan yang berbeda dengan cara perhitungan pada target indikator yang sama.

Adapun analisis pencapaian derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya Tahun 2015 telah melampaui target, hal itu diakibatkan oleh bertambahnya desa budaya maju dan bertambahnya organisasi budaya yang tumbuh dan berkembang. Tahun 2013 desa budaya maju sebanyak 12 desa, selanjutnya pada tahun 2014 desa budaya maju meningkat menjadi sebanyak 14 desa dan tahun 2015 desa budaya maju mencapai sebanyak 17 desa. Sedangkan organisasi budaya yang tumbuh dan berkembang pada tahun 2015 sebanyak 5.917, dengan organisasi budaya yang maju tahun 2015 sebanyak 87 organisasi. Pertambahan desa budaya maju tidak terlepas dari upaya yang terus menerus dalam meningkatkan potensi serta eksistensi desa budaya sebagai sarana untuk memperkuat nilai budaya yang telah melekat pada masyarakat, ditengah tantangan globalisasi yang memberikan implikasi adanya akulturasi budaya.

Untuk capaian angka melek huruf juga telah melampaui target yang ditetapkan pada 2015. Hal itu dipengaruhi bertambahnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Namun, untuk capaian rerata lama sekolah pada 2015 masih menujukkan capaian yang belum optimal. Hal itu dipengaruhi adanya perbedaan metodologi pengukuran rata-rata lama sekolah oleh BPS, yang pada rilis terbarunya menggunakan rata-rata lama sekolah pada kelompok umur > 25 tahun keatas, sebesar 8,84 tahun. Adapun metodologi penghitungan rata-rata lama sekolah sebelumnya, menggunakan perhitungan pada kelompok umur tahun > 15 tahun keatas. Dengan demikian capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 tidak bisa diperbandingkan dengan target 2015.

Sedangkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya telah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2015. Terpenuhinya target tersebut karena komitmen yang tinggi dari sekolah untuk menerapkan pendidikan yang berbasis budaya.

Angka harapan hidup telah melampaui target yang ditetapkan untuk Tahun 2015 dengan pertimbangan bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik secara tidak langsung telah meningkatkan Angka Harapan Hidup. Menurunnya jumlah kasus kematian ibu, menurunnya jumlah kasus kematian bayi dan menurunnya prevalensi balita kurang gizi (KEP) telah berperan besar dalam mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk adanya perubahan dari lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan kependudukan.

Sedangkan pendapatan per kapita menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada tahun 2015, yakni sebesar Rp 22,68 juta per kapita. Capaian pendapatan (PDRB) per kapita tersebut tidak bisa diperbandingkan dengan target pada tahun yang sama, karena BPS merilis capaian PDRB tahun 2015 dengan menggunakan asumsi tahun dasar 2010. Sementara asumsi target PDRB dan capaian PDRB tahun sebelumnya, masih menggunakan tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar untuk menghitung dinamika perekonomian daerah, dilakukan untuk menyesuaikan dengan gambaran/kondisi perkembangan perekonomian yang lebih menggambarkan situasi perekonomian yang sebenarnya.

Kinerja disparitas antar wilayah pada tahun 2015 cenderung mengalami stagnasi, apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adanya pelambatan perekonomian selama tahun 2015, mempengaruhi upaya untuk menekan ketimpangan antar wilayah, terutama kerentanan pada wilayah berbasis perdesaan. Selain itu, gambaran ketimpangan juga terlihat dari aspek pendapatan antara yang kaya dengan golongan menengah ke bawah, melalui indeks ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan di DIY cenderung tinggi, yang tergambar dari capaian indeks ketimpangan pendapatan sebesar 0,43 pada 2015. Laju pertumbuhan pendapatan masyarakat golongan kaya, masih belum dapat diimbangi dengan laju pertumbuhan pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. Upaya menekan ketimpangan merupakan hal pokok yang harus diatasi sebagai prioritas pembangunan untuk menunjukkan peningkatan perekonomian yang berkualitas.

Untuk kinerja jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah melampaui target. Peningkatan ini disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah sebagai akibat masih diminatinya yogyakarta oleh wisatawan nusantara terutama kalangan pelajar dan mahasiswa pada musim liburan. Perbaikan sarana prasarana destinasi juga menjadi penarik wisatawan nusantara berkunjung disamping kondisi DIY yang relatif aman, nyaman, dan dukungan transportasi serta akomodasi yang memadahi, juga menjadi faktor DIY masih menjadi destinasi menarik bagi wisatawan, disamping faktor stabilitas sosial dan keamanan yang relatif terjaga selama 2015.

Namun, lama tinggal untuk wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara masih belum mencapai target, meskipun capaiannya sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Peningkatan lama tinggal wisatawan dibandingkan tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh semakin banyaknya pilihan destinasi dan event yang diselenggarakan sehingga mampu menambah lama tinggal, termasuk dukungan semua lapisan masyarakat, organisasi non pemerintah, swasta, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Untuk capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) telah mencapai target yang ditetapkan untuk Tahun 2015. Nilai AKIP dari Kementerian PAN & RB pada tahun 2015 adalah A (dengan *score* 80,68) meningkat dibanding dengan Nilai AKIP tahun 2014 yang juga A (dengan *score* 76,36). Nilai AKIP dipengaruhi oleh kinerja pada beberapa aspek yaitu: Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan dan budaya kinerja birokrasi.

Capaian pada Opini Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mencapai target yang ditetapkan untuk Tahun 2015. Opini Pemeriksaan BPK tahun 2014 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Oleh karena itu Opini Pemeriksaan BPK tahun 2015 yang akan dinyatakan pada bulan April-Mei 2016 yang akan datang diharapkan tetap WTP. Kunci sukses untuk bisa mempertahankan opini WTP dari BPK ialah karena pemerintah daerah konsisten menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

Load factor angkutan perkotaan telah melampaui target yang ditetapkan untuk Tahun 2015. *Load factor* angkutan perkotaan tahun 2015 meningkat lebih baik dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 37,82%. Angkutan umum sebagai salah satu sarana transportasi perkotaan bagi masyarakat sangat memegang peranan penting dalam pergerakan lalu lintas masyarakat. Keberhasilan di atas tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya melalui berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu: pengembangan sistem angkutan umum massal, memadukan sistem jaringan jalan terpadu antar wilayah, pengembangan keterpaduan intra dan antar moda yang sejalan dengan kebijakan spasial daya dukung lingkungan, dan pengembangan manajemen transportasi perkotaan.

Adapun presentase Peningkatan Kualitas Lingkungan belum mencapai target yang diharapkan pada Tahun 2015. Namun demikian, persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan tahun 2015 telah mencapai 9,17%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 6,29%. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa tantangan terhadap ancaman pengelolaan lingkungan semakin besar khususnya yang disebabkan oleh beberapa pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk pentingnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama kualitas air.

Sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW telah melampaui target yang ditetapkan untuk Tahun 2015. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi tahun 2015 telah mencapai 64,36%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 64,21%. Namun demikian, tantangan pengendalian pemanfaatan ruang akan semakin berat ke depannya seiring dengan meningkatnya aktifitas kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, dan aktifitas sosial ekonomi lainnya.

4.2 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

4.2.1 Urusan Pendidikan

4.2.1.1 Kondisi Umum

Gambar 4.1 Pembukaan OSN Tingkat Nasional

Pendidikan merupakan urusan yang strategis, berkaitan dengan kontribusinya yang penting untuk mewujudkan visi DIY sebagai *Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2025.* Untuk itu diperlukan upaya berkelanjutan yang memenuhi kemajuan pendidikan yaitu pemerataan, perluasan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas menjadi hak setiap orang pada semua jenjang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Sebagai gambaran capaian kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan

No	Satuan Pendidikan	Angka Mengulang (%)	Angka Putus Sekolah (%)	Angka Kelulusan (%)	Kualialifikasi Pendidikan Guru/ S1 (%)	Ruang Kelas dalam Kondisi Baik (%)
1	SD/ MI	1,58	0,03	100,40	85,80	80,24
2	SMP/ MTs	0,16	0,19	105,72	89,60	91,17
3	SMA/ MA/ SMK	0,15	0,27	100,40	94,45	94,67

Sumber: Disdikpora DIY, 2016

Prestasi diatas dicapai karena kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan baik formal maupun nonformal, partisipasi penduduk usia sekolah, dan ketersediaan sarana pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan telah mencukupi dan mendukung walaupun tetap diperlukan peningkatan khususnya ketersedian sarana pendidikan yang lebih memadai. Fasilitas sarana dan prasarana sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, ruang UKS, ruang

praktik, ruang tempat ibadah, dan listrik yang memadai telah dimiliki sebagian besar sekolah/ madrasah.

Profil Pendidikan DIY Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sekolah, Siswa, dan Guru

Tabel 4.3 Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru

No	Satuan Pendidikan	Lembaga	Siswa	Guru
1	TK/ RA	2.302	97.915	7.559
2	SD/ MI	2.009	309.924	21.803
3	SMP/ MTs	530	156.871	12.507
4	SMA/ MA	207	66.234	7.767
5	SMK	230	82.072	8.679
6	SLB	76	4.389	1.271

Sumber: Disdikpora DIY, 2016

2. Perguruan Tinggi

Tabel 4.4 Jumlah Perguruan Tinggi

No	Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Universitas	21
2	Institut	6
3	Sekolah Tinggi	49
4	Poli Teknik	10
5	Akademi	41
Jumlah		129

Sumber: Disdikpora DIY, 2016

3. Pendidikan Non Formal (PNF)

Tabel 4.5 Lembaga, Peserta, dan Pendidik Pendidikan Non Formal

No	Jenis Pendidikan Non Formal	Lembaga	Peserta	Pendidik
1	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	5	332	92
2	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	227	4.521	1.266
3	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	322	28.785	736
4	Lembaga PAUD Nonformal	4.249	112.233	16.042

Sumber: Disdikpora DIY, 2016

4. Rasio Siswa

Tabel 4.6 Rasio Siswa Per Sekolah, Rasio Siswa Per Guru, dan Rasio Siswa Per Kelas

No	Satuan Pendidikan	Rasio Siswa Per Sekolah	Rasio Siswa Per Guru	Rasio Siswa Per Kelas
1	SD/MI	154	15	21
2	SMP/ MTs	296	13	28
3	SMA/ MA/ SMK	347	10	26

Sumber: Disdikpora DIY, 2016

5. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tabel 4.7 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

No	Satuan Pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK)	Angka Partisipasi Murni (APM)
1	PAUD	96,15	-
2	TK/ RA	60,98	-
3	SD/ MI	109,22	96,71
4	SMP/ MTs	115,63	84,34
5	SMA/ MA/ SMK	93,02	65,24

Sumber: Disdikpora DIY, 2016

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017, urusan pendidikan tahun 2015 meliputi 5 indikator, dengan target pencapaian sebagai berikut:

Tabel 4.8 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017
				Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,33	10,8	8,84	88,70*	12	79,83*
2	Peningkatan layanan pendidikan non formal & informal	Orang	7000	8000	8000	100	10.000	80
3	Sekolah yang mengimplemen-tasikan pendidik-an berkarakter & sinergis dengan kebutuhan pembangunan	%	0	29,17	29,17	100	45,83	63,65

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017
				Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
4	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	%	83,13	74,71	84,62	113,26	75,17	112,57
5	Jumlah Peserta Didik Yang Mendapat Pelayanan Pendidikan Teknik Terstandar	Peserta	1.892	1.904	1.912	100,42	1.977	96,71

Sumber: Disdikpora DIY, 2016

Capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 sebesar 8,84 tahun. Capaian tersebut mengesankan adanya ketidakcapaian realisasi dengan target. Pemberian tanda bintang (*) pada persentase realisasi untuk capaian rata-rata lama sekolah, menunjukkan bahwa realisasi pada 2015 memiliki metode perhitungan yang berbeda dengan target tahun 2015. Realisasi rata-rata lama sekolah menggunakan metode perhitungan BPS dengan menggunakan asumsi kelompok usia diatas 25 tahun keatas, sementara metode lama (pada asumsi perhitungan target dan capaian tahun sebelumnya) menggunakan basis data pada usia 15 tahun keatas. Meski demikian, capaian rata-rata lama sekolah yang dicapai DIY pada tahun 2015 berada diatas rerata nasional (7,73 tahun) dengan basis data usia 25 tahun keatas.

Untuk layanan pendidikan non formal dan informal, jumlah masyarakat yang telah mendapatkan layanan pada tahun 2015 sebanyak 8.000 orang. Capaian ini telah mencapai 100% target dan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 sebesar 7.000 orang, terdapat kenaikan mencapai 1.000 orang, sedangkan jika dibandingkan dengan target RPJMD 2017 sebesar 10.000 orang, mencapai 80%.

Persentase sekolah yang mengimplementasikan pendidikan berkarakter dan sinergis dengan kebutuhan pembangunan pada tahun 2015 mencapai 29,17%. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan bila dibandingkan dengan RPJMD 2017 sebesar 45,83% telah mencapai 63,65%.

Kinerja peningkatan mutu pendidikan melampaui target dari 74,71% tercapai 84,62%. Capaian tersebut lebih besar daripada capaian tahun 2014 sebesar 83,13% atau mengalami peningkatan sebesar 1,49%. Sedangkan persentase capaian terhadap target akhir RPJMD 2017 mencapai 112,57%.

Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar sebesar 1.912. Jumlah ini lebih besar dari target yang ditentukan yaitu 1.904. Capaian ini bila dibandingkan capaian 2014 sebesar 102,33% mengalami penurunan 1,91% namun di atas target tahun 2015, yaitu sebesar 100,42% dan dibandingkan dengantarget RPJMD 2017 sebesar 1.977, telah mencapai 96,71%.

4.2.1.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Upaya mencapai indikator utama kemajuan pendidikan pada tahun 2015 dilaksanakan melalui 16 program dengan 105 kegiatan urusan pendidikan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun anggaran 2015 seluruhnya mencapai Rp124,982,392,382,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp112,632,496,873,00 atau tercapai sebesar 90,12%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 98,16%. Kegiatan yang tidak dapat terlaksana ialah pengadaan tanah untuk SLB N 2 Gunungkidul karena tidak ada kesepakatan harga dengan pemilik tanah.

4.2.1.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Kondisi sosial ekonomi sebagian peserta didik masih memerlukan perhatian khusus agar dapat menempuh pendidikan dengan baik.
- Masih perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus.

B) Solusi

- Pemberian bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa Kartu Cerdas, pemberian bantuan, biaya pendidikan mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda);
- Penyelenggaraan forum masyarakat peduli pendidikan sebagai sarana sosialisasi layanan anak berkebutuhan khusus, pemberian bantuan operasional untuk SLB swasta se-DIY, dan pengembangan pendidikan inklusi.

4.2.2 Urusan Kesehatan

4.2.2.1 Kondisi Umum

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi agar tercapai masyarakat yang sejahtera dan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Derajat kesehatan masyarakat DIY tergolong yang tertinggi dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan semakin bertambahnya angka harapan hidup penduduk DIY dari 73,62 tahun pada tahun 2013 menjadi 74,5 tahun di tahun 2014. Peran kesehatan dalam meningkatkan angka harapan hidup ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan dan meningkatnya status gizi masyarakat.

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, menempatkan DIY dalam pencapaian terbaik beberapa indikator kesehatan. Pencapaian kesehatan ibu melalui indikator kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifas mengalami *trend* penurunan. Jumlah kasus kematian ibu menurun dari tahun 2013 sebanyak 46 kasus, menjadi 40 kasus pada tahun 2014 dan turun menjadi 29 kasus pada tahun 2015. Perkembangan angka kematian bayi dan balita selama kurun 2013 sampai 2015 juga menunjukkan trend yang semakin menurun. Jumlah kematian bayi di DIY mengalami penurunan dari 449 bayi tahun 2013, menurun menjadi 405 bayi tahun 2014 dan tahun 2015 menjadi 329 bayi. Kematian balita dari 508 balita tahun 2013 menjadi 454 balita tahun 2014 dan pada tahun 2015 menurun menjadi 378 balita.

Prevalensi balita kekurangan energi protein (KEP) yang biasa disebut balita kurang gizi sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2015 prevalensi KEP mengalami sedikit peningkatan dari 7,91% tahun 2014 menjadi 8,04%.

Penyakit menular masih menjadi fokus perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, beberapa penyakit menular yang masih perlu mendapat perhatian adalah diare, pneumonia balita, DBD, TB paru. Di sisi lain Penyakit Tidak Menular (PTM) menunjukkan kecenderungan meningkat. Hasil Riskesdas tahun 2013 telah menunjukkan prevalensi asma, hipertensi, diabetes dan kanker melebihi angka nasional. Selain itu angka gangguan jiwa berat di DIY cukup tinggi

Gambar 4.2 *Talkshow*: Mengembalikan Martabat ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)

yaitu 0,27% dibanding angka nasional yang hanya 0,17%. Kecenderungan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan, sedangkan tingginya angka gangguan jiwa dipengaruhi oleh kerapuhan kesehatan mental sehingga kurang siap menghadapi perubahan yang sangat cepat di masyarakat.

Terkait dengan kesehatan jiwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang dimaksud dengan gangguan jiwa merupakan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang ditunjukkan dengan gejala perubahan perilaku yang signifikan sehingga dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia pada umumnya.

Melihat definisi di atas, masalah kesehatan jiwa di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus mendapat perhatian dalam upaya penanggulangannya. Hasil Riset Kesehatan Dasar terakhir yang dilakukan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala kecemasan dan depresi secara nasional adalah sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat adalah 1,7 per 1.000 penduduk atau sekitar 400.000 orang.

Angka prevalensi gangguan jiwa berat di DIY tahun 2013 adalah 2,7 per 1.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan Riskesdas sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2007 sebesar 4 per 1.000 penduduk, angka tersebut menunjukkan penurunan. Namun, jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas nasional, prevalensi gangguan jiwa di DIY lebih besar. Penanganan masalah kesehatan jiwa di DIY merupakan tugas bersama antara RSJ Grhasia sebagai fasilitator pelayanan kesehatan tingkat provinsi, rumah sakit umum di kabupaten/ kota, puskesmas, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/ kota, serta masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan urusan kesehatan pada masyarakat, Pemda DIY melalui Dinas Kesehatan dan RS Jiwa Grhasia terus berupaya meningkatkan capaian derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas fungsi dan kewenanganya.

Tolok ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di DIY dapat dicermati dalam indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017. Kondisi di tahun 2015 memperlihatkan bahwa sebagian besar indikator kesehatan maupun upaya kesehatan telah mencapai target. Capaian target indikator urusan kesehatan yang masih belum memenuhi target adalah indikator Prevalensi balita kurang gizi sebesar 8,04% dari target 7,5%. Hal ini dikarenakan multi faktor antara lain faktor akses dan ketersediaan pangan dirumah tangga, pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang gizi, pola asuh dan budaya yang kurang mendukung terciptanya gizi seimbang serta adanya penyakit infeksi dan penyakit penyerta yang dibawa sejak lahir. Untuk menuntaskannya diperlukan dukungan dari lintas sektor dan peran serta masyarakat.

Tabel 4.9 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2015 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase rumah tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	37,74	38	40,42	106,37	40	101,05
2.	Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	99,96	99	99,81	100,82	99	100,82
3.	Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama (KN1)	99,63	98,50	99,64	101,16	100	99,64
4.	Persentase cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	99,69	98	99,61	101,64	98	101,64
5.	Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL)	70,25	73,55	82,64	112,36	80%	103,3
6.	Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	7,91	7,50	8,04	92,8	6,50	76,31
7.	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	150,18	64,44	72,02	111,76	73,44	98,07

No	Indikator Kinerja	2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2015 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
8.	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan program Kecamatan Sehat	100	74,36	93,58	125,85	89,74	104,28
9.	Persentase RS bekerja sama dengan BPJS kesehatan	43,69 (N/A)	72,6	81,08	111,68	86,30	91,97
10.	Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapel Jamkesos	60,8 (N/A)	88	90	102,27	94	95,74
11.	Persentase mutu pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan	96 (N/A)	69	69,05	100,07	71,90	96,04
12.	Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan	77,35	79	84,77	107,30	87	97,44
13.	Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu	67,33	48,40	57,40	118.60	72,80	78,85
14.	Persentase pemenuhan standar RS tipe C	79 (N/A)	80	85,7	107,13	82	104,51
15.	Persentase pemenuhan Laboratorium Kesehatan Tipe Utama	79 (N/A)	80	80	100	82	97,56
16.	Persentase Penderita Gangguan jiwa yang ditangani RS Jiwa Grhasia DIY	53,66	8,62	8,64	100,23	9,13	94,63

Sumber: Dinas Kesehatan DIY dan RSJ Grhasia, 2016

Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai indikator terwujudnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 38%, realisasi sebesar 40,42% pada tahun 2015. Dibandingkan pencapaian tahun 2014 mengalami kenaikan. Terhadap target akhir RPJMD 2014 pencapaian sebesar 100%. Beberapa faktor pendorong adalah dukungan komitmen dari masyarakat, lintas sektor, dukungan anggaran dari APBD dan APBN.

Persentase cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (PF) sebagai indikator dari sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu memiliki nilai capaian kinerja sebesar 99,81%. Pencapaian kinerja 2015 telah melampaui target indikator 2017. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan akses persalinan di fasilitas kesehatan, program pembiayaan persalinan, dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehamilan dan persalinan.

Persentase cakupan Kunjungan Neonatus Pertama (KN1) sebagai indikator terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita target sebesar 98,50%, realisasi sebesar 99,64%. Terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 99,64%. Tercapainya indikator ini didukung oleh tingginya angka capaian indikator persalinan di fasilitas kesehatan.

Persentase cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat sebagai indikator terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja, realisasi kinerja sebesar 99,61% dari target 98%. Capaian tahun 2015 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2014. Dibandingkan dengan target 2017, realisasi tahun 2015 sudah melampaui target. Faktor pendukung adanya dukungan koordinasi lintas sektor dari Dinas Pendidikan, Biro Kesra dan Kementerian Agama.

Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada usila (PSU) sebagai indikator terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan usila, target 62%, realisasi 70,24% mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu 61,16%. Indikator tersebut tercapai dengan fasilitasi sarana dan peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan usila di Puskesmas.

Prevalensi balita kurang gizi (KEP) sebagai indikator Terwujudnya peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat, target 2015 sebesar 7,5%, realisasi 8,04%, dibandingkan tahun 2014 prevalensi balita kurang gizi meningkat 0,13%. Terhadap target akhir RPJMD 2017 tercapai 76,31%. Faktor yang mempengaruhi peningkatan angka KEP disebabkan multi faktor, secara langsung penyumbang balita kurang gizi disebabkan masih tingginya bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), tahun 2015 sebesar 5,32% naik dari 5,06% di tahun 2014, dan bayi lahir pendek. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kualitas kesehatan ibu dari sejak mereka remaja, masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan dan masa setelah persalinan. Kualitas kesehatan ibu dipengaruhi oleh tingkat konsumsi penduduk yang belum sesuai dengan harapan. Hasil survey diet total pada kelompok usia 15-55 tahun sebesar 46,4% pada jenis kelamin wanita mengalami kekurangan energi (tingkat konsumsi <70% AKG). Di samping itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan balita juga masih cukup rendah. Hanya 79,09% masyarakat yang datang dan menimbang balitanya di Posyandu. Penyakit penyerta seperti kelainan *congenital* dan penyakit infeksi seperti TB anak juga banyak menyumbang kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita.

Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai indikator terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit tahun 2015 ditargetkan sebesar 64,44% realisasi 72,02%. Dibandingkan tahun 2014 terjadi penurunan karena perubahan definisi operasional terkait dengan adanya review renstra 2012-2017. Tercapainya indikator tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain: meningkatnya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan kemitraan dengan swasta, ormas, LSM, organisasi profesi dan masyarakat dalam mendukung program pengendalian penyakit.

Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan program Kecamatan Sehat tahun 2015 ditarget sebesar 74,36% realisasi 93,58%. Terhadap target akhir RPJMN 2017 sudah melebihi target 100%. Indikator ini tercapai didukung oleh komitmen yang kuat di kabupaten/ kota dan lintas sektor untuk terus mengembangkan penyelenggaraan KKS (Kota/ Kabupaten Sehat) di kecamatan-kecamatan. Tahun 2015 seluruh Kabupaten/ Kota di DIY telah mendapatkan Penghargaan *Swasti Sabha* dari Kementerian Kesehatan.

Persentase RS bekerja sama dengan BPJS kesehatan sebagai indikator terrwujudnya peningkatan partisipasi RS dengan BPJS tahun 2015 ditargetkan sebesar 72,6%, realisasi sebesar 81,08%. Terhadap target akhir RPJMD 2017 tercapai sebesar 91,97%. Indikator dapat dicapai karena komitmen RS untuk bekerja sama dengan BPJS sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mensukseskan program pemerintah untuk mendukung tercapai UHC (*Universal Health Coverage*).

Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapel Jamkesos target tahun 2015 sebesar 88% realisasi sebesar 90%. Terhadap target akhir RPJMD 2017 pencapaiannya sudah 95,74%. Indikator dapat dicapai didukung oleh meningkatnya mutu pelayanan kepesertaan Jamkessos.

Persentase mutu pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan dasar sebagai indikator terwujudnya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, Keamanan Makanan termasuk Pelayanan Kefarmasian serta jaminan dan pembiayaan kesehatan yang cukup, merata dan bermutu tahun 2015 target sebesar 69%, realisasi 69,05%. Pencapaian tahun 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 sudah tercapai sebesar 96,04%. Faktor yang mendukung capaian

indikator di atas adalah karena pengelolaan obat yang baik di pelayanan kesehatan, sarana produksi, distribusi farmasi dan alat kesehatan dan implementasicara produksi dan distribusi yang baik.

Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan target tahun 2015 sebesar 79%, realisasi 84,77%. Terhadap target akhir RPJMD 2017 tercapai sebesar 97,44%. Faktor pendukung pencapaian sasaran diatas karena meningkatnya jumlah pelanggan, adanya program pemasaran ke sekolah-sekolah kesehatan, tambahan kelengkapan sarana prasarana dan meningkatnya kualitas media pembelajaran, SDM dan sarana pendukung pelatihan.

Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai indikator terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu pada tahun 2015 ditargekan sebesar 48,40% realisasi sebesar 57,4% terhadap target akhir RPJMD 2017 tercapai sebesar 78,85%. Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah adanya regulasi yang mengharuskan fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pelayanan dasar dan ditingkat rujukan harus terakreditasi, demikian juga dengan terbitnya undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan bahwa semua tenaga kesehatan harus teregistrasi.

Persentase pemenuhan standar RS tipe C target tahun 2015 sebesar 80%, realisasi 85,7%. Terhadap target akhir RPJMD 2017 tercapai sebesar 104,51%. Indikator ini adalah tambahan indikator yang merupakan hasil review renstra dinas kesehatan 2012-2017. Faktor pendukung tersedianya dana yang berasal dari APBD rutin dan cukai rokokdan pajak rokok untuk pemenuhan standar RS.

Persentase pemenuhan Laboratorium Kesehatan Tipe Utama target tahun 2015 sebesar 80%, realisasi 80%. Terhadap target akhir RPJMD 2017 tercapai sebesar 97,56%. Indikator ini adalah tambahan indikator yang merupakan hasil *review* renstra dinas kesehatan 2012-2017. Faktor pendukung tersedianya dana yang berasal dari APBD rutin dan pajak rokok untuk pemenuhan standar laboratorium kesehatan tipe utama.

Persentase penderita jiwa yang ditangani di RS Jiwa Grhasia DIY telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu terealisasi sebesar 8,64% terhadap target akhir RPJMD di tahun 2017 sebesar 94,63%. Pada tahun 2015, RS Jiwa Grhasia menangani pasien gangguan jiwa berat sebanyak 836 pasien. Realisasi melebihi

target disebabkan karena peningkatan sarana prasarana, kualitas SDM, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan dalam hal pelayanan, serta akreditasi Rumah Sakit oleh KARS dengan status lulus paripurna atau mendapat bintang 5 (lima). Dalam rangka meningkatkan pelayanan, RS Jiwa Grhasia terus berupaya untuk dapat menjamin kualitas pelayanan dan meningkatkan manajemen dengan pengembangan sistem informasi, diklat atau bimtek bagi pegawai, dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar yang ada.

Tingkat ketercapaian indikator kinerja urusan kesehatan terhadap target RPJMD 2017, sebanyak 6 indikator sudah tercapai, dan yang lainnya optimis dapat dicapai. Ada satu indikator yang perlu perhatian yaitu Prevalensi balita kurang gizi (KEP) yang baru mencapai 76,31% terhadap target RPJMD 2017. Upaya akselerasi yang dilakukan untuk mencapai target 2017 akan dilakukan intervensi langsung berupa Pemberian Makanan Tambahan pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan semua Balita Kurus, pemberian tablet tambah darah (Fe) bagi semua ibu hamil dan remaja putri, pemberian kapsul Vitamin A bagi semua bayi dan balita, juga meningkatkan peranserta lintas sektor dan masyarakat dalam penanggulangan masalah gizi.

4.2.2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Program dan kegiatan urusan kesehatan pada tahun 2015 terdiri dari 20 program dan 89 kegiatan, yang dikelola oleh Dinas Kesehatan DIY dan RSJ Ghrasia. Dinas Kesehatan DIY mengelola 19 program dan 87 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp167.898.290.672 dapat direalisasi sebanyak Rp127.629.047.136 (76,02%), dengan pencapaian fisik 99,84%, yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp26.070.272.008 dan belanja langsung sebesar Rp141.828.018.664.

RSJ Ghrasia di tahun 2015 mengelola 1 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.062.913.698,00 yang bersumber dari APBD sebesar Rp21.826.213.586,00 dan jasa layanan sebesar Rp23.236.700.112,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,42%.

Capaian kinerja urusan kesehatan yang semakin baik dari tahun ke tahun tidak menyurutkan upaya untuk senantiasa mencapai peningkatan lebih lanjut.

Terdapat kesenjangan capaian kinerja fisik maupun keuangan pada Dinas Kesehatan DIY. Kesenjangan fisik disebabkan adanya kekosongan stok reagen rabies, seleksi gagal untuk jasa konsultansi survei penyakit, tidak terbelinya tanah untuk perluasan RS Paru Respira, dan kegiatan supervisi BPRS ke rumah sakit. Sedangkan kesenjangan pada keuangan faktor terbesar disebabkan oleh anggaran jaminan kesehatan pada Bapel Jamkesos yang tidak habis untuk pembayaran klaim kesehatan.

Sedangkan capaian kinerja RSJ Grhasia pada tahun 2015 terjadi peningkatan kinerja fisik maupun kinerja keuangan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Realisi fisik pada tahuan 2015 terdapat kenaikan 5,64% dari tahun 2014 sebesar 94,36% tercapai 100% di tahun 2015, sedangkan capaian keuaangan terdapat kenaikan sebesar 8,39% dari tahun 2014 sebesar 88,01% tercapai sebesar 96,4% di tahun 2015.

4.2.2.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan masih menghadapi berbagai permasalahan yang sepenuhnya belum dapat diatasi antara lain:

1. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat DIY meskipun dari sisi target sudah tercapai akan tetapi jika didalami masih ada beberapa indikator yang cakupannya masih rendah yaitu tidak merokok di dalam rumah, aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah.
2. Beban ganda penyakit seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup. Di satu sisi beban penyakit menular seperti HIV AIDS, TB paru, DBD dan diare masih perlu penanganan serius dan disisi lain penyakit tidak menular yang didominasi penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes mellitus, asma, kanker, kecelakaan dan gangguan jiwa cukup tinggi.
3. Beban ganda masalah gizi sudah nampak, masalah kurang gizi belum mampu diturunkan secara optimal tetapi prevalensi gizi lebih (kegemukan) cenderung naik dari tahun ke tahun. Sejalan dengan realita angka kemiskinan di DIY diatas angka nasional dan sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 70,97%. Hal

tersebut sejalan dengan hasil Riskesdas 2013 bahwa DIY salah satu dari 5 provinsi yang memiliki pola makanan beresiko dan hasil studi diet total tahun 2014 menunjukkan konsumsi gula tertinggi ada di DIY.

4. Jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu semakin meningkat, namun belum seluruh masyarakat terlindungi secara optimal terhadap beban pembiayaan kesehatan. Masih adanya disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, belum berjalannya sistem rujukan kesehatan secara baik.
5. Masih adanya stigma negatif di masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa maupun eks penderita gangguan jiwa.
6. Masih adanya kasus pemasungan penderita gangguan jiwa berat di DIY. Data pasung sejak 2012 terdata 97 kasus, yang belum dibebaskan 8 kasus karena penolakan keluarga.
7. Belum semua keluarga mau menerima kondisi anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa dan kurangnya kapasitas keluarga dalam mendampingi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
8. Penanganan terhadap kesehatan jiwa masih terkesan parsial oleh sektor tertentu di semua tingkatan pemerintahan.

B) Solusi

1. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui posyandu, desa/ kelurahan siaga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan.
2. Meningkatkan upaya promotif, preventif dengan melaksanakan peningkatan kewaspadaan dini, peningkatan surveilens penyakit dan peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana kasus penyakit serta penyediaan logistik, mengembangkan kemitraan.
3. Meningkatkan koordinasi dan advokasi lintas sektor dan meningkatkan peran swasta serta pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kurang gizi dengan membudayakan Pola Makan Gizi Seimbang di masyarakat untuk mengantisipasi naiknya masalah gizi lebih yang memicu penyakit tidak menular.
4. Integrasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan penambahan jenis layanan yang dijamin sebagai upaya pengembangan jaminan kesehatan

semesta, penerapan sistem rujukan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

5. Peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai upaya promotif dan preventif dalam rangka mengurangi stigma terhadap penderita gangguan jiwa di masyarakat.
6. Penanganan
7. kasus pasung sebagai tindak lanjut Pergub DIY No 81 tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan dan meningkatkan jejaring antara fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani kasus gangguan jiwa khususnya pemasungan.
8. Pendampingan keluarga pasien melalui *family gathering*, pendidikan keluarga atau caregiver ODGJ dan pembentukan paguyuban Laras Jiwo agar pasien paska rawat inap mendapatkan layanan berkesinambungan dan layak.
9. Penguatan jejaring lintas sektor dengan menyusun kesepakatan antar sektor terkait penanganan masalah kesehatan jiwa.

4.2.3 Urusan Lingkungan Hidup

4.2.3.1 Kondisi Umum

Gambar 4.3 Kegiatan *Mertikali*-Padat Karya Bersih Sungai

Kondisi lingkungan hidup sangat mempengaruhi kualitas kehidupan eksositem didalamnya termasuk manusia, sebagaimana juga terjadi pada wilayah DIY. Lingkungan hidup yang terdiri dari air, udara dan tanah/lahan serta unsur-unsur didalamnya mengalami tekanan dan menyebabkan turunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan yang merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran lingkungan mempengaruhi derajat kesehatan dan kesejahteraan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator terjadinya pencemaran lingkungan dapat diukur dari beberapa aspek, antara lain kualitas air dan kualitas udara serta kondisi lahan.

Penurunan kualitas air sungai dipengaruhi oleh aktifitas manusia, karena sungai merupakan ekosistem yang terbuka dan memungkinkan masuknya berbagai jenis polutan. Selain itu, penurunan kualitas air sungai juga dipengaruhi oleh terjadinya degradasi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi sehingga menyebabkan air hujan kurang terserap kedalam tanah sehingga menurunkan debit air sungai. Berbagai material erosi yang masuk ke dalam sungai juga dapat mengakibatkan pendangkalan sungai dan menyebabkan daya tampung sungai berkurang yang akhirnya mengakibatkan terjadinya banjir pada musim hujan.

Penurunan kualitas udara ambien dipengaruhi oleh konsentrasi zat pencemar baik berupa gas maupun partikel debu di udara. Kualitas udara di DIY secara umum semua parameter masih memenuhi baku mutu, namun dengan meningkatnya sarana transportasi dikhawatirkan parameter CO dan HC cenderung mengalami peningkatan dan mengindikasikan terjadinya penurunan kualitas udara ambien, khususnya pada jalan padat lalu-lintas.

Fungsi lahan/ tanah sebagai habitat bagi makhluk hidup perlu dipertahankan daya dukung dan daya tampungnya untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Menurunnya fungsi lahan/ tanah yang diakibatkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatan tata ruang dapat menimbulkan kerusakan lahan seperti erosi, tanah longsor, menurunnya kesuburan tanah, gangguan fungsi tata air. Penggunaan lahan yang berpotensi menurunkan fungsi lahan/ tanah adalah seperti berikut: (1) Tidak sesuai kaidah pemanfaatan tata ruang; (2) Reklamasi lahan pasca-penambangan belum dilakukan, terutama penambangan galian golongan C yang dilakukan oleh masyarakat secara illegal; (3) Populasi penduduk yang terus meningkat membutuhkan ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana, sementara jumlah lahan yang tersedia tetap; dan (4) Penggunaan lahan untuk pertanian yang belum memperhatikan tehnik konservasi tanah.

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun. Indikator sasaran strategis urusan wajib bidang lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2012-2017, yaitu: persentase peningkatan kualitas air, persentase peningkatan kualitas udara, dan peningkatan akses informasi lingkungan hidup.

Tabel 4.10 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan kualitas udara	persen	4,51	6,76	6,76	100	11,26	60,04
2	Persentase peningkatan kualitas air	persen	7,8	11,21	10,43	98,73	18,69	59,22
3	Peningkatan akses informasi lingkungan hidup	jenis	8	9	9	100 %	11	81,22

Sumber: BLH DIY, 2016

Persentase peningkatan kualitas udara ditentukan oleh target dan realisasi 2 (dua) parameter kunci yaitu parameter *Carbon Monoksida* (CO) dan *Hidro Carbon* (HC). Penghitungan capaian dua parameter kunci kualitas udara ambien mendasarkan hasil uji pemantauan kualitas udara yang dilakukan selama dua periode dalam setahun dengan lokasi yang di tepi jalan protokol (*roadside*), kawasan permukiman dan sekitar kawasan industri. Realisasi capaian parameter *Carbon Monoksida* (CO) sebesar 1.221 mg/m^3 dari target yang ditetapkan sebesar <9.000 mg/m^3, tercapai 100%. Realisasi capaian parameter *Hidro Carbon* (HC) sebesar 68,26 mg/m^3 dari target yang ditetapkan sebesar <130 mg/m^3, tercapai 100%. Capaian 2 (dua) parameter CO dan HC dirata-rata hasilnya 100% (Capaian indikator peningkatan kualitas udara tercapai sebesar 6,76%). Pada tabel di atas target capaian persentase peningkatan kualitas udara sebesar 6,76% realisasinya sebesar 6,76% (memenuhi target 100%). Dengan terpenuhinya target peningkatan kualitas udara ini, maka kualitas udara di DIY masih kondusif bagi masyarakat.

Angka persentase peningkatan kualitas air pada tahun 2015 dihitung berdasarkan data hasil pemantauan 11 sungai, yaitu sungai Winongo, Code, Gajahwong, Kuning, Konteng, Tambakbayan, Bedog, Oyo, Belik, Bulus dan Opak. Parameter kunci yang

digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD), parameter *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan Koli Tinja. Realisasi capaian parameter BOD sebesar 8,83 mg/l dari target yang ditetapkan < 9 mg/l, tercapai 100%. Realisasi capaian parameter COD sebesar 18,30 mg/l dari target < 45 mg/l, tercapai 100%. Realisasi capaian Bakteri Koli sebesar 181.909 MPN/100 ml dari target yang ditetapkan <175.000 MPN/100 ml, belum tercapai 96,20%. Capaian 3 parameter BOD, COD dan Bakteri Koli dirata-rata, hasilnya 98,75%. Pada tabel diatas target capaian persentase peningkatan kualitas air sebesar 11,21% realisasinya sebesar 11,07% (belum memenuhi target). Angka target peningkatan kualitas air belum tercapai, disebabkan dari hasil uji pemantauan kualitas air sungai untuk parameter bakteri koli belum mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk parameter BOD dan COD telah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun sumber pencemaran bakteri koli tinja utamanya berasal dari limbah domestik dan kotoran ternak.

Salah satu upaya serius yang telah dilakukan Pemerintah DIY sampai saat ini dalam pengendalian pencemaran sungai adalah melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini merupakan upaya memperbaiki kualitas lingkungan, melalui kegiatan pemantauan kualitas air yang dilaksanakan 3 periode dalam satu tahun, di 11 sungai di DIY. Upaya lain untuk menurunkan beban pencemaran air melalui kegiatan pengawasan penaatan hukum lingkungan dan pembinaan pengendalian pencemaran air dan bahan beracun dan berbahaya (B3).

Target indikator kinerja peningkatan akses informasi lingkungan hidup dalam RPJMD DIY sampai akhir periode tahun 2017 sebesar 11 jenis data. Pada tahun 2015 target peningkatan akses informasi lingkungan hidup sebesar 9 jenis data, realisasinya 9 jenis data (sesuai target 100%). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 8 jenis data, maka realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan 1 (satu) jenis data yaitu jenis data uji emisi kendaraan bermotor. Adapun 9 (sembilan) jenis data yang dapat diakses adalah sebagai berikut: Data Pemantauan Kualitas Air Sungai, Data Kualitas Udara Ambien, Data Kualitas Air Laut, Data Kualitas Air Sumur, Data Kualitas Tanah, Data Kualitas Limbah Padat, Data Kualitas Limbah Cair, Data Sumber Pencemar, dan Data Uji Emisi Kendaraan Bermotor.

4.2.3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015

Pagu anggaran Badan Lingkungan Hidup DIY tahun 2015 sebesar Rp17.501.914.403,00 terdiri dari belanja tidak langsung (gaji pegawai) Rp3.369.025.378,00 dan belanja langsung (kegiatan) sebesar Rp14.132.889.025. Realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung sebesar Rp3.276.854.701 (97,26%) dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp12.949.636.828 (91,63%). Total realisasi belanja sebesar Rp16.226.491.529 (92,71%), sehingga sisa anggaran sebesar Rp1.183.252,197 (8,37%) telah disetor ke kas Negara. Realisasi fisik belanja tidak langsung sebesar 100% dan realisasi fisik belanja langsung sebesar 100%. Belanja langsung (kegiatan) dilaksanakan melalui 10 program yang terdiri dari 44 kegiatan.

4.2.3.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- DIY mempunyai daya tarik bagi para investor properti untuk menyediakan sarana hunian baik bagi para pelajar/ mahasiswa maupun para lansia yang ingin tinggal menikmati masa tuanya di DIY. Kondisi ini cenderung akan meningkatkan jumlah pencemaran/ kerusakan sungai apabila tidak diikuti kewajiban pengelolalan lingkungan secara baik oleh para pemangku kepentingan.
- Penambahan penduduk, peningkatan laju perekonomian dan keterbatasan layanan transportasi publik yang tersedia di DIY memicu timbulnya peningkatan kepemilikan jumlah kendaraan pribadi. Kondisi ini akan menurunkan kualitas udara ambien, khususnya di wilayah perkotaaan.

B) Solusi

- Melakukan penaatan dalam implemantasi dokumen lingkungan baik pada saat pra pembangunan, konstruksi maupun saat operasional sarana prasarana wisata, pendidikan dan permukiman.
- Mendorong pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan baik milik publik maupun privat, serta mendorong kabupaten/ kota untuk lebih efektif melakukan uji emisi kendaraaan bermotor.

4.2.4 Urusan Pekerjaan Umum

4.2.4.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakaryaan, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah DIY berkewajiban dan bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan konkuren yang tercantum dalam UU tersebut, meliputi:

- Sub Urusan Sumber Daya Air untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air terbatas yang dikerjasamakan dengan Daerah) serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah Kabupaten/ Kota;
- Sub Urusan Jalan bertanggungjawab untuk melaksanaan pengelolaan jalan berstatus Jalan Provinsi, meliputi penanganan pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan/ pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
- Sub Urusan Keciptakaryaan melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten/ Kota, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/ Kota, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah, penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah, penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah, Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah Kabupaten/ Kota;
- Sub Urusan Jasa Konstruksi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.

Mengingat UU Nomor 23 Tahun 2014 baru terbit diakhir tahun anggaran 2014, program dan kegiatan tahun 2015 belum sepenuhnya bisa mengacu pada urusan

konkuren tersebut diatas. Berdasarkan Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah TAHUN 2012–2017, sasaran pembangunan urusan Pekerjaan Umum adalah: Meningkatnya aksesibilitas jalan ; Meningkatnya akses air minum; Meningkatnya akses sanitasi yang layak; dan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi. Adapun kinerja capaian sasaran tersebut diukur menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu: aksesibilitas jalan di wilayah provinsi; persentase penduduk berakses air minum; persentase penduduk berakses sanitasi yang layak; dan persentase penyelenggaraan jasa konstruksi.

Tabel 4.11 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi	%	N/A	86	91,88	106,84	90	102,09
2	Persentase penduduk berakses air minum	%	N/A	80,85	81,25	100,49	87,83	92,51
3	Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak	%	N/A	80	87,05	108,8	90	96,72
4	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	%	N/A	83,33	87,42	104,91	90,83	96,24

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2016

A. Aksesibilitas Jalan di Wilayah Provinsi

Untuk meningkatkan konektifitas antar wilayah pada pusat-pusat produksi sangat diperlukan penyediaan aksesibiltas jalan. Kebutuhan jalan untuk menghubungankan pusat-pusat produksi di DIY sepanjang 1.007,32 km. Hingga akhir tahun 2015 untuk memenuhi kebutuhan jalan tersebut telah terbangun jalan sepanjang 925,56 km yang terdiri atas jalan negara sepanjang 247,91 km, jalan provinsi sepanjang 619,34 km, jalan selokan mataram yang telah ditingkatkan struktur dan kapasitasnya sepanjang 9,34 km dan jalan jalur pantai selatan (Pansela) sepanjang 48,97 km. Dengan demikian aksesibilitas jalan di wilayah provinsi hingga tahun 2015 tercapai 91,88%. Capaian ini telah melampaui sebesar

106,84% dari target sebesar 86%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017 telah mencapai 102,09%.

Capaian aksesibilitas jalan di wilayah provinsi tersebut didukung oleh program pengadaan tanah untuk infrastruktur, program peningkatan jalan dan jembatan, program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan dan program inspeksi jalan dan jembatan, serta dukungan APBN Kementerian PUPUPR di Wilayah DIY.

Pengembangan aksessibilitas jalan jalan di wilayah DIY baru difokuskan pada percepatan penyelesaian jalan jalur Pantai Selatan (Pansela) yang membentang di sepanjang pantai selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul) serta pengembangan Pusat kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pembangunan jalan Selokan Mataram yang menghubungkan jalan arteri utara barat sampai dengan jalan arteri utara timur dengan membangun jalan di sisi utara dan selatan Selokan Mataram sepanjang.

Kebutuhan total lahan untuk pembangunan aksesibilitas kawasan strategis dan kawasan strategis baru seluas 373,656 ha, yakni untuk pembangunan jalur Pansela seluas 366,992 ha dan untuk pembangunan jalan Selokan Mataram seluas 6,664 ha, secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2015 lahan yang telah disediakan/dibebaskan seluas 122,974 ha atau 32,91%.

Kondisi jalan propinsi berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan (100%), pada akhir tahun 2015 diperoleh data bahwa Jalan Provinsi dalam kondisi mantap sepanjang 457,99 km atau 73,95%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 73,24%.

Tabel 4.12 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2015

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		km	%		km	%
1	Mantap	457,99	73,95	Baik	233,90	37,77
				Sedang	224,09	36,18
2	Tidak Mantap	161,35	26,05	Rusak Ringan	141,69	22,88
				Rusak Berat	19,66	3,17
JUMLAH		**619,34**	**100**	**Jumlah**	**619,34**	**100**

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2016

B. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Ketidakseimbangan antara jumlah air yang siap dimanfaatkan dengan permintaan kebutuhan air masyarakat saat ini dan mendatang memerlukan upaya-upaya komprehensif dalam pengembangan sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan akan air minum.

Hingga akhir tahun 2015 melalui program pengembangan pengelolaan air minum, program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air Lainnya serta dukungan APBN Ditjen Cipta Karya melalui kegiatan pembangunan SPAM IKK dan Optimalisasi SPAM IKK dan dukungan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum yang tersebar di lima kabupaten/ kota di DIY, penduduk berakses air minum sejumlah 2.926.514 jiwa atau setara dengan 81,25% dari total penduduk DIY. Capaian tersebut telah melampaui 100,49% dari target tahun 2015 sebesar 80,85%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017 baru mencapai 92,51%.

Melalui program pengembangan pengelolaan air minum telah dilaksanakan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Sistem Kartamantul sepanjang 15 Km sebagai upaya meningkatkan debit air minum SPAM Regional Kartamantul menjadi 200 liter/detik untuk melayani 160.000 jiwa di Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Adapun melalui Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dan Program Penyediaan Air Baku telah dibangun 1 buah embung di Kabupaten Bantul, 1 buah embung di Kabupaten Gunungkidul dan 3 buah embung di Kabupaten Kulonprogo yang dapat diperoleh tambahan ketersediaan air baku sebesar 45,20 liter/detik. Dan atas dukungan APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) telah dibangun 1 buah embung di Kota Yogyakarta, yang mampu menyediakan air baku sebesar 8,67 liter/detik.

C. Persentase Penduduk Berakses Sanitasi yang Layak

Pengelolaan sanitasi meliputi pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan sampah dan pengelolaan drainase. Melalui dukungan program program pengembangan pengelolaan air limbah, program pengelolaan persampahan dan

progaram pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, hingga pada akhir tahun 2015 capaian jumlah penduduk berakses sanitasi layak sejumlah 3.135.376 jiwa atau setara dengan 87,05% dari total penduduk DIY. Capaian tersebut telah melampaui 108,8% dari target tahun 2015 sebesar 80%. Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017 baru mencapai 96,72%.

Untuk mengurangi pencemaran air tanah dari limbah rumah tangga di KPY telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sewon beserta jaringan perpipaanya. Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY dicapai melalui pelaksanaan program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah. Pada tahun 2015, melalui koordinasi intensif dengan kabupaten kota dan dukungan APBD DIY berupa pembangunan pipa lateral, pipa service berserta operasi pemeliharaannya dan APBD Kabupaten/ Kota jumlah sambungan rumah yang terpasang secara kumulatif mencapai 20.101 SR. Jumlah sambungan rumah air limbah cair rumah tangga pada sistem IPAL terpusat sewon disajikan pada tabel x.x

Tabel 4.13 Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Pada Sistem IPAL Terpusat Sewon Sampai Dengan Tahun 2015

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)
1	Kabupaten Bantul	1.764
2	Kota Yogyakarta	16.170
3	Kabupaten Sleman	2.167
Jumlah Total		**20.101**

Sumber Data: Pemerintah Kabupaten/ Kota se-DIY, 2015

Melalui program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY telah dilaksanakan pembangunan TPST 3R di Wirokerten dan Piyungan Kabupaten Bantul serta kegiatan peningkatan sarana prasana dan operasi pemeliharaan TPA Piyungan, didukung pula oleh kegiatan pembangunan TPST 3R oleh dana APBN yang tersebar di 5 kabupaten/ kota di DIY hingga akhir tahun 2015 Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan mencapai 67,26%. Adapun untuk mengurangi titik genangan melalui program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong telah dilaksanakan pembangunan yang secara komulatif jumlah titik genangan yang tertangani menjadi sebanyak 30 titik genangan atau mencapai 58,82%.

D. Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Infrastruktur merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian di suatu daerah. Pengembangan infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari sektor jasa konstruksi. Untuk mendapatkan infrastruktur yang handal dan bermutu diperlukan konstuksi infrastruktur yang bermutu. Kinerja penyelenggaraan kinerja konstruksi dukur berdasarkan rerata persentase kinerja pelayanan jasa pengujian, pembinaan jasa konstruksi, dan pengkajian & penerapan teknologi bidang Pekerjaan Umum. Hingga akhir tahun 2015 kinerja pelayanan jasa pengujian sebesar 97,62%, kinerja pembinaan jasa konstruksi sebesar 83,94 dan kinerja pengkajian & penerapan teknologi bidang Pekerjaan Umun sebesar 80,70, sehingga kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi mencapai 87,42%.

Capaian ini telah melampaui 104,91% dari target sebesar 83,33. Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD-P tahun 2017, baru mencapai 96,24%.

4.2.4.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pada Tahun Anggaran 2015 jumlah alokasi danauntuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp285.118.864.498,00 yang dilaksanakan melalui 19 program dan didukung oleh 41 kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi keuangan sebesar Rp265.645.305.819,00 (93,17%) dan realisasi fisik sebesar 97,23%. Realisasi fisik yang kurang dari target 100% adalah kegiatan pengadaan tanah untuk infrastruktur.

4.2.4.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Pembebasan lahan untuk jalur Pansela terkendala adanya perubahan trase jalan pada ruas Baron-Tepus atas permintaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hal ini memerlukan perubahan desain oleh Ditjend Bina Marga Kementerian PUPR yang mengakibatkan pelaksanaan fisik tidak bisa sesuai waktu yang direncanakan.
- Pengadaan tanah untuk jalur Pansela, pembangunan jalan Selokan Mataram dan jalan Imogiri Timur terkendala proses administrasi dan masalah hukum (sebagian tanah masih dalam sengketa). Sedangkan

pengadaan tanah untuk pembangunan salah satu reservoir air minum Sistem Kartamantul terpaksa ditunda karena adanya perubahan perencanaan teknis yang mempengaruhi lokasi dan luasan pengadaan tanah.

B) Solusi

- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam penentuan trase jalan agar desain dan pelaksanaan pembangunan jalan jalur Pansela sesuai target waktu yang direncanakan.
- Mengalokasikan waktu yang lebih banyak untuk berkomunikasi dengan masyarakat terdampak agar mampu memberikan data status tanah secara lengkap dan benar. Untuk pengadaan tanah pembangunan reservoir air sistem Kertamantul dilaksanakan pada tahun 2016.

4.2.5 Urusan Penataan Ruang

4.2.5.1 Kondisi Umum

Penyelenggaran Penataan Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara holistic dan komprehensif yang mencakup aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Dalam pelaksanaannya tentu pula kita perlu untuk melakukan pengaturan penataan ruang itu sendiri diantaranya ialah upaya untuk melakukan pembentukan landasan hokum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.

Undang–Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan Penataan Ruang yang didasarkan pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

Berdasarkan aturan yang berlaku, setelah Rencana Tata Ruang berjalan selama 5 (lima) tahun, perlu dilakukan *review* terhadap dokumen tersebut sebagai sebuah proses peninjauan kembali terhadap arahan pelaksanaan penataan ruang. Disamping itu, adanya beberapa peristiwa yang terjadi di Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam kurun waktu terakhir, di antaranya terjadinya bencana alam letusan Gunung Merapi yang berakibat terhadap penambahan luas Kawasan Rawan Bencana, disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berimplikasi terhadap penataan ruang Kawasan Tanah Kasultanan dan Kawasan Tanah Kadipaten, serta beberapa keputusan pembangunan dari pemerintah pusat, juga turut mempengaruhi arahan penataan ruang yang mencakup perencanaan struktur ruang, pola ruang, serta penetapan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan pengaturan penataan ruang, rencana tata ruang harus ditindaklanjuti secara berjenjang dan komplementer, dimana untuk tingkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang adalah penyusunan rencana detail tata ruang. Rencana Detail Tata Ruang tersebut digunakan sebagai instrument dan pedoman dalam pemberian perijinan pemanfaatan ruang, terutama bagi Kabupaten/ Kota dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional, dan pada kawasan lindung bawahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/ Kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Mengingat UU Nomor 23 Tahun 2014 baru terbit diakhir tahun anggaran 2014, program dan kegiatan tahun 2015 belum sepenuhnya bisa mengacu pada urusan konkuren tersebut diatas. Berdasarkan Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017, sasaran pembangunan urusan Penataan Ruang adalah meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi. Kinerja capaian sasaran tersebut diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dengan RTRW Provinsi; dan meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dengan RTRW Provinsi.

Tabel 4.14 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2015

No	Indikator/ Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dengan RTRW provinsi	%	N/A	81,20	62,28	76,70	81,60	76,32
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dengan RTRW provinsi	%	N/A	48,05	66,44	138,27	48,50	136,99

Sumber: Dinas PU P & ESDM, 2016

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang hingga akhir tahun 2015 diketahui kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di DIY sebesar 62,28%, capaian tersebut dibawah target yang ditetapkan sebesar 81,20%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017 baru mencapai 76,32%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh pemanfaatan ruang khususnya pada kawasan lindung geologi untuk permukiman dan sawah tadah hujan. Perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan RTRW provinsi dengan skala 1:100.000. Untuk perhitungan lebih rinci maka perlu segera menetapkan RTRW kawasan strategis provinsi dengan skala 1:25.000. Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dengan RTRW provinsi tersebut didukung oleh program perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang dan program pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karenanya pemanfaatan ruang kawasan budidaya yang sesuai dengan rencana tata ruang

sangat diperlukan guna mewujudkan tata kelola ruang yang baik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang hingga akhir tahun 2015 diketahui kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya di DIY sebesar 66,44%, capaian tersebut telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 48,05%. Hal ini didukung dengan meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan pertanian lahan basah dan pariwisata. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017 telah mencapai 136,99%. Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dengan RTRW provinsi tersebut didukung oleh program perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang dan program pengendalian pemanfaatan ruang.

4.2.5.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, urusan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 3 program dan 5 kegiatan, anggaran seluruhnya sebesar Rp1.090.056.000,00 terealisasi sebesar Rp1.019.770.500,00 (93,55%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

4.2.5.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Pemerintah Kabupaten/ Kota belum menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang seharusnya menjadi acuan operasional dalam pemberian ijin, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sangsi, karena keterbatasan sumber daya;
- Masih terbatasnya jumlah aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang yang mengawal penyelenggaraan penataan ruang di DIY khususnya PPNS Penataan Ruang Kabupaten/ Kota.

B) Solusi

- Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam rangka percepatan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi;
- Meminta Kabupaten/ Kota untuk menambah jumlah PPNS Penataan Ruang serta mengoptimalkan kinerja PPNS Penataan Ruang yang sudah ada.

4.2.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

4.2.6.1 Kondisi Umum

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagai urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahanan Daerah di DIY yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Visi dan misi pembangunan DIY yang akan dicapai beserta arah pencapaiannya dalam 20 tahun mendatang tertuang dalam dokumen RPJPD DIY yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2009 tersebut. Tahun 2015 adalah tahun ke-empat dalam masa RPJMD 2012-2017 sebagaimana diatur dalam Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan dan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel 4.15 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%	16,90	13,94	8,28	140,60	8,07	97,39
2	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	%	81,12	84	86,57	103,06	91,93	94,17

Sumber: Analisis Bappeda DIY, 2016

Realisasi kinerja sasaran keterpaduan program/kegiatan pembangunan RPJMD pada tahun 2015, sebesar 8,28 % atau memiliki persentase realisasi sebesar 140,60% dibandingkan target tahun yang sama. Capaian tersebut didukung dari 157 indikator sasaran yang ada, dengan terdapat 13 indikator sasaran yang belum mencapai target. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi pada 2015 memiliki persentase capaian sebesar 97,39%. Capaian tersebut menunjukkan upaya perencanaan yang sudah berjalan efektif.

Sedangkan untuk indikator capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD memiliki realisasi sebesar 86,57%. Capaian itu sudah melebihi target pada 2015 dengan persentase capaian 103,06%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2017, maka capaian pada 2015 menunjukkan persentsae realisasi sebesar 94,17%. Capaian sasaran tahun 2015 menunjukkan tingkat pengendalian terhadap pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan. Capaian indikator ini juga menunjukkan komitmen Pemda DIY dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan (indikator kinerja utama Pemda DIY) sebagaimana arah RPJMD DIY 2012-2017.

Bappeda sebagai representasi pemerintah daerah dalam bidang perencanaan daerah pada tahun 2015 berhasil mempertahankan anugerah Pangripta Nusantara Utama dalam Kategori A diperingkat pertama seperti yang dicapai yang pada tahun sebelumnya (2014). Kementerian PPN/ Bappenas menetapkan dua kelompok

daerah, kategori A diberikan kepada daerah kategori sumber daya cukup besar untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Kriteria penilaian didasarkan pada empat aspek, pertama keterkaitan antar dokumen RKPD Tahun 2015 dengan dokumen RPJMD dan RKP. Aspek kedua, Konsistensi dalam dokumen RKPD dimana konsistensi antara hasil evaluasi dari capaian pembangunan tahun sebelumnya dengan isu strategis, isu strategis dengan prioritas, dan prioritas dengan pennganggaran. Aspek ketiga, Kelengkapan dan kedalaman dokumen yang menyajikan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, analisis arah dan prioritas pengembangan wilayah, arah kebijakan percepatan pada pertumbuhan ekonomi daerah (*pro growth*), pengurangan kemiskinan (*pro poor*), pengurangan pengangguran (*pro job*), kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan (*pro-environment*) dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG's). Aspek keempat, keterukuran tujuan dan sasaran RKPD 2015 yang dilengkapi dengan indikator kinerja.

4.2.6.2 Program/ Kegiatan Reguler Tahun Anggaran 2015

Jumlah total anggaran yang berasal dari sumber pendanaan APBD pada Tahun 2015 untuk urusan perencanaan pembangunan adalah sebesar Rp20.953.507.615,00 (dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas Belanja Langsung sebesar Rp14.387.107.600,00 (empat belas miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp6.566.400.015,00 (enam miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu lima belas rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai sejumlah 10 program dan 52 kegiatan yang terdiri dari empat program pendukung perencanaan, 6 program urusan perencanaan.

Realisasi fisik Program/Kegiatan Tahun 2015 mencapai 99,97%. Dari 10 program hanya satu program yang realisasi fisiknya sebesar 98,64% yaitu Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Deviasi capaian fisik pada kegiatan tersebut terjadi karena faktor eksternal yaitu: (1) untuk tolok ukur kinerja kursus pengadaan barang/jasa & sertifikasi tidak ada penawaran dari lembaga yang berwenang sehingga BAPPEDA tidak bisa

mengirim personil untuk mengikuti kursus tersebut; (2) untuk Tolok Ukur kinerja kursus penjenjangan Pejabat Fungsional Tertentu (perencana) anggaran yang disediakan tidak mencukupi biaya yang ditetapkan panitia.

4.2.6.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan pada Urusan Perencanaan

- Fungsi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dalam konteks pencapaian kinerja sasaran belum optimal.
- Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
- Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan secara tepat dan efektif sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan.
- Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan baik antar sektor maupun antar daerah (kabupaten/ kota), yang mengakibatkan ketidaksinkronan perencanaan pembangunan.

B) Solusi

- Meningkatkan fungsi kooordinasi dan evaluasi pelaksanaan program di sektor-sektor terkait.
- Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran dan mengintegrasikan proses politik sejak awal serta menyinkronkan waktu reses DPRD dengan tatakala waktu perencanaan maupun penganggaran.
- Peningkatan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (*up to date*) sebagai bahan perencanaan yang efektif.
- Meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar daerah dan antar instansi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur tentang tatacara koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan musrenbang daerah.

4.2.7 Urusan Perumahan

4.2.7.1 Kondisi Umum

Kewajiban Pemerintah Daerah atas kewenangan konkuren sebagaimana tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi;
c. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
d. Penyelenggaraan PSU permukiman;
e. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

Hal tersebut berimplikasi adanya beberapa perubahan kewenangan atas urusan untuk masing-masing level pemerintahan. Mengingat UU Nomor 23 Tahun 2014 baru terbit diakhir tahun anggaran 2014, RPJMD 2012-2017 belum disesuaikan, termasuk program dan kegiatan tahun 2015 belum sepenuhnya memfasilitasi pelaksanaan urusan konkuren tersebut diatas, dengan lebih terfokus pada upaya mengurangi jumlah rumah tangga miskin dengan fasilitasi terkait rumah dan sarana pendukungnya.

Sesuai Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah TAHUN 2012–2017, sasaran pembangunan urusan bidang perumahan adalah menurunnya perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni yang kinerjanya diukur menggunakan indikator persentase rumah tidak layak huni.

Tabel 4.16 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumah tidak layak huni	%	N/A	7,25	7,17	101,11	6,75	94,14

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2016

Untuk mewujudkan menurunnya perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni didukung melalui program pengembangan perumahan, program pemberdayaan komunitas perumahan dan program pengurangan kawasan kumuh. Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) dilakukan melalui fasilitasi perbaikan kualitas rumah yang diwujudkan dengan bantuan stimulan bahan bangunan kepada masyarakat. Hasil identifikasi awal pada tahun 2012 jumlah rumah yang tergolong rumah tidak layak huni (RTLH) sejumlah 91.200 unit. Hingga tahun 2014 jumlah RTLH yang tersebar di DIY sejumlah 77.764 unit atau setara dengan 7,49%.

Dokumen RPJMD DIY 2012-2017, terutama pada target tahun 2015 yang ditetapkan adalah menurun menjadi 7,25%. Untuk mencapai target tersebut telah dilakukan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan pemangku lainnya yang menangani bidang perumahan. Total RTLH yang ditangani pada tahun 2015 sejumlah 3.273 unit yang terdiri dari penanganan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dengan demikian secara kumulatif jumlah RTLH sampai dengan akhir tahun 2015 yang belum tertangani sebanyak 74.491 unit atau setara dengan 7,17%. Kinerja ini telah melampaui 101,11% terhadap target tahun 2015.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang tidak layak huni yang difokuskan pada kawasan kumuh di kecamatan miskin, melalui APBD DIY hingga akhir tahun 2015 secara kumulatif telah ditangani sebanyak 53 lokasi kumuh yang setara dengan 49,53% dari jumlah total 111 lokasi kumuh serta dilaksanakan pemberdayaan komunitas perumahan. Secara kumulatif telah tertangani sebanyak 329 komunitas perumahan yang diberdayakan atau setara dengan 75,11% dari jumlah total komunitas perumahan sebanyak 438 komunitas.

4.2.7.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, Urusan Perumahan direalisasi dalam APBD DIY melalui 3 program dan 8 kegiatan dengan jumlah dana Rp11.162.955.000 yang terealisasi sebesar Rp10.285.717.500 (92,14%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

4.2.7.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Belum ada *database* Jumlah RTLH yang terintegrasi dengan Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Kelurahan (sebagai unit terkecil pemerintahan) yang bisa ter-*update* dari waktu ke waktu, menyulitkan pengambilan keputusan penanganan RTLH yang akan ditangani lebih dahulu;
- Belum ada penjabaran penetapan kawasan kumuh sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014.

B) Solusi

- Di Tahun 2016 diprogramkan pembuatan Data Base RTLH yang bisa di *up date* oleh pihak-pihak terkait secara terintegrasi;
- Ditingkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten/ kota dalam penanganan kawasan kumuh sesuai kewenangan.

4.2.8 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

4.2.8.1 Kondisi Umum

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan dengan menciptakan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minatnya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/ pemberdayaan pemuda, pengembangan jiwa kewirausahan dan kemandirian pemuda sehingga terbentuk sikap positif pemuda dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mewujudkan kapasitas pemuda dalam olahraga yang berkualitas dan berdaya saing dilaksanakan dengan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan

olahragawan berbakat. Melalui pembibitan dan pembinaan dapat meningkatkan prestasi pada berbagai jenjang.

Gambar 4.4 Peningkatan Kemandirian dan Kepeloporan Pemuda Tahun 2015

Penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan dan pemberdayaan pemuda dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian dan kepeloporan pemuda, pengembangan sentra pemberdayaan pemuda, pemberdayaan peran serta pemuda untuk pembangunan, pembinaan dan pengiriman pertukaran pemuda antar negara dan kapal pemuda nusantara dan pembinaan pemuda kader narkoba. Adapun untuk menumbuhkan dan memberi bekal kewirausahaan pemuda dilakukan pelatihan keterampilan. Melalui pembinaan ini diharapkan tumbuhnya inovasi bisnis dan daya saing pemuda sehingga sanggup untuk berusaha secara mandiri secara berkelanjutan serta handal menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Tabel 4.17 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Prestasi Cabang Olahraga	Peringkat	0	13	11	115,38	13	100
2	Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	Sentra	12	13	13	100	15	86,67
3	Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/ pemberdayaan pemuda	%	0	100	100	100	100	100
4	Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda	Kelompok	345	365	365	100	405	100

Sumber: Disdikpora DIY, 2016

Capaian peringkat prestasi olahraga tampak pada capaian peringkat kontingen DIY pada POPNAS yang menduduki peringkat 11. Capaian ini jauh di atas target, yaitu 115,38%. Bila dibandingkan dengan RPJMD 2017 yaitu peringkat 13 telah tercapai 100%. Adapun untuk jumlah sentra pemberdayaan pemuda pada tahun 2015 telah sesuai dengan target yaitu 13 sentra atau 100%. Dibandingkan 2014 sebanyak 12 sentra terdapat peningkatan 1 sentra. Apabila dibandingkan dengan RPJMD 2017, capaian target jumlah sentra pemberdayaan pemuda tahun 2015 sebanyak 13 sentra telah mencapai 86,67% dari target.

Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda pada tahun 2015 mencapai 100% dari target. Bila dibandingkan dengan RPJMD 2017 telah mencapai 100% pula. Sedangkan jumlah kelompok wirausaha muda pada tahun 2015 mencapai sesuai dengan target 365 atau 100% dari target. Bila dibandingkan capaian tahun 2013 sebanyak 345 kelompok, mengalami peningkatan sebanyak 20 kelompok. Sedangkan bila dibandingkan dengan RPJM 2017, sebanyak 405 kelompok telah tercapai 90,12%.

4.2.8.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Urusan kepemudaan pada tahun 2015 mempunyai 8 program dan 50 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan pemuda dan olahraga pada tahun anggaran 2015 seluruhnya sebesar Rp52.261.837.550,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp47.932.229.865,00 atau 91,72% dan realisasi fisik sebesar 95,52%. Capaian realisasi anggaran 91,72% karena ada efisiensi dan sisa lelang kontrak yang pekerjaannya tidak dapat terselesaikan. Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 95,52% disebabkan adanya pekerjaan yang tidak dapat terselesaikan pada pembangunan Stadion Mandala Krida.

4.2.8.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Terbatasnya sarana untuk kegiatan kepemudaan.
- Terbatasnya sarana latihan para atlet, belum optimalnya pembibitan atlet, dan sikap sportivitas, disiplin dan semangat juang atlet masih belum memadai.

B) Solusi

- Penyediaan sarana yang memadai untuk pembinaan generasi muda, agar menjadi pemuda yang inovatif, kreatif, dan mandiri. Serta penambahan, pemeliharaan fasilitas latihan bagi para atlet agar prestasi meningkat.
- Pengelolaan pembibitan atlet yang berkelanjutan dan berkesinambungan melalui Pencarian atlet olahraga berbakat secara sistemik, pemberian penghargaan berupa beasiswa bagi atlet berprestasi, dan melakukan pembinaan atlet-atlet berbakat dan klub-klub olahrag aprestasi.

4.2.9 Urusan Penanaman Modal

4.2.9.1 Kondisi Umum

Penanaman Modal atau investasi diperlukan agar kesinambungan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Investasi baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun domestik digunakan untuk membiayai aktivitas kegiatan produksi barang dan jasa pada seluruh sektor ekonomi. Adanya kegiatan investasi baru akan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memberi peluang penambahan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan investasi selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi juga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk melaui peluang kerja yang diciptakan.

Realisasi investasi di suatu daerah/ wilayah pada tahun tertentu sama dengan penjumlahan nilai pembentukan tetap (domestik) bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada tahun tertentu secara kumulatif, sedangkan inventori (stok) menggambarkan *output* suatu sektor yang belum selesai diproses, dapat berbentuk barang setengah jadi, atau bahkan input yang belum digunakan, dan barang jadi yang belum terjual. Untuk selanjutnya, jika disebut investasi fisik maka sudah merupakan gabungan/ penjumlahan antara PMTB dan perubahan inventori. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif berikut ini kami sampaikan perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PMTB Provinsi DIY, tahun 2010-2015.

Tabel 4.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PMTB DIY, 2010-2015 (%)

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi	PMTB
2010	4,88 %	3,41 %
2011	5,17 %	4,62 %
2012	5,32 %	4,96 %
2013	5,41%	5,13 %
2014	5,20 %	5,76%
2015	4,96 %	4,34 %

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2016

Gambar 4.5 Penandatangan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Pelestarian *Geopark* Gunungsewu

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi DIY cenderung tertekan menjadi 4,96%, berkaitan dengan pelemahan ekonomi nasional yang dipengaruhi adanya lesunya ekonomi dunia karena harga minyak dunia yang menurun dan krisis di Eropa yang belum berakhir. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi di DIY cenderung lebih baik daripada nasional, karena pengaruh sektor riil yang dominan dalam struktur perekonomian wilayah. Sedangkan pembentukan Modal Tetap Bruto memiliki distribusi yang cukup besar (30,51%) dengan laju pertumbuhan sebesar 4,34 % pada 2015.

Pertumbuhan investasi fisik yang dicerminkan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami peningkatan selama periode tahun 2010-2014. Pada tahun 2014 pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai Rp22,64 triliun atau naik sekitar Rp2,71 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp19,93 triliun. Peningkatan tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumya yang naik sekitar Rp2,06 triliun.

Investasi di DIY tumbuh 17,84% dari tahun 2014 sebesar Rp9.524.400.134.638,00 menjadi Rp11.223.403.242.074,00 pada tahun 2015 yang terdiri dari PMDN Rp3.951.662.458.339,00 dan PMA sebesar Rp7.271.740.783.735,00. Sampai dengan akhir tahun 2015 melalui Gerai P2T DIY telah memberikan pelayanan

permohonan perizinan dan non perizinan sebanyak 406 layanan izin prinsip dan 942 layanan non izin. Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 274 perusahaan, yang terdiri dari 139 PMA dan 135 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 45.396 TKI dan 197 TKA. Pada tahun 2015, tiga besar sektor terbesar penyumbang investasi di DIY, yaitu dari tiga terbesar adalah di Perusahaan PMA sektor Telekomunikasi, Sektor pengolahan susu, Sektor Perdagangan Besar, sedangkan di Perusahaan PMDN yaitu sektor Real Estate, Sektor Industri Tekstil, dan Sektor Industri alat pertanian.

Tabel 4.19 Perkembangan Investasi PMA dan PMDN DIY Tahun 2011-2015

Tahun	Investasi PMDN (Rp)	Investasi PMA (Rp)	Total Investasi PMA+PMDN (Rp)
2011	2.313.141.695.784	4.110.436.324.224	6.423.578.020.008
2012	2.805.944.605.930	4.250.121.535.829	7.056.066.141.759
2013	2.864.654.491.755	5.203.115.642.883	8.067.770.134.638
2014	3.568.546.291.755	5.955.853.842.883	9.524.400.134.638
2015	3.951.662.458.339	7.271.740.783.735	11.223.403.242.074

Sumber: BKPM DIY, 2016

Tercapainya target indikator kinerja urusan penanaman modal untuk tahun 2015 menunjukkan pembangunan urusan penanaman modal masih sejalan dengan arahan dan tahapan dalam RPJMD DIY. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan hingga akhir periode RPJMD DIY tahun 2017 terutama untuk target nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Tabel 4.20 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	Juta Rupiah	22.640.000	22.120.635	30.935.037	139,85	24.920.435	124,14

Sumber: BKPM DIY, 2016

Target Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman Modal pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY (BKPM) selama 2015 sebesar Rp22.120.635.000.000,00 dengan realisasi nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp30.935.037.000.000,00 (139,85%). Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto

mengalami peningkatan sebesar Rp8.295.037.000.000,00 bila dibandingkan dengan capaian nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto pada tahun 2014 sebesar Rp22.640.000.000.000,00 sedangkan capaian nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto tahun 2015 terhadap target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 sebesar 124,14%.

4.2.9.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD DIY yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian sasaran selanjutnya dijabarkan secara lebih sistematis ke dalam program kegiatan BKPM DIY. Pada tahun Anggaran 2015, BKPM DIY melaksanakan 8 (delapan) program, dengan pagu sebesar Rp16.919.294.640,00 (rincian belanja tidak langsung sebesar Rp5.243.434.640,00 dan belanja langsung Rp. 11.675.860.000,00).

Realisasi Anggaran Tahun 2015

Pagu anggaran Belanja langsung setelah perubahan belanja BKPM DIY dalam APBD-Perubahan Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2015 sebesar Rp11.675.860.000,00. Adapun realisasi belanja langsung sebesar Rp11.675.860.000,00 terdiri dari anggaran untuk kantor induk BKPM DIY, Gerai P2T dan Kaperda terealisasi sebesar Rp10.991.524.671,00 atau sebesar 94,14%.

Pada administrasi umum dibagi menjadi 4 program dan 30 kegiatan. Jumlah pagu administrasi umum sebesar Rp4.921.833.700,00 atau sebesar 42,15% dari total anggaran perubahan Belanja langsung APBD tahun 2015. sedangkan realisasi fisik sebesar 100% dari total pagu administrasi umum dan realisasi keuangan 97,71% dari total pagu administrasi umum.

Pada urusan Penanaman Modal dibagi menjadi 2 program dan 5 kegiatan. Jumlah pagu urusan Penanaman Modal sebesar Rp4.813.271.550,00 atau sebesar 41,22% dari total anggaran perubahan Belanja langsung APBD tahun 2015, sedangkan realisasi fisik sebesar 99,40% dari total pagu urusan administrasi umum dan realisasi keuangan 95,55% dari total pagu urusan Penanaman Modal.

Upaya peningkatan iklim dan realisasi investasi di DIY dimana BKPM DIY pada tahun 2015 melakukan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan *website* Jogja Invest dengan tujuan memberikan informasi Investasi kepada calon investor

melalui publikasi *online*. Selain itu dalam menarik calon investor dilakukan dengan strategi utama yakni perbaikan perangkat system, prosedur investasi peningkatan pelayanan prima kepada investor. Pada tahun 2015 BKPM DIY telah melaksanakan kegiatan Penyiapan Potensi Investasi untuk melakukan kajian infrastruktur kawasan industri.

Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi dilaksanakan dalam bentuk dua kegiatan yaitu Pameran Investasi dan Pameran Potensi Unggulan Daerah, untuk Pameran investasi di dalam Negeri yang telah dilakukan adalah Pameran AITIS (*Apkasi International Trade and Investment Summit*), Pameran IITT (*Indonesia Invesment, Tourism and Trade Expo*), Pameran Jogja TRI (*Tourism Invesment and Trade Expo*) sedangkan Pameran investasi di Luar Negeri dalam rangka memenuhi undangan dari KJRI Shanghai untuk melakukan promosi Investasi TTI (*Trade, Tourism, and Investment*) di pameran *Shanghai Gift and Home Expo 2015*. Sedangkan kegiatan Pameran Potensi Unggulan Daerah seperti Pameran sekaten, Pameran Pembangunan dan Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ). Selain kegiatan pameran juga melakukan temu bisnis untuk menarik calon investor potensial dalam rangka memberikan informasi kepada calon investor potensial terkait dengan berbagai peluang investasi di DIY.

Adapun realisasi anggaran untuk program pada urusan penanaman modal secara keseluruhan adalah sebesar Rp4.813.271.550,00 atau sebesar 95,55% dengan realisasi fisik sebesar 99,40%. Beberapa catatan terkait pelaksanaan kegiatan pada urusan penanaman modal yang serapan keuangan dan serapan fisik dibawah 90% adalah adanya penataan kembali pada Kegiatan Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Investasi dengan penjelasan (a) Pameran investasi di luar pulau jawa (Kaltim) dibatalkan dari pihak penyelenggara dengan surat 379/CMP-PAM/XI/2015 tanggal 12 Nov 2015 dan (b) Pameran sekaten ada pengurangan hari penyelenggaraan dari 40 hari menjadi 20 hari.

4.2.9.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Belum adanya sinkronisasi regulasi pemerintah pusat dan daerah (kabupaten/ kota) dalam hal pelayanan perijinan;
- Untuk meningkatkan daya saing investasi, masih diperlukan peningkatan infrastruktur pendukung investasi. Selain itu, pemerataan investasi di DIY masih perlu ditingkatkan.

B) Solusi

- Telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi regulasi Pusat dan Daerah dengan membuat Peraturan Gubernur sebagai dasar Pelayanan Perizinan;
- Melakukan pemantapan infrastruktur secara sinergis dengan kabupaten/ kota serta Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan dalam penyiapan infrastruktur.

4.2.10 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

4.2.10.1 Kondisi Umum

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian daerah terutama dalam menggerakan ekonomi kerakyatan di DIY. Perkembangan koperasi ditunjukkan dengan peningkatan data keragaan koperasi selama 5 (lima) tahun terakhir baik dari aspek jumlah koperasi aktif maupun volume usaha. Pada tahun 2015, jumlah koperasi aktif sebanyak 2.369 koperasi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan sebesar 4,40%. Demikian juga pada tahun 2015, volume usaha mengalami peningkatan sebesar Rp1.013.041 Juta atau sebesar 39,17%.

Tabel 4.21 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Koperasi Aktif	1.981	2.090	2.176	2.269	2.369
Koperasi Tidak Aktif	485	427	499	341	316
Koperasi Beku	-	-	58	-	-
Modal Sendiri (Rp Juta)	929.556	1.015.396	1.440.948	594.124	1.318.800
Modal Luar (Rp Juta)	513.936	572.156	572.159	830.210	2.320.866
Volume Usaha (Rp Juta)	2.304.123	2.304.127	2.320.617	2.586.506	3.599.547

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2016

Kualitas perkembangan koperasi di DIY dapat dilihat dari peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 4,40% atau sebanyak 100 koperasi. Persentase ini meningkat di bandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai sebesar 4,27% atau sebanyak 93 koperasi. Peningkatan ini di dorong dengan pembinaan terhadap koperasi pasif. Pada tahun 2015 jumlah koperasi pasif berkurang dari 341 menjadi 316 koperasi.

Tabel 4.22 Perkembangan Jumlah UKM menurut skala usaha Tahun 2011-2015

No	Sektor	2011	2012	2013	2014	2015
1	Usaha Mikro	111.086	111.591	111.912	101.600	104.171
2	Usaha Kecil	50.494	50.999	51.459	67.509	71.289
3	Usaha Menengah	30.296	30.801	31.121	51.594	54.587
4	Usaha Besar	10.099	10.604	10.718	-	
	Jumlah	**201.975**	**203.995**	**205.210**	**220.703**	**230.047**

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2016

Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di DIY dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,23%, yaitu dari 220.703 unit usaha pada tahun 2014 menjadi 230.047 unit usaha. Jenis usaha UKM di DIY masih didominasi oleh sektor usaha di bidang perdagangan dan industri pertanian.

Tabel 4.23 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi & UKM Tahun 2014-2015 serta Capaian 2015 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Peningkatan Koperasi Aktif dan UKM	%	-	4%	4,24%	106	4%	106

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2016

Indikator kinerja pembangunan koperasi dan UKM adalah Persentase Peningkatan Koperasi Aktif dan UKM. Realisasi pada tahun 2015 sebesar 4,24% atau sebesar 106% dari target tahun 2015. Sedangkan Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 106%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan koperasi aktif semakin meningkat untuk mendorong perekonomian sektor riil dalam rangka menumbuhkan perekonomian yang berkualitas.

4.2.10.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pembangunan pada sektor Koperasi dan UKM dilakukan melalui 3 Program yaitu Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Secara keseluruhan terdapat 3 Kegiatan dalam 3 Program dengan pagu total sebesar Rp1.544.729.850,00 sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp1.300.348.950,00 atau sebesar 84,17 % dari pagu.

Adapun Program dan Kegiatan meliputi Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dengan Pagu Anggaran sebesar Rp90.474.500,00 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp83.099.500,00 atau sebesar 91,84% dan deviasi sebesar 8,16%, sedangkan capaian Fisik sebesar 100%. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp988.100.000,00 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp786.978.500,00 atau 79,64% deviasi sebesar 20,36%, sedangkan capaian Fisik 100%. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp466.155.350,00 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp430.270.950,00 atau 92,30 % deviasi sebesar 7,70%, sedangkan capaian Fisik 100%.

4.2.10.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Dalam rangka meningkatkan daya saing produk diperlukan inovasi dalam proses produksi, diantaranya pada teknologi dan desain produksi. Selain itu diperlukan adanya sertifikasi dan standarisasi produk. Namun saat ini, sebagian besar pelaku usaha belum mampu melakukan inovasi dalam proses produksi, serta kurang memiliki kesadaran akan pentingnya standarisasi produk. Disamping itu, mahalnya pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk juga menjadi kendala.
- Meningkatnya kemampuan koperasi tidak hanya didukung dari aspek SDM dan kelembagaan, namun juga harus didukung dari aspek permodalan. Sementara saat ini kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengakses sumber permodalan belum optimal.

B) Solusi

- Meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya standarisasi produk dalam menghadapi persaingan global dalam bentuk fasilitasi sertifikasi produk (Halal, Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga, MD).
- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Koperasi melalui Bimtek dalam hal kelembagaan dan manajemen usaha. Selain itu, upaya mendekatkan koperasi dengan sumber-sumber permodalan seperti kegiatan kemitraan dengan Perbankan, BUMN Non Perbankan, dan Lembaga Keuangan lain perlu diintensifkan.

4.2.11 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

4.2.11.1 Kondisi Umum

Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2015 terfokus pada tertib administrasi kependudukan yaitu kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran, surat nikah/ akta perkawinan, surat cerai/akta perceraian dan sosialisasi akta kematian. Disamping itu juga pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan kependudukan dengan Kabupaten/ Kota yang meliputi koordinasi penguatan *database* kependudukan sampai dengan desa/ kelurahan dengan memberikan aplikasi pengelolaan *database* kependudukan dan bimbingan teknis kepada Petugas Registrasi Desa/ Kelurahan, koordinasi penduduk rentan administrasi kependudukan, koordinasi data kependudukan orang asing hingga pemberdayaan petugas PKK dalam mendukung tertib administrasi kependudukan.

Capaian program dan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2015 secara umum dapat berjalan dengan baik dengan output 100%. Disamping itu juga adanya perbaikan kualitas data kependudukan dari tahun 2015 melalui pembersihan data ganda yang dilakukan secara terus menerus dengan data center di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri secara *online* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota serta Kecamatan dan memutakhiran *database* kependudukan dilakukan seiring dengan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk. Sedangkan terobosan lain dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan adalah adanya fasilitasi kepemilikan akta

kelahiran dan akta perkawinan bagi penduduk miskin, adanya aplikasi konsolidasi *database* kependudukan DIY yang terkoneksi dengan *database* kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota se-DIY yang dapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), begitu pula terdapat data dan informasi kependudukan yang dapat diakses oleh publik berbasis web melalui *kependudukan.jogjaprov.go.id*.

Tabel 4.24 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014-2015 serta Capaian 2015 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	%	94,41%	96%	92,23%	96,07%	97%	95,05%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan DIY, 2016

Pada 2015, Pemda DIY menargetkan jumlah penduduk berstatus wajib KTP yang telah ber-KTP-el mencapai 96% dan realisasi pada periode tersebut sebesar 92,23%, sehingga capaian realisasi atas target adalah 96,07%. Hal itu menunjukkan bahwa masih terdapat 7,77% penduduk berstatus wajib KTP di DIY yang belum memiliki KTP-el. Bila dirinci per kabupaten/ kota, Kota Yogyakarta menempati posisi tertinggi dalam hal kepemilikan KTP-el, yaitu 98,31%, diikuti Kabupaten Kulon Progo 98,19%, Kabupaten Bantul 91,37%, Kabupaten Sleman 91,17%, dan terendah Kabupaten Gunungkidul 88,42%.

Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya penduduk berstatus wajib KTP yang belum memiliki KTP-el, adalah yang bersangkutan belum melakukan perekaman biometrik karena alasan kesibukan atau tinggal sementara di luar DIY, yang bersangkutan telah pindah domisili akan tetapi belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/ kota.

Pada tahun 2015, Pemda DIY bersama kabupaten/ kota merumuskan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kepemilikan KTP-el bagi penduduk DIY yakni, (1) mendorong persyaratan KTP-el dan Kartu Keluarga untuk seluruh pengurusan pelayanan publik. (2) memperkuat prosedur mobilitas penduduk untuk

memastikan bahwa tidak ada lagi penduduk yang datang pindah dari dan ke luar kabupaten/ kota se-DIY secara tidak prosedural, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen. Saat ini proses pindah dan datang penduduk telah terintegrasi dalam satu jaringan konsolidasi nasional. (3) Pembekuan data penduduk yang telah tercatat/ perekaman biometrik di daerah lain serta membekukan data penduduk meninggal berdasarkan laporan dari desa/kelurahan atau pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga.

4.2.11.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Anggaran yang dialokasikan pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015 adalah sebesar Rp1.134.649.500,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 1 program dan 7 kegiatan. Adapun capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 100% untuk capaian fisik, dan realisasi anggaran sebesar Rp1.094.350.241,00 (96,32%). Artinya tidak ada kesenjangan antara target fisik dengan realisasi kinerja fisik program dan kegiatan. Kesenjangan terjadi pada capaian kinerja anggaran yang berada pada kisaran 94,65%, dan tidak terdapat kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90%.

4.2.11.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Masih terdapat data penduduk pindah, terdata ganda, atau meninggal yang belum dibersihkan dari *database* kependudukan yang mempengaruhi kualitas data. Selain itu masih banyak ditemukan ketidaksinkronan antara NIK (Nomor Induk Kependudukan) penduduk di *database* KTP-el dengan di *database* SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
- Saat ini Jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman biometrik tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam satu hari jumlah penduduk yang merekam biometrik rata-rata kurang dari 20 orang, dan didominasi oleh penduduk wajib KTP baru. Padahal kabupaten/ kota di DIY masih terdapat sekitar 7,77% dari jumlah penduduk wajib KTP yang belum perekaman biometrik.

- Masih terdapat instansi atau lembaga swasta penyedia layanan publik belum melaksanakan tertib administrasi kependudukan, misal masih memberlakukan surat keterangan kelahiran atau kematian dari desa/ kelurahan. Semestinya menggunakan Akta Kelahiran atau Akta Kematian; dan masih diizinkan penduduk menggunakan KTP non elektronik sebagai kartu identitas resmi bukti domisili penduduk, dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

B) Solusi

- Mempersiapkan kemampuan *softskill* sumber daya manusia dalam mengelola *database* SIAK dan secara terus-menerus melakukan pembersihan data ganda, termasuk pemberdayaan secara maksimal pemerintah desa/ kelurahan dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan.
- Melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PERPRES Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Melalui KTP-el sebagai identitas resmi bukti domisili penduduk (sesuai Pasal 10 B ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013) diberlakukan secara menyeluruh dalam pengurusan pelayanan publik. Bila kebijakan ini terealisasi, maka seluruh penduduk wajib KTP akan merekamkan biometriknya.
- Melaksanakan tertib administrasi kependudukan secara sistematis, sinergis, terstruktur, masif, dan berkelanjutan agar semua instansi atau lembaga swasta untuk mensyaratkan kepemilikan dokumen kependudukan kepada penduduk dalam layanan publik. Amanat UU Nomor 24 tahun 2013, menerangkan bahwa data kependudukan digunakan untuk semua keperluan, seperti: pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum.

4.2.12 Urusan Ketenagakerjaan

4.2.12.1 Kondisi Umum

Angkatan kerja Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus 2015 sebesar 1.971.463 orang, yang terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 1.891.218 orang dan penganggur 80.245 orang (BPS, Sakernas Agustus, 2015). Jumlah angkatan kerja ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2.023.461 orang, tetapi disisi lain jumlah penduduk bekerja juga mengalami penurunan sebesar 64.825 orang dari tahun sebelumnya 1.956.043 orang**,** sehingga jumlah penganggur naik sebesar 12.827 orang dibanding tahun sebelumnya sejumlah 67.418 orang. Penganggur terbuka tersebut didominasi oleh penganggur dengan tingkat pendidikan SMTA sebanyak 43.557 orang, Diploma dan Sarjana sebanyak 15.933 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY pada Agustus 2015 sebesar 4,07% jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 6,18%. Indek Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 64,80 masih diatas rata-rata Nasional sebesar 55,73 dan berada pada peringkat ke 3 (tiga) dibawah Provinsi Kepulauan Riau (69,16) dan DKI Jakarta (65,68).

Tabel 4.25 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	%	26,66	25	30,69	122,76	27,00	113,67
2	Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja	%	10,51	20,77	22,06	106,21	21,18	104,15
3	Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai perundangan yang berlaku	%	62,23	48,35	69,47	143,68	52,00	133,6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
4	Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	100	65	91,66	141,03	84,00	109,12
5	Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang Norma Kerja dan K3	%	17	30,3	38,9	128,38	30,91	125,85

Sumber: Disnakertrans DIY, 2016

Realisasi pencapaian target indikator persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat naik 4,03% dibandingkan capaian 2014. Capaian Target telah melampaui target RPJMD tahun 2017 sehingga Pelaksanaan program ditahun selanjutnya diarahkan pada peningkatan dan pengembangan pada cakupan serta jenis kompetensi pelatihan kepada masyarakat agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berpijak pada realisasi pencapaian target indikator Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja naik 11,55% dibandingkan capaian 2014, sehingga diperlukan peningkatan program/kegiatan perluasan kesempatan kerja agar dapat mengimbangi jumlah pencari kerja/penganggur.

Realisasi pencapaian target indikator Persentase lembaga yang terstandarisasi sesuai perundangan yang berlaku sebesar 69,47% dari target 48,35% atau dengan capaian 143,68%, sehingga diperlukan peningkatan pembinaan lembaga ketenagakerjaan agar seluruh lembaga yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan realisasi pencapaian target indikator Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 91,66% dari target 65% atau dengan capaian 141,01%, hal ini dikarenakan upaya preventif melalui pembinaan hubungan industrial kepada Perusahaan dan masyarakat pekerja, dan keberhasilan

proses mediasi yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial kepada pihak perusahaan dan pekerja yang berselisih.

Realisasi pencapaian target indikator Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang Norma Kerja dan K3 sebesar 38,9% dari target 30,30% atau dengan capaian 128,38%. Capaian Target telah melampaui target RPJMD tahun 2017 sehingga diperlukan peningkatan koordinasi pegawai pengawas ketenagakerjaan dan optimalisasi peran ahli K3 di perusahaan supaya semakin banyak perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan dibidang norma kerja dan K3.

4.2.12.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Urusan Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp40.114.962.424,00 yang terbagi dalam 9 (sembilan) program dan 64 kegiatan. Secara keseluruhan dari total pagu anggaran sebesar Rp40.114.962.424,00 realisasi keuangan sebesar Rp37.703.007.912,00 (93,99%) dan realisasi fisik 100%.

4.2.12.3 Permasalahan dan solusi

A) Permasalahan

- Belum optimalnya daya saing pencari kerja DIY dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
- Belum optimalnya peran perusahaan dalam pembentukan sarana Hubungan Industrial yaitu Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit.
- Laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor formal di DIY belum sebanding dengan laju pertumbuhan pencari kerja, dan perluasan kesempatan kerja bagi penganggur belum berjalan optimal.

B) Solusi

- Peningkatan kompetensi pencari kerja melalui peningkatan sarana prasarana pelatihan, pelatihan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pelaksanaan pemagangan dan sertifikasi uji kompetensi sehingga pencari kerja mampu bersaing di pasar kerja/ dunia kerja.
- Peningkatan koordinasi dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Organisasi

Pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta mendorong perusahaan untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

- Koordinasi yang intensif dengan lembaga/ instansi/ pihak swasta dalam rangka peningkatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan Perluasan Kesempatan Kerja.

4.2.13 Urusan Ketahanan Pangan

4.2.13.1 Kondisi Umum

Gambar 4.6 Peresmian LDPM Patalan, Jetis, Bantul pada November 2015

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu. Hal ini tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Urusan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas penting mengingat perannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan terbukti secara empiris menjadi faktor titik tolak gejolak stabilitas suatu wilayah. Strategi renaisans pangan menjadi bagian penting untuk mewujudkan Renaisans DIY dengan semangat menuju kedaulatan pangan melalui sejumlah tahapan. Tahapan tersebut dilakukan dengan upaya secara konsisten menjalankan kebijakan kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah, strategi penting yang dilakukan harus bertumpu pada pemenuhan sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan dari luar daerah. Demi mewujudkan

tahapan ketahanan pangan menuju kemandirian/ kedaulatan pangan, seluruh pemangku kepentingan harus berperan aktif dan berkoordinasi secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hakikatnya mempunyai beban tugas dan tanggung jawab untuk mampu menyelenggarakan pengaturan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi kebutuhan penduduk DIY. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat DIY yang memiliki tipologi geografi dan kondisi sosiologis yang beragam harus memperhatikan aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan, dan keamanan serta halal sampai di tingkat rumah tangga.

Tabel 4.26 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 Terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85,3	84,6	85,3	101	90	95
2	Persentase Jumlah Penyuluh yang Meningkat Kapasitasnya	%	61	74	74	100	100	74
3	Persentase Rata-rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: BKPP DIY, 2016

Capaian skor PPH (Pola Pangan Harapan) pada tahun 2014 adalah 85,3 sama dengan capaian pada tahun 2015. Realisasi pada tahun 2015 ini mencapai 95% dari target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Capaian DIY masih lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 83,4. Tercapainya sasaran pemantapan ketersediaan dan konsumsi pangan dengan indikator skor PPH ini disebabkan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Hal ini didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat sebagai akibat kondisi perekonomian masyarakat yang semakin membaik, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

Pemantapan ketersediaan dan konsumsi pangan didukung oleh keberhasilan 3 (tiga) sub system pendukungnya, yaitu dari sisi ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah maupun dari impor. Untuk ketersediaan energi dan protein berturut-turut sebesar 3.701 kal/kapita/hari dan 111,71 gr/kapita/hari, telah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan yaitu sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan 63 gr/kapita/hari. Cadangan pangan (pemerintah dan masyarakat) juga cukup banyak, tahun ini mencapai 360 ton. Cadangan pangan ini dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu jika terjadi kerawanan maupun krisis pangan. Distribusi dan akses pangan telah tertangani dengan baik. Fasilitasi diberikan kepada GAPOKTAN di daerah rawan pangan dengan tujuan mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan sesuai kebutuhan masyarakat setempat dengan harga terjangkau secara kontinu. GAPOKTAN di daerah sentra produksi pangan juga difasilitasi agar dapat menampung dan mengelola hasil panen masyarakat setempat sehingga harga pangan terjaga, tidak merugikan petani saat panen raya dan tidak memberatkan konsumen saat musim paceklik. Harga pangan pokok yang juga berpengaruh terhadap inflasi juga dipantau secara rutin dan bila perlu dilakukan pengendalian melalui operasi pasar oleh instansi terkait. Harga pangan pokok di DIY selama tahun 2015 relatif terkendali. Hal ini sangat didukung oleh keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Dari sisi konsumsi, selain pelaksanaan Gerakan Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), pencapaian target skor PPH juga didukung melalui usaha pemberdayaan wanita melalui pemanfaatan pekarangan, pengembangan diversifikasi produk antara, dan peningkatan sosialisasi maupun promosi penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Angka konsumsi energi di DIY adalah 1.946,4 kkal/kapita/hari dan angka konsumsi protein 60 gr/kapita/hari. Jika dibandingkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan 2.150 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari maka tingkat konsumsi energi di DIY masih perlu ditingkatkan, terutama konsumsi dari kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal terutama umbi-umbian menjadi alternatif terbaik dalam memenuhi kebutuhan energi sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit degeneratif seperti diabetes, kanker, dan serangan jantung karena umbi-umbian

dapat dikembangkan menjadi makanan fungsional yang memiliki indeks glisemik rendah, kaya kandungan prebiotik dan antioksidan.

Selain mutu/ kualitas konsumsi, aspek keamanan pangan sangat penting belakangan ini. Dengan terbukanya pasar terhadap masuknya produk pangan dari luar daerah maupun dari luar negeri, masalah dan tantangan keamanan pangan semakin kompleks. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) telah berperan aktif di DIY dalam mengamankan pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar, baik segar maupun olahan, sehingga pangan yang dikonsumsi masyarakat DIY aman dari berbagai cemaran fisik, biologis, kimiawi, maupun mikrobiologis. Pembinaan terhadap produsen pangan juga terus dilaksanakan agar produsen pangan di DIY dapat menyediakan pangan yang bermutu dan aman, sekaligus dapat bersaing menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA).

Keberhasilan pencapaian ketiga sub sistem ketahanan pangan tersebut secara sinergis telah mendukung upaya penurunan kemiskinan dan kerawanan pangan di DIY. Tahun 2015, Desa Rawan Pangan di DIY turun dari 26 desa di tahun 2014 menjadi 20 desa. Desa rawan pangan tersebut tersebar di Kota Yogyakarta 1 desa, Kabupaten Bantul 3 desa, Kabupaten Kulon Progo 9 desa, dan Kabupaten Gunungkidul 7 desa.

Persentase jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya mengalami kenaikan yang semula 61% pada tahun 2014 meningkat menjadi 74% pada tahun 2015. Realisasi pada tahun 2015 ini mencapai 74% dari target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan ketahanan pangan. Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan. Programa penyuluhan menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian ke depannya. Programa disusun dengan mengakomodir keperluan masyarakat yang dibuat berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi dengan tetap berpegang pada rambu-rambu perundangan kebijakan pemerintah, RPJMD maupun Renstra SKPD. Programa yang disusun secara partisipatif ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penyuluh itu sendiri.

Persentase Rata-rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD pada tahun 2014 adalah 100, demikian pula pada tahun 2015. Realisasi tersebut telah mencapai target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Indikator ini terdiri dari 4 program dan 25 kegiatan yang sangat mendukung untuk mencapai sasaran SKPD.

4.2.13.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pada tahun 2015, Pemerintah Daerah DIY melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY menyelenggarakan sejumlah operasionalisasi kebijakan urusan ketahanan pangan, melalui 9 program dan 51 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp12.083.200.076,00. Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi keuangan sebesar 95,29% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Adanya deviasi realisasi keuangan sebesar 4,71% disebabkan efisiensi kegiatan dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan yang terbit saat tahun berjalan.

4.2.13.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Pola konsumsi rumah tangga masih kurang beragam dan tergantung pada sumber energi dari satu jenis bahan pangan, yaitu beras dan/ atau tepung terigu.
- Perkembangan usaha/industri pangan berbasis sumberdaya lokal berjalan relatif lambat.
- Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengkonsumsi dan memproduksi pangan yang aman masih rendah.
- Masih terdapat 20 Desa Rawan Pangan di DIY.
- Masih beragamnya kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/ kota.
- Jumlah tenaga penyuluh PNS setiap tahun berkurang karena alih tugas maupun pensiun.
- Formasi dan penempatan tenaga penyuluh belum sesuai dengan kelembagaan, maupun kompetensinya.
- Belum terbentuknya UPTB OKKP-D (Unit Pelaksana Teknis Badan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah), sehingga daerah tidak bisa mengakses anggaran DAK Pemerintah Pusat yang berpengaruh pada kinerja ketahanan pangan.

B) Solusi

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan lokal, sehingga dapat menekan atau mengurangi konsumsi beras dan/ atau terigu. Usaha tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi pola makan Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat.
- Meningkatkan nilai pangan spesifik lokasi (pangan lokal) menjadi olahan pangan yang menarik dan bergizi bagi konsumen.
- Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha pengolahan tentang pangan yang bermutu dan aman, serta proses pengolahan pangan yang benar dan aman. Selain itu dilakukan pengawasan peredaran makanan terutama di sekolah akan lebih diintensifkan melalui kerja sama dengan instansi terkait, termasuk instansi vertikal di daerah yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap peredaran bahan makanan.
- Meningkatkan kerjasama dan sinergitas antar *stakeholder* yang menangani urusan pangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pangan yang ada di DIY, khususnya dalam mengentaskan kerawanan pangan di Desa Rawan Pangan yang masih tersisa. Hal ini secara tidak langsung akan membantu pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.
- Sebaiknya kelembagaan penyuluhan di kabupaten/ kota mengacu pada UU Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan, pertanian perikanan dan kehutanan yang disinkronkan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Mengangkat tenaga penyuluh di kabupaten/ kota secara bertahap dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada sistem kepegawaian ASN.
- Formasi dan penempatan tenaga penyuluh disesuikan dengan kelembagaan dan kompetensinya.
- Segera dibentuk UPTB OKKP-D di DIY.

4.2.14 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4.2.14.1 Kondisi Umum

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan peran perempuan untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses, kontrol, manfaat, terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur dan meningkatkan kualitas diri. Tujuan dari pemberdayaan perempuan antara lain: mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Sedangkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya. (UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak).

Gambar 4.7 Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu sebagai upaya perlindungan terhadap Ibu dan Anak

Gender sebagai suatu konstruksi sosial atau inteprestasi masyarakat atas perbedaan kondisi biologis laki-laki dan perempuan, akan menjadi masalah ketika timbul ketimpangan atau ketidaksetaraan antara laki–laki dan perempuan dalam memperoleh akses untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol atas sumber daya dan/ atau pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari hasil–hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dilihat dari tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan keanggotaan perempuan di dalam organisasi politik. Pada tahun 2015 Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah sebesar 97,14% dari target sebesar 96,66%. Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah sebesar 36,51% dari target sebesar 36,20%, sedangkan Persentase keanggotaan perempuan di dalam organisasi politik adalah sebesar 13,07% dari target sebesar 11,06%.

Kekerasan seksual dianggap kejahatan berat karena bukan cuma persoalan virginitas/ keperawanan tapi juga harkat dan martabat orang. Tindak kejahatan ini disebabkan karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku yang didukung oleh struktur di dalam masyarakat. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak fisik, namun juga psikis. Orang yang mengalami kekerasan seksual di masa kecil/ remaja, umumnya memiliki gangguan makan, tidur, gangguan seksual, buang air kecil/ besar. Tugas dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah upaya untuk menurunkan jumlah kasus yang ada. Pada tahun 2015 rasio korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 0,56 orang dari target sebanyak 0,47, sedangkan rasio korban kekerasan terhadap anak sebanyak 0,38 anak dari target sebanyak 0,37 (mengalami *review* indikator semula Jumlah Penanganan perempuan korban kekerasan dan jumlah penanganan anak korban kekerasan).

Untuk mewujudkan kesetaraan gender, dan meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak maka dukungan dan peran aktif organisasi-organisasi perempuan sangat diperlukan, sedangkan tugas pemerintah dalam hal ini adalah memberikan pembinaan kepada organisasi perempuan. Pada tahun 2015 persentase pembinaan organisasi perempuan adalah sebesar 75,28% dari target sebesar 75,14%.

Tabel 4.27 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Reali sasi	% Realisasi		
1	Persentase Partisipasi Perempuan di bidang pmerintah, Swasta dan politik	%	94,56	47,97	48,91	101,96	48,33	101,20
2	Rasio korban kekerasan tehadap perempuan dan anak	rasio	642	0,42	0,47	89,4	0,40	85,11
3	Persentase Pembinaan Organisasi perempuan	%	62,64	75,14	75,28	100,19	100	75,28

Sumber: BPPM DIY, 2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, swasta dan politik pada tahun 2015 sebesar 48,91% telah mencapai target yang sudah di tetapkan yaitu sebesar 47,97%. Hal ini disebabkan adanya:

1. Surat Edaran Gubernur DIY No. 411.4/0195 tanggal 23 Januari 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Keputusan Gubernur DIY Nomor: 340/KEP/2012 tentang Pembentukan kelompok Kerja PUG,
2. Pengangkatan pejabat struktural sudah sesuai dengan kompetensi tidak lagi memandang bahwa pemimpin harus laki-laki,
3. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor: 56/SK/MENEG PP/XII/2004 tentang Penetapan Kebijakan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) salah satu tindaklanjutnya melalui Model Desa PRIMA,
4. Upaya Pemda DIY dalam melakukan inisiasi Desa Prima sampai dengan tahun 2015 sejumlah 50 desa prima dengan anggota sebanyak 1.200 orang,
5. Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kuota perempuan 30%, dan dukungan Mitra kerja dalam hal ini Kesbangpol DIY/ Kab/Kota, KPU DIY/ Kab/Kota, BAWASLU DIY/ Kab/Kota.

Apabila dilihat ketercapaian tahun 2014 dan 2015 akan terjadi perbedaan yang sangat menyolok karena pada tahun 2015 tedapat *review* terhadap indikatornya. Dibandingkan antara persentase capaian tahun 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 48,33% dengan persentase capaian tahun 2015 sebesar 48,91 maka dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2015 sudah melampaui, melihat kondisi ini upaya yang dilakukan adalah mempertahankan angka tersebut sampai dengan akhir RPJMD.

Rasio korban kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2015 sebanyak 0,47 dari target 0,42, apabila dilihat sepintas capaian tahun 2015 tersebut tidak sesuai target,hal ini sangat dipengaruhi oleh: meningkatnya kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya, keberhasilan sosialisasi sehingga memunculkan kesadaran korban tindak kekerasan melapor kepada layanan pengaduan yang saat ini sudah difasilitasi oleh pemerintah, penegakan hukum masih lemah terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Apabila dilihat ketercapaian tahun 2014 dan 2015 akan terjadi perbedaan yang sangat menyolok karena pada tahun 2015 tedapat review terhadap indikatornya. Capaian tahun 2015 dengan target akhir RPJMD tahun 2017 sebanyak 0,40 masih jauh dari harapan, kondisi ini memerlukan dukungan dari lintas sektor. Pembinaan organisasi perempuan pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 75,14% dengan capaian sebesar 75,28% atau tercapai 100,19% jika dibanding dengan target akhir RPJMD sebesar 75,28% maka capaian di tahun 2015 ini telah ememuni target di akhir RPJMD.

4.2.14.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Anggaran yang dipergunakan untuk membiayai urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupa belanja langsung sebesar Rp9.158.567.550,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 6 program dan 7 kegiatan.

Realisasi anggaran belanja langsung urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp7.703.950.761,00 atau sebesar 84,12% dengan sisa anggaran sebesar Rp1.454.616.789,00 atau sebesar 15,88%. Kinerja realisasi fisik yang dilaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak tercapai 99%, karena ada satu kegiatan yang realisasi fisiknya tercapai 92,4% yaitu kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak, hal ini terjadi karena kegiatan yang direncanakan untuk Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI)DIY dibekukan sementara oleh KPPI pusat dengan nomor: 082/KPPI-P/A/IX/2015 tanggal 5 September 2015, namun secara umum terjadi karena adanya efisiensi anggaran.

4.2.14.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah orang terdekat dari korban dan kebanyakan masih mempunyai hubungan kerabat.
- Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak masih lemah.

B) Solusi

- Penguatan fungsi keluarga dengan menekankan pada ketahanan keluarga.
- Mengoptimalkan FPKK dalam sinergi program kegiatan masing-masing lembaga yang menangani kasus kekerasan.

4.2.15 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

4.2.15.1 Kondisi Umum

Gambar 4.8 Bakti Sosial Pemasangan Alat Kontrasepsi

Undang-Undang Nomor: 52 Tahun 2009 menegaskan bahwa dalam upaya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas sehingga dilakukan beberapa upaya antara lain pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Pembangunan kependudukan erat kaitannya dengan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu kebijakan nasional yang dilakukan adalah melalui:

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Besarnya angka partisipasi KB (CPR) menunjukkan adanya upaya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk. Indikator kinerja Cakupan peserta KB Aktif pada tahun 2015 dengan target sebesar 80,22%, sedangkan capaiannya sebesar 80,35%. Indikator Persentase Penurunan PUS yang Usia istri di bawah 20 tahun ditargetkan sebesar 0,510% dengan capaian sebesar 0,412%.

Keluarga dikategorikan dalam 5 tahapan keluarga, yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga sejahtera I, Keluarga sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus. Pada tahun 2015 Target dari persentase tahapan keluarga

sejahtera adalah sebesar 44,10 dengan capaian sebesar 43,45. Partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera juga sangat besar, bentuk partisipasi kelompok masyarakat dapat dilihat dari adanya kelompok bina keluarga berkategori percontohan. Pada tahun 2015 target Persentase lembaga Bina Keluarga berkatagori Percontohan adalah sebesar 23,00 dengan capaian sebesar 23,61.

Tabel 4.28 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Cakupan Peserta KB Aktif	%	80,05	80,220	80,35	100,16	80,224	100,16
2	Persentase Penurunan Pernikahan Usia di bawah 20 tahun	%	0,89	0,510	0,430	123,78	0,500	121,36
3	Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera	%	45,24	44,10	43,45	101,50	43,00	98,96
4	Persentase lembaga Bina Keluarga berkatagori Percontohan	%	23,28	23,00	23,61	102,65	24,27	97,28

Sumber: BPPM DIY, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase cakupan peserta KB Aktif pada tahun 2015 sudah melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 80,35 dari target 80,220 Kondisi ini dipengaruhi oleh kegiatan: Penjaringan dan Bakti Sosial Pelayanan KB, Penguatan dukungan TNI melalui Peningkatan peran Babinsa dalam mendukung KB/ KS, dan Partisipasi dari Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan (IMP) yang terdiri dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.

Capaian tahun 2015 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah dilampaui, namun upaya-upaya yang telah dilakukan tidak berhenti begitu saja, masih perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Persentase penurunan pernikahan usia di bawah 20 tahun pada tahun 2015 tercapai sebesar 0,430 dengan target 0,510, Capaian tersebut didukung adanya: Peningkatan kapasitas mitra sangat membantu dalam

KIE KRR, Peningkatan kapasitas pengelola kelembagaan, dan Dukungan dari instansi yang mempunyai kewenangan dan komitmen terhadap upaya pencegahan pernikahan usia di bawah 20 tahun/perkawinan usia dini.

Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera pada tahun 2015 tercapai sebesar 43,45 dari target 44,10 Capaian ini sudah melebihi dari target yang sudah ditetapkan, karena ada dukungan dari: Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian, Peningkatan peserta KB Baru dan KB Aktif, Peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan, Upaya pengembangan kegiatan UPPKS, serta Partisipasi dari Institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan (IMP) yang terdiri dari Petugas Pelayanan Keluarga Berencana Dusun (PPKBD) dan Pembantu Pembina KB desa (sub PPKBD).

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 45,24 maka capaian tahun 2015 sebesar 43,45 ini jauh lebih baik. Sementara target akhir RPJMD adalah 43,00 perlu dilakukan upaya yang lebih meskipun realisasi melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Persentase Lembaga Bina Keluarga Berkategori Percontohan pada tahun 2015 menetapkan ditetapkan target sebesar 23,00 dengan capaian sebesar 23,61, karena adanya dukungan dari: kebijakan Pergub No 36 tahun 2013 tentang pelaksanaan Integrasi BKB, PAUD, SDIDTK di Posyandu, Pelatihan bagi Kader BKB, BKR dan BKL yang dilaksanakan secara bersinergi antara BPPM dan BKKBN dan SKPD KB Kabupaten/ Kota dapat meningkatkan cakupan jumlah kader yang terlatih dan Penguatan Pokjanal Posyandu semakin meningkatkan BKB, BKR dan BKL Percontohan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 23,28, maka capaian tahun 2015 sudah semakin baik. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 24,27 maka target tersebut optimis dapat tercapai.

4.2.15.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Anggaran yang dipergunakan untuk membiayai urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berupa belanja langsung dari APBD sebesar Rp5.670.237.700 Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 7 kegiatan. Realisasi anggaran belanja langsung urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebesar Rp4.830.088.566 atau sebesar 85,18%, sedangkan sisa

anggarannya sebesar 14,82%. Kinerja fisik urusan keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera dapat tercapai 100%.

4.2.15.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) dan Peserta KB baru (PB) di DIY sudah cukup tinggi yaitu 80,35%, tetapi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR) DIY juga meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya PA dan PB yang menggunakan non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti suntik, kondom dan pil, sehingga tingkat kegagalan masih tinggi.

B) Solusi

Memperbanyak kegiatan penjaringan dan baksos pelayanan KB secara langsung kepada masyarakat dengan kontrasepsi MKJP.

4.2.16 Urusan Perhubungan

4.2.16.1 Kondisi Umum

Mengacu pada RPJMD 2012-2017, sasaran urusan perhubungan yaitu meningkatkan layanan publik, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan melalui strategi penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan penataan sistem transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan, dimana target *load factor* pada tahun 2015 adalah sebesar 38,57%. Untuk mendukung arah kebijakan ini telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yakni penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan dan peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi. Ketercapaian pada indikator sasaran ini didukung dengan 9 (sembilan) sasaran program dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 4.29 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan	%	16,8	25,2	25,2	100	42	60
2	Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan	%	82,68	83	83	100	88	94,31
3	Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	%	39,47	40	40	100	60	66,67
4	*Load factor* Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta	%	37,82	38,57	39,05	101,2	42,57	91,73
5	Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Transportasi di DIY	%	40	44,17	44,17	100	82,50	53,54
6	Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda	%	36,44	40	40	100	50	80
7	Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi	%	100	100	100	100	100	100
8	Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	100	100	100	100	100	100
9	Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	%	111,4	100	100	100	100	87

Sumber: Dishub DIY, 2016

Dalam rangka memenuhi target penataan transportasi berbasis kawasan telah dilaksanakan Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Adapun kawasan yang menjadi fokus pada tahun 2015 adalah kawasan Terban, Jati Kencana-Demak Ijo berupa Penyediaan Cermin Tikungan, RPJJ, APILL ATCS, Controler ATCS, Rambu, Repeater, dan Traffic Cone, serta perencanaan di kawasan Pakualaman dan Kota Gede. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka tingkat

capaian indikator ini mengalami peningkatan sebesar 8,4%, sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJM, maka tingkat capaian adalah sebesar 60% dan diharapkan pada tahun 2017 target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dengan menghitung ketersediaan sarana dan prasarana di 7 (tujuh) kawasan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2015 telah tercapai sesuai target 25,2% atau tingkat capaian sebesar 100%. Ketercapaian indikator ini tidak terlepas dari adanya dukungan dana keistimewaan.

Mengacu pada dokumen *RPJMD*, maka untuk capaian indikator Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan, sasaran tersebut didukung oleh Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Dengan membandingkan jumlah kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas (APILL ATCS, Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Jalan, dsb) dan jumlah yang tersedia, maka pencapaian pada tahun 2015 adalah sebesar 83% atau tercapai 100% dari yang ditargetkan dan naik sebesar 0,32% dari capaian tahun 2014. Selain dari dana APBD, ketercapaian indikator ini juga didukung malalui Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu sebesar 38,1% dari APBD dan 61,9% dari DAK. Terhadap target akhir RPJMD, pada tahun 2015 telah tersedia fasilitas keselamatan jalan sebesar 94,31% dan diharapkan tahun 2017 capaian indikator ini sesuai dengan rencana

Pencapaian Indikator Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta dilaksanakan melalui Program Pengaturan Simpang Bersinyal. Capaian target indikator kinerja untuk pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta adalah sebesar 40% dari target 40%, meningkat 0,53% dari kondisi tahun 2014. Pencapaian terhadap target pada indikator ini sepenuhnya didukung oleh Dana Keistimewaan berupa Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS Tenaga Surya Perkotaan. Untuk persentase capaian indikator tahun 2015 terhadap target akhir RPJMD sebesar 66,67%. Dengan persentase capaian yang telah sesuai rencana, maka pencapaian indikator pada target akhir RPJMD tahun 2017 akan dapat tercapai.

Load factor penumpang angkutan umum Perkotaan Yogyakarta; Indikator ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang pencapaiannya dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Pada tahun 2015 capaian *Load factor* angkutan umum adalah sebesar 39,05% meningkat 1,23% jika dibandingkan capaian tahun 2014. Persentase capaian

indikator tahun 2015 terhadap target akhir RPJMD sebesar 91,73%. Dengan persentase capaian yang telah sesuai rencana dan bahkan melebihi dari target, maka pencapaian indikator pada target akhir RPJMD tahun 2017 akan dapat tercapai.

Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Transportasi di DIY; Untuk mencapai target indikator ini dilaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas *transfer point* dan *park and ride* pada Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Pada tahun 2015, capaian indikator untuk tolak ukur kinerja ini adalah sebesar 44,17% atau tercapai 100% dari target. Capaian target kinerja diperoleh melalui: Penyusunan DED Fasilitas *Transfer Point* di Jl. Parangtritisdan Pembangunan *Transfer Point* di Dongkelan.

Capaian indikator pada tahun 2015 meningkat 4,17% dibandingkan tahun 2014, serta 53,54% dibandingkan target akhir RPJMD. Dan diharapkan pada tahun 2017 target Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Transportasi di DIY dapat tercapai sesuai rencana.

Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda; Untuk mencapai target indikator Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda dilaksanakan melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan penyediaan fasilitas transportasi antar moda yaitu SMTS *On Bus* 29 unit dan Pengembangan Halte Trans Jogja 7 unit. Capaian indikator ini pada tahun 2015 sebesar 40% sesuai yang ditargetkan dan mengalami kenaikan sebesar 3,56% dari capaian tahun 2014. Dibandingkan target akhir RPJMD capaian pada tahun 2015 adalah sebesar 80%. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015 s/d 2017, diharapkan target akhir RPJMD tahun 2017 akan dapat dipenuhi.

Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi; Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi. Capaian indikator Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi pada tahun 2015 sebesar 100% dihitung berdasarkan capaian output 4 kegiatan yaitu: Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum, Pembinaan dan Pemantauan Keselamatan Penerbangan, Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dengan capaian masing-masing kegiatan 100%.

Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan; Guna menjamin berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan dilaksanakan beberapa kegiatan melalui Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Capaian indikator ini pada tahun 2014 sebesar 100% yang dihitung berdasarkan pada sarana dan prasarana yang berfungsi baik yang meliputi: sarana dan prasarana jembatan timbang, sarana dan prasarana laut dan ASDP, fasilitas keselamatan lalu lintas, dan sarana dan prasarana angkutan umum *buy the service*

Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor; Target indikator Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dipenuhi melalui Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor berupa pembinaan di 5 kabupaten/ kota.

4.2.16.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pada Tahun Anggaran 2015 alokasi dana APBD untuk Urusan Perhubungan sebesar Rp96.505.503.743,00. Dana ini untuk melaksanakan 12 Program dan 50 Kegiatan pada Urusan Perhubungan. Untuk realisasi anggaran sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp. 83.489.382.250,00 atau 86,51%. Sedangkan untuk realisasi fisiknya adalah 99,78% dari target yang direncanakan. Pencapaian keuangan mengalami deviasi sebesar 13,49% diantaranya karena adanya sisa lelang dari kegiatan, adanya *at cost* untuk perjalanan dinas luar daerah serta adanya penyesuaian SHBJ.

4.2.16.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Pada penerapan manajemen berbasis kawasan, koordinasi antar *stake holders* masih belum optimal.
- Cakupan layanan angkutan umum (Trans Jogja) belum dapat ditingkatkan karena rencana penambahan 2 jalur tidak terealisasi sehinga belum semua potensi kawasan kantong penumpang di perkotaan Yogyakarta dapat terjangkau.

B) Solusi

- Telah dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui SK Gubernur, dan telah dilakukan koordinasi rutin.

- Tahun Anggaran 2016 merupakan masa transisi beralihnya operator pengelolala Trans Jogja ke BUMD yaitu PT AMI. Sehingga pengembangan cakupan layanan berupa penambahan jalur akan direalisasikan pada tahun 2017.

4.2.17 Urusan Komunikasi dan Informatika

4.2.17.1 Kondisi Umum

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan sebutan *e-government*, telah dijabarkan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003. Pengoptimalisasian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yakni melalui pengembangan *e-government*, sehingga pemerintah dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah secara efektif dan efisien.

Landasan pengembangan *egovernment* Pemerintah Daerah DIY dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province* dengan konsep *Digital Government Services* (DGS). Pada awalnya DGS ini dikembangkan pada 6 (enam) bidang unggulan strategis (Bidang Pendidikan, Bidang Perindustrian, Bidang Perhubungan, Bidang Perikanan dan Kelautan, Bidang Pariwisata, dan Bidang Pertanian), dan sampai tahun 2015 sudah 12 bidang unggulan dari target 14 bidang pada tahun 2017. Pengembangan bidang unggulan ini menunjukkan sikap yang jelas dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang menitikberatkan pada pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Penerapan konsep *e-government* membawa akibat perlunya transformasi model kepemerintahan, menuju konsep model kepemerintahan *citizen centric* atau kepemerintahan yang lebih berorientasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Model kepemerintahan ini memerlukan peran dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi pada kegiatan pembangunan di daerah.

Pemerintah Daerah DIY telah memulai pembangunan infrastruktur jaringan komputer sejak tahun 2002 dan telah mengalami pengembangan sampai saat ini. Pembangunan jaringan ini telah memungkinkan setiap SKPD *terkoneksi* dalam jaringan internet/ intranet, sehingga transformasi data dan informasi antar unit kerja dapat berjalan semakin lancar.

Tabel 4.30 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi & Informatika Tahun 2015

No	Indikator	2014	2015		% Realisasi	Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi			
1	Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan	11 urusan/ bidang	12 urusan/ bidang	12 urusan/ bidang	100,00	14 urusan/ bidang	85,71
2	Persentase penyediaan jaringan IT di Pemda DIY	85,80	80	86	107,50	100	86
3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat	65,98	70	71	101,43	75	94,67

Sumber: Dishubkominfo DIY, 2016

Peningkatan layanan unggulan DGS per-urusan; dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang berupa pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan *Digital Government Services* (DGS). Pengembangan layanan unggulan ini juga dilaksanakan melalui *updating Jogja Cyber Province* sejak tahun 2011. Capaian indikator pada tahun 2015 adalah 12 urusan/ bidang, yang diukur melalui indikator penambahan layanan unggulan dalam pelaksanaan DGS. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 terdapat penambahan 1 urusan dalam pelaksanaan DGS yaitu pada Dinas Sosial.

Persentase penyediaan jaringan IT di Pemda DIY dilaksanakan melalui Program Pengambangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi. Pada tahun 2015 dilakukan perawatan/ *maintenance* semua jaringan yang sudah ada. Untuk jaringan *fiber optic* terkoneksi sebanyak 61 titik lokasi di semua SKPD Pemda DIY, serta perbaikan jaringan *wireless* disejumlah 46 titik dan berpindahnya titik lokasi karena perpindahan lokasi SKPD. Capaian indikator pada tahun 2015 sebesar 86% melebihi dari target 80%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2017, maka dengan persentase capaian tahun 2015, diharapkan target akhir RPJMD tahun 2017 akan dapat terpenuhi.

Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi Masyarakat; dilaksanakan melalui Program Fasilitasi Pos Telekomunikasi, Pengendalian Frekuensi dan Informasi Publik. Pencapaian indikator ini sebesar 71% melebihi target 70% untuk tahun 2015. Berdasarkan capaian indikator tahun sebelumnya 65,98%, maka persentase capaian indikator tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,02%. Terhadap target akhir capaian indikator RPJMD tahun 2017, maka capaian sebesar 94,67%, tidaklah terlalu berbeda secara signifikan, sehingga diharapkan target akhir RPJMD tahun 2017 akan dapat terpenuhi.

4.2.17.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Jumlah alokasi dana APBD Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp9.384.847.425,00 untuk melaksanakan 3 Program dan 12 Kegiatan. Realisasi keuangannya sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp8.953.452.107,00 atau 95,40%. Sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target yang direncanakan. Pencapaian keuangan mengalami deviasi sebesar 4,60% disebabkan antara lain adanya sisa lelang dari kegiatan, adanya *at cost* untuk perjalanan dinas luar daerah serta adanya penyesuaian SHBJ.

4.2.17.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Pengembangan e-Gov belum berjalan maksimal, sehingga integrasi layanan *Digital Government Services* (DGS) antar SKPD belum berjalan baik;
- Belum adanya payung hukum yang lebih tinggi untuk menyelaraskan pengembangan e-Gov sampai tingkat kabupaten/ kota di DIY.

B) Solusi

- Memaksimalkan pengembangan e-Gov dengan sinkronisasi layanan *Digital Government Services* (DGS) antar SKPD;
- Menginisiasi raperda tentang pengembangan e-Gov yang memberikan payung hukum yang lebih kuat untuk melakukan pengembangan e-Gov sampai tingkat kabupaten/ kota.

4.2.18 Urusan Pertanahan

4.2.18.1 Kondisi Umum

Urusan Pertanahan diarahkan pada kegiatan-kegiatan penataan pemanfaatan tanah, pengawasan dan izin pengelolaan tanah kas desa, penyelesaian konflik-konflik pertanahan sampai dengan fasilitasi penetapan izin lokasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selama tahun 2015 telah terproses izin penetapan lokasi sebanyak 60 izin dari target 12 izin. Dalam hal fasilitasi izin pengelolaan tanah kas desa, pada tahun 2015 sudah dilakukan fasilitasi terkait terbit/keluarnya izin pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa sebanyak 86 izin dari target 70 izin. Disamping itu juga terus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan terhadap target 38, realisasi 50 izin tanah kas desa, serta penanganan permasalahan pertanahan dari target 25 realisasi sebanyak 42 permasalahan yang tertangani.

Tabel 4.31 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% realisasi		
Bidang SG, PAG, dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum	bidang	9.168	10.535	11.548	109,62	13.035	88,59

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2016

Sampai dengan saat ini telah dilakukan pendataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak ±13.226 bidang dengan keluasan ±58.219.146 m^2 dan untuk Tanah Desa sebanyak ±31.804 bidang dengan keluasan ±209.664.472 m^2, juga telah dilakukan pendaftaran dan penerbitan sertifikat. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten sifatnya berkelanjutan mulai dilaksanakan pada tahun 2014 selanjutnya dilakukan pengembangan dan *updating* data. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah terbit sebanyak 2.867 sertifikat. Sedangkan Tanah Desa sampai tahun 2014 telah terbit sebanyak ±8.381 sertifikat.

4.2.18.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Total anggaran dari Dana APBD untuk membiayai urusan Pertanahan pada tahun 2015 sebesar Rp434.985.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program dan 5 kegiatan. Capaian fisik kinerja dari program kegiatan yang dilakukan sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar Rp431.952.575,00 atau 99,31%.

4.2.18.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Ketergantungan terhadap pihak pihak eksternal dalam hal kelengkapan berkas yang diterima.
- Kondisi fisik bidang di lapangan yang memiliki kompleksitas yang sangat beragam, antara lain lokasi lahan, sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengukuran bidang secara cepat.

B) Solusi

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyikapi kondisi yang ada terkait berkas yang diterima dan solusi penyelesaiannya agar pelaksanaan dilapangan dapat berjalan lebih baik.
- Proses inventarisasi dan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara paralel dengan lokus per desa (lokasi) agar lebih cepat dan mudah.

4.2.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

4.2.19.1 Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

A. Kondisi Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) wilayah yang dikenal sebagai tempat yang ramah dan terbuka bagi kalangan siapapun. Kondisi itu menunjukkan bahwa DIY merupakan wadah yang baik sebagai percontohan kehidupan yang beragam, multikulltural, toleran dan nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Upaya pembinaan kesatuan dan stabilitas politik yang ada di DIY, menjadi modal utama dalam membentuk masyarakat madani dan merupakan benefit yang mendukung upaya Pemda DIY dalam mewujudkan DIY sebagai pusat budaya, pendidikan, dan tujuan wisata terkemuka di Asia.

Dalam upaya meningkatkan kerukunan dan menjalin komunikasi antar elemen masyarakat di DIY, dilakukan upaya-upaya strategis melalui Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM), Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK), Dialog Antar Umat Beragama/Forum Umat Beriman, serta Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat meliputi kegiatan Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Koordinasi Cipta Kondusif Daerah dan Desk Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki begitu banyak nilai luhur dan kearifan budaya lokal. Oleh sebab itu ntuk menggali, menjaga dan menumbuhkan nilai-nilai tersebut perlu diadakan suatu usaha yang lahir dari masyarakat yang dilaksanakan oleh pranata-pranata sosial baik yang sudah lama ada atau yang dibentuk berdasarkan kebutuhan-kebutuhan akibat perkembangan situasi dan kondisi masa kini atau masa mendatang.

Upaya di atas sangat penting mengingat sistem dan institusi sosial yang lahir dan diselenggarakan oleh masyarakat merupakan basis utama dalam menjaga ketahanan masyarakat sehingga mampu menghadirkan ketentraman, ketertiban, dan pada akhirnya melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu pranata-pranata sosial yang telah ada maupun yang nantinya akan dibentuk dalam masyarakat agar dapat berjalan harmonis dan bersinergi antara yang satu dengan lainnya menjadi penting untuk diatur melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga.

Upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan telah dilakukan oleh berbagai pihak namun masih diperlukan keterpaduan, sinergitas serta peran serta aktif dari masyarakat yang lebih tahu dan memahami kondisi situasi disekelilingnya dengan menggunakan kearifan lokal-kearifan lokal, dengan kembali memunculkan budaya-budaya adiluhung yang sudah ada dan memang ada, dan sekarang sudah mulai luntur apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ternyata dampaknya sangat besar, entah itu dampak negatif ataupun positif.

Dua puluh tiga Jaga Warga telah terbentuk di Kabupaten/ Kota dari 15 yang ditargetkan dalam tahun 2015, dengan rincian enam di Kota Yogyakarta (4 basis

kampong/ dusun, 2 basis kelurahan), tiga di Kabupaten Bantul (1 basis dusun, 2 basis desa), enam di Kabupaten Kulon Progo (2 basis dusun, 4 basis desa), 3 wilayah merupakan permintaan tambahan wilayah sasaran, tiga Jaga Warga basis dusun di Kabupaten Gunungkidul, dan lima di Kabupaten Sleman dengan basis 2 dusun dan 3 desa dan 5 Kabupaten Sleman dengan basis 2 dusun dan 3 desa.

Dengan adanya Jaga Warga permasalahan-permasalahan yang diperkirakan akan muncul disekeliling kita diharapkan dapat diketahui sejak dini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat sebagaimana tercantum di dalam Pancasila serta meminimalisir penyelesaian melalui jalur hukum (kecuali memang diperlukan).

Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis 2015 menunjukkan capaian demokrasi di DIY cukup menggembirakan. Indeks demokrasi di DIY melampaui rerata nasional (82,71 dari rerata 73,04). Angka ini naik 10,35 poin dibandingkan dengan IDI DIY yang dirilis tahun 2014 sebesar 72,36 dan mengalami perubahan tingkat demokrasi. Lebih detail, capaian kekebasan sipil (86,25 dari rerata nasional 82,62), capaian hak-hak politik (76,07 dari rerata nasional 63,72) dan lembaga demokratis (88,82 dari rerata nasional 75,81).

Dari hasil Indeks tersebut, DIY masuk ke dalam kategori baik dimana skor Indeks yang diperoleh lebih dari 80. Namun demikian tingkat demokrasi di DIY berdasarkan penghitungan indeks sejak tahun 2009 hingga 2013 masih berada pada kategori “sedang”. Secara lebih rinci, pada IDI yang dirilis tahun 2014-2015 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat bahwa aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan berturut-turut 25,42 dan 5,13 poin. Sementara nilai indeks kebebasan sipil cenderung mengalami penurunan 4,53 poin. Indeks hak-hak politik yang berubah banyak karena digunakannya informasi hasil Pemilu Legislatif 2014.

DIY yang memang multikultur selalu dihadapkan pada resiko dan potensi konflik sosial ketika berbagai perubahan yang terjadi tidak diantisipasi dan tidak dikelola dengan baik. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan upaya penanganan konflik secara koordinatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mencipatakan serta menjaga ketahanan masyarakat dan stabilitas Daerah.

Tabel 4.32 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesbangpoldagri Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase penurunan konflik	Persen	33,33	33	100	303,03	33	303,03
2.	Kasus ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	Kasus	5	5	1	180	5	180
3.	Persentase korban tertolong dalam kejadian kecelakaan di Gunung, Laut, Waduk dan Sungai	Persen	86,72	84,90	89,43	105,36	86,4	103,51

Sumber: Bankesbangpol, 2016

Melalui koordinasi dengan Forum-Forum yang menjadi mitra Pemda DIY dan ditetapkannya Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga dan Pergub DIY Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial maka penurunan konflik dapat dicapai sebesar sebesar 100% (303,03%). Capaian penurunan konflik tahun 2014 sebesar 33,33% dan tahun 2015 sebesar 100%, sehingga mengalami penurunan sebesar 66,67%. Capaian kinerja kasus ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berpendapat tahun 2014 sebanyak 5 kasus dan tahun 2015 sebanyak 1 kasus, sehingga pada tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 4 kasus. Keberhasilan penurunan jumlah kasus ini berkat adanya koordinasi yang baik antar-pemangku kepentinganan melalui berbagai forum yang telah dibentuk Pemda DIY untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan potensi konflik serta dijadikannya Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (PKS) sebagai pedoman lintas sektor dalam meminimalisasi ancaman maupun gangguan terhadap keamanan di DIY.

Upaya pertolongan korban dalam kecelakaan/ musibah di gunung, laut, waduk dan sungai, capaian kinerjanya sebesar 89,43% (105,56%). Capaian kinerja tersebut berkat upaya Pemerintah Daerah menempatkan SAR Satlinmas pada obyek-obyek

wisata untuk mengawasi dan memberikan pertolongan/pencarian korban bila terjadi musibah/kecelakaan di obyek wisata Pantai Sadeng (wilayah I), Pantai Baron (Wilayah II), Pantai Parangtritis (Wilayah III), Pantai Samas (Wilayah IV), Pantai Glagah (Wilayah V), Waduk Sermo (Wilayah VI) dan Kaliurang (Wilayah VII).

B. Program dan Kegiatan Tahun 2015

Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program kegiatan pada Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dari APBD 2015 adalah sebesar Rp8.629.333.984,00 yang terdiri dari 7 Program dan 46 Kegiatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja fisik Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebesar 99,99% dan realisasi keuangan sebesar 97,14%.

C. Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Heterogenitas masyarakat DIY dan pesatnya perkembangan teknologi informasi semakin mempermudah masyarakat untuk menyampaikan pendapat maupun informasi melalui media sosial, namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan yang menujurus semakin banyaknya ancaman kekerasan, akibat informasi yang beragam tersebut.

B) Solusi

- Optimalisasi Forum-Forum Kemitraan yang sudah terbentuk selama ini (FKUB, FKDM, FPK, Kominda, Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT), Forum Dialog LSM/Ormas/Orpol), Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK),
- Peningkatan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik.

4.2.19.2 Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

A. Kondisi Umum

Pesona DIY sebagai daerah yang memiliki banyak alternatif objek wisata dan lembaga pendidikan tinggi telah menjadi alasan utama para pendatang mempunyai kepentingan untuk menjadi pelaku ekonomi, politik dan sosial budaya

di DIY. Dengan keanekaragaman kepentingan tersebut maka akan meningkatkan risiko pelanggaran Peraturan Daerah dan penyimpangan penggunaan asset Pemerintah Daerah DIY.

Pemerintah Daerah DIY memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengantisipasi dan mengelola hal itu. Pasal 27 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewajiban kepada kepala daerah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Gambar 4.9 Operasi Miras sebagai bentuk kegiatan penanganan Penyakit Masayarakat (PEKAT)

Dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi. Begitu juga dalam rangka mengamankan asset Pemerintah Daerah DIY dari tindak penyimpangan, Pemerintah Daerah DIY menempatkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan serangkaian kegiatan pengamanan.

Tabel 4.33 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kasus	289	290	303	95,52	280	91,79
2	Peningkatan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah DIY	%	45,05	26	6,57	174,73	22	178,1

Sumber: Satpol PP DIY, 2016

Indikator peningkatan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada tahun 2015 ini realisasinya mencapai 303 kasus dari target 290 kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 95,52%. Peningkatan pengamanan asset Pemerintah Daerah DIY capaiannya sebesar 174,73% dengan realisasi penyimpangan aset sebesar 6,57% yang melampaui dari target tahun 2015 sebesar 26%.

Berdasarkan dari tabel di atas, capaian kinerja Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan untuk indikator Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Akan tetapi pada indikator Persentase Penyimpangan Penggunaan Asset mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2014.

Kinerja pada indikator Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercapai sebesar 95,52%, yaitu dari 290 kasus yang ditargetkan, terealisasi 303 kasus. Tidak tercapainya target dikarenakan beberapa kendala, diantaranya:

1. Bertambahnya jumlah dan semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang harus ditegakkan, mengakibatkan jumlah kasus pelanggaran juga meningkat.
2. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, aparat maupun lembaga dalam mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku.
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen dan PPNS.

Kinerja pada indikator Persentase Penyimpangan Penggunaan Asset Pemerintah Daerah DIY tercapai sebesar 174,73% yaitu dari 26% yang ditargetkan, terealisasi 6,57%. Keberhasilan pencapaian target didukung beberapa faktor, diantaranya: Koordinasi dan sinergi yang baik antara Satpol PP DIY dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja dan Adanya komitmen dari pengguna asset memberikan informasi penyimpangan penggunaan asset Pemerintah Daerah DIY.

B. Program dan Kegiatan Tahun 2015

Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program kegiatan utama (Belanja Langsung) untuk Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada APBD 2015 adalah sebesar Rp3.519.013.360,00 yang terdiri dari 9 Program dan 35 Kegiatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja fisik Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,93%.

C. Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Meningkatnya dinamika sosial masyarakat sebagai akibat dari dinamika kebijakan Pemerintah, pengaruh globalisasi, dan konvergensi media sosial sebagai wahana komunikasi dan interaksi antar-warga.
- Persoalan kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat yang menyebabkan potensi tindak kriminal dan gangguan keamanan ketertiban umum.
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas PPNS dalam melakukan penegakan Perda.

B) Solusi

- Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan tibumtranmas melalui kerjasama antar *stakeholder*, peningkatan patroli dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi dan media dalam mendukung pembangunan.
- Perlu adanya penambahan PPNS yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

4.2.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4.2.20.1 Sub Urusan Otonomi Daerah

A. Kondisi Umum

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam pasal 411 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 2 Oktober 2014, sehingga tidak ada masa transisi yang menjembatani dalam implementasinya. Dan sampai saat ini Peraturan Pelaksana urusan pemerintahan pun belum dikeluarkan.

Meskipun UU no 23 tahun 2014 ini tidak ada masa transisi, namun dalam pasal 408 disebutkan bahwa “semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Disamping kejelasan urusan pemerintahan, penyelenggaraan sub urusan otonomi daerah ini juga menyasar penyelesaian permasalahan P3D. Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/ Kota dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Untuk mengampu urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan perangkat pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa, khususnya menindaklanjuti Alokasi Dana Desa. Kegiatan ini bekerjasama dengan perwakilan BPKP DIY.

Tabel 4.34 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah, Fasilitasi Pemerintah Tahun 2015

Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase bahan rumusan kebijakan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100

Sumbe: Biro Tapem DIY, 2016

Pada Sub Urusan Otonomi Daerah memiliki indikator kinerja Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Pemerintahan. Secara capaian, maka indikator kinerja tersebut dapat tercapai 100% dimana telah adanya bahan rumusan terkait penyelenggaraan otonomi daerah dan kejelasan urusan pemerintahan antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Indikator kinerja Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Pemerintahan pada sub urusan otonomi daerah bersifat non kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan tersusunnya dan diserahkannya bahan rumusan kebijakan kepada pembuat kebijakan.

B. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program kegiatan pada sub urusan otonomi daerah ini adalah Rp922.959.000,00. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 program dan 5 kegiatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja fisik sub bidang otonomi daerah adalah 100% dan capaian anggaran sebesar Rp850.911.500,00 atau sebesar 92,19%. Dengan demikian tidak ada kesenjangan antara target fisik dengan capaian kinerja fisik. Kesenjangan terjadi pada capaian anggaran yaitu sebesar 7,81%. Untuk Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa total anggaran Rp542.862.625,00 dengan 4 kegiatan. Capaian kinerja fisik adalah 100% dan capaian anggaran sebesar Rp498.476.488 atau sebesar 91,82%.

C. Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Belum keluarnya Peraturan Pelaksana dari Perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah dan Desa.

- Masih ada beberapa aspek yang perlu disepakati antara Pemda DIY dan Kabupaten/ Kota antara lain tentang aset dan personil.
- Adanya 2 Kementerian yang menangani penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam implementasi kebijakan timbul multitafsir.

B) Solusi

- Konsultasi ke Pusat terkait implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih jelas.
- Melakukan Sosialisasi dengan Narasumber dari pemerintah Pusat terkait Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Perlunya pemahaman terhadap regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang disepakati bersama.

4.2.20.2 Sub Urusan Pemerintahan Umum

A. Fasilitas Pemerintahan

1) Kondisi Umum

Penyelenggaraan program kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi fokus sub urusan Pemerintahan Umum. Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dilakukan kegiatan;

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan (LPPD) Pemda DIY. LPPD DIY tahun 2014 telah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan harapan kinerja Pemda DIY dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya Prestasi Kinerja 3 (tiga) Provinsi Terbaik berdasarkan LPPD tahun 2013 yang kemudian dilanjutkan dengan penganugrahan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Presiden RI kepada Gubernur DIY atas Kinerja Pemerintah Daerah DIY terhadap LPPD tahun 2013.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun arahan yang sudah dihasilkan: (1) Pengangkatan Penjabat Bupati Bantul, Gunungkidul dan Sleman sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri, (2) Menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/10585 tanggal

26 Oktober 2015 perihal Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

3. Kajian Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian terhadap penelusuran Hari Jadi DIY merekomendasikan 2 (dua) alternatif yang memungkinkan untuk diangkat menjadi Hari Jadi DIY; alternatif utama tanggal 13 Maret 1755 ketika Sultan Hamengku Buwono memproklamirkan Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat dan alternatif kedua tanggal 5 September 1945 yang merujuk pada peristiwa Amanat 5 September 1945.

Untuk kerjasama antar pemerintah daerah, Pemerintah Daerah DIY turut serta aktif dalam keanggotaan Mitra Praja Utama (MPU) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Terdapat 5 (lima) kesepakatan yang dicapai dalam MPU pada tahun 2015 mengenai: (1) Program Prioritas 2016-2020, (2) Program Kegiatan kerjasama Pembangunan 2016, (3) Rekomendasi kepada Pemerintah, antara lain Kemudahan Kredit dengan suku bunga khusus bagi UKM/IKM dan Promosi Pariwisata melalui *International Tourism Information Center* (ITIC), (4) Kenaikan iuran anggota FKD-MPU, dan (5) Kesepakatan Bersama Kerjasama Kawasan Nusa Tenggara/ *Area Visit* Sunda Kecil. Sedangkan rekomendasi APPSI adalah (1) Pemerintah diharapkan memberikan insentif fiskal dengan usaha di sektor pangan, industri berbasis ekspor dan industri berbasis subsitusi impor; (2) Pelaksanaan rekrutmen terbuka dan pengisian jabatan secara terbuka.

Tabel 4.35 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum, Fasilitasi Pemerintah Tahun 2015

Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase bahan rumusan kebijakan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Tapem DIY, 2016

Dalam pelaksanaan Sub Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja yaitu Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Pemerintahan. Fokus bahan rumusan

kebijakan pada Sub Urusan Pemerintahan Umum ini adalah kebijakan batas daerah baik antar Kabupaten/ Kota maupun DIY-Jawa Tengah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator kinerja Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Pemerintahan ini bersifat non kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan tersusunnya dan diserahkannya bahan rumusan kebijakan kepada pembuat kebijakan.

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program kegiatan pada sub urusan pemerintahan umum dari APBD 2015 adalah Rp2.055.377.900,00. Adapun program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD sebanyak 5 program dan 29 kegiatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja fisik sub bidang pemerintahan umum 96,72% dan capaian anggaran sebesar Rp1.877.160.782,00 atau sebesar 91%. Kesenjangan capaian anggaran pada pelaksanaan sub urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2015 sekitar 5%. Kesenjangan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi karena faktor eksternal.

3) Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

Belum diterbitkannya aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga proses pengusulan pengangkatan dan pengesahan Bupati Bantul, Gunungkidul dan Sleman menjadi tidak efisien.

B) Solusi

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik dengan Kemendagri maupun dengan instansi di daerah untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/140/SJ tanggal 19 Januari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota.

B. Kelembagaan

1) Kondisi Umum

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 menjadi semangat untuk lahirnya beberapa regulasi baru. Salah satu poin penting dari undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berimplikasi pada pengalihan beberapa urusan dari dan atau antar tingkat pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur sipil negara.

Gambar 4.10 Sosialisasi Urtujab

Penyelenggaraan urusan tersebut tentunya berdampak pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan sesuai bidangnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur sipil negara yang diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan serta peningkatan skor IKM pada unit pelayanan publik.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, pada tahun 2015 Pemda DIY mendukung gerakan *one agency one innovation* dengan menerbitkan SE Gubernur DIY Nomor 065/12017 tentang inovasi pelayanan publik. Hal tersebut juga diikuti dengan penyusunan regulasi pedoman teknis penyusunan inovasi pelayanan publik yang diharapkan menjadi panduan bagi unit layanan dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan dan replikatif. Peningkatan pelayanan publik pada tahun 2015 secara nyata dibuktikan dengan nilai IKM yang melebihi target serta keberhasilan Pemda DIY dalam kompetisi inovasi pelayanan publik sebagai salah satu 25 *Top Inovator* se-Indonesia (*Jagja Plan*).

Tabel 4.36 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	80	85	87,69	103,16	90	97,43
2.	Persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik	%	80	85	87,50	102,94	90	97,22

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2016

Indikator kinerja persentase kelembagan yang efektif dan efisien tercapai sebesar 103,16%, dari target sebesar 85% tercapai sebesar 87,69%. Capaian ini terdapat kenaikan sebesar 7,69% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014. Angka capaian tahun 2015 ini berkontribusi sebesar 97,43% terhadap target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Capaian indikator ini diantaranya didukung oleh dukungan anggaran, komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan serta meningkatnya kapasitas SDM aparatur pelaksana.

Untuk indikator persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik, capaian indikator sebesar 102,94%. Target di tahun 2015 sebesar 85% tercapai sebesar 87,50% dan berkontribusi sebesar 97,22% terhadap target akhir RPJMD DIY Tahun 2017. Faktor pendukung pencapaian target indikator tersebut di tahun 2015 diantaranya adanya ekspose hasil survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2014 dari 63 unit layanan dan RS Grhasia yang mampu mendorong masing-masing unit layanan untuk berupaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2) Program dan Kegiatan Tahun 2015

Tahun 2015, total APBD yang dikelola Biro Organisasi Setda DIY sebesar Rp5.085.452.875,00 yang didukung oleh 4 program dan 24 kegiatan. Realisasi keuangan sebesar 87,90% (Rp3.840.383.516,00) dan realisasi fisik sebesar 95,45%. Realisasi fisik kurang dari 100% dikarenakan ada 2 kegiatan yang tidak bisa diselesaikan karena faktor eksternal. Kegiatan tersebut adalah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyelenggaraan Munas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI).

3) Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

Belum adanya petunjuk teknis tentang penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan tentang pelaksanaan 6 urusan wajib.

B) Solusi

Sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang penerapan standar pelayanan minimal, disepakati oleh semua pengampu SPM di provinsi dan kabupaten/ kota di DIY mengacu pada regulasi yang lama.

C. Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum

Gambar 4.11 Diskusi Lembaga Ombudsman DIY tentang BPJS Kesehatan

1) Kondisi Umum

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyelenggara pemerintahan dihadapkan ke dalam kompleksitas dalam banyak bidang. Salah satu bidang yang dihadapi adalah bidang hukum. Sesuai dengan asas legalitas, penyelenggaraan suatu pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, pembentukan produk hukum daerah merupakan proses yang sangat penting. Pembentukan produk hukum daerah dilakukan dengan cara mewujudkan sistem hukum daerah yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang sangat pesat dan cenderung sering dilakukan perubahan mengakibatkan banyak produk-produk peraturan harus segera ditindaklanjuti dengan dibentuknya Peraturan Daerah. Pembentukan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum di daerah. Produk hukum daerah ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di semua bidang di daerah.

Penyusunan produk hukum daerah harus diprogramkan sesuai dengan kewenangan daerah sehingga dalam pembentukan produk hukum daerah dapat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, penyusunan produk hukum daerah harus mengakomodir perkembangan masyarakat dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat agar pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dapat dirasakan optimal. Penyusunan produk hukum yang didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga/ organisasi/ unit kerja yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah akan menghasilkan produk hukum daerah yang berhasil guna dan berdaya guna.

Sinkronisasi, harmonisasi dan keselarasan dalam penyusunan produk hukum daerah, perlu dilakukan melalui koordinasi dan asistensi dalam penyusunan produk hukum, baik berupa perubahan produk hukum maupun penyusunan produk hukum daerah baru agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.37 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013-2015 serta Capaian 2015 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum	%	99,15	100	120,55	120,55	100	120,55
2	Persentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum	%	134,88	96	118,54	123,48	100	118,54

Sumber: Biro Hukum DIY, 2016

Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai keluaran dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dilakukan lima bentuk kegiatan yaitu proses pembahasan, penyusunan rancangan peraturan daerah, penjaringan aspirasi masyarakat, evaluasi-klarifikasi-konsultasi, serta publikasi rancangan peraturan perundang-undangan di media cetak. Pada Tahun 2015, Biro Hukum Setda DIY bersama DPRD DIY telah membahas 20 (dua puluh) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)/Rancangan Keputusan DPRD DIY dari target sebanyak 16 (enam belas) Rancangan. Dari 20 (dua puluh) Rancangan yang dibahas bersama DPRD DIY, 16 (enam belas) Raperda merupakan PROLEGDA Tahun 2015, 3 (tiga) Raperda Anggaran Belanja dan Pendapatan dan Daerah (APBD) Penetapan, Perubahan dan Pertanggungjawaban, dan 1 (satu) Rancangan Keputusan DPRD yaitu tentang Rekomendasi DPRD DIY terhadap Perubahan Kelima Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Jogja Tugu Trans. Target yang ingin dicapai setiap tahunnya adalah 100%.

Tabel 4.38 Kegiatan pembahasan raperda menjadi perda oleh Pemda DIY pada 2015

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Pembahasan Raperda di DPRD DIY	16 Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD	1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
		2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa	Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa
		3. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		4. Raperda tentang Pelestarian Habitat Alami	Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami
		5. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
		6. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
		7. Raperda tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
		8. Raperda tentang Pola Pengembangan Transpotasi Wilayah	Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transpotasi Wilayah
		9. Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak
		10. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		11. Raperda tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial	Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
		12. Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan	Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan
		13. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana	Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
		14. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
		15. Raperda tentang Nomenklatur DIY dan Penggunaannya	Masih menunggu pemberian nomor register dari Kementerian Dalam Negeri
		16. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DIY	Masih menunggu pemberian nomor register dari Kementerian Dalam Negeri
		17. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Masih menunggu pemberian nomor register dari Kementerian Dalam Negeri
		18. Rancangan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD DIY Terhadap Rancangan Perubahan Kelima Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Jogja Tugu Trans	Keputusan DPRD Nomor 7/K/DPRD/2015 tentang Rekomendasi DPRD DIY Terhadap Rancangan Perubahan Kelima Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Jogja Tugu Trans
		19. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Masih dalam proses evaluasi perda di Kementerian Dalam Negeri

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		20. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Masih dalam proses evaluasi perda di Kementerian Dalam Negeri

Sumber: Biro Hukum DIY, 2016

Fungsi Peraturan Gubernur yang bersifat pengaturan *(regeling)* adalah untuk menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan lain, sesuai dengan lingkup kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif (wakil Pemerintah Pusat). Tahun 2015 ini Biro Hukum, melakukan penyusunan Peraturan Gubernur sebanyak 119 Peraturan Gubernur, 362 Keputusan Gubernur, dan 6 Instruksi Gubernur.

Pengawasan atas Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi Produk Hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah. Dalam Tahun Anggaran 2015 target kinerja yang ditetapkan untuk Konsultasi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota, Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota sebanyak 50 (lima puluh) Produk Hukum Kabupaten/ Kota dan untuk Evaluasi sebanyak 1 (satu Rancangan Produk Hukum Kabupaten/K ota. Selanjutnya dalam Tahun Anggaran realisasi Kegiatan Pengawasan atas Produk Hukum Kabupaten/ Kota adalah menerima dan melakukan kajian terhadap 66 (enam puluh enam) Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang dikonsultasikan atau 132% dari target, 52 (lima puluh dua) Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang diklarifikasi atau 130% dari target, dan 3 (tiga) Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang dievaluasi atau 300% dari target.

Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang telah dilaksanakan oleh Biro Hukum antara lain adalah:

a. Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke 5 kabupaten/ kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu ke Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman.
b. Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disampaikan ke Kabupaten/ Kota sampai ke tingkat Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
c. Pembuatan katalogisasi, abstrak peraturan dan pelabelan
d. Pengadaan dan penataan koleksi dokumentasi dan informasi hukum
e. Pemasukan *database* naskah lengkap peraturan perundang-undangan ke dalam media CD (*Compact Disk*)
f. *Entry* data produk hukum ke dalam website: www.birohukum.pemda-diy.go.id
g. Partisipasi dalam penyelenggaraan Legal Expo yang dilaksanakan di Kementerian Hukum dan HAM RI.
h. Penyebarluasan produk hukum keistimewaan yaitu Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk sosialisasi dan penyampaian sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) buku ke Kabupaten/ Kota sampai ke tingkat pedukuhan.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan pelayanan hukum bagi aparatur, Biro Hukum melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum dengan realisasi penyelesaian permasalahan hukum, sebanyak 3 kasus sebagai berikut:

a. Penyelesaian Perkara Nomor 08/G/2015/PTUN.YK berkaitan dengan Gugatan PT. Bhinneka Citra Utama terhadap Pokja ULP Paket Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY. Kasus antara PT. Binneka Citra Utama (PENGGUGAT) melawan Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Paket Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (TERGUGAT) mengenai Pencabutan Gugatan terhadap perkara Nomor: 08/G/2015/PTUN.YK dengan Surat Pencabutan Gugatan Nomor: 26/YSP-YGY/V/2015 karena Penetapan PT. Kathir Mas Samodra sebagai pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Kantor pada kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY telah dibatalkan Kelompok Kerja

(POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Paket Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY dan sedang di evaluasi ulang. Diputuskan dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara 08/G/2015/PTUN.YK bahwa Pencabutan Gugatan perkara Nomor: 08/G/2015/PTUN.YK dikabulkan.

b. Penyelesaian Perkara Nomor 12/G/2014/PTUN.YK berkaitan dengan Gugatan Bondan Danu Kusumo, SE tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman oleh Yayasan PPKP Kasus antara Yayasan Pusat Pelatihan Keterampilan Profesional Yogyakarta (PENGGUGAT) melawan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (TERGUGAT) mengenai Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 143/4693 yang dikeluarkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Surat Peringatan Ketiga dan tanggapan surat perihal laporan persoalan Pengelolaan Tanah Kas Desa Condongcatur dan Jawaban atas Peringatan Gubernur DIY yang dinilai Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Kepentingan hukum penggugat yaitu penggugat tidak bisa mendapatkan hasil atas pemanfaatan Tanah Kas Desa Condongcatur secara optimal dan nama baik penggugat sebagai badan hukum menjadi tercemar. Diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara 12/G/2014PTUN.YK bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 143/4693 tidak sah dan diminta untuk dicabut.

c. Penyelesaian Perkara Nomor 07/G/2015/PTUN.YK berkaitan dengan Gugatan Sumadi dkk atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus antara Warga Dalam Pengadaan Tanah Bandara Baru DIY (PENGGUGAT) melawan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (TERGUGAT) mengenai Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 43 (empat puluh tiga) warga dari wilayah pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru menuntut Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015, karena dianggap tidak sesuai prosedur, melanggar HAM, dan tidak sesuai tata ruang karena sebagai daerah rawan tsunami sehingga tidak boleh dibangun. Diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor Perkara 07/G/2015/PTUN.YK bahwa Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 dibatalkan karena tidak sesuai dengan tata ruang

provinsi, hanya sesuai dengan tata ruang nasional dan tata ruang daerah. Lalu Gubernur DIY mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, yang mana jika ditolak maka akan diadakan upaya peninjauan kembali (PK) dan jika dikabulkan maka akan dilaksanakan pengukuran dan penentuan kepemilikan oleh BPN, penunjukan penilai harga tanah dan proses pembayaran ganti rugi.

Selain melaksanakan tugas diatas Biro Hukum Setda DIY melaksanakan penyiapan bahan pemberian Rekomendasi Perizinan, Pengesahan Badan Hukum. Sesuai dengan ketugasan tersebut maka Biro Hukum mempunyai kegiatan Layanan Hukum Masyarakat. Layanan Hukum Masyarakat mempunyai target kinerja sebagai berikut:

a. Kebijakan Penegakan Perlindungan Hukum sebanyak 3 bahan kebijakan yaitu tentang HAKI, Penegakan HAM dan Dilkehjapol.
b. Keputusan Gubernur tentang Ijin Tanah Kas Desa dengan target 60 buah, terealisasi 69 buah.
c. Keputusan Gubernur tentang Ijin Gubernur sebagai Pelindung dengan target 30 buah, terealisasi 24 buah.
d. Keputusan Gubernur tentang Pendirian Koperasi dengan target 10 buah, terealisasi 41 buah.
e. Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Usaha Beretika di DIY dan Perbaikan Pelayanan Publik di DIY dengan target 100 rekomendasi, terealisasi 103 rekomendasi.

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Biro Hukum Setda DIY pada Tahun Anggaran 2015 mengelola sebanyak 6 Program yang terdiri dari 25 kegiatan dengan besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp5.240.140.925,00. Realisasi keuangan pada Biro Hukum Setda DIY di Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.015.733.811,00 atau sebesar 95,72% dan realisasi fisik sebesar 100%. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum tidak ada kesenjangan antara target fisik dan capaian kinerja fisik. Kesenjangan terjadi pada capaian realisasi keuangan sebesar 4,28%. Hal tersebut karena adanya efisiensi anggaran pada kegiatan sesuai dengan harga dan standar yang berlaku. Untuk Belanja Tidak Langsung

anggarannya sebesar Rp3.025.986.656,00 dan realisasinya sebesar Rp2.987.270.395,00 atau 98,72% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

3) Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Perubahan Peraturan Perundang-undangan ditingkat Pusat yang sangat dinamis, berpengaruh terhadap penyusunan dan pengawasan produk hukum daerah karena mengakibatkan perubahan arah kebijakan Pusat dan Daerah.
- Belum seluruhnya Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang disampaikan ke Biro Hukum memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan Pergub DIY Nomor 48.1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 219/KEP/2009 tentang Prosedur Tetap Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota.

B) Solusi

- Mengkoordinasikan penyusunan produk hukum daerah dengan para pihak yang terkait agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan Pusat dan Kabupaten/ Kota agar proses konsultasi, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/ kota berjalan dengan lancar.

D. Fasilitas DPRD

1) Kondisi Umum

Lembaga Perwakilan Rakyat, sebagai salah satu simpul utama

penyelenggaraan pemerintahan, menjadi katup terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif. Agar Lembaga Perwakilan Rakyat dapat menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan secara optimal harus didukung dengan fungsi penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan, administrasi Keuangan, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan

penyediaan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Gambar 4.12 Rapat Paripurna Istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat Dewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kedudukan sebagai unsur fasilitasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mempunyai tugas pelayanan administrasi kepada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan; Administrasi Keuangan DPRD; Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; Menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Fungsi Sekretariat tersebut dalam rangka memfasilitasi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 55 orang anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang terhimpun dalam 7 Fraksi.

Dalam melaksanakan kegiatan DPRD terbagi dalam 7 alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan yang bersifat tidak tetap sesuai dengan peraturan Per Undang–Undangan yang berlaku meliputi: Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah (Banmusy), Komisi–Komisi, Badan Anggaran (Banggar), Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), Badan Kehormatan (BK) dan Alat Kelengkapan Lainnya berupa Pansus-Pansus.

Sesuai dengan RPJMD yang dijabarkan dalam Rencana Strategis, Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengampu 6 program yang terdiri 45 kegiatan dalam rangka merealisasikan target kinerja yang telah ditentukan, dengan ini kami sampaikan capaian indikator dan capaian Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum pada Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2015 sebagai berikut:

Tabel 4.39 Indikator dan Capaian Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum pada Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase perda, perdais pembahasan anggaran dan LKPJ Gubernur yang terselesaiakan tepat waktu.	%	-	94,5	95,27	100,81	100	100,81
2	Persentase rata rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD.	%	-	100	99,85	99,85	100	99,85

Sumber: Sekretaris DPRD, 2016

1. Target Kinerja Persentase Perda, Perdais, pembahasan anggaran dan LKPJ Gubernur ditargetkan 94,50% terealisasi 95,27 atau sebesar 100,81%. Pada Tahun 2014 Perda, Perdais, pembahasan anggaran dan LKPJ Gubernur pada tahun 2014 belum ditargetkan. Terhadap capaian target akhir RPJMD Tahun 2017, capaian pada tahun 2015 sebesar 100,81% telah melebihi target.
2. Target persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD pada tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi 99,85 atau sebesar 99,85%. Pada Tahun 2014 belum ditargetkan terhadap capaian target akhir RPJMD tahun 2017, capaian pada tahun 2015 masih belum memenuhi target yaitu kurang sebesar 0,15%.

Indikator Kinerja Persentase pengakses Informasi aktivitas Pemerintahan Daerah melalui Web, media elektronik, dan media cetak sudah tercantum pada tahun 2015 tetapi belum ada ditargetkan. Terhadap capaian target akhir RPJMD Tahun 2017 sebesar 90% tidak mengalami hambatan karena belum disediakan anggarannya pada tahun 2015.

2) Program dan Kegiatan Tahun 2015

Pembangunan sub Urusan Pemerintahan Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. Total Anggaran Belanja Langsung Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2015 yang terdiri dari 6 program yang dijabarkan dalam 45 kegiatan adalah sebesar Rp40.060.175.200 dan dapat direalisasikan sebesar Rp35.294.103.754 atau 88,10% dengan capaian fisik sebesar 96,65.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa keluaran kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap capaian keuangan dan fisik Tahun 2015. Salah satu contoh kegiatan yang tidak sesuai dengan sasaran target adalah Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD DIY dikarenakan tidak semua anggota DPRD mengambil hak untuk melaksanakan Bimtek.

Target keuangan sebesar 100% terealisasi 88,10% terjadi kesenjangan sebesar 11,90% hal ini disebabkan: Adanya efisiensi, Adanya sisa hasil lelang dan Pengadaan mobil operasional DPRD, sesuai dengan Hasil Evaluasi Kemendagri di perubahan APBD 2015 hanya menggunakan anggaran pengadaan mobil jabatan pimpinan DPRD yang digeser sehingga tambahan anggaran tidak digunakan.

Sedangkan Target Capaian fisik ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 96,65%, terjadi kesenjangan sebesar 3,35%, yang menyebabkan kegiatan tidak dilaksanakan sesuai target, karena:

1. Kegiatan Pimpinan DPRD yang terkait Forkom DPRD seluruh Indonesia realiasainya menyesuaikan undangan.
2. Siaran Langsung TVRI dan Konferensi Pers menyesuaikan agenda Dewan.
3. Tidak semua anggota dewan mengikuti kegiatan Bimtek karena bersamaan dengan kegiatan yang lain.

3) Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan:

- Yang menjadi permasalahan pelaksanaan program Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2015, karena kegiatan menyesuaikan agenda DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Tidak semua Alat Kelengkapan Dewan menggunakan kelompok pakar/nara sumber.
- Tidak semua Anggota DPRD mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

B) Solusi

- Menyusun agenda kerja dengan lebih cermat, dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan Dewan dan dengan pihak-pihak terkait lainnya.
- Meningkatkan komunikasi dengan Alat Kelengkapan DPRD sehingga dapat merealisasikan target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan perencanaan.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan DPRD.

E. Fasilitas Kesra

Gambar 4.13 Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang PMK RI tentang Penguatan Peran Keluarga

1) Kondisi Umum

Pembangunan diharapkan mampu untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut maka harus dilaksanakan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang.

Kondisi kesejahteraan masyarakat di DIY selama beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Kinerja pengentasan kemiskinan sudah

berjalan dengan baik. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, persentase penduduk miskin DIY cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin sebesar 16,14%. Kemudian pada tahun 2012 sebesar 15,88% tahun 2013 sebesar 15,03%, 2014 sebesar 14,55% Tahun 2015 sebesar 13,16%. Namun demikian, masih diperlukan optimalisasi agar persentase kemiskinan DIY semakin berkurang dan tidak berada di atas rata-rata nasional. Perlu upaya menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat miskin agar mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada dan mampu berkontribusi secara optimal dalam proses pembangunan. Pemerintah juga diharapkan mampu menstimulus penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat melalui upaya perluasan dan peningkatan kesempatan kerja.

Berdasarkan pada kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY selaku SKPD yang memiliki ketugasan untuk menyusun bahan rumusan kebijakan diharapkan mampu menyusun kebijakan demi mencapai tujuan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tabel 4.40 Indikator dan Capaian Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum pada Biro Adm Kesra & Kemasyarakatan Setda DIY Tahun 2015.

No	Indikator	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan	%	35,29	36,45	44,44	121,92	51,17	86,84%
2.	Persentase Pelaksanaan Kehidupan Beragama	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Kesra Setda DIY, 2016

Indikator persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan, target kinerja tahun 2015 adalah sebesar 36,45% dan terealisasi sebesar 44,44%. Hasil tersebut didasarkan pada pencapaian 9 (sembilan) rumusan bahan kebijakan yang menjadi 4 (empat) kebijakan pemerintah daerah. Pencapaian ini melebihi realisasi

capaian pada tahun 2014 yaitu sebesar 35,29%. Indikator Persentase Pelaksanaan Kehidupan Beragama, berhasil tercapai 100% dari target. Pencapaian target ini juga berhasil terealisasi pada tahun 2014. Hasil yang sama juga diharapkan akan mampu dicapai pada akhir RPJMD tahun 2017.

2) Program dan Kegiatan 2015

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY melaksanakan 5 program yang terdistribusi menjadi 29 kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp6.094.923.850,00. Pemanfaatan anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp5.680.626.671,00 atau 93,2% dan kinerja fisik terealisasi 100%.

3) Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Dinamisnya perkembangan kondisi terkait kesejahteraan rakyat menjadikan rumusan bahan kebijakan yang disusun seringkali menjadi kurang aktual dan relevan
- Agenda penyelenggaraan festival keagamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama seringkali tidak sesuai dengan jadwal

B) Solusi

- Identifikasi kondisi dan kesenjangan pelaksanaan kebijakan terkait bidang kesejahteraan rakyat
- Optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota

F. Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1) Kondisi Umum

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah, keuangan daerah, kerjasama, penanaman modal, pertanian, ketahanan pangan, penyuluhan, perijinan, kehutanan, perkebunan, serta kelautan dan perikanan. Dalam hal ini Biro

Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan urusan wajib bidang Pemerintahan Umum.

Tabel 4.41 Target dan Realisasi Kinerja Fasilitasi Perekonomian & Sumberdaya Alam Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	%	104,91	36,45	36,45	100	51,17	71,23

Sumber: Biro Perekonomian Setda DIY, 2016

Target kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY pada tahun 2015 adalah 36,45%, dengan realisasi 36,45% dari total kajian yang menjadi kebijakan, yang berarti 100% tercapai target untuk tahun 2015. Berdasarkan kegiatan pada tahun 2015, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY menghasilkan 5 (lima) kebijakan dari total 3 (tiga) bahan rumusan kebijakan.

2) Program dan Kegiatan Tahun 2015

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan 28 kegiatan dalam 5 program. Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp3.507.951.250,00 dengan capaian keuangan Rp3.197.298.680,00 atau 91,14% dan capaian fisik sebesar 100%. Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2015 antara lain, masih terkendalanya koordinasi dengan mitra kerja, baik di tingkat SKPD maupun kelompok-kelompok masyarakat di lapangan. Selain itu, penyusunan kajian yang melibatkan tenaga ahli sering terkendala dalam menyesuaikan waktu dan jadwal koordinasi mengingat kesibukan tenaga ahli. Sedangkan dalam pencapaian target kinerja untuk pencapaian target dalam RPJMD 2012-2017 tidak ada kendala.

3) Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

Sebagai institusi yang mempunyai tugas sebagai perumus bahan kebijakan, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam masih mempunyai kendala dalam mewujudkan bahan rumusan kebijakan tersebut untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

B) Solusi

Menjalin komunikasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan *stakeholders* dengan baik demi mewujudkan target utama Pemerintah Daerah DIY seperti yang tertuang dalam RPJMD 2012-2017.

G. Fasilitas Administrasi Pembangunan

1) Kondisi Umum

Merujuk pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Satuan Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah DIY bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perhubungan, pekerjaan umum, energi dan sumberdaya mineral (ESDM), kebudayaan dan pariwisata, dekonsentrasi serta fasilitasi penelitian dan pengembangan.

Jika dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2013-2017, Biro Administrasi Pembangunan berkontribusi terhadap Misi III yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Kontribusi tersebut lebih spesifik ada pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan program yang diampu antara lain program analisis kebijakan pembangunan; program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; program

peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah; dan program peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Pada tahun 2015 Biro Administrasi Pembangunan telah menghasilkan 5 rumusan kebijakan yaitu:

a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi
b. Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang *Roadmap* Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2020
c. Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah DIY (Tahap I Tahun 2012-2014)
d. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 541/8474 tentang Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas Pertambangan dan Perkebunan
e. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 557/11102 tentang Pengoptimalan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Tabel 4.42 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum pada Biro Administrasi Pembangunan tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan	%	25%	36,45	36,45	100	47,78	76,28
2	Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	%	85,14%	100%	98%	98%	100%	98%

Sumber: Biro Adpem Setda DIY, 2016

Dari tabel di atas nampak bahwa persentase realisasi kinerja Biro Administrasi Pembangunan untuk indikator kinerja persentase rumusan bahan kebijakan tang menjadi kebijakan adalah 100% atau mencapai target RPJMD senilai 36,45%. Realisasi target tersebut dihitung dari target sebanyak 5 rumusan bahan kebijakan

yang ditetapkan menjadi kebijakan sebanyak 5 buah. Hasil ini jika dibandingkan dengan pencapaian target tahun sebelumnya maka ada peningkatan secara signifikan sebesar 75% karena pada tahun 2014 dari 4 target kebijakan yang ditetapkan hanya dapat tercapai 1 saja sehingga capaiannya hanya 25%.

Sedangkan berkaitan dengan capaian sasaran indikator yang kedua yakni persentase pengadaan barang dan jasa, dapat disampaikan bahwa ada peningkatan sebesar 12,86% yaitu dari capaian sebesar 85,14% pada tahun 2014 meningkat menjadi 98% pada tahun 2015. Peningkatan ini terlihat dari jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang masuk ke Unit Layanan Pengadaan Biro Administrasi Pengadaan Setda DIY sebanyak 659 paket, berhasil dilaksanakan lelang sebanyak 646 paket.

Sedangkan paket pengadaan barang/ jasa tidak terlaksana sebanyak 13 (tiga belas) paket dikarenakan beberapa faktor penyebab yaitu pengadaan dilakukan sendiri oleh SKPD melalui e-katalog, paket yang akan dilelangkan berupa hibah bansos, ada proses sanggah sehingga tidak cukup waktu untuk dilakukan lelang ulang, tidak ada penawar yang masuk sehingga proses lelang tidak bisa dilakukan, serta belum adanya kepastian tempat pelaksanaan konstruksi sehingga berpotensi menimbulkan problem hukum jika dilakukan lelang.

2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Tahun anggaran 2015 Biro Administrasi Pembangunan mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp7.817.897.450,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk melaksanakan 8 program dengan 34 kegiatan. Realisasi fisik Biro Administrasi Pembangunan DIY mencapai 100% sedangkan realisasi anggarannya sebesar 75,15%. Realisasi anggaran 75,15% dikarenakan realisasi anggaran kegiatan penguatan lembaga pengadaan barang dan jasa hanya sebesar 58,86%. Penyerapan anggaran yang tidak sesuai target tersebut dikarenakan adanya pengurangan jumlah paket yang diadakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga terjadi efisiensi anggaran untuk Kelompok Kerja (Pokja). Sedangkan pengurangan paket tersebut dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang atau Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang menyebabkan proses pengadaan dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan SKPD terkait.

3) Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat menyebabkan kesulitan dalam memilih dan menentukan isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dengan kajian untuk menyiapkan rumusan bahan kebijakan;
- Penentuan tindak lanjut rumusan bahan kebijakan untuk ditetapkan menjadi suatu kebijakan merupakan wewenang *decision maker*/ *policy maker*, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mendorong terwujudnya suatu kebijakan;
- Penyusunan KAK dan spesifikasi teknis untuk paket pengadaan barang/ jasa belum detil;
- Pengajuan paket pengadaan barang/ jasa dari SKPD ke ULP terlambat sehingga waktu untuk proses lelang sangat terbatas.

B) Solusi

- Pemilihan dan penentuan isu strategis dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait agar sesuai dengan upaya penyelesaian permasalahan strategis yang dihadapi pemerintah daerah.
- Untuk memastikan agar suatu rumusan bahan kebijakan dapat ditindaklanjuti oleh menjadi suatu kebijakan perlu dilakukan peningkatan kualitas rumusan bahan kebijakan dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten sehingga dapat menyusun *policy brief* atau rekomendasi yang meyakinkan.
- Melakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi secara lebih efektif dengan SKPD-SKPD untuk mempercepat proses pemasukan paket lelang ke ULP.
- Dilakukan pencermatan secara lebih seksama berkaitan dengan KAK, spesifikasi teknis dan persyaratan penyedia barang/ jasa agar tidak terjadi gagal lelang.

H. Fasilitas Umum Humas dan Protokol

Gambar 4.14 Kegiatan Jumpa Pers Tim TPID DIY dengan wartawan berkaitan dengan Pantauan Harga Pangan yang difasilitasi oleh Bagian Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY di *Press Room* Humas Pemda DIY

1) Kondisi Umum

Keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memajukan daerahnya sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia, pusat pendidikan yang berbudaya, kota perjuangan dan prestasi-prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan reformasi birokrasi menjadikan daya tarik bagi masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri serta pemeritah daerah lainnya baik kab/kota maupun provinsi untuk melakukan kunjungan ke DIY. Kunjungan tersebut selain dimaksudkan untuk berwisata, banyak pula yang studi banding untuk belajar atas keberhasilan atau prestasi yang berhasil diraih oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam pengelolaan surat maupun naskah-naskah dinas, agenda pimpinan, manajemen metting room dan sistem informasi pemerintah daerah Pemda DIY saat ini sudah menggunakan sistem online *e–office* (Sisminkada) yang dilakukan dengan komputerisasi yang terhubung dengan server online jaringan kearsipan sehingga diharapkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat menjadi meningkat.

Dalam rangka mendukung penetapan Yogyakarta *world heritage* serta pemanfaatan dan penataan ruang kompleks Kepatihan yang lebih baik maka diperlukan penataan Kawasan Kompleks Kepatihan secara komprehensif. Demi terciptanya kondisi yang lebih baik dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat maka dibutuhkan pemanfaatan dan penataan ruang kompleks Kepatihan yang salah satunya membuka akses dari

selatan dengan memfungsikan kembali keberadaan dua pintu gerbang yang berada disisi selatan kompleks Kepatihan. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan aset tanah dan bangunan di sepanjang Jl. Suryatmajan.

Untuk mewujudkan adanya pelayanan yang baik terhadap tamu-tamu yang berkunjung ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu didukung dengan pelayanan penerimaan tamu yang prima sehingga diperlukan pelayanan keprotokolan yang profesional yang didukung oleh SDM yang handal sehingga kunjungan tamu-tamu tersebut dapat berjalan dengan lancar, nyaman, aman serta meninggalkan kesan yang baik.

Keberhasilan program-program pembangunan tidak dapat dilepaskan dari peran media dalam penyebarluasan informasi berupa publikasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama Tahun 2014 dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

Tabel 4.43 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase SKPD terlayani tata kearsipan berbasis TI	%	100%	100%	100%	100	100%	100%
2	Kualitas pelayanan yang tanggap, cepat dan tepat	%	98,39%	95%	161,93%	170,45	100%	100%
3	Penataan Kawasan Kompleks Kepatihan	%	8,5%	80%	80%	100	100%	80%
4	Kelancaran Pelayanan keprotokolan	%	96,43%	95%	99,96%	105,22	100%	96,43%
5	Aktivitas Pemda dalam media massa dan jejaring dengan pemangku kepentingan	%	165%	80%	165%	220	100%	100%

Sumber: Biro UHP Setda DIY, 2016

Target yang ingin dicapai Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY pada tahun 2015 adalah sudah diterapkannya sistem administrasi naskah dinas terpadu dan tata kearsipan berbasis TI (e-Office Sisminkada) pada seluruh SKPD beserta UPTD se Pemda DIY yaitu sekitar 34 SKPD dan 46 UPTD. Pada tahun 2015 ini target yang ingin dicapai dapat terpenuhi yaitu sebanyak 100%

Adapun untuk indikator kinerja Kualitas pelayanan yang tanggap, cepat dan tepat mentargetkan tamu yang dilayani sebesar 95% atau sebanyak 25.215 orang dari perkiraan kunjungan tamu pada tahun tersebut sejumlah 26.542 orang. Realisasi capaian pada tahun 2015 tercapai 161,93% atau terdapat 42.980 orang tamu yang terlayani sehingga target pada tahun 2015 dapat terpenuhi bahkan terlampaui.

Dibandingkan dengan capain realisasi di tahun 2014 sebesar 98,39% atau sebanyak 26.550 maka capaian di tahun 2015 terdapat peningkatan kunjungan tamu yang cukup signifikan yaitu 42.980 tamu atau 161,93%.

Untuk indikator Penataan Kawasan Kompleks Kepatihan pada sasaran kedua yaitu Pelayanan kerumahtanggaan dan kendaraan yang tanggap, cepat dan tepat pada capaian tahun 2014 sebesar 8,5%. Pada indikator kinerja ini yang menjadi ukurannya adalah proses penataan kawasan kompleks Kepatihan berdasarkan pembobotan dari masing-masing proses. Formulasi perhitungan yang digunakan adalah proses penataan kawasan yang sudah dilaksanakan dibanding seluruh proses pelaksanaan penataan kawasan Kompleks Kepatihan kali 100% dengan tipe perhitungan kumulatif. Indikator ini didukung oleh kegiatan Penataan Kawasan Kompleks Kepatihan.

Pada awalnya pengadaan tanah untuk penataan Kompleks Kepatihan dilaksanakan dengan melalui tahapan diubah menjadi secara langsung dan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 121 Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015. Dengan berubahnya proses pengadaan tersebut mengakibatkan target di tahun 2015 sebesar 80% dapat tercapai. Dalam perkembangannya pengadaan tanah di Jl. Suryatmajan pada tahun 2015 dengan menggunakan proses pengadaan langsung terdapat perkembangan yang positif yaitu dari target 25 pemilik tanah, 24 orang pemilik tanah menyatakan setuju untuk diberikan ganti

rugi dan mendukung pengadaan tanah untuk Penataan Kompleks Kepatihan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penilaian tanah dan bangunan oleh jasa penilai publik pertanahan. Kesepakatan antara warga terdampak dengan Pemda DIY dituangkan dalam Nota kesepakatan. Analisis tingkat capaian indikator kinerja Penataan Kawasan Kompleks terhadap target akhir RPJMD tahun 2017 diprediksikan dapat tercapai 100%.

Indikator kinerja pelayanan keprotokolan diukur dari jumlah kedatangan tamu yang dilayani protokol dengan formulasi penghitungan jumlah tamu yang datang dibagi jumlah target tamu yang datang dikalikan 100%. Tahun 2015, ditargetkan jumlah kunjungan tamu yang dilayani sebesar 95% atau sebanyak 2.327 orang dari jumlah tamu yang diharapkan sebanyak 2.450 orang tamu.

Kelancaran dalam memberikan pelayanan protokoler kepada tamu-tamu yang berkunjung ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, tamu luar negeri Tahun Anggaran 2015. Dari target yang ditetapkan sebesar sebesar 95% dapat terealisasi sebesar 99,96% dengan jumlah kunjungan tamu sebanyak 2.449 orang tamu sehingga tingkat capaian tahun 2015 sebesar 105,22%.

Pada indikator kinerja Aktivitas Pemda dalam media massa dan jejaring dengan pemangku kepentingan, yang menjadi ukurannya adalah jumlah buletin siaran pemerintah daerah (Jogjawara) yang dicetak dalam satu tahun oleh bagian Humas. Formulasi perhitungan yang digunakan jumlah buletin tercetak dalam satu tahun dibanding jumlah target buletin dalam satu tahun kali 100% dengan tipe perhitungan non kumulatif. Pada tahun 2015 target yang ingin dicapai indikator kinerja aktivitas Pemda dalam media massa dan jejaring dengan pemangku kepentingan sebesar 80% atau sebesar 9325 buletin dari target indikator yang ingin dicapai pada akhir RPJMD tahun 2017 sebesar 90% atau sebanyak 10.491 buletin. Dari target cetak buletin yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80% ternyata tingkat capaiannya sebesar 129,63% atau sebanyak 13.600 buletin. Kenaikan jumlah buletin yang signifikan tersebut dikarenakan pada saat pembahasan anggaran terdapat masukan-masukan dari masyarakat maupun DPRD DIY agar distribusi buletin Jogjawara bisa sampai ke tingkat desa dibanding tahun 2013 yang hanya sampai kabupaten kota.

2) Program dan Kegiatan Tahun 2015

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2015 Biro Umum. Humas dan Protokol Setda DIY melaksanakan 9 program dan 40 kegiatan. Untuk belanja tidak langsung sebesar Rp8.522.764.822,00 dan terealisasi sebesar Rp8.501.987.138,00 (99,76%). Anggaran tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan gaji PNS Biro Umum, Humas dan Protokol yang berjumlah sekitar 151 orang. Untuk belanja langsung terbagi dalam 9 program dan 40 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp22.431.439.926,22,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp20.302.418.507,29,- atau 90,51% dan realisasi fisik sebesar 100%. Secara realisasi keuangan, anggaran belanja langsung Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY masih tersisa sekitar 9,49% hal itu bukan disebabkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana akan tetapi karena adanya sisa negosiasi harga, sisa lelang dan efisiensi. Sedangkan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY yang terbagi dalam urusan Pelayanan, Kehumasan, Keprotokolan dan Administrasi sudah berjalan dengan baik dengan tingkat capaian sebesar 99,81%.

3) Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Masih adanya warga yang belum menyepakati nilai appraisal tanah dan bangunan yang akan dipergunakan untuk penataan kawasan kompleks Kepatihan.
- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang berkompeten di bidang Keprotokolan, Kehumasan dan Persandian.

B) Solusi

- Perlu melakukan pendekatan formal dan informal kepada warga terdampak.
- Perlu penambahan personil serta peningkatan kualitas SDM melalui Diklat, Bimtek, dll.

I. Fasilitas Pengawasan

1) Kondisi Umum

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas sangat strategis. Inspektorat menjadi Aparat Pengawas Intern Pemerintah DIY yang secara langsung memberikan kontribusi dan pengaruh dalam proses bisnis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Inspektorat melalui APIP harus terus melakukan perubahan dan memberi nilai tambah bagi Pemerintah DIY. Peran "pengawasan intern" untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi tidak akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktek-praktek KKN. Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Keberhasilan pelaksanaan pengendalian menjadi salah satu faktor utama yang dapat menunjang efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, pengawasan diarahkan sepenuhnya dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, sampai dengan 31 Desember 2015 telah dilakukan pemeriksaan reguler sebanyak 194 obyek pemeriksaan dan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 terhadap 34 SKPD di lingkungan Pemerintah DIY dan pemeriksaan reguler terhadap pemerintah kabupaten/ kota se DIY sejumlah 40 SKPD. Hasil pemeriksaan sampai dengan bulan Nopember tahun 2015 terdapat 362 temuan dengan 749 rekomendasi dan telah

ditindak lanjuti sejumlah 580 rekomendasi (77,44%). Adapun 169 rekomendasi (22,56%) baru dalam proses tindak lanjut.

Pemeriksaan BPK RI tahun 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah DIY tahun 2014 dengan temuan 10 temuan 15 rekomendasi, telah ditindak lanjuti 15 tindak lanjut (100%). Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 dengan 14 temuan 18 rekomendasi, telah ditindak lanjuti 18 (100%). Sehingga secara keseluruhan pemeriksaan APIP dan BPK telah ditindaklanjuti 92,48%.

Tabel 4.44 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Inspektorat Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan	%	2%	5	2,12	235,85	5	42,4

Sumber: Inspektorat, 2016

Penetapan Target 5% atas indikator kinerja Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan mendasarkan pada angka materialitas yang digunakan oleh BPK ketika melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan menjadi dasar bagi pemberian opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan. Target tersebut merupakan angka toleransi tertinggi bagi kondisi di OPD yang akan memberikan dorongan motivasi kepada Inspektorat dalam melakukan serangkain proses pengawasan, pengawalan dan pengendalian atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada kinerja Inspektorat DIY Tahun 2015, keseluruhan program dan kegiatan pengawasan yang telah tertuang melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015, telah mampu memberikan pencapaian realisasi atas target dengan sangat baik. Inspektorat berperan melalui beberapa bentuk aktivitas pengawasan dan pengendalian. Pengawasan memiliki tujuan untuk koreksi dan perbaikan atas pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh OPD melalui prosedur audit dengan output kinerja rekomendasi temuan hasil pemeriksaan. Sedangkan pengendalian memiliki tujuan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Atas dasar kinerja yang telah dilakukan Inspektorat tersebut, maka secara umum realisasi atas target yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh Inspektorat dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari para meter Opini BPK RI, Nilai Sakip Pemda DIY serta Percpatan Tindak Lanjut dari setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal.

2) Program dan Kegiatan Tahun 2015

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2015 mengelola dana APBD sejumlah Rp10.385.340.907,00 didukung 7 (tujuh) program yang diimplementasikan menjadi 35 kegiatan. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp5.708.793.150,00 dan realisasi sebesar Rp5.549.050.370,00 atau dengan tingkat capaian keuangan sebesar 97,20% dan capaian fisik sebesar 99,97%. Sedangkan alokasi Belanja Tidak langsung sebesar Rp5.032.647.723,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.980.185.362,00 (98,96%).

3) Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

Kualitas Sistem Pengendalian Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih lemah. SKPD masih berorientasi kepada *output* sehiingga belum mengedepankan adanya resiko terhadap program dan kegiatan yang dikelolanya. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan belum dipedomani secara penuh.

B) Solusi

Inspektorat akan lebih intensif untuk melakukan proses pengawalan, mendorong dan membina SKPD dalam membangun pengendalian internal yang lebih baik dengan mengedepankan analisis terhadap resiko yang ada SKPD sehingga dapat diciptakan *Early Warning System* dan sekaligus *Quality Assurance* terhadap pelakssanaan program dan kegiatan SKPD dalam memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah daerah.

J. Penanggulangan Bencana

1) Kondisi Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang secara geografis terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman dan memiliki potensi bencana yang tinggi. Kondisi alam ini menyebabkan timbulnya potensi bencana alam terutama yang terkait dengan kegiatan manusia dan kedaruratan kompleks. Risiko menghadapi bencana alam dan kerentanan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa rencana penanggulangan bencana adalah bidang yang wajib dimasukkan dalam agenda rencana pembangunan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. SKPD ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Tabel 4.45 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada BPBD DIY Tahun 2015

Tujuan/ Indikator Tujuan/ Sasaran/ Indikator Sasaran	Capaian/ Kondisi 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap 2017 (Akhir RPJMD) (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Ketahanan Daerah	0	50	53,4	106,72	60	88,3

Sumber: BPBD DIY, 2016

Indikator sasaran BPBD DIY adalah Indek Ketahanan Daerah dengan taget pada tahun 2015 adalah 50, tahun 2016 = 55 dan tahun 2017 = 60. dan Indek Ketahanan Daerah pada tahun 2015 telah tercapai 53,4 atau 107% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tahun 2015 ini kalau kita dengan target tahun 2017 (akhir RPJMD) adalah 88,3% Penilaian Indek ketahanan daerah sudah tercapai karena

Adanya peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana, namun masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

2) Program Kegiatan Tahun 2015

Pada tahun 2015, alokasi anggaran yang dikelola dalam penyelenggaraan Sub Urusan Penanggulangan Bencana sebesar Rp16.221.166.833,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.661.546.913,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp13.559.619.920,00. Sedangkan jumlah program dan kegiatan sebanyak 6 program dan 43 kegiatan. Capaian kinerja anggaran 94,26% dan capaian kinerja fisik 100%.

3) Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Koordinasi antar wilayah, yurisdiksi dan komunikasi antar lembaga yang merespon bencana belum terpadu;
- Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana kurang memahami upaya penanggulangan bencana;
- Pengelolaan data dan informasi bencana belum optimal.

B) Solusi

- Revitalisasi peran BPBD dalam koordinasi, monitoring, dan evaluasi para-pihak *stakeholders* Penanggulangan Bencana ;
- Meningkatkan PRB-BK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) melalui pembentukan dan pengembangan desa/ kelurahan tangguh bencana;
- Revitalisasi sistem informasi pengelolaan data dan informasi bencana, diantaranya dengan Integrasi EWS (*early warning system*) dalam Sistem Informasi-Penangulangan Bencana, optimalisasi utilisasi Pusdalops-PB BPBD dan kerjasama berbagi informasi dengan lembaga lain yang mengelola data/ info terkait Penangulangan Bencana.

4.2.20.3 Fasilitas Administrasi Keuangan Daerah

A. Kondisi Umum

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang Sasarannya meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan dengan strategi:

1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah
2) Menggali potensi pendapatan yang sudah ada dengan:
   a) Melaksanakan kajian potensi obyek pendapatan terhadap SKPD berpendapatan.
   b) Pemetaan dan pengkajian obyek pendapatan Asli Daerah.
3) Perbaikan sarana dan prasarana penunjang peningkatan pendapatan dengan:
   a) Pembangunan Gedung Samsat baru untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.
   b) Pengadaan alat cetak TNKB untuk mempercepat pelayanan Wajib Pajak.
   c) Penyediaan Aplikasi kesamsatan online untuk mempermudah WP melaksanakan kewajibannya.

Kebijakan yang dilaksanakan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah. Untuk mencapai tujuan optimalnya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kinerja BUMD dengan strategi: Penataan kelembagaan BUMD, Pengembangan manajemen BUMD, dan Penguatan Modal dan Pengembangan Usaha

Untuk tercapainya tujuan meningkatnya konstribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Pemda dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kualitas pengelolaan aset (tanah, bangunan, kendaraan) dengan strategi: melakukan Verifikasi, Klasifikasi dan penilaian, monitoring dan investigasi aset daerah

Untuk memudahkan pencataan serta pelaporan Barang Milik Daerah secara akurat dan cepat menggunakan aplikasi system informasi manajemen barang milik

daeraH dengan SIPKD Modul Aset. Melakukan pendampingan kepada pengurus barang dan petugas akuntansi SKPD/Unit kerja dalam menyusun inventaris Barang Milik Daerah. Dari kegiatan peningkatan status Hak Atas Tanah, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian status kepamilikan atas tanah-tanah yang dikuasai dan tercatat di daftar inventaris barang pemerintah DIY, di tahun 2015 menargetkan pensertifikatan 7 bidang tanah dan 125 warkah sertifikat tanah, bisa direalisasikan sebanyak 14 bidang tanah terdiri dari 11 bidang tanah telah selesai sertifikatnya dan 3 bidang dalam proses serta 95 warkah yang sudah direalisasikan

Kebijakan yang dilaksanakan untuk tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan pendayagunaan kekayaan daerah, dilaksanakan dengan cara: Sewa sebanyak 43 bidang, Pinjam pakai sebanyak 69 bidang tanah/ bangunan, yang tercantum dalam 37 perjanjian pinjam pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, sebanyak I bidang, dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

Untuk mencapai tujuan terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dan sasaran yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan strategi: Perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang taat pada peraturan perundang–undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab keadilan, kepatuhan dan manfaat. Dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah DPPKA DIY sudah menerapkan SAP berbasis akrual dengan melakukan langkah strategi dalam bentuk: Penyiapan regulasi, Penyiapan Sumber Daya Manusia, dan Penyesuaian Aplikasi

Dengan penerapan SAP akrual basis diharapkan menjadi motivasi meningkatnya transparansi, tatkelola, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peran akuntansi pemerintah untuk mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelengaraan pemerintahan. Perubahan dibidang akuntansi dalam penyusunan Laporan keuangan dengan menerapkan akrual basis dapat untuk: (a) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisien dan efektive pengeluaran public melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan dan (b) Meningkatkan alokasi sumberdaya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan transparansi dari keberhasilan suatu program.

Dalam pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur. Untuk tahun 2015 ditargetkan 3 (tiga) Peraturan Daerah dan 3 (tiga) Peraturan Gubernur tentang APBD dan dapat direalisasikan semua. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapinya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Instansi, sedangkan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan di tahun anggaran 2015 adalah 2 (dua) Peraturan Daerah dan 9 (sembilan) Peraturan Gubernur.

Tabel 4.46 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pengawasan, Fasilitasi Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2015)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah.	%	52,62	51,31	53,11	103,50	46,25	114,83
2.	Persentase pendapatan BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD	%	20,01	18,34	18,12	98,80	19,36	93,59
3.	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan	%	12,82	11,71	13,65	116,57	12,00	106,83
4.	Opini Pemeriksaan BPK	%	100% (WTP)	WTP	WTP	100	100	100
5.	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	%	-	100	100	100	100	100

Sumber: DPPKA DIY, 2016

Capaian Kinerja dari Indikator Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah ditahun 2015 sebesar 53,11% dari target sebesar 51,31% jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 103,50%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun 2014 sebesar 52,62% ada kenaikan sebesar 0,49% hal itu disebabkan karena adanya kenaikan realisasi pendapatan daerah dari PAD yaitu dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah. Realisasi tahun 2015 sebesar 53,51% terhadap target kinerja RPJMD tahun 2017 sebesar 46,25% jadi capaian kinerjanya sebesar 114,83%.

Capaian Kinerja dari indikator Persentase pendapatan BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD di tahun 2015 sebesar 18,12% dari target sebesar 18,34% jadi realisasi capaian kinerja nya sebesar 98,80%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun 2014 sebesar 20,01% ada penurunan sebesar 1,89% hal itu disebabkan karena: belum tercapainya realisasi pendapatan BUKP dari target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja dari indikator Persentase Aset daerah yang dapat dimanfaatkan di tahun 2015 sebesar 13,65% dari target sebesar 11,71% jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 116.57%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun 2014 sebesar 12.82% ada kenaikan sebesar 0,83% hal itu disebabkan karena: adanya obyek baru yang dioptimalkan (disewakan) sebanyak 8 bidang dan dipinjam pakai sebanyak 8 bidang.

Apabila realiasasi tahun 2015 sebesar 13,65% terhadap target kinerja RPJMD tahun 2017 sebesar 12,00%, maka target 2017 sudah tercapai karena penentuan target 2017 dihitung menggunakan prediksi jumlah sewa (37 bidang) jumlah pinjam pakai 64 (enam puluh empat) bidang, jumlah BGS 1 (satu) bidang serta jumlah bidang tanah 850.

Capaian Kinerja dari indikator Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah di tahun 2015 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 100,00% adalah dari Persentase rata –rata nilai ketepatan dan nilai bobot keakuratan Laporan Keuangan daerah: (a) Capaian 50% berasal dari Indikator ketepatan adalah ketepatan APBD tahun 2015 dan ketepatan SKPD selesai dalam menyusun Laporan keuangan, yaitu

tanggal 28 Pebruari 2015 dan (b) capaian 50% berasal dari keakuratan: rata –rata nilai bobot SPI (40%) ditambah nilai bobot kepatuhan (60%) dari LHP BPK.

B. Program dan Kegiatan Tahun 2015

Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2015, DPPKA DIY melaksanakan 13 (tiga belas) Program dan terbagi dalam 67 (enampuluh tujuh) kegiatan yang tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di 5 (lima) KPPD Kota/Kabupaten. Adapun total anggaran sebesar Rp142.414.745.426,00 dan realisasinya sebesar Rp111.976.889.721,00 atau 78,63% dan realisasi fisiknya 99,85%, untuk Belanja Tidak Langsung anggarannya sebesar Rp. 71.209.252.536,00 dan realisasinya sebesar Rp63.542.197.602,00 atau 89,23% dan realisasi fisiknya sebesar 100% untuk Belanja Langsung anggarannya sebesar Rp71.205.492.890,00, realisasinya sebesar Rp48.434.692.119,00 atau 68,02% dan realisasi fisiknya 99,70%.

Pembangunan sub urusan administrasi keuangan Tahun 2015 didukung oleh 13 program dan 67 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp71.205.492.890,00 dengan capaian keuangan Rp48.434.692.119,00 dengan tingkat realisasi 68,02% dan capaian fisik sebesar 99,70%. Capaian keuangan sebesar 68,02% ini disebabkan antara lain karena lelang pengadaan pembangunan gedung kantor KPPD (Samsat) Bantul belum berhasil dan dari sisa hasil lelang pengadaan barang dan sisa dari hasil negosiasi harga serta efisiensi dari belanja. Capaian Fisik sebesar 99,70% dikarenakan ada 1 kegiatan yang secara fisik belum selesai 100% yang disebabkan oleh kendala faktor eksternal.

C. Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

Belum tercapainya realisasi capaian kinerja indikator persentase pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal BUMD disebabkan karena belum tercapainya realisasi hasil pendapatan BUKP.

Hal ini menyebabkan Capaian Kinerja Indikator Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal belum dapat mencapai target. Dari target sebesar 18,34% dapat direalisasikan sebesar 18,12% atau 98,80%.

B) Solusi

Penguatan modal dan pengembangan usaha melalui Perubahan Perda No. 5 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal BUMD yaitu Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2016, sehingga dapat meningkatkan kinerja BUMD disertai dengan Penataan Kelembagaan BUMD dan Pengembangan Manajemen BUMD.

4.2.20.4 Pendidikan dan Pelatihan

LKPP

Sertifikat

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A

dalam menyelenggarakan
Program Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sertifikat ini berlaku sejak tanggal
16 Desember 2014 sampai dengan 15 Desember 2018

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

DR. AGUS PRABOWO

Gambar 4.15 Sertifikat Akreditasi Penyelenggaraan Program Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

A. Kondisi Umum

Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY melaksanakan kegiatan pokok penyelenggaraan kediklatan (pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi) bagi aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dan pemberian fasilitasi bagi aparatur di luar Pemda DIY. Penyelenggaraan diklat ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap aparatur Pemda agar dapat melaksanakan tugas secara profesional yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman kepada masyarakat dan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Pendidikan dan Pelatihan yang telah diselenggarakan pada tahun 2015 antara lain Diklat Teknis dan Fungsional sebanyak 13 jenis, Workshop Pengembangan Kreativitas Berbasis Seni 1 angkatan, Workshop *Entrepreneur Spirit* sebanyak 1 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 8 angkatan, Diklat

Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 5 angkatan, dan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III sebanyak 18 angkatan. Pada tahun 2015, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008. Kemudian mendapatkan Sertifikat Akreditasi Perpustakaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kategori B, serta mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penyelenggaraan Program Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan kategori A.

Tabel 4.47 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2014-2015 serta Capaian 2015 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Akreditasi Badan Diklat (1=A, 2=B, 3=C)	Klasifikasi	2	2	2	100,00	1	50

Sumber: Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, 2016

Akreditasi merupakan persyaratan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai pembina lembaga diklat agar suatu lembaga diklat bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Lembaga diklat yang telah terakreditasi dapat menyelenggarakan program diklat tertentu sebagaimana ditetapkan dalam SK dan Sertifikat Akreditasi. Akreditasi lembaga Diklat pemerintah dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Manajemen Lembaga Diklat. Pada tahun 2015 ini, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY telah melaksanakan proses reakreditasi untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, dan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2015 dapat mempertahankan nilai akreditasi sama dengan sebelumnya, yaitu dengan kategori B untuk penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, dan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III.

Agar dapat mencapai akreditasi A pada tahun 2017 sesuai dengan yang ditargetkan didalam RPJMD DIY Periode 2013-2017, ada beberapa hal yang menjadi menjadi evaluasi dan perbaikan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY ke depan, yaitu aspek pengembangan bahan ajar yang masih kurang, sementara dari sisi sumber daya

manusia adalah kurangnya tenaga pengajar/Widyaiswara secara kuantitas serta pemenuhan syarat kompetensi penyelenggara, pengajar dan pengelola diklat yang telah memiliki sertifikat *Management of Training* (MoT), *Training Officer Course* (ToC), *Training of Facilitator* (ToF) dan *Training of Trainers* (ToT), dan juga kualitas dan kuantitas sarana diklat yang masih terbatas.

Dari target akreditasi B pada tahun 2015 ini dapat tercapai 100%. Perbandingan antara capaian nilai akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY antara tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sama. Sedangkan persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 50% dari target akreditasi A pada tahun 2017.

B. Program dan Kegiatan Tahun 2015

Jumlah anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan melalui dana APBD tahun 2015 berjumlah Rp22.648.568.645,00 yang terdiri dari belanja langsung sejumlah Rp17.923.957.450,00 dan belanja tidak langsung sejumlah Rp4.724.611.195,00. Jumlah program yang dilaksanakan meliputi 8 program dan 47 kegiatan.

Capaian kinerja anggaran belanja langsung untuk tahun 2015 sejumlah 88,06%. Dari total anggaran sejumlah Rp17.923.957.450,- terserap Rp15.784.205.297,00. Sedangkan realisasi kinerja fisik kegiatan untuk tahun 2015 sebesar 99,90%.

Pembangunan sub urusan kepegawaian Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015 melaksanakan 8 program yang diimplementasikan menjadi 47 kegiatan, dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp17.923.957.450,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp15.784.205.297,00 atau dengan tingkat capaian sebesar 88,06% dengan capaian fisik sebesar 99,90%.

C. Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholder* kediklatan di Pemda DIY.
- Masih kurangnya tenaga pengajar / Widyaiswara secara kuantitas.
- Belum terpenuhinya syarat kompetensi penyelenggara, pengajar dan pengelola diklat (MoT, ToC, ToF dan ToT).
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana penunjang diklat.

B) Solusi

- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait.
- Mengusulkan tambahan Widyaiswara kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah DIY supaya jumlah SDM Widyaiswara memenuhi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerangkan bahwa jumlah dan kebutuhan widyaiswara di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY adalah sebanyak 13 orang.
- Menyelenggarakan diklat atau melakukan pengiriman diklat dalam rangka pemenuhan syarat kompetensi penyelenggara diklat.
- Secara bertahap meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana penunjang diklat seperti auditorium, asrama, kelas, fasilitas olahraga dan rekreasi, maupun fasilitas penunjang diklat lainnya agar memenuhi persyaratan mencapai akreditasi A pada tahun 2017.

4.2.20.5 Kepegawaian Daerah

A. Kondisi Umum

Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi dan memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak perekrutan pegawai, pengembangan hingga tataran penempatan dalam jenjang karir. Dalam rangka perencanaan kebutuhan pegawai, selama tahun 2015 Pemda DIY telah melakukan penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2015-2019, penyusunan formasi pegawai tahun 2015 serta input data analisis jabatan. Tahapan selanjutnya adalah melaksanakan seleksi sesuai dengan formasi pegawai yang disetujui. Penyelenggaraan penerimaan pegawai mengacu pada pedoman pengadaan pegawai yang menganut prinsip-prinsip transparan, obyektif, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif serta tidak dipungut biaya.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur diupayakan dengan mengirim PNS dalam tugas belajar, pendidikan formal secara mandiri dengan pemberian ijin belajar serta pengikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional

maupun kepemimpinan. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai serta menumbuhkan daya saing dalam menciptakan inovasi dan kreasi.

Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta seiring dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Keistimewaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilaksanakan pengisian dan penataan personel pada 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Aparatur Sipil Negara melalui mekanisme Panitia Seleksi (PANSEL) dan dikonsultasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

Penempatan dan penataan pejabat memperhatikan kinerja dan hasil uji kompetensi/pemeriksaan psikologi bekerjasama dengan lembaga yang kompeten dalam pengukuran kompetensi sumber daya aparatur. Selama kurun waktu tahun 2015 telah dilakukan penataan Jabatan Pelaksana (staf) sebanyak 4.238 orang, Jabatan Pengawas (Eselon IV dan V) sebanyak 601 pejabat, Jabatan Administrator (Eselon III) sebanyak 223 pejabat serta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebanyak 34 pejabat. Sedangkan pengisian 7 Jabatan Pimpinan Tinggi yang masih kosong akan dilakukan pengisiannya melalui mekanisme seleksi terbuka pada tahun yang akan datang. Adapun mekanisme mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka.

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem *reward and punishment*. Reward diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi. Penilaian kinerja mempertimbangkan kinerja instansi dan kinerja individu. Formulasi penilaian kinerja PNS dikembangkan secara proporsional dari tahun ke tahun. *Punishment* diterapkan kepada PNS berupa penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan yang berlaku.

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011, penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan dengan menyusun perjanjian kerja sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Sasaran Kerja Pegawai disusun pada awal tahun atau awal seseorang memegang jabatan dan akan dilalukan penilaian pada akhir tahun oleh Atasan Langsungnya. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai dengan penilaian perilaku kerja. Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hasil rekomendasi penilaian prestasi kerja digunakan untuk peningkatan kinerja organisasi melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi dan karier PNS yang bersangkutan serta pengembangan manajemen, organisasi dan lingkungan kerja.

Tabel 4.48 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2014-2015 serta Capaian 2015 Terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Presentase kualitas manajemen sumber daya aparatur	%	69,87	79,03	65,74	83,18	78,96	83,26

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2016

Indikator kualitas manajemen sumber daya aparatur didukung oleh 2 indikator program yaitu pemenuhan kompetensi pegawai dan pemenuhan kebutuhan pegawai. Pemenuhan kompetensi pegawai diformulasikan sebagai jumlah pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan oleh kompetensi individu dibandingkan dengan jumlah formasi yang terisi. Tingkat capaian tahun 2015 sebesar 65,74%. Kesesuaian dinilai dari aspek pemenuhan persyaratan kompetensi dari sisi pendidikan, pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan serta kesesuaian dengan formasi jabatan. Tingkat kesesuaian dalam penempatan pegawai sesuai dengan formasi jabatan masih perlu ditingkatkan lagi. Sedangkan pemenuhan kebutuhan pegawai dipengaruhi oleh pegawai yang keluar/ masuk dari/ ke Pemda DIY, pegawai pensiun serta penerimaan calon pegawai.

Selama tahun 2015 telah diterbitkan keputusan pengiriman pegawai dalam tugas belajar sebanyak 38 orang sehingga keseluruhan berjumlah 77 orang, perpanjangan studi mahasiswa tugas belajar sebanyak 34 orang, pengaktifan kembali 43 orang, penerbitan ijin belajar dan surat keterangan belajar 78 orang, pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II sebanyak 3 orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 13 orang, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 71 orang, pendidikan pelatihan teknis fungsional di Badan Diklat DIY sebanyak 510 orang, pendidikan pelatihan teknis fungsional di luar Pemerintah Daerah DIY sebanyak 313 orang, Pelatihan Implementasi Competency Profiler sebanyak 6 orang, Pelatihan/Kursus Penyusunan Alat Feedback (*Designing 360 degree feedback tools training program*) sebanyak 3 orang, Pelatihan/Kursus Pengelolaan Talent Berbasis Kompetensi (*Competency Based Human Resource Management Program*), Pemagangan Calon Assessor sebanyak 2 orang, Bimbingan Teknis Pembentukan Karakter Bagi CPNS sebanyak 105 orang serta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan sebanyak 100 orang.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan beberapa langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai kurun waktu 2015-2019 untuk memetakan proyeksi kebutuhan pegawai ideal yang harus dipenuhi selama 5 tahun mendatang. Penyusunan formasi pegawai tahun 2015 digunakan sebagai dokumen perencanaan dalam pengadaan pegawai. Usulan formasi ini disampaikan ke kementrian untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar penyelenggaraan seleksi penerimaan calon pegawai. Seiring dengan adanya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tentang Penundaan Penambahan Pegawai Tahun 2015 maka seleksi calon pegawai di Pemda DIY tahun 2015 ditiadakan.

B. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pembangunan Urusan Kepegawaian tahun 2015 melaksanakan 5 program yang diimplementasikan dalam 41 kegiatan. Program kegiatan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp22.925.236.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp18.645.063.154,00 atau dengan tingkat kinerja keuangan sebesar 81,33% dengan capaian kinerja fisik

sebesar 96,65%. Secara umum, kegiatan di tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai rencana. Target keuangan dan kinerja fisik dapat tercapai secara maksimal.

Secara keseluruhan, tingkat capaian fisik sebesar 96,65% karena ada beberapa target tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan awal. Perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur terealisasi 75% karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menunda penambahan pegawai di tahun 2015. Sedangkan dalam Pengelolaan Jabatan terealisasi 87,5% karena pemanfaatan hasil Assessment sebelumnya dalam proses pengisian jabatan. Penempatan dan penataan pejabat memperhatikan kinerja dan hasil uji kompetensi/ pemeriksaan psikologi bekerjasama dengan lembaga yang kompeten dalam pengukuran kompetensi sumber daya aparatur. Selama kurun waktu tahun 2015 telah dilakukan penataan Jabatan Pelaksana (staf), Jabatan Pengawas (Eselon IV dan V), Jabatan Administrator (Eselon III) serta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Sedangkan pengisian 7 Jabatan Pimpinan Tinggi yang masih kosong akan dilakukan pengisiannya melalui mekanisme seleksi terbuka pada tahun yang akan datang.

C. Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Pemenuhan kebutuhan pegawai melalui seleksi penerimaan calon pegawai tidak tercapai.
- Kesesuaian kualifikasi dan kompetensi dalam penempatan sumber daya aparatur perlu ditingkatkan.

B) Solusi

- Koordinasi dengan Kementerian untuk pemenuhan formasi jabatan sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai, mengelola permohonan pindah pegawai ke Pemerintah Daerah DIY secara selektif serta memanfaatkan sumber daya lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Melakukan penataan dan redistribusi pegawai serta meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.

4.2.20.6 Persandian

A. Kondisi Umum

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat membawa ancaman terhadap berbagai infomasi yang sifatnya strategis dan rahasia. Infomasi yang rahasia yang dimiliki oleh suatu negara menjadi sasaran utama bagi pihak-pihak lawan atau yang tidak berkepentingan untuk dapat mengambil keuntungan baik dari aspek politis, sosial, ekonomis maupun yang terkait pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu persandian menjadi suatu kebutuhan oleh instansi pemerintah dengan didukung oleh peralatan teknologi yang modern serta SDM yang profesional, tekun, fokus, berdedikasi tinggi dan loyal.

Untuk mewadahi personel sandi serta untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan tugas persandian di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda) DIY dengan surat keputusan Gubernur DIY nomor 181/KEP/2013 tanggal 15 Juli 2013. Adapun anggota-anggota Forkomsanda berasal dari beberapa unsur, yaitu: Jajaran Pemerintah Daerah DIY, Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se-DIY, Jajaran TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan AAU, Jajaran POLDA DIY, dan Jajaran Kejaksaan Tinggi.

Tabel 4.49 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Persandian Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Sandiman yang memiliki kompetensi persandian profesi dari sandi negara	%	50%	60%	80	133,33	100	80

Sumber: Biro UHP Setda DIY, 2016

Yang menjadi target dari indikator ini adalah jumlah sandiman yang memiliki kompetensi sandi. Formulasi perhitungannya yaitu Jumlah orang yang mempunyai kompetensi persandian dibanding jumlah kebutuhan sandiman pada unit pengelola persandian x 100% dengan tipe perhitungan Kumulatif. Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan Peningkatan Kinerja Aparatur dengan anggaran Rp330.000.000,00 yang di dalam terdapat terdapat sub kegiatan Bimtek Persandian. Di Pemda DIY unit pengelola persandian berada di Biro umum, Humas dan Protokol Setda DIY yaitu pada Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

Pada tahun 2014 kondisi capaian sasaran Pengelolaan persandian dan telekomunikasi, yang cepat tepat, baik dan aman sebesar 50%. Pada tahun 2016 mentargetkan 60% dan terealisasi 80% sesuai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 133,33%. Sedangkan capaian sampai dengan 2015 terhadap target akhir Renstra di tahun 2017 sebesar 80%.

Target sandiman yang memiliki kompetensi persandian pada unit pengelola persandian berdasarkan analisa kebutuhan jabatan sandiman di Pemda DIY adalah 10 (sepuluh) orang, sedangkan kondisi tahun 2014 baru ada 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi sandi, 2 (dua) diantaranya sudah memiliki sertikat sandi dari Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia. Untuk meningkatkan kompetensi petugas sandi maka di tahun 2015 Biro Umum, Humas dan Protokol melaksanakan kegiatan Bimtek Persandian, serta mengirimkan 1 (orang) personel untuk mengikuti Diklat di Lembaga Sandi Negara. Pada tahun 2015, jumlah petugas yang memiliki kompetensi persandian pada unit persandian di Pemda DIY berjumlah 8 orang yang terdiri dari 3 orang yang bersertifikat dari Lemsaneg dan 5 orang belum bersertifikat dari Lemsaneg, sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pengelola Pengamanan Persandian.

Dengan bertambahnya petugas sandi yang sudah mempunyai kompetensi persandian menjadi 8 orang maka target indikator pada tahun 2015 sebesar 60% dapat tercapai bahkan terlampaui. Sedangkan kebutuhan petugas yang mempunyai kompetensi persandian sampai dengan akhir Renstra pada tahun 2017 diprediksikan bisa tercapai.

B. Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang berkompeten di bidang Keprotokolan, Kehumasan dan Persandian.

B) Solusi

- Perlu penambahan personil serta peningkatan kualitas SDM melalui Diklat, Bimtek, dll.

4.2.21 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4.2.21.1 Kondisi umum

Upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Pada tahun 2015 target Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aktif adalah sebesar 29,16 dengan tingkat capaian 40,50 atau 138,89% realisasi ini didukung oleh Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung kegiatan Desa membangun, Pengelola lembaga pemberdayaan masyarakat lebih banyak tenaga muda dan adanya dukungan dari lintas sektor.

Gambar 4.16 Pra TNI Manunggal Membanguan Desa (TMMD)

Tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat yang ada didalam kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) juga bisa digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat pembangunan keberdayaan masyarakat. Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 32,08% dengan capaian sebesar 98,33%, besarnya capaian ini karena adanya dukungan dana stimulan dari Kab/Kota untuk kegiatan gotong-royong yang nilainya bervariasi misal: Kab. Gunungkidul memberikan dana per dusun Rp10 jt, Kesadaran warga masyarakat yang semakin meningkat, rela dan peduli terhadap lingkungan, Tekad untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan antar semua sektor yang ada melalui TNI Manunggal Membangun Desa serta masih dipegang-teguhnya nilai-nilai kegotong-royongan masyarakat di DIY.

Keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan melalui inisiasi, pembinaan dan pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan Asli Desa. Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 34,43% dengan capaian sebesar 35,46% keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BAB X Badan Usaha Milik Desa Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Miliki Desa yang disebut BUM Desa, Terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurus dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Adanya Upaya dari Pemda DIY melalui BPPM DIY yang memberikan pelatihan untuk menginisiasi Pembentukan BUM Desa di 262 Desa yang belum membentuk BUM Desa dari target 5 desa realisasi 9 desa, sehingga pada tahun 2015 sudah terdapat 139 desa yang memiliki BUM Desa dan Adanya Dana Desa.

Persentase profil desa sesuai standar pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 70% dengan capaian sebesar 96,58%. Besarnya capaian ini karena adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pelatihan *entry* profil desa untuk 130 Desa/Kelurahan, Adanya Tim Pokja Profil Desa/ Kelurahan dan Profil Desa menjadi Indikator Utama dalam penilaian Lomba Desa.

Tabel 4.50 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat	%	74,27	32,08	98,33	306,51	37,00	286,76
2	Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes	%	46,53	34,43	35,46	102,99	46,94	75,54
3	Persentase Desa yang telah memiliki profil	%	36,36	70,00	96,58	137,97	100,00	96,58

Sumber: BPPM, 2016

Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat pada tahun 2015 sangat tinggi yaitu sebesar 98,33 dari target yang sudah ditetapkan sebesar 32,08%, kegiatan yang mendukung pencapaian target ini adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Teknologi Tepat Guna (TTG). Tingginya capaian ini disebabkan adanya:

1. Dukungan dana stimulan dari Kabupaten/ Kota untuk kegiatan gotong-royong yang nilainya bervariasi misal: Kabupaten Gunung Kidul memberikan dana per dusun Rp10 juta;
2. Kesadaran warga masyarakat yang semakin meningkat, rela dan peduli terhadap lingkungan, dan masih dipegang-teguhnya nilai-nilai kegotong-royongan di masyarakat;
3. Tekad untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan antar semua sektor yang ada melalui TNI Manunggal Membangun Desa serta.

Berdasarkan capaian tersebut maka target akhir RPJMD sebesar 34,29% telah terlampaui. Pada tahun 2015 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan penghargaan “Upakarya Wanua Nugraha” dalam acara Pekan Inovasi Perkembangan Desa/ Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVII di Banda Aceh. Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes, pada tahun 2015 memiliki target sebesar 34,43 dengan capaian sebesar 35,46. Capaian ini berbeda apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 46,53 karena terjadi review terhadap penghitungan yang semula Persentase Usaha Ekonomi Desa menjadi Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes. Berdasarkan capaian tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 46,94 optimis tercapai.

Persentase Desa yang telah memiliki profil, pada tahun 2015 memiliki target sebesar 70% dengan capaian sebesar 96,58%, besarnya tingkat capaian ini karena adanya dukungan regulasi berupa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 maka capaian tahun 2015 lebih baik. Hal ini karena adanya percepatan oleh pemerintah dalam melaksanakan UU no 6 tahun 2014. Dengan tingkat capaian pada tahun 2015 ini maka target akhir RPJMD pada tahun 2017 sebesar 100% optimis tercapai.

4.2.21.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Anggaran yang dipergunakan untuk membiayai urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa belanja langsung dari APBD sebesar Rp5.876.379.800,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 5 kegiatan. Kinerja fisik urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat tercapai 98%, Realisasi anggaran belanja langsung urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp5.262.365.750,00 atau sebesar 90%, sisa anggarannya sebesar Rp614.014.050,00 atau sebesar 10,45%. Besarnya sisa anggaran ini dikarenakan ada beberapa kegiatan seperti penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional tidak diselenggarakan tetapi dilakukan temu karya nasional sesuai surat kementerian dalam negeri nomor: 555.3/4704/BP tanggal 4 Agustus 2015, selain itu adanya efisiensi pelaksanaan dari beberapa kegiatan.

4.2.21.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

Adanya perubahan kelembagaan di pusat, yang semula semua urusan pemberdayaan masyarakat diampu oleh kementerian Dalam Negeri dipecah kewenangannya menjadi dua kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri dn Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Terpencil.

B) Solusi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah menyesuaikan dengan Kelembagaan dn Tugas Pokok dan Fungsi SKPD di Daerah.

4.2.22 Urusan Sosial

4.2.22.1 Kondisi Umum

Permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Perkembangan zaman menyisakan berbagai masalah sosial baru seperti konflik sosial, ketimpangan, kemiskinan baru dan keterbelakangan. Gejala dan fenomena yang muncul sangat perlu dicarikan pemecahannya karena dapat menghambat usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Gambar 4.17 UEP Lanjut Usia Terlantar

Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih tinggi, masih menjadi permasalahan yang harus dicari solusinya secara bersama-sama mengingat kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional yang menyangkut dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya dan politik. Permasalahan sosial yang bersifat konvensional lainnya seperti keterlantaran, kecacatan, ketunaan serta permasalahan aktual lainnya seperti potensi konflik sosial sangat memerlukan perhatian. Permasalahan ini tidak akan mampu ditangani oleh pemerintah daerah sendiri. Oleh karena itu keterpaduan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan untuk menangani kemiskinan.

Sasaran utama penanganan permasalahan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Penanganan permasalahan sosial pada PMKS harus dilakukan secara profesional dan terpadu melalui konsep catur pilar. Keterpaduan peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, masyarakat sebagai inisiator subyek/ pelaku utama, dunia usaha sebagai fasilitator *motivator adviser partner* serta perguruan tinggi sebagai adviser fasilitator *researcher partner* dalam penanganan permasalahan sosial dilakukan melalui strategi integratif, berbasis keluarga dan masyarakat serta berkelanjutan. Disamping menangani secara langsung permasalahan sosial terhadap PMKS, pemerintah daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendorong tumbuh berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan melalui program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam target dan realisasi urusan sosial tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.51 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Anak Bermasa-lah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial.	Persen	-	27,20	79,13	290,92	29,84	265,18
2	Persentase Fakir Miskin, Korban Tindak Kekerasan dan Para Tuna Sosial yang mengalami peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial	Persen	-	9,80	102,51	1.046,02	14,79	693,10
3	Persentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan social	Persen	-	73,24	132,34	180,69	73,86	179,18
4	Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan PMKS dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan UKS	Persen	-	100	100	100	100	100
5	Persentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetia-kawanan sosial, dan peningkatan jiwa nasional-isme pada generasi muda dan masyarakat	Persen	50,66	55,02	57,83	105,11	70	82,61

Sumber: Dinas Sosial, 2016

Persentase Anak Bermasalah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial: Target 2015 sebesar 27,20% dengan realisasi sebesar 79,13% (290,92%). Capaian target 2015 sebesar 79,13% terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 29,84% (265,18%). Capaian tersebut melebihi target karena adanya kegiatan:

1. Peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar melalui dana dekonsentrasi sebanyak 640 orang dan melalui dana luncuran dari Kementerian Sosial RI sebanyak 2.832 orang.
2. Kegiatan bagi penyandang disabilitas melalui dana dekonsentrasi sebanyak 1.250 orang dan melalui dana luncuran sebanyak 939 orang.
3. Kegiatan bagi Anak Balita Terlantar melalui dana dekonsentrasi sebanyak 340 anak dan melalui dana luncuran sebanyak 1.100 anak.
4. Kegiatan bagi anak terlantar melalui dana dekonsentrasi sebanyak 1.300 anak dan melalui dana luncuran sebanyak 500 anak.
5. Kegiatan bagi anak berhadapan dengan hukum melalui dana dekonsentasi sebanyak 20 anak dan melalui dana luncuran sebanyak 110 anak.
6. Kegiatan bagi anak jalanan melalui dana dekonsentrasi sebanyak 270 anak.
7. Kegiatan bagi anak penyandang disabilitas melalui dana dekonsentrasi sebanyak 110 anak dan melalui dana luncuran sebanyak 150 anak.
8. Kegiatan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui dana dekonsentrasi sebanyak 20 anak dan melalui dana luncuran sebanyak 59 anak.
9. Kegiatan bagi anak korban tindak kekerasan melalui dana dekonsentrasi sebanyak 20 anak.
10. Kegiatan korban bencana sosial melalui dana dekonsentrasi sebayak 31 orang.
11. Kegiatan korban bencana alam melalui dana dekonsentrasi sebanyak 645 orang.
12. Kegiatan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana melalui dana dekonsentrasi sebanyak 3 Kampung Siaga Bencana (KSB) dan melalui dana luncuran sebanyak 3 KSB.

Persentase Fakir Miskin, Korban Tindak Kekerasan dan Para Tuna Sosial yang mengalami peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial: Target 2015 sebesar 9,80% dengan realisasi sebesar 102,51%. Capaian target 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 693,10%. Capaian tersebut melebihi target karena adanya:

1. Kegiatan bagi korban tindak kekerasan melalui dana dekonsentrasi sebanyak 30 orang dan melalui dana luncuran sebanyak 195 orang.
2. Kegiatan bagi pekerja migran bermasalah sosial melalui dana luncuran sebanyak 5 orang.
3. Kegiatan bagi bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan melalui dana dekonsentrasi sebanyak 40 orang.
4. Kegiatan bagi korban penyalahgunaan napza melalui dana dekonsentrasi sebanyak 10 orang.
5. Kegiatan bagi keluarga miskin dan keluarga fakir miskin melalui dana dekonsentrasi sebanyak 1.650 kk dan melalui dana luncuran sebanyak 1.860 KK.
6. Kegiatan bagi RTSM anggota PKH melalui dana luncuran sebanyak 654 orang.
7. Kegiatan bagi perempuan rawan sosial ekonomi melalui dana dekonsentrasi sebanyak 70 orang.
8. Kegiatan bagi keluarga bermasalah psikologis melalui dana dekonsentrasi sebanyak 613 orang, dan
9. Kegiatan rehabilitasi sosial bagi eks penyakit sosial (bimbingan mental sosial di *camp assesment* dan pemulangan gelandangan dan pengemis) tidak dapat diprediksi. Target yang ditetapkan sebanyak 150 orang terealisir 173 orang rata-rata setiap bulannya.

Persentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial: Target 2015 sebesar 73,24% dengan realisasi sebesar 132,34%, capaian tahun 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 73,86% (179,18%). Capaian tersebut melebihi target karena adanya:

1. Kegiatan bagi pekerja sosial masyarakat melalui dana dekonsentrasi sebanyak 60 orang.
2. Kegiatan bagi lembaga kesejahteraan sosial (LKS) melalui dana luncuran sebanyak 7 LKS, dan
3. Kegiatan bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) melalui dana dekonsentrasi sebanyak 10 LK3.

Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan PMKS dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan UKS: capaian target 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 100%. Target 2015 sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100% sedangkan target akhir RPJMD 2017 sebesar 100%.

Persentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial, dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat: Target 2015 sebesar 55,02% dengan realisasi sebesar 57,83% (105,11%), capaian tahun 2015 terhadap akhir RPJMD 2017 sebesar 70% adalah 82,61%. Capaian tersebut melebihi target karena adanya: kegiatan melalui dana dekonsentrasi yakni jejaring KSN sebanyak 60 orang, kegiatan olimpiade pahlawan Indonesia sebanyak 69 orang, kegiatan ziarah wisata sebanyak 176 orang dan kegiatan bimbingan bagi guru sebanyak 80 orang.

Pemerintah Daerah telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan untuk menangani PMKS dan PSKS di wilayah DIY. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/ Panti-Panti Sosial yang berada di bawahnya.

Untuk isian capaian indikator 1-4 tahun 2014 tidak dapat dituangkan karena pada tahun 2015 Pemda DIY melakukan review RPJMD yang diikuti dengan review Renstra Instansi. Indikator sasaran untuk tahun 2014 berjumlah 3 indikator dan setelah review Renstra menjadi 5 indikator sehingga capaian 2014 tidak dapat disandingkan dengan capaian 2015.

4.2.22.2 Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pada tahun 2015, urusan sosial dilaksanakan dengan 15 program dan 51 kegiatan. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp46.976.025.659,00 dengan realisasi keuangan

sebesar Rp41.684.939.621,00 atau 88,74%, dan realisasi fisik 99,57. Realisasi capaian fisik yang < 100%, ditemui pada sejumlah kegiatan pada urusan sosial, yakni sebanyak 2 kegiatan. Adapun rincian kegiatan urusan sosial yang memiliki realisasi capaian fisik < 100% adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo, dengan realisasi capaian fisik mencapai 97,20%. Hal itu disebabkan jumlah klien dalam Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yakni remaja putus sekolah tidak memenuhi target. Di samping banyaknya program bantuan kependidikan dari pemerintah yang bisa diakses oleh keluarga miskin juga karena kesadaran masyarakat atas pengasuhan terhadap anak yang terbaik adalah dalam lingkungan keluarga semakin meningkat.
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial; dengan realisasi capaian fisik mencapai 96,39%. Hal itu disebabkan ada kegiatan yang belum dilaksanakan karena belum memenuhi persyaratan. Untuk bantuan UEP, sarpras dan jaminan hidup bagi gelandangan dan pengemis (gepeng) tidak dapat dilaksanakan karena belum lengkapnya persyaratan administratif.

4.2.22.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Penyalahgunaan NAPZA di DIY cenderung meningkat.
- Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis yang ada di DIY cukup tinggi.
- Permasalahan sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) cenderung meningkat.

B) Solusi

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan memaksimalkan peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam penanganan korban penyalahgunaan napza dan membangun Pusat Informasi dan Edukasi NAPZA.
- Memaksimalkan implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelanangan dan Pengemis dengan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk

mencegah praktek pergelandangan dan pengemisan dengan tidak memberikan sumbangan kepada peminta-minta di tempat umum maupun di perumahan.

- Memberikan penanaman nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial pada generasi muda terutama anak-anak sekolah melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. Menumbuhkan jiwa toleransi dan kepedulian sosial dalam keluarga melalui kegiatan penyuluhan sosial sehingga anak yang terlibat dalam masalah hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi dapat berkurang.

4.2.23 Urusan Kebudayaan

4.2.23.1 Kondisi Umum

Urusan kebudayaan DIY semakin strategis kedudukannya setelah disahkannya UU RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY karena menjadi salah satu kewenangan istimewa DIY dalam pembangunan, serta merupakan payung hukum atau mainstream pembangunan daerah di segala bidang. Sumber daya budaya yang unggul mendominasi seluruh potensi yang dimiliki oleh DIY. Sumber daya budaya sebagai salah satu modal pembangunan di DIY dapat dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan jatidiri masyarakat, membangun identitas dan citra (*image building*) bagi DIY, serta memberikan manfaat ekonomi dalam rangka mewujudkan Visi DIY sebagai Pusat Pendidikan dan Daerah Tujuan Wisata yang terkemuka.

Sesuai dengan rekomendasi LKPJ tahun 2015, tindak lanjut dalam rangka mengevaluasi, menyusun program budaya unggul yang memperkuat karakter dan identitas keistimewaan DIY adalah dengan pelibatan semua stakeholder kebudayaan melalui kegiatan pendampingan, pembinaan, pengembangan, kerjasama, dan fasilitasi di sektor unggulan urusan kebudayaan seperti organisasi/ lembaga seni budaya, museum, perfilman, warisan cagar budaya, dan organisasi kemahasiswaan perwakilan daerah se-Indonesia yang ada di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam berkesenian dibutuhkan sarana berekspresi yang representatif menjadi perhatian yang serius sebagai kawah candradimuka untuk melahirkan generasi baru seniman dan budayawan DIY.

Dinas Kebudayaan dan UPTD nya didukung pemangku kepentingan lain membangun beberapa ruang seni budaya di tingkat desa, sekolah, tempat wisata geo heritage, Taman Budaya di tingkat kabupaten, yang diikuti dengan pemberian fasilitas sarana kesenian ke masyarakat serta fasilitasi kegiatan-kegiatan.

Tabel 4.52 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Jumlah Organisasi budaya dan desa budaya kategori maju	%	22	24	24,5	102	28	86
2.	Persentase Nilai budaya, Adat, dan Tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	16	15	17,68	117,87	30	58,93
3.	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) tidak bergerak yang tertangani	%	46,80	50	52,80	105,60	54,16	97,49
4.	Persentase ruang seni dan budaya yang representatif	%	31	40	41,12	102,88	70	57,14
5.	Persentase Implementasi Hasil Kesepakatan	%	12	15	15	100	35	42,86

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2016

Persentase Jumlah Organisasi budaya dan desa budaya kategori maju tercapai melebihi target menjadi 24,5% dari keseluruhan organisasi budaya dan desa budaya. Hal ini didukung oleh Fasilitasi Sarana Budaya yang merata di 438 Desa dan pendampingan budaya di 100 desa serta adanya berbagai pelatihan, *workshop*, dan sarasehan untuk meningkatkan kualitas serta berbagai event baik

yang bersifat kompetisi maupun eksebisi yang mampu mengasah prestasi. Namun hal ini terhambat oleh kebiasaan organisasi dan masyarakat desa yang masih merasa puas terhadap ketrampilan berkesenian dan kesenian hanya sebagai hoby buka profesi. Dengan kata lain, organisasi budaya hanyalah perkumpulan orang yang mempunyai hoby yang sama buka mereka yang memang berprofesi dalam budaya. Pencapaian target 2015 terhadap target 2017 adalah sebesar 86%, diharapkan nantinya pada tahun 2017 akan tercapai 100%.

Persentase Nilai budaya, Adat, dan Tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi didalamnya mencakup seni (seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, seni multimedia dan media rekam, seni desain dan arsitektur), kuliner, dan industri budaya. Realisasi indikator terebut pada tahun 2015 adalah 117,87% dari target. Keberhasilan memenuhi target dalam indikator ini didukung oleh keberhasilan event budaya yang di inisasi oleh masyarakat serta mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan memunculkan peluang usaha yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Berbagai upaya pembinaan dan bantuan dari Pemerintah mampu memunculkan kembali berbagai Upacara Adat di berbagai desa/ kelurahan di DIY. Rekonstruksi berbagi seni tradisi pun dilakukan dari sisi kostum iringan, dan gerak agar lebih menarik. Nilai budaya juga di kemas dan di sajikan dalam berbagai media film, TV, animasi, dan radio. Semuanya itu belum maksimal karena belum didukung Prasarana dan sarana upacara adat yang memadai, Peralatan produksi multimedia yang belum di punyai, serta meratanya ketersediaan prasarana dan sarana berkesenian. Pencapaian kinerja yang dtargetkan 15% dapat terlampaui, yakni 17,68%. Melihat capaian pada tahun 2014 dan 2015 ini diharapkan pada akhir pelaksanaan RPJMD pada tahun 2017 diproyeksikan lebih dari 60% walaupun target pada akhir RPJMD hanya 30%.

Realisasi indikator “Jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) tidak bergerak yang tertangani” di tahun 2015 tercapai 105,60% dari target, Dinas Kebudayaan menargetkan 50% namun realisasinya melebih target yang telah ditetapkan yakni 52,80%. Keberhasilan Dinas Kebudayaan dalam memenuhi target dalam pelestarian cagar budaya tidak dapat dilepaskan dari ketersedian pendanaan serta peran SDM yang ada di Dinas Kebudayaan beserta KPA urusan kebudayaan dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Dengan ketersedian anggaran yang ada serta adanya pembagian tanggungjawab dalam

pengelolaan Cagar Budaya di DIY dengan SKPD di Kabupaten/ Kota, maka diproyeksikan peningkatan persentase BCB yang tertangani setiap tahunnya meningkat 5% lebih tinggi dari yang direncanakan. Sehingga pada akhir tahun 2017 diharapkan indikator ini dapat terealisasi sebesar 100%.

Indikator Persentase ruang seni dan budaya yang representatif merupakan salah satu indikator yang penting bagi pemda DIY. DIY adalah wilayah yang dikenal sebagai pusat budaya, oleh karena itu ketersedian ruang seni budaya yang representatif mutlak dibutuhkan. Pada tahun 2015 realisasi capaiannya adalah 102,88% dari target. Sarana dan Prasarana Budaya, didalamnya mencakup Prasarana (regulasi, standarisasi, fasilitasi teknologi), dan Sarana (desa/kelurahan budaya, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan, sanggar seni, pasar seni, fasilitas pendidikan formal dan non formal, balai pertemuan adat). Diharapkan beberapa tahun ke depan capaian dari indikator tersebut semakin besar karena kab/kota dengan Dana Keistimewaan mempunyai komitmen untuk mencapai target tersebut. Keberhasilan indikator ini tercapai karena didukung oleh Rehabilitasi Taman Budaya Yogyakarta, pembangunan Taman Budaya di Kabupaten, Balai Budaya di Desa/ Kelurahan Budaya serta Rumah Budaya di desa/ kelurahan di DIY. Namun keberhasilan tersebut masih terhambat oleh minimnya pemeliharaan ruang seni dan perilaku penggunanya yang masih kurang peduli. Diproyeksikan pada tahun 2017 ruang seni budaya Di daerah Istimewa Yogyakarta akan bertambah secara signifikan.

Indikator Persentase Implementasi Hasil Kesepakatan erat kaitannya dengan Diplomasi Budaya yang didalamnya mencakup nominasi, penetapan, apresiasi, promosi, citra serta pengakuan. Keberhasilan pencapaian target indikator tersebut, didukung oleh keberhasilan kerjasama dengan Pemerintah dan Lembaga di Indonesia dan Mancanegara yang dilakukan Pemda DIY dan jalinan kerjasama yang erat antara seniman DIY dan Mancanegara yang mampu menghadirkan event berkelas Nasional dan Mancanegara yang bermutu dan semarak. Pendanaan yang tidak berkelanjutan menghambat keberlanjutan event budaya yang bagus dan bermutu. Pada tahun 2015 realisasi dari indikator ini adalah 15% yang artinya memenuhi 100% antara target dengan realisasi. Berdasarkan capaian pada tahun 2014 dan 2015, diharapkan pada akhir pelaksanaan RPJMD pada tahun 2017 diproyeksikan semua hasil kesepakatan kerjasama dapat ditindaklanjuti dengan

implementasi nyata. Tahun 2015 Dinas Kebudayaan melaksanakan 4 misi kebudayaan ke luar negeri yaitu Jepang, Shanghai, Korea, dan Australia.

4.2.23.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Untuk memenuhi target kinerja Dinas Kebudayaan pada tahun 2015, Dinas Kebudayaan DIY melaksanakan 4 program yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan total pagu Rp4.645.166.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 99,44% dan realisasi keuangan 81,39%. Disamping itu Dinas Kebudayaan DIY tahun 2015 melaksanakan 6 program urusan kebudayaan yang tertuang dalam 30 (tiga puluh) kegiatan. Realisasi fisik yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan tahun 2015 sebesar 99,41% Sedangkan untuk realisasi keuangan sampai akhir tahun 2015 yaitu sebesar Rp175.428.174.010,00 atau 79,83% dari total anggaran Rp219.738.015.185,00. Secara umum kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dalam rangka tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan kebudayaan di DIY telah dilaksanakan.

4.2.23.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Peninggalan warisan budaya fisik *(tangible)* masih terbatas pada pelaksanaan perlindungan, belum maksimal pada sisi pengembangan dan pemanfaatan.
- Apresiasi masyarakat terhadap pertunjukan seni tradisi, partisipasi kegiatan adat dan tradisi, penggunaan bahasa dan sastra Jawa masih rendah.

B) Solusi

- Peninggalan warisan budaya fisik *(tangible)* perlu dilakukan pengelolaan terpadu kawasan cagar budaya.
- Menciptakan industri-industri budaya baru dengan kemasan modern untuk lebih menarik minat masyarakat terhadap warisan budaya.

4.2.24 Urusan Statistik

4.2.24.1 Kondisi Umum

Urusan Statistik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan konkuren yang wajib dilaksanakan dan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya untuk melaksanakan urusan statistik tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan undang-undang di atas statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Sedangkan berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik dibagi menjadi 3, yaitu statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Sementara statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat, baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan.

Statistik memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2010, salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah DIY adalah penyelenggaraan statistik daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir. Tersedianya data yang benar dan akurat merupakan salah satu syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah.

Guna memperoleh data statistik yang benar, akurat dan sesuai kebutuhan, diperlukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi/ kabupaten/ kota, unsur perguruan tinggi, masyarakat dan *stakeholders* penyedia data lainnya. Upaya tersebut juga harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai untuk menjadi sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang terpercaya.

Tabel 5.53 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Statistik Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	%	96,04	97	97,07	100,07	100	97,07

Sumber: BAPPEDA DIY, 2016

Realisasi capaian kinerja dari sasaran persentase ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan pada tahun 2015 telah mencapai target. Target ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan adalah sebesar 97%, sedangkan capaiannya adalah 97,07% atau sebesar 100,07% dari target.

Untuk mencapai sasaran indikator kinerja urusan statistik dilaksanakan melalui Program Pengembangan Statistik Daerah yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan Pengelolaan Data dan Statistik Daerah. Hasil analisis dan data tersebut di atas dilaksanakan untuk menyediakan bahan masukan yang digunakan dalam perencanaan. Analisis PDRB, ICOR dan Makro Ekonomi sebagai input yang menyajikan kondisi perekonomian yang sudah, sedang dan akan berlangsung. Analisis tentang kinerja perekonomian tersebut menjadi salah satu dasar dalam perumusan permasalahan pembangunan. Sementara Analisis IPM dimaksudkan untuk menyediaan bahan analisis terkait dengan isu kesejahteraan sosial di masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data perencanaan dibangun Sistem Aplikasi Dataku yang dikembangkan mulai tahun 2014 dengan tujuan mengintegrasikan data perencanaan pembangunan di DIY. Pada Tahun 2014 tingkat keterisian data semula hanya 96,04% atau terisi sejumlah 3,471 dari 3,614 elemen data. Sedangkan pada Tahun 2015 tingkat keterisian data

ditargetkan meningkat menjadi 97%, dan dapat terealisir sebesar 97,07% atau terisi 3,508 dari 3,614 elemen data.

4.2.24.2 Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Jumlah anggaran yang berasal dari sumber pendanaan APBD pada Tahun 2015 untuk urusan statistik terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp1.193.335.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan Pogram Pengembangan Statistik Daerah. Capaian realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp1.174.014.895,00 (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 98,38% dari total anggaran. Adanya deviasi keuangan sebesar 0,62% dikarenakan adanya sisa perjalanan (kebijakan *at cost*)

4.2.24.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Belum optimalnya pemanfaatan data perencanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari BPS. Permasalahan tersebut itu disebabkan oleh rilis data-data terkait oleh BPS tidak bertepatan waktunya dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- Data kabupaten/ kota masih belum dapat diintegrasikan dalam satu sistem data secara ideal. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya metadata di kabupaten/ kota.

B) Solusi

- Bappeda melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan BPS terkait penyediaan dan rilis data perencanaan dan evaluasi pembangunan agar selaras dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- Pengembangan dan peningkatan pengelolaan sistem aplikasi integrasi data serta mengintesifkan koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan data dengan kabupaten/ kota.

4.2.25 Urusan Kearsipan

4.2.25.1 Kondisi Umum

Gambar 4.18 Penyelamatan Arsip Statis ke 3 (SOPD) ke BPAD DIY

Sebagai sebuah aset bangsa, arsip harus dilestarikan agar generasi bangsa Indonesia dari tahun ke tahun dapat memanfaatkannya sebagai sumber informasi jati diri bangsa. Arsip harus diatur, ditata atau disusun secara sistematis dan logis agar dapat dilestarikan dan mudah ditelusuri. Pengaturan/ penataan/ penyusunan arsip tentu harus berpedoman pada aturan atau kaidah kearsipan agar arsip yang disimpan dapat terjaga utuh baik fisik maupun informasinya. Urusan kearsipan diampu tiga program yaitu:

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan,
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah,
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

Tabel 5.54 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013-2014 serta capaian 2015 terhadap Target Akhir RPJMD (2017)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya.	persen	41,19	11	16,5	150	15	111
2	Persentase arsip yang dimanfaatkan	persen	19,42	20	20,38	101,9	30	67,9

Sumber: BPAD DIY, 2016

Pencapaian sasaran strategis BPAD DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya jumlah khasanah Arsip terdiri dari satu indikator yaitu indikator: Penambahan khasanah arsip dari jumlah arsip yang sudah ada. Target persentase jumlah penambahan khasanah arsip dari jumlah arsip yang sudah ada pada tahun 2015 ini ditetapkan sebesar 11%, artinya dari total jumlah arsip yang telah dimiliki BPAD DIY sebanyak 20.779 berkas, diharapkan terdapat penambahan khasanah arsip setidaknya sebanyak 2.285 berkas. Realisasi hingga akhir tahun 2015, jumlah khasanah arsip yang berhasil di olah adalah sebanyak 3.448 berkas. Jumlah penambahan khasanah arsip Tahun 2015 berasal dari Arsip yang sudah diolah dari Arsip Puro Pakualaman 550 berkas, Arsip Kraton 521 berkas dan Arsip BPAD DIY 2.377 berkas. Persentase Penambahan khasanah arsip dari jumlah arsip yang sudah adalah sebesar 16,5%. Berdasarkan realisasi tersebut sudah melebihi target yang dicanangkan pada tahun 2015 sebesar 11%. Faktor yang mendukung capaian kinerja tahun 2015 ini adalah penelusuran dan akuisisi yang dilakukan di sejumlah instansi pemerintah dan non pemerintah di lingkungan pemda DIY maupun kabupaten dan kota berjalan dengan baik serta dijalin komunikasi yang cukup intens dengan lembaga sasaran akuisisi sehingga target kinerja tahun 2015 dapat dicapai dengan baik.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi terdiri dari satu indikator yaitu indikator: Jumlah arsip yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah keseluruhan arsip yang dimiliki. Target persentase jumlah arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2015 ini ditetapkan sebesar 20%. Artinya dari total jumlah khasanah arsip yang dimiliki BPAD DIY sebesar 20.779 arsip, diharapkan sebanyak 4.155 arsip yang dimanfaatkan ataupun diakses oleh pengguna arsip. Realisasi hingga akhir tahun 2015, jumlah khasanah arsip yang digunakan oleh masyarakat terdapat 4.235 arsip. Jumlah tersebut terdiri dari penggunaan arsip di BPAD DIY dan juga penggunaan arsip di Puro Pakualaman dan Kraton. Dapat disimpulkan bahwa jumlah khasanah arsip yang digunakan terdapat 4.235 arsip. Bila dibandingkan dengan jumlah khasanah arsip yang dimiliki oleh BPAD DIY sebesar 20.779 arsip, penggunaan arsip tahun 2015 terealisasi sebesar 20,38%. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2015 ini adalah dioptimalkannya sosialisasi di bidang kearsipan secara maksimal baik itu dengan menggunakan media cetak maupun media massa dan dilakukan promosi melalui pameran yang diselenggarakan di Alun-alun Selatan maupun di Kraton Yogyakarta.

Selain itu juga telah dilakukan Sosialisasi pemanfaatan arsip ke masyarakat melalui pemutaran Film sadar arsip.

Capaian untuk masing masing Indikator di Tahun 2015 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, maka capaian masing masing Indikator untuk Tahun 2015 lebih baik dibandingkan dengan capaian indicator Tahun 2014, kecuali untuk penambahan khasanah arsip, hal ini disebabkan karena tahun 2015 untuk penambahan khasanah arsip dukungan dari dana Istimewa anggarannya lebih sedikit dibandingkan Tahun 2014. Adapun analisis capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 untuk masing masing capaian indicator optimis bisa tercapai.

4.2.25.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015

Total Anggaran Urusan Kearsipan dari pendanaan APBD sebesar Rp1.470.103.100,00, didukung dengan 3 Program dan 6 Kegiatan. Untuk capaian kinerja anggaran dengan target Rp1.470.103.100,00, realisasinya sebesar Rp1.329.177.873,00 (90,41%), sedangkan capaian Kinerja Fisik sebesar 99,5%. Capaian fisik sebesar 99,5% dari target 100% dikarenakan pada Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah, untuk Kegiatan Pemindahan Arsip Instansi yang digabung/ dihapus/ diubah statusnya, dari 23 SKPD yang direncanakan hanya 20 SKPD yang bisa dilaksanakan karena ada 3 SKPD belum siap dokumen arsipnya untuk diserahkan ke BPAD DIY.

4.2.26 Urusan Perpustakaan

4.2.26.1 Kondisi Umum

Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok. Perpustakaan, melalui BPAD DIY mempunyai program meliputi:

1. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan,
2. Program Pengembangan Budaya Baca dan,
3. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.

Tabel 5.55 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan.	%	19,54%	20 %	30,56 %	152,8%	24%	127%

Sumber: BPAD DIY, 2016

Indikator Persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan dengan aktivitas memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat, yakni: layanan menetap, layanan perpustakaan keliling juga layanan Pojok Baca. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dan mengakses buku bacaan. Tahun 2015, Pojok Baca dikembangkan dan dilaksanakan di 5 (lima) Rumah Sakit yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Rumah Sakit Condongcatur Sleman, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, dan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta

Gambar 4.19 Peresmian Gedung Perpustakaan " Grhatama Pustaka" Karangjambe, Banguntapan, Bantul

Target persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan pada tahun 2015 ini ditetapkan sebesar 20%, artinya bahwa dari total penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.679.200 jiwa ditargetkan terdapat setidaknya 735.840 orang yang berkunjung ke perpustakaan selama satu tahun (DIY dalam angka: BPS 2014). Realisasi hingga tahun 2015, terdapat 1.124.694 orang yang berkunjung ke perpustakaan, jumlah tersebut berasal dari perpustakaan dari BPAD DIY dan juga perpustakaan kabupaten/ kota selama satu tahun. Berikut rincian data pengunjung perpustakaan DIY:

Jumlah pengunjung perpustakaan atau disebut pemustaka di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga akhir 2015 tercatat mencapai 1.124.694 pemustaka. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.679.176 jiwa, maka didapat kesimpulan bahwa terdapat 30,56% pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan di tahun 2015. Jumlah persentase tersebut sudah melebihi target yang dicanangkan pada tahun 2015 sebesar 20%. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2015 ini adalah adanya *Jogja Learning Park* di Unit layanan perpustakaan Tentara Rakyat Mataram 4 yang merupakan konsep layanan perpustakaan dengan pelayanan peminjaman buku dan akses internet melalui *wifi* gratis. Selain itu juga tersedia angkringan yang buka hingga malam hari. Adanya *Jogja Learning Park* terbukti mampu membuat animo masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan pemustaka dalam mengakses informasi melalui internet. Sedangkan di Perpustakaan Kabupaten/ Kota, seperti misalnya perpustakaan kota yogyakarta juga membuka layanan perpustakaan dengan fasilitas Hotspot dibuka sampai dengan jam 24.00 setiap harinya.

4.2.26.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015

Alokasi dana untuk urusan perpustakaan pada tahun anggaran 2015 seluruhnya mencapai Rp44.551.989.100,00 dengan realisasi sebesar Rp42.053.524.645,00 (94,4%). Capaian Kinerja Fisik sudah sesuai target sebesar 100% dengan didukung oleh 7 program dan 46 kegiatan.

4.3 URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

4.3.1 Urusan Pariwisata

4.3.1.1 Kondisi Umum

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang dikenal memiliki potensi budaya dan tradisi, serta memiliki keberagaman potensi alam yang terbentang dari pegunungan hingga ke pesisir pantai.–Pemerintah Daerah DIY berupaya untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar dapat mencapai Visi Kepariwisataan DIY yaitu sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, maka Pemerintah

Daerah DIY pada tahun 2015 berupaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pada tahun 2015 Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pembangunan nasional diantaranya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan kepada 30 negara. Kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015 tentang penambahan negara yang diberikan bebas visa kunjungan menjadi 45 negara, sehingga total negara bebas Visa kunjungan pada bulan Oktober telah menjadi 75 negara. Pemberlakuan peraturan bebas Visa kunjungan kepada beberapa negara dapat menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

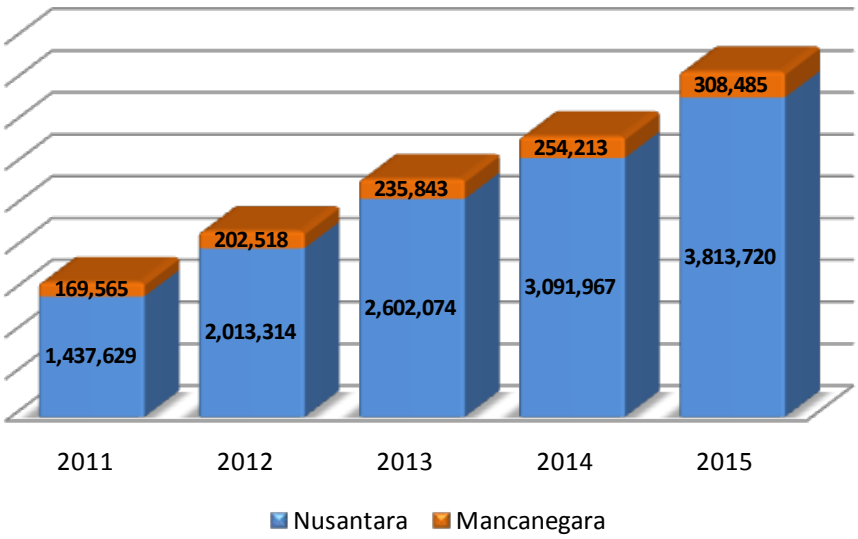

Gambar 4.20 Perkembangan Kunjungan Wisatawan di DIY 2011-2015

Jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY pada tahun 2015 mencapai 4.122.205 wisatawan, terdiri dari 308.485 wisatawan mancanegara dan 3.813.720 wisatawan nusantara. Wisatawan mancanegara mengalami peningkatan sebesar 21% dari tahun sebelumnya dan 23% peningkatan jumlah kunjungan untuk wisatawan nusantara. Capaian tahun 2015, jumlah wisatawan mancanegara telah melebihi target RPJMD tahun 2017, yaitu sebanyak 115,23% sedangkan untuk wisawatan nusantara baru mencapai 83,60% dari target akhir RPJMD di tahun 2017. Komposisi lima besar wisatawan mancanegara yang mengunjungi DIY masih sama

dengan tahun sebelumnya, yaitu Belanda, Jepang, Malaysia Perancis, dan Singapura. Kelima negara tersebut merupakan negara-negara yang termasuk dibebaskan Visa kunjungan.

Pertumbuhan kunjungan wisatawan di tahun 2015 secara total mencapai 776,025 wisatawan bila dibandingkan dari tahun 2014, merupakan indikator bahwa destinasi wisata DIY masih menjadi pilihan bagi para wisatawan. Keanekaragaman destinasi wisata yang dimiliki DIY dapat menjadi berbagai pilihan utama dari wisatawan yang berkunjung. Keberagaman wisata alam yang menjadi potensi di DIY juga menawarkan keindahan wisata pegunungan hingga keunikkan wisata bahari di sepanjang kawasan pantai selatan DIY.

Pada tahun 2014, lama tinggal wisatawan mancanegara adalah 1,95 hari dan 1,58 hari untuk wisatawan nusantara, sedangkan pada tahun 2015 telah meningkat sebesar 6,2%, namun belum dapat mencapai target lama tinggal wisatawan tahun 2015. Lama tinggal wisatawan mancanegara yang pada tahun 2015 ditargetkan pada angka 2,35 hari hanya dapat terealisasi 2,07 hari (88,09%). Lama tinggal wisnus pada tahun 2015 dengan target 2,30 hari hanya terealisasi 1,85 hari (80,43%), namun masih terdapat peningkatan sebesar 17% jika dibandingkan dengan lama tinggal wisatawan nusantara pada tahun 2014. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD di tahun 2017, jumlah lama tinggal wisawatan mancanegara di tahun 2015 baru mencapai target sebesar 76,95% dan untuk lama tinggal wisawatan nusantara mencapai target sebesar 71,15%. Tidak tercapainya target kinerja Lama Tinggal baik wisawatan Nusantara maupun Mancanegara disebakan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pelaksanaan event kepariwisataan dan bertambahnya jumlah destinasi wisata di DIY belum diikuti dengan penyusunanan paket-paket wisata yang dapat mengakomodir informasi-informasi yang menawarkan kegiatan-kegiatan wisata dan destinasi wisata terbaru.
2. Sebagian besar paket wisata yang disusun oleh pihak travel agent masih menawarkan destinasi dan event-event wisata yang sudah cukup dikenal atau terbatas pada daya tarik konvensional seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Kraton Yogyakarta serta daerah sekitarnya, namun belum menyertakan paket-paket wisata yang berisi destinasi dan event wisata yang baru.

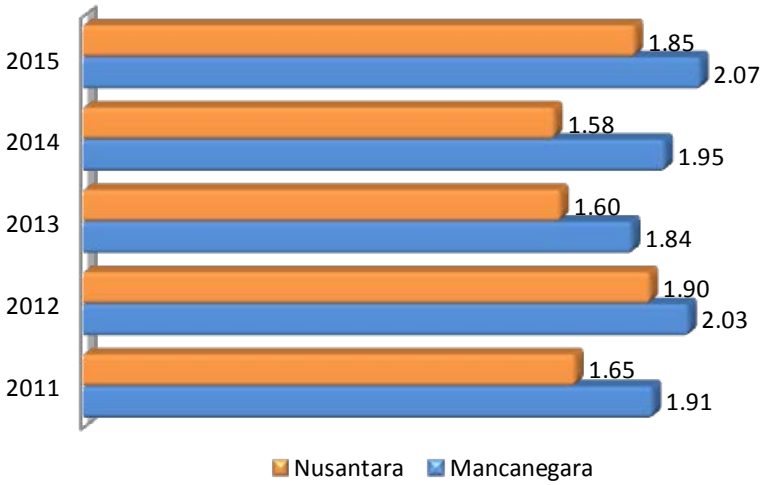

Gambar 4.21 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan di DIY 2011-2015

Berdasarkan RPJMD DIY 2012-2017 dan Renstra Dinas Pariwisata DIY sampai tahun 2017 (akhir masa Renstra) target jumlah pengunjung ke Daya Tarik Wisata (DTW) di DIY sebanyak 22.198.333 orang. Pada tahun 2014 jumlah pengunjung ke DTW mencapai 16.774.235 orang dantahun 2015 target jumlah pengunjung yang diharapkan sebesar 16.785.128 orang dan dapat tercapai hingga 18.435.445 orang,terdapat kenaikan sebesar 1.650.317 orang.

Tabel 4.56 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata (DTW)	Orang	16.774.235	16.785.128	18.435.445	109,83	22.198.333	83,05
2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	3.091.967	3.581.860	3.813.720	106,47	4.561.646	83,60
	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	254.213	261.053	308.485	118,17	272.162	113,35
3	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,58	2,30	1,85	80,43	2,60	71,15
	Lama Tinggal Wisataan Mancanegara	Hari	1,95	2,35	2,07	88,09	2,69	76,95
4	Jumlah daya tarik baru	DTW/ Lokasi	88	89	91	102,25	93	97,85

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015 Target	2015 Realisasi	2015 %	Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
5	Jumlah Desa Wisata	Desa	77	80	80	100	90	88,89
	Jumlah Pokdarwis	Kelompok/ Pokdarwis	82	86	86	100	96	89,58

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016

Perubahan paradigma yang terjadi saat ini menitikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat setempat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan membuat kegiatan kepariwisataan juga melibatkan peran serta masyarakat setempat. Peluang dalam pemberdayaan masyarakat setempat dilakukan dengan membentuk desa-desa wisata dan juga membentuk organisasi pengelolaan kegiatan parwisata bagi masyarakat local yang disebut sebagai kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pembentukkan desa-desa wisata didasari oleh potensi dari masing-masing desa serta juga memperhatikan kemampuan dan keinginan dari masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan wisata di daerah mereka masing-masing.

Pada tahun 2015, jumlah desa wisata mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014, dari 77 desa wisata menjadi 80 desa wisata. Sedangkan jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga meningkat dari 82 pokdarwis di tahun 2014, menjadi 86 pokdarwis di tahun 2015 ini. Untuk jumlah daya tarik baru pada tahun 2015 meningkat menjadi 89 lokasi. Bila dibandingkan dengan target akhir di RPJMD tahun 2017, capaian target jumlah desa wisata di tahun 2015 sudah mencapai 88,89%, kemudian untuk jumlah Kelompok Sadar Wisata telah mencapai 89,58%, sedangkan untuk jumlah daya tarik baru, telah mencapai 97,85% dari target RPJMD tahun 2017.

4.3.1.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015

Tahun Anggaran 2015 Dinas Pariwisata DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp22.800.663.433,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp4.013.030.833,00 dan Belanja Langsung Rp18.787.636.600.00, sedangkan realisasi adalah sebesar Rp21.508.721.389,00 (94,33%) dengan perincian Belanja Tidak Langsung Rp3.978.069.630,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp17.530.651.759,00. Semuanya dialokasikan untuk mendukung

berjalannya 8 program dan 35 kegiatan. Untuk realisasi keuangan terdapat selisih antara target dengan realisasi keuangan, hal tersebut disebabkankan adanya sisa lelang dan efisiensi kegiatan sehingga anggaran yang ditargetkan dapat terserap 100% hanya dapat terealisasi sebesar 93,31%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas Pariwisata DIY dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bidang Pariwisata berupa Sewa tempat/ *counter* TIC Malioboro oleh Disbudpar Prov. Jateng dan Sewa Tempat parkir PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (PT. TWCBP & RB) di Candi Ratu Boko, sebesar Rp51.404.440,00 dari target Rp34.580.250,00 dan telah melampaui target pendapatan sebesar 148,65%.

4.3.1.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Belum optimalnya penyelenggaraan wisata-wisata minat khusus yang dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap lama tinggal wisatawan.
- Permintaan atau minat dari wisatawan yang datang ke DIY belum dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga masih belum mampu mengetahui minat yang diinginkan oleh sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke DIY.
- Infrastruktur bandara yang ada sekarang ini di DIY belum memungkinkan untuk mendarat pesawat berbadan lebar dan terbatasnya akses untuk dilakukan penerbangan langsung dari banyak negara. Hal ini menyebabkan travel agent DIY terkendala dalam membuat paket wisata secara mandiri.
- Belum tersedianya moda trasportasi umum yang dapat melayani daerah-daerah tujuan wisata, sehingga penyebaran wisatawan masih banyak di sekitar area Kota Yogyakarta.

B) Solusi

- Meningkatkan kegiatan-kegiatan event kepariwisataan, terutama bagi event-event yang mampu mempromosikan kegiatan wisata minat khusus yang dimiliki oleh DIY.
- Melakukan penyebaran informasi dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan jejaring kemitraan dengan seluruh *stakeholder* pariwisata.

- Melakukan kegiatan manajemen event yang mampu mengatur jadwal-jadwal penyelenggaraan event wisata dan budaya, dan dapat disebarkan informasi-informasi mengenai jadwal pelaksanaan event kepada wisatawan dan calon wisatawan dengan menggunakan teknologi informasi sehingga penyebaran informasi dapat cepat tersalurkan.
- Segera terwujudnya bandara internasional baru yang dapat menambah *direct flight*/penerbangan langsung berbagai provinsi di Indonesia maupun ke luar negeri.
- Memperluas jaringan moda transportasi umum yang sudah ada saat ini, seperti memperluas jaringan bus Transjogja, sehingga dapat mampu menjangkau destinasi-destinasi wisata yang pada saat ini masih sulit dijangkau oleh para wisatawan.

4.3.2 Urusan Kelautan dan Perikanan

4.3.2.1 Kondisi Umum

Gambar 4.22 Bimtek Nelayan

Urusan kelautan dan perikanan berperan penting baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan maupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari aspek pengembangan wilayah, urusan kelautan dan perikanan merupakan tumpuan utama untuk mewujudkan kawasan laut selatan atau pesisir sebagai halaman depan wilayah DIY. Sektor kelautan dan perikanan juga berperan sebagai salah satu alternatif penguatan perekonomian daerah untuk penumbuhan kawasan potensial dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan membuka peluang usaha baru berbasis kelautan/perikanan, khususnya pada kawasan pedesaan dan kawasan tertinggal.

Salah satu perkembangan yang patut diapresiasi adalah peningkatan produksi perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di DIY, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:

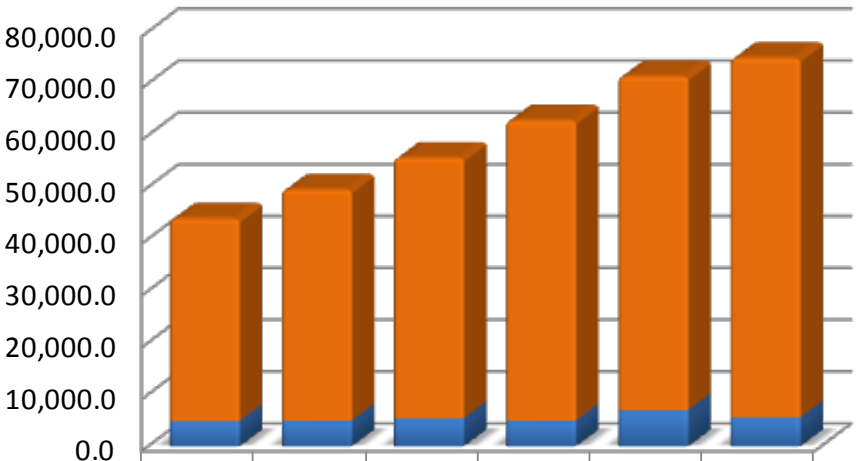

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Perikanan Budidaya	39,033.0	44,542.0	50,247.0	57,903.0	64,394.0	69,384.0
Perikanan Tangkap	4,906.4	5,000.0	5,437.0	4,996.0	6,997.0	5,560.0

Gambar 4.23 Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY 2010-2015

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2016)

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa perikanan budidaya selalu menunjukkan kenaikan. Kenaikan produksi perikanan budidaya dari tahun 2014 ke tahun 2015 adalah 7,75%, sedangkan perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 20,53%. Perbandingan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap pada tahun 2015 adalah 10:1. Untuk dapat memahami sasaran dan indikator keberhasilan pembangunan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2015, berikut ini disampaikan indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2015 sesuai RPJMD 2012-2017 dan capaiannya yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.57 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD	%		100	100	100	100	100
2.	produksi perikanan budidaya dan tangkap	ton	71.391,228	77.400	74.943,89*	96,83	96.900	77,34
3.	NTP sektor perikanan meningkat	%	119,92	116,89	122,34	104,66	106	115
4.	Jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim	orang	1.350	1.530	1.530	100	1.890	80,95
5.	Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya	dokumen	302	300	304	101,33	300	101,33
6.	Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total	rasio	1,4	0,11	1,42	1.290,91	0,17	835,29

*Ket: *) angka sementara*

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2016

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi sudah sesuai dengan sasaran pada tahun 2015 dan pencapaian terhadap target RPJMD. Realisasi persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD pada tahun 2015 sebesar 100% (capaian tahun 2015 sebesar 100% dari target). Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD pada tahun 2015 mencapai 100% dari target akhir RPJMD tahun 2017. Pencapaian realisasi persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program kegiatan tahun 2015.

Realisasi produksi perikanan budidaya dan tangkap tahun 2015 sebesar 74.943,89 ton dari target sebesar 77.400 ton atau realisasinya sebesar 96,83% dari target dengan perincian produksi perikanan budidaya sebesar 69.383,918 ton dan produksi perikanan tangkap sebanyak 5.559,972 ton. Realisasi produksi perikanan budidaya dan tangkap tahun 2015 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 3.552,662 ton. Produksi perikanan budidaya dan tangkap tahun 2015 mencapai 77,34% dari target akhir RPJMD tahun 2017.

Target produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 sebesar 70.500 ton sedangkan realisasi produksi perikanan budidaya sebanyak 69.383,918 ton. Target produksi perikanan budidaya belum tercapai karena pada tahun 2015 banyak pembudidaya yang tidak bisa memelihara ikan terkait faktor cuaca akibat kemarau panjang sehingga ketersediaan air menurun. Cuaca ekstrim juga berdampak pada penurunan produksi benih yang menyebabkan ketersediaan benih berkurang. Selain itu, produksi tambak udang juga menurun karena adanya penyakit.

Di sisi lain, terget produksi perikanan tangkap tahun 2015 sebesar 6.900 ton juga tidak dapat terpenuhi dalam realisasinya yang sebesar 5.559,97 ton. Target produksi perikanan tangkap belum tercapai karena jumlah trip melaut berkurang disebabkan adanya beberapa kapal yang tidak dapat beroperasi terkait surat-surat kapal yang sudah kedaluwarsa/ belum diperpanjang sehingga para nelayan tidak melaut Selain itu, pada tahun 2014 produksi ubur-ubur cukup tinggi yaitu kurang lebih 2.687,54 ton, namun pada tahun 2015 tidak ada musim ubur-ubur. Walaupun produksi perikanan tangkap tahun 2015 menurun namun nilai produksi perikanan tangkap tetap meningkat. Nilai produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar Rp80.107.612.000,-, sedangkan nilai produksi perikanan tangkap tahun 2015 sebesar Rp99.065.849.000,-.

NTP (Nilai Tukar Petani) sektor perikanan pada tahun 2015 sebesar 122,34 melebihi dari target tahun 2015 sebesar 116,89 atau realisasinya sebesar 104,66% dari target. NTP sektor perikanan pada tahun 2015 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,42. NTP sektor perikanan tahun 2015 mencapai 115% dari target akhir RPJMD tahun 2017. NTP sektor perikanan DIY tahun 2015 juga terlihat lebih baik bila dibandingkan dengan NTP tingkat nasional (105,15). NTP sektor perikanan yang meningkat ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan dan kelautan

dibanding tingkat pemanfaatan rumah tangga sehingga masih ada surplus pendapatan.

Jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim pada tahun 2015 sebanyak 1.530 orang sesuai dengan target tahun 2015 atau realisasinya sebesar 100% dari target. Jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim pada tahun 2015 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 180 orang. Jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim pada tahun 2015 mencapai 80,95% dari target akhir RPJMD tahun 2017. Peningkatan Jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim dicapai melalui kegiatan penyadaran masyarakat di kawasan pesisir DIY terhadap mitigasi bencana laut dan prakiraan iklim. Secara nasional DIY menyumbang 3 kawasan dari target nasional sejumlah 50 kawasan.

Realisasi jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya tahun 2015 sebanyak 304 dokumen melebihi dari target tahun 2015 sebanyak 300 dokumen atau realisasinya sebesar 101,33% dari target. Realisasi jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya tahun 2015 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 4 dokumen. Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya sampai tahun 2015 mencapai 101,33% dari target akhir RPJMD tahun 2017. Pencapaian peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dan fasilitasi pemerintah akan pentingnya ijin untuk usaha perikanan dan kelautan. Kontribusi capaian perijinan bila dibanding dengan target nasional sejumlah 10.000 ijin (perikanan tangkap), DIY mempunyai andil sebesar 0,03%.

Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total pada tahun 2015 sebesar 1,42 melebihi dari target tahun 2015 sebesar 0,11 atau realisasinya sebesar 1.290,91% dari target. Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total pada tahun 2015 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,02. Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total pada tahun 2015 mencapai 835,29% dari target akhir RPJMD tahun 2017. Pencapaian target rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total telah dilakukan melalui Pencadangan Kawasan Konservasi

Perairan di Kabupaten Gunungkidul dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 271/KPTS/2013 Tanggal 2 September 2013 dan Surat Keputusan Bupati Bantul No 284 tahun 2014 tentang pencadangan kawasan taman pesisir di Kabupaten Bantul tanggal 28 April 2014. Dan Secara nasional DIY berkontribusi sejumlah 2 (satu) lokasi dari target nasional sejumlah 641 lokasi.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di DIY, telah dijalin kerja sama yang secara resmi tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur (Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumberdaya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut meliputi pengembangan perikanan budidaya, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan kelautan dan pesisir, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Sementara itu, kemitraan dan kerjasama juga telah terjalin dengan Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer LAPAN untuk mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan di Bidang Kemaritiman dalam rangka mendukung keselamatan pelayaran dan perikanan di DIY. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *Decision Support System* (DSS) merupakan sistem berbasis komputer yang berfungsi memberikan informasi pengamatan berbasis satelit, radar, sensor di daratan dan lautan secara near real time serta prediksi kondisi atmosfer dan lautan di wilayah perairan selatan Yogyakarta berbasis model atmosfer/laut. Hal ini dapat dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung keselamatan pelayaran dan peningkatan produksi perikanan tangkap. Pada akhirnya diharapkan sistem ini dapat memberikan manfaat bagi para nelayan dalam hal keselamatan dan kesejahteraan nelayan.

4.3.2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melaksanakan 11 (sebelas) program dengan 62 (enam puluh dua) kegiatan. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015 sebanyak Rp51.250.947.223,00. Realisasi capaian kinerja fisik Dinas Kelautan dan Perikanan DIY sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar 100% dan capaian kinerja anggaran sebesar 90,82% atau Rp46.547.518.273,00. Pencapaian realisasi anggaran sebesar 90,82% tersebut

disebabkan adanya efisiensi sisa pembangunan fisik pada kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan dan pengembangan sarana prasarana pembenihan (DAK), dan terdapat efisiensi honor instruktur/narasumber pada kegiatan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil dan peningkatan pelayanan pelabuhan.

4.3.2.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Kurang optimalnya pengelolaan kapal Inka Mina 30 GT disebabkan keterbatasan jumlah sumberdaya nelayan yang mampu mengoperasionalkan kapal inkamina 30 GT.
- Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempunyai kawasan konservasi, yaitu Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Wediombo dengan zona inti seluas 420 ha, kawasan konservasi taman pesisir di Patehan seluas 50 ha, dan kawasan konservasi mangrove di Baros seluas 132 ha. Namun kelembagaan pengelola kawasan konservasi belum terbentuk.
- Budidaya udang di tambak memiliki prospek yang menarik dikarenakan nilai ekonomis udang yang tinggi. Namun masih ada tambak udang yang dibangun pada lokasi yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukannya antara lain, terlalu dekat dengan JJLS, berada di daerah sempadan pantai, Gumuk Pasir, ataupun kawasan konservasi.
- Permasalahan pokok pada produksi perikanan budidaya adalah kendala harga pakan yang relatif mahal dan cenderung naik.
- Pelabuhan Tanjung Adikarta belum dapat beroperasi pada tahun 2015, dikarenakan pembangunan fasilitas pelabuhan belum selesai pada akhir tahun 2015. Pengerukan kolam pelabuhan Tanjung Adikarta tidak maksimal (masih dangkal). Alur masuk pelabuhan juga mengalami pendangkalan sehingga kapal 30 GT tidak bisa masuk pelabuhan dan hanya bisa dimasuki kapal < 30 GT.

B) Solusi

- Melakukan pelatihan nelayan (ATKAPIN, ANKAPIN, BST, Navigasi dan lain-lain), pelatihan kader nelayan serta melakukan pemagangan dan pendampingan nelayan dengan awak yang berpengalaman.

- Pencadangan kawasan konservasi akan ditindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan satuan organisasi pengelola kawasan konservasi Perairan di tingkat pemerintah.
- Penataan tambak udang dilakukan secara komprehensif antara pemangku kepentingan dengan melibatkan petambak dan unsur lain yang terkait. Penataan tambak dilakukan dengan merelokasi tambak udang ke kawasan yang sesuai peruntukannya.
- Bekerjasama dengan perguruan tinggi (UGM) untuk membuat pakan alternatif yang harganya lebih murah namun kualitasnya baik. Selain itu, terhadap kelompok-kelompok yang telah memproduksi pakan dengan bahan baku lokal juga diberikan fasilitasi.
- Pada tahun 2016 akan dilaksanakan ujicoba tambat labuh di Pelabuhan Tanjung Adikarta dan akan dilakukan review DED Pelabuhan Tanjung Adikarta untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan pelabuhan seiring dengan berbagai perkembangan yang terjadi hingga tahun 2015.

4.3.3 Urusan Pertanian

4.3.3.1 Kondisi Umum

Tantangan utama pembangunan adalah pencapaian kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan sektor pertanian. Jumlah penduduk yang besar menjadi modal dasar sekaligus pertimbangan penting bagi penentuan arah kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Oleh karena itu, pertanian selalu menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian menuju era industrialisasi.

Terdapat sejumlah masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian terutama dalam hal peningkatan produksi pangan. *Pertama*, keterbatasan lahan produktif sebagai input pokok usahatani. Pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan lonjakan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan berbagai sarana dukung kehidupan masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan industri telah mempersempit lahan pertanian beririgasi teknis. Hal ini diperparah dengan stagnasi laju peningkatan produktivitas (*yield*) komoditas pertanian. *Kedua,* pasokan air untuk pertanian juga berkurang. Banyak saluran irigasi rusak dan perlu rehabilitasi, dan banyak juga yang tidak terhubung dengan saluran sekunder dan primer. *Ketiga,* anomali iklim seperti fenomena *El Nino* akibat pengaruh

pemanasan global yang berakibat pada musim hujan dan curah hujan tidak normal sehingga menciptakan ketidakpastian bagi petani untuk berusahatani. *Keempat,* masalah tenaga kerja. Dalam struktur makro ekonomi, tenaga kerja di sektor pertanian menempati posisi ketiga, menyusul sektor perdagangan dan sektor jasa. Meskipun dengan pertumbuhan yang kecil, jumlah orang yang bekerja di sektor ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan pada sektor keuangan, industri pengolahan, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi. Dengan beban tenaga kerja yang berat sementara pertumbuhan output rendah, mudah dipahami jika pendapatan per kapita di sektor pertanian rendah. Hal terakhir ini barang tentu menjadi penghalang bagi tenaga kerja produktif dan pemuda untuk bekerja di sektor pertanian.

Sektor pertanian tetap diharapkan berkontribusi besar dalam perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat kontribusi peluang kerja di sektor ini masih besar di samping luasan lahan pertanian terutama lahan kering di Daerah Istimewa Yogyakarta masih signifikan.

Tabel 4.58 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah produksi tanaman pangan	ton	2.193.605	2.356.600	2.203.235	93,49	2.208.665	99,75
2.	Jumlah produksi hortikultura	ton	383.913	387.000	389.573	100,66	394.800	98,68
3.	Jumlah populasi ternak	Animal unit	607.709	700.516	616.000	87,93	641.416	96,04
4	Persentase peningkatan NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan	%	-1,19 (99,45)*	1,7 (101,14)	-0,99 (98,.39)*	-58,82 (97,28)*	8,5 (99)*	99,38
5.	Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu	komoditas	3	3	3	100	15	60,00
6.	NTP Sektor Perkebunan	%	141,28	128	139,75	109,18	132	119,44
7.	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	80.084	88.000	82.379,82	93,61	91.600	102,78

*Sumber: Analisis Dinas Pertanian DIY 2016; * ada penyesuaian indikator pada 2017*

Indikator jumlah produksi tanaman pangan tahun 2015 sebesar 2.203.235 ton sedikit di bawah target sebesar 2.356.600 ton (93,49%). Walaupun demikian produksi komoditas strategis padi sebesar 923.343 ton GKG melampaui target (915.123 ton), begitu juga produksi kacang tanah tahun 2015 sebesar 81.227 ton biji kering dari target 68.802 ton. Namun penurunan cukup nyata terjadi pada ubi kayu, tercapai 881.131 ton dari target 990.596. Penurunan produksi ubi kayu antara lain disebabkan oleh penurunan luas tanam/panen sekaligus penurunan produktivitas selama tahun 2015, di samping ubi kayu bukan merupakan tanaman pokok, di Kabupaten Gunungkidul yang merupakan sentra ubi kayu dalam pengelolaan tanaman ini hanya menjadi sampingan saja dengan pola tumpang sari. Sementara itu, produksi kedelai yang dicapai lebih rendah dibandingkan dengan sasaran 2015 dan capaian tahun 2014, akibat penurunan luas tanam/panen dan produktivitas. Selain itu karena harga kedelai yang kurang menarik maka petani tidak banyak yang berminat untuk menanam.

Indikator kinerja jumlah produksi hortikultura tahun 2015 sebesar 389.573 ton telah melebihi target dan meningkat dibandingkan dengan tahun 2014, peningkatan produksi tanaman hortikultura unggulan di DIY tahun 2015 meningkat sebesar 3,03% dibanding tahun 2014.

Tabel 4.59 Produksi Hortikultura Unggulan di DIY Tahun 2014-2015

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2014	2015*
1.	Cabai besar	ton	17.759	23.189
2.	Cabai rawit	ton	3.168	3.239
3.	Bawang merah	ton	12.360	8.783
4.	Salak	ton	75.751	73.282
5.	Jamur	ton	1.396	1.431
6.	Jahe	ton	3.374	4.614
7.	Durian	ton	7.894	8.303
8.	Jambu air	ton	2.430	3.011
9.	Nangka	ton	26.870	27.438
10.	Rambutan	ton	23.069	24.174

*Keterangan: Angka Tetap 2014, * Angka Sementara = 2015*

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2016

Produksi komoditas unggulan yang naik dari tahun 2014 adalah cabai merah, cabai rawit, jamur, jahe, durian, jambu air, nangka dan rambutan. Peningkatan produksi cabai ditunjang adanya tambahan anggaran dari APBN-P yang diberikan khusus untuk meningkatkan produksi cabai pada saat *off season*. Berbagai upaya perbaikan teknologi budidaya dengan penerapan GAP/SOP, fasilitasi sarana prasarana dan penanganan pasca panen yang lebih baik turut berperan dalam peningkatan produksi hortikultura.

Realisasi indikator populasi ternak tahun 2014 sebesar 607.709 animal unit dibandingkan tahun 2015 sebesar 616.000 animal unit, mengalami kenaikan sebesar 8.291 (1,36%) animal unit. Kenaikan populasi komoditas ternak total di DIY relatif kecil, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala antara lain: belum terbebasnya penyakit AI pada ternak unggas dan target bebas AI di DIY pada tahun 2020; keterbatasan penyediaan pakan hijauan ternak; sekitar 70 % total sapi potong sudah mengalami persilangan yang menyebabkan gangguan reproduksi; kebijakan pemerintah yang membatasi mutasi ternak betina produktif antar daerah sehingga tidak dapat memperroleh indukan yang berkualitas dari daerah lain.

Indikator nilai tukar petani (NTP) menunjukkan capaian NTP untuk rerata tanaman pangan, dan hortikultura menunjukkan kenaikan indek capaian dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan rerata peternakan menunjukkan capaian yang menurun daripada tahun sebelumnya.

Capaian NTP sub sektor tanaman pangan naik 0,71%, sub sektor hortikultura naik 0,69% dan sub sektor peternakan turun 4,33%, secara indek capaian rerata NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan pada tahun 2015 sebesar 98,39 (dengan rincian NTP subsektor tanaman pangan sebesar 97,57, NTP sub sektor hortikultura sebesar 98,47, dan NTP sub sektor peternakan sebesar 99,12). Capaian rerata NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan sebesar 98,39, memiliki tingkat capaian dengan persentase sebesar 98,93% dibandingkan tahun 2014 (capaian sebesar 99,45).

NTP Sub sektor peternakan yang terdiri atas ternak besar, kecil dan unggas dan hasil ternak lainnya menurun akibat indeks harga yang diterima petani (It) lebih kecil dari indeks yang harus dibayar petani (Ib). Kenaikan harga yang diterima

petani karena meningkatnya harga kelompok ternak besar tidak sebanding dengan kenaikan indeks harga yang harus dibayarkan petani. Selain itu, adanya dampak fluktuasi harga BBM pada tahun 2015, menyebabkan adanya perubahan pola konsumsi petani yang tidak seimbang dengan stagnasi pendapatan petani. Kenaikan harga sejumlah barang pokok untuk konsumsi, tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan petani yang cenderung stagnan. Demikian pula dengan penurunan NTP sektor perkebunan disebabkan oleh hal yang senada dengan kondisi NTP sub sektor peternakan.

Tabel 4.60 NTP 2015 dibandingkan 2014

No	Nilai Tukar Petani (NTP)	2014	2015
1	Pertanian Pangan	96,88	97,57
2	Pertanian Hortikultura	97,86	98,47
3	Peternakan	103,60	99,12
4	Perkebunan	141,28	109,18

Sumber: BPS DIY, 2016

Produksi komoditas perkebunan pada tahun 2015 adalah sejumlah 82.379,82 ton, meningkat sejumlah 2.295,34 ton (2,87%), apabila dibandingkan produksi tahun 2014 sejumlah 80.084,48 ton. Namun demikian kenaikan produksi perkebunan belum dapat memenuhi target produksi tahun 2015 yaitu sejumlah 88.000 ton. Hal ini sebagai akibat adanya alih fungsi lahan baik pemanfaatan lahan untuk pembangunan sektor lain maupun peralihan pemanfaatan lahan dari lahan perkebunan menjadi usaha tani komoditas non perkebunan, disamping juga akibat adanya perubahan/ anomali iklim yang sulit diprediksi pada beberapa tahun terakhir.

4.3.3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015

Jumlah total anggaran yang dibiayai melalui APBD DIY Tahun Anggaran 2015, untuk urusan pertanian, adalah sebesar: Rp32,722,876,554,00 yang didukung oleh 11 program dan 117 kegiatan. Dari keseluruhan anggaran urusan pertanian tersebut, terbagi atas anggaran yang dikelola Dinas Pertanian (subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan) dan Dinas Kehutanan Perkebunan (sub sektor perkebunan).

Dinas Pertanian melaksanakan 9 Program dan 98 kegiatan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp30.867.146.679,00 atau 87,30% sedangkan sisanya sebesar Rp1.855.729.875,00 atau 5,45% Alokasi anggaran untuk urusan perkebunan yang dikelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY.

Total serapan anggaran untuk urusan pertanian tahun 2015 sebesar Rp30.351.557.428,00 atau sebesar 92,75%. Persentase serapan untuk Dinas Pertanian DIY sebesar Rp28.568.094.614,00 (92,55%) dan serapan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY sebesar Rp1.783.462.814,00 (96,11%). Adapun adanya sisa anggaran pada pelaksanaan urusan pertanian, secara umum disebabkan adanya: sisa lelang pengadaan barang/jasa, efisiensi dan efisiensi belanja. Sedangkan fisik untuk urusan pertanian sudah memberikan capaian yang sudah baik. Kinerja fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian DIY mencapai 99,69% hal ini dikarenakan adanya perubahan kelompok dalam pemberian hibah kepada masyarakat terkait dengan penyesuian dengan UU 23 tahun 2014, sedang kinerja fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas kehutanan dan perkebunan terealisasi 100%.

Diketahui bahwa Realisasi anggaran TA. 2015 sebesar 92,55%, sisa anggaran disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran.

4.3.3.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan NTP.
- Peningkatan populasi ternak masih rendah, terkendala oleh adanya PHMS dan sebagian peternak belum menerapkan SOP yang baik
- Petani pekebun belum optimal dalam mengelola usaha taninya dan belum memenuhi baku teknis, sehingga produksi dan kualitas produk tanaman perkebunan belum optimal.

B) Solusi

- Upaya yang dilakukan guna meningkatkan skor NTP adalah dengan meningkatkan pendapatan petani dan menekan tingkat konsumsi

masyarakat petani. Peningkatan pendapatan dilakukan melalui pendekatan agribisnis pertanian, yakni:

a. Menyusun SOP dan mendorong penerapan GMP (*Good Manufacturing Practices*) serta GHP (*Good Handling Practices*) pada tahap pascapanen, pengolahan hasil panen hingga pemasaran produk hasil pertanian;
b. Penerapan sistem budidaya SOP (*Standard Operasional Procedure*) dan penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*) pada beberapa produk hortikultura unggulan daerah (salak, pisang, mangga, jamur, melon, cabai merah, bawang merah, buah naga, srikaya);
c. Meningkatkan upaya pemberdayaan kelembagaan kelompok tani melalui fasilitasi Dana Penguatan Modal Pemasaran Hasil Pertanian (DPM-PHP);
d. Memberikan fasilitasi penanganan pascapanen dan pengolahan hasil untuk meningkatkan akseptabilitas konsumen nilai tambah produk;
e. Meningkatkan promosi produk unggulan, membangun jejaring kemitraan berbasis wilayah strategis dan melakukan promosi melalui keikutsertaan dalam Even tingkat lokal, regional, maupun nasional.

- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan populasi ternak dengan fasilitasi pendampingan penerapan SOP dan pengawasan dan pengendalian kesehatan ternak untuk mencegah PHMS.
- Skema agribisnis untuk memberikan nilai tambah dan daya saing produk.

4.3.4 Urusan Kehutanan

4.3.4.1 Kondisi Umum

Kelestarian Hutan memiliki arti yang penting dalam menjaga kondisi fungsi hidro-orologis wilayah dan mendukung keberlangsungan hidup ekosistem yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan dilakukan secara komprehensif, yakni melalui pendekatan: lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi yang terintegrasi. Pengelolaan hutan lestari menjadi pijakan dalam melakukan pengelolaan hutan di DIY, baik pada wilayah hutan negara maupun hutan rakyat.

Tabel 4.61 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Status dan Kewilayahan Tahun 2015

Kabupaten	Hutan Negara (ha)	Hutan Rakyat (ha)	Total Hutan (ha)	% Total hutan
Gunungkidul	14.895,50	42.569,96	57.465,46	60,24
Bantul	1.052,60	8.595,00	9.647,60	10,11
Sleman	1.729,46	4.756,11	6.485,57	6,80
Kulon Progo	1.037,50	20.759,41	21.796,91	22,85
Hutan di DIY	18.715,06	76.680,48	95.395,54	100,00

Sumber: Analisis data Dishutbun DIY & BPS DIY, 2016

Luas hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2015 adalah sebesar 95.395,54 hektar atau sebesar 29,94% dari luas wilayah DIY (3.185,18 km²). Sebagian besar hutan di DIY merupakan hutan rakyat (seluas 76.680,48 hektar atau setara dengan 24,07%) dan sisanya merupakan hutan Negara (seluas 18.715,06 hektar atau 5,87%). Kabupaten yang memiliki wilayah hutan terluas di DIY adalah kabupaten Gunungkidul sebesar 60,24%, dari jumlah tersebut luas hutan rakyatnya sebesar 44,62%. Vegetasi dominan yang tumbuh pada hutan rakyat adalah: tanaman jati, akasia, mahoni, sengon, dan sonokeling. Sedangkan vegetasi pada hutan Negara didominasi oleh hutan produksi dengan jenis tanaman jati dan tanaman kayu putih.

Gambar 4.24 Sebaran Vegetasi Hutan Di DIY

Dalam RPJMD DIY tahun 2012-2017, urusan kehutanan memiliki indikator kinerja utama sebanyak 5 (lima) indikator kinerja. Yaitu: peningkatan produksi hasil hutan, persentase jumlah industri primer hasil hutan kayu yang telah dibina, Luas lahan kritis, Persentase kerusakan hutan, dan persentase luas hutan. Realisasi capaian kinerja seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4.62 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Peningkatan produksi hasil hutan	%	5,51	5,59	5,29	94,63	7,32	72,27
2.	Persentase jumlah industri primer hasil hutan kayu yang telah dibina	%	120	80	90	112,50	90	100
3.	Luas lahan kritis	ha	25.789,75	26.000	25.378,25	102,39	24.000	94,26
4.	Persentase kerusakan hutan	%	8,56	29,14	7,03	175,86	23,77	170,42
5.	Persentase luas hutan	%	29,78	27,63	29,94	108,36	27,85	107,50

Sumber: Analisis Dishutbun DIY, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa peningkatan produksi hasil hutan (kayu, minyak kayu putih, getah pinus dan kayu rakyat) pada tahun 2015 tidak memenuhi target yaitu total peningkatan hanya mencapai sebesar 5,29% dari target total peningkatan produksi hasil hutan sebesar 5,59%. Tidak tercapainya target peningkatan produksi hasil hutan disebabkan dari hasil sadapan getah pinus yang hanya mencapai sebesar 30.996 ton atau penurunan setara 73,52%, karena dari hasil kajian dan rekomendasi tenaga ahli kehutanan untuk menjaga kelestarian hutan pinus, maka penyadapan getah pinus sebaiknya dihentikan.

Sumbangan peningkatan produksi hasil hutan yang cukup besar terjadi pada produksi kayu sebesar 138,12 m^3 setara dengan peningkatan produksi sebesar 243,51%. Hasil kayu tersebut terdiri dari kayu hasil tebangan terencana sebesar 123,34 m^3, dan kayu hasil sitaan barang bukti serta kayu roboh akibat bencana alam sesebesar 14,78 m^3.

Capaian peningkatan produksi hasil hutan juga diimbangi dengan peningkatan persentase luas hutan. Peningkatan luas hutan di DIY tahun 2015 terjadi akibat bertambahnya luasan hutan rakyat, sejumlah 667,59 ha atau meningkat 0,88% dibandingkan tahun 2014. Peningkatan luas hutan rakyat tersebut juga memberikan implikasi adanya penurunan luas lahan kritis. Luas lahan kritis di DIY tahun 2015 sebesar 25.378,25 ha atau turun setara 1,60% dibandingkan tahun 2014. Hal ini menunjukkan capaian positif, karena luas lahan kritis DIY dibawah angka luasan target sebesar 26.000 ha. Peningkatan luas hutan rakyat dan berkurangnya lahan kritis, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi hutan lestari, semakin baik dari waktu ke waktu.

Gangguan kerusakan hutan di DIY menurun menjadi 7,03% pada tahun 2015, dibanding data tahun 2014 sebesar 8,56%, Artinya terjadi penurunan sebesar 1,53%. Bertambahnya kasus kerusakan hutan sebagai akibat adanya kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan melalui skema pemberdayaan memiliki implikasi yang positif, disamping adanya faktor upaya optimalisasi pengamanan hutan. Keberhasilan sejumlah pembangunan kehutanan tersebut diatas, juga memiliki pengaruh pada dimensi ekonomi dan sosial, disamping aspek lingkungan yang sudah dijelaskan diatas. Hal tersebut menunjukkan hutan memiliki peran signifikan dalam menjaga keserasian hubungan antara masyarakat dan alam secara berkelanjutan.

Aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu menunjukkan pergerakan yang positif dengan indikator capaian jumlah industri primer hasil hutan yang dibina sebanyak 90 industri (112,50%). Pembinaan industri hasil hutan diharapkan mampu meningkatkan produk hasil hutan yang memiliki nilai tambah dan daya saing secara berkelanjutan sehingga memiliki implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat atas hutan secara lestari.

4.3.4.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY merupakan SKPD yang mempunyai tugas utama dalam pengelolaan urusan kehutanan. Program kegiatan pada tahun 2015, yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi kinerja untuk mendukung capaian sasaran urusan kehutanan dilakukan melalui skema penganggaran APBD DIY Tahun

Anggaran 2015. Dukungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dalam menangani urusan kehutanan, memiliki sejumlah program dan kegiatan yang terdiri dari: 5 (lima) program teknis dengan 18 (delapan belas) kegiatan.

Alokasi anggaran untuk urusan kehutanan yang dikelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, sebesar Rp13.340.056.075,00. Realisasi serapan anggaran/keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kehutanan senilai Rp12.168.918.835,00 atau sebesar 91,22%. Adapun untuk realisasi fisik pelaksanaan urusan kehutanan sebesar 99,53%. Deviasi capaian realisasi fisik sebesar 0,47%, disebabkan adanya dua kegiatan yang memiliki realisasi fisik < 100% dengan penjelasan secara umum sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman: realisasi fisik sebesar 88,67%, ini terjadi karena pelaksanaan pekerjaan penyadapan getah pinus hanya tercapai sebesar 30.996 ton atau terjadi penurunan produksi setara 73,52%. Penurunan produksi disebabkan umur tanaman pinus yang sudah kurang produktif dan bidang sadap pada batang tanaman sudah tidak bisa optimal, sehingga produksi getah pinus tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari aspek kelestarian lingkungan untuk mempertahankan nilai fungsi hutan, maka konservasi hutan tanaman pinus harus dilakukan secara berkelanjutan, dan diperlukan masa tenggang untuk rehabilitasi tanaman pinus dimaksud.
2. Kegiatan Pengembangan Konservasi Alam Wana Lestari: realisasi fisik sebesar 93%, hal ini disebabkan pelaksanaan Jambore Nasional dibatalkan berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 5.44/IX-LUH/2015 tertanggal 6 Maret 2015 sehingga pekerjaan yang sudah dijadwalkan dan alokasi anggaran telah disusun tidak dapat dilaksanakan.

4.3.4.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Dalam rangka optimasilasi hutan pinus sebagai kawasan hutan lindung, pengelolaan hutan tanaman pinus tidak lagi disadap getahnya, sehingga hutan difungsikan pariwisata (Jasa lingkungan).

- Pengelolaan hutan negara masih belum optimal, terutama yang terkait dengan pengkayaan tegakan/ populasi dan luas areal tanaman kayu putih produktif, untuk peningkatan produksi daun kayu putih sebagai bahan baku minyak kayu putih dan mengoptimalkan kapasitas giling pabrik minyak kayu putih yang sudah ada.

B) Solusi

- Konservasi/ rehabilitasi hutan tanaman pinus terus dilakukan, hal ini untuk mempertahankan fungsi hutan pinus sebagai hutan lindung untuk kelestarian lingkungan serta mengupayakan pengalihan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan pinus, dari tenaga penyadap getah pinus menjadi pemandu/ penggiat pariwisata alam.
- Peninjauan ulang terkait tata waktu baik dari aspek penganggaran kegiatan pembuatan bibit/ benih tanaman kehutanan dan penanaman dalam rangka optimalisasi/ rehabilitasi tegakan tanaman kayu putih, dengan harapan pengelolaan hutan Negara yang terkait dengan peningkatan produksi hasil kehutanan khususnya minyak kayu putih dapat dilakukan secara optimal.

4.3.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

4.3.5.1 Kondisi Umum

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintahan konkuren di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang meliputienergi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah, serta sumber daya mineral, menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, antara lain dalam hal pelaksanaan perizinan,pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Adapun pelaksanaan pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi menjadi kewenangan penuh Pemerintah Pusat. Kondisi ini menyebabkan adanya kegiatan yang harus dialihkan pendanaannya karena kewenangan Pemerintah Provinsi yang berkurang disatu sisi dan bertambah disisi lainnya.

Dengan berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prioritas pelaksanaan program dan kegiatan urusan ESDM di Tahun

2015diarahkan ke peningkatan pelayanan publik berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD dan upaya pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PUP & ESDM DIY tahun 2013 -2017.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pasca terbitnya UU nomor 23 Tahun 2014, telah disusun regulasi urusan ESDMagar pelayanan publik tetap bisa berjalan yang meliputi:

1. Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas PUP&ESDM DIY;
2. Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2015 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;
3. Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;
4. Peraturan Gubernur Nomor 110 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat.
5. Dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, telah dipersiapkan perhitungan Nilai Perolehan Air tanah (NPA) dan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai dasar pengenaan pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan di Daerah.

Gambar 4.25 Pemberian Penghargaan Energi Prabawa 2015 kepada Pemerintah Daerah DIY

Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIYdianggap berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan memacu program kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan sehingga pada tahun 2015 mendapatkan Penghargaan Energi Prabawa 2015.

Berdasarkan Perda DIY Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah TAHUN 2012–2017, sasaran pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral adalah meningkatnya akses energi dengan indikator kinerja penduduk berakses energi.

Tabel 4.63 Target dan Realisasi Kinerja Urusan ESDM Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017) (%)	Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Penduduk berakses energi	%	N/A	92	93,14	101,23	94	99,09

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2016

Peningkatan akses energi ditempuh melalui ketersediaan ketenagalistrikan dan bahan bakar minyak dan gas. Upaya pemenuhan ketenagalistrikan dilakukan melalui program pembinaan, pengawasan dan pengembangan ketenagalistrikan, program pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi. Pada akhir tahun 2014, pencapaian rasio elektrifikasi di DIY adalah sebesar 82,70%. Sedangkan realisasi pencapaian rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2015 sebesar 86,27% melalui penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 54.822 RT meliputi:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan APBD DIY tahun 2015, sebanyak 1500 RT;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten tahun 2015, sebanyak 31 RT;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan APBN 2015, sebanyak 2.257 RT;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Gunungkidul, sebanyak 49 RT;
5. Dari dana Non PLN dan swadaya masyarakat, sebanyak 50.985 RT

Pada tahun 2015 pemenuhan bahan bakar minyak dan gas sudah mencapai 100%. Kebutuhan bahan bakar minyak dan gas untuk rumah tangga di DIY sebagian besar dipasok oleh PT. Pertamina (Persero). Berdasarkan capaian ratio elektrifikasi dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar maka capaian kinerja penduduk berakses

energi pada tahun 2015 sebesar 93,14 % atau telah mencapai 101,23 dari target, Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017, telah mencapai 99,09%.

4.3.5.2 Program dan Kegiatan TahunAnggaran 2015

Pada tahun anggaran 2015, urusan ESDM dilaksanakan melalui 3 program utama dan 2 program pendukung meliputi 16 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp18.166.231.683,00 (92,30%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

4.3.5.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan sub urusan bidang minyak dan gas menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga pengawasan distribusi sudah tidak dilaksanakan oleh pemda

B) Solusi

Untuk upaya pengawasan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas harus berkoordinasi dengan Pemerintah pusat, PT.Pertamina (Persero) dan Hiswana Migas DIY.

4.3.6 Urusan Perindustrian

4.3.6.1 Kondisi Umum

Tahun 2015 sektor industri pengolahan memberikan sumbangan sekitar 12,76% dalam struktur PDRB DIY. Sektor industri memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah produk-produk DIY dan penyerapan tenaga kerja.

Jumlah IKM DIY dari tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukan pertumbuhan yang positif. Rata-rata pertumbuhan jumlah IKM DIY setiap tahunnya sebesar 2,58%. Pada tahun 2015 jumlah IKM

meningkat sebesar 2,96% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah unit usaha tersebut diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,44 % dari sebesar 318.858 pada tahun 2014 menjadi 326.669 orang pada tahun 2015.

Tabel 4.64 Perkembangan IKM di DIY

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Unit Usaha	80.056	81.523	84.234	86.087	88.637
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	295.461	300.539	310.173	318.858	326.669
Nilai Investasi (Rp Milyar)	1.003.678	1.010.585	1.064.180	1.151.443	1.187.754
Nilai Produksi (Rp Milyar)	3.053.031	3.199.224	3.294.485	3.399.909	3.489.769
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp. Milyar)	1.352.479	1.388.023	1.449.435	1.524.806	1.550.832

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2016

Peningkatan nilai produksi pada tahun 2015 adalah sebesar 2,64% dibandingkan dengan tahun 2014 atau dari sebesar Rp3.399.909 Miliyar pada tahun 2014 menjadi Rp3.489.769 Miliyar pada tahun 2015.

Tabel 4.65 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	Juta Rupiah	10.469.637	3.271.732	10.652.525	325,59	3.530.122	301,76

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2016

Indikator untuk menunjukan kinerja pembangunan sektor Industri sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD DIY 2012-2017 adalah Nilai Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY. Tahun 2015 Nilai Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY adalah sebesar Rp10.652.525 Juta atau sebesar 325,59 % jika dibandingkan dengan target. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017 nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB DIY sudah mencapai 301,76%.

4.3.6.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Dalam rangka mendorong pertumbuhan IKM di DIY Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif dengan total pagu sebesar Rp2.595.637.000,00. Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp2.466.921.545,00 atau 95,04% dari pagu. Capaian realisasi fisik pada Urusan Industri sebesar 100% sedangkan realisasi keuangannya sebesar 96,04%.

4.3.6.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Dalam menjalankan usahanya, IKM memerlukan legalitas usaha, namun sampai saat ini sebagian besar IKM belum memiliki legalitas usaha. Hal ini akan berdampak pada terkendalanya pengembangan usaha mereka, misalnya keterbatasan dalam mengakses sumber permodalan dan tidak diperolehnya fasilitasi dari pemerintah karena terkendala persyaratan legalitas usaha.
- Masih terbatasnya sumber daya manusia dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, modal, dan akses terhadap pasar modern.
- Terbukanya pasar bagi produk-produk IKM DIY belum diikuti dengan jaminan mutu dan sertifikasi produk
- Penyediaan sebagian bahan baku industri masih tergantung pasokan dari daerah lain.

B) Solusi

- Perlunya pendampingan dan fasilitasi terhadap IKM akan pentingnya legalitas usaha.
- Melakukan peningkatan kemampuan IKM melalui pelatihan manajemen, teknologi, inovasi produk, pemasaran, dan kemitraan dengan lembaga permodalan.
- Melakukan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi terhadap hasil produk industri seperti SVLK, SPIRT, GMP,MD, Halal, HAKI, HaKi dan SNI Wajib bagi IKM.

- Melakukan kemitraan antara IKM DIY dengan mitra penyedia bahan di luar DIY, seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan daerah lainnya dalam rangka penyediaan bahan baku. Selain itu akan dilakukan koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan bahan baku yang dapat diproduksi sendiri.

4.3.7 Urusan Perdagangan

4.3.7.1 Kondisi Umum

Kinerja Perdagangan Luar Negeri DIY menunjukan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri ditunjukkan dengan pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan nilai ekspor DIY setiap tahun rata-rata sebesar 14,16%. Nilai Ekspor DIY pada tahun 2015 tercatat US$ 242,47 Juta. Jumlah tersebut meningkat sebesar 3,95% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Peningkatan ekspor DIY terutama didukung oleh komoditas utama ekspor yaitu pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, minyak atsiri, kerajinan kayu, STK sintetis, kulit disamak, kerajinan batu, kerajinan kertas, mebel rotan, kerajinan rotan, produk tekstil lainnya, teh hijau/hitam, papan kemas, kerajinan perak, arang kayu, kerajinan tanah liat, kerajinan bambu, kerajinan kulit, dan salak. Tujuan ekspor komoditas DIY terutama Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Belanja, Italia, Australia, Perancis, China, Inggris, Belgia, Malaysia, Kanada, Spanyol, India, Turki, Uni Emirat Arab, Thailand, Iran dan Portugal.

Tabel 4.66 Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Volume (Juta kg)	27	33,54	34,03	57,51	56,90
Nilai (Juta US $)	144	177,07	211,76	233,25	242,47
Komoditi	102	108	127	166	110
Negara	87	98	111	114	115
Eksportir	208	235	286	310	325

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2016

Tahun 2015, sektor perdagangan memberikan sumbangan sekitar 17,72% dalam struktur PDRB DIY atau sebesar Rp14.787.035 Juta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY mengalami peningkatan sebesar 6% atau sebesar Rp832.906 Juta.

Tabel 4.67 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2015terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB DIY	Juta Rupiah	13.954.129	6.077.411	14.787.035	243,31	6.961.756	212,40
2	Jumlah UTTP (Ukur Tambang Takar dan Perlengkapannya) Yang Ditera dan Ditera Ulang.	Unit	242.064	234.000	261.336	111,68	247.500	105,59

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2016

Indikator Kinerja Pembangunan sektor Perdagangan terbagi menjadi Dua yaitu Nilai Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB DIY dan Jumlah UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya) Yang Ditera dan Ditera Ulang. Nilai Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB DIY merepresentasikan Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Capaian target Nilai Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB DIY pada tahun 2015 sebesar 243,31%.

Indikator Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang mewakili aspek perlindungan terhadap konsumen. Dengan meningkatnya jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang, Pemda DIY mengupayakan jaminan atas tertibnya alat ukur yang digunakan di pusat perdagangan. Pada tahun 2015 sebanyak 261,336 UTTP berhasil dilakukan peneraan. Realisasi capaian tersebut sebesar 111,68% dari target yang ditetapkan. Secara tahunan, jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang tahun 2015 meningkat sebesar 7,96% dibandingkan tahun 2014.

4.3.7.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pembangunan sektor Perdagangan DIY dilaksanakan melalui 3 Program utama yaitu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Eksporserta Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Adapun pagu anggraran untuk Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan sebesar Rp672.636.350,00 dengan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp650.688.600,00 atau 96,73%, sedangkan capaian Fisik 100%.

4.3.7.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Beberapa jenis bahan pokok untuk saat-saat tertentu terjadi gejolak harga yang disebabkan karena mekanisme pasar, faktor distribusi, ekspektasi pasar, faktor kebijakan pemerintah dan faktor produktivitas yang menurun.
- Kebutuhan pasar atas produk-produk UKM masih terbuka lebar namun upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran masih belum optimal terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas.
- Pesatnya pertumbuhan pusat-pusat perdagangan DIY yang menjual produk luar DIY memberikan dampak pada peningkatan barang beredar. Pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar belum optimal.
- Dalam rangka meningkatkan nilai ekspor DIY, perlu diperhatikan juga ketersediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukungnya. Akan tetapi di DIY infrastuktur dan sarana prasarana pendukung ekspor seperti pelabuhan ekspor, dan kawasan berikat belum memadai.

B) Solusi

- Pemantauan secara kontinu masih perlu dilakukan dan ditindak lanjuti dengan koordinasi intensif dengan pelaku pasar serta melakukan kerjasama dengan daerah lain yang menjadi pemasok bahan pokok, agar ketersediaan stok bisa tercukupi dan berimbas kepada stabilitas harga.
- Peningkatan kapasitas jaringan pemasaran bagi UKM DIY dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta peningkatan nilai tambah,

kualitas dan diversifikasi produk agar dapat diterima oleh pasar mancanegara dan pasar dalam negeri.

- Melakukan upaya pemantauan kualitas barang beredar termasuk mengadakan pengujian mutu secara kontinu serta meningkatkan jaminan mutu atas produk-produk yang dihasilkan UKM DIY. Selain itu diperlukan penegakan hukum secara terpadu agar bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar.
- Mendorong terwujudnya infrastruktur seperti pelabuhan ekspor, bandara yang memadai untuk kepentingan ekspor dan kawasan berikat guna meningkatkan pengembangan ekspor.

4.3.8 Urusan Ketransmigrasian

4.3.8.1 Kondisi Umum

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan melalui Kerja Sama Antar Daerah serta difasilitasi oleh pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan sedangkan pemerintah daerah sebagai pelaksana.

Tabel 4.68 Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2012-2015

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2012	165
2	2013	150
3	2014	70
4	2015	100

Sumber: Disnakertrans DIY, 2016

Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah pengirim transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. kerjasama tersebut diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir. Kerjasama yang dilakukan yaitu dengan: 1) Kabupaten Simeuleu, Provinsi Aceh 2) Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, 3) Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, 4) Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 5) Kabupaten Gorontalu (Ayumolingo) Provinsi Gorontalo dan 6) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Pemerintah Daerah DIY telah memberangkatkan transmigran total sebanyak 485 KK selama kurun waktu 2012-2015. Sebelum pemberangkatan telah dilaksanakan kegiatan bagi calon transmigrans meliputi: Seleksi, Pelatihan Dasar Umum (PDU), Pemeriksaan kesehatan dan pemberian perbekalan.

Tabel 4.69 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2015

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2014 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan	%	37,61	20	10,55	52,75	21	50,24

Sumber: Disnakertrans DIY, 2016

Realisasi pencapaian target indikator persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan sebesar 10,55% dari target 20% atau dengan capaian 52,75%. Target tersebut belum terpenuhi sehingga masih diperlukan peran aktif Pemda DIY dalam forum-forum ketransmigrasian sehingga mendapatkan peningkatan kuota/alokasi penempatan transmigrasi untuk DIY dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

4.3.8.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY pada urusan Ketransmigrasian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.488.176.750,00 untuk 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan 2 (dua) kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp3.143.930.700,00 (90,13%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

4.3.8.3 Permasalahan dan Solusi

A) Permasalahan

- Alokasi program penempatan transmigrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi belum dapat memenuhi tingginya animo masyarakat terhadap program transmigrasi.
- Penempatan calon transmigran sangat tergantung pada kesiapan lokasi tujuan transmigrasi, sedangkan SPP (Surat Pemberitahuan Pemberangkatan) dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi diterbitkan pada bulan November dan Desember 2015, sehingga waktu penempatan transmigran sangat sempit.

B) Solusi

- Kebutuhan pendaftar transmigrasi perlu dilakukan penambahan alokasi program penempatan melalui *sharing* anggaran pembiayaan APBD dengan daerah penempatan.
- Meningkatkan pemantauan pembangunan fisik di lokasi transmigrasi secara intensif supaya pelaksanaan pembangunannya selesai tepat waktu, sehingga Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP) dapat segera diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Bab 5

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tersebut telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadiUndang-Undang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pemerintahan daerah antara lain dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (1) hurup e UU 23/2014). Namundemikian, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wewenang istimewa dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan perundang-undangan tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 terdiri dari lima urusan, meliputi:

a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
c. Kebudayaan;
d. Pertanahan; dan
e. Tata Ruang.

Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk: *Pertama*, mewujudkan pemerintahan yang demokratis; *Kedua*, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; *Ketiga*, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; *Keempat*, menciptakan pemerintahan yang baik; dan *Kelima*, melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya nusantara.

Pemerintah Daerah DIY telah mendapatkan alokasi dana Keistimewaan dari Pemerintah dalam rangka implementasi kewenangan Keistimewaan DIY sejak tahun 2013. Alokasi Dana Keistimewaan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 15 Juli 2013. Ketentuan tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2015, alokasi Dana Keistimewaan untuk Pemda DIY sebesar Rp547.450.000.000,00 terdistribusi di Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Pemerintah Daerah DIY dan Pemkot/ Pemkab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Alokasi tersebut dipergunakan untuk membiayai empat urusan yakni Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Dalam tiga tahun sejak tahun 2013 -2015 kucuran Dana Keistimewaan dari Pemerintah cenderung meningkat. Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada 2014 naik cukup siginifikan sebesar 126,4% dibanding tahun sebelumnya (2013). Sedangkan anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2015 naik 4,5% dari anggaran tahun 2014.

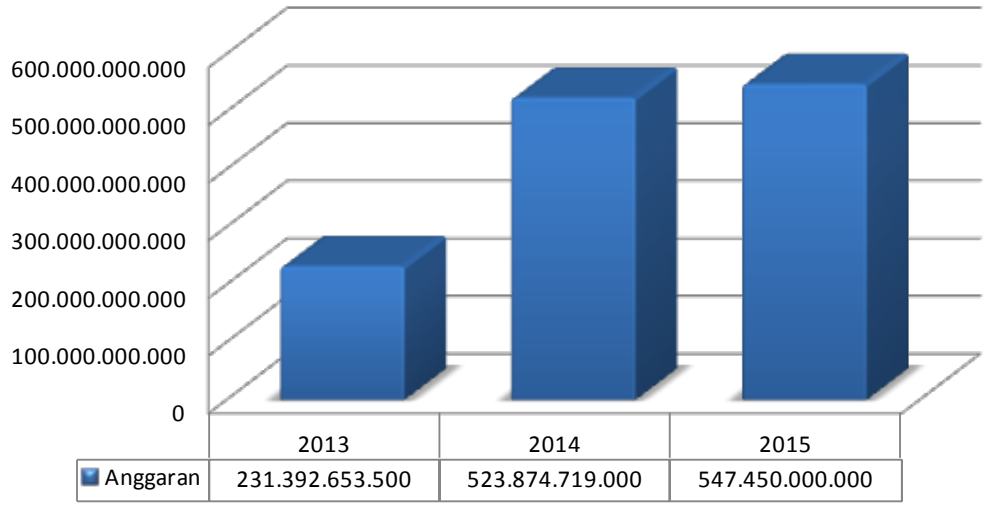

Gambar 5.1 Anggaran dan Realisasi Keuangan Dana Keistimewan Tahun Anggaran 2013-2015
(Sumber: DPPKADIY, 2015; diolah)

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan 103/PMK.07/2013 target progress serapan keuangan kegiatan Dana Keistimewaan dibagi dalam 3 (tiga) tahap dengan persentase terhadap total pagu. Adapun pembagiannya ialah Tahap I sebesar 25%, Tahap II sebesar 55% dan Tahap III sebesar 20%. Ketentuan terkait serapan berubah pada tahun 2016, dengan skema Tahap I sebesar 15%, Tahap II sebesar 65% dan Tahap III sebesar 20% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/ PMK.07/ 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Skema anggaran Dana Keistimewaan per tahap tersebut merupakan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa realisasi penyerapan dan realisasi kinerja fisik pada setiap tahap, telah mencapai sekurangnya 80% pada tahap bersangkutan.

Adapun alokasi anggaran pada tahun 2015 diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pada 4 (empat)urusan keistimewaan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Dana Keistimewaan DIY Tahun 2015, sesuai Urusan

No.	Urusan/ Bidang	Jumlah		Pagu (Rp)
		Program	Kegiatan	
1.	Kelembagaan	1	4	1.650.000.000
2.	Kebudayaan	26	116	420.800.000.000
3.	Pertanahan	1	20	10.600.000.000
4.	Tata Ruang	3	60	114.400.000.000
Total		**31**	**200**	**547.450.000.000**

Sumber: Bappeda DIY dan DPPKA DIY, 2015; diolah.

Pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan Pemda DIY tahun 2015 terdiri dari 31 program dan 200 kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 98% dan capaian keuangan sebesar: Rp477.494.515.166,00 atau sebesar 87,22%. Capaian tahun 2015 tersebut merupakan capaian kumulatif dari tahap I, II dan III. Capaian tahun 2015 tersebut melebihi kinerja fisik tahun 2014 sebesar 92,77% dan capaian keuangan sebesar Rp271.900.680.389,00 atau sebesar 64,88%. dari total dana pencairan tahap I dan tahap II atau sebesar 51,90% dari pagu anggaran dana keistimewaan. Realisasi tahun 2014 hanya mencapai kumulatif tahap I dan tahap II saja. Sebagai gambaran terkait realisasi dapat disampaikan sebagai berikut:

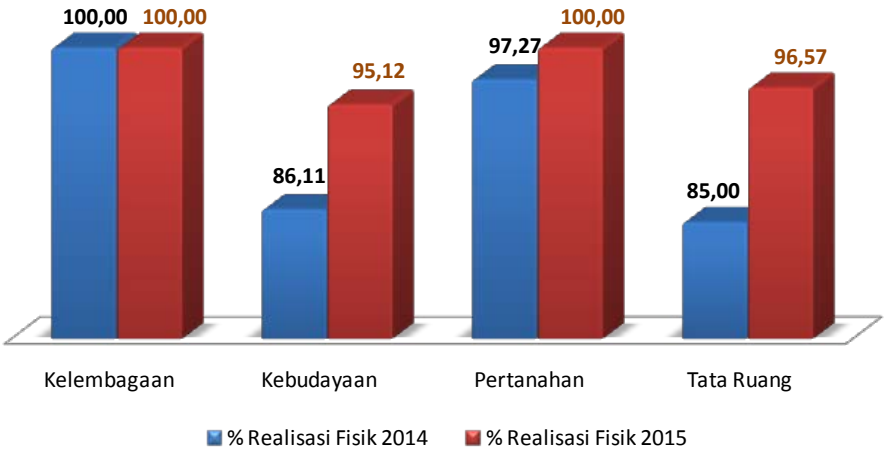

Gambar 5.2 Realisasi Fisik Per Urusan Pada 2014 & 2015
(Sumber: BappedaDIY, 2015; diolah)

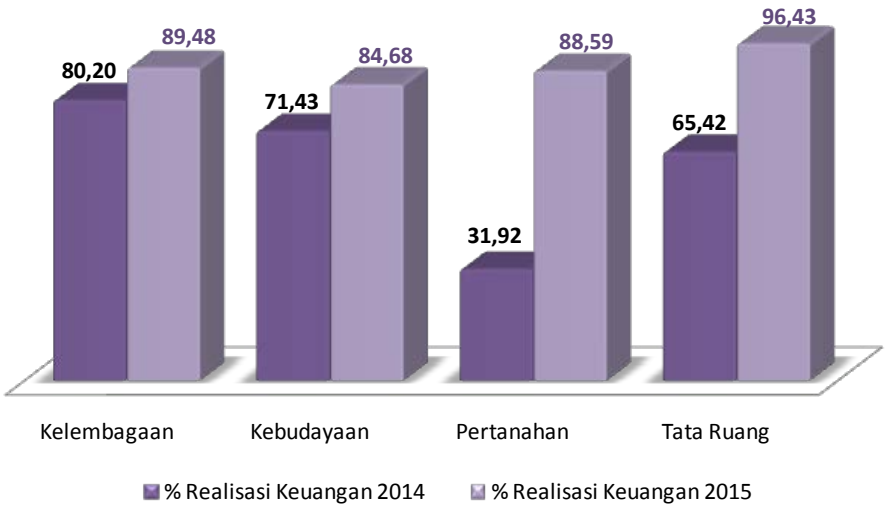

Gambar 5.3 Realisasi Keuangan Per Urusan Pada 2014 dan 2015
(Sumber: DPPKA DIY, 2015; diolah)

5.1 URUSAN KELEMBAGAAN

5.1.1 Kondisi Umum

Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY memiliki dampak terhadap diberikannya 5 (lima) Urusan Keistimewaan kepada Pemerintah Daerah DIY; salah satunya ialah urusan kelembagaan. Dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY, pasal 23 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dibentuk kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Selain organisasi perangkat daerah yang mewadahi urusan wajib dan urusan pilihan, dibentuk pula organisasi perangkat daerah sebagai wadah urusan istimewa, yaitu Asisten Keistimewaan. Pembentukan organisasi perangkat daerah dan perubahan organisasi tersebut dilaksanakan berdasar ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015Tentang Kelembagaan Pemerintah DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta (Perdais Nomor 3

Tahun 2015). Penerbitan Perdais tersebut merupakan tindak lanjut terhadap Perdais 1 Nomor 2013. Organisasi baru dan atau berubah pasca-penerbitan Perdais Nomor 3 Tahun 2015 antara lain: Satpol PP, Dinas Daerah (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Dinas Komunikasi dan Informatika), Lembaga Teknis Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik); dan Lembaga lain (Parampara Praja). Penataan Kelembagaan perangkat daerah DIY dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah.

5.1.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pelaksanaan urusan Kelembagaan yang diampu oleh Biro Organisasi terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan kegiatan sebanyak 4 kegiatan. Keempat kegiatan tersebut meliputi: (1) Peningkatan implementasi budaya pemerintahan; (2) *Review* Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pola Hubungan Lembaga Keistimewaan; dan (4) Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi fisik dari semua kegiatan pada urusan kelembagaan telah mencapai 100% dari target, artinya semua kegiatan telah diselesaikan sesuai dengan perencanaan. Realisasi keuangan sampai dengan tahap III atau akhir tahun sebesar sebesar Rp1.476.455.586 dari pagu Rp1.650.000.000 atau sebesar 89,48%.

Gambar 5.4 Kegiatan Urusan Kelembagaan ada Biro Organisasi Setda DIY berupa Sosialisasi Rapergub pola hubungan kerja
(Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2015)

5.1.3 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan:

Regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur pola hubungan kerja masih bersifat makro dan belum ada pembaruan, sehingga menimbulkan penafsiran yang berlebihan diantara pemangku kepentingan yang ada.

B. Solusi:

Berkonsultasi dengan Kementerian dan Lembaga yang berkompeten untuk mendapatkan solusi dan mengusulkan perubahan regulasi, sehingga mampu menjawab dinamika pemerintahan.

5.2 URUSAN KEBUDAYAAN

5.2.1 Kondisi Umum

Kewenangan penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ditetapkan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Urusan kebudayaan ditetapkan tidak sekedar menangani aspek seni saja, melainkan mencakup nilai dan perilaku manusia berserta produk yang dihasilkannya dalam perspektif keistimewaan. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan tersebut diwujudkan dengan kebijakan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Kebijakan penyelenggaraan kewenangan Kebudayaan tersebut tercermin pada pelaksanaan program-program urusan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya;
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
6. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
8. Program Pendidikan Dasar;

9. Program Pendidikan Menengah;
10. Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya;
11. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Program Pendidikan Non Formal dan Informal;
13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
16. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya;
17. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
18. Program Pengembangan Ikm;
19. Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat;
20. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Program Analisis Kebijakan Pembangunan;
22. Program Kerjasama Informasi Penyelenggaraan Keistimewaan DIY;
23. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media;
24. Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan;
25. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokuman/ Arsip Daerah;
26. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
27. Program Pengembangan Kemitraan;
28. Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
29. Program Pengembangan Perikanan Tangkap; serta
30. Hibah Urusan Kebudayaan (Keistimewaan).

5.2.2 Program dan dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Urusan kebudayaan ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp420.800.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 26 program dan 116 kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan DIY dan 25 Kuasa Pengguna Anggaran dari SKPD Pemda DIY dan SKPD Kabupaten/ Kota di DIY. Kinerja fisik dari urusan kebudayaan secara kesuluruhan sebesar 95,12% dan capaian keuangan sebesar Rp356.314.922.039,00 (84,68%). Capaian fisik urusan kebudayaan Dana Keistimewaan DIY tahun 2015 tidak mencapai 100% dalam penyelesaiannya. Akan tetapi secara keseluruhan capaian ini memperbaiki realisasi tahun 2014 yang hanya mencapai kinerja fisik sebesar 86,11% dengan capaian keuangan sebesar

51,90% yang dikucurkan dalam 2 tahap dari total 3 tahap pelaksanaan. Pelaksanaan urusan kebudayaan tahun 2015 bersama dengan urusan lainnya, mencapai 3 tahap dengan capaian yang bervariasi. Adapun rekapitulasi kinerja pelaksanaan program/ kegiatan urusan kebudayaan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Rekapitulasi Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s/d Tahap III (Rp)	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	Dinas Kebudayaan DIY	245.618.896.170	201.309.054.985	81,96%	99,87%
2	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	11.524.418.600	10.935.247.296	94,89%	100,00%
3	Dinas Kebudayaa, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo	21.425.694.025	20.027.102.812	93,47%	100,00%
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	17.578.339.000	15.823.904.088	90,02%	94,98%
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	17.918.617.700	15.539.260.757	86,72%	98,12%
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman	7.965.205.200	6.801.478.775	85,39%	100,00%
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta	10.757.880.925	6.943.397.118	64,54%	87,65%
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	12.217.203.000	10.675.282.715	87,38%	100,00%
9	Dinas Kesehatan DIY	323.117.500	287.286.420	88,91%	100,00%
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY	14.307.428.500	14.304.539.470	99,98%	100,00%
11	Badan Lingkungan Hidup DIY	2.026.624.600	1.989.241.950	98,16%	100,00%
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY	135.000.000	127.524.400	94,46%	100,00%
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY	8.110.374.000	7.459.909.000	91,98%	100,00%
14	Kantor Perwakilan Daerah DIY	4.793.281.000	4.140.648.000	86,38%	95,16%

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s/d Tahap III (Rp)	(%)	Realisasi Fisik (%)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat DIY	288.715.800	277.798.900	96,22%	100,00%
16	Biro Hukum Setda DIY	750.000.000	623.315.600	83,11%	95,00%
17	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	692.278.000	681.403.250	98,43%	100,00%
18	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	5.956.092.000	5.405.468.000	90,76%	100%
19	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	285.868.300	282.041.300	98,66%	100,00%
20	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	1.210.000.000	1.032.221.843	85,31%	100,00%
21	Dinas Pariwisata DIY	12.138.518.000	11.821.148.600	97,39%	100,00%
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	4.235.406.710	3.276.584.410	77,36%	100,00%
23	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	248.000.000	143.283.650	57,78%	100,00%
24	Biro Tata Pemerintahan Setda Yogyakarta	3.750.000.000,00	58.912.200	1,57%	15,00%
25	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo	10.574.805.000	10.556.908.000	99,83%	100,00%
26	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	5.968.235.970	5.791.958.500	97,05%	100,00%
	Total	**420.800.000.000**	**356.314.922.039**	**84,68%**	**95,12%**

Sumber: Bappeda DIY, DPPKA DIY, 2015 diolah

Gambar 5.5 Upacara Adat Bersih Desa, Rintisan Desa Budaya Tukseno, Sentolo, Kulon Progo

Gambar 5.6 Kegiatan Pengembangan Perfilman Daerah: Bulan Sinema Jogja 2015;

Adapun realisasi program dan kegiatan pada urusan Kebudayaan secara umum memiliki capaian kinerja dan manfaat yang semakin baik dari tahun ke tahun. Pengelolaan program-program urusan kebudayaan mendorong kreatifitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, mampu menggerakkan kelompok seni dan event kebudayaan sertamerangkul partisipasi antara masyarakat dan pemerintah yang sinergis. Salah satu contoh manfaat yang dapat dirasakan antara lain terkait raihan prestasi, sebagaimanapadakegiatan Pengembangan Perfilman Daerah yang menghasilkan satu Piala Dewantara untuk Apresiasi Pemerintah Daerah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam ajang Apresiasi Film Indonesia 2015. Pelaksanaan dana keistimewaan pada kegiatan pengembangan perfilman daerah memberikan dukungan produksi untuk 14 pembuat film yang diseleksi oleh Dinas Kebudayaan pada tahun 2015.

Adapun capaian kinerja urusan kebudayaan yang tidak mencapai 100%, meliputi:

1. Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan DIY terkendala kegiatan pembebasan lahan dari 3 lokasi hanya terlaksana 2 lokasi. Pengadaan lahan Indraloka terkendala dalam proses akhir negosiasi.
2. Penyelesaian kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul pada Program Pengembangan Nilai Budaya; Program Pengelolaan Keragaman Budaya; dan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya karena kendala penyajian pelaporan.
3. Kegiatan Pengelolaan dan Penguatan Desa Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul tidak dapat terselesaikan terkait pengadaan gamelan perunggu. Hal tersebut terjadi karena terkendala pengambilan keputusan terkait hibah. KPA ragu-ragu untuk merealisasikan sesuai Surat Gubernur Nomor 900/8527 Tanggal 24 Agustus 2015 perihal Penajaman Ketentuan tentang Hibah. Surat tersebut merupakan penajaman atas Surat Edaran Kemendagri Nomor 900/4627/SJ tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Kegiatan pada Kantor Perwakilan Daerah DIY yang tidak terselesaikan yakni Pengembangan Sarana Prasarana Anjungan DIY di TMII berupa

Rehab Anjungan DIY Sisi sebelah Timur, 1 paket karena penyedia jasa konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu dan kinerja.

5. Penyelesaian Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan pada Biro Hukum Setda DIY yang memiliki output raperda istimewa dan Rapergub Keistimewaan terkendala penyesuaian jadwal antara eksekutif dan legislatif.
6. Akuisisi cagar budaya yang diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta karena tidak tercapainya kesepakatan jual beli antar pihak karena harga dari appraisal independen tidak memenuhi keinginan harga dari pemilik tanah/ bangunan cagar budaya.

5.2.3 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

a. Pengadaan tanah/ lahan/ bangunan cagar budaya terkendala proses negosiasi dan *gap* atas nilai *aprraisal* dari tim independen dengan nilai harga yang diminta pemilik;
b. Pelaksanaan hibah pada kelompok masyarakat belum optimal karena adanya keragu-raguan dari KPA untuk melaksanakan hibah karena adanya multi tafsir terhadap ketentuan pada pasal 298 ayat (5) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur syarat pemberian hibah kepada kelompok masyarakat yang harus berbadan hukum;
c. Beberapa pekerjaan konstruksi sarana prasarana tidak dapat diselesaikan karena penyedia barang/ jasa tidak mampu menyelesaikan kontrak sesuai target waktu dan kinerja yang dijanjikan. (seperti: pada pembangunan anjungan TMII pada Kantor Perwakilan Daerah DIY di Jakarta).

B. Solusi

a. Memperkuat kapasitas tim pengadaan tanah/ lahan Pemda DIY, dan meningkatkan komunikasi dengan pemilik lahan;

b. Mendorong PA/ KPA untuk memahami dan melaksanakan hibah kepada kelompok masyarakat sesuai Surat Gubernur Nomor 900/8527 Tanggal 24 Agustus 2015 perihal Penajaman Ketentuan tentang Hibah. Surat tersebut merupakan penajaman atas Surat Edaran Kemendagri Nomor 900/4627/SJ tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat perlu menerbitan peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait agar kendala-kendala terkait hibah di seluruh Indonesia dapat segera teruraikan dan mendorong daerah untuk memiliki inisiatif penyelesaian pelaksanaan hibah.
c. Meningkatkan pengendalian internal dan mengoptimalkan peran Aparatur Pengewas Internal Pemerintah (APIP) serta mengenakan sanksi terhadap penyedia barang/ jasa yang melakukan wanprestasi.

5.3 URUSAN PERTANAHAN

5.3.1 Kondisi Umum

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dankesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdais 1 Tahun 2013 meliputi: (a) izin lokasi; (b) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; (c) penyelesaian sengketa tanah garapan; (d) penyelelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (e) penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanahkelebihan maksimum dan tanah *absentee*; (f) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; (g) izin membuka tanah; dan (h)perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/ Kota.

Dalam urusan pertanahanan tersebut, Pemda DIY memiliki peran untuk memfasilitasi:

a. penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
b. memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Dalam menjalankan perannya, Pemda DIY melaksanakan urusan pertanahan tahun 2015 dengan fokus program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Tata Pemerintah, Setda DIY dan 5 KPA yang berasal dari masing-masing Kabupaten.

5.3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015

Pelaksanaaan urusan Pertanahan ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp10.600.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 1 program dan 20 kegiatan dengan Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan. Pelaksanaan Urusan Pertanahan tahun 2015 memiliki capaian kinerja fisik keseluruhan sebesar 100% dengan capaiankinerja keuangan sebesar Rp9.390.386.050,00 (88,59%). Secara umum realisasi fisik dari KPA Urusan Pertanahan terlaksana seluruhnya.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	2.668.514.000	2.234.701.575	83,74	100
2	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulonprogo	1.421.137.000	1.283.144.525	90,29	100
3	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	1.810.526.000	1.728.103.300	95,45	100
4	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul	2.575.287.000	2.285.991.700	88,77	100
5	Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman	1.526.391.000	1.397.335.700	91,55	100

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Realisasi Fisik (%)
6	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta	598.145.000	461.109.250	77,09	100
Total		**10.600.000.000**	**9.390.386.050**	**88,59%**	**100%**

Sumber: BAPPEDA DIY; DPPKA DIY, 2015; diolah

Deviasi keuangan yang tinggi selain karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan juga disebabkan adanya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan kerena adanya perbedaan biaya untuk pendaftaran 175 bidang tanah kasultanan dan kadipaten di BPN. Selain itu, penghitungan biaya pendaftaran tanah tidak menggunakan satuan bidang akan tetapi dengan menggunakan satuan luasan sehingga bidang yang luasannya kecil maka biaya pendaftarannya juga kecil.

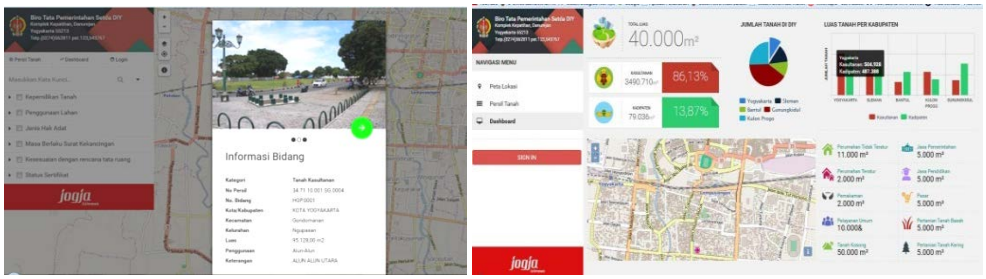

Gambar 5.7 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan & Kadipaten

Gambar 5.8 Inventarisasi Tanah Desa

5.3.3 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Kondisi fisik bidang di lapangan yang memiliki kompleksitas yang sangat beragam, antara lain lokasi lahan, sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengukuran bidang secara cepat.

B. Solusi

Dalam mengatasi kesulitan lokasi, proses inventarisasi dan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara 5-17arallel dengan lokus per desa (lokasi) agar lebih cepat dan mudah.

5.4 URUSAN TATA RUANG

5.4.1 Kondisi Umum

Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY. Dalam Urusan Keistimewaan disebutkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan filosofi:

a. Harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*);
b. *Spiritual-transenden* (*sangkan paraning dumadi*);
c. Humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*);
d. Kebersamaan (tahta untuk rakyat);
e. Harmonisasi lingkungan (sumbu imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi);
f. Ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak);
g. Filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan
h. *Delineasi spasial* Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid *pathok negara*.

Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan Tata Ruang Nasional dan Tata Ruang DIY. Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dan berbasis kawasan. Penataan Ruang dilakukan dengan prinsip mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan.

5.4.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pelaksanaan urusan Tata Ruangpada 2015 didukung oleh 3 program dan 60 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp114.400.000.000,00. Realisasi keuangan sampai dengan tahap III sebesar Rp110.312.751.509,00 atau dengan persentase sebesar 96,43% dengan realisasi fisik sebesar 96,57% hal ini disebabkan beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan 100% diantaranya Penataan Sarana dan Prasarana bagi kendaraan tidak bermotor di kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta yang mengalami gagal lelang, dan Penataan kawasan perkotaan pada sumbu filosofi dan sumbu imaginer (Taman Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali) yang pembangunannya selesai akhir Desember sehingga Operasionalisasi TKP Abu Bakar Ali akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016. Penataan ruang urusan keistimewaan yang lain meliputi Penataan Transportasi Perkotaan (*Heritage City)*, Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imaginer), *Masterplan Merapi National Volcano Park*, dan kawasan Merapi Kaliurang, *Masterplan* kawasan Suroloyo-Sendangsono, Kawasan Goa Kiskendo-Sermo-Wates Kulon Progo, *Masterplan* Kawasan Nglanggeran dan Penyusunan RDTR Kawasan Budaya Sokoliman Gunungkidul.

Tabel 5.4 Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Ruang

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY	92.673.187.700	90.859.114.365	98.04	10
2	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY	11.815.149.000	11.544.017.519	97.71	100
3	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	1.200.000.000	384.421.000	32.04	75.71

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	(%)	Realisasi Fisik (%)
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta	3.000.000.000	2.136.845.000	71.23	90,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman	1.267.035.000	1.220.997.000	96,37	100
6	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo	1.651.421.000	1.642.557.850	99.46	100
7	Dinas Perhubunga, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo	193.516.000	193.516.000	100	100
8	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul	1.375.524.800	1.280.864.500	93.12	100
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	924.166.500	791.041.500	85.60	100
10	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul	300.000.000	259.376.775	86,46	100
Total		**114.400.000.000**	**110.312.751.509**	**96,43**	**100**

Adanya deviasi keuangan 3,57% disebabkan adanya beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal berkaitan adanya gagal lelang dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan, terutama pada SKPD Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Adanya gagal lelang terjadi pada penyediaan sarpras tanah untuk mendukung penataan kendaraan tidak bermotor di kawasan budaya perkotaan Yogyakarta. Selain itu, pembangunan Taman Khusus Parkir Abu Bakar Ali juga tidak optimal sehingga operasionalisasinya belum bisa sebagaimana diharapkan.

Gambar 5.9 Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imaginer): Pembangunan Parkir Portabel, Taman Parkir Abu Bakar Ali di Utara Hotel Inna Garuda

5.4.3 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

a. Pelaksanaan penyediaan Sarana dan prasarana tanah untuk mendukung penataan bagi kendaraan tidak bermotor di kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta mengalami gagal lelang yang meliputi Marka Jalur Sepeda 1.000 m^2 dan Lampu Dua Aspek khusus pengaturan sepeda.
b. TKP Abu Bakar Ali belum dapat operasional karena pembangunannya baru selesai pada akhir Desember.

B. Solusi

a. Melakukan Pencermatan dalam perencanaan dan penjadwalan agar dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan Jasa dapat berjalan dengan lancar.
b. Melakukan penjadwalan yang lebih ketat terutama pada pekerjaan konstruksi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mundur.

6 Bab Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dalam rangka penyelenggaraaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Latar belakang penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi, dan tidak mungkin semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Maksud pemberian tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Selanjutnya tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

6.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

6.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum atau peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pembantuan, secara umum adalah:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 63 Tahun 2014Tentang Pengelolaa Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1. Tahun 2012 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.

6.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pasal 35 ayat (1) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015, telah menerima beberapa tugas pembantuan dari Pemerintah melalui Kementerian:

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Kementerian Pertanian;
3. Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Kementerian Perikanan dan Kelautan;

Program yang diterima dari Pemerintah ada 14 program dengan 44 kegiatan. Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD.

Jumlah dana Tugas Pembantuan pada tahun 2015 sebanyak Rp150.307.573.000,- Bila dibandingkan dengan dana pada tahun 2014 terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp71.421.609.000,- Sedangkan realisasi keuangan pada tahun anggaran 2015 mencapai Rp142.416.425.000,- atau sebesar 94,75%. Jumlah dana tugas pembantuan yang diterima dari Kementerian pada tahun 2015 serta realisasinya dapat dilihat dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1 Kementerian dan Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Pemda DIY Tahun Anggaran 2015

No	Nama Kementerian	Tahun 2015			
		Jumlah Pagu Rp (.000)	Real Keuangan Rp (.000)	Real Keu (%)	Real Fisik (%)
1	Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi	3.520.098	2.771.034	87,72	93,14
2	Kementerian Pertanian	94.090.469	74.008.502	83,96	95,65
3	Kementerian Pekerjaan Umum	28.155.561	27.812.468	99,13	100
4	Kementerian Kelautan & Perikanan	12.541.445	8.360.579	66,67	74,21
Jumlah		**150.295.573**	**131.646.425**	**87,59**	**90,75**

Sumber: Bappeda DIY, Tahun 2015

6.1.3 SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan penugasannya, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pembantuan adalah:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Pertanian;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
6. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

6.1.3.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 TentangPerubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015;
8. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanTransmigrasi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/1995 tentang Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Permakanan dan Bimbingan Sikap Mental dalam Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-067.07.4.350107/2015 tanggal 24 April 2015 untuk Program Penyiapan kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-067.08.4.350106/2015 tanggal 29 April 2015 untuk Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. dengan anggaran sebesar Rp3.520.098.000,-.

C. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

D. Pelaksanaan Program / Kegiatan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menerima dana tugas pembantuan pada tahun 2015 sebesar Rp3.520.098.000,- untuk membiayai 2 (dua) program yaitu Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi serta Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Rekapitulasi program/ kegiatan, anggaran dan realisasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 6.2 Program/ Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2015

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)		Keterangan	Urusan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
I	**Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi**	**3.192.118.000**	**100**	**76,66**	**100**	**86,57**	Terdapat 5 (lima) daerah penempatan yang belum siap. 1. Lokasi Ds. Makeuh Kab. Bengkalis, Prop. Riau 2. Lokasi Bukit Merbau SP2, Kab. Rejanglebong, Prov. Bengkulu 3. Lokasi Pangea SP3 Kab. Balemo, Prov. Gorontalo 4. LokasiAyumolingo Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo 5. Lokasi Kidal Kab. Banggai	**Ketrans-migrasi-an**
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	362.490.000	100	93,98	100	94		Ketrans-migrasi-an
2	Penataan Persebaran Penduduk	2.190.288.000	100	69,27	100	69,27		Ketrans-migrasi-an
3	Pembinaan potensi kawasan Transmigrasi	639.340.000	100	92,16	100	95,70		Ketrans-migrasi-an

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)		Keterangan	Urusan
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
							Kepulauan, Prov. Sulteng	
II	**Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**327.980.000**	**100**	**98,77**	**100**	**99,70**		**Ketrans-migrasi-an**
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	145.030.000	100	98,00	100	100		Ketrans-migrasi-an
2	Pengembangan Usaha Transmigrasi	182.950.000	100	99,38	100	99		Ketrans-migrasi-an

Sumber: Disnakertrans DIY, 2016

Tabel 6.3 Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Tahun 2015

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Keuangan			Fisik (%)
			Pagu (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	Capaian (%)	
1	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	3	3.192.118	2.447.080,852	76,66	86,57
2	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2	327.980	323.953,553	98,77	99,70

Sumber: Analisis Bappeda 2016

Realisasi fisik yang tidak dapat tercapai 100%, dikarenakan pelaksanaan penempatan transmigrasi hanya terrealisir sebanyak 116 KK/390 jiwa dari 202 KK yang ditargetkan, hal ini dikarenakan belum siapnya 5 (lima) lokasi daerah penempatan.

E. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan:
Penyelesaian pembangunan Rumah Tangga dan Jamban Keluarga (RTJK) serta sarana prasarana pendukung tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu oleh Pemerintah sehingga Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi hanya 116 KK dari 202 KK yang ditargetkan.

2) Solusi:
Diwaktu yang akan datang, akan dioptimalkan pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi ke Dirjend Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi maupun dengan daerah tujuan.

6.1.3.2 Dinas Pertanian DIY

A. Dasar Hukum

1. Pemberian tugas pembantuan untuk urusan pertanian kepada Pemerintah DIY dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tanggal 14 November 2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan provinsi Tahun Anggaran 2015.
2. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-018.03.4.049087/2015 tanggal 14 November 2014
3. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-018.04.4.049088/2015 tanggal 14 November 2014.
4. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-018.06.4.049090/2015 tanggal 14 November 2014.
5. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-018.07.4.049092/2015 tanggal 14 November 2014.
6. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-018.08.4.049094/2015 tanggal 14 November 2014.

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI, cq Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

C. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian DIY

D. Pelaksanaan Program/ Kegiatan

Tabel 6.4 Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
I	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan**	**67,71**	**96,43**	
1763.008	Pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan	40,70	75,00	Pemberdayaan penangkar target 3 unit realisasi 1 unit
1764.033	Pemantapan Penerapan PHT	88,18	100	
1764.034	Penerapan Penanganan DPI	99,73	100	
1765.005	Laporan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan	77,74	100	
1765.020	Dukungan Sarana Pascapanen Jagung	69,09	100	
1766.012	Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan	77,87	100	
1766.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	83,68	100	
II	**Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan**	**62,02**	**88.33**	
1771.003	Sekolah Lapang GAP	97,67	100	
1771.019	Sarana Prasarana Budidaya	86,34	100	
1771.020	Sarana Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat	46,75	65,00	Target sarpras pasca panen cabe 740 unit terelisasi 460 unit
1771.021	Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran	58,44	65,00	Target lahan cabe target 37 ha terelisasi 23 unit

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1773.006	Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura	92,03	100	
1774.994	Layanan Perkantoran	43,49	100	
III	**Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**	**83,88**	**97,14**	
1782.101	Pengembangan Budidaya Sapi Potong	92,79	100	
1782.115	Penyediaan Saran & Peralatan IB	98,93	100	
1782.124	Pengembangan Budidaya Kambing	99,88	100	
1782.126	Pengembangan Budidaya Kambing Perah	83,87	100	
1782.132	Pengembangan Budidaya Ayam Lokal di Pedesaan	75,32	100	
1783.103	Penguatan Sumber bibit/ benih HPT di UPTD	93,76	100	
1783.124	Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas	95,06	100	
1783.133	Revitalisasi UPP/PPSK	95,78	100	
1783.137	Penguatan Pakan Induk Sapi Potong	91,79	100	
1783.141	Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemukan	59,14	60,00	Pengadaan pakan untuk sapi potong persiapan hari Raya Idul Adha, dari target 180 ton terealisasi 103 ton karena pada saat proses pengadaan, e-katalog baru terbit menjelang hari raya Idul Adha
1785.145	Penguatan sapi/ kerbau Betina bunting	95,8	100	
1786.122	Pengadaan Sarana & Prasarana Lab. Kesmavet	97,06	100	
1787.020	Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan	99,28	100	
1787.022	Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penata-usahaan Barang Milik Negara	99,96	100	
IV	**Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian**	**95,44**	**100**	

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1789.001	Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestik	87,67	100	
1792.001	Unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan	98,07	100	
1792.002	Unit usaha pengolahan hasil hortikultura	96,97	100	
1792.004	Unit usaha pengolahan hasil peternakan	95,27	100	
1793.004	Laporan Kegiatan & Pembinaan	91,31	100	
V	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**	**91,34**	**100**	
1794.023	Pengembangan Jaringan Irigasi	99,91	100	
1794.994	Layanan Perkantoran	84,07	100	
1795.002	Pengembangan Optimasi Lahan	64,56	100	
1795.004	Pengembangan SRI (*System of Rice Intensification*)	98,10	100	
1795.011	Laporan Kegiatan & Pembinaan	87,99	100	
1796.013	Pengembangan alat dan mesin pertanian	87,5	100	
1796.025	Fasilitasi penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian	80,09	100	
1797.994	Layanan Perkantoran	93,88	100	
3993.012	Fasilitas pestisida untuk pertanian	84,78	100	
3993.017	Pendampingan Penyaluran Pupuk	91,15	100	
3994.016	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	75,87	100	

Sumber: Distan DIY, 2016

E. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

1. Terjadinya Revisi anggaran yang berkali-kali, yang disebabkan tidak tersedianya pedoman pelaksanaan yang memadai.
2. Beberapa kelompok sasaran tidak sanggup mencapai target yang ditetapkan sebagai dampak keterbatasan pelaksanaan program
3. Pengaruh anomali iklim,yakni gejala el nino yang mengganggu masa tanam sehingga terjadi keterlambatan waktu tanam yang berpengaruh terhadap hasil produksi.

2) Solusi
   1. Secara proaktif melakukan komunikasi dengan kementrian dan melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
   2. Menyampaikan laporan danmenyediakan bahan evaluasi dalam pelaksanaan dimasa yang akan datang.
   3. Melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna meminimalisasi dampak negatif pergeseran waktu tanam.

6.1.3.3 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2011 tanggal 14 November 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yg merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015, tanggal 21 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008, tanggal 12 Desember 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
5. DIPA TA 2015 Nomor: DIPA-033.04.4.049029/2015 tanggal 14 November 2014;
6. DIPA TA 2015 Nomor: SP DIPA-033.06.4.049136/2015 tertanggal 14 November 2014.

B. Instansi Pemberi Dana (Sumber Dana dan Jumlah Anggaran)

Pemerintah melaui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air dan Direktorat Jendral Bina Marga.

C. SKPD Yang Melaksanakan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY

D. Pelaksanaan Program/ Kegiatan

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Tugas Pembantuan untuk program Pengelolaan Sumber Daya Air dimaksudkan untuk melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang berada di wilayah Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah dengan luasan total 12.311 ha, meliputi:

a. Jaringan irigasi di di Karangtalun (Jaringan Irigasi Vander Wicjk) dengan luas areal 5.159 ha;
b. Jaringan Irigasi di DI Kalibawang, dengan luas areal 7.152 ha.

TP-OP Jaringan irigasi ini bertujuan untuk mengoperasikan, menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2015, Program dan kegiatan TP-OP terdiri Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan kegiatan utama adalah:

a. Survey Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemliharaan (AKNOP) Jaringan Irigasi.
   Survey AKNOP jaringan irigasi dilaksanakan dalam rangka menginventarisasi kegiatan yang perlu dilakukan dan mengetahui kebutuhan anggaran dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk perencanaan tahun yang akan datang.
b. Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
   Operasi jaringan irigasi terdiri dari:
   1) Pekerjaan membuat Rencana Penyediaan Air Tahunan, Pembagian dan Pemberian Air Tahunan, Rencana Tata Tanam Tahunan, Rencana Pengeringan;

2) Pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberian air;
3) Pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung;
4) Pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur;
5) Koordinasi antar instansi terkait;

Kegiatan pemeliharaan rutin jaringan irigasi meliputi:

1) Yang bersifat Perawatan:
   a) Memberikan minyak pelumas pada bagian pintu.
   b) Membersihkan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak.
   c) Membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran.
   d) Pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur.
2) Yang bersifat perbaikan ringan
   a) Menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran/ bangunan.
   b) Perbaikan kecil pada pasangan.

c. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi;

Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala/ periodik sesuai kondisi jaringan irigasinya. Pemeliharaan berkala yang dilakukan adalah Pemeliharaan Saluran Sekunder Cerbonan (DI Karangtalun), Pemeliharaan Kantor Pengamat Kalibawang Hilir, Pemeliharaan Saluran Sekunder Kulur Kiri (DI Kalibawang) dan Pemeliharaan Saluran Sekunder Kedundang (DI Kalibawang)

Tabel 6.5 Target dan Realisasi TA 2015

No.	Kegiatan/ Paket	Pagu DIPA (Rp .000)	Realisasi		
			Keuangan (Rp .000)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1.	**Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA**				
1.1.	Jaringan Irigasi yang dioperasikan dan Dipelihara				
1)	Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Van Der Wicjk	21.193	19.288	91,01	100
2)	Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Kalibawang	27.416	27.393	99,92	100
3)	Operasi Rutin DI Van Der Wicjk	385.562	385.485	99,98	100

No.	Kegiatan/ Paket	Pagu DIPA (Rp .000)	Realisasi		
			Keuangan (Rp .000)	Keuangan (%)	Fisik (%)
4)	Operasi Rutin DI Kalibawang	493.603	492.775	99,83	100
5)	Pemeliharaan Rutin DI. Van Der Wicjk	593.291	589.644	99,39	100
6)	Pemeliharaan Rutin DI Kalibawang	744.717	744.593	99,98	100
7)	Pemeliharaan Berkala DI. Van Der Wicjk	376.456	354.429	94,15	100
8)	Pemeliharaan Berkala DI Kalibawang	804.567	792.662	98,52	100
9)	Pendaftaran dan Seleksi	6.537	5.948	91,00	100
1.2.	Layanan Perkantoran				
1)	Administrasi Kegiatan	190.222	176.855	92,97	100
2.	**Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu**				
2.1.	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)				
1)	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (*e-Monitoring*)	11.280	11.268	99,90	100
2)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.654.844	3.600.340	98,51	100

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2016

Anggaran secara keseluruhan TP-OP TA 2015 sebesar Rp3.654.844.000 dan terealisasi sebesar Rp3.600.340.000 atau sebesar 98,51%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Secara umum kegiatan Tugas Pembantuan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air tidak menemui kendala/ hambatan yang berarti, bisa berjalan sesuai dengan target.

2. Program Penyelenggaraan Jalan

   Tugas Pembantuan untuk Pelaksanaan Jalan dari Direktorat Jenderal Bina Marga TA 2015 meliputi:

   a. Penyenglenggaraan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan dilingkungan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) D.I Yogyakarta.

   b. Koordinasi keterpaduan terhadap kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan fungsional SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Tugas Pembantuan TA 2015 meliputi kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Berkala dari Jalan Yogyakarta-Wonosari-Duwet dan beberapa ruas jalan terkait, sepanjang 89,29 km serta jembatan sepanjang 808,9 m, melalui Perjanjian Kinerja TA. 2015 untuk SKPD Dinas PUP dan ESDM D.I. Yogyakarta Sebagaimana Tabel 6.7

Tabel 6.6 Cakupan Perjanjian Kinerja Penyelenggaraan Jalan TA 2015

URAIAN	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN (%)
	Jalan		Jembatan (m)	Jalan		Jembatan (m)	
	Efektif (km)	Fungsional (km)		Efektif (km)	Fungsional (km)		
Cakupan TP	3,60	89,29	808,90	3,60	89,29	808,9	100,00

Sumber: Analisis Dinas PU dan ESDM DIY, 2016

Dalam tahun 2015 ini wajib dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah.

Tabel 6.7 Target dan Realisasi Pelaksanaan Jalan TA 2015

No	Kegiatan/ Paket	Pagu DIPA (Rp .000)	Realisasi Keuangan (Rp .000)	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.407.264.000	4.251.138.000	99,99	100
2	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.051.570.000	1.050.977.000	99,94	100
3	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan	17.208.799.000	17.206.277.000	99,99	100
4	Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU (Jumlah Paket 1-10)	22.750.000	22.749.000	100	100
5	Layanan Perkantoran	1.867.071.000	1.809.765.000	99,75	100
Jumlah		**24.401.717.00**	**24.340.906.000**	**99,75**	**100**

Sumber: Analisis Dinas PU dan ESDM DIY, 2016

Proses pengukuran kinerja SKPD Dinas PUP dan ESDM D.I. Yogyakarta dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator memberikan gambaran tentang keberhasilan, kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran SKPD Dinas PUP dan ESDM D.I. Yogyakarta. Dalam proses pengukuran kinerja

dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran indikator kinerja di SKPD Dinas PUP dan ESDM D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.8 Pengukuran Kinerja Dinas PUP dan ESDM Tahun 2015

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET		REALISASI		%
Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program					
	Tingkat Penggunaaan Jalan Nasional	101,00	Milyar Kendaraan km	101,00	Milyar Kendaraan km	
	Indikator Kinerja Output					
	Pemeliharaan Rutin Jalan	89,29	km	89,29	km	100
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	808,90	m	808,90	m	100
	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan	3,60	km	3,60	km	100
	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU II	28,00	Laporan	28,00	Laporan	100
	Layanan Perkantoran	12,00	Bulan	12,00	Bulan	100

Sumber: Analisis Dinas PU dan ESDM DIY, 2016

SKPD Dinas PUP & ESDM DIY mendapat alokasi total sebesar Rp24.401.717.000,- (Dua puluh empat milyar empat ratus satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah). Revisi DIPA Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan 2 (dua) kali, revisi pertama dilaksanakan pada bulan April 2015 dikarenakan adanya perubahan Nomen klatur dengan pagu DIPA tetap. Revisi kedua dilaksanakan pada bulan Juni dengan tidak merubah pagu DIPA, hanya pergeseran anggaran antar *output*.

Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp24.340.905.918,- dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp60.811.082,00 dan rata-rata persentase realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 99,75%.

Tabel 6.9 Target dan Realisasi Pelaksanaan Jalan TA 2015

No	Kegiatan/ Paket	Pagu DIPA (Rp .000)	Realisasi Keuangan (Rp .000)	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.407.264.000	4.251.138.000	99,99	100
2	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.051.570.000	1.050.977.000	99,94	100
3	Pemeliharaan Berkala/ Rehabilitasi Jalan	17.208.799.000	17.206.277.000	99,99	100
4	Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU (Jumlah Paket 1-10)	22.750.000	22.749.000	100	100
5	Layanan Perkantoran	1.867.071.000	1.809.765.000	99,75	100
Jumlah		**24.401.717.00**	**24.340.906.000**	**99,75**	**100**

Secara keseluruhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja tugas Pembantuan Penyelenggaraan Bidang Jalan di lingkungan SKPD Dinas PUP& ESDM DIY pada tahun 2015 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum kegiatan Tugas Pembantuan untuk Penyelenggaraan Jalan tidak menemui kendala/ hambatan yang berarti, berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

6.1.3.4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY

A. Dasar Hukum

Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY pada tahun anggaran 2015, melaksanakan 2 (dua) sumber dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan dasar hukum, sebagai berikut:

(1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.: 135/Permentan/ OT.140/12/ 2014, tentang Penugasan Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung-jawab Pengelola Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2015.

(2) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9 KEP/2015, tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2015.

(3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Prov. D.I. Yogyakarta Nomor: SP DIPA-018.05.4.049089/2015

(4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Prov. D.I. Yogyakarta Nomor: SP DIPA -018.07.4.049091/2015

B. Instansi Pemberi Dana Tugas Pembantuan

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

C. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY

D. Pelaksanaan Program/ Kegiatan

Tabel 6.10 Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2015

No	Nama Urusan	Program/ Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi fisik (%)
1	Sub Sektor Perkebunan	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	76.46	89.81
2	Sub Sektor Perkebunan	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	99.20	100.00

Sumber: Dishutbun DIY, 2016

Tabel 6.11 Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2015

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s/d Desember 2015 Keuangan (Rp)	% Thd Target	% thd Pagu	Fisik (%)
	TUGAS PEMBANTUAN	**1,221,000,000**	**1,211,221,300**	**99.20**	**99.20**	**100**
1	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	1,221,000,000	1,211,221,300	99.20	99.20	100
1.a	Pengembangan Mutu dan Standardisasi	400,000,000	399,466,000	99.87	99.87	100
1.b	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	696,000,000	687,490,400	98.78	98.78	100

Sumber: Dishutbun DIY, 2016

E. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

1. Adanya perubahan identifikasi calon petani dan calon lahan penerima bantuan sehingga kesiapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk pelaksanaan kegiatan setelah dana/ anggaran tersedia menjadi belum optimal.
2. Adanya ketersaediaan bibit unggul komoditas strategis (tebu, mete, kelapa) yang belum memadai dengan keterbatasan stock untuk bibit/ benih yang berkualitas dan bersertifikat, terutama ketersediaannya pada saat masa tanam tiba.
3. Adanya regulasi terkait dengan UU 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Yang berimplikasi terhadap aturan kelompok penerima bantuan hibah/ bansos yang harus berbadan hukum. Hal itu menyebabkan pelaksanaan pemberian bantuan hibah menjadi tidak optimal karena adanya keragaman peraturan terhadap operasional ketentuan tersebut terutama pada level pemerintah kabupaten.
4. Adanya gangguan hama/ penyakit tanaman perkebunan yang menyerang sejumlah komoditas tanaman perkebunan strategis (tembakau, tebu, kakao, kelapa) sebagai dampak *el nino*, dan penanggulangan oleh petani yang bersifat on the spot atau parsial karena kondisi bentang lahan perkebunan yang beragam.

2) Solusi

1. Pendataan/ pemantapan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) akan dilakukan lebih awal dengan perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang berkelanjutan, dan evaluasi yang benar. Pengalokasian anggaran disusun (T-1) dan dilakukan pengawalan CPCL yang intensif.
2. Kebun bibit akan dibangun lebih awal dengan pola perhitungan sesuai kebutuhan yang didukung dengan regulasi yang mendorong ketersediaan/ distribusi bibit yang berkualitas dan terjangkau.
3. Pengurusan Kelompok calon penerima hibah yang membutuhkan, akan diupayakan lebih awal sejak pengusulan dengan fasilitas pengurusan badan hukum, sebagaimana mestinya.
4. Melakukan pengendalian secara intensif dan melakukan kajian teknologi pengendalian hama/ penyakit secara terpadu dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

6.1.3.5 Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggarakan Tugas Pembantuan dalam lingkungan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, tentang Perikanan;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 141 Tahun 2000, tentang Usaha Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2002, tentang Rencana Setrategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 tahun 2005, tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 tahun 2008, tentang Usaha Perikanan Tangkap;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 20 tahun 2008, tentang Pemanfaatan Pulau-pulau kecil;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi danTatakerja Dinas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
12. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap tahun 2015 nomor DIPA-032.03.4.049097/2015 tanggal 14 November 2014.
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya tahun 2015 nomor DIPA-032.04.4.049098/2015 tanggal 14 November 2014.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan Perikanan tahun 2015 nomor DIPA-032.06.4.049099/2015 tanggal 14 November 2014.

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

C. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Pelaksanaan Program/ Kegiatan

Program Kegiatan yang diterima tahun 2015 terdapat 3 program dengan 7 kegiatan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan. Program kegiatan telah terlaksana dengan baik, realisasi fisik tercapai 74,21%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp8.360.579.256,- atau 66,67% dari pagu anggaran Rp12.541.445.000,-.

1. Sumber dan Jumlah Anggaran

   Sumber Anggaran untuk melaksanakan tugas Pembantuan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dituangkan dalam 3 program dengan 7 kegiatan. Jumlah pagu anggaran sebesar Rp12.541.445.000,-.

Tabel 6.12 Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014 - 2015

Nama	Tahun 2014				Tahun 2015			
	jumlah Pagu Rp (000)	Realisasi Keuangan Rp (000)	%	Reali-sasi Fisik %	jumlah Pagu Rp (000)	Realisasi Keuangan Rp (000)	%	Reali-sasi Fisik %
Kementeri-an Kelaut-an & Perikanan	6.106.055	5.975.454,85	97,86	100	12.541.445	8.360.579,256	66,67	74,21

Sumber: Analisis Dislautkan DIY, 2016

Pelaksanaan 3 program 7 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp12.541.445.000,- terealisasi Rp8.360.579.256,- atau 66,67% dengan realisasi fisiknya mencapai 74,21%.

Pelaksanaan Program Pengembangan Pengelolaan Perikanan Tangkap pada kegiatan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan penyerapan anggarannya sebesar 65,43% karena adanya putus kontrak pengerukan kolam pelabuhan Tanjung Adikarto, sedangkan pada pelaksanaan Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan Perikanan pada kegiatan Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan Perikanan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran diblokir (tidak dapat dicairkan) sampai berakhirnya TA 2015.

Tabel 6.13 Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2015

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Program Pengembangan Pengelolaan Perikanan Tangkap	10.000.000.000	6.542.980.556	65,43	81,30
1.1	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	10.000.000.000	6.542.980.556	65,43	81,30
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	1.433.805.000	1.369.579.700	95,52	100
2.1	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	1.346.330.000	1.282.125.900	95,23	100
2.2	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya	87.475.000	87.453.800	99,98	100
3	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan Perikanan	1.107.640.000	448.013.000	40,45	41,32
3.1	Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan Perikanan	650.000.000	-	-	-
3.2	Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan Perikanan	225.000.000	222.913.000	99,07	100
3.3	Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan	190.000.000	189.265.000	99,61	100
3.4	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	42.640.000	35.841.000	84,05	100
Total		**12.541.445.000**	**8.360.579.256**	**66,67**	**74,21**

Sumber: Analisis Dislautkan DIY, 2016

E. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Adanya pemblokiran anggaran pada kegiatan Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan Perikanan, usulan revisi penghapusan tanda blokir tidak dapat ditetapkan berdasarkan surat dari Dirjen Anggaran Nomor: S.2522/AG/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal revisi DIPA TA 2015 Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan surat dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor: 6819/PDSPKP.0/TU.210/XI/2015 tanggal 16 November 2015 perihal Penghapusan Catatan Halaman IV DIPA.

b. Pelaksanaan pekerjaan pengerukan kolam pelabuhan Tanjung Adikarta tidak terselesaikan, sampai dengan akhir tahun 2015 realisasi fisik hanya tercapai 81,30%.

2) Solusi

a. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi anggaran (terutama APBNP) dengan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan meskipun sampai akhir tahun anggaran belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Untuk kedepannya akan dilakukan pencermatan kembali pada kegiatan yang sesuai.

b. Memberikan perpanjangan kontrak selama 30 hari kalender (memberikan denda selama perpanjangan kontrak), setelah penyedia jasa/ rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaaan selama perpanjangan kontrak maka dilakukan putus kontrak dan penyedia jasa/ rekanan mendapat sanksi masuk daftar hitam selama 2 tahun (5 januari 2016 s/d 4 Januari 2018).

6.2 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI GUBERNUR KE KABUPATEN/ KOTA

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pasal 35 ayat (2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/ kota dan/ atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi.

Pemda DIY memberikan Dana Tugas Pembantuan kepada kabupaten/ kota atau pemerintah desa melalui mekanisme Bantuan Keuangan Daerah baik yang bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemda DIY sebagai pemberi bantuan. Terhadap bantuan keuangan yang bersifat khusus, Pemda DIY dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota penerima bantuan.

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1. Tahun 2012 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial.
5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan tahun anggaran 2013.
6. Keputusan Gubernur Nomor 90/Kep/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran 2013.
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 63 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah.

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

C. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan dari Gubernur ke Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) di lingkup Kabupaten/ Kota masing-masing disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing SKPD.

D. Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Gubernur ke Kabupaten/ Kota terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan diberikan kepada seluruh kabupaten/ kota. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di DIY dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.Merespon isu kemiskinan ini Pemerintah Daerah DIY telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang diturunkan menjadi serangkaian program dan aktifitas untuk mengurangi kemiskinan di Yogyakarta. Pada tahun 2015, Pemda DIY melanjutkan pelaksanaan program Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota (BKK) yang bersifat khusus untuk penanggulangan kemiskinan, yang peluncurannya dilakukan berdasar Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan tahun anggaran 2013, dan Keputusan Gubernur No 90/Kep/2013 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran 2013.
2. Pembangunan Pasar Percontohan diberikan kepada seluruh kabupaten/ kota. Pembangunan Pasar Percontohan dengan tujuan untuk mewujudkan pasar tradisional yang lebih representatif, bersih dan nyaman. Dengan kondisi pasar yang demikian diharaapkan akan meningkatkan transaksi yang ada. Pasar yang dibangun diharapkan menjadi pasar yang mampu menjual produk dalam negeri secara dominan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
3. Insentif GTT/ PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK diberikan kepada seluruh kabupaten/ kota.
4. Belanja Bantuan Pelaksanaan Pilkada diberikan kepada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2015.

5. Pelayanan Kesehatan diberikan kepada Kabupaten Kulon Progo. Bantuan dari Gubernur DIY dialokasikan untuk Pembangunan Rumah Sakit Kelas D yaitu Rumah Sakit Nyi Ageng Serang. Selain Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran khusus diberikan untuk Kabupaten Kulon Progo.
6. Pembangunan Terminal Tipe C di Semin, Pembangunan Gedung Asrama SMK Tanjungsari dan Pembangunan Parkir Pantai Baron dan Krakal khusus diberikan untuk Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 6.14 Alokasi dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Gubernur DIY Kepada Kabupaten/ Kota Tahun 2015

No	Kabupaten/ Kota	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Dana Pendamping (Rp)
1	Kota Yogyakarta	8.752.750.000	7.425.350.000	84,83%	9.704.924.800
2	Bantul	29.297.100.000	28.160.700.000	96,12%	27.932.800.000
3	Kulon Progo	12.449.900.000	12.449.900.000	100,00%	9.255.098.500
4	Gunungkidul	25.313.025.000	25.008.225.000	98,80%	19.448.388.500
5	Sleman	26.366.550.000	24.627.950.000	93,41%	50.449.446.600
Jumlah		**102.179.325.000**	**97.672.125.000**	**95,59%**	

Tugas Pembantuan dari Gubernur DIY kepada Kabupaten Kota Tahun 2015 sebesar Rp102.179.325.000,00 dengan realisasi sebesar Rp97.672.125.000,00 atau dengan persentase 95,59%. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di masing-masing Kabupaten Kota desa/Kelurahan Tahun 2015 secara lebih rinci diinformasikan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Yogyakarta

   Alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus/ Tugas Pembantuan kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp8.752.750.000,00 dengan realisasi Rp8.752.750.000,00 atau dengan persentase realisasi sebesar 84,83%. Dana pendamping yang dialokasikan oleh Kota Yogyakarta sebesar Rp9.704.924.800,00. Realisasi Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 6.15 Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Yogyakarta TA 2015

No	Uraian	Anggaran Pagu (BKK)	Penggunaan Dana	Target			Realisasi (Sekarang)			SKPD Pengampu
				Vol	Satuan	Fisik	%	Keuangan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	**Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus**									
a	Penanggulangan Kemiskinan	2.678.550.000	Bansos dan Operasional	2.551	RTS	2.551 RTS	100	2.678.550.000	100,00	Dinsos-nakertrans
b	Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Karangwaru	2.000.000.000	Pembangun-an Fisik	1	Unit	100%	100	2.000.000.000	100,00	**Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah**
c	Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK	4.074.200.000	Pemberian insentif kepada GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA	2.289	orang	2.289	100	2.746.800.000	67,42	Dinas Pendidikan

Sumber: Analisis Pemkot Yogyakarta, 2016

Capaian fisik atas kegiatan yang mendukung Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada 2015 menunjukkan kinerja fisik yang optimal. Namun terdapat serapan yang kurang optimal, terhadap capaian kinerja keuangan terutama pada pemberian insentif GTT/ PTT pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK; yang menunjukkan progres realisasi keuangan sebesar 67,42%, berkaitan anggaran yang tidak dapat dicairkan 100%, sehubungan adanya guru yang sudah lulus sertifikasi, distribusi guru yang pensiun/ keluar/ pindah, dan instirusi sekolah yang tidak melakukan operasional lagi atau tidak ada kegiatan belajar mengajar.

2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Bantul

Alokasi bantuan keuangan/ Tugas Pembantuan kepada Kabupaten Bantul sebesar Rp29.297.100.000,00 dengan realisasi Rp28.160.700.000,00 atau dengan persentase realisasi sebesar 96,12%. Dana pendamping yang dialokasikan oleh Kabupaten Bantul Rp27.932.800.000,00. Realisasi Tahun 2015 pada tabel 6.16.

Secara umum pelaksanaan kegiatan berupa bantuan keuangan/ Tugas Pembantuan oleh Kabupaten Bantul sudah cukup optimal dengan progres capaian fisik yang sudah optimal. Upaya penanggulangan kemiskinan dari target 16094 RTS dalam pelaksanaan terdapat penggantian 536 RTS yang diambil dari RTS cadangan sesuai SK Gubernur. Penggantian dilakukan karena RTS tersebut sudah pernah menerima program yang sama tahun sebelumnya, meninggal dunia tanpa ahli waris, RTS yang bersangkutan tidak ada, pindah alamat luar DIY, pindah alamat tidak diketahui alamatnya, transmigrasi, PNS dan tidak bersedia menerima bantuan. Adapun pemberian Insentif untuk GTT/ PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK tidak dapat direalisasi sesuai dengan target dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak aktif mengajar, sudah mendapatkan sertifikasi, meninggal dunia dan sudah diangkat sebagai CPNS.

Tabel 6.16 Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Yogyakarta TA 2015

No	Uraian	Anggaran Pagu (BKK)	Penggunaan Dana	Target			Realisasi (Sekarang)			SKPD Pengampu
				Volume	Satuan	Fisik	%	Keuangan (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bantuan Keuangan Kapada Kab. Bantul Yang Bersifat Khusus									
a	Penang-gulangan Kemiskinan	16.898.700.000	membantu keluarga miskin untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif	16.094	RTS	16.094 RTS	100	16.898.700.000	100	Bappeda
b	Pembang-unan Pasar Percontohan Pasar Sorobayan	4.000.000.000	Membantu ketersediaan sarana perdagangan percontohan	1	unit		100	4.000.000.000	100	DPU
c	Belanja Bantuan Pelaksana-an PILKADA	3.500.000.000	Membantu kelancaran penyeleng-garaan PILKADA	1	paket		100	3.500.000.000	100	KPU
d	Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK	4.898.400.000	Mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah	21.243	orang	2.797 orang	100	3.762.000.000	76,80	Dikmen

Sumber: Analisis Pemkab Bantul, 2016

Alokasi bantuan keuangan/ Tugas Pembantuan kepada Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp12.449.900.000 dengan realisasi Rp12.449.900.000 atau dengan persentase realisasi sebesar 100%. Dana pendamping yang dialokasikan oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp9.255.098.500 Realisasi Tahun 2015 pada tabel 6.17.

Kinerja pelaksanaan pelaksanaan kegiatan berupa bantuan keuangan/ Tugas Pembantuan oleh Kabupaten Kulon Progo sudah cukup optimal dengan progres capaian fisik yang menunjukkan capaian hingga 100%. Untuk progres penanggulangan kemiskinan juga dilaksanakan dengan optimal dengan catatan bahwa pemberian dilakukan pada 2.761 RTS dari target 3.861 RTS. Hal itu disebabkan pasca verifikasi ditemukan 43 RTS meninggal, 51 RTS pindah, dan 252 RTS sudah diberikan tahun sebelumnya (2013-2014) dan 35 RTS tidak bersedia menerima bantuan.

3) Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Gunungkidul

Alokasi bantuan keuangan/ Tugas Pembantuan kepada Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp25.313.025.000 dengan realisasi Rp25.008.225.000 atau dengan persentase realisasi sebesar 98,80%. Dana pendamping yang dialokasikan oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp19.448.388.500. Realisasi Tahun 2015 pada tabel 6.18.

Secara umum pelaksanaan kegiatan berupa bantuan keuangan/ Tugas Pembantuan oleh Kabupaten Gunungkidul sudah cukup optimal yang ditunjukkan progres fisik sebagian besar mencapai 100%, kecuali pada pemberian insentif GTT/ PTT pada TK, SD, SMP, SMA, SMK. Hal itu disebabkan anggaran pada pagu BKK Pemda DIY lebih besar dari kebutuhan yang sudah dikurangi lulusan peserta sertifikasi tahun 2014 dan di perjalanan triwulan memungkinkan terdapat penerima yang mengundurkan diri, berhalangan tetap dan lain-lain.

Tabel 6.17 Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Kulon Progo TA 2015

No	Uraian	Pagu Anggaran (B K K)	Target		Realisasi (Sekarang)			SKPD Pengampu
			Volume	Satuan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Bantuan Keuangan Kpd Kab. Kulon Progo Yang Bersifat Khusus**							
a	Penanggulangan Kemiskinan	3.861.900.000	3.861	RTS	100	3.861.900.000	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
b	Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Sentolo	3.000.000.000	1	Paket	100	3.000.000.000	100	Dinas Perindag ESDM
c	Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit, Pembangunan Rumah Sakit Nyi Ageng Serang (Kelas D) - Pasangan Instalasi dan Gedung Radiologi dan Instalasi Kebidanan dan Kandungan	2.650.000.000	2	Unit	100	2.650.000.000	100	Dinas Kesehatan
d	Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK	1.338.000.000	1.115	orang	100%	1.338.000.000	100	Dinas Pendidikan
e	Mobil Pemadam Kebakaran	1.338.000.000	1	unit	100	1.338.000.000	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Analisis Pemkab Kulon Progo, 2016

Tabel 6.18 Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Gunungkidul TA 2015

No	Uraian	Anggaran Pagu BKK (Rp)	Penggunaan Dana	Target Fisik				Realisasi		Keterangan
				Volume	Satuan	Fisik	%	Keuangan	%	
1	**Bantuan Keuangan Kepada Kab. Gunungkidul Yang Bersifat Khusus**									
a	Penanggulang-an Kemiskinan	7.268.100.000	6.922 RTS	6.922	RTS	100	%	7.268.100.000	100,00	BAPPEDA
b	Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Semin	4.000.000.000	Untuk Membangun Los, Kios, Mushola, MCK, Kantor, Gudang, Lahan Parkir	1	Paket	100	%	4.000.000.000	100,00	
c	Belanja Bantuan Pelaksanaan Pilkada	4.000.000.000	Untuk Pilkada	1	Kegiatan	100	%	3.908.470.000	97,71	KPU
d	Pembangunan Terminal Tipe C di Semin	3.500.000.000	Untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Pekerjaan Konstruksi	1	Paket	100	%	3.491.266.000	99,90	Dishubkom-info

No	Uraian	Anggaran Pagu BKK (Rp)	Penggunaan Dana	Target Fisik				Realisasi		Keterangan
				Volume	Satuan	Fisik	%	Keuangan	%	
e	Pembangunan Gedung Asrama SMK Tanjungsari	2.500.000.000	Pembangunan Asrama, Laboratorium, dan Peralatan Pengolahan Ikan dan Peralatan Bengkel	1	Paket	100	%	2.392.866.000	95,70	Disdikpora
f	Insentif GTT/ PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK	3.084.000.000	Mendukung Pembelajaran	2332 Orang	100.000/ Bulan	88	%	2.702.700.000	87,64	Disdikpora
g	Parkir Pantai Baron dan Krakal	960.925.000	Penataan kawasan Pantai Baron dan Krakal	2	Paket	100	%	960.925.000	100	Disbudpar

Sumber: Analisis Pemkab Gunungkidul, 2016

4) Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Sleman

Alokasi bantuan keuangan/ Tugas Pembantuan kepada Kabupaten Sleman sebesar Rp26.366.550.000 dengan realisasi Rp24.627.950.000 atau dengan persentase realisasi sebesar 93,41%. Dana pendamping yang dialokasikan oleh Kabupaten Sleman sebesar Rp50.449.446.600. Realisasi Tahun 2015 pada tabel 6.19.

Secara umum pelaksanaan bantuan keuangan/ tugas pembantuan oleh Kabupaten Sleman Tahun 2015 menunjukkan realisasi yang sudah optimal. Adanya deviasi serapan keuangan yang lebih dari 10% pada kegiatan pemberian insentif GTT/ PTT pada TK, SD, SMP, SMA, SMK disebabkan adanya rasionalisasi jumlah sasaran, berkaitan adanya guru yang tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan adanya status tenaga pendamping yang tidak berhak menerima insentif.

Tabel 6.19 Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Sleman TA 2015

No	Uraian (Rincian Kegiatan)	Anggaran Pagu (BKK)	Penggunaan dana	Target		Realisasi (Sekarang)			SKPD Pengampu
				Volume	Satuan	Real. Fisik	Keuangan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus**								
a	Penanggulangan Kemiskinan	12.759.000.000	Bantuan sosial	12759	RTS	100	12.759.000.000	100,00	Badan KB PM PP
b	Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Prambanan	5.000.000.000	Fondasi	1	paket	100	5.000.000.000	100,00	Dinas Pasar dan DPUP
c	Belanja Bantuan Pelaksanaan PILKADA (KPUD)	2.500.000.000	Untuk Pilkada	1108	OB	100	2.500.000.000	100,00	KPU Sleman
d	Insentif GTT/ PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK	5.469.600.000	Mendukung pembelajaran	5992	orang	100	3.732.000.000	68,23	Dinas Dikpora

Sumber: Analisis Pemkab Sleman, 2016

Bab 7

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

7.1 KERJASAMA ANTAR DAERAH

7.1.1 Kerjasama Antar-Daerah

Kerjasama antar daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/ Walikota atau antara Bupati/ Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/ Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dasar pelaksanaan Kerjasama Antar-Daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 363 berisikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling mengutungkan.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan:
   a. Daerah lain;
   b. Pihak ketiga; dan/ atau
   c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
3. Kerjasama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat 92 huruf a dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerja sama sukarela.

Dalam menjalin kerjasama dengan daerah lain, penanganan kerjasama dilaksanakan dengan membangun jejaring yang efektif agar pelaksaan implementasi kerjasama dapat berjalan sesuai sasaran dan saling menguntungkan.

Pada tahun 2015, kerjasama Pemda DIY dengan pemerintah daerah lain di wilayah Indonesia telah dibentuk sebanyak 14 kerjasama sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, dan Pemkab Sleman, & Pemkot Yogyakarta tentang Konstribusi Pembiayaan dan Pemeliharaan Tepat Pemrosesan akhir dan/ atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, Pemkot Yogyakarta tentang Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah domestik terpusat;
3. Perjanjian Kerja sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan Pemda DIY Kerja Sama di Bidang Kepariwisataan;
4. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY & Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tentang Kerjasama Bidang Kehutanan;
5. Perjanjian Kerja Sama Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan BKPM DIY, tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah dan DIY;
6. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan Pariwisata;
7. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Penanganan Masalah Sosial;
8. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan Perikanan;
9. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan Perkebunan;
10. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan Pendidikan;
11. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan Industri dan Perdagangan;
12. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan Peternakan;
13. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Pengembangan SDM Aparatur;
14. Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY, tentang Penanaman Modal.

Pada tahun 2015, Pemda DIY telah mulai melaksanakan proses pembentukan Kerjasama Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah Lain melalui Penandatangan 2 (dua) *Letter of Intent (LoI)* serta penegasan kembali 2 (dua) kerjasama luar negeri yang telah terjalin melalui penandatangan dua *Reaffirmation,* Penandatangan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain di luar negeri diantaranya sebagai berikut:

1. *Reaffirmation of The Friendly Relations Agreement* antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kyoto Prefecture, Jepang. Ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2015 di Kyoto pada saat peringatan 30 Tahun kerjasama meliputi kerjasama di bidang Kesenian dan Kebudayaan, Pendidikan dan Ilmu Teknologi, Pariwisata, Industri dan lain-lain;
2. Penegasan Kembali Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2015 oleh Gubernur DIY dengan Gubernur Gyeongsangbuk-do dalam rangka memperingati 10 tahun hubungan kerjasama meliputi kerjasama pembangunan pedesaan;
3. *Letter of Intent* antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Victoria, Australia Ditandatangani pada tanggal 30 September 2015 meliputi kerjasama bidang seni-budaya dan pendidikan;
4. *Letter of Intent on Friendly Coorperation* antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang Ditandatangani pada tanggal 23 November 2015 meliputi kerjasama bidang Budaya, Pertanian, Pendidikan, dan Pariwisata.

Sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat 5 (lima) Kesepakatan kerjasama Pemda DIY dengan daerah lain di luar negeri yang masih aktif, meliputi:

1. *Sister Province* dengan Kyoto Prefecture, Jepang, meliputi kerjasama bidang seni budaya, pendidikan/ iptek, pariwisata, industri serta bidang-bidang lain yang disepakati *(MoU Sister Province)*.
2. Dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan/ seni, pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, dan investasi *(MoU Sister Province)*.
3. Dengan Gangwon, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang pariwisata, pertanian, iptek, kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan bidang-bidang lain yang disepakati *(MoU Friendly Ties Cooperation)*.

4. Dengan Pemerintah Kota Shanghai, RRT meliputi kerjasama bidang pariwisata, perdagangan dan investasi, kebudayaan, pendidikan dan bidang-bidang yang disepakati (*MoU Friendship Cooperation*).
5. *Dengan pemerintah* Pemerintah Chiang Mai, Thailand, meliputi kerjasama meliputi kerjasama bidang pariwisata, pertanian, iptek, kebudayaan, pendidikan, dan bidang-bidang lain yang disepakati (*Memorandum of Understanding)*.

Untuk kesepakatan kerjasama DIY dengan daerah lain dil uar negeri yang mengalami stagnasi sampai dengan tahun 2015 adalah:

1. Dengan Provinsi Ismailia, Mesir, perjanjian kerjasama meliputi bidang perdagangan, pariwisata, IPTEK, industri, pendidikan dan kebudayaan (*MoU Sister Province*).
2. Dengan pemerintah negara bagian California, Amerika Serikat meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perdagangan dan ekonomi, industri, investasi, lingkungan hidup dan bidang lain yang disepakati (*Memorandum of Understanding*)
3. Dengan pemerintah Land Tirol, Austria meliputi bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (*Memorandum of Understanding*)
4. Dengan Pemerintah Provinsi Chungcheongnam-do, Korea Selatan meliputi administrasi pemerintah, budaya dan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan,industri dan investasi, pariwisata, informasi dan komunikasi, pertanian dan perikanan, kesehatan masyarakat dan kesejahteraaan sosial (*Memorandum of Understanding*)

Pada tahun 2014, disamping pembentukan kesepakatan/perjanjian kerjasama baru, upaya penanganan dan fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri yang telah dilakukan adalah:

1. Kerjasama antar daerah di dalam negeri:
   a. Rapat Kerja Teknis Kerjasama Kabupaten/ Kota se DIY;
   b. Rapat Kerja Teknis Kerjasama DIY-Kalimantan Timur;
   c. Rapat Kerja Teknis Kerjasama DIY-Jawa Tengah;
   d. Rapat Kerja Teknis Kerjasama DIY-Jawa Timur;

2. Kerjasama antar daerah dengan pihak di luar negeri:
    a. kegiatan yang dilaksanakan adalah pengiriman misi kebudayaan dan ekonomi dipimpin langsung oleh Gubernur DIY untuk memperingati 30 tahun kerjasama DIY-Kyoto di Kyoto Prefecture, Peringatan 30 tahun kerjasama melalui Pelaksanaan Festival Jogja-Japan Week di UGM, penandatanganan reafirmasi kerjasama, dan pengiriman lukisan anak-anak;
    b. *Joint Working Group* untuk pembahasan pembentukan Rumah Persahabatan DIY-Shanghai di Yogyakarta;
    c. Pengiriman delegasi dari Pemda DIY untuk mengikuti program *International Cooperation Management* Program 2015 di Shanghai;
    d. Pengiriman Misi Kebudayaan, Pariwisata, dan Perdagangan untuk mengikuti Expo TTI di Shanghai;
    e. Pengiriman misi kebudayaan untuk mengikuti Gyeong Silk Road Festival;
    f. Festival Peringatan 10 tahun kerjasama DIY-Gyeongsangbuk-do yang dipentaskan di Gedung Graha Sabha Pramana UGM;
    g. Pengiriman tenaga pertanian untuk mempelajari teknologi pertanian di Korea;
    h. Pengiriman staf Pemda DIY untuk mengikuti Korean and Language Program 2015;
    i. Penyelenggaraan Program Desa Mandiri Saemaul di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul;
    j. Pengiriman delegasi dari Pemda DIY, Bantul, dan Gunungkidul untuk mengikuti *Saemaul Leader Program 2015*.

Pada program/ kegiatan yang mendukung kerjasama antar daerah Terdapat 1 (satu) program yaitu Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan 2 kegiatan. Jumlah pagu sebesar Rp1.291.584.750 atau sebesar 11,06% dari total anggaran perubahan Belanja langsung APBD tahun 2015, sedangkan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 92,19%.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Kesepakatan Pemda DIY dengan daerah lain sudah banyak dilakukan namun tindak lanjut kesepakatan kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama masih belum optimal.

b. Solusi

Meningkatkan koordinasi terhadap materi kesepakatan kerjasama untuk dapat ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui kemajuan dari manfaat kerjasama tersebut.

7.1.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pada tahun 2015 kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dibentuk terdapat 7 (tujuh) kerjasama yang terdiri dari:

1. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan LAPAN, tentang Pemanfaatan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa untuk mendukung program pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan LAPAN, tentang Pemanfaatan sains dan teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi kelautan dan perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BPP ESDM (Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral) Tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Dibidang Konservasi dan Diversifikasi Energi di DIY;
4. Perjanjian Kerja sama antara Pemda DIY dengan BPP ESDM (Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral), tentang Kerja sama Pengembangan dan Implementasi Gasmin Batubara untuk Industri Kecil Menengah di DIY;
5. Kesepakatan Bersama antara POLDA DIY, Pemda DIY, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, tentang Proses seleksi administrasi kependudukan calon anggota POLRI dan Calon Aparatur Sipil Negara POLRI;

6. Perjanjian Kerja sama antara POLDA DIY, Pemda DIY, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Sleman dan Pemkot Yogyakarta, tentang Proses seleksi administrasi kependudukan calon anggota POLRI dan Calon aparatur sipil Negara POLRI;
7. Kesepakatan bersama antara Menteri ESDM, Menteri DIKBUD, Menteri Pariwisata, Pemda DIY, Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Wonogiri dan Pemkab Pacitan tentang Pengembangan dan Pelestarian *Geopark* Gunungsewu.

Sedangkan kerjasama luar negeri dengan pihak ketiga yang telah dibentuk pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagai berikut:

1. *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan AIC, Universitas Monash, Australia Ditandatangani pada tanggal 16 November 2015 tentang Seni Budaya;
2. *Implementing Arrangement* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan *Adeleide Festival Centre Trust*, Australia Ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2015, tentang Seni Budaya.

Pada program/ kegiatan yang mendukung kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2015 terdapat 1 program yaitu Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan 2 kegiatan. Jumlah pagu sebesar Rp1.291.584.750 atau sebesar 11,06% dari total anggaran perubahan Belanja langsung APBD tahun 2015, sedangkan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 92,19%.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Kesepakatan Pemda DIY dengan pihak ketiga sudah banyak dilakukan namun tindak lanjut kesepakatan kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama masih belum optimal.

b. Solusi

Meningkatkan koordinasi terhadap materi kesepakatan kerjasama untuk dapat ditindak lanjuti melalui perjanjian kerjasama dan melakukan monitoring dan

evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui kemajuan dari manfaat kerjasama tersebut.

Pencapaian indikator kinerja daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Aspek Pelayanan Umum yang telah ditetapkan di RPJMD Tahun 2012-2017, pada indikator Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama *di tahun 2014 sebesar 60% dan tahun 2015 meningkat 5% menjadi 65%.*

Agar kesepakatan bersama dapat memiliki kekuatan hukum dan dapat dimanfaatkan dalam wujud kegiatan teknis, Pemda DIY selalu mengupayakan percepatan tindak lanjut kesepakatan tersebut menjadi bentuk perjanjian kerjasama. Pada Tahun 2015 Target Persentase Kesepakatan Bersama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama dari 10 Kesepakatan Bersama yang ada, telah berhasil ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerjasama sebanyak 19 buah atau sebesar 292,31%.

Pada indikator kinerja Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama *pada tahun 2014 capaiannya sebesar 78,43%. Sedangkan, pada tahun 2015 dengan target 65%, realisasinya 190%, sehingga capaian realisasinya 292,31%. Pada akhir RPJMD 2017 targetnya 75%, sehingga capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 253,33%.*

Tabel 7.1 Daftar Rincian Naskah Kesepakatan yang Ditindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Pada Tahun 2015

No	Kesepakatan Bersama	No	Perjanjian Kerja Sama	Keterangan
1.	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan LAPAN No: 62/02/2015 & 3/KSP/II/2015, tanggal 12-02-2015 tentang Pemanfaatan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa untuk mendukung program pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.	(1)	Perjanjian Kerja Sama antara LAPAN dengan Pemda DIY No: 63/02/2015 & 3/PERJ/GUB/II/2015, tanggal 12-02-2015, tentang Pemanfaatan sains dan teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi kelautan dan perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta	PKS merupakan tindak lanjut KBS. Jangka waktu PKS: 3 tahun Pengampu DISKANLA DIY
2.	Keputusan Bersama Bupati Bantul, bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta No. 18 Tahun 2001, 01/PK-KDH/2001, & 01 Tahun 2001, tanggal 30 Januari 2001 tentang Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan sarana Perkotaan Antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta	(1)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, dan Pemkab Sleman, & Kota Yogyakarta No: 1/PERJ/Gub/II/2015, 11.1/Pk/Bt/2015, 02/Pk-Kdh/A/2015, 31/Perj. YK/2015 tanggal 15-02-2015 tentang Konstribusi Pembiayaan dan Pemeliharaan Tempat Pemrosesan akhir dan/ atau tempat pengelolaan sampah terpadu	Jangka waktu PKS: 1 tahun Pengampu: Kartamantul
3.	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan BPP ESDM No. 2418/05/BLB/2015 & 6/KSP/IV/2015, tanggal 21-04-2015, tentang Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Dibidang Konservasi dan Diversifikasi Energi di Daerah Istimewa Yogyakarta	(1)	Perjanjian Kerja sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemda DIY No. 582/05/BLT/2015 & 4/PERJ/GUB/IV/2015, tanggal 21-04-2015 tentang Kerja sama Pengembangan dan Implementasi Gasmin Batubara untuk Industri Kecil Menengah di DIY	PKS merupakan tindak lanjut KBS. PKS berlaku 2 tahun Instansi Pengampu: Dinas Disperindagkop DIY

No	Kesepakatan Bersama	No	Perjanjian Kerja Sama	Keterangan
4.	Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Bantul No.KU.07.01-DC/673, 9/KSP/X/2009, 024/NKB/2009, 30/PK.KDH/B/2009 & 37a/MOU/Bt/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Program Metropolitan Sanitation Management & Health Project (MSMHP) di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta	(1)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, Pemkot Yogyakarta No. 5/PERJ/GUB/IV/2015, 16.1/PK/BT/2015, 17.1/PK.KDH/A/2015, 39/Perj.Yk/2015, tanggal 21-04-2015 tentang Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah domestik terpusat	PKS berlaku 5 tahun Instansi Pengampu: Dinas PUP ESDM
5.	Kesepakatan Bersama antara POLDA DIY, Pemda DIY, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Sleman, Pemkot Yogyakarta, No: B.05/V/2015, 8/KSP/V/2015, 22/MoU.KP/HKM/2015, 10/MoU/BT/2015 415.4/KB/07/2015, 25/PK.KDH/A/2015, 05/NKB.YK/2015, tanggal 08-05-2015 tentang Proses seleksi administrasi kependudukan calon anggota POLRI dan Calon aparatur sipil Negara POLRI	(1)	Perjanjian Kerja sama antara POLDA DIY, Pemda DIY, Pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Sleman dan Pemkot Yogyakarta B/01/V/2015 6/PERJ/GUB/V/2015, 23/PRJ.KP/HKM/2015, 29/PK/Bt/2015 415.4/PK/12/2015, 26/PK.KDH/D/2015, 40/Perj.YK/2015, tanggal 08-05-2015 tentang Proses seleksi administrasi kependudukan calon anggota POLRI dan Calon aparatur sipil Negara POLRI	PKS merupakan tindak lanjut KBS. PKS berlaku 3 tahun Instansi pengampu: Biro Tata Pemerintahan
6.	Kesepakatan Bersama antara Pem Prov. DIY Pem Prov. Jawa Timur No. 08 / KSP /2008, 120.I/07/012/2008, tanggal 17-6-2008 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah	(1)	Perjanjian Kerja sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Jatim dengan Pemda DIY No: 9/PERJ/GUB/V/2015 & 556/6306/10751/2015, tanggal 09-05-2015 Kerja Sama dibidang Kepariwisataan.	PKS merupakan tindak lanjut KBS. Masa berlaku PKS 5 Tahun Instansi pengampu: Dispar DIY
		(2)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY & Dinas Kehutanan Prov. Jatim No: 7/PERJ/GUB/V/2015 & 120.1/202/012/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Kerjasama Bidang Kehutanan	PKS merupakan tindak lanjut KBS. Masa berlaku PKS 5 Tahun

No	Kesepakatan Bersama	No	Perjanjian Kerja Sama	Keterangan
7.	Peraturan Bersama Pemda Prov. DIY dan Pemda Prov. Tk 1 Jateng No. 1/pb/1998 & No. 18 Tahun 1998 tanggal 4 November 1998 tentang Pokok-Pokok Kerjasama Antara Pemda Prov. DIY dengan Prov. Jateng di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan	(1)	Perjanjian Kerja Sama Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan BKPM DIY 120.13/1259/2015 11/PERJ/GUB/VI/2015, tanggal 16-06-2015, tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Masa berlaku PKS 5 Tahun Instansi pengampu: BKPM DIY
8.	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Pemprov Kaltim tanggal 18 Juni 2008 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	(1)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY No: 556/1012 bud par II, 556/4869, tanggal 26-08-2015 Pengembangan Pariwisata	PKS merupakan tindak lanjut KSB. Masa berlaku PKS: 5 tahun
		(2)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY No: 119/17474/1.3 & 119/67/DS-TU/2015, tanggal 26-08-2015 tentang Penanganan Masalah Sosial	PKS merupakan tindak lanjut KSB. Masa berlaku PKS: 5 tahun
		(3)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY No: 075/700/DKP/2015 & 602/5334 tanggal 26-08-2015 tentang Pengembangan Perikanan	PKS merupakan tindak lanjut KSB. Masa berlaku PKS: 5 tahun
		(4)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY No: 119/5575/Bun/2015 & 119/13603 tanggal 26-08-2015 tentang Pengembangan Perkebunan	PKS merupakan tindak lanjut KSB. Masa berlaku PKS: 5 tahun
		(5)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY No: 197/3664//IX/2015 & 421/5960, tanggal 26-08-2015 tentang Pengembangan Pendidikan	PKS merupakan tindak lanjut KSB. Masa berlaku PKS: 5 tahun
		(6)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY tanggal 26-08-2015 tentang Pengembangan Industri dan Perdagangan	PKS merupakan tindak lanjut KSB. Masa berlaku PKS: 5 tahun
		(7)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY tanggal 26-08-2015 tentang Pengembangan Peternakan	PKS merupakan tindak lanjut KSB. Masa berlaku PKS: 5 tahun

No	Kesepakatan Bersama	No	Perjanjian Kerja Sama	Keterangan
		(8)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY tanggal 26-08-2015 tentang Pengembangan SDM Aparatur	PKS merupakan tindak lanjut KSB. Masa berlaku PKS: 5 tahun
		(9)	Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltim dan Pemda DIY tanggal 08-10-2015 tentang Penanaman Modal	PKS merupakan tindak lanjut KSB. Masa berlaku PKS: 5 tahun
9.	*Letter of Intent (LoI)* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Victoria, Australia. Ditandatangani Bidang: Seni dan Budaya, dan Pendidikan	-		. Saat ini proses pembentukan kerjasama adalah permohonan persetujuan DPRD DIY
10.	*Letter of Intent on Friendly (LoI) Coorperation* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang. Ditandatangani Bidang Budaya, pertanian, pendidikan dan pariwisata.	-		. pada saat kunjungan penjajakan kerjasama oleh delegasi DIY ke Yamanashi, telah ditandatangani Minutes of Discussionan antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Prefektur Yamanashi, Jepang ditandatangani pada tanggal 25 agustus 2015. . Saat ini proses pembentukan kerjasama adalah permohonan persetujuan DPRD DIY
11.		(1)	Reaffirmation of The Friendly Relations Agreement antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Kyoto Prefecture, Jepang	Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengiriman misi kebudayaan dan ekonomi dipimpin langsung oleh Gubernur DIY untuk memperingati 30 tahun kerjasama DIY-Kyoto di Kyoto Prefecture. Peringatan 30 tahun kerjasama melalui pelaksanaan festival Jogja-Japan week di UGM, penandatangan Reafirmasi kerjasama dan pengiriman lukisan anak-anak

No	Kesepakatan Bersama	No	Perjanjian Kerja Sama	Keterangan
12.		(2)	*Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Gyeongsangbuk do, Korea Selatan ditandatangani tanggal 24 Februari 2005, berlaku 5 tahun dan diperpanjang 5 tahun berikutnya. Bidang: Ekonomi Pendidikan Kebudayaan dan Seni Pertanian Pariwisata	Kerjasama aktif Pada tahun 2015, kegiatan yang terlaksana adalah: Pengiriman misi kebudayaan untuk mengikuti Gyeong Silk Road Festival Festival Peringatan 10 tahun kerjasama DIY-Gyeongsangbuk do yang dipentaskan di Gedung Grha Sabha UGM Pengiriman tenaga pertanian untuk mempelajari teknologi pertanian di Korea Pengiriman staf Pemda untuk mengikuti *Korean and Language Program 2015* Penyelenggaraan Program Desa Mandiri Saemaul di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul Pengiriman delegasi dari Pemda DIY, Bantul, dan Gunungkidul untuk mengikuti Saemaul Leader Program 2015 .

7.2 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

7.2.1 Kebijakan dan Kegiatan

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2015, sejatinya dilakukan oleh hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kaitannya sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Diantaranya adalah Forkorpimda yang terdiri dari Polda DIY, Korem 072 Pamungkas, Lanal TNI AU, Lanud TNI AU, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kementerian Agama DIY.

Pelaksanaan Forkorpimda merupakan amanat Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 meliputi:

I. Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menjelang dan Pasca Hari Raya Idul Fitri 1436 H/2015 di Wilayah DIY.

   Rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut antara lain:

   1. Perlu ada penambahan alkohol dan obat-obatan pendukung di area wisata pantai terkait dengan potensi kerawanan ubur-ubur pada wisatawan, utamanya di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
   2. Perlu dilakukan pengerahan personil untuk menjaga area lintasan kereta api yang tidak berpintu, terumata di wilayah Kabupaten Kulonprogo;
   3. Perlu ada dukungan bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membangun rumah sakit rujukan di area pantai selatan, guna mengantisipasi korban pengunjung pantai wisata dan/ atau korban kecelakaan lalu lintas pada area wisata pantai selatan;

4. PMI DIY supaya meningkatkan stok darah selama libur Lebaran 1436 H;
5. Perlu ada peningkatan kewaspadaan di Bandara Adisutjipto berkenaan dengan peredaran narkoba, karena tidak menutup kemungkinan masa libur Lebaran 1436 H digunakan sebagai kesempatan untuk menyelundupkan narkoba ke DIY, mengingat DIY menjadi salah satu pasar potensial bagi peredaran narkoba;
6. Polda DIY dan intelijen supaya mengantisipasi aksi sweeping tempat-tempat ibadah/kegiatan ibadah agama lain tertentu, serta mengantisipasi isu SARA;
7. Perlu kesiapsiagaan mobil ambulan di pos polisi yang dapat meng-cover beberapa pos polisi lainnya, sebagai antisipasi terjadinya kecelakan lalu lintas;
8. Pertamina DIY supaya memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan SPBU yang buka/melayani penjualan selama 24 jam;
9. Kepolisian dan Pemerintah Daerah (Pemda DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta) supaya berkoordinasi menggunakan area parkir di Kantor Dinas Pariwisata DIY bagi pengunjung kawasan Malioboro;
10. BPBD DIY, Bank Indonesia dan Dinas Pertanian DIY supaya dapat mengantisipasi dampak bencana *El-Nino* seperti kekeringan, gagal panen, dan inflasi bahan pangan pokok;
11. Perlu ada koordinasi lanjutan guna tindaklanjut laporan BPOM DIY perihal tingginya persentase sarana produksi bahan pangan di DIY yang tidak memenuhi syarat.

II. Rapat Fasilitasi Koordinasi Daerah dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2015 di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut:
    1. Bagi Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kemendagri) diharapkan dapat:
        a. Segera menerbitkan PP dan Perpres ataupun aturan lainnya yang merupakan aturan turunan yang diamanatkan dalam UU Nomor 8 tahun 2015;
        b. Menyusun regulasi yang tegas yang mengatur sanksi dalam setiap pelanggaran.

2. Bagi aparat Kepolisian, KPU provinsi/ kabupaten/ kota dan Bawaslu DIY diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap praktik politik uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
3. Bagi KPU provinsi/ kabupaten/ kota diharapkan dapat:
    a. Melakukan validasi data kependudukan, karena basis data yang tidak kunjung usai, mulai e-KTP yang belum selesai, masih ditemui NIK ganda dan perubahan data yang tidak ter-update;
    b. Meningkatan kualitas SDM Panitia Pemungutan Suara, mekanisme pembentukan PPS juga perlu diubah, tidak lagi melalui usul bersama kepala desa dan BPD namun melalui seleksi terbuka;
    c. Memberikan jaminan bagi pasien dan penunggu RS serta Puskesmas untuk menggunakan hak pilihnya;
    d. Membentuk/membuat PS khusus di RS dan Rutan untuk menjamin keterpenuhan hak pilih warga Negara;
    e. Melaksanakan bimbingan teknis yang lebih intensif bagi anggota KPPD guna meminimalisir kesalahan administrasi;
    f. Melakukan pencermatan dalam proses penyortirsan dan distribusi logistik;
    g. Melakukan validasi yang akurat dalam penghitungan jumlah DPT dan surat suara;
    h. Menyusun regulasi berkenaan dengan pembuatan APK oleh pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada dengan pembatasan biaya, jumlah dan pengaturan mekanisme.

III. Rapat Kerja Rapat Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKORPIMDA) dalam rangka Antisipasi Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Menjelang Natal dan Tahun Baru 2016, dengan hasil sebagai berikut;
    1. Instruksi ke Bupati, Walikota dan Kepala Dinas untuk menyediakan event agar masyarakat tidak serta merta menuju kota sehingga tidak terjadi penumpukkan massa di Kota;

2. Tidak ada negosiasi untuk para pelaku kejahatan agar menjadikan efek jera kepada pelaku dan kepada yang lainnya jangan sampai iklim yang sudah baik ini rusak;
3. Perlu terus ada pengawasan dan antisipasi pada tempat-tempat wisata khususnya pantai. Pengadaan papan larangan mandi dan lainnya harap diperhatikan kondisinya juga kesiapan Tim SAR dan Tim Medis di tempat-tempat wisata.
4. Memantau situasi dan kondisi terminal bus, termasuk pendataan penumpang naik/ turun serta situasi dan kondisi lalu lintas jalan. Memantau dan menjaga kinerja APILL pada tiap persimpangan agar tetap berfungsi dengan baik selama Angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016. Mengantisipasi dan mengatur pada titik-titik keramaian dengan berkoordinasi bersama pemangku kepentingan.
5. Melakukan pemantauan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tingkat distributor dan di pasar tradisional baik di Kota maupun di Kabupaten. Operasi pasar mengantisipasi naiknya harga beras.
6. Pertamina DIY supaya memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan SPBU yang buka/melayani penjualan selama 24 jam dan ketersediaan SPBU Kantong di jalur padat pariwisata (rencana di SPBU Gading dan SPBU Duwet Gunungkidul).

7.2.2 Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan sub urusan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah secara umum berlangsung lancar dan efektif, tidak terdapat kendala permasalahan yang ditemui.

7.3 PEMBINAAN BATAS DAERAH

7.3.1 Kebijakan dan Kegiatan

Batas daerah di DIY sejumlah 8 (delapan) segmen, yang terdiri dari 1 (satu) segmen batas daerah antar provinsi (DIY dengan Provinsi Jawa Tengah), dan 7 (tujuh) segmen batas daerah antar kabupaten/ kota di DIY. Pada masing-masing segmen batas daerah dimaksud telah dilaksanakan penegasan batas daerah, dan

mendapatkan penetapan yuridis melalui Permendagri tentang Batas Daerah. Permendagri tentang Batas Daerah berisi deskripsi jalur batas daerah yang ditandai dengan pemasangan pilar batas daerah di lapangan, dan dilampiri dengan peta koridor batas daerah. Berikut disampaikan rincian Permendagri tentang Batas Daerah di DIY.

Tabel 7.2 Permendagri tentang Batas Daerah di DIY

No	Segmen Batas Daerah Otonom		Jml. Pilar Batas	Panjang Lintasan Batas (km)	Penetapan
1	DIY	Prov. Jawa Tengah	213	± 215,24	Permendagri 19/2006
2	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	79	± 28,18	Permendagri 70/2007
3	Kab. Gunungkidul	Kab. Bantul	83	± 51,70	Permendagri 71/2007
4	Kota Yogyakarta	Kab. Sleman	66	± 9,46	Permendagri 72/2007
5	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	28	± 6,50	Permendagri 4/2009
6	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	55	± 19,36	Permendagri 61/2009
7	Kota Yogyakarta	Kab. Bantul	160	± 18,74	Permendagri 15/2012
8	Kab. Bantul	Kab. Sleman	200	± 41,15	Permendagri 83/2013

Pasca penegasan batas daerah, dan dalam rangka pembinaan batas wilayah, maka kebijakan strategis yang perlu segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan. Hal ini terkait erat dengan entitas daerah otonom itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai *batas-batas wilayahyang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat* menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi daerah otonom di atas mengandung 2 (dua) dimensi, yakni dimensi spasial dan dimensi urusan kewenangan. Yang dimaksud dengan dimensi spasial adalah bahwa daerah otonom memiliki wilayah yang pasti *(fixed boundary)*, diwujudkan dengan pelaksanaan penegasan batas daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Kemudian yang dimaksud dengan dimensi kewenangan adalah kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terutama kewenangan daerah yang bersifat urusan pemerintahan konkuren.

Oleh karena itu, pelaksanaan urusan pemerintahan oleh suatu pemerintah daerah otonom semestinya memperhatikan batas-batas wilayah administrasi pemerintahannya, guna mewujudkan tertib administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan.

Batas Daerah didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah otonom berupa rangkaian titik-titik koordinat di atas permukaan bumi yg dituangkan dalam bentuk peta, dan secara definitif ditetapkan dalam Permendagri tentang Batas Daerah. Kemudian wilayah perbatasan adalah kawasan yang paling dekat dengan batas daerah, biasanya merupakan desa dan kecamatan yang terletak di sepanjang garis batas daerah. Berikut disampaikan ilustrasi batas daerah dan wilayah perbatasan.

Gambar 7.1 Ilustrasi Batas Daerah dan Wilayah Perbatasan

Perhatian pemerintah daerah di DIY dalam mengelola wilayah perbatasan dirasakan kurang, dan masih menganggap wilayah perbatasan sebagai halaman belakang *(backyard)*dari suatu daerah otonom. Paradigma ini menyebabkan beberapa kondisi di wilayah perbatasan, sebagai berikut.

1. Pembangunan (baik fisik maupun non-fisik) yang kurang diperhatikan/ terbengkalai;
2. Terjadi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang berada di luar wilayah administrasi yang menjadi kewenangannya;

3. Terjadi perselisihan karena adanya ego dalam mengelola potensi yang ada di wilayah perbatasan; serta
4. Permasalahan lain seperti konflik pemanfaatan ruang, sosial, ketentraman dan ketertiban, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya.

Berikut disampaikan beberapa contoh persoalan di wilayah perbatasan (baik segmen antar provinsi maupun segmen antar kabupaten/ kota di DIY) untuk memberikan gambaran mengenai wilayah perbatasan.

Sarana dan Prasarana di Wilayah Perbatasan:

Kondisi Jembatan Gembyong yang merupakan akses bagi warga di perbatasan Desa Ngoro-Oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman perlu perbaikan. Hal ini karena jembatan tersebut merupakan akses utama bagi warga kedua wilayah di perbatasan, serta penting bagi akses wisata Air Terjun Gembyong, Kudungmanten, Curug Gedhe dan beberapa curug kecil lainnya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di luar wilayah administrasi yang menjadi kewenangannya:

Pasca penegasan batas Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul, diketahui terdapat pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bantul, yakni SD Patangpuluhan (koordinat 7°48'38,35" LS dan

110°20'45,19" BT). Hal ini merupakan "dampak ikutan" dalam pelaksanaan penegasan batas daerah. Saat ini, proses belajar dan mengajar di SD Patangpuluhan masih aktif dengan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 129 siswa.

Upaya perwujudan tertib adminsitrasi pemerintahan akan segera dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip bahwa proses belajar-mengajar di SD Patangpuluhan dikedepankan untuk tidak terganggu, serta sekolah tidak dirugikan dengan kegiatan tertib administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta.

Perselisihan karena adanya ego dalam mengelola potensi yang ada di wilayah perbatasan:

Pemanfaatan lahan (tambak udang) di Desa Jangkaran oleh masyarakat Purworejo yang menimbulkan keberatan dari warga Desa Jangkaran (segmen perbatasan DIY - Provinsi Jawa Tengah).

Permasalahan lain, misal konflik pemanfaatan ruang:

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang secara eksisting di kawasan Hargodumilah (untuk bangunan hotel dan warung makan) dengan RTRW Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dan RTRW Desa Patuk Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul. RTRW Desa Srimartani mengatur pemanfaatan ruang untuk kawasan resapan air dan pertanian lahan kering, kemudian RTRW Desa Patuk mengatur pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung rawan bencana dan pertanian lahan kering.

Untuk mewujudkan tertib administrasi di wilayah perbatasan, maka Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah, dengan kegiatan Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar Daerah. Kegiatan tersebut dianggarkan sebesar Rp258.921.000, dengan keluaran sebagai berikut.

1. Penambahan pilar batas DIY-Jateng (perapatan pilar batas);
2. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap Permendagri Nomor 83 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2006;
3. Rekomendasi penanganan permasalahan di wilayah perbatasan; serta
4. *Database* pilar batas untuk Kabupaten Perbatasan DIY-Jawa Tengah (perbatasan Kabupaten Kulon Progo dan Purworejo).

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

A. Penambahan Pilar Batas DIY-Jateng (Perapatan Pilar Batas)

Salah satu keluaran Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah, pada kegiatan Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar Daerah adalah penambahan pilar batas DIY-Jateng (perapatan pilar batas). Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Jalur batas merupakan jalur maya di lapangan, sehingga perlu dilakukan perapatan tanda batas di lapangan berupa pembangunan pilar batas. Pada prinsipnya, semakin rapat tanda batas di lapangan akan memudahkan aparatur pemerintahan dan masyarakat setempat dalam memahami keberadaan jalur batas daerah di lapangan, dan hal ini akan mendorong terwujudnya tertib administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan;
2. Sebagai tindaklanjut Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah DIY Nomor: 120.13/002221 dan Nomor: 2/PERJ/SEKDA/II/2014 tentang Pembangunan dan/ atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai perjanjian kerjasama dimaksud, DIY berkewajiban melaksanakan kegiatan pembangunan dan/ atau pemeliharaan pilar batas daerah Nomor 001 sampai dengan Nomor 089 yang terletak di garis batas antara Kabupaten Kulonprogo dengan

Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban melaksanakan kegiatan pembangunan dan/ atau pemeliharaan pilar batas daerah mulai pilar Nomor 090 sampai dengan Nomor 213 yang terletak di garis batas antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan pembangunan pilar batas dalam rangka perapatan tanda batas sejumlah 15 pilar. Pilar-pilar batas tersebut dipasang mulai perbatasan Desa Kebonharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo dengan Desa Tawangsari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo; sampai dengan perbatasan Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo dengan Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Berikut disampaikan hasil pembangunan pilar batas dalam rangka perapatan tanda batas DIY-Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2015.

Tabel 7.3 Hasil Pembangunan Pilar Batas dalam rangka Perapatan Tanda Batas DIY- Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2015

No.	Nama Pilar Batas	Koordinat		Lokasi Pilar Batas
		LS	BT	
1.	42D/PBA.0029G	07˚ 42' 27.593"	110˚ 07' 51.518"	Perbatasan Dusun Gowok Desa Kebonharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY Dusun Ketawang Desa Tawangsari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.
2.	42E/PBA.0029H	07˚ 42' 09.670"	110˚ 07' 54.158"	Perbatasan Dusun Gowok Desa Kebonharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Ketawang Desa Tawangsari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.
3.	42F/PBA.0029J	07˚ 41' 55.393"	110˚ 07' 59.647"	Perbatasan Dusun Jarakan Desa Kebonharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Ketawang Desa Tawangsari Kec. Kaligesing Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.
4.	43A/PBA.0030A	07˚ 41' 46.379"	110˚ 08' 07.177"	Perbatasan Dusun Jarakan Desa Kebonharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Dukuh Desa Pucungroto Kec. Kaligesing Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.

No.	Nama Pilar Batas	Koordinat		Lokasi Pilar Batas
		LS	BT	
5.	43B/PBA.0030B	07˚ 41' 44.269"	110˚ 08' 14.482"	Perbatasan Dusun Jarakan Desa Kebonharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Dukuh Desa Pucungroto Kec. Kaligesing Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.
6.	44A/PBA.0031A	07˚ 41' 23.680"	110˚ 08' 10.730"	perbatasan Dusun Kalinongko Desa Pagerharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Krajan Satu Desa Pucungroto Kec. Kaligesing Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.
7.	44B/PBA.0031B	07˚ 41' 09.043"	110˚ 07' 59.326"	Perbatasan Dusun Kemesu Desa Pagerharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Krajan Dua Desa Pucungroto Kec. Kaligesing Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.
8.	44C/PBA.0031C	07˚ 40' 54.799"	110˚ 07' 34.272"	Perbatasan Dusun Kemesu Desa Pagerharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Krajan Dua Desa Pucungroto Kec. Kaligesing Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.
9.	45A/PBA.0032A	07˚ 40' 44.002"	110˚ 07' 17.720"	Perbatasan Dusun Sinogo Desa Pagerharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Ngadiboyo Desa Ngadirejo Kec. Kaligesing Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.
10.	45B/PBA.0032B	07˚ 40' 43.505"	110˚ 07' 12.116"	Perbatasan Dusun Sinogo Desa Pagerharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Ngadiboyo Desa Ngadirejo Kec. Kaligesing Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.
11.	45C/PBA.0032C	07˚ 40' 32.940"	110˚ 06' 56.328"	Perbatasan Dusun Sinogo Desa Pagerharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Kembangsoko Desa Ngadirejo Kec. Kaligesing dan Dusun Sleteh Desa Sedayu Kec. Loano Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.
12.	46A/PABA.0006A	07˚ 40' 05.512"	110˚ 07' 04.696"	Perbatasan Dusun Ngaglik Desa Pagerharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Sleteh/Sejati Desa Sedayu Kec. Loano Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.
13.	46B/PABA.0006B	07˚ 39' 47.774"	110˚ 07' 26.065"	Perbatasan Dusun Separang Desa Pagerharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Sejati Desa Sedayu Kec. Loano Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.
14.	47A/PABA.0007A	07˚ 39' 37.373"	110˚ 07' 39.262"	Perbatasan Dusun Sarigono Desa Pagerharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Wonosari Desa Sedayu Kec. Loano Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.

No.	Nama Pilar Batas	Koordinat LS	Koordinat BT	Lokasi Pilar Batas
15.	47B/PABA.0007B	07˚ 39' 12.610"	110˚ 08' 20.545"	Perbatasan Dusun Nglinggo Barat Desa Pagerharjo Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo DIY dengan Dusun Saribumi Desa Benowo Kec. Bener Kab. Purworejo Prov. Jawa Tengah.

Gambar 7.2 Contoh Pilar Batas yang Terpasang

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

Kebutuhan SDM dengan latar belakang pendidikan ilmu spasial (geografi atau teknik geodesi di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY belum tersedia.

b. Solusi:

Penguatan kapasitas SDM melalui pengisian personil dengan latar belakang pendidikan ilmu spasial (geografi atau teknik geodesi), sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal.

B. Peningkatan Pemahaman Aparatur terhadap Permendagri Nomor 83 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2006

Keluaran berikutnya pada kegiatan Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar Daerah adalah Peningkatan pemahaman aparatur terhadap Permendagri Nomor 83 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2006. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa masyarakat setempat perlu mengetahui jalur batas daerah yang telah ditetapkan dalam Permendagri tentang Batas Daerah. Bentuk kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi Permendagri tentang Batas Daerah dengan menghadirkan narasumber terkait, seperti pakar batas daerah dan instansi terkait untuk mendukung perwujudan tertib adminstrasi pemerintahan di wilayah perbatasan (kependudukan, pertanahan, perpajakan, dan lain sebagainya). Dengan demikian, aparatur pemerintah desa dan masyarakat setempat dapat memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya, baik informasi mengenai jalur batas, maupun informasi yang berkaitan dengan perwujudan tertib adminstrasi pemerintahan di wilayah perbatasan.

Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 83 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Berikut disampaikan pelaksanaan sosialisasi Permendagri Nomor 83 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2006.

Tabel 7.4 Pelaksanaan Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2013

No.	Sosialisasi	Waktu, Tempat, dan Peserta	Rekomendasi
1.	Permendagri Nomor 19 Tahun 2006	Selasa, 26 Mei 2015; Balai Desa Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman; Sebanyak 40 orang (unsur Bagian Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten yang berbatasan, pihak kecamatan, desa/ pedukuhan di wilayah perbatasan, serta kelompok penambang).	Perlu dibentuk forum masyarakat di wilayah perbatasan sebagai sarana musyawarah apabila muncul permasalahan di wilayah perbatasan; Perlu dilakukan pembaruan peta dasar untuk menggambarkan kondisi eksisting. Bencana Merapi tahun 2010 silam telah mengubah kenampakan Sungai Krasak, sehingga peta dasar yang ada saat ini informasinya sudah tidak *update* lagi; Perlu ada penyampaian data persil tanah yang hilang pada kantor Pajak Pratama terkait dengan penghapusan SPPT tanah, sehingga tidak ada lagi pungutan pajak terhadap persil tanah yang hilang akibat pergeseran Sungai Krasak.
2.	Permendagri Nomor 83 Tahun 2013	Kamis, 17 September 2015; Balai Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman; Sebanyak 40 orang (unsur Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang berbatasan).	Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman perlu segera melaksanakan pemeliharaan pilar batas antar kedua kabupaten, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012; Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman agar mengadakan koordinasi untuk membahas pemeliharaan pilar batas kedua kabupaten yang selanjutnya menjadi dasar penganggaran kegiatan; Pemerintah Kabupaten/ Kota agar dapat menyelesaikan permasalahan batas wilayah secara mandiri, terutama permasalahan yang sifatnya kecil; Masyarakat agar meminta ijin kepada Kantor Pertanahan setempat apabila hendak mengubah status tanah, misal dari tanah pertanian menjadi tanah pekarangan, dan lain sebagainya.

Gambar 7.3 Suasana Pelaksanaan Sosialisasi Permendagri Nomor 83 Tahun 2013

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

Tindaklanjut atas pelaksanaan sosialisasi Permendagri tentang Batas Daerah dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah/pemerintah desa terkait belum optimal.

b. Solusi:

a. Rekomendasi pelaksanaan sosialisasi Permendagri tentang Batas Daerah diinformasikan kepada Kepala Daerah melalui surat resmi tertulis dengan tembusan kepala intansi terkait sesuai tugas dan fungsi;

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi pelaksanaan sosialisasi Permendagri tentang Batas Daerah.

C. Rekomendasi Penanganan Permasalahan di Wilayah Perbatasan

Keluaran berikutnya pada kegiatan Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar Daerah adalah Rekomendasi Penanganan Permasalahan di Wilayah Perbatasan. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa secara eksisting terdapat potensi persoalan di wilayah perbatasan dan/ atau persoalan yang sudah muncul di wilayah perbatasan yang perlu segera ditangani, untuk menghindari konflik pada skala yang lebih besar. Desain kegiatan melalui rapat koordinasi perbatasan

(Rakortas), dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten sesuai dengan tema bahasan, serta mengundang instansi pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan 4 (empat) kali Rakortas dengan tema bahasan yang berbeda. 2 (dua) kali Rakortas mengambil tema bahasan mengenai Pelaksanaan Urusan Pendidikan di Wilayah Perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul. Kemudian 2 (dua) kali Rakortas berikutnya masing-masing digunakan untuk membahas tema Pemeliharaan dan Pembangunan pilar batas yang berada di jalur sungai, serta membahas tema Perjanjian Kerjasama antar Daerah dalam Pemeliharaan dan/ atau Pembangunan Pilar Batas Daerah (segmen batas antar Kabupaten/ Kota di DIY). Berikut disampaikan rincian pelaksanaan Rakortas tahun anggaran 2015.

1. Tema: Pelaksanaan Urusan Pendidikan di Wilayah Perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul.
   a. Waktu, Tempat, dan Peserta:
      - Rabu, 4 Maret 2015;
      - Ruang Rapat A, Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY;
      - Sebanyak 30 orang yang terkait (unsur Kanwil BPN DIY, Kantor Pertanahan Kab.Bantul dan Kota Yogyakarta, unsur Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kab. Bantul, serta unsur Pemerintah Kota Yogyakarta).

   Rekomendasi:

   a. Pelaksanaan urusan pendidikan SDN Patangpuluhan dapat dilaksanakan dengan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul;
   b. Untuk pengalihan urusan pemerintah Kota Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Bantul, diikuti dengan pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dukumen (P3D).

   b. Waktu, Tempat, dan Peserta:
      - Kamis, 20 Agustus 2015;
      - Ruang Rapat Gandhok Kiwo, Kepatihan;
      - Sebanyak 30 orang yang terkait (unsur Tim Penanganan Permasalahan di wilayah perbatasan, unsur instansi vertikal,

unsur Pemerintah Daerah DIY, unsur Pemerintah Kota Yogyakarta, dan unsur Pemerintah Kabupaten Bantul).

Rekomendasi:

a. Pada prinsipnya proses belajar-mengajar di SD Patangpuluhan dikedepankan untuk tidak terganggu, serta sekolah tidak dirugikan dengan kegiatan tertib administrasi di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta;
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan barang milik daerah tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila diperuntukkan salah satunya bagi kepentingan umum. Keberadaan SD Patangpuluhan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kepentingan umum. Dengan demikian Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memerlukan persetujuan DPRD Kota Yogyakarta apabila sepakat untuk mengalihkan pelaksanaan urusan pendidikan di SD Patangpuluhan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;
c. Pemerintah Kota Yogyakarta agar segera melakukan internalisasi dan akselerasi penyelesaian permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan urusan pendidikan di SD Patangpuluhan;
d. Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota diharapkan tidak melakukan pembiaran berkenaan dengan persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan.

2. Tema: Pemeliharaan dan Pembangunan pilar batas yang berada di jalur sungai.

   Waktu, Tempat, dan Peserta:

   - Kamis, 30 April 2015;
   - Ruang Rapat Lt. III Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
   - Sebanyak 30 orang yang terkait dari unsur instansi Pemerintah DIY, unsur instansi Kabupaten Sleman (menghadirkan juga Camat Tempel, Kades Lumbungrejo, Sumberrejo, Pondokrejo, Banyurejo, Merdikorejo, Wonokerto), serta anggota Tim pelaksana kegiatan.

Rekomendasi:

a. Perlu dilaksanakan sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2006, berkenaan dengan jalur batas dan fisik jalur batas di Kali Krasak (batas alam);
b. Materi sosialisasi didesain dengan memasukkan materi tentang sungai dan penambangan pasir untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal penambangan pasir;
c. Pemerintah desa di wilayah perbatasan perlu diberikan buku data pilar-pilar batas yang terletak diwilayahnya. Hal ini akan membantu perangkat desa setempat dalam rangka melindungi keberadaan pilar-pilar batas yang sudah terpasang, disamping sebagai langkah awal untuk merespon permasalahan yang muncul di wilayah perbatasan;
d. Pemerintah Daerah DIY beserta Pemerintah Kabupaten Sleman perlu segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang berkenaan dengan beberapa potensi permasalahan yang muncul di wilayah perbatasan Kecamatan Tempel-Kecamatan Ngluwar.

3. Tema: Perjanjian Kerjasama antar Daerah dalam Pemeliharaan dan/ atau Pembangunan Pilar Batas Daerah (segmen batas antar Kabupaten/ Kota di DIY).

   Waktu, Tempat, dan Peserta:

   - Kamis, 22 Oktober 2015;
   - Ruang Rapat Lt. III Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
   - Sebanyak 30 orang yang terkait (unsur Pemerintah Daerah DIY, dan unsur Pemerintah Kabupaten/ Kota di DIY).

   Rekomendasi:

   a. Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di DIY agar melaksanakan sosialisasi Permendagri tentang Batas Daerah sesuai dengan segmen batas yang menjadi kewenangannya;
   b. Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di DIY dalam memasang pilar batas diusahakan tepat pada as jalur batas;

c. Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di DIY agar mendistribusikan *database* lokasi pilar batas dan peta koridor batas wilayahnya kepada desa/kelurahan dan/ atau kecamatan di wilayah perbatasan;
d. Pemerintah Daerah DIY supaya berkirim surat kepada Kemendagri perihal pilar batas daerah yang dibangun oleh Kemendagri di daerah supaya dihibahkan pada daerah;
e. Pemerintah Kabupaten/ Kota supaya mengutamakan pemeliharaan pilar batas terlebih dahulu, sehingga membentuk suatu siklus pemeliharaan;
f. Pemerintah Daerah DIY (dalam hal ini Biro Tata Pemerintahan Setda DIY) perlu segera membina kabupaten/ kota yang siap melaksanakan perjanjian kerjasama;
g. Masing-masing pemerintah Kabupaten/ Kota di DIY sebaiknya sudah mempunyai materi substasi yang hendak dikerjasamakan, misalnya obyek kerjasama, ruang lingkup kerjasama, dan seterusnya;
h. Pemerintah Daerah DIY supaya segera mengkoordinasikan jalur batas daerah di Perum Griya Wirokerten.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

Belum semua rekomendasi yang muncul dalam Rakortas dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah/ pemerintah desa.

b. Solusi:

a. Rekomendasi Rakortas diinformasikan kepada Kepala Daerah melalui surat resmi tertulis dengan tembusan kepala intansi terkait sesuai tugas dan fungsi;
b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi pelaksanaan Rakortas dengan melibatkan pemerintah kabupaten/ kota sesuai tema yang dibahas.

D. *Database* Pilar Batas untuk Kabupaten Perbatasan DIY-Jawa Tengah (Perbatasan Kabupaten Kulon Progo dan Purworejo)

Keluaran berikutnya pada kegiatan Penanganan Permasalahan Perbatasan Antar Daerah adalah *database* Pilar Batas untuk Kabupaten Perbatasan DIY-Jawa Tengah (Perbatasan Kabupaten Kulon Progo dan Purworejo). Beberapa hal yang melatarbelakangi adalah sebagai berikut.

1. Peta koridor sebagai lampiran Permendagri 19 Tahun 2006 memiliki skala yang terlampau kecil untuk digunakan pada level desa (sampai dengan skala 1:100.000), sehingga informasi yang disajikan kurang akurat dan kurang detail;
2. Perapatan pilar batas DIY-Provinsi Jawa Tengah sebagai implementasi perjanjian kerjasama kedua daerah otonom mengenai pembangunan dan/ atau pemeliharaan pilar batas daerah belum tergambar secara menyeluruh dalam bentuk peta;
3. Untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan, maka perlu disusun *database* pilar batas daerah yang dituangkan dalam peta skala 1: 10.000 yang memuat informasi mengenai jalur batas daerah dan keberadaan pilar batas secara lebih akurat dan mendetail. *Database* pilar batas daerah ini berjalan pararel dengan sosialisasi Permendagri tentang Batas Daerah guna memberikan pemahaman secara utuh berkenaan dengan jalur batas beserta dengan tanda batas di lapangan kepada aparatur pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan penyusunan *database* pilar batas antara Kabupaten Kulonprogo DIY dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah melalui penggambaran peta koridor sebanyak 33 titik pilar batas daerah yang terletak di wilayah Desa Sindutan (Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo), dan Desa Hargomulyo serta Desa Kalirejo (Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo). Kemudian pelaksanaan kegiatan menggunakan jasa pihak ketiga.

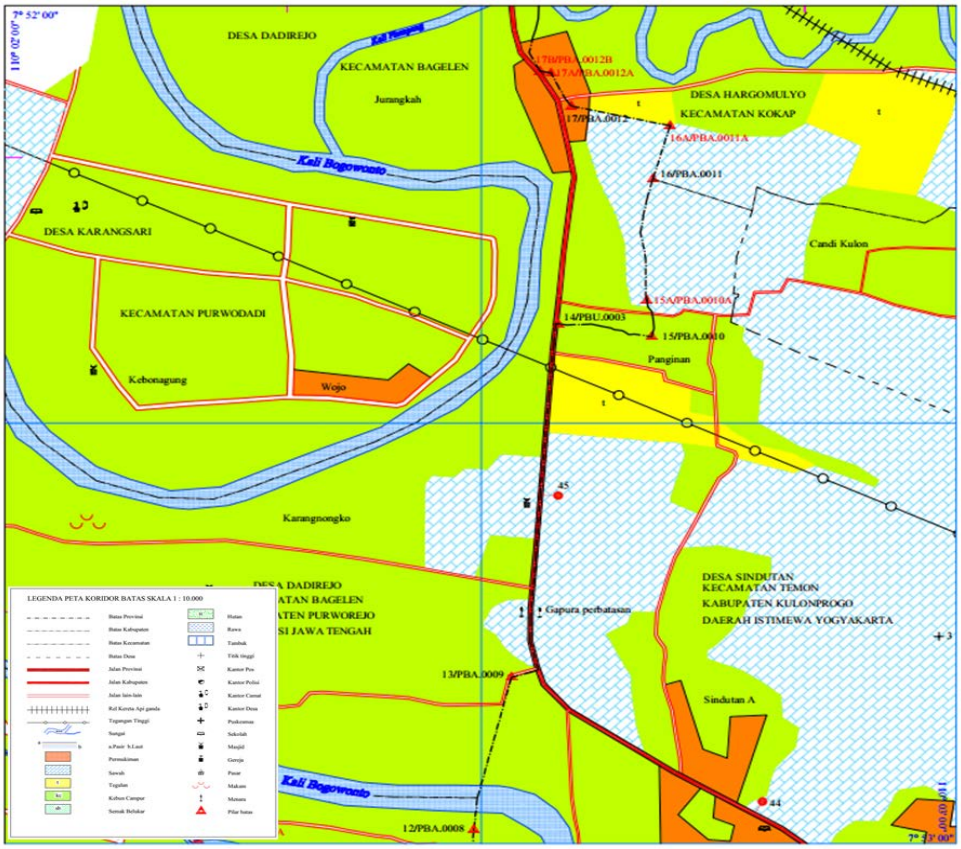

Gambar 7.4 Contoh Hasil Pekerjaan *Database* Pilar Batas antara Kabupaten Kulonprogo DIY dengan Kabupaten Purworejo

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

Kebutuhan SDM dengan latar belakang pendidikan ilmu spasial (geografi atau teknik geodesi di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY belum tersedia.

b. Solusi:

Penguatan kapasitas SDM melalui pengisian personil dengan latar belakang pendidikan ilmu spasial (geografi atau teknik geodesi), sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal.

7.4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

7.4.1 Kebijakan dan Kegiatan

Data Kejadian bencana di DIY pada tahun 2015 mengalami penurunan bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 terdapat 255 kejadian bencana, sementara pada tahun 2014 terdapat 122 bencana sedang tahun 2015 terdapat 65 kejadian bencana.

Bencana Banjir pada tahun 2015 menurun tajam jumlahnya jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013, kejadian banjir tahun 2015 hanya terjadi di Kabupaten Bantul sedang bencana banjir tahun 2014 terjadi di Kabupaten Sleman, banjir ini biasanya terjadi di kawasan sempalan sungai-sungai besar seperti Sungai Opak, Sungai Oyo, dan Anak Sungai Progo.

Kejadian bencana tanah longsor dalam tahun 2015 paling banyak terjadi di Kabupaten Gunungkidul dengan 5 kejadian, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo 3 kejadian Tanah Longsor. Sementara itu Kabupaten Sleman kejadian 2 kali Tanah Longsor. Dampak kerusakan yang terjadi rumah rusak berat berjumlah 3 rumah 3 di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan di Wilayah Gunungkidul. Rumah rusak sedang berjumlah 10 rumah 1 di wilayah Kulon Progo dan 9 di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Bencana angin kencang di tahun 2015 paling banyak dilaporkan terjadi di Kabupaten Sleman dengan 9 kejadian, Kota Yogyakarta 3 kejadian, serta Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul masing-masing 1 kejadian. Meskipun hanya tercatat 9 kejadian angin kencang yang dilaporkan dalam DIBI di Kabupaten Sleman, bencana ini sebenarnya tergolong sering menimpa wilayah tersebut. Tidak ada korban yang meninggal pada kejadian angin kencang di tahun 2015 ini hanya ada 2 orang luka-luka akibat bencana Angin Kencang yang berada di Wilayah Kulon Progo.

Tabel 7.5 Frekuensi Kejadian Bencana di DIY tahun 2012-2015

Jenis Bencana	Bantul				Gunungkidul				Kulon Progo				Sleman				Yogyakarta			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Banjir	40	2	0	1	17	0	0	0	0	0	0	0	8	6	2	0	2	7	0	0
Kekeringan	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanah Longsor	14	12	1	3	84	18	7	5	216	1	1	3	8	3	1	2	0	1	2	0
Kebakaran Hutan/ Lahan	1	8	5	4	16	0	3	1	6	3	0	2	8	2	4	7	2	5	2	7
Gempa Bumi	2	2	6	9	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Angin Kencang	127	89	61	1	133	34	1	2	25	3	0	3	84	56	18	9	2	4	1	3
Epidermi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gunung meletus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Olah data BPBD DIY, 2015.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. SKPD ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan SKPD, lembaga dan instansi terkait. Selain badan penanggulangan bencana pemerintah, di tingkat telah dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum PRB - Daerah Istimewa Yogyakarta), yakni sebuah forum independen untuk mendorong serta memfasilitasi kerjasama antar pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Forum PRB-DIY berupaya mewadahi semua kepentingan terkait kebencanaan serta membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan PRB di tingkat provinsi, agar dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan PRB DIY dan terwujudnya ketahanan dan ketangguhan daerah terhadap bencana. Hal ini selaras dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana yaitu lebih menekankan pada proses pengurangan risiko bencana.

Keterbatasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan keterbatasan sumberdaya yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana juga menjadi salah satu faktor pertimbangan utama untuk memilih bentuk fasilitasi yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah kabupaten/ kota. Oleh karena itu berbagai fungsi yang melekat pada pemerintah perlu dicermati sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana. Peran teknis pemerintah terbatas hanya pada aset yang berada di daerah. Peran teknis lain yang mungkin diemban oleh provinsi di daerah adalah pada masa darurat bencana, pada saat kabupaten/ kota tidak mampu menangani bencana yang timbul.

Kebijakan pengurangan risiko bencana ditindaklanjuti dengan upaya-upaya khusus untuk bencana yang telah dipetakan guna pengurangan dampak bencana secara terstruktur, terukur dan menyeluruh dalam kewenangan Pemda DIY selaku pemerintah di level provinsi. Selain itu juga dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di daerah bencana yang tergolongkan kedalam kelompok rentan. Pencapaian sasaran tersebut difokuskan kepada:

1. **Pencegahan dan Mitigasi Bencana**

   Pencegahan bencana dilaksanakan dengan memberikan perlakuan di sumber bencana sehingga menghilangkan ancaman sehingga kejadian bencana dapat dihilangkan. Mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Mitigasi dapat berupa struktural yaitu dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa dan lain-lain, maupun dengan melakukan mitigasi non struktural dengan meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana, menjaga kepekaan dan kesiapsiagaan agar melakukan tindakan akurat sebelum atau ketika bencana.

2. **Kesiapsiagaan Bencana**

   Kesiapsiagaan merupakan kebijakan yang perlu diambil bila upaya pencegahan dan mitigasi belum dirasa optimal. Kunci keberhasilan kesiapsiagaan adalah keberhasilan proses evakuasi masyarakat yang didukung oleh sistem pendeteksian ancaman dan sistem peringatan dini. Kolaborasi antara kultur dan teknologi (struktur) sangat penting dalam mewujudkan sistem kesiapsiagaan yang efektif.

Untuk menjamin capaian dari kebijakan ini, maka program difokuskan pada pembangunan sistem peringatan dini bencana di zona prioritas penanggulangan bencana DIY, peningkatan kapasitas evakuasi masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana, gladi dan simulasi peringatan dini dan evakuasi masyarakat.

Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana telah menjadi pijakan bagi terciptanya paradigma pembangunan daerah yang baru, yakni

pembangunan berkelanjutan yang berbasis pengurangan risiko bencana. Paradigma pembangunan tersebut telah mengilhami gerakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha di daerah untuk secara bersama-sama mengerahkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan ketangguhan daerah terhadap ancaman bencana.

Berkembangnya ilmu pengetahuan, perkembangan jenis ancaman, serta kebutuhan nyata masyarakat akan sistem penanggulangan bencana daerah yang responsive dan konstruktif, bencana perlu dipandang dalam konteks yang lebih luas. Untuk itulah, dalam Peraturan Daerah ini, jenis bencana dirumuskan secara terbuka dan tetap membuka kemungkinan timbulnya jenis ancaman bencana baru yang harus segera disikapi secara responsive dan konstruktif.

Seiring dengan timbulnya dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka substansi pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana perlu diubah dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan tersebut. Pada 2015 dinamika tersebut direspon melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi saerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pada tahun 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY mengelola APBD sebesar Rp16.221.166.833,- (Enam belas milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Rp2.661.546.913,- (dua milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan Belanja Rp13.559.619.920,- (Tiga belas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Sedangkan jumlah program dan kegiatan sebanyak 6 program dan 43 kegiatan. Capaian kinerja anggaran 94,26% dan capaian kinerja fisik 100%.

7.4.2 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Koordinasi antar wilayah, yurisdiksi dan komunikasi antar lembaga yang merespon bencana belum terpadu;
2. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana kurang memahami upaya penanggulangan bencana;
3. pengelolaan data dan informasi bencana belum optimal.

b. Solusi

- Revitalisasi peran BPBD dalam koordinasi, monitoring, dan evaluasi para-pihak *stakeholders* Penanggulangan Bencana ;
- Meningkatkan PRB-BK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) melalui pembentukan dan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana;
- Revitalisasi sistem informasi pengelolaan data dan informasi bencana, diantaranya dengan Integrasi EWS (*early warning system*) dalam Sistem Informasi-Penangulangan Bencana, optimalisasi utilisasi Pusdalops-PB BPBD dan kerjasama berbagi informasi dengan lembaga lain yang mengelola data/info terkait Penangulangan Bencana.

7.5 PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

7.5.1 Kebijakan dan Kegiatan

Situasi keamanan di DIY yang cukup dinamis membutuhkan perhatian khusus dan kebersamaan antar aparat keamanan baik dari unsur Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota maupun dari unsur PAM swakarsa yang dibentuk oleh komunitas-komunitas masyarakat. Menurut laporan data POLDA DIY tindakan kriminal selama tahun 2015, kasus curanmor roda dua/empat hingga tahun 2015 tetap menjadi kasus yang paling menonjol sebanyak 66 kasus, disusul dengan kasus narkoba 24 kasus dan permainan judi 16 kasus.

Pesona DIY sebagai daerah yang memiliki banyak alternatif objek wisata dan lembaga pendidikan tinggi telah menjadi alasan utama para pendatang untuk

menjadi pelaku ekonomi, politik dan sosial budaya di DIY. Inilah yang menjadikan DIY memiliki wajah multikultur. Kondisi multikultur ini menimbulkan dampak adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan.

DIY yang multikultur dengan masyarakat heterogen selalu dihadapkan pada risiko dan potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini menyebabkan DIY sebagai wilayah yang rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta gejolak sosial.

Kondisi multikultur di DIY memberikan dua kemungkinan ekstrim. Pertama, nilai-nilai multikultural dapat berkembang sehingga keberagaman di DIY tidak akan menimbulkan konflik sosial, tetapi sebaliknya, justru menjadi modal sosial yang kuat bagi pembangunan sosial dan ekonomi DIY. Kedua, keberagaman di DIY tidak ditopang oleh kekuatan modal sosial, seperti *social trust* (kepercayaan sosial), *social institutions* (institusi sosial), dan social *norms* (norma sosial) yang memadai sehingga justru berpotensi melahirkan potensi konflik sosial. DIY yang sebelumnya tidak memiliki sejarah konflik sosial yang mengkhawatirkan bukan berarti akan terbebas dari kemungkinan terjadi konflik sosial yang destruktif saat ini dan di masa depan. Dinamika perubahan sosial yang berdimensi budaya, ekonomi, dan politik di DIY dapat menutup peluang terjadinya kemungkinan yang pertama dan sebaliknya, memperbesar peluang terwujudnya kondisi kedua yang tentu tidak diharapkan. Sekam konflik akan muncul di permukaan dan meluas sehingga DIY dapat kehilangan kedamaian yang selama ini dibanggakannya.

Kemungkinan konflik tersebut berpeluang besar untuk terjadi di DIY. Sejak lama DIY, terutama sejumlah kawasan tertentu, telah menjadi magnet bagi pendatang dari luar DIY. Pesona DIY sebagai daerah yang memiliki banyak alternatif objek wisata dan lembaga pendidikan tinggi telah menjadi alasan utama para pendatang untuk menjadi pelaku ekonomi, politik, dan sosial budaya di DIY. Inilah yang menjadikan DIY memiliki wajah multikultur. Namun kondisi multikultur ini berinteraksi intensif dengan berbagai perubahan sosial yang berdimensi budaya, ekonomi, dan politik. Pada dimensi ekonomi, perubahan yang cepat sangat mudah teramati dari semakin masifnya para pelaku ekonomi, terutama dari kalangan

pendatang, memanfaatkan arena-arena dagang. Bertebarannya pasar-pasar modern semakin nyata merebut peran pasar tradisional.

Masih dalam dimensi ekonomi, sumber daya ekonomi yang terbatas di DIY semakin menjadi perebutan. Sumber daya yang bernilai ekonomi sangat tinggi, seperti tanah dan properti, menjadi objek perebutan bagi masyarakat kelas menengah dan atas. Investasi tanah dan properti di kawasan strategis di DIY, bahkan semakin menjadi incaran masyarakat luar DIY. Bermunculannya hunian-hunian eksklusif di sejumlah kawasan tentu dapat memunculkan kesenjangan sosial antara komunitas pendatang dan penduduk asli. Kecemburuan sosial dapat menjadi pemantik kriminalitas ataupun konflik sosial.

Pertarungan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas juga terjadi di kalangan penduduk asli. Terbatasnya arena ekonomi di DIY mendorong sejumlah komunitas membuka dan mengelola sumber ekonomi baru, seperti pengembangan objek wisata berbasis komunitas. Pada awalnya kekuatan modal sosial mereka mampu menjadi basis tata kelola sumber ekonomi baru tersebut. Namun seiring dengan semakin membesarnya keuntungan, kekuatan modal sosial mereka, seperti kepercayaan dan jejaring kerja sama di antara anggota masyarakat, melemah dan akhirnya memunculkan konflik antarmereka dalam memperebutkan sumber ekonomi baru tersebut.

Sektor informal, bahkan juga menjadi arena perebutan di antara pendatang dan penduduk asli maupun antarpenduduk asli atau antarpendatang. Mereka yang tidak memiliki peluang untuk bekerja di sektor formal tersingkir dan seolah tidak memiliki pilihan lain selain mengais sumber-sumber ekonomi yang bernilai rendah, seperti menjadi tukang becak, kuli panggul di pasar tradisional, buruh, dan tukang parkir. Arena-arena di sektor informal ini juga tidak terbebas dari potensi konflik perebutan di antara para pelakunya. Semakin lama semakin terbatas arena yang tersisa untuk dimasuki maka potensi konflik semakin tinggi.

Pada dimensi politik, seiring dengan menguatnya iklim dan semangat demokrasi, masyarakat semakin memiliki kebebasan untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingannya. Membangun afiliasi politik dengan partai politik tertentu atau membentuk organisasi kemasyarakatan menjadi pilihan yang terbuka luas. Kesadaran warga mengenai hak-hak politik juga semakin menguat sehingga

tuntutan warga terhadap transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin menguat pula. Sampai pada titik tertentu kondisi ini menjadi indikasi yang positif. Namun sebagaimana dilihat pada kenyataannya, euforia kebebasan meningkatkan potensi konflik horizontal maupun vertikal.

Potensi konflik horizontal semakin terbuka karena DIY menjadi arena bersama bagi kelompok-kelompok kepentingan dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masing-masing. Ini membuat DIY yang multikultur menjadi terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok berbasis etnis, daerah asal, agama dan keyakinan, profesi, dan sebagainya. Kerja sama ataupun konflik menjadi peluang yang sama-sama terbuka. Konflik antara masyarakat dan pemerintah yang bersumber dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan kebijakan pemerintah juga semakin sering terjadi dan lebih bersifat destruktif daripada konstruktif.

Pada dimensi sosial budaya, potensi konflik di arena multikultur semakin meningkat ketika jarak sosial antar kelompok masyarakat semakin melebar yang terindikasi dari tingkat penerimaan anggota dari kelompok tertentu terhadap kelompok lain semakin rendah. Ini terjadi karena fragmentasi sosial berlangsung secara berlebihan sehingga eksklusivitas kelompok-kelompok masyarakat semakin menguat. Relasi sosial antarkelompok semakin renggang. Ketika jarak sosial yang lebar terbentuk di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada, baik yang berbasis agama, etnis, daerah asal, dan sebagainya, maka keniscayaan selanjutnya adalah semakin menguatnya ketidakpedulian antar-kelompok masyarakat.

Besarnya tuntutan masyarakat, rawan menimbulkan gejolak sosial akan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian dituangkan dalam aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 2015 terjadi sebanyak 204 kali aksi unjuk rasa (bappeda.jogjaprov.go.id). Aksi unjuk rasa tersebut antara lain terjadi di kantor Gubernur, gedung DPRD, perempatan Tugu, Jalan Malioboro, Titik Nol/perempatan Kantor Pos besar, serta Bundaran UGM. Penanganan unjuk rasa dilakukan secara persuasif dan sinergis antara Satpol PP, POLRI, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat, sehingga potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum tersebut dapat diminimalisir.

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan pendekatan preemptif, preventif, persuasif dan represif. Pendekatan preventif dan persuasif lebih diutamakan daripada pendekatan represif. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi.

Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi target, disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya dipantau apakah masyarakat sudah memahami dan menaati Peraturan tersebut. Dari hasil pemantauan dapat diketahui tingkat kesadaran masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mengindahkan dikenakan operasi non yustisi, yaitu diberikan pembinaan dan teguran disertai berita acara dan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya perlakuan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan ditingkatkan menjadi operasi yustisi, yaitu bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan diproses secara hukum.

Selain pembinaan kesatuan bangsa, Pemerintah DIY juga melaksanakan pembinaan politik baik kepada masyarakat maupun kepada partai politik yang ada dalam upaya membentuk masyarakat madani. Suasana kondusif, sejuk, aman, tenteram, diantaranya meningkatnya penanaman modal, kunjungan wisata, pendidikan.

Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis 2015 menunjukkan capaian demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup menggembirakan. Indeks demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta melampaui rerata nasional (82,71 dari rerata 73,04).Angka ini naik 10,35 poin dibandingkan dengan IDI DIY yang dirilis tahun 2014 sebesar 72,36 dan mengalami perubahan tingkat demokrasi. Lebih detail, capaian kekebasan sipil (86,25 dari rerata nasional 82,62), capaian hak-hak politik (76,07 dari rerata nasional 63,72) dan lembaga demokratis (88,82 dari rerata nasional 75,81).

Dari hasil Indeks tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta masuk ke dalam kategori baik dimana skor Indeks yang diperoleh lebih dari 80. Namun demikian tingkat

demokrasi di DIY berdasarkan penghitungan indeks sejak tahun 2009 hingga 2013 masih berada pada kategori “sedang”.

Secara lebih rinci, pada IDI yang dirilis tahun 2014-2015 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat bahwa aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan berturut-turut 25,42 dan 5,13 poin. Sementara nilai indeks kebebasan sipil cenderung mengalami penurunan 4,53 poin. Indeks hak-hak politik yang berubah banyak karena digunakannya informasi hasil Pemilu Legislatif 2014.

Untuk Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkembang dan telah terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mengalami perubahan jumlah yang fluktuatif. Pada Tahun 2009 terdapat 31 organisasi, tahun 2010 terdapat 33 organisasi, tahun 2011 terdapat 29 organisasi, tahun 2012 terdapat 18 organisasi, tahun 2013 34 organisasi, dan hingga pertengahan Juni 2014 terdapat 7 organisasi. Dari data ini bisa diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan yang sudah resmi terdaftar memiliki keragaman sifat baik dalam kekhususan organisasi ataupun kesamaan latar belakang baik dari kesamaan profesi, agama, lingkup budaya, sosial dan kemasyarakatan lainnya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan sosial kemasyarakatan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat DIY. Sejak berlakunya Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat, pendaftaran Ormas dan LSM sudah tidak lagi berada di Kesbanglinmas DIY, namun sudah menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.

Unjuk rasa yang terjadi di DIY ditangani dengan cara-cara yang persuasif dan sinergis antar petugas yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan cara penanganan yang persuasif dan sinergis, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diminimalisir.

Untuk jumlah pelanggaran Perda pada tahun 2013 sebanyak 305 pelanggaran, sementara di tahun 2014 sebanyak 289 pelanggaran. Untuk Tahun 2015 sebanyak 303 pelanggaran. Jumlah pelanggaran ini juga tetap harus diikuti dengan proses penanganan dan penyelesaian penegakan Perda. Namun kondisi di lapangan, proses tersebut masih berjalan timpang. Di tahun 2013 jumlah penyelesaian penegakan Perda sebanyak 12 kali, sedangkan di tahun 2014 meningkat menjadi

14 kali. Sedangkan di tahun 2015 jumlah penyelesaian penegakan Perda tetap sebanyak 14 kali. Dari perbandingan pelanggaran dan penyelesaian ini menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah agar ke depan semakin sedikit angka pelanggaran yang dilakukan sehingga amanat dalam Perda bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

Proses penegakan Perda ini tentunya juga berkaitan dengan kapasitas sumber daya aparatur dari penegak Perda itu sendiri dimana dalam tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memegang peranan penting. Sementara ini jumlah personil yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja masih belum maksimal. Pada tahun 2013 tercatat terdapat 120 orang, sedangkan pada tahun 2014 tercatat terdapat 118 orang. Di tahun 2015 jumlah personil tetap 120 orang.

Berdasarkan pasal 48 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 menetapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kebijakan perwujudan ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja DIY melaksanakan sejumlah kegiatan, diantaranya:

1. Pelaksanaan kebijaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
2. Pelaksanaan kebijaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
4. Penyiapan bahan administrasi, fasilitasi dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
5. Koordinasi dan/ atau pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
6. Pengawasan dan pembinaan masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

7. Pelaksanaan pengamanan aset dan pengawalan Gubernur, Wakil Gubenur serta tamu daerah;
8. Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta Instansi/ Lembaga lain yang terkait;
9. Koordinasi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan program P4GN daerah;
10. Pelaksanaan kebijakan program P4GN daerah;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sumber Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2015 yaitu APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 7.6 Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja DIY

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.519.013.360,-	3.340.703.300,-	98,63	100
2.	Belanja Langsung	6.514.840.924,-	6.425.733.042,-	94,93	100
	Total	**10.033.554.284,-**	**9.766.436.342,-**	**97.33**	**100**

7.5.2 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

1. Meningkatnya potensi konflik karena dampak kebijakan pemerintah (Pusat dan Daerah), kontestasi politik, perebutan potensi sumberdaya alam, ekonomi, praktik premanisme, interaksi dan segregasi sosial berbasis SARA, memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Kebutuhan regulasi daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) yang meningkat dan kompleks, mengakibatkan semakin tinggi pula potensi pelanggaran dan penyimpangan. Tantangan ini semakin berat dengan adanya keterbatasan Instansi dalam melakukan penegakan regulasi daerah.

3. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Kecenderungan meningkatnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan baik yang berasal dari DIY maupun luar DIY;
5. Asset-asset milik Pemerintah Daerah DIY yang tersebar di banyak titik lokasi di kabupaten/ kota sehingga memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
6. Masih belum cukup sinerginya partisipasi multi-pihak (instansi pemerintah, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat) dalam penanganan potensi konflik.

b. Solusi:

1. Dalam penanganan potensi konflik (karena dampak kebijakan pemerintah (Pusat dan Daerah), kontestasi politik, perebutan potensi sumberdaya alam, ekonomi, praktik premanisme, interaksi dan segregasi sosial berbasis SARA) dilaksanakan melalui:
   - Memasukkan materi kepemimpinan yang berbasis pada prinsip-prinsip multikulturalisme dan anti-kekerasan dalam pendidikan politik bagi masyarakat luas lewat pendidikan formal maupun informal.
   - Melakukan review dan pemetaan potensi ekonomi lokal yang berada di setiap kabupaten/ kota. Berdasarkan hasil review dan pemetaan potensi ekonomi lokal tersebut maka bisa dikembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih banyak melibatkan masyarakat dan pelaku bisnis lokal.
   - Pemanfaatan berbagai media komunikasi untuk interaksi warga lintas suku dan agama, terutama dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya, diarahkan pada pembudayaan prinsip-prinsip multikulturalisme untuk penegakan NKRI.
   - Mengedepankan pendekatan hubungan sosial budaya daripada pendekatan represif dalam mengatasi perselisihan antar kelompok.

- Pengembangan *early warning and quick response system* yang efektif untuk mengantisipasi dan mengelola potensi konflik sosial (melibatkan antar-lembaga: pemerintah daerah, kepolisian, lembaga dan tokoh keagamaan, serta lembaga dan tokoh masyarakat lintas daerah).
- Pembentukan dan pengembangan 'Jaga Warga' untuk merevitalisasi peran pranata sosial masyarakat dalam lingkup komunitas dan deteksi dini dan cegah dini potensi konlik dan gangguang ketentraman dan ketertiban umum.

2. Mengupayakan penambahan PPNS yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan masyarakat;
4. Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan secara terpadu yaitu Pemerintah Daerah DIY telah melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah tetangga dalam bentuk operasi terpadu;
5. Peningkatan Pengamanan asset-asset Pemerintah Daerah DIY melalui Pemantauan rawan penyimpangan penggunaan asset dan Pemetaan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibumtranmas);
6. Revitalisasi peran Forum-forum kerukunan umat beragama maupun antar kelompok yang berisi tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang memiliki pemahaman multikultur yang kuat.

7.6 TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH

7.6.1 Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta telah memasuki usia sepuluh tahun pada tahun 2015 ini. Sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi utama melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan

bersih dan penyelenggaraan usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan. Marwahutama LO DIY adalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan public dan menerima pengaduan dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang *good* dan *clean governance* di DIY. LO DIY dalammemenuhi harapan masyarakat tersebuttelah melakukan banyak hal untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga masyarakat. Keberadaan lembaga seperti LO DIY semakin penting untuk memastikan fungsi *check and balances* serta untuk menjawab hipotesabahwa *"power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely*" (kecenderungan kekuasaan itu korup dan semakin absolut sebuah kekuasaan maka korupsinya semakin tak terkendali). Orientasi pemerintahan yang semula dimaknai sebagai otoritas kewenangan *"pangrehprojo"* yang cenderung represif saat ini telah bergeser dimaknai sebagai penyelenggara *"pamongprojo"* yang berorientasi pada pelayanan bagi seluruh warga masyarakat.

Dalam rangka untuk menjawab ekspektasi warga masyarakat terhadap LO DIY, banyak hal yang telah diupayakan oleh LO DIY dalam rangka mewujudkan cita-cita pelayanan publik yang berkualitas bagi warga masyarakat dan mendorong terwujudnya *good* dan *clean governance*. Usaha-usaha yang telah dilakukan antara lain: *pertama*, membangun kemitraan *multistakeholders* dan *multishareholders* untuk membangun komunikasi serta tali silaturrahim antarlembaga baik dengan lembaga eksekutif, legislatif, *civil society* maupun organisasi masyarakat yang turut peran serta dalam mengawal dan mengawasi pelayanan publik di masing-masing daerah. *Kedua*, memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan daerah baik PERDA, PERGUB, PERBUP/PERWAL dan kebijakan-kebijakan daerah yang lain yang muara utamanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi warga dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Lahirnya PERDA pelayanan publik serta PERDA penyelenggaraan pendidikan di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu contoh peran serta LO DIY dalam terumuskannya aturan tersebut. *Ketiga*, sistem pengaduan melalui *SMS Gateway* telah mendekatkan dan memudahkan warga masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atas persoalan yang dialami di bidang pelayanan publik. Melalui sms ini banyak warga yang letak geografis dan akses transportasi yang jauhbisa menyampaikan keluhannya dengan biaya yang murah. *Keempat*, sistem audit sosial dengan melibatkan warga masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat yang

diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan LO DIY dalam melakukan fungsi penerima pengaduan dan menindaklanjuti persoalan. *Kelima*, sistem informasi dan dokumentasi LO DIY sudah mempunyai *software*nya yang bisa dipergunakan untuk menyimpan berbagai data. Baik data kesekretariatan, data penelitian, serta data-data pengaduan yang selama ini telah ditangani ataupun sedang ditangani.

Awal periode keempat LO DIY tahun 2015 kasus yang masuk sebanyak 300 kasus, terdiridari 49 kasus tinggalan periode 20112-2014, dan 251 kasus baru, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.7 Laporan kepada LOD (Periode: 9 Januari-25 Desember 2015)

No	Bidang	Jumlah	Persentase
1	KEUANGAN (SWASTA)	45	17.93%
2	KETENAGAKERJAAN (SWASTA)	40	15.94%
3	PROPERTI-PERHOTELAN (SWASTA)	18	7.17%
4	BISNIS & PERDAGANGAN (SWASTA)	14	5.58%
5	TEKNOLOGI & KOMUNIKASI (SWASTA)	10	3.98%
6	PENDIDIKAN (PEMERINTAH)	33	13.15%
7	PERTANAHAN (PEMERINTAH)	27	10.76%
8	KESEHATAN (PEMERINTAH)	16	6.37%
9	BANTUAN SOSIAL (PEMERINTAH)	13	5.18%
10	PERIZINAN (PEMERINTAH)	10	3.98%
11	PENEGAKAN KEBIJAKAN (PEMERINTAH)	10	3.98%
12	TRANSPORTASI	5	1.99%
13	KEPENDUDUKAN	8	3.19%
14	PERTAMBANGAN	1	0.40%
15	PARIWISATA	1	0.40%
Total Kasus		**251**	**100%**

Tabel 7.8 Kinerja Penanganan Kasus (Periode: 9 Januari-25 Desember 2015)

No	Indikator-Parameter	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
1	JUMLAH KONSULTASI - PENGADUAN					
	Konsultasi	40	51	31	38	160
	Pengaduan	28	21	20	22	91
	TOTAL KONSULTASI - PENGADUAN	**68**	**72**	**51**	**60**	**251**
2	JUMLAH WILAYAH PERSEBARAN					
	Kota Yogyakarta	31	23	18	26	98
	Sleman	23	33	18	19	93
	Bantul	12	8	9	11	40
	KulonProgo	1	5	3	2	11
	GunungKidul	1	1	3	2	7
	*LuarKewenangan Daerah		2			2

No	Indikator-Parameter	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
3	JENIS PER JUMLAH					
	Perseorangan	61	68	49	55	233
	Kelompok	7	4	2	5	18
4	JENIS PER BIDANG TERLAPOR					
	Pemerintahan / Negeri	21	26	19	28	94
	BUMN - BUMD	17	11	5	3	36
	Swasta	30	35	27	29	121
5	GENDER					
	Pria	56	51	37	44	188
	Wanita	12	21	14	16	63
6	PENDIDIKAN PELAPOR/PENGADU					
	PendidikanDasar (TK - SD - SMP)	0	7	3	5	15
	Menengah (SMA)	23	30	22	26	101
	PerguruanTinggi	44	35	26	29	134
	Khusus (DIFABEL/DISABILITAS)	1	0	0	0	1
7	PEKERJAAN PELAPOR/PENGADU					
	Profesi	3	5	2	4	14
	PNS	3	4	6	7	20
	Swasta	31	22	16	15	84
	Petani - Nelayan	0	2	1	1	4
	Pedagang	11	5	3	0	19
	Wiraswasta - Pengusaha	9	24	16	18	67
	Pelajar	2	1	0	4	7
	Lainnya	9	9	7	11	36
8	MEDIA PENGADUAN					
	Datang Langsung	67	63	50	58	238
	Website (*Form Email LO* DIY)	1	6	1	2	10
	SMS Gateway	0	3	0	0	3
9	PRODUK AKHIR					
	Kesimpulan dan Rekomendasi	17	15	4	13	49
	Kesimpulan	12	2	1	0	15
	Pendapat Hukum	0	2	2	5	9
	LPK	5	13	8	4	30
	TOTAL PRODUK AKHIR	**34**	**32**	**15**	**22**	**103**
10	INDIKASI MAL ADMINISTRASI					
	Ada Mal Administrasi	8	6	2	6	22
	Ada Pelanggaran Etika Usaha swasta	0	6	1	6	13
	Tidak Ada Mal & pelanggaran etika	26	20	12	10	68

Tindaklanjut atas kasus yang diadukan adalah pencermatan aduan, klarifikasi, koordinasi, telaah dokumen, pendapat hukum, mediasi, dan gelar kasus. Gelar kasus adalah salah satu tindaklanjut yang sangat penting untuk mendapatkan masukan/ pendapat ahli sesuai keilmuan atas sebuah kasus. Tindak lanjut setiap kasus

berbeda-beda, tergantung tingkat kerumitan kasus tersebut. Kecenderungan kasus yang dilaporkan, lima besar bidang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahpadaperiode ini antara lain: bidang pendidikan bidang kesehatan, pertanahan, bantuan sosial dan perizinan menjadi tren kasus yang paling banyak diadukan oleh warga masyarakat. Sedangkan bidang pelayanan public yang diselenggarakan oleh swasta pada periode ini adalah: bidang keuangan, tenaga kerja, properti-perhotelan, bisnis perdagangan dan telekomunikasi. Meningkatnya laporan pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran akan hak warga negaraserta semakin meningkatnya pemahaman warga masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah dalam menangani persoalan. Selain itu *sms gateway* merupakan sarana untuk menjangkau dan memudahkan bagi warga masyarakat terutama yang berada di lokasi yang lebih jauh dengan LO DIY sehinggabisa dengan mudah menyampaikan laporannya. Selain itu juga program audit sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat juga turut memberikan andil membuka pengetahuan warga masyarakat tentang keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2015 LO DIY Pokja Penelitian dan pengembangan telah menerbitkan jurnal LO DIY sebagai media untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat luas baik masyarakat akademik maupun instansi-instansi pemerintahan serta masyarakat pada umumnya. Pada tahun 2014 ada dua jurnal yang telah terbit di mana dua tema yang diambil yaitu edisi yang pertama tentang alih fungsi lahan sedangkan tema untuk edisi kedua adalah transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Bidang penelitian dan pengembangan juga telah melakukan penelitian yang mendasarkan pada trenkasus yang diadukan di LO DIY kemudian ditelaah dan dianalisis untuk memberikan masukan kebijakan dan program kepala daerah di DIY, maupun kabupaten/ kota di DIY.

Selain melakukan penelitian setahun terakhir LO DIY juga menerbitkan *Ombudsman Brief* untuk merespon isu-isu sistemik yang diadukan oleh warga masyarakat. Ombudsman brief pada tahun 2015 ini ada dua yaitu bidang properti dan bidang pendidikan. Bidang properti merupakan isu yang sangat penting dan hangat dibicarakan, munculnya berbagai aduan dari masyarakat akan keberadaan hotel, apartemen, perumahan, tidak terpenuhinya fasilitas umum dan fasilitas social menjadikan masyarakat menolak, atau bahkan tidak mendapatkan hak-haknya

seperti yang dijanjikan. Kemudian bidang pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah masih rancu dalam memahami kebijakan. Istilah pungutan dan sumbangan yang masih rancu dalam pelaksanaannya di lapangan sehingga banyak praktek penahanan ijazah di sekolah baik SMP maupun SMA. Selain melalui *ombudsman brief* juga diselenggarakan diskusi publik yang mengangkat tema sesuai dengan tren pengaduan yang paling banyak diadukan. Selain itu juga dilakukan penguatan kapasitas internal untuk *refreshment* materi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan internal LO DIY.

Hasil akhir tindaklanjut kasus di LO DIY berupa laporan penyelesaian kasus, yang dalam hal ini di sebut produk akhir. Produk akhir LO DIY tahun 2015 berbentuk: kesimpulan, kesimpulan dan rekomendasi, pendapat hukum dan laporan penyelesaian kasus. Tahun 2015 LO DIY berhasil menyelesaikan 103 kasus dalam bentuk kesimpulan 15 kasus, kesimpulan dan rekomendasi 49 kasus, pendapat hokum 9 kasus dan laporan penghentian kasus (LPK) 30 kasus. Selanjutnya rekomendasi tindak lanjut kasus dikawal/ dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan rekomendasi oleh bidang monitoring, untuk memastikan sejauh mana rekomendasi yang LO DIY berikan di laksanakan. Selain itu, tahun 2015 ini LO DIY juga mengukur diri dengan menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan yang berikan selama inimenunjukkan mutu pelayanan LO DIY adalah B, dikategorikan BAIK dengan nilai interval konversi IKM 75,60.

Semakin dikenalnya LO DIY oleh warga masyarakat tidak lepas dari peran yang telah dilakukan oleh Pokja bidang sosialisasi kerjasamadan penguatan jaringan. Ada beberapa metode sosialisasi kepada masyarakat yang telah dilakukan, diantaranya sosialisasi dilakukan dengan melalui media elektronik seperti siaran di televisi dan siaran di radio juga sosialisasi yang dilakukan langsung kepada warga masyarakat. Selain melalui media elektronik sosialisasi juga dilakukan dengan media cetak seperti dengan leaflet, poster, stiker, kelender serta penulisan di media. Sosialisasi juga biasa dilakukan sekaligus dengan diskusi merespon tren kasus yang sedang muncul di LO DIY dengan mendiskusikan bersama narasumber yang ahli di bidang persoalan yang sedang didiskusikan melalui berbagai workshop, *focus group discussion* (FGD) maupun kegiatan koordinasi yang lain.

Sebagai bagian dalam *supporting system* kesekretariatan LO DIY telah bekerja secara maksimal untuk mendukung kinerja dalam penanganan laporan baik dari surat

menyurat untuk klarifikasi, mediasi, investigasi, audiensi serta kordinasi dengan pihak-pihak terkait. Begitu juga telah mengatur berbagai agenda rapat-rapat serta tata kelola anggaran yang dibutuhkan dalam proses kegiatan dan program yang telah dilakukan selama setahun. Adalah hal yang tidak mudah agar anggaran yang terbatas bisa memenuhi seluruh kebutuhan kantor secara memadai dan merata. Begitu juga terkait dengan sistem pelaporan-pelaporan baik laporan bulanan, laporan triwulan, maupun laporan tahunan yang senantiasa menjadi bagian dan kewajiban yang harus dilakukan. Selain itu, sistem informasi dan dokumentasi yang memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan data-data yang dibutuhkan melalui *website* yang selalu di *update* dan *accessible.* Begitu juga dengan urusan kerumahtanggaan yang saat ini telah tersedia *ramp* yang *portable* agar kantor LO DIY mempunyai fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Tentu selama tahun 2015 masih banyak hal kekurangan, tetapi dengan segala keterbatasan baik keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dengan jumlah pengaduan yang luar biasa mudah mudahan inovasi yang selama ini telah dilakukan akan tetap bisadilanjutkan, untukituperludukungandarisemuapihak agar LO DIY mampu mengoptimalkan capaian kerja yang lebihbaiksehinggapelayanan public yang berkualitas adalah benar-benar menjadi hak warga Negara.

7.6.2 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Sesuai dengan visi KONI yaitu *'Menjadikan KONI sebagai Organisasi yang Independen dan Profesional, untuk Membangun Prestasi Olahraga Nasional, Guna Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa Indonesia'*dan misi KONI yaitu *'Meningkatkan Prestasi Olahraga Indonesia, Melalui Pembinaan Organisasi dan Peningkatan Sumber Daya Olahraga yang Efektif, Penggunaan Sport Science & Technology, serta Membangun Karakter Olahragawan Guna Menciptakan Atlet yang Berprestasi di Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional',* maka KONI DIY mempunyai tugas membina pelatih maupun atlet yang ada di wilayah DIY dengan mengacu pada program-program pembinaan dari KONI pusat. Melalui pembinaan dan pelatihan secara intensif dan progresif diharapkan KONI DIY dapat mempersiapkan atlet-atlet yang berbakat dan berprestasi untuk mewakili DIY pada kejuaraan olahraga berskala nasional.

Dalam pengembangan organisasi, KONI DIY memiliki visi ***"tercapainya prestasi tinggi melalui pendekatan holistik dan sinergik"***. Visi tersebut diharapkan dapat

menjadi milik bersama guna memotivasi olahraga di DIY agar maju dan bersinergi. Demi mencapai visi tersebut KONI DIY telah merinci beberapa misi yaitu:

1. Mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai komponen terkait dalam proses pembinaan prestasi;
2. Mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga;
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk organisasi cabang olahraga yang mengikuti PON;
4. Mengusahakan bantuan SDM, fasilitas, peralatan, dan dana yang diperlukan untuk pembinaan prestasi sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengembangkan sistem, metode, dan pengelolaan pembinaan prestasi dengan pendekatan IPTEK.

Visi dan misi KONI DIY tercermin dalam program-program kerja yang dilaksanakan oleh KONI DIY. Pada tahun 2015, program prioritas KONI DIY adalah untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat pada tahun 2016. Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai persiapan antara lain sebagai berikut:

1. Pelatda PRAPON XIX, yaitu suatu kegiatan pemusatan latihan untuk seluruh cabang olahraga peserta PON XIX di DIY yang telah lolos dan memenuhi persyaratan;
2. PRAPON XIX atau Babak Kualifikasi PON XIX. Babak kualifikasi ini merupakan penentuan jumlah atlet serta tim yang berhak maju ke PON XIX.
3. PORDA XIII yang pada tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 19-26 Oktober di Kulon Progo. Kabupaten Bantul menjadi juara umum pada PORDA XIII yang mempertandingkan 34 cabang olahraga.
4. Mengikuti POPNAS BAPOPSI (Pekan Olahraga Pelajar Nasional Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia).
5. Mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (POMNAS BAPOMI).
6. Mengikuti PORWADA dan POWARNAS
7. Mengikuti PORWANAS PERWOSI
8. Mengikuti PORPRIDA dan PORPRINAS

KONI DIY mempersiapkan 45 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam PON XIX. Dari 45 cabang olahraga ini terdapat 22 cabang olahraga andalan DIY, yaitu balap sepeda, panahan, terbang layang, voli pasir, kempo, terjun payung, judo, aeromodeling, panjat tebing, menembak, bilyard, gantole, renang indah, catur, taekwondo, sepatu roda, tenis lapangan, wushu, bridge, pencak silat, voli indoor, dan balap motor.

Dengan target mempertahankan peringkat ke-13 seperti pada PON XVIII dan berusaha menaikkan peringkat pada PON XIX, KONI DIY menyadari bahwa masih diperlukan peningkatan dalam pembinaan prestasi olahraga dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di DIY yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada sebagai berikut:

1. Kekuatan
    a. Wilayah DIY yang relatif kecil, memudahkan komunikasi dan koordinasi;
    b. Dukungan pemerintah daerah, legislatif dan masyarakat cukup besar;
    c. Atlet memiliki dedikasi yang tinggi;
    d. Potensi atlet pelajar dan mahasiswa cukup tersedia;
    e. Sumber Daya Manusia di segala bidang cukup tersedia;
    f. Sifat paternalistik yang kuat;
2. Kelemahan
    a. Pelaksanaan latihan belum maksimal dan optimal;
    b. Potensi pelatih belum dioptimalkan;
    c. Pemanfaatan IPTEK masih terbatas;
    d. Koordinasi antara KONI dan Pemprov belum sesuai harapan;
    e. Profesionalisme pelatih perlu ditingkatkan;
    f. Kondisi organisasi beberapa Pemprov masih kurang tertib;
    g. Periodisasi kepengurusan KONI DIY belum singkron dengan pelaksanaan PON;
3. Peluang
    a. Waktu persiapan menuju PON XIX tahun 2016 masih relatif panjang;
    b. Sumber Daya Manusia di berbagai bidang cukup tersedia;
    c. Kebijakan Perguruan Tinggi yang memberi kesempatan kepada atlet berprestasi untuk menempuh studi di lembaganya.

4. Tantangan
    a. Tuntutan masyarakat yang berorientasi pada medali bukan pada pembinaan atlet;
    b. Mensinergikan berbagai instansi terkait dalam proses pembinaan;
    c. Mengatasi keterbatasan sumber dana dan fasilitas;
    d. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di bidang Olahraga.

Dengan mempelajari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, KONI DIY diharapkan mampu meningkatkan keunggulan-keunggulan dalam pembinaan olahraga untuk mengatasi berbagai tantangan dan meminimalisir kelemahan yang ada serta memanfaatkan peluang demi mengembangkan potensi atlet dan meraih prestasi olahraga yang lebih baik di masa mendatang, khususnya dalam PON XIX di Jawa Barat tahun 2016.

7.6.3 Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

Pendidikan yang berkualitas merupakan pendidikan yang mencakup kecakapan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mendukung kecakapan pada ketiga aspek tersebut, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka di Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha aktif mewarnai pengembangan pendidikan watak, budi pekerti luhur, jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda serta mengatasi permasalahan yang dihadapi pemuda melalui kepramukaan.

Sejalan dengan filosofi pembangunan DIY yaitu *"Hamemayu Hayuning Bawana"*, Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta turut serta mengabdi dan mensukseskan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan motto Gerakan Pramuka "*Satyaku Kudharmakan Dharmaku Kubaktikan*". Pengabdian Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY diwujudkan dalam bentuk pembinaan pada generasi muda dalam rangka penguatan kepribadian generasi muda, mengingat banyaknya tantangan dan permasalahan yang dihadapi generasi muda akibat kemajuan zaman. Hak ini diperlukan sebagai filter terhadap dampak kemajuan zaman tersebut. Generasi muda yang dibutuhkan saat ini adalah generasi muda yang mau belajar untuk menjadi pribadi yang tangguh terhadap gangguan dari hal-hal negatif seperti hedonisme, kemerosotan moral, dan fanatisme berlebihan yang mampu membuka wawasan dan pemikiran untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

Sebagai usaha untuk melaksanakan pembinaan agar dapat membentuk mental dan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda melalui gerakan pramuka, maka Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY telah menyusun dan melaksanakan program kerja, yang dijabarkan pada kegiatan-kegiatan melalui bidang-bidang pada Kwarda DIY yaitu:

A. Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal, dengan kegiatan meliputi:
   1. Jelajah Budaya Daerah
   2. Kemah Budaya Daerah
   3. Kemah Budaya Nasional
   4. Sarasehan Budaya "*Rebranding* Jogja Istimewa"
   5. FGD Perumusan arah dan kebijakan program kerja sama bidang kebudayaan dan pengembangan kearifan lokal
   6. Rapat bidang kebudayaan dan kearifan lokal
   7. Jelajah Tempat Bersejarah menggunakan sepeda

B. Bidang Pembinaan Anggota Muda, dengan kegiatan meliputi:
   1. Muspanitera Daerah
   2. Pertemuan FKPKRR
   3. Perkemahan Sabtu Minggu
   4. Pemberdayaan kesetiakawanan sosial bagi pelajar antarsekolah
   5. Perkemahan Pramuka Santri Nasional
   6. Pembinaan Anggota Pramuka dalam rangka Kegiatan Krida Pengendalian Penyakit Saka Bhakti Husada
   7. Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Manajemen Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKRR)
   8. Mengikuti Jambore Dunia 2015
   9. Sosialisasi Saka Widya Budaya Bakti
   10. Mengikuti Pelayaran Lingkar Nusantara IV
   11. Sosialisasi Buku Panduan Komunikasi dengan Pramuka Berkebutuhan Khusus Tuna Netra dan Tuna Rungu
   12. *Jamboree in the Air*/*Jamboree in the Internet* (JOTA/JOTI)
   13. Kemah Bakti Pemuda Pembauran Kebangsaan DIY
   14. Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Pemuda
   15. Jambore Daerah
   16. Mengikuti Peransaka Nasional

17. Perkemahan Saka Bhayangkara
18. Perkemahan Wirakarya Nasional

C. Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, dengan kegiatan meliputi:
   1. Kursus Pamong Satuan Karya Widya Budaya Bakti
   2. Kemah Pramuka Pendidikan Karakter bagi Guru SMA
   3. Bimtek Ekstrakurikuler Pramuka SD
   4. Kursus Pelatih Pembina Pramuka tingkat Lanjutan

D. Bidang Organisasi Manajemen dan Hukum
   1. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Putra Putri Daerah XI
   2. Forum Konsultasi Publik
   3. Musyawarah Daerah
   4. Pengukuhan Pengurus Mabida dan Kwarda
   5. Workshop Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Satuan Komunitas dan Gugus Darma Pramuka
   6. Pembinaan dan Penilaian Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tergiat
   7. Kursus Pengelola Kwartir

E. Bidang Keuangan, Usaha, Sarana, dan Prasarana, dengan kegiatan meliputi:
   1. Pemeliharaan Kendaraan
   2. Pemeliharaan Gedung Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lingkungan
   3. Pemeliharaan Gedung Bumi Perkemahan Babarsari
   4. Pengembangan Usaha Pemberdayaan Aset
   5. Pemeliharaan Gedung Bumi Perkemahan Karang Pramuka Kaliurang
   6. Pelatihan Penyusunan Program dan Anggaran Berbasis Kinerja
   7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan

F. Bidang Pengabdian Masyarakat, Kehumasan, Penanggulangan Bencana dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan meliputi:
   1. Posko Induk Karya Bakti Lebaran Tahun 2015
   2. Peringatan Hari Pramuka ke-54
   3. Pos Kesehatan dan Bantuan Komunikasi BBTKLPP
   4. Bantuan Air Bersih
   5. *Jamboree in the Air*/*Jamboree in the Internet* (JOTA/JOTI)
   6. Kegiatan Bakti Sosial Jelang Hari Pramuka ke-53

Program kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY tahun 2015 disusun sebagai pedoman seluruh jajaran Gerakan Pramuka di DIY. Melalui program kerja tersebut diharapkan generasi muda yang terlibat di dalamnya dapat memperoleh bekal nilai-nilai hidup yang baik dan pribadi kuat yang mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.

7.6.4 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh

perseratus). Masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilu, KPU meyelenggarakan:

- Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Pemilihan Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 KPU DIY melaksanakan kegiatan antara lain:

A. Bimbingan Teknis
   - *Legal Drafting* terkait Keputusan KPU Kabupaten
   - Pengganti Antar Waktu anggota DPRD DIY
   - Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota
   - Aplikasi SIPAW
   - Pemilihan Kepala Daerah

B. Pencermatan terkait regulasi pilkada
   - Kajian Peraturan Komisi Pemilihan Umum
   - Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan

C. Rapat Koordinasi
   - Identifikasi permasalahan hukum
   - Penyelesaian sengketa Pemilu di Peradilan Tata Usaha Negara
   - Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
   - Rakor Partai Politik dan Bawaslu
   - Penyusunan Dana Kampanye
   - Penyusunan data, informasi dan produk hukum
   - Persiapan kampanye
   - Terkait pengawalan NPHD

D. Monitoring dan supervisi seluruh tahapan pemilihan
   - Pemutakhiran Data pemilih
   - Pendaftaran pasangan calon
   - Kampanye

- Laporan dan audit dana kampanye
- Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
- Pemungutan suara dan penghitunan suara
- Rakapitulasi hasil penghitungan suara
- Penetapan pasangan calon
- Pengusulan, pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih

E. Fasilitasi
- Pusat Pendidikan Pemilih
- Pengawalan NPHD

F. Workshop
- Sosialisasi Pilkada 2015
- Kampanye Pilkada

Tabel 7.9 Data Pemilih Pilkada tahun 2015

No	Kabupaten	Pemilih	Pengguna hak pilih
1	Sleman	779.538	563.039
2	Gunungkidul	619.825	434.478
3	Bantul	695.855	523.817

Tabel 7.10 Data Perbandingan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Pilkada

No	Kabupaten	Tahun 2010	Tahun 2015
1	Sleman	-	72,23%
2	Gunungkidul	71,80%	70,09%
3	Bantul	73,80%	75,23%

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

Belum semua penduduk yg memiliki hak pilih masuk dalam daftar hak pilih, serta masih ada duplikasi hak pilih

b. Solusi:

Untuk penduduk yang belum masuk daftar masih dapat memilih dengan menggunakan KTP/ KK/ Paspor atau identitas lain yang sah, sedangkan validasi oleh petugas, dengan pemutakhiran terhadap data pemilih yang dianggap ganda

Anggaran Pemilihan Kepala Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten penyelenggara yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan besaran sebagai berikut:

No	Kabupaten	No NPHD	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Sleman	24/PK.KDH/A/2015 66/NPHD/KPU.Kab-13.329625/2015	8 Mei 2015	18.628.446.500
2	Gunungkidul	903/1911/SP HIBAH/2015	8 Mei 2015	18.841.613.500
3	Bantul	900/02195 165/KPU/ Kab/Btl.013.0329600/V/2015	18 Mei 2015	22.583.288.144

7.6.5 Badan Pengawasan Pemilihan Umum DIY

Keberadaan Bawaslu DIY adalah bagian dari tindaklanjut amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Terbentuknya Bawaslu DIY ditandai dengan penetapan anggota Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 593-KEP Tahun 2012.

Sebagai pengawas pemilu, tugas dan wewenang kepada Bawaslu DIY adalah:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
2. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
3. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

6. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu DIY juga dapat:

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/ atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran dalam pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Bawaslu DIY juga berkewajiban untuk:

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan

6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015 di DIY yang meliputi Pilkada Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman, Bawaslu DIY melaksanakan tugas yang antara lain:

1. Pembentukan lembaga *Ad Hoc* Panwas kabupaten (Panitia Pengawas Kabupaten) di tiga kabupaten;
2. Seleksi personil Panwas Kabupaten di tiga kabupaten;
3. Menyampaikan permohonan kepada Bupati di tiga kabupaten untuk pengisian personil sekretariatan Panwas Kabupaten;
4. Melaksanakan bimtek terhadap anggota dan sekretariat Panwas kabupaten di tiga kabupaten;
5. Melakukan supervisi pengawasan di setiap tahapan Pilkada di tiga kabupaten;
6. Pendampingan pengelolaan anggaran dana Hibah penyelenggaraan Pilkada untuk tiga kabupaten.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Bawaslu DIY, Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten (Panwas Kabupaten), Pengawas Pemilihan Tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas TPS secara sinergis dan koordinatif mengambil langkah-langkah strategis sehingga penyelenggaraan Pilakda berjalan dengan baik mencakup:

1. Upaya pencegahan (menyampaikan peringatan dini dan himbauan kepada penyelenggara pemilu, partai politik, penyelenggara negara dan pasangan calon);
2. Pelaksanaan bimbingan teknis;
3. Supervisi atas kinerja Pengawas Pemilihan ;
4. Melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan;
5. Melaksanakan penanganan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan;
6. Melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dengan bersama-sama membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

7. Melakukan sosialisasi tentang peran Pengawas Pemilihan, mekanisme pelaporan dan peran serta masyarakat selama Pilkada dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Tokoh Masyarakat, Guru PKN dan Aktivitas Mahasiswa;
8. Memberikan rekomendasi bagi KPU Kabupaten dan Penyelenggara Pemilu di bawahnya dalam rangka menjaga Tahapan Pilkada berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
9. Memberikan rekomendasi kepada pihak lain yang berwenang terhadap temuan dan/ atau laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain.

Bawaslu DIY telah melakukan sosialisasi dan koordinasi secara intensif kepada Panwas Kabupaten untuk dapat melakukan sosialisasi dan koordinasi secara intensif kepada Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS. Upaya lain yang dilakukan oleh Bawaslu DIY untuk memastikan kesepahaman bersama di jajaran Pengawas Pemilihan yaitu dengan melakukan Supervisi di lapangan sehingga dapat diminimalisir ketidakpahaman atas Peraturan Bawaslu RI.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

1. Kualitas DPT
   - Masih ditemukannya DPT bermasalah di TPS (pemilih ganda, tidak valid, tidak sesuai antara jumlah dengan data *byname*).
2. Penyelenggaraan Kampanye dalam bentuk Rapat Umum
   - Pelaksanaan kampanye rapat umum di Bantul dan Sleman khususnya putaran pertama belum dikelola secara antisipatif untuk cegah terjadinya gangguan ketertiban masyarakat, konvoi motor *blombongan* dan anagangguan ketertiban dan ketentraman umum di jalan oleh peserta konvoi. Pelaksanaan kampanye rapat umum di Gunungkidul perlu diapresiasi, Polres telah antisipatif dengan mengerahkan Polsek untuk secara serentak merazia motor yang melanggar UU Lalu Lintas jelang kampanye dan peserta kampanye diarahkan untuk naik truk atau mobil.

3. Kualitas Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Rumah Sakit
   - Kurang terjaminnya penggunaan hak pilih bagi warga yang memiliki hak pilih yang tengah sakit di RS dan penunggu karena kurang koordinasi lebih awal dan intensif dengan pengelola RS.
4. Kecermatan *Packing Logistics* (Pengepakan Logistik)
   - Masih ditemukannya jumlah surat suara yang kurang/ lebih di tiap TPS.
5. Ketidaknetralan ASN dan Kepala Desa
   - Pengawas Pemilihan masih menemukan adanya keterlibatan ASN dan Kepala Desa untuk mendukung Pasangan calon tertentu selama Pilkada Tahun 2015.
6. Ketidaknetralan Media
   - Sejumlah media terindikasi mendukung Pasangan calon tertentu sehingga masyarakat cenderung tidak mendapatkan informasi yang obyektif dan berimbang.
7. Prosedur Penyelenggara Pemilihan
   - Pengawas Pemilihan masih menemukan adanya penyelenggara pemilihan yaitu PPK yang tidak secara cermat memasukkan Formulir DA-1 ke dalam kotak suara.

b. Solusi

1. Meningkatkan koordinasi antara penyelenggara Pemilihan Umum dan Pilkada (KPU) dengan Dinas Pencatatan Sipil serta peningkatan tertib administrasi kependudukan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih.
2. Meningkatkan koordinasi antara KPU, Partai Politik atau Tim Sukses Pasangan Balon Pilkada, Kepolisian, Unsur Pengawas Pilkada, dan Pemda agar pengelolaan kampanye terbuka dalam bentuk rapat umum bisa lebih efektif, tertib, dan meminimalisir ekses gangguan trantibum.
3. Meningkatkan kesiapan penyelenggaraan Pilkada di TPS khusus (RS, Klinik, Puskesmas, dll) dengan dasar estimasi kapasitas maksimal setiap TPS dan sosialisasi baik kepada pasien dan penunggu maupun kepada pengelola unit layanan di TPS khusus tersebut.
4. Membenahi dan meningkatkan *quality control* logistik Pilkada.
5. Meningkatkan koordinasi dan internalisasi urjensi netralitas aparat (ASN dan perangkat desa) dalam setiap proses penyelenggaraan Pilkada.

6. Bekerjasama dengan KPID dan KPU untuk pemantauan kampanye dan siaran Pilkada di Lembaga Penyiaran Publik.
7. Meningkatkan kapasitas personil pelaksana Pilkada, khususnya di tingkat TPS dan PPK.

7.6.6 Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)

Kondisi Umum

Komisi Penanggulangan AIDS DIY dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 43/KEP/2008 yang telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan HIV/ AIDS DIY sebagai tindak lanjut dari terbentuknya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di pusat sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah melalui PP nomor 75 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/ Kota Komisi Penanggulangan AIDS DIY merupakan lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur. KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional;
b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi;
c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi;
e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

f. Menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
g. Memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/ Kota;
h. Mendorong terbentuknya LSM/kelompok peduli HIV dan AIDS; dan
i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pelaksanaan program dan kegiatan

Tahun 2015 KPA DIY mengelola dana Hibah dari pemerintah DIY sebesar Rp400.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp350.233.964,00 (87,56%) dan fisik 100%. Adapun rincian kegiatan KPA DIY adalah:

Kelembagaan

- Lokakarya Tahunan Anggota KPA DIY 2 kali
- Lokakarya Bidang KPA DIY dan Tim Asistensi 4 kali
- Workshop NASA *(National AIDS Spending Assesment)* di DIY 2 kali

Pencegahan

- Lokakarya pada Populasi Kunci 2 kali
- Workshop dalam rangka Hari AIDS 1 kali
- Lokakarya HIV pada masyarakat 2 kali
- Lokakarya Temu Media 2 kali
- Rapat Kerja Bidang 3 kali
- Rapat Kerja Tim Asistensi 1 kali
- Rapat Kerja Tim Monev 1 kali

Pengembangan Program

- Pertemuan Regional di Surabaya 1 kali
- Pertemuan Nasional di Makassar 1 kali

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Penguatan lembaga KPAD di kabupaten/ kota belum optimal.
2. Keterbatasan dalam sarana karena sejak tahun 2015, sekretariat untuk aktivitas KPAD provinsi sudah habis masa kontraknya.

b. Solusi

1. Dukungan berupa penyelenggaraan program dari KPAD kota/kabupaten melalui upaya koordinasi dan supervisi.
2. Memobilisasi semua sumber daya yang dimiliki yang efektif termasuk penyediaan tempat secretariat yang bersifat permanen untuk aktifitas kegiatan.

7.6.7 Palang Merah Indonesia (PMI)

Kondisi Umum

Perhimpunan Palang Merah Indonesia adalah suatu organisasi nasional yang berdiri atas azas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan dan faham politik. PMI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. PMI mempunyai tugas pokok dan kegiatan antara lain melaksanakan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bencana alam yang terjadi, melaksanakan pelayanan darah. Dalam melaksanakan tugasnya PMI tiap tahun harus mengajukan rencana kerja dan menyampaikan laporan kegiatan tahun sebelumnya kepada pemerintah.

Pada tahun 2015 PMI DIY mendapatkan dana hibah dari pemerintah DIY sebesar Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membantu operasional PMI.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatannya PMI DIY mendukung program Dinas Kesehatan DIY dengan sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Jumlah anggaran yang dihibahkan ke PMI sebesar Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah),- dapat direalisasi sebanyak Rp400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), dengan pencapaian fisik 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan PMI antara lain: Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Citra Positif PMI DIY, Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kepalangmerahan, Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM (kapasitas SDM)

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Keterbatasan SDM untuk pelayanan klinik pratama PMI DIY
2. Keterbatasan jumlah ambulan untuk pelayanan kasus emergensi di masyarakat

b. Solusi

1. Koordinasi pengaturan SDM untuk relawan PMI di kabupaten/ kota
2. Penambahan pelayanan ambulan di masyarakat oleh dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

7.6.8 Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY

Kondisi Umum

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK merupakan sebuah gerakan representatif perempuan yang telah diakui keberadaannya dan mempunyai payung hukum yaitu Kepmendagri No. 53 tahun 2000. Di sisi lain, gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju, dan mandiri.

Gerakan PKK bertujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Keterkaitan perempuan dengan PKK ialah mengenai masalah bagaimana perempuan itu dapat aktif untuk mencapai kesejahteraan keluarga melalui keterlibatannya di PKK sehingga eksistensi PKK diakui oleh semua pihak. Hasil kesejahteraan keluarga itu nantinya dapat dilihat dari adanya peningkatan kualitas hidup keluarga, dan adanya peningkatan ekonomi dari keluarga itu sendiri. Peranan perempuan PKK sebagai TP-PKK ialah (1) mengembangkan koperasi umum dan koperasi khusus (Koperasi Wanita) dengan tujuan membantu permodalan bagi masyarakat di wilayah kerja PKK, (2) mengadakan diklat untuk dirinya sendiri tentang wirausaha/koperasi dan keterampilan lainnya, (3) memberikan pelatihan dan keterampilan bagi ibu-ibu di cakupan wilayah kerja PKK (menjahit, memasak, berwirausaha/berkoperasi, membuat pembukuan sederhana dalam usaha, dan lain-lain).

Dalam melaksanakan kegiatannya TP PKK DIY terbagi dalam 4 Kelompok Kerja (Pokja), yaitu:

a. Pokja I mengurusi Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Gotong Royong
b. Pokja II mengurusi Pendidikan dan Keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi
c. Pokja III mengurusi Pangan Sandang Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
d. Pokja IV mengurusi Kesehatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015

Pada tahun 2015 TP PKK DIY mengelola dana dari APBD DIY sebesar Rp722.320,00 Dana tersebut digunakan untuk kegiatan kesekretariatan dan Pokja-pokja TP PKK DIY. Dalam pelaksanaan kegiatan realisasi keuangan yang dicapai sebesar 99,74%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan

oleh TP PKK pada tahun 2015: Pembinaan kader, Pencanangan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tahun 2015, dan Bunda PAUD.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal.
2. Fungsi dan program PKK belum dipahami secara merata.
3. Sistem Informasi Manajemen PKK dan sarana penunjangnya belum merata.

b. Solusi

1. Adanya mekanisme hubungan kerja secara koordinatif dan konsultatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis antara pusat dan daerah.
2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan program/ kegiatan PKK.
3. Perlu pelatihan system informasi manajemen PKK dan pemenuhan sarana penunjang untuk memperlancar pelaksanaan 10 pokok program PKK baik di Provinsi maupun Kab/ Kota.

7.6.9 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah merupakan salah satu lembaga negara independen yang didesentralisasi sampai ke tingkat daerah berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaga yang lahir karena konsekuensi demokratisasi ini memiliki tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; ikut membantu persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait; memelihara tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang; menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangansumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Pelaksanaan kinerja KPID DIY bersifat koordinatif dengan KPI Pusat, maka pendanaannya dibantu oleh APBD. Kegiatan KPID DIY sejak tahun 2012 s/d

2015 di biayai oleh anggaran hibah daerah dari Pemerintah Daerah DIY sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Jumlah (Rp)
1	Tahun 2012	650.000.000,00
2	Tahun 2013	760.175.000,00
3	Tahun 2014	841.197.750,00
4	Tahun 2015	901.750.000,00

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2015

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Lembaga ini memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal mempunyai predikat sebagai kota Budaya dan Kota Pendidikan wajib dijaga kelestariannya melalui media penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mempunyai tugas menjaga agar masyarakat mendapatkan informasi yang layak, benar dan berbudaya agar nilai-nilai luhur yang hidup di mayarakat tidak tergerus oleh dampak negatif media penyiaran.

KPID DIY dalam rangka melindungi masyarakat harus memberikan sanksi tegas kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar peraturan tetapi disisi lain harus membina dan memberikan perlindungan hukum agar Lembaga Penyiaran di DIY dapat tumbuh berkembang dengan sehat sehingga dapat mendorong timbulnya minat investor untuk mendirikan usaha penyiaran di DIY dan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan dari tugas dan kewajiban tersebut dilaksanakan oleh 3(tiga) bidang yaitu bidang penataan struktur dan sistem siaran, bidang pengawasan isi siaran dan bidang kelembagaan.. berikut ini adalah rekapitulasi realisasi kegiatan yang dilakukan oleh KPID DIY, diantaranya:

1. BIDANG PENATAAN STRUKTUR DAN SISTEM SIARAN

Tabel 7.11 Lembaga Penyiaran yang mengajukan Proses Perizinan

No	Lembaga Penyiaran	2012	2013	2014	2015	Jml	Keterangan
1	Televisi Berjaringan	10	0	0	11	21	Permohonan IPP Baru
2	Televisi Komunitas	3	3	0	0	6	Permohonan IPP Baru
3	Televisi Lokal	5	0	0	2	7	Permohonan IPP Baru
4	Televisi Digital	0	0	22	0	22	Permohonan IPP Baru
5	Radio Swasta	7	2	2	1	12	Permohonan IPP Baru dan Perpanjangan IPP
6	Radio Komunitas	10	1	4	11	26	Permohonan IPP Baru
Jumlah		**35**	**6**	**28**	**25**	**94**	

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2015

Tabel 7.12 Lembaga Penyiaran Yang Telah Mendapatkan IPP

No	Lembaga Penyiaran	2012	2013	2014	2015	Keterangan
1	Televisi Berjaringan	10	0	0	2	IPP Prinsip di Tahun 2015
2	Televisi Komunitas	1	0	0	0	-
3	Televisi Lokal	5	0	0	1	IPP Prinsip di Tahun 2015
4	Televisi Digital	0	0	15	0	IPP Prinsip
5	Radio Swasta	7	11	3	1	Perpanjangan IPP
6	Radio Komunitas	3	0	0	0	IPP Prinsip
Jumlah		**26**	**11**	**18**	**3**	

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2015

Pada Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita *Ultra High Frequency* ada alokasi 3 (tiga) kanal baru untuk wilayah siaran DIY dan sekitarnya. Satu kanal oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika diperuntukkan menata RTV yang sebelumnya menggunakan kanal cadangan di Magelang kemudian ditempatkan di DIY, jadi tersisa 2 kanal dari alokasi tersebut untuk DIY membuka peluang usaha. KPID DIY menerima 13 (tiga belas) proposal permohonan pengajuan ijin penyelenggaraan penyiaran dari lembaga penyiaran swasta.

Pada proses perijinan KPID DIY berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Kelayakan untuk Lembaga Penyiaran yang akan menjadi salah satu syarat diterbitkannya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran. Setelah melalui proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang dihadiri oleh Pemohon, Dishubkominfo, Balmon DIY dan perwakilan masyarakat, KPID DIY menilai 9 (Sembilan) pemohon layak untuk diberikan Rekomendasi Kelayakan. 4 (empat) pemohon lain tidak mendapatkan rekomendasi kelayakan dengan alasan kurang syarat administrasi dan pertimbangan *diversity of ownership*.

Setelah menjalani proses seleksi dan Forum Rapat Bersama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika maka hasilnya sebagai berikut 2 kanal diperuntukkan bagi NET.TV dan Kresna TV. Saat ini lembaga penyiaran swasta tersebut telah mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip dan sedang menjalani proses uji coba siaran. Perpanjangan IPP di tahun 2015 ada satu lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio yang mengajukan yaitu Sonora FM.

Lembaga Penyiaran Komunitas di DIY tumbuh subur dalam hal ini DIY memiliki iklim yang berbeda dengan daerah lain yang hanya memiliki sedikit LPK. Lembaga Penyiaran Komunitas yang wilayah jangkauan siarannya terbatas hanya 5 km saja, banyak digunakan oleh kelompok masyarakat untuk mengembangkan kelompoknya, menjalin kerjasama dengan aparat pemerintahan setempat dan kalangan pelajar mahasiswa untuk mengasah kemampuan di bidang penyiaran. Sayangnya baru sedikit yang mengajukan permohonan penyiaran tercatat sejak tahun 2012 baru 26 Lembaga Penyiaran Komunitas yang mengajukan proses perijinan.

Tahun 2015 KPID DIY bersama Balmon melakukan penataan terhadap Lembaga Penyiaran Komunitas. Lembaga Penyiaran Komunitas yang belum memproses perijinan diminta untuk mengajukan permohonan ijin, dalam hal ini KPID DIY bekerja sama juga dengan Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta. Hasilnya ada 11 Radio Komunitas yang mengajukan permohonan ijin di tahun 2015. Sampai hari ini belum ada Lembaga Penyiaran Komunitas yang mendapatkan IPP, pasalnya sampai di Forum Rapat Bersama dengan Kominfo Lembaga Penyiaran Komunitas terbentur biaya untuk sertifikasi alat yang memang sangat mahal untuk ukuran LPK karena biayanya disamakan dengan

Lembaga Penyiaran Swasta. KPID DIY bekerjasama dengan Balmon DIY, JRKY dan akademisi melakukan terobosan untuk memudahkan Lembaga Penyiaran Komunitas melakukan sertifikasi. Proses ini masih berlangsung hingga saat ini.

2. BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN

KPID DIY memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan isi siaran terhadap semua Lembaga Penyiaran yang bersiaran di wilayah DIY. Saat ini terdapat 2 Lembaga Penyiaran Publik, 12 Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Jaringan, 4 Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Lokal, 38 Lembaga Penyiaran Swasta Radio, 26 Lembaga Penyiaran Komunitas, 1 Lembaga Penyiaran Berlangganan. Pengawasan isi siaran dilakukan melalui 2 hal yaitu pemantauan (regular dan tematik) dan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan dari masyarakat dilayani KPID DIY melalui pengaduan langsung ke kantor KPID DIY, telepon, SMS, email dan menggunakan sosial media yaitu Facebook dan Twitter. Tahun 2015 pengaduan masyarakat terhadap isi siaran sebanyak 165 aduan, dari aduan tersebut yang dapat ditindaklanjuti ada 131 aduan. Hal ini dikarenakan ada aduan yang tidak jelas secara substansi. KPID DIY mengeluarkan 92 teguran, 41 himbauan dan melakukan 11 klarifikasi terhadap Lembaga Penyiaran yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

No	Jenis Surat	2012	2013	2014	2015	Keterangan
1	Teguran	2	8	20	92	Televisi dan Radio
2	Himbauan	0	38	76	41	Televisi dan Radio
3	Klarifikasi	0	9	0	11	Televisi dan Radio
Jumlah		**2**	**55**	**96**	**131**	

Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, 2015

Tahun 2015 KPID DIY menegakkan Sistem Siaran Jaringan di DIY agar 12 TV berjaringan yang bersiaran di DIY mematuhi P3 SPS untuk memenuhi program siaran lokal minimal 10% dari waktu siaran perhari dan ditayangkan pada jam prime time lokal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan iklim penyiaran di DIY, lebih banyak SDM terserap dan potensi lokal DIY terangkat. Harapannya dapat berperan untuk menjaga kelestarian budaya dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DIY. Hasil dari penegakan tersebut sampai akhir tahun 2015 dari

rata-rata 0-30 menit untuk program siaran lokal dapat meningkat menjadi 90-120 menit di tiap-tiap Lembaga Penyiaran Swasta.

Pada tahun 2015 KPID DIY, KPU DIY dan Bawaslu melakukan kerjasama untuk pemantauan kampanye dan siaran Pilkada Serentak 2015. Hasil pemantauan diperoleh 9 pelanggaran pada saat pelaksanaan pemantauan pemilu dan sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan sanksi teguran kepada lembaga penyiaran dan mengirimkan salinan serta rekaman siaran kepada Bawaslu dan KPU DIY untuk ditindaklanjuti.

3. BIDANG KELEMBAGAAN

Bidang kelembagaan DIY pada tahun 2015 mengadakan kegiatan sebagai berikut:

a. Sosialisasi melalui Radio (GCD Gunungkidul) dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan sebanyak 9 kali.
b. Dialog Interaktif melalui TVRI tentang tugas dan fungsi KPID DIY sebanyak 9 kali.
c. Melaksanakan Sosialisasi / *Literacy Media* kepada Mahasiswa di wilayah DIY dan luar DIY sebanyak: 10 kali.
d. Telah melaksanakan penandatanganan MOU dengan KPU dan Bawaslu terkait Pengawasan Pelaksanaan Pilkada 2015.
e. Kegiatan pertemuan melalui Diskusi Publik sebanyak 9 kali.
f. Kegiatan pertemuan melalui Rakerda 1 kali
g. Kegiatan pertemuan melalui Jumpa Pers 1 kali.
h. Pada Tahun 2015 KPID DIY mendapatkan gugatan hukum dari PT. Matahari Yogya Televisi (My TV) karena KPID DIY tidak mengeluarkan rekomendasi kelayakan untuk proses perijinan, ditingkat PTUN Yogyakarta gugatan tersebut dimenangkan oleh KPID DIY. Kemudian pihak PT. Matahari Yogya Televisi (My TV) melakukan proses banding yang sementara ini sedang berjalan.

Selain itu KPID DIY menyediakan diri sebagai tempat magang untuk pelajar dan mahasiswa yang tertarik di bidang penyiaran, beberapa penelitian juga mengambil data dan sumber dari KPID DIY.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

1. Belum mempunyai payung hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran televisi dan radio. Kewenangan untuk melakukan penindakan masih terbatas mengeluarkan teguran tertulis.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY, khususnya alat pemantauan isi siaran televisi maupun radio.
3. SDM pendukung operasional KPID masih kurang.

b. Solusi:

1. Menginisiasi adanya payung hukum dalam bentuk Perda Penyiaran untuk memberikan kewenangan kepada KPID dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran televisi maupun radio di DIY.
2. Perlu penambahan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan di bidang penyiaran di DIY.
3. Perlu didukung oleh tenaga PNS dan non PNS yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan di bidang penyiaran.

7.6.10 Komisi Informasi DIY

Komisi Informasi DIY merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU 14/2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi DIY memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/ atau ajudikasi informasi.

Sedangkan kewenangannya:

1. Memanggil dan/ atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambi Keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik
3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam sengketa informasi publik
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi non litigasi penyelesaian informasi publik
5. Membuat Kode Etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja KI DIY.

Sesuai Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepada publik yang dikenal dengan monitoring dan evaluasi Badan Publik dan puncaknya adalah pemeringkatan dan penganugerahan kepada Badan Publik yang mengimplementasikan UU KIP.

Tahun 2015 Komisi Informasi DIY memasuki tahun terakhir dari periode pertama berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi, yang anggotanya dikukuhkan pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan Surat Keputusan Gubernur No: 227/KEP/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 dengan struktur komisionernya berdasarkan SK Ketua KIP DIY Nomor 13/KEP/KIP-DIY/XI/2013 tentang Susunan Kepengurusan Komisi Informasi Provinsi DIY masa Jabatan Tahun 2013-2015 adalah Dewi Amanatun Suryani, SIP, MPA (Ketua merangkap anggota), Istiatun MA (Wakil Ketua merangkap anggota), Sarworo Soeprapto, MSi (Bidang Kelembagaan), Siti Roswati Handayani, S.H., MPA (Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi), dan Ir. J. Surat Djumadal (Bidang Sosialisasi).

Semenjak berakhirnya masa jabatan komisioner periode pertama dan dilantiknya komisioner baru pada tanggal 30 November 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 263/KEP/2015 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Periode 2015-2019 dengan struktur komisioner baru berdasarkan SK Ketua Komisi Informasi DIY Nomor 01/KEP/KIP-DIY/XII/2015 adalah

Hazwan Iskandar Jaya, SP (Ketua merangkap anggota), Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA (Wakil Ketua merangkap Anggota), Drs. Martan Kiswoto, MA (Anggota Bidang Kelembagaan), Warsono, SH (Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi), Suharnanik Listiana, S.Sos (Anggota Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi).

Keputusan Gubernur Nomor 263/KEP/2015 juga mengamanatkan tambahan tugas kepada Komisi Informasi DIY, yakni melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik.

Pagu anggaran Komisi Informasi DIY tahun 2015 sebesar Rp898.250.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD dalam bentuk hibah.

Visi:

> "Menjadi Lembaga yang mandiri, Profesional dan Pengawal Budaya Keterbukaan Informasi Publik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"

Misi:

1. Menyelesaikan Sengketa Informasi publik dengan cepat, tepat dan mudah
2. Mendorong adanya Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di wilayah DIY agar lebih Peka dan Responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan semua pihak
3. Mendorong dan membangkitkan inisiatif masyarakat untuk mengakses informasi publik dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat
4. Mewujudkan lembaga yang mandiri, transparan, adil, non diskriminatif, kredibel dan akuntabel dalam penyelesaian sengketa informasi

Program dan kegiatan Komisi Informasi DIY

1. Bidang Kelembagaan

    a. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dengan mengikutsertakan sekretariat pada Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi (Bimtek Simsi PSI) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Bogor Jawa Barat.
    b. Membangun koordinasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam bentuk rapat kerja daerah mengundang Bappeda, Biro Organisasi, Biro Hukum, BKD, DPPKA, Dishubkominfo, media, LSM, dan para pihak yang pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi untuk mendapatkan masukan terkait kinerja KIP DIY; kerjasama dengan humas perguruan tinggi, LSM, media, humas pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/ kota se-DIY dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional dan Hari hak untuk tahu; keikutsertaan Komisi Informasi DIY dalam forum panduan bersih penyediaan barang dan jasa; kerjasama dengan LSM SIAR (Saluran Informasi Akar Rumput) dalam penyadaran hak untuk akses informasi dalam bentuk pendampingan pada kelompok masyarakat; forum PPID Pemda DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY; dan keikut sertaan dalam program Penyusunan SDG's bersama Bappeda Pemda DIY.
    c. Konferensi Press dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional dan Hari Hak Untuk Tahu.
    d. Rapat internal yang rutin dilaksanakan secara berkala setiap mingguan dan bulanan.
    e. Rapat koordinasi dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional, Hari Hak Untuk Tahu dan monitoring evaluasi Badan Publik, menghadiri koordinasi dengan Dishubkominfo dan Komisi A DPRD DIY.
    f. Kunjungan kerja dilaksanakan di KI Provinsi Kepulauan Riau untuk menambah wawasan terkait kelembagaan dan metode sosialisasi, serta penanganan sengketa informasi, dan kunjungan ke KI Provinsi Jawa Barat untuk menambah pengetahuan tentang strategi sosialisasi, monitoring badan publik dan membangun sinergitas antarKomisi Informasi.

g. Menghadiri undangan dari Komisi Informasi Pusat dalam acara Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional, Hari Hak Untuk Tahu, Penganugerahan Badan Publik, Rapat Kerja Teknis Persiapan Rakornas, Rapat Kerja Nasional.
h. Menghadiri undangan diskusi dari KPK, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dan Komisi Informasi Sumatera Selatan.
i. Penyediaan kesempatan dan ruang pembelajaran bagi penelitian dari mahasiswa Atmajaya, UII dan magang dari mahasiswa Fakultas Hukum UGM.
j. Penyediaan dan layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID baik melalui website, dan sarana elektronik maupun non elektronik.
k. Monitoring dan Evaluasi Badan Publik dan penganugerahan pemeringkatan Badan Publik dalam mengimplementasikan UU KIP dengan sasaran 350 PPID di lingkup pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/ kota se DIY, BUMD dan Partai Politik.

2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

a. Pengadministrasian penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Panitera dan panitera pengganti meliputi pengadministrasian pra register, registrasi permohonan penyelesaian sengketa, menyiapkan dan merekam proses mediasi dan persidangan, menyiapkan dan pengarsipan seluruh dokumen penyelesaian sengketa informasi.
b. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dapat teregister adalah permohonan yang memenuhi kelengkapan dokumen/legal standing pemohon dan terpenuhinya jangka waktu permohonan kepada Badan Publik.
c. Kegiatan advokasi kepada pemohon PSI dengan memberikan pemahaman mengenai kelengkapan dan prosedur permohononan sengketa informasi.

Tabel 7.13 Penanganan Sengketa

NO	TAHUN	JUMLAH PENGADUAN	SIDANG AJUDIKASI	KETERANGAN
1.	2012	19	3	16 tidak memenuhi syarat untuk disidangkan, dengan sebab: Kadaluwarsa; Selesai di Badan Publik; Syarat tidak lengkap
2.	2013	22	7	15 tidak memenuhi syarat untuk disidangkan, dengan sebab: Kadaluwarsa; Selesai di Badan Publik; Syarat tidak lengkap
3.	2014	27	5	22 tidak memenuhi syarat untuk disidangkan, dengan sebab: Kadaluwarsa; Selesai di Badan Publik; Syarat tidak lengkap
4.	2015	14	14	Sampai tanggal 12 Februari sebanyak 12 sengketa sudah diputuskan, 2 masih dalam proses persidangan

Sumber: Komisi Informasi DIY, 2015

3. Bidang Sosialisasi

   a. Sosialisasi UU KIP dan aturan pelaksanaannya dalam bentuk seminar dengan sasaran sekolah kepala sekolah tingkat SD- SMA/ SMK se DIY sebanyak 350 peserta;
   b. Bimtek PPID pada Badan Publik dengan sasaran peserta 420 orang di seluruh Pemda Provinsi dan Kabupaten/ Kota se DIY.
   c. Pendampingan PPID dengan sasaran 70 orang peserta dari Badan Publik, dengan materi Uji Konsekuensi/pengecualian informasi.
   d. Bimtek PPID Perguruan Tinggi dengan sasaran 140 orang peserta baik dari PTN maupun PTS.
   e. Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional dalam bentuk penyediaan layanan informasi bertempat di *Car Free Day*, sepanjang Jl Mangkubumi/ Margo Utomo Yogyakarta bekerjasama dengan BPJS, Kanwil BPN, Dinas Perizinan, Klinik Keterbukaan Informasi UII, LSM Mitra Wacana, Satu Nama dan IDEA serta stasiun TV lokal ADI TV.

f. Peringatan Hari Hak Untuk Tahu dalam bentuk aksi jalanan, penyediaan layanan informasi bertempat di *Car Free Day*, sepanjang Jl Mangkubumi/ Margo Utomo Yogyakarta bekerjasama dengan Kanwil BPN, Lembaga Ombudsman Daerah, Klinik Keterbukaan Informasi UII, Sekolah Tinggi MMTC, UMY, UNY, LSM Mitra Wacana, MPM, Satu Nama dan IDEA, pemasangan spanduk bekerja sama dengan humas UIN dan PPID kabupaten/ kota se-DIY, dialog di radio bekerja sama dengan Satu Nama, Mitra Wacana dan IDEA

g. Sosialisasi melalui media cetak dalam bentuk buku peraturan perundangan, buku pengecualian informasi, buletin, leaflet, stiker dan media elektronik dalam bentuk ILM di radio dan koran, dialog publik di televisi, radio dan website.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan aturan pelaksanaannya dan keberadaan KIP DIY belum banyak dikenal dan diketahui oleh Badan Publik dan Masyarakat.
2. Belum siapnya Badan Publik menerima perubahan paradigma tentang keterbukaan informasi publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Belum optimalnya PPID dalam menyediakan, mengumumkan dan melayani permohonan informasi.
4. Karakteristik masyarakat dan lokus permasalahan informasi di tiap daerah bervariasi.
5. Keterbatasan SDM pendukung kinerja kesekretariatan Komisi Informasi.
6. Sarana dan prasarana kantor sebagai pendukung tugas KI dalam penyelesaian sengketa informasi belum representative.
7. Keterbatasan dana operasional untuk mendukung kinerja Komisi Informasi DIY.
8. Keterbatasan pemahaman komisioner/ panitera terkait dengan sangketa informasi yang ditangani.

b. Solusi

1. Sosialisasi yang lebih masif tentang peraturan dan memperkenalkan tugas fungsi Komisi Informasi kepada Badan Publik.
2. Penyadaran yang bersifat edukasi melalui Bimtek dan Penghargaan kepada Badan Publik yang telah melaksanakan UU KIP.
3. Pendampingan PPID dan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi UU KIP.
4. Perlunya literasi keterbukaan informasi pada kelompok-kelompok masyarakat.
5. Penambahan personil pendukung kesekretariatan melalui rekrutmen tenaga kontrak.
6. Perlunya penyediaan ruang kerja komisisoner, ruang mediasi, ruang sidang ajudikasi, ruang kesekretariatan dan penyediaan sarana mobilitas.
7. Mengoptimalkan kinerja jaringan yang sudah berjalan.
8. Mengikutkan komisioner pada pelatihan mediator di Pusat Mediasi Indonesia UGM dan perlunya bimbingan teknis (bimtek) penyelesaian sengketa informasi. Di samping itu mengikutkan panitera pada bimtek kepaniteraan, serta perlu dilakukannya pendalaman materi terkait obyek yang sering menjadi sengketa informasi.

7.6.11 Trans Jogja

Trans Jogja sebagai bentuk penyediaan layanan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Perkotaan Yogyakarta. Keberadaan Trans Jogja itu sendiri, didasari karena adanya keluhan terhadap kondisi angkutan perkotaan yang ada pada saat itu, sehingga pada bulan Februari tahun 2008, Trans Jogja mulai dioperasikan dengan konsep dasar layanan "*buy the service*'. Konsep layanan "buy the service" ini dimaksudkan bahwa pemerintah yang akan menanggung segala kerugian yang timbul karena adanya pengoperasian angkutan umum. Pihak operator dibayar oleh pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang telah disepakati dan mereka akan dikenakan denda jika melanggar kesepakatan tersebut.

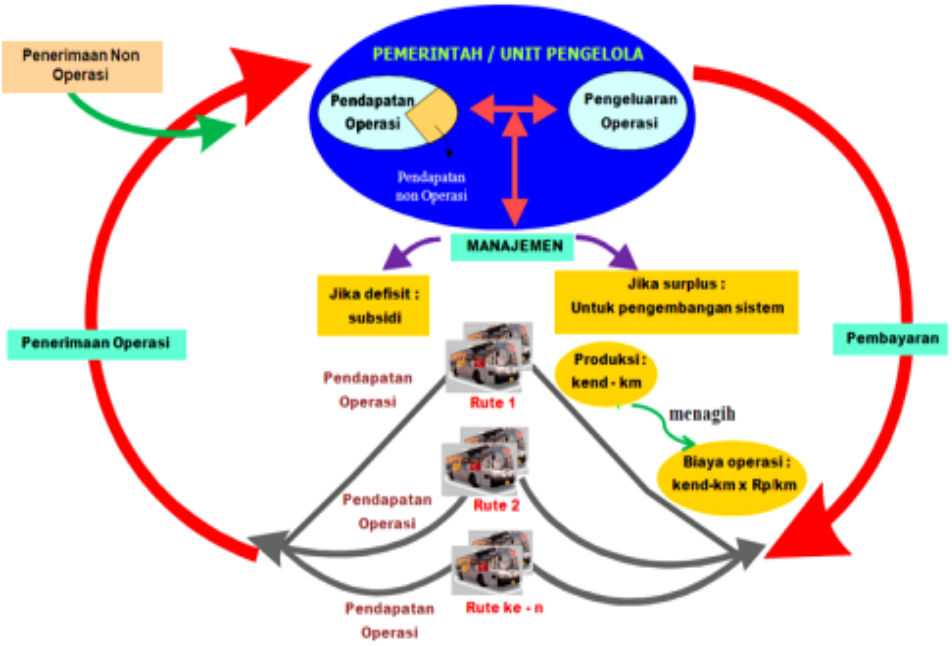

Gambar 7.5 Konsep *Buy The Service*

Keberadaan Trans Jogja dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang di Perkotaan Yogyakarta, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui kemudahan akses dan kemudahan perpindahan orang antar wilayah di Perkotaan Yogyakarta. Keberadaan Trans Jogja juga diharapkan dapat mengurangi problematika lalulintas di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya pemakaian kendaraan bermotor dan kurangnya penggunaan angkutan umum menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan bagi pergerakan lalulintas yang akan berdampak pada timbulnya kemacetan lalulintas.

Nilai unggul yang ditawarkan dalam layanan Trans Jogja adalah:

1. Sistem tiket sudah terintegrasi dengan *e-money* yang ada di beberapa bank pemerintah maupun swasta, antara lain: Mandiri, BNI, BRI dan BCA.
2. Dengan fasilitas *e-money*, tiket Trans Jogja juga sudah terintegrasi dengan Trans Batik Solo dan KA Komuter Prameks.
3. Pada beberapa bus, tersedia fasilitas *bike rack on bus* guna memudahkan pengendara sepeda yang akan menggunakan layanan Trans Jogja.
4. Jam layanan yang dimulai dari jam 05.30 pagi sampai dengan jam 21.30.

Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT), menjadi satu-satunya operator yang menyelenggarakan layanan angkutan umum Trans Jogja. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Perhubungan menjalin kerjasama dengan PT. JTT yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS tersebut mengalami pembaharuan setiap tahunnya. PT. Jogja Tugu Trans sendiri merupakan perusahaan konsorsium (gabungan) yang dibentuk dari kemitraan antara beberapa operator/koperasi angkutan perkotaan yang ada, antara lain: PEMUDA, DAMRI, KOPATA, ASPADA, KOBUTRI dan PUSKOPKAR.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan di RPJMD DIY 2013-2017, dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, jumlah *load factor* Trans Jogja mengalami peningkatan. Demikian juga halnya dengan jumlah pendapatan yang selalu meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2012, karena operasional jalur 4 pada saat itu dihentikan sementara.

Tabel 7.14 Jumlah Load Factor dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2009-2015

No.	TAHUN	RATA-RATA *LOAD FACTOR (%)*	PENDAPATAN (Rp)
1.	2009	21,98	15.359.527.500,00
2.	2010	26,37	17.504.928.000,00
3.	2011	26,96	18.043.004.000,00
4.	2012	29,26	17.407.646.993,80
5.	2013	32,25	18.359.146.684,23
6.	2014	37,82	20.177.264.827,00
7.	2015	39,05	22.852.181.651,91

Sumber: UPT Trans Jogja, DinasPerhubungan DIY, 2016

Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Untuk melaksanakan operasional Trans Jogja dan meningkatkan mutu layanannya, pada tahun 2015 Pemerintah Daerah DIY, dalam hal ini Dinas Perhubungan melalui anggaran APBD Tahun Anggaran 2015, telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum *Buy The Service*
   Kegiatan yang dilakukan berupa pembayaran Biaya Operasional Kendaraan kepada operator dan pembayaran SDM penunjang, berupa tenaga kerja halte dan penjaga malam
2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus Trans Jogja
   Kegiatan yang dilakukan untuk belanja modal pengadaan sarana dan prasarana bus Trans Jogja berupa:
   a) *SMTS On Bus* : 29 unit
   b) Halte *Portable* : 20 unit
   c) Bus Information System : 8 unit
   d) *Monitor Tracking Bus* : 1 unit
   e) Sandaran Sepeda : 12 unit
   f) Pengembangan Halte Trans Jogja : 7 lokasi
3. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum *Buy The Service*
   Kegiatan yang dilakukan berupa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung angkutan Trans Jogja selama tahun 2015.

Pelaksanaan

1. Pada tahun 2015 target pendapatan dari tiket Trans Jogja adalah sebesar Rp21.300.000.000,00 dengan realisasi pendapatan tahun 2015 mencapai Rp22.852.181.651,91 dengan mengangkut 6.347.828 orang. Pengeluaran untuk Biaya Operasional Kendaraan atau BOK adalah sebesar Rp41.636.645.807,00. sehingga nilai subsidi adalah sebesar Rp18.784.464.156,00 atau 45,11% dari total BOK.
2. Operasional Trans Jogja didukung:
   a. Armada bus ukuran sedang sebanyak 74 unit terdiri dari 54 bus milik Operator PT. Jogja Tugu Trans (JTT)dan 20 bus milik PT. AMI (yang merupakan hibah dari Pemda DIY)

b. Fasilitas halte sebanyak 112 unit terdiri dari 36 halte dibangun oleh Pemerintah Kota dan 76 halte dibangun oleh Pemda DIY, tersebar pada 8 jalur 1A/B, 2 A/B, 3 A/B dan 4A/B. dan Halte *Portable* sebanyak 57 halte. Petugas halte sebanyak 740 orang terdiri dari petugas TGA (*Tiketing and Gate Access*) 586 orang dan 154 penjaga malam halte.

c. Sampai dengan Desember 2014 total aset Peralatan dan mesin sebesar Rp10.756.717.772,00 sedangkan Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.734.085.869,00.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Cakupan layanan Trans Jogja sampai dengan saat ini belum menyentuh/ menjangkau seluruh kawasan di Perkotaan Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena dari total 17 rute layanan yang diharapkan dilayani oleh Trans Jogja sesuai dengan PERGUB No. 22 Tahun 2014 baru terlayani 8 rute. Sejak awal mula Trans Jogja dioperasikan pada tahun 2008, penambahan rute layanan, dilakukan pada tahun 2013 dengan menambah 2 rute layanan dari sebelumnya 6 rute layanan sehingga sampai saat ini ada 8 rute layanan. Kurangnya kualitas layanan yang tercermin dari cakupan layanan yang terbatas, dikuatirkan akan menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum akan turun karena angkutan Trans Jogja menjadi tidak *reliable*.
2. *Time Table* Operasional Bus sering tidak terpenuhi atau terlambat akibat lalu lintas yang semakin padat. Hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna bus Trans Jogja karena interval jarak antar bus sekarang menjadi sekitar 10 sampai 20 menit. Hal ini dikarenakan semakin padatnya lalu lintas pada jalur yang dilewati oleh Bus Trans Jogja dan kurangnya jumlah armada Trans Jogja yang melayani tiap jalur.
3. Kondisi bus yang sudah banyak yang tidak layak sehingga sangat mempengaruhi layanan terhadap penumpang yang tidak nyaman di dalam bus seperti AC tidak berfungsi maksimal, pintu bus yang tidak tertutup, kursi penumpang banyak yang rusak.

4. Minat masyarakat untuk menggunakan Trans Jogja dikuatirkan akan menurun, apabila tidak didukung oleh adanya kebijakan manajemen dan rekayasa lalulintas yang mendukung operasional angkutan umum untuk mobilitas orang di Perkotaan Yogyakarta.

b. Solusi

Atas dasar permasalahan di atas, perlu diupayakan solusi alternatif penyelesaian masalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna trans jogja pihak UPTD Trans Jogja di tahun 2016 perlu penambahan sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan layanan trans jogja diantaranya sebagai berikut:
   a. Pengadaan Mesin Aktivasi/ *Top Up* EDC sebanyak 48 unit dimaksudkan bagi pengguna yang selama ini aktivasi kartu hanya di halte POS (7 lokasi) tetapi dengan penambahan mesin tersebut bisa menjadi lebih banyak untuk aktivasi di 48 titik halte.
   b. Printer tiket di bus dan di halte diperuntukkan untuk pengguna yang belum mempunyai kartu diharapkan dengan adanya mesin tersebut bisa membayar dengan uang dan sebagai bukti pembayaran ada hasil print.
   c. Atap pelindung halte *portable* dimaksudkan bagi pengguna yang naik halte *portable* supaya tidak kepanasan dan kehujanan waktu menunggu di halte *portable*.
   d. *Bus Information System* diperuntukkan untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang keberadaan bus di titik mana, informasi masalah trans jogja secara umum dan informasi lainnya.
   e. Pembangunan Halte Design baru dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pengguna difabel untuk naik bus trans jogja dengan akses yang lebih longgar dan nyaman serta memberikan kesempatan kepada pengguna jalan untuk tetap memakai area jalan untuk pejalan kaki.

2. Perlu adanya penambahan operasional jalur layanan Trans Jogja sehingga 17 jalur yang ada sesuai dengan amanat PERGUB no. 22 Tahun 2014 dapat beroperasi untuk melayanai mobiltas orang di Perkotaan Yogyakarta.
3. Perlu penambahan armada pada jalur-jalur layanan yang telah beroperasi, sehingga diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu penumpang di halte. Hal ini sudah akan diwujudkan dengan adanya bus bantuan dari Kementerian Perhubungan Jakarta sebanyak 25 unit bus baru yang saat ini masih dalam proses penyerahan.
4. Penambahan jumlah halte *portable* akan mengurangi waktu tempuh yang ada karena banyaknya waktu henti yang harus dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya integrasi antara moda layanan angkutan yang ada sehingga akan tercipta integrasi sistem layanan angkutan umum yang ideal.
5. Halte permanen yang ada perlu dikelola secara konsep kawasan, sehingga akan menambah *income*/ pendapatan dari non operasional bis (tiket penumpang).

8 Bab Penutup

Sebagai catatan penutup, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun 2015 yang telah dilaksanakan melalui dukungan sejumlah program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah dilaksanakan dan berjalan dengan cukup optimal, melalui proses manajemen pembangunan yang bersifat siklikal, diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Hakekat pembangunan daerah di wilayah DIY merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi dan efektivitas pembangunan dari kinerja elemen: eksekutif, legislatif, masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Efektifitas itu berkorelasi terhadap pencapaian target pembangunan pada tahun 2015, sehingga mendukung pencapaian target pada tahun 2016, yang tentunya berpengaruh pada pencapaian sasaran pembangunan hingga akhir tahun perencanaan. Adanya sejumlah kekurangan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2015, diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk dijadikan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD 2012-2017 sebanyak 17 indikator, capaian kinerja pembangunan tahun 2015 yang mencapai target (capaian $\geq$ 100%) terdapat sebelas indikator. Indikator yang memiliki capaian $\geq$ 100% diantaranya adalah: derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan & pelestarian budaya, angka melek huruf, persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya, angka harapan hidup, jumlah wisatawan (baik wisnus maupun wisman), pendapatan per kapita, nilai

akuntabilitas kinerja pemerintah, opini pemeriksaan BPK, *load factor* angkutan perkotaan, dan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi.

Sedangkan indikator sasaran Pemda DIY yang belum mencapai target sebanyak enam indikator. Secara umum ketidaktercapaian disebabkan adanya perubahan metodologi perhitungan seperti pada indikator rata-rata lama sekolah, ketimpangan pembangunan dari perspektif kewilayahan maupun pendapatan, lama tinggal wisatawan (baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara) yang belum tercapai, dan peningkatan kualitas lingkungan yang belum optimal.

Demikian penyampaian LKPJ Tahun 2015 ini, dengan penuh harapan semoga kinerja pembangunan masa depan senantiasa lebih baik, lebih *gumregah*, dan lebih bermanfaat bagi segenap masyarakat, serta segala daya upaya kita lakukan demi kemajuan Daerah Istimewa Yogyakarta yang senantiasa di ridhoi oleh Allah SWT.

1. Urusan Pendidikan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**3,577,648,165**	**100**	**92.79**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24,500,000	100	99.95	100	100	100	0	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,327,965,140	100	90.34	100	100	100	0	
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	27,000,000	100	75.21	100	100	100	0	Menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan dan terdapat efisiensi karena adanya penghapusan kendaraan roda 4 sebanyak 5 buah
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	159,217,400	100	100	100	100	100	0	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	142,640,400	100	96.57	100	100	100	0	
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	89,710,650	100	99.57	100	100	100	0	
1.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	231,299,525	100	96.00	100	100	100	0	
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15,149,400	100	98.82	100	100	100	0	
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35,445,550	100	99.93	100	100	100	0	
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13,340,000	100	78.28	100	100	100	0	Menyesuaikan tarif berlangganan surat kabar dan majalah
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	93,500,000	100	99.28	100	100	100	0	
1.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	213,000,000	100	99.98	100	100	100	0	
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	204,880,100	100	96.05	100	100	100	0	
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**5,892,463,161**	**100**	**53.36**	**100**	**61.66**	**100**	**-38.34**	
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	532,568,000	100	92.08	100	100	100	0	
2.2	Pengadaan Perlengkap-an Gedung Kantor	590,608,500	100	96.48	100	100	100	0	
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	195,853,000	100	96.51	100	100	100	0	
2.4	Pengadaan Mebeleur	68,373,000	100	99.63	100	100	100	0	
2.5	Pengadaan Tanah	2,657,867,000	100	1.28	100	15		15	Tidak ada kesepakatan harga dengan pemilik tanah sehingga anggaran yang direalisir hanya honorarium. Tim Appraisal menetapkan harga tanah total

1. Urusan Pendidikan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Rp1.477.180.000 (harga per meter disesuaikan dengan letak tanah), sementara warga meminta harga tanah total sebesar Rp2.393.160.000 (dengan harga per meter Rp175.000 ditambah PPN 5% sehingga menjadi Rp183.500
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	20,000,000	100	98.11	100	100	100	0	
2.7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	150,000,000	100	99.67	100	100	100	0	
2.8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	318,035,000	100	99.87	100	100	100	0	
2.9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	79,500,000	100	99.63	100	100	100	0	
2.10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	165,000,000	100	99.43	100	100	100	0	
2.11	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	31,320,000	100	94.23	100	100	100	0	
2.12	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	983,338,661	100	95.89	100	100	100	0	
2.13	Pemeliharaan Arsip Dinas	100,000,000	100	90.32	100	100		100	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**575,582,000**	**100**	**85.53**	**100**	**100**		**100**	
3.1	Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola keuangan	95,000,000	100	55.21	100	100	100	0	Efisiensi sebesar Rp47.730.000 (Akomodasi dan honorarium)
3.2	Pengelolaan dan administrasi aset barang milik daerah	82,582,000	100	97.61	100	100	100	0	
3.3	Workshop Penyusunan dan penataan anggaran berbasis TI	195,000,000	100	87.65	100	100	100	0	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp24.080.000,00
3.4	Bimtek Tata Naskah dan Kearsipan	68,000,000	100	98.70	100	100	100	0	
3.5	Bimtek Administrasi Sekolah Bagi Pengelola Administrasi Keuangan Sekolah	135,000,000	100	89.79	100	100	100	0	Efisiensi anggaran sebesar Rp13.785.000,00
4	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**232,990,000**	**100**	**97.37**	**100**	**100**	**100**	**0**	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	11,000,000	100	100	100	100	100	0	
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	45,000,000	100	91.91	100	100	100	0	

1. Urusan Pendidikan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	145,990,000	100	98.33	100	100	100	0	
4.4	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	31,000,000	100	99.87	100	100	100	0	
5	**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**	**1,537,680,000**	**100**	**68.92**	**100**	**100**	**100**	**0**	
5.1	Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	1,537,680,000	100	68.92	100	100	100	0	Penggunaan gedung pemerintah sesuai SE Gubernur DIY nomor 900/7963 tanggal 28 November 2014 Tentang Pem-batasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor menyebabkan efisiensi biaya sewa tempat kegiatan
6	**PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN**	**20,501,015,000**	**100**	**94.54**	**100**	**100**	**100**	**0**	
6.1	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS / BOSDA) Pendidikan Dasar	734,510,000	100	98.50	100	100	100	0	
6.2	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Galur Kulonprogo	650,000,000	100	95.89	100	100	100	0	
6.3	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wates Kulonprogo	700,000,000	100	93.89	100	100	100	0	
6.4	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Karangmojo Gunungkidul	650,000,000	100	94.81	100	100	100	0	
6.5	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wonosari Gunungkidul	850,000,000	100	95.46	100	100	100	0	
6.6	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba SD	1,897,560,000	100	89.64	100	100	100	0	Penggunaan gedung pemerintah sesuai SE Gubernur DIY nomor 900/7963 tanggal 28 November 2014 Tentang Pem-batasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor menyebabkan efisiensi biaya sewa tempat kegiatan, sewa perlengkapan, dan biaya jasa kebersihan

1. Urusan Pendidikan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
6.7	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMP	1,949,430,000	100	83.72	100	100	100	0	Berdasarkan ketentuan pusat, cabang lomba OSN yang semula 4 diubah menjadi 3 cabang
6.8	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SD	783,190,000	100	78.35	100	100	100	0	Penggunaan gedung pemerintah sesuai SE Gubernur DIY nomor 900/7963 tanggal 28 November 2014 Tentang Pem-batasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor menyebabkan efisiensi biaya sewa tempat kegiatan, sewa perlengkapan, dan biaya jasa kebersihan;
6.9	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMP	2,224,865,000	100	87.43	100	100	100	0	Efisiensi biaya akomodasi (Sewa tempat dan perlengkapan) dan transport
6.10	Perluasan Aksesibilitas Pendidikan Dasar (Pajak Rokok)	9,800,000,000	100	99.98	100	100		100	
6.11	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba Budaya Mutu SD	261,460,000	100	99.20	100	100		100	
7	**PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH**	**40,516,287,000**	**100**	**96.56**	**100**	**100**	**100**	**0**	
7.1	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 2 Wates Kulon Progo	894,900,000	100	94.60	100	100	100	0	
7.2	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 1 Wonosari Gunungkidul	947,860,000	100	79.81	100	100	100	0	Sisa honorarium bedah skl, raker proker, & penyusunan bank soal. Sisa biaya tes psikologi, belanja cetak, konsumsi kegiatan. Sisa honorarium untuk Pembimbing Ekstrakurikuler, Pembimbing PM, dan Tutor Sebaya yang pelaksnaan-nya dilakukan penjadwalan ulang karena : 1) Jadwal ujian maju, 2) bersamaan dengan kegiatan ISO dan Akreditasi sekolah, 3) pembangunan gedung sekolah
7.3	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Pengasih Kulon Progo	1,220,750,000	100	90.57	100	100	100	0	

1. Urusan Pendidikan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
7.4	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Wonosari Gunungkidul	1,194,900,000	100	98.15	100	100	100	0	
7.5	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA	3,402,112,000	100	86.73	100	100	100	0	Terdapat efisiensi sewa Gladi PIR dan menyesuaikan ketentuan dari pusat sehingga terdapat pe-ngurangan jumlah peserta yang dikirim ke pusat
7.6	Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pengiriman Lomba SMK	4,946,100,000	100	95.08	100	100	100	0	
7.7	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	2,285,000,000	100	94.52	100	100	100	0	
7.8	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	1,002,000,000	100	84.26	100	100	100	0	Penginapan tidak terserap sesuai target karena Edaran pemerintah tidak boleh menyeleng-garakan kegiatan di hotel (terdapat sisa belanja sewa penginapan Rp202.500.000 & anggaran untuk sewa mobilitas darat Rp72.000.000)
7.9	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah (Pajak Rokok)*	24,622,665,000	100	99.84	100	100	100	0	
8	**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**	**3,761,200,000**	**100**	**85.17**	**100**	**100**	**100**	**0**	
8.1	Pengembangan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	277,000,000	100	91.83	100	100	100	0	
8.2	Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	240,000,000	100	48.72	100	100	100	0	Adanya kebijakan penggunaan gedung pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan menyebabkan belanja sewa penginapan, sewa ruang pertemuan, & jasa kebersihan tidak dapat terserap maksimal
8.3	Pengembangan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan	2,139,800,000	100	89.61	100	100	100	0	Efiensi sewa akomodasi
8.4	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba Keagamaan	550,000,000	100	94.19	100	100	100	0	
8.5	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PNFI	329,400,000	100	82.17	100	100	100	0	Lomba PNF berprestasi tingkat nasional ditiada-kan oleh pusat

1. Urusan Pendidikan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
8.6	Pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan	225,000,000	100	55.97	100	100	100	0	Efisiensi anggaran sebesar Rp99.062.000,00
9	**PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**	**12,926,820,056**	**100**	**86.12**	**100**	**99.77**	**99.77**	**0**	
9.1	Bantuan Operasional Sekolah	2,452,315,800	100	98.88	100	100	100	0	
9.2	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Yogyakarta	450,000,000	100	97.88	100	100	100	0	
9.3	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Yogyakarta	400,000,000	100	95.78	100	100	100	0	
9.4	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN Pembina	800,000,000	100	97.61	100	100	100	0	
9.5	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Bantul	1,160,000,000	100	95.74	100	100	100	0	
9.6	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Bantul	350,000,000	100	97.91	100	100	100	0	
9.7	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Sleman	300,000,000	100	99.54	100	100	100	0	
9.8	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Gunungkidul	325,000,000	100	87.81	100	100	100	0	Efisiensi belanja bahan pakai habis karena harga di pasaran lebih rendah dari SHBJ, sisa belanja alat musik (stand konga) karena tidak adanya stok di pasaran serta sisa belanja mesin foto copy
9.9	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Kulon Progo	939,900,000	100	92.13	100	100	100	0	
9.10	Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Gunungkidul	150,000,000	100	95.58	100	100	100	0	
9.11	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PK-PLK	2,068,379,256	100	72.86	100	100	100	0	Sisa belanja dokumentasi, penggandaan sesuai dengan kebutuhan, sisa belanja kebersih-an, sisa harga sewa penginapan karena mengguna-kan gedung pemerintah, sisa biaya perjalanan dinas, dan honor tenaga staf di pusat autis belum direalisir karena belum diperoleh personil yang sesuai
9.1	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PK-PLK	1,513,900,000	100	60.69	100	98.00	100	0	Penggunaan gedung pemerintah sesuai SE Gubernur DIY

1. Urusan Pendidikan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2									nomor 900/7963 tanggal 28 November 2014 Tentang Pem-batasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor menyebabkan efisiensi biaya sewa tempat kegiatan, sewa perlengkap-an, & biaya jasa ke-bersihan. Kegiatan bimtek reproduksi dan Forum Yayas-an dilaksanakan September karena menyesuaikan ketersediaan tempat & peserta kegiatan; Kegiatan diklat Bahasa Inggris tidak bisa dilaksanakan karena memerlu-kan instruktur/ narasumber khusus (antara lain yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat atau metode/ teknik khusus untuk meningkat-kan kemampuan guru melaksana-kan pembelajaran bagi siswa SLB)
9.13	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	1,555,325,000	100	75.17	100	100	100	0	Sesuai Juknis dari Pusat ada pengurangan jumlah cabang lomba (FLSSN dari 12 menjadi 9 dan SOINA dari 7 menjadi 5) menyebabkan pengurangan jumlah peserta yang dikirim ke tingkat nasional; dan pelaksanaan OSN di DIY sehingga belanja perjalanan dinas luar daerah tidak direalisasikan.
9.14	Penyediaan Beasiswa PK-PLK	462,000,000	100	99.89	100	100	100	0	
10	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA**	**210,000,000**	**100**	**98.03**	**100**	**100**	**100**	**0**	
10.1	Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	210,000,000	100	98.03	100	100	100	0	
11	**PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN**	**19,599,447,000**	**100**	**87.09**	**100**	**100**	**100**	**0**	

1. Urusan Pendidikan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
11.1	Penyelenggaraan Siaran Pendidikan Berbasis Budaya di Media Elektronik	550,000,000	100	96.19	100	100	100	0	
11.2	Pengembangan Minat Jurnalistik Siswa	646,975,000	100	58.34	100	100	100	0	Terdapat sisa lelang majalah dan tabloid, penggandaan, dan sisa honor untuk penulisan artikel menyesuaikan dengan jumlah artikel yang berhasil lolos dari proses pengeditan
11.3	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/ Madrasah	1,495,500,000	100	63.91	100	100	100	0	Sisa anggaran honorarium dan akomodasi
11.4	Penyelenggaraan Ujian	2,539,360,000	100	74.90	100	100	100	0	Sisa sewa penginapan Rp47.800.000; sisa cetak Lembar jawab Rp95.938.750; Sisa cetak ijazah Rp17.200.250; Penggandaan soal sisa Rp109.740.600
11.5	Penjaminan Mutu Sekolah	130,000,000	100	90.61	100	100	100	0	
11.6	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,437,800,000	100	98.62	100	100	100	0	
11.7	Penyelenggaraan OSN Tingkat Nasional	3,748,420,000	100	89.27	100	100		100	Teradapt efisiensi anggaran
11.8	Pengelolaan Data dan Informasi bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1,298,845,000	100	86.47	100	100	100	0	Perubahan software aplikasi yang digunakan
11.9	Apresiasi Prestasi dan Kreatifitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,146,700,000	100	99.27	100	100	100	0	
11.	Penguatan Kelembagaan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	60,000,000	100	50.35	100	100	100	0	Penggunaan anggaran operasional menyesuaikan apabila ada perubahan penerima hibah/bansos; Sesuai dengan UU no. 23 Tahun 2014 & Surat Edaran Mendagri Nomor 900/ 4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka jumlah lembaga penerima hibah/ bantuan sosial berkurang sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu

1. Urusan Pendidikan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
10									keharusan bagi lembaga penerima hibah/bantuan sosial untuk memiliki badan hukum.
11.11	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,378,271,000	100	74.94	100	100		100	Kegiatan bimtek karya tulis ilmiah dan penilaian kinerja guru diselenggarakan tanpa menginap sehingga anggaran penginapan tidak direalisasikan
11.12	Profesor Goes to School	167,576,000	100	92.10	100	100		100	
12	**PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI**	**4,462,800,000**	**100**	**93.24**	**100**	**100**		**100**	
12.1	Promosi Pendidikan DIY	1,890,000,000	100	88.81	100	100	100	0	Efisiensi biaya perjalanan dinas, sisa honor peserta dan kegiatan sosialisasi (APTISI tidak melakukan sosialisasi), dan sisa kegiatan koordinasi
12.2	Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa	2,122,800,000	100	96.97	100	100	100	0	
12.3	Pemberdayaan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Provinsi se Indonesia di Yogyakarta	450,000,000	100	94.22	100	100	100	0	
13	**PROGRAM AKSELERASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TERKEMUKA**	**300,000,000**	**100**	**99.62**	**100**	**100**	**100**	**0**	
13.1	Pengembangan TI Bagi Guru dan TU	300,000,000	100	99.62	100	100	100	0	
14	**PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA**	**8,020,560,000**	**100**	**89.41**	**100**	**99.83**	**100**	**-0.17**	
14.1	Pembinaan dan Penyelenggaran Duta Seni Pelajar Se-Jawa Bali dan Lampung	600,000,000	100	97.63	100	100	100	0	
14.2	Pembinaan, Pencegah-an Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa, mahasiswa dan pendidik	276,640,000	100	81.38	100	100	100	0	Terdapat sisa anggaran
14.3	Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (AKSENIBUDYO)	6,643,920,000	100	88.61	100	99.80		99,80	Pembangunan gedung AK tidak sampai finishing Terdapat sisa honor pengajar, pengadaan sarana dan prasarana akademis serta pengadaan konstruksi
14.4	Penguatan dan pembinaan Pendidikan Karakter Bagi Siswa	500,000,000	100	94.65	100	100		100	

1. Urusan Pendidikan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
15	**PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGULAN MUTU PENDIDIKAN**	**1,497,500,000**	**100**	**94.32**	**100**	**100**	**100**	**0**	
15.1	Penyusunan dan Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan	500,000,000	100	99.40	100	100	100	0	
15.2	Rintisan PKBM dan PAUD Unggulan	217,500,000	100	73.08	100	100		100	Terdapat sisa honorarium bimtek, efisiensi akomodasi (sewa ruang, kebersihan, dan mobiltas)
15.3	Pembinaan Kesiswaan	500,000,000	100	97.39	100	100		100	
15.4	Pengembangan Sekolah Sejahtera	280,000,000	100	96.27	100	100		100	
16	**PROGRAM SINERGITAS PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN**	**1,370,400,000**	**100**	**89.91**	**100**	**100**	**100**	**0**	
16.1	Penelitian dan Pembangunan Pendidikan	175,000,000	100	56.77	100	100	100	0	Sisa honor tenaga operator komputer yang bertugas untuk entry yang terealisasi 3 bulan karena data yang baru masuk pada bulan September 2015
16.2	Peningkatan Kualitas LPM Bidang Kewirausahaan dan SIBERTIMAS	170,400,000	100	98.30	100	100	100	0	
16.3	Pengembangan Kewirausahaan SMK	350,000,000	100	99.07	100	100	100	0	
16.4	Penyelenggaran LITM dan OSAINTEK	675,000,000	100	91.62	100	100	100	0	
		124,982,392,382	**100**	**90**	**100**	**98.32**	**99.5**		

Sumber: Disdikpora DIY, 2016

2. Urusan Kesehatan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Belanja Pegawai	**26.070.272.008**	**100**	**98,91**	**100**	**100**	**100**	**-**	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.875.000	100	99,46	100	100	100	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.148.700.000	100	71,53	100	100	100	-	Menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	25.000.000	100	94,86	100	100	100	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	18.684.500	100	79,60	100	100	100	-	Menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	128.364.000	100	99,27	100	100	100	-	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	567.428.450	100	97,62	100	100	100	-	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	38.500.000	100	77,80	100	100	100	-	Menyesuaikan kebutuhan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.070.000	100	91,92	100	100	100	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	128.764.225	100	93,92	100	100	99,39	0,61	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.106.000	100	92,27	100	100	97,81	2,19	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.019.700	100	95,24	100	100	98,81	1,19	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.774.000	100	80,47	100	100	100	-	
	Penyediaan bahan logistik kantor	114.674.500	100	71,22	100	100	100	-	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	544.140.000	100	83,61	100	100	100	-	Menyesuaikan kebutuhan yang ada
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	323.259.000	100	65,81	100	100	100	-	Menyesuaikan kebutuhan (perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan undangan pusat)
	Penyediaan Jasa Keamanan kantor/ gedung/ tempat kerja	718.349.500	100	92,44	100	100	100	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	2.393.652.600	100	87,77	100	100	100	-	Menyesuaikan jumlah pasien
	Jumlah	**6.371.361.475**	**100**	**84,94**	**100**	**100**	**99,94**	0,06	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	187.460.000	100	97,51	100	100	100	-	
	Pengadaan Perlengkap-an Gedung Kantor	262.888.055	100	90,36	100	100	100	-	

2. Urusan Kesehatan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	327.720.000	100	96,46	100	100	100	-	Menyesuaikan kebutuhan yang ada
	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	434.032.000	100	77,79	100	100	100	-	Menyesuaikan kebutuhan yang ada
	Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	98.000.000	100	89,17	100	100	100	-	Menyesuaikan kebutuhan yang ada
	Pemeliharaan rutin/berkala Mabelair	7.985.000	100	99,37	100	100	100	-	
	Jumlah	**1.318.085.055**	**100**	**88,72**	**100**	**100**	**100**	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	217.700.000	100	80,55	100	100	100	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.600.000	100	100,00	100	100	100	-	
	Pembinaan, Pengem-bangan dan Penilaian Angka Kredit Jabfung	36.849.000	100	98,17	100	100	100	-	
	Penyusunan Digital Performance Services (DGS)	325.372.450	100	95,85	100	100	100	-	
	Pengembangan ISO	190.037.500	100	84,28	100	100	100	-	
	Pengembangan data dan Informasi	45.070.000	100	100,0	100	100	100	-	
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	113.205.000	100	100,0	100	100	100	-	
	Pengembangan Mutu Manajemen Penelitian Kesehatan	196.799.850	100	72,11	100	100	100	-	
	Penyusunan Pedoman Pelaporan Program Kesehatan	32.010.000	100	100,00	100	100	100	-	
	Seleksi Tenaga Kesehatan Berprestasi	155.800.000	100	93,24	100	100	100	-	
	Jumlah	**1.325.443.800**	**100**	**88,55**	**100**	**99,67**	**100**	-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.185.000	100	73,76	100	100	100	-	
	Penyusunan Pengem-bangan Perencanaan Program	60.153.000	100	99,14	100	100	100	-	
	Pengendalian, Monitoring & Evaluasi Program/ Kegiatan	13.493.250	100	99,90	100	100	100	-	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	70.898.000	100	95,98	100	100	100	-	
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	13.778.400	100	99,54	100	100	100	-	
	Jumlah	**167.507.650**	**100**	**96,51**	**100**	**100**	**100**	-	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								

2. Urusan Kesehatan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Pajak Rokok)	1.203.344.500	100	89,82	100	100	100	-	
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	261.054.000	100	95,13	100	100	100	-	
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pajak Rokok)	2.461.065.158	100	92,32	100	100	-	-	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (U K B M) (Pajak Rokok)	290.264.000	100	83,90	100	100	100	-	
	Pengembangan Media Promosi Kesehatan	427.995.000	100	88,91	100	100	100	-	
	Jumlah	**4.643.722.658**	**100**	**90,99**	**100**	**100**	**100**	-	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat								
	Penyusunan Peta Informasi Masy Kurang Gizi	992.997.000	100	96,76	100	100	100	-	
	Jumlah	**992.997.000**	**100**	**96,76**	**100**	**100**	**100**	-	
	Program Pengembang-an Lingkungan Sehat								
	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	824.979.000	100	96,81	100	100	100	-	
	Jumlah	**824.979.000**	**100**	**96,81**	**100**	**100**	**100**	-	
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/ RSJ/ RS paru-paru/ RS mata								
	Pengadaan Alat-alat kesehatan RS di BP4 (Dana Cukai Tembakau)	6.591.339.611	100	91,88	100	100	100	-	Sisa lelang
	Pengadaan Obat-obatan RS	1.563.100.000	100	95,55	100	100	100	-	
	Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	140.00.000	100	94,27	100	100	100	-	
	Pengadaan Perlengkap-an Rumah Tangga RS (dapur ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	150.00.000	100	95,25	100	100	100	-	
	Pengadaan Bahan-bahan Logistik RS (Dana Cukai Tembakau)	266.420.000	100	23,62	100	100	100	-	Menyesuaikan jumlah pasien
	Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat RS	120.000.000	100	98,37	100	100	100	-	
	Pengadaan Reagen/ Bahan Kimia (Dana Cukai Tembakau)	750.000.000	100	96,19	100	100	100	-	
	Pengadaan Reagen/Bahan Kimia	1.113.990.000	100	98,03	100	100	100	-	
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	787.535.000	100	95,31	100	100	100	-	
	Pengembangan RSKP Respira (Pajak Rokok)	10.962.889.000	100	41,23	100	70,00	100	(30)	Tidak terbelinya tanah

2. Urusan Kesehatan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Pengembangan Balai Laboratorium Kesehatan	4.542.161.355	100	97,62	100	100	100	-	
	Jumlah	**26.987.434.966**	**100**	**72,34**	**100**	**87,81**	**100**	(12,19)	
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/ RSJ/ RS Paru-Paru/ RS Mata								
	Pemeliharaan rutin/berkala RS	322.334.000	100	83,56	100	100	100	-	Menyesuaikan kebutuhan
	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS	110.500.000	100	71,07	100	100	100	-	Menyesuaikan kebutuhan
	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kesehatan RS	60.000.000	100	69,13	100	100	100	-	Menyesuaikan kebutuhan
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan RS	60.000.000	100	60,11	100	100	100	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala Hewan percobaan	27.600.000	100	99,80	100	100	100	-	
	Jumlah	**580.434.000**	**100**	**78,04**	**100**	**100**	**100**	-	
	Program Sediaan Farmasi Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan								
	Peningkatan Mutu Penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	393.974.400	100	97,08	100	100	100	-	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	148.498.600	100	93,51	100	100	100	-	
	Jumlah	**542.473.000**	**100**	**96,10**	**100**	**100**	**100**	-	
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan								
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan (Pajak Rokok)	13.240.542.711	100	93,31	100	100	100	-	
	Upaya Kesehatan Dasar	35.785.000	100	80,42	100	100	100	-	Efisiensi biaya
	Upaya Kesehatan Rujukan	194.008.950	100	82,63	100	100	100	-	Tidak terserap pada supervisi BPRS di RS
	Upaya Kesehatan Khusus	202.825.500	100	92,67	100	100	100	-	
	Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan	145.059.600	100	94,16	100	100	100	-	
	Jumlah	**13.818.221.761**	**100**	**93,13**	**100**	**100**	**100**	-	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapel Jamkessos								
	Pelayanan Kesehatan pada BLUD	71.219.243.754	100	65,66	100	100	84,53	15,47	Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan
	Jumlah	**71.219.243.754**	**100**	**65,66**	**100**	**100**	**84,53**	15,47	

2. Urusan Kesehatan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Program Pembinaan Kesehatan Lansia								
	Peningkatan dan pengembangan Kesehatan Lansia	271.858.000	100	97,84	100	100	100	-	
	Jumlah	**271.858.000**	**100**	**97,84**	**100**	**100**	**100**	**-**	
	Program Pembinaan Kesehatan Ibu								
	Peningkatan dan pengembangan Kesehatan Ibu	173.506.900	100	94,13	100	100	100	-	
	Jumlah	**173.506.900**	**100**	**94,13**	**100**	**100**	**100**	**-**	
	Program Pembinaan Kesehatan Anak								
	Peningkatan dan pengembangan Kesehatan Anak	181.475.000	100	97,32	100	100	100	-	
	Jumlah	**181.475.000**	**100**	**97,32**	**100**	**100**	**100**	**-**	
	Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita								
	Peningkatan & pengem-bangan Kesehatan Bayi dan Balita	123.762.700	100	95,81	100	100	100	-	
	Jumlah	**123.762.700**	**100**	**95,81**	**100**	**100**	**100**	**-**	
	Program Pembiayaan Kesehatan								
	Pengembangan Sistem Pembiayaan	734.330.000	100	97,80	100	100	100	-	
	Jumlah	**734.330.000**	**100**	**97,80**	**100**	**100**	**100**	**-**	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit								
	Peningkatan Imunisasi	**272.304.500**	**100**	**99,47**	100	100	100	-	
	Penguatan Pelaksana-an Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	17.349.500	100	99,83	100	100	100	-	
	SKD dan Penanggulangan KLB	163.124.600	100	96,95	100	100	100	-	
	Surveilans PD3I	25.069.400	100	95,00	100	100	100	-	Tidak terbelinya serum diphteri
	Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue	238.597.950	100	66,24	100	100	81,10	-	Efisiensi biaya bahan bakar
	Pengendalian Penyakit Malaria	173.409.850	100	94,67	100	100	100	-	
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV AIDS	540.535.000	100	93,05	100	97,14	97,14	-	
	Pengendalian Penyakit TB	389.431.000	100	90,23	100	100	100	-	
	Pengendalian Penyakit Zoonosis	317.650.000	100	78,91	100	100	100	-	Tidak terbeli serum rabies karena kosong nasional
	Pengendalian Penyakit Kanker	267.072.400	100	80,93	100	100	100	-	
	Penanggulangan penyakit jantung dan Pembuluh Darah (PJPD)	265.622.500	100	90,40	100	100	100	-	
	Penanggulangan Penyakit Metabolik	249.421.900	100	39,28	100	90,0	100	(10%)	Gagal seleksi sederhana karena tidak ada

2. Urusan Kesehatan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014 (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Jumlah	**2.919.588.600**	**100**	**87,30**	**100**	**97,08**	**97,08**	-	penawar
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapelkes								
	Pelayanan Kesehatan pada BLUD	8.631.593.345	100	89,97	100	100	100	-	
	Jumlah	**8.631.593.345**	**100**	**89,97**	**100**	**100**	**100**	-	
	Total Belanja Langsung Dinas Kesehatan DIY	**141.828.018.664**	**100**	**71.81**	**100**	**96.14**	**90,48**		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS Jiwa Grhasia DIY								
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan	43.109.316.698	100	96.56	100	100	94.36	5.64	
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan DAK	1.953.597.000	100	94.50	100	100			
	Jumlah	**45.062.913.698**	**100**	**96.42**	**100**	**100**	**94.36**	**5.64**	

Sumber: Dinkes DIY dan RS Ghrasia DIY, 2016

3. Urusan Lingkungan Hidup

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	Program Pengembang-an Kinerja Pengelolaan Persampahan	531.192.000	100	86,11	100	100	100	0	Efisiensi
	• Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelola-an Persampahan	531.192.000	100	86,11	100	100	100	0	Efisiensi
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	4.197.295.025	100	93,24	100	100	100	0	
	1) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	89.472.900	100	98,34	100	100	100	0	
	2) Pengkajian Dampak Lingkungan	141.025.000	100	97,79	100	100	100	0	
	3) Pembinaan Teknis Pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan DPL	50.850.000	100	92,10	100	100	100	0	
	4) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	84.782.000	100	71,00	100	100	100	0	Efisiensi: Semua kasus yang diadukan telah ditindaklanjuti.
	5) Penyusunan SPM Bidang LH	45.424.975	100	92,78	100	100	100	0	
	6) Peningkatan Kepedulian LH	752.541.900	100	96,81	100	100	100	0	
	7) Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH	601.892.000	100	96,05	100	100	100	0	
	8) Pengendalian Pencemaran Udara	349.785.000	100	93,74	100	100	100	0	
	9) Pengembangan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	478.133.000	100	97,99	100	100	100	0	
	10) Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan B3	1.603.388.250	100	89,51	100	100	100	0	Efisiensi
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.981.689.500	100	92,93	100	100	100	0	
	1) Konservasi Sumber Daya Air & Keanekaragam-an Hayati	1.839.292.500	100	95,73	100	100	100	0	
	2) Pengendalian Kerusakan Lingkungan	2.142.397.000	100	90,53	100	100	100	0	
4	Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	851.426.875	100	97,70	100	100	100	0	

3. Urusan Lingkungan Hidup

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	1) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	332.702.375	100	98,94	100	100	100	0	
	2) Pengembangan Data dan Infor-masi Lingkungan	518.724.500	100	96,91	100	100	100	0	
4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	608.548.950	100	83,99	100	100	100	0	Efisiensi
	1) Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	531.369.000	100	84,88	100	100	100	0	Efisiensi
	2) Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat & Limbah Cair	77.179.950	100	77,88	100	100	100	0	Efisiensi
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	887.240.000	100	73,22	100	100	100	0	Efisiensi
	1) Penataan RTH	887.240.000	100	73,22	100	100	100	0	Efisiensi

Sumber: BLH DIY, 2016

4. Urusan Pekerjaan Umum

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	**5.333.947.000**	100	94,88					
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	4.986.954.000	100	95,64	100	100	100	100	
2	Perencanaan Penanganan Genangan	346.993.000	100	83,91	100	100	100	100	Sisa Pengada-an/ Lelang
	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	**59.224.128.885**	100	96,55					
3	Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan (D A K)	1.714.646.885	100	95,18	100	100	100	100	
4	Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan dan Jembatan	46.781.712.975	100	96,35	100	100	100	100	
5	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	10.727.769.025	100	97,64	100	100	100	100	
	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	**578.224.800**	100	96,93					
6	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	578.224.800	100	96,93	100	100	100	100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	**31.911.245.413**	100	91,58					
7	Rehabilitasi/ Pemeliharaa-an Jaringan Irigasi (DAK)	10.909.882.640	100	88,81	100	100	100	100	Sisa Pengada-an/ Lelang
8	Peningkatan Pengelola-an Sumber Daya Air Wilayah Sungai & Penge-lolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – Loan	2.210.000.000	100	94,76	100	100	100	100	
9	Peningkatan Pengelola-an Sumber Daya Air Wilayah Sungai & Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	230.000.000	100	91,73	100	100	100	100	
10	Perencanaan Pengem-bangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi	1.628.200.000	100	95,25	100	100	100	100	
11	Pengembangan Jaringan Irigasi	6.428.250.000	100	86,02	100	100	100	100	Sisa Pengada-an/ Lelang
12	Pengelolaan Jaringan Irigasi	7.696.120.000	100	96,13	100	100	100	100	
13	Pengembangan Jaringan Irigasi (DAK)	2.808.792.773	100	97,99	100	100	100	100	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	**30.180.980.000**	100	94,09					
14	Perencanaan Penyedia-an & Pengelolaan Air Baku	1.148.000.000	100	94,15	100	100	100	100	
15	Penyediaan Air Baku	24.233.620.000	100	94,16	100	100	100	100	
16	Pengelolaan Air Baku	4.799.360.000	100	93,77	100	100	100	100	

4. Urusan Pekerjaan Umum

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	**1.200.000.000**	100	98,41					
17	Pengelolaan Sarana & Prasarana Konservasi Air	1.200.000.000	100	98,41					
	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	**3.182.220.000**	100	89,35					
18	Rehabilitasi & Pemeli-haraan Bantaran & Tanggul Sungai	3.182.220.000	100	89,35	100	100	100	100	Sisa Pengada-an/ Lelang
	PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN	**3.587.600.000**	100	93,08					
19	Pelayanan & Pengem-bangan Kualitas Kontruksi	3.587.600.000	100	93,08	100	100	100	100	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**13.692.829.400**	100	95,81					
20	Pengembangan Sarana & Prasarana Persampahan	3.994.450.000	100	95,28	100	100	100	100	
21	Pengelolaan Sarana & Prasarana Persampahan	6.259.442.400	100	95,85	100	100	100	100	
22	Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional (Sharing Kabupaten/Kota)	3.438.937.000	100	96,34	100	100	100	100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN	**3.332.998.000**	100	97,55					
23	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	2.836.000.000	100	99,46	100	100	100	100	
24	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan	496.998.000	100	86,62	100	100	100	100	Sisa Pengada-an/ Lelang
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	**5.005.550.000**	100	85,88					
25	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	5.005.550.000	100	85,88	100	100	100	100	Sisa Pengada-an/ Lelang
	PROGRAM PEMBANGUNAN & PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG & LINGKUNGAN	**147.597.000**	100	97,59					
26	Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah	147.597.000	100	97,59	100	100	100	100	
	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	**81.355.109.000**	100	97,99					
27	Peningkatan Jalan (DAK)	16.093.679.000	100	96,32	100	100	100	100	
28	Perencanaan Pening-katan Jalan&Jembatan	640.550.000	100	88,50	100	100	100	100	Sisa Pengada-an/ Lelang

4. Urusan Pekerjaan Umum

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
29	Peningkatan Jalan dan Jembatan	64.620.880.000	100	98,50	100	100	100	100	
	PROGRAM PENGKAJI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PEKERJAAN UMUM	**894.395.000**	100	98,85					
30	Informasi dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum	297.120.000	100	97,89	100	100	100	100	
31	Pelayanan Klinik Kontruksi	597.275.000	100	99,33	100	100	100	100	
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR	**8.600.000.000**	100	54,95					
32	Pengadaan Tanah Untuk Jalan dan Jembatan	5.000.000.000	100	35,48	100	43,33	83,51	51,80	Realisasi fisik < 100% karena pembebasan tanah di selok-an mataran terdapat 1 persil tidak dapat dibebas-kan karena sedang dalam proses hukum (sengketa), proses pembe-basan tahan ruas jalan imogiri sebagi-an tidak dapat dilaksanakan karena proses penerbitan IPL lanjutan belum selesai hingga akhir tahun anggaran yang menye-babkan serapan anggaran tidak optimal
33	Pengadaan Tanah Untuk Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan	3.600.000.000	100	82,00	100	45,93	-	-	Realisasi fisik < 100% karena Pembebasan tanah di 1 lokasi untuk reservoar air sistem Kertomantul tidak dapat dilaksanakan karena peru-bahan DED sehingga serap-an anggaran tidak optimal

4. Urusan Pekerjaan Umum

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM	**21.447.055.000**	100	84,43					
34	Perencanaan Pengelolaan SPAM	396.990.000	100	87,17	100	100	100	100	Sisa Pengada-an/ Lelang
35	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	21.050.065.000	100	84,38	100	100	100	100	Sisa Pengada-an/ Lelang
	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH	**10.510.015.000**	100	89,77					Sisa Pengada-an/ Lelang
35	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	6.171.280.000	100	85,52	100	100	100	100	Sisa Pengada-an/ Lelang
37	Pemantauan Kualitas Air dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah	992.400.000	100	96,40	100	100	100	100	
38	Pengelolaan Sarana & Prasarana Air Limbah	3.346.335.000	100	95,64	100	100	100	100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN, MINAPOLITAN DAN DESA POTENSI	**3.986.660.000**	100	82,53					
39	Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan	3.986.660.000	100	82,53	100	100	100	100	Sisa Pengada-an/ Lelang
	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	**948.310.000**	100	93,13					
40	Pengawasan Jasa Konstruksi	148.360.000	100	98,87	100	100	100	100	
41	Pengelolaan Database Jasa Konstruksi	799.950.000	100	92,06	100	100	100	100	
	J U M L A H	**285.118.864.498**	**100**	**93,17**	**100**	**97,23**	**99,81**	**97,41**	

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2016

5. Urusan Penataan Ruang

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	**390.643.000**							
1	Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang	390.643.000	100	89,19	100	100	100	100	Realisasi anggaran sesuai kebutuhan
	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	**398.500.000**							
2	Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang	199.200.000	100	99,96	100	100	100	100	
3	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	199.300.000	100	98,15	100	100	100	100	
	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	**300.913.000**							
4	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	219.639.000	100	90,59	100	100	100	100	
5	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	81.274.000	100	95,56	100	100	100	100	
	JUMLAH	**1.090.056.000**	100	93,55	100	100	100	100	

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2016

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
			PROGRAM PENDUKUNG						
I	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1,508,945,200**	**100**	**77.11**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,500,000	100	85.88	100	100	100	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	386,000,000	100	85.94	100	100	100	0	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12,400,000	100	84.16	100	100	100	0	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	34,321,900	100	96.94	100	100	100	0	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	65,689,200	100	99.71	100	100	100	0	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	46,878,100	100	99.98	100	100	100	0	
7	Penyediaan Barang Cetakan&Penggandaan	35,000,000	100	99.89	100	100	100	0	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9,700,000	100	99.97	100	100	100	0	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000	100	99.93	100	100	100	0	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11,200,000	100	93.96	100	100	100	0	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	72,600,000	100	69.35	100	100	100	0	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	754,656,000	100	68.54	100	100	100	0	
13	Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	60,000,000	100	56.72	100	100	100	0	
II	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**1,356,615,000**	**100**	**90.47**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	592,105,000	100	97.92	100	100	100	0	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	190,000,000	100	87.19	100	100	100	0	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	150,000,000	100	94.03	100	100	100	0	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	70,870,000	100	97.49	100	100	100	0	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	250,000,000	100	68.65	100	100	100	0	
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	55,240,000	100	95.19	100	100	100	0	
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	48,400,000	100	98.14	100	100	100	0	

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
III	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**318,180,000**	**100**	**82.59**	**100**	**98.64**	**100**	**-1.36**	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	70,600,000	100	68.6	100	93.88	100	-6.12	
2	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	72,580,000	100	89.33	100	100	100	0	
3	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	175,000,000	100	85.44	100	100	100	0	
IV	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**492,085,950**	**100**	**94.69**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	8,426,400	100	100	100	100	100	0	
2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	22,287,850	100	98.89	100	100	100	0	
3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	436,575,000	100	94.21	100	100	100	0	
4	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	24,796,700	100	97.58	100	100	100	0	
	PROGRAM PERENCANAAN								
V	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**2,192,018,000**	**100**	**89.44**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Penyusunan Rancangan RKPD	1,199,410,000	100	96.92	100	100	100	0	
2	Penyusunan KUA DAN PPAS	369,295,000	100	95.95	100	100	100	0	
3	Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan	461,723,000	100	63.01	100	100	100	0	
4	Review RPJMD	161,590,000	100	94.63	100	100	100	0	
VI	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**	**1,811,621,400**	**100**	**91.03**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan	676,010,600	100	94.81	100	100	100	0	
2	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha	807,608,800	100	88.97	100	100	100	0	
3	Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan	199,187,000	100	88.82	100	100	100	0	
4	Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha	128,815,000	100	87.52	100	100	100	0	
VII	**PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA**	**1,304,055,700**	**100**	**89.21**	**100**	**100**	**100**	**0**	

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	Perencanaan Pem-bangunan Sub Bidang Pengembangan SDM	356,350,000	100	93.62	100	100	100	0	
2	Perencanaan Pem-bangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra	301,496,000	100	88.41	100	100	100	0	
3	Koordinasi & Singkroni-sasi Sub Bidang Pengembangan SDM	150,505,000	100	78.11	100	100	100	0	
4	Koordinasi & Singkroni-sasi Sub Bidang Pengembangan Kesra	495,704,700	100	89.89	100	100	100	0	
VIII	**PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA**	**1,724,598,200**	**100**	**92.5**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman & ESDM	556,517,500	100	94.54	100	100	100	0	
2	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	368,240,000	100	90.89	100	100	100	0	
3	Koordinasi & Sinkroni-sasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, & ESDM	487,217,200	100	92.64	100	100	100	0	
4	Koordinasi & Sinkroni-sasi Sub Bidang Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	98,040,000	100	91.7	100	100	100	0	
5	Peningkatan Pengelola-an Sumber Daya Air Wilayah Sungai & Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – Loan	96,248,000	100	79.99	100	100	100	0	
6	Peningkatan Pengelola-an Sumber Daya Air Wilayah Sungai & Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	118,335,500	100	98.19	100	100	100	0	
IX	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN**	**1,668,143,600**	100	**93.85**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik	384,050,000	100	94.97	100	100	100	0	
2	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	593,776,000	100	96.1	100	100	100	0	

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
3	Koordinasi & Sinkroni-sasi Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik	516,280,000	100	91.92	100	100	100	0	
4	Koordinasi & Sinkroni-sasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	174,037,600	100	89.45	100	100	100	0	
X	**PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**2,010,844,550**	**100**	**98.39**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	656,639,900	100	97.53	100	100	100	0	
2	Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	524,995,000	100	98.75	100	100	100	0	
3	Pengendalian Pembangunan Daerah	829,209,650	100	98.85	100	100	100	0	
	Jumlah	**14,387,107,600**	**100**	**98.74**	100	**99.97**	**100**		

Sumber: BAPPEDA DIY, 2016

7. Urusan Perumahan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**Program Pengembangan Perumahan**								
	Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan	592.980.000	100	95,58	100	100	100	100	Sisa Lelang
	Koordinasi Penyeleng-garaan Pengembangan Perumahan	170.800.000	100	57,47	100	100	100	100	Menyesuaikan SBU
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	4.000.000.000	100	96,19	100	100	100	100	Sisa Lelang
2	**Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan**								
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	2.500.000.000	100	93,10	100	100	100	100	Sisa Lelang
	Koordinasi Pengawas-an & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan tentang Pembangunan Perumahan	38.905.000	100	53,84	100	100	100	100	Menyesuaikan SBU
3	**Program Pengurangan Kawasan Kumuh**								
	Peningkatan Kualitas Prasaranan, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan	4.453.250.000	100	89,60	100	100	100	100	Sisa Lelang

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2016

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**2,156,666,700**	**100**	**83.76**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	100	99.4	100	100	100	0	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	404,300,000	100	80.01	100	100	100	0	Jasa internet sebesar Rp4.800.000 tidak diserap karena sudah dibiayai Pemda dan Efisiensi sebesar Rp.80.800.175
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,000,000	100	41.04	100	100	100	0	Dana untuk perpanjangan kendaraan roda 2 (2 unit) tidak bisa diserap karena sudah didanai Dinas Dikpora (Induk) dan efisiensi sebesar Rp.1.768.700
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	36,968,800	100	99	100	100	100	0	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	978,239,000	100	78.66	100	100	100	0	Efisiensi sebesar Rp208.712.544 (sisa lelang & sisa anggaran)
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,000,000	100	99.85	100	100	100	0	
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,631,200	100	99.99	100	100	100	0	
1.8	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	22,000,000	100	99.91	100	100	100	0	
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	22,000,000	100	99.39	100	100	100	0	
1.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000	100	99.77	100	100	100	0	
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,999,200	100	100	100	100	100	0	
1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	13,992,000	100	99.92	100	100	100	0	
1.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	37,000,000	100	99.98	100	100	100	0	
1.14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	591,036,500	100	90.14	100	100	100	0	
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**997,200,000**	**100**	**95.18**	**100**	**100**	**100**	**0**	
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	221,200,000	100	97	100	100	100	0	

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2.2	Pengadaan Perlengkap-an Gedung Kantor	225,000,000	100	94.15	100	100	100	0	
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	225,000,000	100	98.52	100	100	100	0	
2.4	Pengadaan Mebeleur	150,000,000	100	85.15	100	100	100	0	Efisiensi sebesar Rp22.262.400
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	90,000,000	100	97.88	100	100	100	0	
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	30,000,000	100	99.62	100	100	100	0	
2.7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14,000,000	100	99.69	100	100	100	0	
2.8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	20,000,000	100	98.49	100	100	100	0	
2.9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	22,000,000	100	98.73	100	100	100	0	
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN**	**3,142,500,000**	**100**	**97.12**	**100**	**100**	**100**	**0**	
3.1	Peningkatan Kemandirian dan Kepeloporan Pemuda	300,000,000	100	99.65	100	100	100	0	
3.2	Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda	300,000,000	100	98.6	100	100	100	0	
3.3	Pemberdayaan Peran Serta Pemuda Untuk Pembangunan Pedesaan	950,000,000	100	99.32	100	100	100	0	
3.4	Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)	450,000,000	100	88.71	100	100	100	0	Efisiensi sebesar Rp.50.802.900 karena adanya perubahan quota dari pusat baik untuk KPN maupun PPAN. Program Australia tidak ada, & program Kanada dialihkan ke Program Korea.
3.5	Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	1,142,500,000	100	97.55	100	100	100	0	
4	**PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA**	**550,000,000**	**100**	**99.57**	**100**	**100**	**100**	**0**	
4.1	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda	550,000,000	100	99.57	100	100	100	0	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA**	**356,850,000**	**100**	**73**	**100**	**100**	**95.38**	**4.62**	

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
5.1	Festival dan Lomba Olahraga Tradisional	356,850,000	100	73	100	100	33	67	Dana tersisa Rp96.349.680 karena dari Pusat ada perubahan jumlah cabang lomba/ festival dan quota peserta yang diselenggarakan.
6	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA**	**35,737,330,000**	**100**	**90.2**	**100**	**93.45**	**92.08**	**1.37**	
6.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	350,000,000	100	95.44	100	100	100	0	
6.2	Pembangunan Stadion Mandala Krida	31,958,210,000	100	89.77	100	92.68	90	2.68	Pekerjaan fisik tidak bisa selesai 100% hanya men-capai 92,6789% karena: 1.Pekerjaan pemasangan *space frame* perlu perhitungan yang cukup matang dari APORA dan penyampaian perhitungannya terlambat, sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaan. 2. Pekerjaan penutup atap tidak dapat diselesaikan karena keterlam-batan pengiriman penutup atap. Keterlambatan tersebut terjadi karena sulitnya mengeluarkan barang dari pelabuh-an. Barang sampai di pelabuhan tanggal 9 Desember 2015, tetapi sampai ke lokasi pekerjaan baru tanggal 22 Desember 2015, akibatnya tidak dapat terpasang semua. Sisa dana Rp3.269.526.780 terdiri dari Sisa lelang fisik Rp777.322.000 sisa lelang konsultan pengawas Rp199.338.000 sisa biaya penunjang Rp.55.209.580 dan sisa kontrak yang tidak dapat terselesaikan sebesar Rp2.237.657.200

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
6.3	Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari	1,491,110,000	100	89.51	100	100	100	0	Pekerjaan sudah selesai. Anggaran sisa Rp156.372.360 terdiri dari sisa lelang dikurangi addendum sebesar Rp105.074.000 dan sisa biaya penunjang sebesar Rp51.298.360
6.4	Pembangunan *Youth Centre*	1,488,010,000	100	97.23	100	100	100	0	
6.5	Pemeliharaan Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana Pemuda	450,000,000	100	96	100	100	100	0	
7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA**	**1,544,750,000**	**100**	**98.28**	**100**	**100**	**100**	**0**	
7.1	Pembentukan Paskibraka	897,200,000	100	98.98	100	100	100	0	
7.2	Lomba Baris Berbaris	250,000,000	100	95.82	100	100	100	0	
7.3	Pembinaan Pemuda Kader Anti Narkoba	397,550,000	100	98.24	100	100	100	0	
8	**PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA**	**7,776,540,850**	**100**	**97.24**	**100**	**100**	**100**	**0**	
8.1	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	2,250,000,000	100	99.88	100	100	100	0	
8.2	Penyelenggaraan POPDA (Pekan Olah-raga Pelajar Daerah)	900,000,000	100	99.41	100	100	100	0	
8.3	Penyelenggaraan Tri Lomba Juang	242,000,000	100	99.78	100	100	100	0	
8.4	Penyelenggaraan POPCADA (Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah)	170,000,000	100	99.03	100	100	100	0	
8.5	Bimbingan Teknis bagi Pelatih dan Wasit	144,540,850	100	90.19	100	100	100	0	
8.6	Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia	180,000,000	100	99.34	100	100	100	0	
8.7	Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)	600,000,000	100	96.46	100	100	100	0	
8.8	Penyelenggaraan Pekan Olahraga KORPRI Daerah (PORPRIDA)	220,000,000	100	93.92	100	100	100	0	
8.9	Lomba Senam Kesegaran Jasmani	220,000,000	100	97.91	100	100	100	0	
8.1	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Kontingen POPCANAS (Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional	550,000,000	100	89.44	100	100		100	Efisiensi dana

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
8.11	Penyelenggaraan Kejuaraan Catur	300,000,000	100	85.73	100	100		100	Peran aktif atlet catur tingkat SD, SLTP, SLTA dan Umum untuk siap mengikuti seleksi. Efisiensi sebesar Rp42.811.300
8.12	Penyelenggaraan POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional)	2,000,000,000	100	97.57	100	100		100	
	Jumlah	**52,261,837,550**	**100**	**91.72**	**100**	**95.52**	**98.43**		

Sumber: Disdikpora DIY, 2016

9. Urusan Penanaman Modal

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**2.889.835.650**	**100**	**97,03**	**100**	**100**	**92,86**	**7,14**	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.550.000	100	89,34	100	100	100	0,00	Efisiensi paket pengiriman
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	475.011.000	100	95,20	100	100	100	0,00	
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	11.295.000	100	89,29	100	100	100	0,00	Sudah sesuai dengan pajak kendaran yang ada
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	72.500.000	100	99,84	100	100	100	0,00	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	366.716.000	100	99,85	100	100	100	0,00	
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	79.180.050	100	100	100	100	100	0,00	
1.7	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	106.619.900	100	99,74	100	100	100	0,00	
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20.750.250	100	100	100	100	100	0,00	
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.601.450	100	100	100	100	100	0,00	
1.1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.607.000	100	100	100	100	100	0,00	
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	106.740.000	100	94,59	100	100	100	0,00	
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	799.927.000	100	98,80	100	100	100	0,00	
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Tempat Kerja	722.690.000	100	96,34	100	100	100	0,00	
1.14	Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	10.648.000	100	95,49	100	100	0,00	0,00	
2	**Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**	**1.802.362.500**	**100**	**96,45**	**100**	**100**	**76,70**	**23,30**	
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	445.000.000	100	87,15	100	100	0,00	100	Efisiensi pengada-an mobil
2.2	Pengadaan Perlengkap-an Gedung Kantor	222.188.000	100	97,28	100	100	100	0,00	
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	119.500.000	100	98,79	100	100	100	0,00	
2.4	Pengadaan Mebeleur	156.400.000	100	99,73	100	100	100	0,00	
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	98.924.500	100	96,99	100	100	100	0,00	
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	463.215.000	100	91,72	100	100	100	0,00	
2.7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	50.285.000	100	99,92	100	100	100	0,00	
2.8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	18.350.000	100	99,65	100	100	100	0,00	
2.9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	8.500.000	100	100	100	100	67,00	33,00	

9. Urusan Penanaman Modal

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2.1	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	220.000.000	100	93,25	100	100	0,00	100	
3	**Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**109.774.250**	**100**	**99,01**	**100**	**100**	**50,00**	**50,00**	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	75.000.000	100	98,01	100	100	100	0,00	
3.2	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	34.774.250	100	100	100	100	0,00	100	
4	**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**119.861.300**	**100**	**98,35**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
4.1	Penyusunan laporan kinerja SKPD	4.840.000	100	100	100	100	100	0,00	
4.2	Penyusunan laporan keuangan SKPD	29.592.400	100	95,54	100	100	100	0,00	
4.3	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan Data informasi	71.686.000	100	97,85	100	100	100	0,00	
4.4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	13.742.900	100	100	100	100	100	0,00	
1	**Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**1.334.901.350**	**100**	**98,15**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	
1.1	Koordinasi Penyeleng-garaan Pelayanaan Ter-padu Satu Pintu (PTSP)	414.279.000	100	98,79	100	100	100	0,00	
1.2	Pembinaan & peng-awasan pelaksanaan penanaman modal	157.956.350	100	96,45	100	100	100	0,00	
1.3	Penyiapan Potensi Investasi	762.666.000	100	99,22	100	100	100	0,00	
2	**Peningkatan Promosi, Kerjasama, & Pemerata-an Pertumbuhan Investasi**	**3.478.370.200**	**100**	**92,94**	**100**	**98,80**	**92,00**	**6,80**	
2.1.	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Investasi	3.296.078.000	100	88,91	100	97,60	84,00	13,60	1. Pameran investasi di luar pulau jawa (Kaltim) dibatal-kan dari pihak penyelenggara dengan surat 379/CMP-PAM/XI/ 2015 tanggal 12 Nov 2015 2. Pameran sekaten ada pengurangan hari penyeleng-garaan dari 40 hari menjadi 20 hari.
2.2.	Koordinasi Percepatan dan Pemerataan Realisasi Investasi	182.292.200	100	96,97	100	100	100	0,00	

Sumber: BKPM DIY, 2016

**) Ket.:*

Urusan Administrasi Umum

Urusan Penanaman Modal

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**2.202.492.250**	**100**	**93,13**	**100**	**100**	**100**	**-**	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6.999.000	100	94,57	100	100	100	-	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	689.379.800	100	80,96	100	100	100	-	Adanya efisiensi sebesar Rp101.801.179 terdiri dari telp: Rp18.000.000, Listrik Rp47.000.000, Internet Rp36.000.000 Colocation semula 2 untuk Disperindagkop dan Jogja Plaza ditempatkan di Jogja Media Net, 1 rusak yang diguna-kan Jogja Plaza sehingga ditarik, internet tadinya langganan di JMN, tahun 2015 tidak langganan lagi karena semua internet SKPD diampu oleh LTMI.
3	Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas operasional	9.600.000	100	88,05	100	100	100	-	Adanya efisiensi (Sesuai kebutuhan)
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	113.515.500	100	90,67	100	100	100	-	Ada efisiensi sebesar Rp9.410.000 dari honor pengelolaan keuangan dan penyimpanan barang karena menyesuai kan SHBJ.
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	209.996.700	100	99,21	100	100	100	-	
6	Penyediaan alat tulis kantor	93.691.500	100	99,96	100	100	100	-	
7	Penyediaan barang cetak & penggandaan	84.999.750	100	99,97	100	100	100	-	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik penerang-an bangunan kantor	30.000.000	100	99,99	100	100	100	-	
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.770.000	100	97,57	100	100	100	-	
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	19.250.000	100	99,99	100	100	100	-	
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.920.000	100	92,48	100	100	100	-	
12	Penyediaan makanan dan minuman	98.208.000	100	99,79	100	100	100	-	
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	526.516.000	100	99,50	100	100	100	-	

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
14	Penyediaan jasa keamanan kantor/ gedung/ tempat kerja	289.966.000	100	99,96	100	100	100	-	
15	Penyediaan retribusi sampah	7.680.000	100	75	100	100	100	-	Adanya efisiensi Rp960.000 karena tagihan per bulan Rp240.000 untuk 2 lokasi.
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	7.168.832.000	100	93,41	100	100	100	-	
1	Pembangunan gedung kantor	5.580.392.000	100	92,50	100	100	100	-	
2	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	224.999.850	100	86,59	100	100	-	100	Adanya efisiensi sebesar Rp30.163.850 karena tipe yang di atasnya tidak ada.
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	244.996.000	100	98,61	100	100	100	-	
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	249.100.000	100	93,67	100	100	100	-	
5	Pengadaan mebeleur	177.350.000	100	99,80	100	100	100	-	
6	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	149.999.150	100	98,55	100	100	100	-	
7	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	350.000.000	100	99,78	100	100	100	-	
8	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	50.000.000	100	99,96	100	100	100	-	
9	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	125.000.000	100	99,04	100	100	100	-	
10	Pemeliharaan rutin/ berkala arsip aktif dan arsip in-aktif/ statis	16.995.000	100	100	100	100	-	100	
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**28.600.000**	**100**	**87,41**	**100**	**100**	**100**	**-**	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	28.600.000	100	87,41	100	100	100	-	Adanya efisiensi sebesar Rp3.600.000 karena menyesuai-kan penyedia jasa.
IV	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**207.725.000**	**100**	**94,70**	**100**	**100**	100	-	
1	Penyusunan laporan kinerja SKPD	7.000.000	100	100	100	100	100	-	
2	Penyusunan laporan keuangan SKPD	15.250.000	100	100	100	100	100	-	
3	Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi	154.975.000	100	93,27	100	100	100	-	
4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	30.500.000	100	98,16	100	100	100	-	

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
V	**Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif**	**90.474.500**	**100**	**91,85**	**100**	**100**	**97,75**	**2,25**	
1	Penguatan kapasitas kemitraan UMKM	90.474.500	100	91,85	100	100	-	100	
VI	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**988.100.000**	**100**	**79,65**	**100**	**100**	**100**	**-**	
1	Penumbuhan kewirausahaan baru	988.100.000	100	79,65	100	100	-	100	- Efisiensi Rp1.624.500 terdiri dari efisiensi Penum-buhan WUB Makanan Minum-an Rp1. 449.500 dan dari Penum-buhan WUB Briket Sampah Organik Rp175.000 (pembelian alat) - Efisiensi dari WUB Pakaian Jadi Rp1.280.000 (sewa tempat menyesuaikan SHBJ, pembelian alat) - Efisiensi dari kegiatan WUB kosmetik sewa tempat Rp500.000 - Efisiensi dari kegiatan WUB Jamu sewa peralatan Rp500.000 & tempat Rp300.000 - Efisiensi pada kegiatan yang bekerjasama dengan UGM dianggarkan honor 3 bulan tetapi pelaksana-an 2 bulan, honor 1 bulan dikembali-kansebesar Rp90.695.000 terdiri dari honor Rp32.450.000 internet Rp200.000 Cetak Rp1.600.000 Penggandaan Rp1.120.000 Makmin harian umum Rp21.965.000 jasa tenaga ahli/ instruktur/ nara-sumber Rp33.360.000 namun realisasi fisik dapat ter-capai 100% karena IKM yang dibina oleh DEQPI adalah IKM yang telah

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									dibina Disperindagkop & telah dilakukan riset oleh DEQPI sehingga pelatihan untuk kelompok embrio yang berupa FGD dan pelatihan ditiadakan.
VII	**Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**	**466.155.350**	**100**	**92,30**	**100**	**100**	100	-	
1	Penguatan kapasitas perkoperasian	466.155.350	100	92,30	100	100	-	100	

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2016

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Program: Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	1.134.639.500	100	96,32	100	100	100	3	
	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu	209.370.000	100	98,48	100,00	100,00	100,00	2,86	-
	Pengembangan Database Kependudukan	155.559.000	100	96,42	100,00	100,00	100,00	0,63	-
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	153.975.250	100	97,88	100,00	100,00	100,00	4,66	-
	Penyusunan Proyeksi Penduduk	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendataan Penduduk untuk Pemutakhiran Database Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi & Sinkronisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	206.336.250	100	95,19	100,00	100,00	100,00	-	
	Kajian Kebijakan Administrasi kependudukan	100.000.000	100	97,62	100,00	100,00	100,00	-	
	Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dukungan Implementasi e-KTP	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Data Orang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Kader PKK dalam mendukung Adminduk	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan TKI ke Luar Negeri di DIY	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi & Sinkronisasi Penyelenggaraan Peningkatan Akta Pencatatan Sipil	220.875.000	100	95,54	100,00	100,00	100,00	-	-
	Penyelesaian Permasa-lahan Pencatatan Sipil	88.524.000	100	93,11	100,00	100,00	100,00	-	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasa-lahan Pencatatan Kelahiran	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Permasalahan Pencatatan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2016

12. Urusan Ketenagakerjaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**2,756,856,824**	**100**	91.20	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,960,000	100	99.89	100	100	100	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	772,177,824	100	82.15	100	100	100	0	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	24,435,000	100	60.54	100	100	100	0	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	89,905,900	100	100	100	100	100	0	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	462,300,000	100	99.66	100	100	100	0	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	76,754,100	100	100	100	100	100	0	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58,248,000	100	100	100	100	100	0	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,313,000	100	100	100	100	100	0	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43,828,000	100	99.95	100	100	100	0	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16,750,000	100	89.48	100	100	100	0	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,434,000	100	90.69	100	100	100	0	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	28,934,000	100	99.05	100	100	100	0	
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	304,805,000	100	95.74	100	100	100	0	
14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	808,012,000	100	90.55	100	100	100	0	
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**8,923,332,000**	**100**	95.18	**100**	**100**	**100**	0	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	401,000,000	100	91.02	100	100	100	0	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	586,060,000	100	98.02	100	100	100	0	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2,089,162,000	100	99.45	100	100	100	0	
4	Pengadaan Mebeleur	511,420,000	100	98.71	100	100	100	0	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1,378,636,000	100	95.56	100	100	100	0	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	480,081,000	100	82.60	100	100	100	0	

12. Urusan Ketenagakerjaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	94,400,000	100	98.86	100	100	100	0	
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	84,000,000	100	99.82	100	100	100	0	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	137,850,000	100	98.34	100	100	100	0	
10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pustaka	1,783,059,000	100	99.48	100	100	100	0	
11	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	1,332,664,000	100	84.50	100	100	100	0	
12	Pengelolaan Naskah Dinas	45,000,000	100	99.67	100	100	100	0	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**216,532,000**	**100**	87.98	**100**	**100**	**100**	0	
1	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	11,478,000	100	93.76	100	100	100	0	
2	Pengembangan Kualitas S D M	67,332,000	100	96.52	100	100	100	0	
3	Pengembangan ISO	137,722,000	100	83.32	100	100	100	0	
4	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**639,806,000**	**100**	96.19	**100**	**100**	**100**	0	
1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	11,800,000	100	100	100	100	100	0	
2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	22,401,000	100	100	100	100	100	0	
3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	361,605,000	100	97.98	100	100	100	0	
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	244,000,000	100	92.99	100	100	100	0	
5	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**11,517,593,500**	**100**	92.90	**100**	**100**	**100**	0	
1	Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU)	4,437,758,000	100	91.00	100	100	100	0	
2	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	3,041,311,400	100	91.93	100	100	100	0	
3	Sertifikasi Uji Kompetensi	279,863,000	100	98.08	100	100	100	0	
4	Pemagangan Tenaga Kerja	2,290,148,000	100	96.31	100	100	100	0	

12. Urusan Ketenagakerjaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
5	Pelatihan Pembentuk-an Wirausaha Baru	982,198,100	100	99.73	100	100	100	0	
6	Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja	486,315,000	100	83.45	100	100	100	0	
6	**PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA**	**13,718,987,100**	**100**	94.07	**100**	**100**	**100**	0	
1	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD	431,350,000	100	99.91	100	100	100	0	
2	Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	1,006,299,800	100	88.86	100	100	100	0	
3	Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah)	102,387,000	100	96.07	100	100	100	0	
4	Pengembangan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja Perusahaan	176,000,000	100	100	100	100	100	0	
5	Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama Antar Daerah	197,800,000	100	98.98	100	100	100	0	
6	Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	335,175,000	100	98.62	100	100	100	0	
7	Pengurangan pengangguran melaui padat karya infrastruktur	6,164,455,600	100	95.05	100	100	100	0	
8	Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penyandang Cacat (Penca)	109,128,500	100	98.16	100	100	100	0	
9	Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja	344,030,000	100	99.04	100	100	100	0	
10	Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI)	1,748,881,700	100	87.73	100	100	100	0	
11	Pembinaan Purna Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Khusus	774,384,000	100	82.06	100	100	100	0	
12	Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan	2,329,095,500	100	98.84	100	100	100	0	
7	**PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN**	**196,735,000**	**100**	94.55	**100**	**100**	**100**	0	
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	86,595,000	100	91.69	100	100	100	0	
2	Pembinaan CTKI/ TKI dan Pemantauan Lembaga Penempatan	110,140,000	100	96.79	100	100	100	0	

12. Urusan Ketenagakerjaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
8	**PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN**	**1,159,117,000**	**100**	96.39	**100**	**100**	**100**	0	
1	Pengujian Lingkungan Kerja	286,210,000	100	99.60	100	100	100	0	
2	Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	198,955,000	100	94.94	100	100	100	0	
3	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja	79,222,000	100	93.71	100	100	100	0	
4	Pemeriksaaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja	89,400,000	100	99.43	100	100	100	0	
5	Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	304,915,000	100	95.04	100	100	100	0	
6	Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak	82,500,000	100	99.75	100	100	100	0	
7	Perlindungan Tenaga Kerja	117,915,000	100	91.72	100	100	100	0	
9	**PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**986,003,000**	**100**	99.56	**100**	**100**	**100**	0	
1	Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code	152,662,000	100	99.89	100	100	100	0	
2	Pembinaan Hubungan Industrial	268,332,000	100	99.53	100	100	100	0	
3	Koordinasi dewan Pengupahan dan Sosialisasi bagi tenaga kerja/ perusahaan	510,444,000	100	99.43	100	100	100	0	
4	Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR)	54,565,000	100	100	100	100	100	0	
	JUMLAH	**40,114,962,424**	**100**	93.99	**100**	**100**	**100**		

Sumber: Disnakertrans DIY, 2016

13. Urusan Ketahanan Pangan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	BELANJA	**12,524,724,166**	**100**	**95.29**	**100**	**100**	**100**	**0**	
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**5,223,150,716**	**100**	**97.61**	**100**	**100**	**100**	**0**	
	Belanja Pegawai	5.223.150.716	100	97.61	100	100	100	0	
	Gaji dan Tunjangan	5.223.150.716	100	97.61	100	100	100	0	
B	**BELANJA LANGSUNG**	**7,301,573,450**	**100**	**93.64**	**100**	**100**	**100**	**0**	
01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**563.813.900**	**100**	**90.61**	**100**	**100**	**100**	**0**	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250,000	100	43.00	100	100	100	0	efisiensi karena surat menyurat lebih banyak menggunakan fasilitas email
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	193.200.000	100	84.79	100	100	100	0	efisiensi penggunaan sarpras telepon, air, dan listrik
c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	6.140.000	100	99.79	100	100	100	0	
d	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.746.600	100	97.29	100	100	100	0	
e	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	74.950.000	100	99.12	100	100	100	0	
f	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.748.300	100	98.63	100	100	100	0	
g	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	24.999.000	100	92.12	100	100	100	0	
h	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pene-rangan Bangunan Kantor	15.000.000	100	99.91	100	100	100	0	
i	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.780.000	100	74.09	100	100	100	0	efisiensi pembayar-an surat kabar & majalah sesuai harga di pasaran
j	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000	100	99.88	100	100	100	0	
k	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150.000.000	100	88.59	100	100	100	0	efisiensi perjalan-an dinas luar daerah menyesuaikan dengan kebutuhan dan undangan dari pusat/ instansi terkait
l	Penyediaan Retribusi Sampah	9.000.000	100	100.00	100	100	100	0	
02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**1,413,500,000**	**100**	**94.84**	**100**	**100**	**100**	**0**	
a	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	496.000.000	100	97.86	100	100	100	0	
b	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	420.000.000	100	93.08	100	100	100	0	efisiensi perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan dengan kebutuhan dan undangan dari pusat/ instansi terkait
c	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	200.000.000	100	99.59	100	100	100	0	
d	Pengadaan Mebeleur	100.000.000	100	94.79	100	100	100	0	

13. Urusan Ketahanan Pangan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
e	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	175.000.000	100	84.47	100	100	100	0	efisiensi belanja servis dan suku cadang karena kendaraan dinas masih relatif baru sehingga belum perlu perawatan intensif serta efisiensi peng-gunaan bahan bakar dan pe-lumas menye-suaikan dengan kebutuhan
f	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.500.000	100	100.00	100	100	100	0	
g	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	18.000.000	100	100.00	100	100	100	0	
03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**36.600.000**	100	**93.36**	100	100	100	0	
a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.600.000	100	99.77	100	100	100	0	
b	Pembinaan, Pengem-bangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	24.000.000	100	90.00	100	100	100	0	efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka penilaian DUPAK PMHP ke pusat
04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**202.000.000**	100	**98.43**	100	100	100	0	
a	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	6.000.000	100	99.17	100	100	100	0	
b	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	8.000.000	100	99.43	100	100	100	0	
c	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	165.000.000	100	98.14	100	100	100	0	
d	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	23.000.000	100	99.96	100	100	100	0	
05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN**	**1.132.000.000**	100	**91.22**	100	100	100	0	
a	Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh	600.000.000	100	92.84	100	100	100	0	
b	Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Swadaya/ Swasta	70.000.000	100	86.92	100	100	100	0	efisiensi karena penyesuaian harga satuan dengan SHBJ
c	Penyusunan Program Penyuluhan	37.000.000	100	92.48	100	100	100	0	

13. Urusan Ketahanan Pangan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
d	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan	425.000.000	100	89.53	100	100	100	0	efisiensi karena perjalanan luar daerah untuk lomba kelompok perikanan dan kelautan tingkat nasional ditang-gung oleh pusat serta adanya penyesuaian harga satuan dengan SHBJ
06	**PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN**	**1.338.189.050**	100	**94.33**	100	100	100	0	
a	Dukungan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	287.470.000	100	95.10	100	100	100	0	
b	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	900.719.050	100	95.63	100	100	100	0	
c	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA	80.000.000	100	78.17	100	100	100	0	
d	Penyusunan SKPG	70,000,000	100	92.85	100	100	100	0	
07	**PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN**	**764.874.000**	100	**93.17**	100	100	100	0	
a	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	70.000.000	100	99.86	100	100	100	0	
b	Penguatan Cadangan Pangan	544.874.000	100	90.75	100	100	100	0	efisiensi anggaran bimtek FSVA untuk kota Yogyakarta yang tidak dilaksana-kan karena dari Pusat tidak ada Pedum Penyu-sunan FSVA 2015 untuk tingkat Kota
c	Analisis Ketersediaan Pangan	100.000.000	100	98.46	100	100	100	0	
d	Penyusunan Ketersedia-an dan Kebutuhan Pangan	50.000.000	100	99.60	100	100	100	0	
08	**PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**	**1.240.596.500**	100	**94.79**	100	100	100	0	
a	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Berimbang dan Aman	109.250.000	100	98.30	100	100	100	0	
b	Penyebaran Informasi ProdukPangan Lokal	200.000.000	100	93.10	100	100	100	0	
c	Pengembangan Diversi-fikasi Produk Antara	119.000.000	100	99.24	100	100	100	0	
d	Penanganan Keamanan Pangan	250.000.000	100	98.94	100	100	100	0	
e	Pengembangan Kelembagaan OKKPD	60.000.000	100	98.33	100	100	100	0	
f	Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan	39.950.000	100	95.20	100	100	100	0	
g	Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar	375.000.000	100	89.06	100	100	100	0	efisiensi belanja analisis laboratorium

13. Urusan Ketahanan Pangan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
h	Dukungan Pengembang-an Produk Pangan Bersertifikat	55.000.000	100	98.93	100	100	100	0	
i	Penyusunan PPH	32.396.500	100	97.11	100	100	100	0	
09	**PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN**	**610.000.000**	100	**93.28**	100	100	100	0	
a	Dukungan Kelembagaan Akses Pangan	250.000.000	100	89.85	100	100	100	0	efisiensi karena penyesuaian harga satuan dengan SHBJ
b	Analisis Distribusi dan Harga Pangan	80.000.000	100	95.82	100	100	100	0	
c	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	165.000.000	100	95.80	100	100	100	0	
d	Analisis Pasokan dan Akses Pangan	100.000.000	100	95.15	100	100	100	0	
e	Pengembangan/Pengada an Software Simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan	15.000.000	100	96.53	100	100	100	0	

Sumber: BKPP DIY, 2016

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**2.058.106.775**	**100**	**86,3**	**100**	**100**	**100**	**0**	.FGD Penyusunan pergub 1 kali belum terlaksana .Pelayanan di P2TPA RDU disesuaikan kebutuhan/ pelayan-an kasus .beberapa kegiatan seperti sewa note-book & proyektor pada kegiatan di kab tidak dapat di SPJ-kan karena tidak ada persewaan .makan minum korban disesuaikan kebutuhan .sewa penginapan disesuaikan harga riil .bahan percontohan dan perlengkapan
	Peningkatan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	1.747.881.775	100	85,05	100	100	100	0	.FGD Penyusunan pergub 1 kali belum terlaksana .Pelayanan di P2TPA RDU disesuaikan kebutuhan/ pelayan-an kasus .beberapa kegiatan seperti sewa note-book dan proyektor pada kegiatan di kab tidak dapat di SPJ-kan karena tidak ada persewaan .makan minum korban disesuaikan kebutuhan .sewa penginapan disesuaikan harga riil .bahan percontohan dan perlengkapan
	Pengembangan Data Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak	310.225.000	100	93,5	100	100	100	0	Effisiensi dari belanja cetak, SPPD dalam daerah, SPPD luar daerah, sewa, transportasi & akomodasi, MM lembur, Uang Lembur, ATK, peng-gandaan, Honor Non PNS
2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN**	**985.865.175**	**100**	**85,9**	**100**	**100**	**100**	**0**	effisiensi dan penyesuaian SHBJ dari belanja Honor non PNS, ATK, Sewa ruang, Cetak, penggandaan, Makan dan minum rapat, SPPD dalam daerah, Jasa kebersihan, publikasi, makan & minum harian umum dan honor narasumber
	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	985.865.175	100	85,9	100	100	100	0	effisiensi dan penyesuaian SHBJ dari belanja Honor non PNS, ATK, Sewa ruang, Cetak, penggandaan,

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Makan dan minum rapat, SPPD dalam daerah, Jasa kebersihan, publikasi, makan & minum harian umum dan honor narasumber
3	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**2.282.575.600**	**100**	**69,3**	**100**	**100**	**100**	**0**	effisiensi dari belanja honor non PNS, ATK, bantuan Peralatan, transport-tasi & akomodasi, dekorasi, EO, Cetak, penggandaan, Sewa ruang, kamar, per-lengkapan kantor, makan & minum rapat, makan & minum harian umum, perjalanan dalam daerah, perjalanan luar daerah, jasa konsultasi,
	Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak	2.282.575.600	100	69,3	100	100	100	0	effisiensi dari belanja honor non PNS, ATK, bantuan Peralatan, transport-tasi & akomodasi, dekorasi, EO, Cetak, penggandaan, Sewa ruang, kamar, per-lengkapan kantor, makan & minum rapat, makan & minum harian umum, perjalanan dalam daerah, perjalanan luar daerah, jasa konsultasi,
4	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**	**1.363.425.000**	**100**	**87,7**	**100**	**92.4**	**98.71**	**-6.31**	Effisiensi dari belanja Honor PNS, Honor non PNS, ATK, Plakat, dokumentasi, publikasi,jasa kebersihan, peng-gandaan,sewa tempat,proyektor, soundsistem, perjalanan dalam daerah, perjalanan luar daerah dan Kegiatan fasilitasi KPPI DIY tidak dilaksanakan
	Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak	1.363.425.000	100	87,7	100	92.4	98.71	-6.31	Effisiensi dari belanja Honor PNS, Honor non PNS, ATK, Plakat, dokumentasi, publikasi,jasa kebersihan, peng-gandaan,sewa tempat, proyektor, *sound system*, perjalanan dalam daerah, perjalanan luar daerah dan Kegiatan fasilitasi KPPI DIY tidak dilaksanakan

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
3	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI EKONOMI PEREMPUAN**	**1.518.650.000**	**100**	**95,8**	**100**	**100**	**100**	**0**	Effisiensi dari belanja Honor PNS, Honor non PNS, ATK, percontohan, alat perlengkapan,dekorasi, sewa tempat, kamar, makan & minum harian umum, perjalanan dalam daerah, perjalanan luar daerah, tenaga ahli/ narasumber
	Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi	1.518.650.000	100	95,8	100	100	100	0	Effisiensi dari belanja Honor PNS, Honor non PNS, ATK, percontohan, alat perlengkapan,dekorasi, sewa tempat, kamar, makan & minum harian umum, perjalanan dalam daerah, perjalanan luar daerah, tenaga ahli/ narasumber
5	**PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN**	**949.945.000**	**100**	**89,3**	**100**	**100**	**100**	**0**	Effisensi dari belanja Sewa Ruang, LCD, *Sound system*, ATK, perjalanan dalam daerah
	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	949.945.000	100	89,3	100	100	100	0	Effisensi dari belanja Sewa Ruang, LCD, Soundsistem, ATK, perjalanan dalam daerah
	Jumlah	**9.158.567.550**	**100**	**84,12**	**100**	**99**	**100**		

Sumber: BPPM DIY, 2016

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA**	**945.946.000**	**100**	**83.15**	**100**	**86.02**	**100**	**-13.98**	- Sesuai dengan surat dari Bappeda No.440/01781 tgl 3 Maret 2015 ttg penyusunan website KRR, maka pembuatan website KRR dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sedangkan FGD dan Rapat kerja dilaksanakan oleh BPPM
	Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	290.887.500	100	93.53	100	100	100	0	- Proses perubahan BPPM sudah mengajukan untuk dialihkan ke effisiensi tetapi tidak mendapatkan perse-tujuan sehingga tetap menjadi silva kegiatan
	Pembinaan Lembaga Reproduksi Remaja	655.058.500	100	78.55	100	79.81	100	-20.19	- effisiensi kegiatan
2	**PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**	**855.520.000**	**100**	**95.47**	**100**	**100**	**99.59**	**0.41**	- effisiensi kegiatan
	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (HRI)	91.402.000	100	78.34	100	100	100	0	
	Pemberdayaan Keluarga dalam Penanggulangan HIV dan AIDS	185.443.000	100	98.9	100	100	100	0	
	Pembinaan KB dan Pelayan KB	578.675.000	100	97.08	100	100	100	0	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**	**2.568.557.000**	**100**	**77.71**	**100**	**100**	**100**	**0**	- Adanya surat dari Kabupaten Gunung KidulNo. 470/225 ttg penolakan pengam-bilan Hr. Sub PPKBD karena Hr. sudah dialokasikan melalui dana desa sesuai perbup No.47/2014
	Pembinaan Ketahanan Keluarga	2.568.557.000	100	77.71	100	100	100	**0**	- effisiensi kegiatan
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN BINA KELUARGA**	**1.300.214.700**	**100**	**94.66**	**100**	**100**	**100**	**0**	- effisiensi kegiatan
	Pengembangan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga	1.300.214.700	100	94.66	100	100	100	**0**	
	Jumlah	**5.670.237.700**	**100**	**85,18**	**100**	**96,50**			

Sumber: BPPM DIY, 2016

16. Urusan Perhubungan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN**	**116,103,800**	**100**	**97.28**	**100**	**100**	**100**	**-**	
1.1	Pembangunan Sarana & Prasarana Pendukung Perhubungan Udara	116,103,800	100	97.28	100	100	100	-	
2	**PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ**	**2,044,838,000**	**100**	**96.50**	**100**	**100**	**100**	**-**	
2.1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang	797,301,200	100	95.08	100	100	100	-	
2.2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP	254,193,650	100	98.57	100	100	100	-	
2.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	975,965,000	100	97.10	100	100	100	-	
2.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Kereta Api	17,378,150	100	97.86	100	100	100	-	
3	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**	**909,345,600**	**100**	**95.86**	**100**	**100**	**100**	**-**	
3.1	Pengumpulan dan Analisis *Database* Pelayanan Angkutan	377,978,700	100	96.86	100	100	100	-	
3.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	375,135,000	100	93.62	100	100	100	-	
3.3	Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan	156,231,900	100	98.85	100	100	100	-	
4	**PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN**	**940,378,250**	**100**	**98.33**	**100**	**100**	**100**	**-**	
4.1	Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas *Transfer Point* dan *Park and Ride*	940,378,250	100	98.33	100	100	100	-	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS**	**2,217,649,522**	**100**	**92.26**	**100**	**100**	**100**	**-**	
5.1	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	396,163,750	100	75.66	100	100	100	-	sisa lelang
5.2	Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	448,365,500	100	98.78	100	100	100	-	
5.3	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalulintas Jalan (DAK)	1,373,120,272	100	94.92	100	100	100	-	

16. Urusan Perhubungan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN**	**11,815,149,000**	**100**	**97.71**	**100**	**100**	**91.38**	**8,62**	
6.1	Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage City)**	8,991,000,000	100	97.26	100	100	90.00	10	
6.2	Penyusunan Masterplan Jalur/ Zone Angkutan Tradisional yang mendukung kawasan budaya perkotaan Yogyakarta**	381,100,000	100	100	100	100	na	100.00	
6.3	Penyusunan Raperda Moda Transportasi Tradisional**	292,444,000	100	93.02	100	100	na	100.00	
6.4	Penyusunan Kajian Asal Tujuan Perjalanan di Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta**	1,993,630,000	100	99.90	100	100	na	100.00	
6.5	Pengembangan Penyediaan *Park And Ride* di DIY**	156,975,000	100	98.41	100	100	na	100.00	
7	**PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR**	**67,798,400**	**100**	**69.57**	**100**	**100**	**100**	**-**	
7.1	Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor	25,789,000	100	95.15	100	100	100	-	
7.2	Pengendalian Pelaksana-an Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	42,009,400	100	53.86	100	100	100	-	Pemilihan Penguji Teladan tidak diselenggarakan Pemerintah
8	**PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**	**2,253,079,000**	**100**	**93.39**	**100**	**100**	**100**	**-**	
8.1	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan	293,798,100	100	97.33	100	100	100	-	
8.2	Penetapan & Pengaturan Manajemen Lalulintas	1,959,280,900	100	92.80	100	100	100	-	
9	**PROGRAM PENGATURAN SISTEM SIMPANG BERSINYAL**	**3,240,850,000**	**100**	**92.69**	**100**	**100**	**100**	**-**	
9.1	Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS Tenaga Surya Perkotaan	3,240,850,000	100	92.69	100	100	100	-	
10	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI**	**1,370,739,300**	**100**	**97.93**	**100**	**100**	**100**	**-**	
10.1	Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum	133,187,200	100	98.82	100	100	100	-	

16. Urusan Perhubungan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
10.2	Pembinaan & Pemantau-an Keselamatan Penerbangan	11,225,000	100	100	100	100	100	-	
10.3	Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan jalan	231,663,000	100	97.41	100	100	100	-	
10.4	Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang	994,664,100	100	97.90	100	100	100	-	

Sumber: Dishubkominfo DIY, 2016

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA**	**1,371,019,025**	**100**	**97.05**	**100**	**100**	**100**	**-**	
a	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	174,802,750	100	98.39	100	100	100	-	
b	Pengkajian & Pengem-bangan Sistem Informasi	1,096,441,000	100	92.64	100	100	100	-	
c	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	72,850,475	100	97.40	100	100	100	-	
d	Kerjasama Pengembang-an e-Government	26,924,800	100	99.78	100	100	100	-	
2	**PROGRAM FASILITASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN POS TELEKOMUNIKASI DAN FREKUENSI**	**729,204,800**	**100**	**94.28**	**100**	**100**	**100**	**-**	
a	Pembinaan & Pendataan Peyelenggaraan Jasa Titipan	12,672,500	100	100	100	100	100	-	
b	Pembinaan & Pengawas-an Penyelenggaraan Telekomunikasi	8,725,000	100	100	100	100	100	-	
c	Penyebarluasan Informasi Daerah	300,000,000	100	96.59	100	100	100	-	
d	Keikutsertaan Dalam Pekan Informasi Nasional	193,803,800	100	78.30	100	100	100	-	Perpindahan tempat penye-lenggaraan dari luar Jawa (Balikpapan) ke Surabaya menye-babkan kebutuh-an anggaran perjalanan dinas menurun
e	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan Daerah	74,990,000	100	96.23	100	100	100	-	
f	Layanan Informasi Publik	139,013,500	100	94.57	100	100	100	-	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI**	**7,284,623,600**	**100**	**96.08**	**100**	**100**	**100**	**-**	
a	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	6,883,060,200	100	96.12	100	100	100	-	
B	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	401,563,400	100	96.04	100	100	100	-	
	JUMLAH	**9,384,847,425**	**100**	**95.51**	**100**	**100**	**100**	**-**	

Sumber: Dishubkominfo DIY, 2016

18. Urusan Pertanahan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1.	Koordinasi Penataan Pemanfaatan Tanah	47.450.000	100	99,35	100	100	-	-	
2.	Penanganan Permasalahan Pertanahan	145.790.000	100	98,86	100	100	-	-	Dari target 25 realisasi 42 rekomendasi
3.	Penyelenggaraan Izin Pengelolaan Tanah Kas Desa	74.990.000	100	100	100	100	-	-	Dari target 70 izin realisasi 86 izin Gub
4.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kebijakan Gubernur DIY di Bidang Pertanahan	100.000.000	100	100	100	100	-	-	Target 38 izin realisasi 50 izin dan workshop
5.	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	66.755.000	100	98,42	100	100	-	-	Target 12 izin realisasi 60 izin penetapan lokasi
	Total	**434.985.000**	**100**	**99,31**	**100**	**100**			

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2016

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
A	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**733.870.984**	**100**	**97.03**	**100**	**99,88**	**100**	**-0,12**	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	100	99,70	100	100	100	0	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.	158.499.984	100	88,18	100	100	100	0	Deviasi keuangan 11,82% karena: .Pembayaran sesuai tagihan/ pemakaian. Melaksanakan SE Sekda tentang Penghematan energi listrik dan air .Biaya internet dan website tidak direalisasikan karena dikelola langsung oleh Dinas KOMINFO/ LTMI
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	9.250.000	100	78,10	100	100	100	0	Deviasi keuangan 21,9% karena: Biaya keringanan pajak Sesuai kebijakan penurun-an tarif pajak
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	29.560.000	100	100	100	100	100	0	
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	80.000.000	100	100	100	100	100	0	
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	70.000.000	100	100	100	100	100	0	
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.500.000	100	100	100	100	100	0	
8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.461.000	100	100	100	100	100	0	
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	100	100	100	100	100	0	
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.600.000	100	100	100	100	100	0	
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.000.000	100	99,97	100	100	100	0	
12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	227.000.000	100	99,95	100	100	100	0	
13.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	55.000.000	100	98,40	100	100	100	0	
B.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1.223.000.000**	**100**	**98,81**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	198.000.000	100	96,54	100	100	100	0	
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000	100	99,75	100	100	100	0	
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	85.000.000	100	99,28	100	100	100	0	
4.	Pengadaan Mebeleur	140.000.000	100	99,86	100	100	100	0	
5.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	110.000.000	100	97,51	100	100	100	0	

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
6.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	340.000.000	100	99,08	100	100	100	0	
7.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	100	99,14	100	100	100	0	
8.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000	100	100	100	100	100	0	
9.	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	5.000.000	100	100	100	100	100	0	
10.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	200.000.000	100	99,73	100	100	100	0	
C	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**362.680.000**	**100**	**96,70**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	100	87,78	100	100	100	0	Deviasi keuangan sebesar 12,22% karena efisiensi pada: .Belanja sewa perlengkapan lain (*sound system*), sewa proyektor, sewa ruang rapat/ pertemuan .Belanja jasa kebersihan kantor .Belanja transportasi dan akomodasi .Honorarium harian non PNS
2.	Pembinaan KORPS Musik Pemda DIY	55.000.000	100	100	100	100	100	0	
3.	Publikasi Media Cetak dan Elektronik	50.000.000	100	99,75	100	100	100	0	
4.	Pengembangan Teknologi Informasi	100.000.000	100	99,23	100	100	100	0	
5.	Updating Data Bidang Kesbanglinmas	32.280.000	100	99,36	100	100	100	0	
6.	Penyusunan Data Hasil Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres	50.000.000	100	98,64	100	100	-	100	
7.	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	30.400.000	100	84,52	100	100	-	100	Deviasi keuangan sebesar 15,48 % karena efisiensi pada: .Belanja tenaga kebersihan .Belanja sewa meja kursi, sewa proyektor, sound system karena memakai sarana kantor .Belanja cetak dan peralatan praktek
D	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**157.909.000**	**100**	**98,99**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	9.374.000	100	100	100	100	100	0	
2.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12.500.000	100	100	100	100	100	0	

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
3.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	96.410.000	100	99,80	100	100	100	0	
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	39.625.000,-	100	96,47	100	100	100	0	
E	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**5.209.418.900**	**100**	**97,37**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1.	Peningkatan Kapasitas SAR Linmas	3.600.000.000	100	99,43	100	100	100	0	
2.	Peningkatan Sarana Prasarana SAR Linmas	400.000.000	100	92,95	100	100	100	0	
3.	Koordinasi Penanganan Potensi Kerawanan Keamanan	181.190.000	100	99,11	100	100	100	0	
4.	Pengembangan Jaga Warga	800.00.000	100	96,41	100	100	100	0	
5.	Koordinasi Organisasi KemasyarakatanPemuda (OKP), Organisasi Masyarakat (Ormas) danOrganisasiSosialPoliti k (Orsospol)	228.228.900	100	74,68	100	100	100	0	Deviasi keuangan 25,32 % karena: .Penerbitan SKT bagi ormas LSM tidak lagi menjadi kewenang-an gubernur ber-dasarkan keputusan Mahkamah Konstribusi No: 3/PUU-XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 sehingga seluruh belanja pendukung penerbitan SKT tidak direalisasikan .Anggaran sewa gedung tidak direalisasikan karena menggunakan gedung pemerintah
F	**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**457.956.100**	**100**	**97,21**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1.	Penyelenggara an Kerjasama Dengan Satuan Menwa, Ormas, Lembaga Nirlaba Lainnya	7.956.100	100	100	100	100	100	0	
2.	Koordinasi Forum Kemitraan	200.000.000	100	94,84	100	100	100	0	
3.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	250.000.000	100	99,01	100	100	100	0	
G	**Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat**	**484.499.000**	**100**	**90,24**	**100**	**99,79**	**100**	**0**	
1.	Penyelenggara an Pelayanan Rekomendasi Perijinan & Pendaftaran Ormas	20.000.000	100	98,04	100	95,00	100	0	
2.	Koordinasi Pemantauan Orang Asing	25.904.000	100	91,55	100	100	100	0	

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
3.	Koordinasi Cipta Kondusif Daerah	248.595.000	100	84,39	100	100	-	100	Deviasi keuangan 15,61% karena: .Honor Wakil Ketua, Honor Moderator, Belanja sewa ruangan kegiatan PGKDN, P4GN dan Sosialisasi, Honor Narasumber PGKDN tidak direalisasikan karena menyesuai-kan SHBJ .Efisiensi pada Belanja Sewa Gedung. .Efisiensi pada Belanja honorarium narasumber, karena menyesuaikan SHBJ.
4.	Desk Penyelenggaraan Pilkada	190.000.000	100	96,88	100	100	-	100	

Sumber: Bankesbangpol DIY, 2016

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	713,750,000	100	97.02	100	100	97.87	2.13	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,950,000	100	99.95	100	100	100	0	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	82,200,000	100	77.66	100	100	100	0	Menyesuaikan dengan tagihan
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional*	10,000,000	100	93.51	100	100	100	0	Sisa pada belanja KIR karena biaya KIR di bawah pagu anggaran.
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22,500,000	100	100	100	100	100	0	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30,000,000	100	100	100	100	99.74	0.26	
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	34,600,000	100	99.86	100	100	100	0	Tidak direalisasikan karena merupakan duplikasi anggaran dari kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.7	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	30,000,000	100	99.82	100	100	100	0	
1.8	Penyampaian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	100	79.6	100	100	100	0	MCB tidak dibelanja-kan karena sudah *include* dalam pema-sangan instalasi baru dari PLN
1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,250,000	100	100	100	100	100	0	
1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	52,190,000	100	99.99	100	100	81.12	18.88	

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200,000,000	100	99.98	100	100	100	0	Penyediaan Makanan dan Minuman sudah mencukupi, menye-suaikan dengan kebutuhan.
1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja*	237,060,000	100	99.49	100	100	100	0	Efisiensi perjalanan dinas karena kebijakan.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	699,460,000	100	92.23	100	100	100	0.00	
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	400,000,000	100	97.63	100	100	100	0	Menyesuaikan dengan harga pasar.
2.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	35,500,000	100	96.62	100	100	100	0	
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	30,000,000	100	94.5	100	100	100	0	Menyesuaikan dengan harga pasar.
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	188,785,000	100	85.32	100	100	100	0	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas sudah mencu-kupi. Usia kendaraan dinas/ operasional yang masih baru, terdapat efisiensi dalam penggunaan jasa service, suku cadang dan lebih hemat dalam penggunaan BBM.
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	13,125,000	100	87.92	100	100	100	0	Efisiensi dalam pemeliharaan karena kondisi per-lengkapan gedung kantor yang masih dalam kondisi baik.
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	32,050,000	100	62.61	100	100	100	0	Efisiensi dalam pe-meliharaan karena kondisi peralatan gedung kantor yang masih dalam kondisi baik.
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	179,790,000	100	97.43	100	100	0	100	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	179,790,000	100	97.43	100	100	0	100	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	230,000,000	100	100	100	100	100	0	
4.1	Pembinaan Fisik bagi Pol PP	230,000,000	100	100	100	100	100	0	Efisiensi dalam biaya penginapan dan makan peserta Jambore Nasional karena ditanggung oleh panitia
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	68,059,800	100	85.6	100	100	100	0	
5.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	2,797,900	100	100	100	100	100	0	
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD*	6,497,000	100	99.95	100	100	100	0	
5.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	54,066,700	100	81.88	100	100	100	0	Efisiensi perjalanan dinas luar daerah

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
5.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4,698,200	100	100	100	100	100	0	
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	960,464,920	100	95.88.	100	100	63.33	36.67	
6.1	Pemetaan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibumtranmas)	225,000,000	100	91.92	100	100	0	100	
6.2	Optimalisasi Kinerja PPNS	126,712,120	100	98.54	100	100	80	20	
6.3	Penegakan Peraturan Daerah	223,815,800	100	92.38	100	100	100	0	
6.4	Pengendalian Gejolak Sosial Masyarakat	109,939,400	100	100	100	100	100	0	
6.5	Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perbatasan	174,997,600	100	99.56	100	100	100	0	
6.6	Penegakan Peraturan Daerah (cukai)	100,000,000	100	98.25	100	100	0	100	Efisiensi honor tim karena penyesuaian SHBJ.
7	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	255,277,590	100	99.17	100	100	100	0	
7.1	Penyuluhan kepada Masyarakat di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	136,993,220	100	98.76	100	100	100	0	
7.2	Penyuluhan dan Operasi Pencegahan, Pemberan-tasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	118,284,370	100	99.65	100	100	100	0	
8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	99,221,400	100	95.46	100	100	0	100	
8.1	Operasi Pekat	99,221,400	100	95.46	100	100	0	100	
9	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	309,989,650	100	99.69	100	100	100	0	
9.1	Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah	59,999,050	100	98.74	100	100	100	0	
9.2	Pengamanan Aset dan Kegiatan Pemda	249,990,600	100	99.92	100	100	100	0	
	Jumlah	3,516,013,360	100	94.93	100	100	96.06		

Sumber: Satpol PP DIY, 2016

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A. Sub Urusan Otonomi Daerah

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
I	PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	867.959.000	100	92	100	100	100	0	
II	OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	55.000.000	100	95,52	100	100	100	0	
III	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	542.862.625	100	91,82	100	100	100	0	

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2016

B. Sub Urusan Pemerintahan Umum

1. Fasilitas Pemerintahan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
I	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah**	**520.267.925**	**100**	**95.86**	**100**	**100**			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Asosiasi Pemerintahan Daerah	187.282.925	100	90,37	100	100	100		
	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	**542.077.875**	**100**	**72,49**	**100**	**99,85**			
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemda	216.404.875	100	72,49	100	100	100		Berdasarkan radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.094/6957/OTDA tanggal 8 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Common Sense Survey atas LPPD Provinsi/Kabupaten/ Kota. Dalam radiogram tersebu t hanya tiga provinsi yang akan dilakukan Common Sense yakni Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur sehingga anggaran yang sudah disiapkan Biro tata Pemerintahan untuk acara tersebut dikembalikan kepada kas daerah.
	Koordinasi & Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	140.618.000	100	60,31	100	100	-		Perubahan regulasi (undang-undang) terkait penyeleng-garaan pilkada dan pengisian jabatan bupati/wakil bupati. Proses pengganggar-an masih pengacu pada pilkada tidak serentak sehingga proses pengusulan pengesahan peng-angkatan bupati

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									dilaksanakan dalam waktu yang berbeda, namun dengan terbitnya UU no. 8 tahun 2015, bahwa akan dilaksanakan pilkada seentak pada bulan Desember 2015 sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan bupati akan diisi oleh Penjabat Bupati sampai dengan pelantikan bupati/wakil bupati terpilih. Hal ini menyebabkan beberapa anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak terserap.
	Kajian Hari Jadi DIY	130.055.000	100	75,84	100	100	-		Terdapat kekelian obyek belanja, sehingga tidak direalisasikan. Misal seharusnya belanja makan minum khusus namun yang tercantum dapam DPA belanja makan minum harian umum

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2016

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2. Kelembagaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**393.196.150**	**100**	**93,12**	**100**	**98,19**	**100**	**-1,81**	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.270.000	100	51,38	100	100	100	0	Secara fisik terpenuhi, tetapi realisasi keuangan tidak terpenuhi karena belanja materai disesuaikan dengan kebutuhan pencairan SPD.
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	1.750.000	100	93,49	100	100	100	0	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	23.649.000	100	99,75	100	100	100	0	
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.100.000	100	0	100	0	100	-100	Kegiatan tidak direalisasikan dikarenakan kegiat-an ini oleh TAPD dianggap duplikasi dengan kegiatan Biro Umum Setda DIY dan tidak bisa dihapus.
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.811.000	100	95,01	100	100	100	0	
1.6	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	14.604.150	100	99,94	100	100	100	0	
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.412.000	100	99,97	100	100	100	0	
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.200.000	100	97,61	100	100	100	0	
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	45.900.000	100	84,09	100	100	100	0	
1.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	266.500.000	100	95,98	100	100	100	0	
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**576.808.800**	**100**	**91,71**	**100**	**100**	**100**	**0**	
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	431.560.000	100	97,30	100	100	0	100	Kegiatan tidak ada di tahun 2014
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	17.100.000	100	98,49	100	100	100	0	
2.3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	95.148.800	100	64,15	100	100	100	0	
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	33.000.000	100	94,49	100	100	100	0	
3	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**59.625.000**	**100**	**95,59**	**100**	**100**	**100**	**0**	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	3.950.000	100	96,58	100	100	100	0	
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	15.000.000	100	92,53	100	100	100	0	
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	36.000.000	100	96,19	100	100	100	0	
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4.675.000	100	99,99	100	100	100	0	
4	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH**	**4.055.822.925**	**100**	**71,21**	**100**	**83,63**	**0**	**83,63**	**Kegiatan redesain mulai tahun 2015, tidak bisa disban-dingkan dengan kegiatan tahun 2014**
4.1	Rumusan Kebijakan Kelembagaan	374.258.000	100	95,01	100	100	0	100	
4.2	Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan	916.100.000	100	91,57	100	100	0	100	
4.3	Rumusan Kebijakan Pelayanan Umum	669.410.525	100	95,08	100	100	0	100	
4.4	Implementasi Budaya Pemerintahan	124.326.400	100	99,12	100	100	0	100	
4.5	Penyelenggaraan Munas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	1.013.853.000	100	0,95	100	1,80	0	1,80	Di akhir tahun pelaksanaan FORSESDASI diambil alih KEMENDAGRI dan dilaksanakan di Jakarta
4.6	Perumusan Kebijakan Penataan SDM Aparatur	957.875.000	100	96,52	100	100	0	100	
	JUMLAH	**5.085.452.875**	**100**	**87,90**	**100**	**95,45**			

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2016

3. Fasilitas Perundang-Undangan dan Hukum

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**366,719,375**	**100**	**97.9**	**100**	**100**			
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,916,000	100	95.52	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Melaksanakan administrasi surat masuk 4.186 buah dan surat keluar 3.018 surat, pengiriman dokumen 16 buah dan pembelian : Meterai 6.000 sebanyak 134 lembar, Meterai 3.000 sebanyak 261 lembar, Buku Cek 3 buku **Faktor penghambat: - Faktor pendukung: -**

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4,324,500	100	59.95	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** - Melaksanakan inventarisir perijinan kendaraan dinas/operasional - Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 Nomor AB 41 tgl 14 Mei 2015 - Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 Nomor AB 1936 UH tgl 13 Mei 2015 - Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 Nomor AB 1570 UA tgl 8 Juli 2015 - Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 AB 1094 UA tgl 30 September 2015 - Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 AB 2970 IS tgl 18 Oktober 2015 - Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 AB 2493 IS tgl 19 Desember 2015 - Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 AB 2494 IS tgl 19 Desember 2015 **Faktor penghambat: -** **Faktor pendukung: -**
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	20,504,000	100	100	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah dilaksanakan pembayaran kepada petugas administrasi keuangan sebanyak 12 orang selama 12 bulan **Faktor penghambat: -** **Faktor pendukung: -**
1.4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	23,800,000	100	100	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:**

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Telah dilaksanakan servise peralatan kerja sebanyak 72 buah terdiri dari service komputer 23 unit (LCD 8 kali, CPU 22 kali), service printer 20 unit, service AC dan peralatan lainnya 22 unit **Faktor penghambat: -** **Faktor pendukung: -** **Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:**
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	27,396,000	100	98.25	100	100			Telah dilaksanakan pembelian alat tulis kantor sebanyak 4 x , terdiri dari 38 jenis antara lain buku register, kertas HVS, Bolpoin dsb **Faktor penghambat: -** **Faktor pendukung: -** **Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:**
1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35,962,500	100	100	100	100			Telah dilaksanakan pengadaan barang cetak sebanyak 4 x 12 jenis antara lain lembar disposisi, amplop, kertas barcode dan fotocopy bahan rapat **Faktor penghambat: -** **Faktor pendukung: -** **Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:**
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,295,000	100	100	100	100			Telah dilaksanakan pembelian alat listrik dan elektronik sebanyak 5 (lima) jenis **Faktor penghambat: -** **Faktor pendukung: -** **Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:**
1.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15,100,000	100	98.1	100	100			Melaksanakan:

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									A. Langganan Surat Kabar dan Majalah terdiri dari Surat Kabar KR selama 12 bulan, Jawa Pos selama 9 bulan, dan Warta Perundang-undangan selama 12 bulan B. Pembelian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 65 (enam puluh lima) buku : 1. UU RI No 5 Th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. UU RI No 30 Th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP RI no 27 Th 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 3. Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Th 2013 Jilid 3 4. Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Th 2013 Jilid 4 5. UU RI No 22 Th 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 6.Peraturan pemerintah pengganti undang No 2 Th 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah 7. PP No 43 Th 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Th 2014 tentang Desa 8. Pedoman Peraturan Petunjuk Teknis Pemerintahan Desa 9. UU Kesehatan dan keperawatan

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
8				3					10. Perpres No 4 Th 2015 ttg Perubahan Keempat atas Perpres No 54 Th 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11. UU RI No 1 Th 2015 ttg Penetapan Perpu No 1 th 2014 ttg Pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU (2 Buku) 12. Hukum Perumahan (Dr. Urip Santoso, SH, MH) 13. Kebijakan Hukum Pertanahan (Dr. Widhi Handoko, SH, SPN) 14. Hukum Pertambangan di Indonesia (Dr.H.Salim HS, SH, MS) 15. Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata (Dr.HM.Fauzan, SH. MM.MH) 16. Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 (R. Soeroso,SH) 17. Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4 (R. Soeroso,SH) 18. Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 5 (R. Soeroso,SH) 19. Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 6 (R. Soeroso,SH) 20. Hukum Administrasi Negara (Dr.IR.H.Juniarso Ridwan,MSi,MH) 21. Hukum Tata Negara (Titik Triwulan Tutik,SH,MH) 22. Politik Pertanahan (Bernhard Limbong)

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									23. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik (B.Hestu Cipto Handoyo) 24. Panduan Resmi Hak Clpta (Tim Visi Yustisia) 25. Panduan Penyusunan dan Penilaian SKP (Sasaran KErja Pegawai) Untuk PNS 26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi 27. Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Prepres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 28. Himpunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pemerintahan Desa 29. Hukum Lingkungan Kehutanan (H.Joni SP, SH, MH) 30. Penerapan Teori Hukum (DR.H.Salim HS,SH,MS dan Erlies Septiana Nurbani,SH,LLM) 31. Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI (DR.Ni'matul Huda, SH, Mhum) 32. Pengantar Hukum (Prof.DR.Lalu Husni, SH,M.Hum) 33. Kamus Hukum ('Drs.M.Marwan, SH dan Jimmy P, SH) 34. Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									35. HPPRI Tahun 2014 Jilid I 36. HPPRI Tahun 2014 Jilid II 37. Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia (Efa Laela Fakhirah) 38. Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik) (DR. Anita Kamilah, SH,MH) 39. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah (Ir.Herman Hermit,MT) 40. Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah (Sudjarwo Marsoem, Wahyono Adi, Pieter G Manopo) 41. Teori Kriminologi (J.Robert Lilly, Richard A.Ball, Francis T Cullen) 42. Hukum Penyelesaian Sengketa Medis (Dr. Siska Elvandari, SH,MH) 43. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal (Dr.Siti Aminah) 44. Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi (Prof.Dr.H.Abdul Latif,SH,MH) 45. Penyelesaian Sengketa Arbitrase (Dr.Susanti Adi Nugroho,SH,MH) 46. Teori Hukum Kontemporer (Prof.A.Mukthie Fadjar,SH,MH) 47. Hukum Pemerintahan Daerah (Lukman Santoso Az)

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									48. Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum (DR.Muhammad taufiq,SH,MH) 49. Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam (Dr.H.Syamsulbahri Salihima,SH,MH) 50. HPPRI Tahun 2014 Jilid III 51. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Taufiqurrohman Syahuri) 52. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia (Davip Kairupan,SH,LLM) 53. Pembatasan Kekuasaan Presiden (Dr. Margarito Kamis,SH,MHum) 54. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Majda El Muhtaj) 55. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus (Suharnoko,SH, MLI) 56. Hukum Pidana Perpajakan (Dr.Simon Nahak,SH,MH) 57. Pergeseran Turut Serta dalam Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Muhammad Ainul Syamsu,SH,MH) 58. Hak Asasi Tersangka Pidana (59. Aspek Hukum Dalam Penelitian (Rianto Adi) 60. Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan (Dr.Chomariyah,SH,MH) 61. UU RI No 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilengkapi UU RI No 22 Th 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wa;ilota serta UU RI No 20 Th

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 62. Konstitusi Hukum dan Respon masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal (Dr.H.Mashudi,M. Ag) 63. Hak Atas Kekayaan Intelektual (Adrian Sutedi,MH) 64. Perolehan Hak Atas Tanah (Dr.Urip Santoso,SH,MH) 65. Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Mudakir Iskandar Syah,SH,MH) **Faktor penghambat:** - **Faktor pendukung:** -
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	15,960,000	100	99.84	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah dilaksanakan pembelian hidangan rapat 40 kali extra fooding 12 kali **Faktor penghambat:** - **Faktor pendukung:** -
1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	218,461,375	100	97.7	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 23 kali dan luar daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 49 kali **Faktor penghambat:** - **Faktor pendukung:** -
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**365,833,625**	**100**	**92.9**	**100**	**100**			

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	185,000,000	100	97.57	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah dilaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa 1 (satu) unit mobil dengan Merk Toyota Avanza 1.3 Luxury dengan Perjanjian Nomor 027/1276 tanggal 17 April 2015, sebagai penyedia PT. Nascomo Bahana Motor Alamat Jalan Ring Road Selatan Tamantirto Kasihan Bantul **Faktor penghambat:** - **Faktor pendukung:** -
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	24,550,200	100	99.47	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah dilaksanakan Pengadaan Peralatan Gedung berupa Komputer PC sebanyak 2 buah, Notebook 1 unit, dan Scanner 1 unit dengan SPK Nomor 027/00918 tanggal 20 Maret 2015 **Faktor penghambat: Faktor pendukung:**
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3,250,000	100	97.11	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah dilaksanakan pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 4 x 12 (dua belas) buah antara lain pembersih kaca, pengarum ruangan, parfum mobil, obat nyamuk, tissu dan sebagainya. **Faktor penghambat: Faktor pendukung:**

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	113,433,425	100	81.26	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah dilaksanakan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional antara lain service 30 kali (12 kali untuk motor, 18 kali untuk mobil), pembelian BBM sebanyak 12 kali, pelumas 23 kali, serta kelengkapan kendaraan dinas/operasional 18 kali. Untuk realisasi keuangan tidak sesuai dengan target, karena 1 kendaraan dinas baru bisa dioperasionalkan pada bulan April 2015 (Pengadaan) **Faktor penghambat: Faktor pendukung:**
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka	39,600,000	100	100	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah dilaksanakan pemeliharaan berupa fumigasi ruang perpustakaan Biro Hukum tahap pertama pada tanggal 12 s/d 15 Juni 2015 selama 4 (empat) hari dan tahap kedua pada tanggal 20 s/d 23 Nopember 2015 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 027/1927 tanggal 12 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa CV. Tri Hasta **Faktor penghambat: Faktor pendukung:**
3	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**37,911,000**	**100**	**97.62**	**100**	**100**			

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	1,800,000	100	100	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk menyusun laporan kinerja SKPD dan pembelian ATK, penyusunan Lakip **Faktor penghambat:** **Faktor pendukung:**
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3,750,000	100	100	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk menyusun laporan keuangan Biro Hukum, laporan bulanan dan semesteran **Faktor penghambat:** **Faktor pendukung:**
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	30,061,000	100	97	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah dilaksanakan rapat koordinasi, pemberian honor penyusun rencana program kegiatan dan pengembangan data dan informasi pembelian ATK dan Penggandaan dalam rangka penyusunan RKT, PK dan Draft Renstra Instansi **Faktor penghambat:** **Faktor pendukung:**
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	2,300,000	100	99.99	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi program kegiatan biro hukum Foto copy dan penggandaan bahan monev Pembelian ATK **Faktor penghambat:**

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Faktor pendukung:
4	**PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**1,621,236,250**	**100**	**98.39**	**100**	**100**			
4.1	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1,053,636,500	100	98.63	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Melaksanakan: 1. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pergub dan Produk Hukum Lainnya sebanyak 87 Peraturan Gubernur, 308 Keputusan Gubernur dan 6 Instruksi Gubernur (401 produk) 2. Pengharmonisasian, dan Pemantapan Raperda sebanyak 6 Raperda yaitu: a. Raperda tentang Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah b. Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha c. Raperda Perubahan atas Perda No 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana d. Raperda tentang Perubahan Raperda Jasa Umum e. Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangannya f. Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak 3. Pembahasan Raperda di DPRD sebanyak 19 Raperda yaitu: 1) Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 2) Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa; 3) Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4) Raperda tentang Pelestarian Habitat Alami 5) Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 6) Raperda tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 7) Raperda tentang Pengembangan Transportasi Wilayah 8) Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak 9) Raperda tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial 10) Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan 11) Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									12) Raperda tentang Nomenklatur DIY dan Penggunaannya 13) Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DIY 14) Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Asuransi Bangun Askrida 15) Rancangan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD DIY terhadap Rancangan Perubahan Kelima Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah DIY dengan PT. Jogja Tugu Trans 16) Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 17) Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 18) Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Tahun Anggaran 2015 19).Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 4. Rapat Koordinasi Teknis Rapergub tentang Pemeriksaan Keuangan SKPD melalui SIPKD, Rakornis tentang Tuntuan Perbendaharaan dan Tuntuan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah pada tanggal 21 September 2015, Rakornis Rapergub tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Situasi Bencana pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan peserta 20 (dua puluh) orang, pengharmonisasian pergub tentang Tata Kelola RS Grhasia, Standarisasi Harga Barang dan Jasa, Perubahan Pergub No 35 Tahun 2014 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas, dan Pergub tentang Akuntansi Pemerintah Daerah **Faktor penghambat:** Draf Rancangan produk hukum daerah dari instansi pengusul seringkali berubah-ubah sehingga penyusunan produk hukum menjadi lebih lama **Faktor pendukung:** Kerjasama dengan instansi lain terjalin dengan baik

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
4.2	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	205,192,500	100	96.03	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** 1. Telah disusun rekomendasi kebijakan pembangunan hukum sebanyak 8 buah yaitu antara lain tentang Vandalisme, Perda RPJMD, Kewenangan Urusan dan Kebijakan Hukum tentang Kerangka Umum dan Arah Kebijakan Kebudayaan di DIY, Pembentukan Lembaga Pembiayaan Petani, Urusan Pemerintahan yang Beralih dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau dari Provinsi ke Kabupaten/Kota 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 20 produk hukum yaitu a. Pergub Nomor 2 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengaduan Layanan Perizinan pada Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu b. Pergub Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tugas & Fungsi SKPD dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan c. Pergub Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan d. Pergub Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah & Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									e. Keputusan Gubernur Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan f. Pergub Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabillitas g. Pergub Nomor 12 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Provinsi yang Mempunyai Redaksi Sama Dengan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota h. Pergub Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Tanah i. Pergub tentang Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana j. Pergub Nomor 14 Tahun 2014 tentang Standar Kebutuhan Penyandang DIsabilitas k. Pergub Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan, Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan l. Pergub Nomor 2 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan pada Gerai Pelayanan dan Perizinan Terpadu BKPM m.Pergub Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									n. Pergub Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas o. Pergub Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana pada saat terjadi Bencana p. Penyusunan Rencana pembangunan & pengembangan Perumahan & Kawasan Pemukiman q. Penyusunan Perda Perlindungan Perempuan & Anak r. Penyusunan Raperda tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial s. Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana t. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Asuransi Bangun Askrida u. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah v. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Perdais **Faktor penghambat:** **Faktor pendukung:**
4.3	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	362,407,250	100	99.03	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:**

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									1. Telah dilaksanakan Pembinaan JDI hukum sebanyak 5 kali yaitu : a. Kota Yogyakarta tanggal 18 Pebruari 2015 b. Kab Bantul tanggal 25 Pebruari 2015 c. Kab Kulonprogo tanggal 5 Maret 2015 d. Kabupaten Gunungkidul tanggal 16 April 2015 e. Kabupaten Sleman tanggal 16 April 2015 2. Pengembangan Website berupa upload produk hukum sebanyak 260 produk hukum 3. Terlaksananya penggandaan produk hukum daerah dan produk hukum pusat 5. Terlaksananya penjilidan produk hukum daerah dan produk hukum pusat 6. Rapat koordinasi JDI Hukum 7. Rapat Pengelolaaan JDI Hukum 8. Rapat Koordinasi Legal Expo 9. Terlaksananya Pengadaan Penggandaan dan Penjilidan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2015 sesuai dengan SPK No. 027/ 1556 tanggal 11 Mei 2015 Penyedia Jasa UD Pelangi 10. Terlaksananya Pengadaan Pencetakan dan Penjilidan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Tahun 2015 sesuai dengan SPK No. 027/1553. tanggal 11 Mei 2015 Penyedia Jasa PD Lukman Offset

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									11. Terlaksananya Upgrading Website Biro Hukum sesuai SPK 027/1717 tanggal 26 Mei 2015 Penyedia Jasa PT. Indotech Medialink 12. Terlaksananya Legal Expo 2015 di Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 26 sampai 27 Oktober 2015 13. Terlaksananya Pengadaan Pengembangan Aplikasi JDI Hukum Dalam CD Interaktif Produk Hukum Daerah sesuai SPK Nomor 027/3550 tanggal 6 Nopember 2015 Penyedia jasa PT.Indotech Medialink **Faktor penghambat:** **Faktor pendukung:**
5	**PROGRAM FASILITASI BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM**	**2,314,522,275**	**100**	**93.21**	**100**	**100**			
5.1	Penyelesaian Permasalahan Hukum	478,215,000	100	85.42	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** Telah melaksanakan: 1. Penyelesaian Sengketa sebanyak 3 kasus yaitu berkaitan dengan: a. Sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor Perkara 08/G/2015/PTUN. YK. antara IR. Victorius Budi Direktur PT. Binneka Citra Utama (Penggugat) melawan Andi Kurniawan Dharma, ST. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Paket Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPDK)

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									DIY (Tergugat). Telah diadakan pencabutan gugatan oleh penggugat karena patut dikabulkan. b. Penyelesaian Penggunaan Tanah Kas Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman oleh Yayasan PPKP Yogyakarta tentang Gugatan Bondan Danu Kusuma, SE c. Sidang di PTUN Yogyakarta yang berkaitan dengan Nomor Perkara 07/G/2015/PTUN. YK.atas nama Sumadi, dkk (Selaku Penggugat) dengan obyek gugatan Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Rapat Koordinasi dengan instansi terkait. 3. Memantau Memori Kasasi yang diajukan Gubernur DIY ke Mahkamah Agung RI terhadap Perkara Nomor 07/G/2015/PTUN. YK.atas nama Sumadi, dkk (Selaku Penggugat) dengan obyek gugatan Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									4. Surat Jawaban Data penanganan perkara litigasi, non litigasi dan pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang terkena perkara tindak pidana yang ditangani pemerintah daerah kabupaten/kota 5. Memori Kasasi yang diajukan Gubernur DIY ke Mahkamah Agung RI terhadap Perkara Nomor 07/G/2015/PTUN. YK.atas nama Sumadi, dkk (Selaku Penggugat) dengan obyek gugatan Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diputuskan oleh MA 6. Penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum 7. Mempersiapkan jawaban uji materi guna membuat jawaban ke Mahkamah Agung atas permohonan keberatan (hak uji materiil terhadap Instruksi Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/75, tgl 5 Maret 1975, sebagaimana terdaftar dalam register Kepaniteraan Mahkamah Agung Nomor 13.P/HUM/2015 tanggal 26 Februari 2015) **Faktor penghambat:**

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									- Khusus Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung) untuk putusan/penerima an putusannya tidak bisa diprediksi. **Faktor pendukung:** - Koordinasi antar instansi berjalan dengan baik.
5.2	Layanan Hukum Masyarakat	1,836,307,275	100	95.24	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** I. Rekomendasi layanan hukum sebanyak 3 rekomendasi yaitu tentang HAKI, HAM dan Forum Dilkehjapol (Pengadilan Kehakiman dan Kepolisian) II. Keputusan Gubernur tentang Ijin Tanah Kas Desa sebanyak 69 buah antara lain yaitu: a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintahan Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul Menyewakan Tanah Kas Desa kepada Yayasan Asram untuk Pembangunan Pengembangan Pendidikan SD Al Azhar 38 b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman untuk Melepaskan Tanah Kas Desa Sebagai Pengganti Tanah Milik Saidi, Kartini, Rahmad Badawi, dan

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Subarjo/Hadi Purwanto yang dipergunakan untuk Pembangunan Sekolah Dasar Negeri Inpres Nganggrung. c. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Sarana Pendidikan SLB Negeri 2 Gunungkidul Di Desa Playen, Kabupaten Gunungkidul. d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Jalan Legundi-Planjen di Desa Girisekar dan Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kab Gunungkidul e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Gapura dan Ruang Terbuka Hijau/Taman di Perbatasan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta - Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah di Desa Candirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta. g. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Pasar Niten di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. h. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Pengembangan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul. i. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Surat Izin/ Rekomendasi/Persetujuan Hak Atas Sebidang Tanah dan Bangunan Milik Internasional Daerah Istimewa Yogyakarta. j. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman kepada Pemerintahan Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman untuk Pembangunan Gedung Balai Rukun Warga.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									k. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman kepada Pemerintahan Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman untuk Pembangunan Barak Pengungsian. l. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman kepada Pemerintahan Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman untuk Pembangunan Embung Barepan. m. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Duwet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada Sekar Dewi Nawang Wulan untuk Pembangunan Apotik.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									n. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. o. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Peningkatan Jalan Sogan â€“ Karangwuni Kecamatan Wates, Kabupaten KUlon Progo. p. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Gapura dan Ruang Terbuka Hijau /Taman di Perbatasan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta â€“ Kabupaten Klaten Jawa Tengah di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. q. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Pelestarian dan Pengembangan Candi Kedulan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									r. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Rejodani di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. s. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Nomporejo, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo untuk Melepaskan Tanah Kas Desa Kepada pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). t. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian izin Kepada Pemerintah Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo untuk Melepaskan Tanah Kas Desa. Kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). u. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. v. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Legundiâ€“Planjan di Desa Girisekar dan Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. w. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah bagi pembangunan Pengembangan Jaringan Irigasi di Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.. x. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Pelestarian dan Pengembangan Candi Kedulan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman y. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman untuk

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Sleman untuk pembangunan Puskesmas Rawat Inap Berbah. z. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian izin Kepada Pemerintah Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa. kepada PT. Inti Hosmed untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Pertanian Modern Kawasan Malioboro City. aa. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Wonokerto, Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Melepaskan Tanah Kas Desa kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman untuk Pembangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi. bb. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada Yayasan Putra Perkasa Mandiri untuk Pembangunan Kampus Sekolah Menengah Kejuruan Dirgantara Putra Bangsa.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									cc. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintahan Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT. Saraswanti Indoland Development untuk Pembangunan Lahan Parkir dan Area Bermain. dd. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul kepada Pemerintah Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul untuk Pembangunan Lapangan Olah Raga. ee. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. ff. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pelebaran Jalan

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Ruas Batas Kota Sleman â€“ Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. gg. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Pelebaran Ruas Batas Kota Sleman â€“ Batas Kota Yogyakarta di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. hh. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Bangunan Rumah Joglo di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. ii. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Peningkatan Jalan Slanden â€“ Sendangsono di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. jj. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Bagi

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. kk. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Situs Pleret di Desa Pleret, Kabupaten Bantul. ll. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Candi Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. mm. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Margosari â€“ Kasatriyan di Kabupaten Kulon Progo. nn. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupatyen Sleman. oo. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Situs Pleret di Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. pp. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Peningkatan Jalan Dudukan â€“ Ngentakrejo di Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Bulan Nopember: 1) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT Sinar Putra Gemilang untuk Pembangunan Gudang dan Kantor; 2) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada Saudara Setiyo Nugroho untuk Pembangunan Pertokoan, Kuliner, dan Home Stay Klebengan Centre;

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									3) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, untuk Melepaskan Tanah Kas Desa kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, untuk Pembangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan; 4) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, untuk Melepaskan Tanah Kas Desa sebagai Pengganti Tanah Milik Painem dkk, yang Digunakan untuk Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sleman, Pasar, Lapangan Denggung, dan Lapangan Tridadi; 5) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51/IZ/2014 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, untuk Melepaskan Tanah Kas Desa

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									sebagai Pengganti Tanah Milik Almarhum Karijoredjo; 6) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT Karya Jasa Transport untuk Pembangunan Tempat Usaha Jasa Transportasi; 7) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada BRAy. Hj. Nuraida Joyokusumo untuk Pembangunan Akses Jalan; 8) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pengembangan Fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Karangjati;

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									9) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada PT Sumber Baru Land untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman dan Lapangan Tenis; 10) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/IZ/2014 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada CV Milan Persada; 11) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul untuk Melepaskan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Penataan Alun-alun Paseban; 12) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Srihardono,

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada Saudara Rudy Untoyo untuk Pembangunan Pusat Oleh-oleh dan Ruang Promo Makanan Olahan Produksi Srihardono; 13) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada Saudara R.H. Bambang Waseso, untuk Pembangunan Rumah Makan, Taman, Sarana Olah Raga dan Arena Permainan; 14) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul untuk Menyewakan Tanah Kas Desa kepada Sekolah Menengah Atas Negeri I Pundong, untuk Pembangunan Fasilitas Pendidikan; 15) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									untuk Melepaskan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Bambanglipuro; 16) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Wareng, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, untuk Melepaskan Tanah Kas Desa sebagai Pengganti Tanah Milik somo wakiyem yang digunakan untuk Pembangunan Sekolah Dasar Negeri Siraman IV; 17) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Bangunan Rumah Joglo di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul; 18) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman; 19) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Jerukwudelâ€"Baranâ€"Duwet di Desa Karangwuni, Desa Semugih, Desa Melikan, Kecamatan Rongkop, dan Desa Jerukwudel, Desa Nglindur, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul; 20) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jembatan Nguwot di Desa Gading, Kecamatan Playen, dan Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul; 21) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pelestarian Bentang Alam Karst Gua Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul; 22) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Peningkatan Jalan Pasar Sentolo (Ngeseng)"Ngelo di Kabupaten Kulon Progo;

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									23) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Penataan Kawasan Alun-alun Paseban Kabupaten Bantul di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul; 24) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul; 25) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pengembangan Kantor Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta; 26) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta; 27) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									untuk Pembangunan Fasilitas Sosial Balai Kampung RW 4, Kalangan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta; 28) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Menuju Kantor Kelurahan Wirogunan, dan Puskesmas Mergangsan, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta; 29) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Situs Masjid Kauman di Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul; 30) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									31) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta; 32) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta; 33) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kampung Ponggalan, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta; 34) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kampung Mrican,

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta; 35) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Pendekat (Oprit) Jembatan Lemahbang di Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman; 36) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perluasan Lahan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Sleman di Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman; 37) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perluasan Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kalasan di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman; 38) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									untuk Land Banking di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman; 39) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Peningkatan Jalan Slandenâ€“Sendangsono di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo; 40) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Wisata Pantai Ngrenehanâ€“Ngobaran di Desa Kepekâ€“Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul; 41) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Keputusan Gubernur tentang Tanah Kas Desa sebanyak 37 produk pada bulan Desember 2015

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									II. Keputusan Gubernur tentang Koperasi sebanyak 41 buah yaitu : a. Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Surat Izin Simpan Pinjam Koperasi Salman Al Farisi. b. Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin untuk Membuka Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Setia Kawan. c. Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sentosa, alamat Krapyak RT 05 RW 19, Desa Tiharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. d. Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Mukti Abadi, alamat Diro, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. e. Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk Membuka Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo RT 13 RW 05, Mlati Dukuh, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									f.Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Konsumen Inter Koneksi Jalan Wakhid Hasyim Nomor 95 - 97 RT 020 RW 003, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. g.Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta untuk Membuka Kantor Cabang Usaha Simpan Pinjam di Siyono Kidul, Desa Logandeng, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. h.Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta untuk Membuka Kantor Cabang Usaha Simpan Pinjam di Madusari, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. i. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Produksi Jamur Merekah Gulan-Gulan RT 03, Pinggir, Desa

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. j. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam GARUDA (Garda Usaha dan Dana) k. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam â€ Bhakt l. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kredit Amrih Makmur. m. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta (KP3Y). n. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam CU Dharma Bakti.o. o. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Puskopdit Jatra Miguna. III. Keputusan Gubernur tentang Ijin Gubernur sebagai Pelindung sebanyak 24 buah yaitu:

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									a. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Keluarga Sakinah Teladan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. b. Surat Jawaban Gubernur kepada Ketua Pelaksana HUT Kedai Kopi Espresso Bar dalam rangka Pelaksanaan HUT Kedai Kopi Espresso yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2015. c. Permohonan rekomendasi usulan penerima penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial DDS 100X, PMI DIY Tahun 2015. d. Telaah staf perihal pemberian penghargaan kepada Pengurus Yayasan Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemerintah Daerah DIY e. Surat Jawaban Gubernur kepada Kepala Dinas Pariwisata DIY, Kepala Dinas Parindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY dan Kepala Dinas Kebudayaan DIY tentang permohonan Gubernur sebagai Pelindung kegiatan dan meresmikan Event KUSTOMFEST 2015. f. Surat Jawaban Gubernur DIY menyampaikan dukungan terhadap rencana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada yang akan menyelenggarakan Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional ALSA Indonesia Piala Mahkamah Agung XIX.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									g. Surat Jawaban Pembina Yayasan Kesejahteraan Pekerja dan Pegawai Pemda DIY tentang pemberian penghargaan/uang kehormatan kepada pengurus yayasan yang telah berakhir periode masa baktinya. h. Tindak lanjut surat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tentang Calon Anggota Komisi Informasi Daerah dari Unsur Masyarakat dan Unsur Pemerintah. i. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kegiatan Pengembaraan Desember Tradisional XLIV Rute Pangsar Jendral Sudirman, 19â˜22 Desember 2015 2. Rapat Koordinasi Layanan Hukum dengan instansi terkait. 3. FGD Fasilitasi Layanan Hukum dengan Materi Penyelenggaraan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Tentang Izin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan pada tanggal Rabu, 17 Juni 2015 dilaksanakan di Balai Pengujian, Informasi Pemukiman dan Bangunan dan Pengembangan Jasa Konstruksi Jalan Kenari Nomor 14 A Yogyakarta.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Dengan Narasumber bapak Dewo Isnu Broto I.S., S.H. Kepala Biro Hukum Setda DIY yang dihadiri oleh 30 orang terdiri dari Instansi Terkait dan Masyarakat, FGD Implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015â˜2019, pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan Narasumber Ridwanto, S.H., M.Hum. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Hukum dan HAM DIY dan Dewo Isnu Broto IS., S.H. Kepala Biro Hukum Setda DIY. Peserta 30 orang yang terdiri dari instansi terkait DIY. 4. Rapat-Rapat Koordinasi kelembagaan LO DIY 5. Sosialisasi melalui media Tribun Jogja tentang bulan aduan bidang properti 6. Mengadakan kerjasama/ jaringan dengan instansi/ masyarakat yaitu: a. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru b. Kerjasama dengan Tribun Jogja dalam even Car Free Day tanggal 14 Juni 8. Persiapan penerbitan buletin, dan selesai tercetak 200 eksemplar buletin Pawartos LO DIY 9. Produk akhir LO DIY sebanyak 103

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Faktor penghambat: - Dokumen pendukung kurang lengkap - Kurangnya koordinasi antar instansi terkait. - Sasaran rapat yang hadir tidak tepat selalu berganti. - Pencairan Dana tidak tepat. **Faktor pendukung:** - Aturan Jelas.
6	**PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM**	**533,918,400**	**100**	**98.77**	**100**	**100**			
6.1	Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	533,918,400	100	98.77	100	100			**Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:** 1.Konsultasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota sebanyak 61 Surat Keputusan antara lain adalah tentang : a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penanggulangan Kemiskinan d. Raperda Kabupaten Gunungkidul tetnang Penyelenggaraan Pendidikan; e. Raperda Kabupaten Gunungkidul tetnang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Kabupaten Gunungkidul Radio Swara Dhaksinarga FM;

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									f. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah g. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; h. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; i. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja j. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Kawasan Tanpa Rokok; k. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul; l. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penanggulangan Bencana

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									m. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; n. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025; o. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas; p. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; q. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; r. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. s. Raperda Kab. Sleman tentang RIPPARDA Kab. Sleman Tahun 2015-2025;

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									t. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Urusan Pemerintahan Daerah; u. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang; v. Raperda Kab. Gunungkidul tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; w. Raperda Kab. Gunungkidul tentang Pengelolaan Pasar; x. Raperda Kota Yogyakarta tentang Izin Gangguan; y. Raperda Kab. Sleman tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah; z. Raperda Kab. Sleman tentang Pengelolaan Cagar Budaya aa. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter bb. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Tertib Administrasi Kependudukan cc. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Desa; dd. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2015 -2025; ee. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2012 tentang

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; ff. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; gg. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; hh. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota sebanyak 3 Surat Keputusan : a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 3.Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota sebanyak 52 Surat Keputusan antara lain tentang:

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara d. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah Desa; f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; g. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									h. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa; j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa; k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa. m. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; n. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; o. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									p. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. q. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; r. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame; s. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025; t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha; u. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa; v. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									w. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan. x. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul. y. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga FM. z. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup aa. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana; bb. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok; cc. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibandingkan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									dd. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas 4. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring hasil konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul, Perjalanan dinas dalam rangka monitoring hasil konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul. **Faktor penghambat:** instansi teknis tidak memberikan saran dan masukan terhadap raperda dan perda terkait **Faktor pendukung:** adanya bantuan dari legal drafter kemenkumham DIY dalam mengkaji raperda dan perda
	Jumlah	**5,240,140,925**	**100**	**95.72**	**100**	**100**			

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2016

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4. Fasilitas DPRD

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,796,015,200	100	92.84	100	100	100	0	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,599,000	100	83.82	100	100	100	0	Pengiriman dokumen direalisasi sesuai kebutuhan
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	833.951.000	100	89.17	100	100	100	0	Pembayaran rekening sesuai dengan tagihan
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	32.753.750	100	95.01	100	100	100	0	
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56.425.000	100	94.50	100	100	100	0	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	332.114.400	100	91.25	100	100	100	0	
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor*	49.762.700	100	98.33	100	100	100	0	
1.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.707.500	100	97.85	100	100	100	0	
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60.456.200	100	99.07	100	100	100	0	
1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	158.020.000	100	94.93	100	100	100	0	
1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	106.860.000	100	80.18	100	100	100	0	Keggiatan peng-amanan unjuk rasa sifatnya antisipasi, menyesuaiakan unjuk rasa yang masuk
1.12	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	65.647.650	100	99.47	100	100	100	0	
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	634.441.000	100	94.07	100	100	100	0	
1.14	Penyediaan Retribusi Sampah	1,440,000	100	100	100	100	100	0	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.092.340.800	100	86.42	100	100	100	0	
2.1	Pengadaan Mobil Jabatan	301.280.000	100	100	100	100	-	100	
2.2	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	3.957.950.000	100	85.63	100	100	-	100	
2.3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor*	428.272.000	100	87.75	100	100	100	0	Selisih Harga Lelang.
2.4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*	71.933.000	100	97.87	100	100	100	0	
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	192.894.850	100	97.63	100	100	100	0	
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	884.537.950	100	80.93	100	100	100	0	Penggunaan BBM dan suku cadang sesuai kebutuhan

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor*	188.473.000	100.0	89,56	100	100	100	0	Pemeliharaan air bersih, operasional genset sesuai kerusakan, penggunaan BBM dan oli genset sesuai kebutuhan
2.8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	67.000,000	100	82,17	100	100	100	0	Efisiensi Pemeliharaan alat kantor dan alat studio.
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	392.3480.000	100	96.80	100	100	98.94	1.06	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	374.609.900	100	96.68	100	100	98.91	1.09	
3.2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	17.738.100	100	99.35	100	100	100	0	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	243.750.000	100	93.25	100	100	90.63	9.37	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan	243.750.000	100	93.25	100	100	90.63	9.37	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN	195.415.500	100	99.99	100	100	100	0	
5.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	8.305.100	100	99.99	100	100	100	0	
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	59.819.99	100	94.34	100	100	100	0	
5.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi*	114.817.500	100	93.37	100	100	100	0	
5.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	12.473.000	100	97.16	100	100	100	0	
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	30.340.305.700	100	87.81	100	95.57	86.99	8.58	
6.1	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD*	1.019.256.000	100	86.58	100	86.58	65.00	21.58	Sejumlah 22 orang anggota tidak mengikuti Bimtek.
6.2	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan.	879.856.000	100	86.54	100	100	97.14	2.86	FGD dan Workshop masing-masing 3x tidak dilaksanakan karena padatnya agenda.
6.3	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Dewan dan Fraksi*	135.726.400	100	85.40	100	100	100	0	Seminar kit tidak dibelanjakan karena disesuaikan dengan SHBJ, sewa ruang tidak dilaksanakan karena menggunakan kantor sendiri dan sisa ad cost.
6.	Penyelenggaraan Tugas Pimpinan	1.396.475.900	100	67.62	100	71.65	83.33	-11.68	Karena menyesuaikan undangan dan tidak dihadiri semua pimpinan, menyesuaikan jadwal

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
4									Banmusy dan kegiatan Forkom menyesuaikan undangan.
6.5	Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah.*	572.220.200	100	92.84	100	100	81.72	18.28	Sisa perjalanan dinas dan sisa ad cost.
6.6	Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD.	8.412.115.400	100	91.03	100	95.96	81.72	14.24	Sisa perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah serta sisa makanan dan minuman.
6.7	Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais*	897.894.000	100	76.92	100	94.09	81.72	12.37	Publikasi perubahan prolegda belum dilaksanakan dan perjalanan dalam daerah belum dilaksanakan.
6.8	Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan*	217.373.000	100	76.16	100	100	81.72	18.28	Honor Nara sumber disesuaikan dengan kebutuhan dan perjalanan dinas dalam daerah belum diagendakan.
6.9	Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/ Tim/ Alat Kelengkapan Dewan*	8.215.498.900	100	91.03	100	100	97.14	2.86	Adanya penggabungan rapat paripurna beberapa pansus sehingga efisiensi mamin
6.10	Penyusunan Kajian dan Pengembangan Produk Hukum*	623.920.200	100	85.79	100	100	100	0	Pengiriman data dan bahan info kajian terlambat. Honor nara sumber sesuai kebutuhaan , jasa kebersihan dan sewa ruang rapat/pertemuan tidak dipergunaan dengan adanya SE Menpan
6.11	Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran	1.385.994.000	100	88.32	100	100	97.14	2.86	Menyesuaikan tatakala pembahasan anggaran.
6.12	Pengembangan Dokumentasi Kinerja DPRD	319.050.000	100	95.64	100	100	100	0	
6.13	Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD.	1.517.053.100	100	89.26	100	96.78	0	96.78	Siaran Televisi menyesuaikan agenda kegiatan dewan.
6.14	Pengembangan Kemitraan Kehumasan.	1.462.312.700	100	67.14	100	78.10	100	-21.90	Siaran Langsung TVRI dan Konferensi Pers menyesuaikan agenda Dewan.
6.15	Penyelenggaraan Reses, Publik Hearing dan Konsultasi Publik.	2.304.673.000	100	90.40	100	98.79	89.70	9.09	Sejumlah 22 orang anggota dewan tidak melaksanakan reses dan unjuk rasa, demo menyesuaikan kegiatan dewan.
6.16	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD.	980.886.900	100	94.87	100	97.92	74.95	23.00	Sisa pengadaan tenaga ahli fraksi, PAW disesuaikan dengan usulan parpol dan sisa mamin.
	Jumlah	**40.060.175.200**	**100**	**88.10**	**100**	**96.65**	**92.86**		

Sumber: Sekretaris DPRD DIY, 2016

5. Fasilitas Kesra

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
A	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**321.822.600**	**100**	**99,46**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.326.000	100	100	100	100	100	0	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	3.703.800	100	97,66	100	100	100	0	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	25.989.900	100	99,47	100	100	100	0	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.092.100	100	100	100	100	100	0	
5	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	21.751.000	100	100	100	100	100	0	
6	Penyediaan komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor	6.373.800	100	99,9	100	100	100	0	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	4.716.000	100	99,87	100	100	100	0	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.350.000	100	100	100	100	100	0	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	188.520.000	100	99,2	100	100	100	0	
B	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**206.096.000**	**100**	**99,69**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	52.578.000	100	99,17	100	100	100	0	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	47.500.000	100	99,58	100	100	100	0	
3	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	87.598.000	100	100	100	100	100	0	
4	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	13.420.000	100	100	100	100	100	0	
5	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	5.000.000	100	100	100	100	100	0	
C	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**64.752.000**	**100**	**98,92**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.873.000	100	98,76	100	100	100	0	
2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7.700.000	100	96,92	100	100	100	0	
3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	43.479.000	100	99,46	100	100	100	0	
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	7.700.000	100	97,97	100	100	100	0	
D	**Program Analisis Kebijakan Pembangunan**	**1.391.116.250**	**100**	**95,01**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	313.113.750	100	94,35	100	100	100	0	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2	Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	130.032.500	100	98,62	100	100	100	0	
3	Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	122.092.500	100	96,68	100	100	100	0	
4	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	246.713.750	100	95,62	100	100	100	0	
5	Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Pember-dayaan Masyarakat	86.377.500	100	95,69	100	100	100	0	
6	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	78.437.500	100	96,94	100	100	100	0	
7	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Mental dan Spiritual	237.988.750	100	90,03	100	100	100	0	
8	Koordinasi & Sinkronisas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Mental dan Spiritual	92.850.000	100	98,26	100	100	100	0	
9	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Mental dan Spiritual	83.510.000	100	95,65	100	100	100	0	
E	**Program Pengembangan Kehidupan Beragama**	**4.781.586.250**	**100**	**91,69**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	1.780.352.000	100	96,61	100	100	100	0	
2	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	2.330.785.000	100	87,93	100	100	100	0	pengembalian beberapa rekening belanja yang disesuaikan dengan pengeluaran riil
	Jumlah	**6.094.923.850**	**100**	**93,2**	**100**	**100**	**100**		

Sumber: Biro Kesra Setda DIY, 2016

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

6. Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**379,151,650**	**100**	**99.19**	**100**	**100**	**99.81**	**0.19**	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,250,000	100	100	100	100	100	0	
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	2,600,000	100	85.96	100	100	84.88	15.12	**Anggaran:** realisasi besaran pajak lebih kecil dari yang dianggarkan
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	24,586,000	100	100	100	100	100	0	
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18,833,400	100	100	100	100	100	0	
1.5	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	14,650,000	100	100	100	100	100	0	
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4,838,250	100	99.98	100	100	100	0	
1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,000,000	100	99.95	100	100	100	0	
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,600,000	100	91.82	100	100	95	5	
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	26,994,000	100	100	100	100	100	0	
1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	269,800,000	100	99.2	100	100	100	0	
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**327,000,600**	**100**	**97.46**	**100**	**100**	**100**	**0**	
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	194,758,600	100	99.87	100	100	100	0	
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	30,382,000	100	98.27	100	100	100	0	
2.3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	82,960,000	100	90.93	100	100	100	0	
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18,900,000	100	100	100	100	100	0	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**65,639,000**	**100**	**97.81**	**100**	**100**	**-**	**100**	
3.1	Bimtek Organisasi dan Manajemen Penyeleng-garaan Pemerintahan	65,639,000	100	97.81	100	100	-	100	
4	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**32,100,000**	**100**	**96.49**	**100**	**100**	**100**	**0**	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	2,707,800	100	80.06	100	100	100	0	**Anggaran:** Lembur tidak dilaksanakan

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	4,388,200	100	100	100	100	100	0	
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	22,690,000	100	97.42	100	100	100	0	
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	2,314,000	100	100	100	100	100	0	
5	**PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**	**2,704,060,000**	**100**	**89.03**	**100**	**100**	**100**	**0**	
5.1	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas	325,000,000	100	95.09	100	100	100	0	
5.2	Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas	250,000,000	100	97.22	100	100	100	0	
5.3	Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas	124,975,000	100	92.97	100	100	100	0	
5.4	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	575,000,000	100	79.44	100	100	100	0	**Anggaran:** adanya efisiensi honor tim dan pelaksanaan FGD pada kegiatan kajian
5.5	Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	500,910,000	100	92.96	100	100	100	0	
5.6	Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	150,000,000	100	94	100	100	100	0	
5.7	Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Produktivitas	448,930,200	100	79.93	100	100	100	0	**Anggaran:** adanya efisiensi honor tim pada kajian
5.8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Produktivitas	265,513,100	100	96	100	100	100	0	
5.9	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Produktivitas	63,731,700	100	97.18	100	100	100	0	

Sumber: Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2016

7. Fasilitas Administrasi Pembangunan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**361.865.000**	**100**	**96,52**	**100**	**100**	**100**	**0**	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**	**401.405.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.**	**56.446.300**	**100**	**93,76**	**100**	**100**	**-**	**100**	Tahun sebelumnya tidak ada
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**	**47.969.900**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	
5	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.**	**4.431.399.300**	**100**	**58,86**	**100**	**100**	**100**	**0**	
	Penguatan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa.	4.431.399.300	100	58,86	100	100	100	0	Pengurangan jumlah paket pengadaan akibat adanya perubahan kebijakan untuk Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014. Sehingga muncul efisiensi anggaran Pokja
6	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.**	**64.089.550**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	
	Pengelolaan SIM Layanan ijin penelitian online	64.089.550	100	100	100	100	100	0	
7	**Program Analisis Kebijakan Pembangunan**	**941.536.000**	**100**	**96,82**	**100**	**100**	**100**	**0**	
	Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembangunan.	37.205.000	100	95,15	100	100	100	0	
	Koord. dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan.	192.497.000	100	97,16	100	100	100	0	
	Pemantauan & evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan.	134.369.000	100	97,75	100	100	100	0	
	Penyiapan bahan perumusan kebijakan dekonsentrasi.	62,715,000	100	97,44	100	100	100	0	
	Koord. dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi.	96,750,000	100	100	100	100	100	0	
	Pemantauan & evaluasi pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi.	80,000,000	100	97,98	100	100	100	0	
8	**Program Penelitian dan Pengembangan**	**1.513.186.400**	**100**	**96,56**	**100**	**100**	**100**	**0**	
	Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.	340.888.000	100	96,43	100	100	100	0	
	Penguatan SIDA.	149,898,400	100	94,14	100	100	100	0	
	Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan.	1.022.400.000	100	96,96	100	100	100	0	
	Jumlah	**7.817.897.450**	**100**	**75,15**	**100**	**100**	**100**		

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY, 2016

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

8. Fasilitas Umum, Humas dan Protokol

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7,651,542,600	100	87.89	100	99.99	99.99	0	Menyesuaikan dengan kebutuhan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	100	99.80	100	100	87.81	12.19	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	2,700,000,000	100	79.94	100	100	100	0	Menyesuaikan dengan kebutuhan
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,325,000	100	99.21	100	100	100	0	
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	49,465,000	100	93,26	100	100	100	0	
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	152,472,500	100	99.35	100	100	100	0	
6.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	943,082,000	100	95.90	100	100	100	0	Sisa hasil lelang dan efisiensi rapat
7.	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	419,346,000	100	99.39	100	100	100	0	
8.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	345,000,000	100	84.33	100	100	100	0	Sisa hasil lelang
9.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	351,287,500	100	92.88	100	100	100	0	
10.	Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/ Penerang-an Bangunan Kantor	65,000,000	100	96.59	100	100	100	0	
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,000,000	100	93.75	100	100	100	0	
12.	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	60,406,000	100	97.99	100	100	100	0	
13.	Penyediaan Makanan Man Minuman	1,701,120,000	100	87.45	100	100	100	0	Menyesuaikan jumlah tamu yang datang
14.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	450,000,000	100	93.61	100	100	100	0	Menyesuaikan dengan kebutuhan
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	234,038,600	100	96,66	100	100	100	0	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8,733,508,776	**100**	**88.56**	**100**	**99.53**	**99.63**	**-0.1**	
16.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	2,089,385,000	100	97.04	100	100	100	0	
17.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	447,650,000	100	88.47	100	90.80	100	0	Efisiensi pengadaan gordyn dan Sisa hasil negosiasi
18.	Pengadaan Meubeler	197,974,250	100	99.37	100	100	100	0	
19.	DED Pembangunan Gedung Kantor	172,383,850	100	87,83	100	100		100	Sisa hasil lelang

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
20.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	376,180,000	100	98.87	100	100	100	0	
21.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	244,387,000	100	66.84	100	100	100	0	Menyesuaikan dengan kondisi kendaraan
22.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1,439,460,000	100	77.66	100	100	100	0	Menyesuaikan dengan kondisi kendaraan
23.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	75,000,000	100	99.60	100	100	100	0	
24.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	200,000,000	100	87.24	100	100	100	0	Menyesuaikan dengan kondisi kendaraan
25.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	125,000,000	100	99.85	100	100	100	0	
26.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	1,488,584,475	100	87.20	100	100	100	0	Sisa hasil lelang
27.	Penataan Kawasan Komplek Kepatihan	184,270,000	100	92,34	100	100	100	0	
28.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (Pajak Rokok)	1,693,234,201	100	86.66	100	100	-	100	Sisa hasil lelang
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	75,000,000	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	
29.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	75,000,000	100	100	100	100	100	0	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	**1,769,648,650**	**100**	**97.41**	**100**	**100**	**100**	**0**	
30.	Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya*	1,439,648,650	100	97,16	100	100	100	0	
31.	Peningkatan Kinerja Aparatur	330,000,000	100	98.50	100	100	100	0	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	52,238,900	**100**	**95,91**	**100**	**100**	**100**	**0**	
34.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5,000,000	100	91.32	100	100	100	0	
35.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	6,694,500	100	88.94	100	100	100	0	Efisiensi uang makan lembur
36.	Penyusunan rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	31,378,800	100	98.16	100	100	100	0	
37.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	9,165,600	100	95.80	100	100	100	0	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	**1,182,700,000**	**100**	**95.86**	**100**	**100**	**97.10**	**2.9**	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
38.	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri*	1,182,700,000	100	95.86	100	100	97.10	2.9	
	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	**469,531,200**	100	98.69	**100**	100	100	0	
39.	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Naskah Dinas Berbasis TI	363,700,000	100	97.72	100	100	100	0	
	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	**84,250,000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	
42.	Pemeliharaan Ruti/Berkala Arsip Dinamis Inaktif Tidak Teratur	84,250,000	100	100	100	100	100	0	
	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	**2,518,851,000**	**100**	**96.10**	**100**	**100**	**100**	**0**	
46.	Pengembangan Kemitraan Kehumasan	494,887,000	100	94.50	100	100	100	0	
47.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2,023,964,000	100	96.49	100	100	100	0	

Sumber: Biro UHP Setda DIY, 2016

9. Fasilitas Pengawasan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	BELANJA LANGSUNG	**5.708.793.150**							
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.205.366.250**	**100**	**97.10**	**100**	**100**	**99.85**	**0.15**	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	100	87.13	100	100	100.00	0	Anggaran pada kegiatan ini bersifat penjagaan
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.080.000	100	92.87	100	100	100.00	0	
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	13.615.000	100	69.61	100	100	100.00	0	Menyesuaikan tarif pajak yang berlaku
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30.687.500	100	100	100	100	100.00	0	
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	83.097.000	100	99.37	100	100	100.00	0	
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	27.000.000	100	99.99	100	100	100.00	0	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.500.000	100	92.43	100	100	100.00	0	
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.911.000	100	99.99	100	100	100.00	0	
	9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.242.000	100	99.32	100	100	100.00	0	
	10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.640.000	100	87.48	100	100	98.00	2.00	Menyesuaikan harga surat kabar harian
	11 Penyediaan Makanan dan Minuman	28.800.000	100	99.51	100	100	100.00	0	
	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	685.093.750	100	98.66	100	100	100.00	0	
	13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/Tempat Kerja	121.500.000	100	96.22	100	100	100.00	0	
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**580.932.000**	**100**	**99.45**	**100**	**100**	66.67	33.33	
	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15.287.000	100	99.66	100	100	100.00	0	
	2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	57.730.000	100	97.05	100	100	100.00	0	
	3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	385.065.000	100	99.85	100	100	100.00	0	
	4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	100	99.60	100	100	0.00	100	
	5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	21.750.000	100	100	100	100	100.00	0	
	6 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	96.1000	100	99.11	100	100	0.00	100	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**82.360.000**	**100**	**52.11**	**100**	**100**	**100.00**	**0**	
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	82.360.000	100	52.11	100	100	100.00	0	Beberapa diklat dibiayai dengan dana pusat
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	100.00	-100	
	3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	100.00	-100	
4	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**46.051.500**	**100**	**99.96**	**100**	**100**	**99.25**	0.75	
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja S K P D	6.459.500	100	99.80	100	100	100.00	0	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	6.319.000	100	99.90	100	100	97.00	3	
	3 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	29.048.000	100	100	100	100	100.00	0	
	4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	4.225.000	100	100	100	100	100.00	0	
5	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**	**3.483.721.550**	**100**	**98.76**	**100**	**99.96**	**98.50**	1.46	
	1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	2.513.632.500	100	99.81	100	100	100.00	0	
	2 Pengendalian Mana-jemen Pelaksanaan Kebijakan K D H	132.796.000	100	93.35	100	100	100.00	0	
	3 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	89.910.100	100	96.91	100	100	100.00	0	
	4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	121.437.750	100	99.92	100	100	100.00	0	
	5 Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	119.445.900	100	95.88	100	100	100.00	0	
	6 Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	147.214.300	100	94.34	100	99.00	90.00	9.00	Obyek pemeriksaan kurang memperhati-kan & serius dalam melakukan tindak lanjut atas rekomen-dasi temuan hasil pemeriksaan
	7 Pengendalian Manajemen Laporan Pajak – Pajak Pribadi	-	-	-	-	-	100.00	-100	
	8 Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah	359.285.000	100	96.23	100	100	98.00	2.00	
6	**PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN**	**178.956.850**	**100**	**82.72**	**100**	**100**	**100.00**	**0**	
	1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	136.420.350	100	78.01	100	100	100.00	0	Seringkali terjadi pengalihan narasumber dari kantor pusat ke kantor perwakilan di DIY
	2 Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis Jabatan Fungsional Auditor	42.536.500	100	97.80	100	100	100.00	0	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
7	**PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**	**131.405.000**	**100**	**93.97**	**100**	**100**	**0.00**	**100**	
	1 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan	31.425.000	100	99.36	100	100	0.00	100	
	2 Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan	99.980.000	100	92.27	100	100	0.00	100	

Sumber: Inspektorat DIY, 2016

10. Penanggulangan Bencana

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN								
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000	100	99,53	100	100	100	0	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	427.000.000	100	89,36	100	100	100	0	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai tagihan
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	69.770.000	100	43.13	100	100	100	0	Proses kegiatan ini tergantung dengan pihak lain (Samsat DKI dan Samsat DIY)
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	40.985.000	100	100	100	100	100	0	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	99.989.000	100	100	100	100	100	0	
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	55.000.000	100	89,56	100	100	100	0	Sisa anggaran terjadi karena, Anggaran yang ada di DPA melebihi SHBJ
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.635.000	100	94,94	100	100	100	0	
1.8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.000	100	99.64	100	100	100	0	
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	100	99.46	100	100	100	0	
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	100	84,92	100	100	100	0	Dilaksanakan sesuai kebutuhan
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	100	68,73	100	100	100	0	Masih kurang pemesanan langgan-an surat kabar
1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	66,000,000	100	55,58	100	100	100	0	Efisiensi dana pada pelaksanaan rapat karena sesuai kebutuhan rapat
1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	275.000.000	100	75,98	100	100	100	0	Biaya Koordinasi dan konsultasi ditang-gung oleh Pusat/ Penyelenggara
1.14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	223.200.000	100	100	100	100	100	0	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1.15	Penyediaan Retribusi Sampah	3.300.000	100	80,00	100	100	100	0	Sesuai tagihan retribusi sampah
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	200.000.000	100	99,74	100	100	100	0	
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	307.560.000	100	95,61	100	100	100	0	
2.3	Pengadaan Mebeleur	849.990.000	100	91,45	100	100	100	0	
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	400.000.000	100	99,60	100	100	100	0	Efisiensi anggaran pada pemeliharan
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	35.000.000	100	95,29	100	100	100	0	
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	225.000.000	100	96,24	100	100	100	0	
2.7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	50.000.000	100	42,06	100	100	100	0	Mebeleur masih bagus, sehingga tidak memerlukan banyak anggaran
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR								
3.1	Publikasi Media Cetak dan Elektronik	82.500.000	100	97.23	100	100	100	0	
3.2	Pengembangan Teknologi Informasi	55.999.000	100	94,33	100	100	100	0	
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	6.995.000	100	97,35	100	100	100	0	
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	18.150.000	100	80,92	100	100	100	0	Lembur dan makan lembur tidak terserap sebesar Rp2.024.000
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	95.000.000	100	93,73	100	100	100	0	
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	15.999.700	100	99,08	100	100	100	0	
5	PROGRAM PENCEGAHAN DINI BENCANA								
5.1	Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Slaga Bencana*	673.674.500	100	94,91	100	100	100	0	
5.2	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Benca-na (PUSDALOPS - PB) DIY	687.155.260	100	93,61	100	100	100	0	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
5.3	Pembentukan dan Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh	1.099.999.900	100	99,60	100	100	100	0	
5.4	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	348.483.550	100	98,12	100	100	100	0	
5.5	Peningkatan Kapasitas Aparat dan Masyarakat Menghadapi Bencana	459.627.475	100	94,95	100	100	100	0	
5.6	Peningkatan Kapasitas Unsur Penanggulangan Bencana (PB)	339.580.550	100	84,23	100	100	100	0	Adanya anggaran yang tidak bisa dilaksanakan (tidak bisa di SPJ kan, antara lain: efisiensi ATK, efisiensi dokumentasi, sewa ruang rapat, sewa meja kursi, sewa perlengkapan lain)
6	PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA								
6.1	Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Tim SAR BPBD DIY	899.311.850	100	99,43	100	100	100	0	
6.2	Latihan dan Gladi Penanggulangan Bencana	929.588.100	100	94,94	100	100	100	0	
6.3	Penyelenggaraan Penanganan Kedaruratan Bencana	448.640.760	100	92,81	100	100	100	0	
6.4	Koordinasi Manajemen Gudang Peralatan dan Logistik	1.268.530.575	100	92,56	100	100	100	0	
6.5	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Pasca Bencana	303.450.000	100	90,60	100	100	100	0	
6.6	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lingkungan Pasca Bencana	499.999.700	100	99,56	100	100	100	0	
6.7	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi Pasca Bencana	198.650.000	100	96,99	100	100	100	0	
6.8	Penyelenggaraan Rehab Rekon Infrastruktur Pasca Bencana	669.220.000	100	92,42	100	100	100	0	
6.9	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana	899.860.000	100	99,63	100	100	100	0	

Sumber: BPBD DIY, 2016

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

C. Fasilitas Administrasi Keuangan Daerah

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran	**5.962.836.225**	**100**	**90.36**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	24.920.000	100	87.29	100	100	100	0	Adanya efisiensi dari sisa biaya pengiriman.
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.787.867.000	100	84.67	100	100	100	0	Adanya efisiensi dari biaya jasa srt kbr (realisasi sesuai tagihan)
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	27.025.600	100	85.77	100	100	100	0	Ada 3 STNK yang sudah dibayarkan di Th 2014
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	237.475.000	100	98.59	100	100	100	0	-
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	888.662.800	100	98.14	100	100	100	0	-
6	Penyediaan alat tulis kantor	269.179.000	100	98.79	100	100	100	0	-
7	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	330.628.675	100	98.61	100	100	100	0	-
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	79.374.000	100	99.78	100	100	100	0	-
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	40.893.750	100	99.02	100	100	100	0	-
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	62.670.000	100	94.34	100	100	100	0	-
11	Penyediaan makanan dan minuman	138.139.000	100	90.94	100	100	100	0	-
12	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.157.614.000	100	79.28	100	100	100	0	Realisasi perjalanan dinas luar daerah sesuai undangan
13	Penyediaan jasa adminis-trasi kepegawaian	12.798.000	100	99.86	100	100	100	0	-
14	Penyediaan jasa keamanan kantor	894.549.400	100	99.11	100	100	100	0	
15	Penyediaan retribusi sampah	11.040.000	100	87.18	100	100	100	0	Realisasi sesuai tarif di Perda Kab. lebih kecil dari yang dianggarkan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**46.365.314.950**	**100**	**54.79**	**100**	**96.14**	**100**	-3.86	
16	Pembangunan Gedung Kantor	36.937.248.000	100	45.56	100	57.5	100	-42.5	Lelang pemba-ngunan gedung KPPD Bantul belum berhasil (dari faktor eksternal)
17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.683.017.000	100	87.83	100	100	100	0	Efisiensi dari sisa hasil lelang dan sisa hasil nego-siasi harga
18	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.464.867.950	100	92.96	100	100	100	0	-
19	Pengadaan mebeleur	1.569.378.000	100	91.47	100	100	100	0	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
20	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1.185.233.100	100	97.93	100	100	100	0	-
21	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	698.231.000	100	62.53	100	100	100	0	Adanya efisiensi dari belanja pemeliharaan kendaraan dari pembelian suku cadang karena masih laik jalan dan pembelian BBM sesuai kebutuhan
22	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	951.800.000	100	96.27	100	100	100	0	-
23	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	209.504.000	100	93.80	100	100	100	0	-
24	Pemeliharaan arsip Kendaraan Bermotor	1.329.705.800	100	96.13	100	100	100	0	-
25	Pemeliharaan Arsip Keuangan	256.665.900	100	92.94	100	100	100	0	-
26	Pemeliharaan Jaringan/ Sistem Informasi	79.664.200	100	92,73	100	100	100	0	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**607.301.000**	**100**	**92.30**	**100**	**100**	**100**	**0**	
27	Peningkatan Motivasi Kerja bagi Aparat	90.000.000	100	90.76	100	100	100	0	-
28	Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola keuangan	17.586.000	100	68.58	100	100	100	0	Adanya efisiensi dari sewa ruang, pelaksanaan di gedung pemerintah
29	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak	499.715.000	100	93.41	100	100	100	0	-
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	**152.290.500**	**100**	**91.89**	**100**	**100**	**100**	**0**	-
30	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	6.500.000	100	99.83	100	100	100	0	-
31	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	18.673.500	100	99.41	100	100	100	0	
32	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan	105.647.000	100	88.64	100	100	100	0	Efisiensi dari belanja perjala-nan dinas
33	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD	21.470.000	100	98.95	100	100	100	0	-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**5.924.503.540**	**100**	**92.27**	**100**	**100**	**100**	**0**	-
34	Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan Daerah	156.585.000	100	96.20	100	100	100	0	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
35	Penyusunan APBD	1.284.960.750	100	86.19	100	100	100	0	Efisiensi dari belanja Cetak, penggandaan, perjalanan dinas
36	Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD	1.820.041.500	100	90.13	100	100	100	0	
37	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertang-gungjawaban APBD	949.827.500	100	98.45	100	100	100	0	
38	Penatausahaan Keuangan Daerah	147.041.290	100	87.86	100	100	100	0	Efisienasi dari rapat,perjalanan dinas,cetak , ATK
39	Pengendalian Gaji Pegawai daerah	328.120.000	100	99.60	100	100	100	0	-
40	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan daerah	284.665.000	100	92.31	100	100	100	0	-
41	Penyusunan Dokumen Penyediaan dana dan pengesahan DPA	953.262.500	100	95.89	100	100	100	0	-
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	**510.393.800**	**100**	**99.99**	**100**	**100**	**100**	**0**	
42	Evaluasi Raperda tentang APBD Kab/Kota	510.393.800	100	99.99	100	100	100	0	-
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan KDH	**163.100.550**	**100**	**90.40**	**100**	**100**	**100**	**0**	
43	Tindak Lanjut LHP	80.824.550	100	98.13	100	100	100	0	-
44	Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	82.276.000	100	82.81	100	100	100	0	-Efisiensi dari belanja rapat dan perjalanan dinas.
	Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi	**162.290.000**	**100**	**91.54**	**100**	**100**	**100**	**0**	
45	Pengelolaan data dan pengembangan Teknologi Informasi	162.290.000	100	91.54	100	100	100	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	**1.191.372.225**	**100**	**90.87**	**100**	**100**	**100**	**0**	-
46	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuda	1.172.517.225	100	95.41	100	100	100	0	-
7	Pelatihan Program / Aplikasi gaji/GDO	18.855.000	100	86.32	100	100	100	0	- Efisiensi dari sewa ruang
	Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah	**396.528.700**	**100**	**92.12**	**100**	**100**	**100**	**0**	-
48	Peningkatan Status Hak Atas Tanah	96.505.700	100	86.61	100	100	100	0	Efisiensi dari rapat dan perjalanan dinas
49	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	300.023.000	100	93.90	100	100	100	0	
	Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	**932.841.000**	**100**	**90.06**	**100**	**100**	**100**	**0**	
50	Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD	632.841.000	100	90.06	100	100	100	0	-

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	**7.110.578.000**	**100**	**93.13**	**100**	**100**	**100**	**0**	
51	Penyusunan Tatkelola Pemungutan pendapatan Asli Daerah	308.271.000	100	93.05	100	100	100	0	
52	Pelayanan Kesamsatan KPPD Kota Yogyakarta	977.108.000	100	96.22	100	100	100	0	
53	Pelayanan Kesamsatan KPPD Kab. Bantul	426.602.000	100	94.33	100	100	100	0	
54	Pelayanan Kesamsatan KPPD Kab. Gunung Kidul	323.978.950	100	91.18	100	100	100	0	
55	Pelayanan Kesamsatan KPPD Kab. Kulon Progo	439.513.000	100	94.55	100	100	100	0	
56	Pelayanan Kesamsatan KPPD Kab. Sleman	959.839.000	100	95.71	100	100	100	0	
57	Pengkajian Potensi Obyek pendapatan daerah	840.940.700	100	99.23	100	100	100	0	
58	Pendataan Potensi dan Penagihan PKB KPPD Kota Yogyakarta	234.455.000	100	99.69	100	100	100	0	
59	Pendataan Potensi dan Penagihan PKB KPPD Kab. Bantul	218.750.000	100	99.54	100	100	100	0	
60	Pendataan Potensi dan Penagihan PKB KPPD Kab. Gunung Kidul	125.756.550	100	99.35	100	100	100	0	
61	Pendataan Potensi dan Penagihan PKB KPPD Kab. Kulon Progo	260.487.000	100	90.43	100	100	100	0	
62	Pendataan Potensi dan penagihan PKB KPPD Kab. Sleman	341.495.000	100	66.48	100	100	100	0	Efisiensi dari honor harian non PNS dan cetak
63	Koordinasi & Sinkronisasi pengelolaan pendapatan Daerah	1.653.381.800	100	90.08	100	100	100	0	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**2.026.142.400**	**100**	**97.63**	**100**	**100**	**100**	**0**	
64	Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.548.480.000	100	98.83	100	100	100	0	
65	Penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah	141.239.000	100	89.39	100	100	100	0	Efisiensi dari perjalanan dinas & pengumuman lelang
66	Penatausahaan Barang Milik Daerah	276.025.400	100	95.33	100	100	100	0	
67	Pengawasan Pengelolaan barang Milik Daerah	60.398.000	100	96.87	100	100	100	0	

Sumber: DPPKA DIY, 2016

D. Pendidikan dan Pelatihan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.525.003.500**	**100**	**100**	**100**	**85,62**	**99,7**	**-14,08**	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000	100	100	100	97,25	100	-2,75	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	649.998.000	100	100	100	67,8	100	-32,2	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.550.000	100	100	100	78,48	100	-21,52	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	48.280.000	100	100	100	100	100	0	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	199.989.500	100	100	100	99,16	100	-0,84	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.790.000	100	100	100	100	100	0	
	Penyediaan Barang Cetakan&Penggandaan	20.500.000	100	100	100	99,95	100	-0,05	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	100	100	100	99,99	100	-0,01	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000	100	100	100	99,36	100	-0,64	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.250.000	100	100	100	97,44	77,42	20,02	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.980.000	100	100	100	100	75	25	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	34.991.000	100	100	100	95,32	100	-4,68	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	221.130.000	100	100	100	98,53	100	-1,47	
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	240.000.000	100	100	100	99,44	100	-0,56	
	Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	13.045.000	100	100	100	97,7	100	-2,3	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**2.618.184.000**	**100**	**100**	**100**	**89,16**	**100**	**-10,84**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	428.600.000	100	100	100	99,01	100	-0,99	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	394.890.000	100	100	100	94,1	100	-5,9	
	Pengadaan Perlengkap-an Gedung Kantor	615.450.000	100	100	100	64,44	100	-35,56	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	372.890.000	100	100	100	93,89	100	-6,11	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	252.891.000	100	100	100	98,19	100	-1,81	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	84.150.000	100	100	100	94,23	100	-5,77	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	81.733.000	100	100	100	97,31	100	-2,69	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	39.400.000	100	100	100	99,49	100	-0,51	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	40.400.000	100	100	100	99,75	100	-0,25	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	3.800.000	100	100	100	100	100	0	
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	254.000.000	100	100	100	99,23	100	-0,77	
	Review DED Pemba-ngunan Gedung Kantor	49.980.000	100	100	100	98,56	100	-1,44	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	**212.922.500**	**100**	**100**	**100**	**97,5**	**100**	**-2,5**	
	Pembinaan, Pengem-bangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	152.922.500	100	100	100	96,69	100	-3,31	
	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	60.000.000	100	100	100	99,55	100	-0,45	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**120.488.300**	**100**	**100**	**100**	**98,67**	**100**	**-1,33**	
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.450.000	100	100	100	100	100	0	
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	14.998.300	100	100	100	99,18	100	-0,82	
	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	80.000.000	100	100	100	100	100	0	
	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	20.040.000	100	100	100	92,64	100	-7,36	
	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	**35.000.000**	**100**	**100**	**100**	**94,94**	**100**	**-5,06**	
	Pengelolaan Sistem Informasi	35.000.000	100	100	100	94,94	100	-5,06	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**803.234.750**	**100**	**100**	**100**	**96,94**	**100**	**-3,06**	
	Pelaksanaan Penelitian	45.000.000	100	100	100	97,99	100	-2,01	
	Pengembangan Kuriku-lum dan Silabus Diklat	40.000.000	100	100	100	97,21	100	-2,79	
	Pengembangan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	390.000.000	100	100	100	99,19	100	-0,81	
	Manajemen Mutu Penyelenggaraan Diklat	328.234.750	100	100	100	94,09	100	-5,91	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA KEDIKLATAN ANTAR DAERAH	**318.000.000**	**100**	**100**	**100**	**98,89**	**100**	**-1,11**	
	Promosi dan Rekruitment Kemitraan	183.398.000	100	100	100	98,5	100	-1,5	
	Koordinasi Kediklatan	134.602.000	100	100	100	99,42	100	-0,58	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN KEDINASAN	**12.291.124.400**	**100**	**99,85**	**100**	**86,98**	**100**	**-13,02**	
	Workshop Pengembang-an Aparatur Berwawasan Budaya	55.996.900	100	100	100	99,76	100	-0,24	
	Peningkatan Pengetahu-an dan Ketrampilan di Bidang Kegiatan Fungsional	329.999.750	100	100	100	99,86	100	-0,14	
	Peningkatan Pengetahu-an dan Ketrampilan di Bidang Kegiatan Teknis	2.479.865.200	100	100	100	85,49	100	-14,51	
	Optimalisasi Kinerja Penyelenggara Diklat	71.487.450	100	100	100	94,37	100	-5,63	
	Diklat Kepemimpinan	7.122.522.000	100	100	100	85,22	100	-14,78	
	Diklat Prajabatan	1.851.253.250	100	99	100	91,42	100	-8,58	
	TOF Diklat Prajabatan Pola Baru	179.999.850	100	100	100	93,12	100	-6,88	
	Jumlah	**17.923.957.450**	**100**	**99,9**	**100**	**88,06**	**99,04**		

Sumber: Bandiklat DIY, 2016

E. Kepegawaian Daerah

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
A		**22,925,236,600**	**100**	**81.3**	**100**	**96.7**		**96.7**	
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1,630,092,600**	**100**	**95.1**	**100**	**100**	**99.97**	**0.03**	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,988,000	100	100	100	100	91	9.00	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	454,800,000	100	85.66	100	100	100	-	Jumlah pembayaran sesuai dengan tagihan.
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104,745,000	100	99.81	100	100	100	-	
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	8,510,000	100	59.21	100	100	100	-	Pajak kendaraan dinas sesuai tarif yang berlaku.
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	52,100,000	100	94.54	100	100	100	-	
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	250,000,000	100	99.17	100	100	100	-	
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37,287,000	100	99.95	100	100	100	-	
1.8	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	79,068,000	100	99.99	100	100	100	-	
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pene-rangan Bangunan Kantor	9,715,000	100	100	100	100	100	-	
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,230,000	100	99.99	100	100	100	-	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,810,000	100	96.44	100	100	100	-	
1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	51,900,000	100	91.58	100	100	100	-	
1.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	364,010,000	100	99.97	100	100	100	-	
1.14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	192,929,600	100	99.50	100	100	100	-	
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**3,979,030,000**	**100**	**95.74**	**100**	**100**	**100**	-	
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	589,834,000	100	99.12	100	100	100	-	
2.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2,040,129,000	100	97.55	100	100	100	-	
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	149,000,000	100	97.10	100	100	100	-	
2.4	Pengadaan Mebeleur	195,800,000	100	89.79	100	100	100	-	Negosiasi harga pengadaan barang
2.5	DED Pembangunan Gedung Kantor	388,649,000	100	84.99	100	100	100	-	Negosiasi harga pengadaan jasa
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	341,200,000	100	98.88	100	100	100	-	
2.7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	199,900,000	100	87.14	100	100	100	-	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sesuai dengan kebutuhan
2.8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4,656,000	100	99.57	100	100	100	-	
2.9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,620,000	100	97.37	100	100	100	-	
2.10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	6,200,000	100	100	100	100	100	-	
2.11	Fumigasi Arsip	58,042,000	100	96.38	100	100	-	100	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**1,854,220,000**	**100**	**85.9**	**100**	**100**	**-**	**100**	
3.1	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	1,854,220,000	100	85.94	100	100	-	100	.Pembiayaan Diklatpim Tk II menggunakan dana APBN (diusulkan 4 orang mendapat surat panggilan 3 orang). .Karena keterbatas-an tempat, pelaksa-naan Bimtek Karak-ter bagi CPNS tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. .Calon peserta Tugas belajar S2 spesialis Anestesi ke UI Jakarta tidak lolos seleksi.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
4	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**140,325,000**	**100**	**98.54**	**100**	**100**	**100**	**-**	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7,185,000	100	99.97	100	100	100	-	
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	27,680,000	100	94.71	100	100	100	-	
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengem-bangan Data dan Informasi	86,860,000	100	99.50	100	100	100	-	
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	18,600,000	100	99.22	100	100	100	-	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR**	**15,321,569,000**	**100**	**75.41**	**100**	**94.99**	**-**	**94.99**	
5.1	Pengembangan Aparatur	221,980,000	100	98.42	100	100	-	100	
5.2	Pengukuran Kompetensi Pegawai	2,072,395,000	100	54.08	100	98.26	-	98.26	Pengukuran Kompe-tensi untuk Pemda DIY se-jumlah 2 angkatan (24 orang) tidak dilaksanakan karena pertimbang-an Pansel JPT untuk menggunakan data hasil Assessment dan Tes Psikologi yang telah dilaksa-nakan sebelumnya dalam pengisian Jabatan Eselon II.
5.3	Pengembangan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	151,016,400	100	86.15	100	100	-	100	Peserta ekspose implementasi hasil pengukuran kompetensi bersifat terbatas, sehingga target peserta tidak terpenuhi.
5.4	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	2,010,000,000	100	25.2	100	75	-	75	Kebijakan penunda-an penambahan pegawai tahun 2015 sesuai surat Menpan-RB RI Nomor B/2163/ M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015.
5.5	Pengelolaan Kepangkatan	279,350,000	100	98.42	100	100	-	100	
5.6	Penegakan Disiplin Aparatur	6,095,122,000	100	96.03	100	100	-	100	
5.7	Pembinaan Aparatur dalam Tertib Administrasi	227,753,600	100	96.18	100	100	-	100	
5.8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur	1,368,375,000	100	95.90	100	100	-	100	
5.9	Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur	768,987,000	100	96.02	100	100	-	100	

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
5.10	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	1,826,590,000	100	49.96	100	87.50	-	87.50	Pengisian jabatan Eselon II tahun 2015 oleh Pansel dilaksa-nakan melalui rotasi tidak melalui seleksi terbuka (mengguna-kan pertimbangan hasil Assessment dan Tes Psikologi yang telah dilaksa-nakan sebelumnya). Selanjutnya jabatan yang kosong akan diisi melalui seleksi secara terbuka yang akan dilaksanakan ditahun 2016.
5.11	Penyelenggaraan MTQ bagi Aparatur	300,000,000	100	89.1	100	100	-	100	Jumlah peserta dari Kab/Kota tidak memenuhi target.

Sumber: BKD DIY, 2016

F. Persandian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	**1,769,648,650**	**100**	**97.41**	**100**	**100**	**100**	**0**	
	Peningkatan Kinerja Aparatur	330,000,000	100	98.50	100	100	100	0	

Sumber: Biro UHP Setda DIY, 2016

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN**	**2.438.425.300**	**100**	**91**	**100**	**100**	**100**	**0**	Effisiensi dari belanja sewa ruang, honor narasumber, makan & minuman harian umum, jambore kader PKK, pameran puncak acara BBGRM, Atk, perjalanan dalam daerah, perjalanan luar daerah, honor Tim lomba, cetak
	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	1.716.105.300	100	87	100	100	100	0	Effisiensi dari belanja sewa ruang, honor narasumber, makan & minuman harian umum, jambore kader PKK, pameran puncak acara BBGRM, Atk, perjalanan dalam daerah, perjalanan luar daerah, honor Tim lomba,
	Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK	722.320.000	100	100	100	100	100	0	terdapat effisiensi belanja cetak, honor pegawai tidak tetap, perjalanan dalam daerah
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN**	**395.725.000**	**100**	**96**	**100**	**100**	**100**	**0**	effisiensi dari belanja sewa proyektor, Kid peserta, cetak, sewa kamar, makan & minum harian umum, honor narasumber
	Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	395.725.000	100	96	100	100	100	0	effisiensi dari belanja sewa proyektor, Kid peserta, cetak, sewa kamar, makan & minum harian umum, honor narasumber
3	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**	**1.186.029.500**	**100**	**83**	**100**	**100**	**100**	**0**	Effisiensi dari belanja honor non PNS, ATK, Pengirim-an Barang, Sertifi-kasi, penggandaan, sewa ruang, kamar, proyektor, perjalan-an dinas luar daerah, dan hasil nego
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	1.186.029.500	100	83	100	100	100	0	Effisiensi dari belanja honor non PNS, ATK, Pengirim-an Barang, Sertifi-kasi,penggandaan, sewa ruang, kamar, proyektor, perjalan-an dinas luar daerah, dan hasil nego

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
4	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA**	**1.856.200.000**	**100**	**91**	**100**	**91**	**100**	**-9**	penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional tidak diselenggara-kan tetapi dilakukan temu karya nasional surat kementerian dalam negeri nomor: 555.3/4704/BP tanggal 4 Agustus 2015, selain itu adanya efisiensi pelaksanaan dari beberapa kegiatan.
	Peningkatan Kapasitas Desa	1.856.200.000	100	91	100	91	100	-9	penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional tidak diselenggar-akan tetapi dilaku-kan temu karya nasional surat kementerian dalam negeri nomor: 555.3/4704/BP tanggal 4 Agustus 2015, selain itu adanya efisiensi pelaksanaan dari beberapa kegiatan (effisiensi dari belanja cetak, penggandaan, sewa printer)
	Jumlah	**5.876.379.800**	**100**	**90**	**100**	**98**			

Sumber: BPPM DIY, 2016

22. Urusan Sosial

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**12.932.768.105**	**100**	**88,86**	**100**	**100**	**99,95**	**0.05**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.363.500	100	100	100	100	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.220.000	100	80,57	100	100	100		Menyesuaikan tagihan setiap bulan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	64.137.500	100	49,94	100	100	98,42	1.58	Menyesuaikan tarif pajak STNK roda 2 dan 4 yang dibayar-kan setiap bulan, Perpanjangan STNK roda 2 target 64 terealisasi 53 tidak tercapai 11 karena sudah dihapus
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	170.061.400	100	99,26	100	100	100		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.390.266.169	100	95,59	100	100	100		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	90.471.550	100	99,99	100	100	100		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	137.586.350	100	96,11	100	100	100		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	121.855.550	100	99,29	100	100	100		
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.936.000	100	98,28	100	100	100		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.494.418.128	100	85,33	100	100	100		Logistik menyesuai-kan jumlah klien
	Penyediaan Makanan dan Minuman	138.234.000	100	99,62	100	100	100		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	234.760.000	100	99,46	100	100	100		
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	1.284.602.558	100	98,13	100	100	100		
	Penyediaan Jasa Para Medis	644.400.000	100	100	100	100	100		
	Penyediaan Retribusi Sampah	2.022.000	100	100	100	100	100		
	Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	26.436.400	100	98,79	100	100	-		
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**4.740.259.800**	**100**	**93,60**	**100**	**100**	**100**		
	Pembangunan Gedung Kantor	61.400.000	100	99,02	100	100	100		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.341.184.000	100	97,36	100	100	100		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	462.487.000	100	96,03	100	100	100		
	Pengadaan Mebeleur	779.462.500	100	81,75	100	100	100		Sisa hasil nego
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	826.930.000	100	99,35	100	100	100		

22. Urusan Sosial

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	948.592.300	100	89,79	100	100	100		Penggunaan BBM sesuai dengan kebutuhan kegiatan di lapangan, Belanja servis dan suku cadang untuk 11 kendaraan roda 2 tidak digunakan karena dihapus
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	74.465.000	100	100	100	100	100		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	144.660.000	100	97,28	100	100	100		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	21.300.000	100	100	100	100	100		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tanaman	9.779.000	100	100	100	100	100		
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	70.000.000	100	99,06	100	100	-		
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**123.956.425**	**100**	**95,36**	**100**	**100**	**100**		
	Pembinaan, Pengem-bangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	11.254.000	100	100	100	100	100		
	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	25.554.000	100	100	100	100	100		
	Forum Optimalisasi Pengembangan Kinerja Aparatur	11.793.000	100	100	100	100	100		
	Pemantapan Pengaplikasian Pengelolaan Keuangan	9.797.425	100	82,14	100	100	100		Sewa gedung tidak digunakan
	Diklat Manajemen Pelayanan Sosial	65.558.000	100	93,90	100	100	-		
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**91.830.550**	**100**	**99,39**	**100**	**100**	**100**		
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.499.900	100	100	100	100	100		
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	14.213.500	100	100	100	100	100		
	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	57.117.300	100	100	100	100	100		
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	14.999.850	100	96,27	100	100	100		
5	**Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo**	**8.358.444.300**	**100**	**95,68**	**100**	**97,20**	**100**		
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo	8.358.444.300	100	95,68	100	97,20	100		Jumlah klien pada PSBR tidak memenuhi target

22. Urusan Sosial

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
6	**Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**	**8.179.325.256**	**100**	**80,27**	**100**	**96,39**	**95,96**	**0,43**	
	Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	8.179.325.256	100	80,27	100	96,39	95,96	0,43	Sisa hasil nego Efisiensi honorarium tukang, belanja alat perlengkapan UEP, sarpras, jadup tidak dapat dilaksanakan karena persyaratan adminitrasi tidak memenuhi.
7	**Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K3S)**	**744.297.300**	**100**	**96,21**	**100**	**100**	**100**		
	Pemeliharaan TMPN/ TMP, MPP, MPN	292.652.550	100	99,13	100	100	100		
	Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	451.644.750	100	94,32	100	100	100		
8	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	**2.199.986.223**	**100**	**59,58**	**100**	**100**	**97,32**	**2.68**	
	Pemberdayaan Sosial Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	1.960.501.110	100	55,09	100	100			.Pengembangan kube melalui Pos Gub yang direncana-kan 140 kube terealisir 97 kube, sedangkan 43 kube setelah diberikan bimtek ada beberapa anggota-nya yang mengun-durkan diri karena merasa keberatan dengan aturan dalam kelompok sehingga bantuan tidak dapat dicairkan .Kegiatan USEP bagi keluarga miskin yang direncanakan 20 kelompok terealisir 18 kelompok, sedangkan 2 kelompok setelah diberikan bimtek ada beberapa anggotanya yang mengundurkan diri karena merasa keberatan dengan aturan dalam kelompok sehingga bantuan tidak dapat dicairkan .Jasa konsultan peneliti tidak dilaksanakan

22. Urusan Sosial

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Pembinaan, Pemantauan dan Pemberdayaan Bagi RTSM PKH	103.700.313	100	99,76	100	100			
	Perlindungan dan Jaminan Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor Informal dan Relawan Sosial Termasuk TKSK	135.784.800	100	93,81	100	100			
9	**Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma**	**489.126.600**	**100**	**97,44**	**100**	**100**	**100**		
	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	489.126.600	100	97,44	100	100	100		
10	**Program Pelayanan dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial**	**1.415.234.150**	**100**	**97,08**	**100**	**100**	**100**		
	Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial	1.415.234.150	100	97,08	100	100	100		
11	**Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar**	**1.558.554.150**	**100**	**93,72**	**100**	**100**	**100**		
	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar	1.558.554.150	100	93,72	100	100	100		
12	**Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana**	**1.304.117.350**	**100**	**86,94**	**100**	**100**	**40,24**	**59.76**	
	Penguatan Kesiapsiagaan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana	1.208.274.850	100	85,90	100	100			
	Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar	95.842.500	100	100	100	100			
13	**Program Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial**	**130.848.050**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		
	Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) serta Korban Trafficking	130.848.050	100	100	100	100	100		
14	**Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**	**3.106.581.300**	**100**	**89,71**	**100**	**100**	**100**		

22. Urusan Sosial

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	3.106.581.300	100	89,71	100	100	100		Sisa hasil nego dan sewa gedung tidak digunakan
15	**Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial**	**1.600.696.100**	**100**	**99,52**	**100**	**100**	**100**		
	Pendataan, Penyuluhan, Edukasi, dan Promosi Kesejahteraan Sosial	1.600.696.100	100	99,52	100	100	100		
	JUMLAH	**46.976.02.659**	**100**	**88,74**	**100**	**99,57**			

Sumber: Dinsos DIY, 2016

23. Urusan Kebudayaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**2.442.084.400**	**100**	**85.14**	**100**	**99.95**	**100**	**-0,05**	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	100	93.13	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pengiriman surat-menyurat, pengiriman dokumen sampai dengan bulan Desember 2015
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	821.600.000	100	72.8	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pembayaran Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik sesuai dengan tagihan rekening
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12.000.000	100	84.36	100	90	100	-10	**Penjelasan Realisasi:** Penyediaan Jas Pemeliharaan dan Perijinan kendaran dinas/ operasional bulan 2015
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan*	379.336.500	100	92.22	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pembayaran Honorarium pengelola administrasi keuangan dan barang daerah.
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*	255.000.000	100	85.51	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sampai dengan Bulan Desember 2015
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	47.033.500	100	98.35	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Penyediaan Alat Tulis Kantor Sampai bulan Desember 2015
1.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	70.000.000	100	91.32	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sampai dengan bulan Desember 2015

23. Urusan Kebudayaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	86.692.500	100	99.99	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor s/d bulan November 2015
1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.500.000	100	77.03	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Langganan Koran dan Majalah sampai dengan Bulan November 2015
1.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.793.000	100	78.63	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa pembelian bendera, umbul-umbul dan isi tabung gas .
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	55.000.000	100	81.11	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Penyediaan Makanan dan Minuman sampai dengan bulan Desember 2015
1.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	232.500.000	100	83.74	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Rapat Konsultasi Pamong Budaya ke Provinsi Jawa Tengah dan Orientasi Lapangan Bimtek Pengelolaan Keuangan ke Provinsi Jawa Barat
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja*	459.128.900	100	97.55	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja sampai dengan Bulan Desember 2015
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**1,441.300.000**	**100**	**81.4**	**100**	**100**	**100**	**0**	

23. Urusan Kebudayaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	649.800.000	100	95.96	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pembelian Komputer, Laptop, LCD, Printer, yang telah dilaksana-kan sampai bulan Desember 2015.
2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor*	65.000.000	100	100	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pemeliharaan sumur, ledeng, WC, Kamar mandi, pintu jendela, atap dan lantai sampai dengan bulan Desember 2015
2.3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	395.000.000	100	42.45	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l sesuai kebutuhan
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	47.000.000	100	97.82	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor sampai dengan bulan Desember 2015
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	284.500.000	100	95.28	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor sampai dengan bulan Desember 2015
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**200.000.000**	**100**	**85.32**	**100**	**100**	**100**	**0**	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100,000,000	100	84.78	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Kegiatan Sudah dilaksanakan pada bulan april 2015

23. Urusan Kebudayaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
3.2	Pembinaan dan Pelaksanaan bimtek bagi pengelola keuangan	100.000.000	100	85.86	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Kegiatan telah terlaksana SDM yang mengikuti pengeolaan keuangan mengalami peningkatan .
4	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**536.781.600**	**100**	**66.67**	**100**	**100**	**100**	**0**	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	20.000.000	100	66.41	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Efisiensi sewa tempat yang tidak dapat mempergunakan Hotel
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	70.000.000	100	84.86	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Penyusunan Laporan Keuang-an SKPD sampai dengan bulan Desember 2015.
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	144,000,000	100	92.43	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Penyusunan ROPK, Renja, RKA, DPA, Sistem Informasi
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	60,000,000	100	94.92	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sampai bulan Desember 2015
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**	**14.171.490.500**	**100**	**88.41**	**100**	**99,25**	**100**	**-0,75**	
5.1	Pendampingan Masyarakat Pecinta Seni dan Penggiat Budaya	4.690.000.000	100	94.43	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Kegiatan Pendampingan Masyarakat Pecinta Seni dan Penggiat Budaya sudah dilaksana-kan dengan Pengirman 200 tenaga pendam-ping ke 100 desa..
5.2	Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya	750.000.000	100	88.51	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Kegiatan Telah dilaksanakan pada triwulan IV

23. Urusan Kebudayaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
5.3	Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.500.000.000	100	74.54	100	95.5	100	-4,5	**Penjelasan Realisasi:** Terlaksananya kegiatan macapat rutin dan terla-ksananya Pra kongres Bahasa Jawa, Temu karya Sastra, dan pe-nerbitan majalah sempulur. Ada efisiensi sisa anggaran dan tidak terbitnya kamus pusporinonce karena belum siapnya materi.
5.4	Pelestarian , Pengembangan dan Aplikasi Nilai- Nilai Budaya Luhur di Masyarakat	4.692.250.500	100	90.89	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Terlaksananya gelar Pakeliran padat, wayang pepadi,dan pentas wayang kulit batam, wayang sukroasih, wayang pepadang serta wayang wong
5.5	Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	1.540.240.000	100	83.49	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** 1)Pelatihan Pengayat kepercayaan sudah dilaksana-kan tanggal 6-8 mei 2015, 3) workshop/ pelatihan SDM Upacara Adat Tahun 2015 tanggal 25 - 30 Mei 2015 dengan peserta 60 orang. 3) Setelah pelatihan peserta mengikuti Studi Lapangan terhadap kelompok Upacara Adat di Bali tanggal 31 Mei - 3 juni 2015
5.6	Gelar Warisan Budaya Tak benda**	999.000.000	100	76.87	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Kegiatan telah dlaksanakan pada bulan November 2015

23. Urusan Kebudayaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
6	**PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	**146.845.427.425**	**100**	**76.08**	**100**	**94,89**	**100**	**-5,11**	
6.1	Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya**	118.765.554.646	100	73,31	100	79.04	100	-20,96	**Penjelasan Realisasi:** Pembebasan lahan Indraloka tidak jadi dilak-sanakan karena belum jelasnya status kepemilik-an tanah.
6.2	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan**	2.007.345.754	100	84,31	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Laweatan Sejarah dilaksanakan tanggal 1-2 April dengan tema perjuangan Pangeran Diponegoro dengan melaku-kan lawatan ke Goa Selarong, Goa Sriti dan ke Magelang peserta; murid SLTA 100org, guru pendamping narasumber (UGM,BPNB Yogyakarta)
6.3	Penguatan Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya**	12.222.219.025	100	88.73	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Kegiatan selesai dilaksanakan
6.4	Pembinaan dan Pengembangan Museum**	12.757.268.000	100	88.83	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Wajib Kunjung Museum sudah dilaksanakan sebanyak 160 kali 6908 orang
6.5	Warisan Budaya Nasional yang Dinominasikan**	1.093.040.000	100	71.9	100	95,42	100	-4,58	**Penjelasan Realisasi:** Penyiapan tim teknis Yogyakarta menuju World Heritage City, Penyiapan dan Penyusunan kelengkapan admnistrasi menuju World Heritage City Pengadaan Workstation tidak dapat dilaksana-kan , Papan Penanda sudah ada dari Kominfo

23. Urusan Kebudayaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Kegiatan seminar tidak jadi dilaksa-nakan karena kajian tim belum selesai.
7	**PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA**	**36.319.258.000**	**100**	**88.73**	**100**	**100**	**100**	**0**	
7.1	Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah**	4.320.914.500	100	88.46	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Kegiatan Telah selesai dilaksana-kan
7.2	Aktualisasi Kesenian Tradisional dan Budaya Kontemporer**	2.969.948.000	100	95.82	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** FKY dilaksanakan bulan 19 Agustus-4 September 2015 Taman Kuliner Condong catur
7.3	Promosi dan Publikasi Seni Budaya**	3.397.000.000	100	84.55	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Kethoprak Sanepa/ Kethoprak Sayembara.Sudah melakanakan produksi sebanyak 4 episode produksi bekerjasama dengan TVRI Yogyakarta . Penayangan dilaksanakan 1 minggu sekali setiap hari Sabtu di stasiun TVRI Yogyakarta. Acara Penayangan di TVRI akan disiarkan perdana pada akhir Bulan Mei/ awal bulan Juni 2015. Tonil mataram telah melaksanakan produksi 6 episode: 1) Episode Gumgregah, 2) episode mabuk facebook 3) episode Jamu mbah Jayeng, 4) episode tatu lawas , 5) Episode Siluman Bandar Narkoba. 6). Episode Reco malati.

23. Urusan Kebudayaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Penayangan akan dilaksanakan tanggal 12 Juni 2015 di Jogja tv 1 minggu 1.
7.4	Pembinaan dan Pengembangan Perfilman**	9.549.530.000	100	89.68	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Terlaksananya Pemutaran Film sepanjang tahun sebanyak 8 kali
7.5	Penyelenggaraan Event Lembaga Penggiat Seni dan Budaya**	3820587000	100	83.31	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Terselenggara teater Jogja pada tanggal 7-31 Maret 2015, 8 April 2015
7.6	Gelar Budaya Jogja**	1.000.000.000	100	73.73	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Kegiatan Telah selesai dilaksanakan
7.7	Pengembangan Taman Budaya**	11.261.278.500	100	90.6	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Kegiatan sudah selesai dilaksanakan.
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA**	**13.778.794.770**	**100**	**77.99**	**100**	**100**	**100**	**0**	
8.1	Misi Kebudayaan dalam dan Luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya**	4.502.434.000	100	73.09	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Misi Kebudayaan Ke Jepang tanggal 21-28 Agustus, Misi Kebudayaan ke Shanghai tanggal 21-28 Juni 2015, Misi Kebudayaan ke Gangwon Korea, Jakarta, bandung dan bali.
8.2	Gelar Pelangi Budaya**	2.000.000.000	100	81.91	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pentas Seni Budaya Sebanyak 6 yaitu : 1. Upacara Tradisi Beselan, Dlingo, Bantul, tanggal 21 April 2015, 2. Pentas Budaya Edu Car SD Kanisius Kumendaman 26 April 2015, 3. Gelar Budaya

23. Urusan Kebudayaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Garda Nusa , di Gunungkidul, tanggal 9 Mei 2015 , 4. Bersih desa dan luaran di Dusun Taruban, Kulon Progo 10 Mei 2015, 5. Pentas seni Budaya di Ngawen , Gunungkidul, tanggal 16 Mei 2015, 6. Festival Dalang Anak dan Remaja di tembi, Bantul 29 Mei 2015.
8.3	Membangun Kemitraan dengan Instansi**	3.602.074.000	100	77.06	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Kegiatan Telah Selesai diaksanakan Ada Pengembali-an tiket pesawat pada SPPD.
8.4	Membangun Kemitraan Bilateral**	505.000.000	100	54.03	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi** Frankfrut tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada MOU kerjasama dengan Frankfrut.
8.5	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya**	3.169.286.770	100	79.57	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi** Telah terlaksana-nya hubungan kemitraan dengan Palembang, Jakarta, Bengkulu dan semarang.
9	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN**	**1,111,200,000**	**100**	**91.77**	**100**	**100**	**100**	**0**	**Penjelasan Realisasi:** Kegiatan sudah selesai dilaksanakan
9.1	Pengembangan kompleks Taman Budaya Yogyakarta**	324.992.000	100	89.82	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Kegiatan sudah selesai dilaksanakan
9.2	Pengembangan Pusat Konservasi dan Pengembangan Budaya**	9.557.500	100	41.82	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi** Kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena gagal lelang 2x, anggaran dialih-kan untuk kegiatan lain,

23. Urusan Kebudayaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									sehingga hanya Rapat persiapan yang telah dibayarkan.
9.3	Pengadaan Sarana Kesenian ke Sekolah**	1.899.200.000	100	99.23	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi** Pekerjaan sudah selesai dilaksana-kan, Sarana Kesenian ke Sekolah-sekolah: 5 Unit gamelan perunggu dari 5 Unit gamelan perunggu.
9.4	Pengadaan Sarana Kesenian ke Masyarakat**	4.465.837.000	100	94.19	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi** Pekerjaan baru tahap pengerjaan di rekanan pemenang lelang: CV. Mataram Triatmaja Yogyakarta.
9.5	Pengembangan Rumah Budaya**	380.450.000	100	96.07	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pekerjaan Kajian Rumah Budaya Sudah dilaksana-kan oleh CV. sakalike, Alamat: Gading Lumbung, RT 17 Donotirto, Kretek Bantul.
9.6	Pembangunan Laboratorium Budaya di Satuan Pendidikan**	250.000.000	100	97.11	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Sudah dilaksana-kan serah terima Pekerjaan di bulan Desember 2015
10	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	1293008000	100	93.81	100	100	100	0	
10.1	Penguatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan**	1.293.008.000	100	93.81	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat. Station Wagon dan Pickup, brankas dan mesin ketik
	Jumlah	**224.383.181.195**	**100**	**79.87**	**99.76**	**99.99**	**98.93**		

Sumber: Disbud DIY, 2016

23. Urusan Kebudayaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**Pengembangan Nilai Budaya**	**649.170.000**	**100**	**99,83**	**100**	**100**	**100**	**-**	
1.1	Aktualisasi Potensi Seni, Adat dan Tradisi Derah	649.170.000	100	99,83	100	100	100	0	
	JUMLAH	**649.170.000**	**100**	**99,83**	**100**	**100**	**100**	**0**	

Sumber: BKPM DIY, 2016

24. Urusan Statistik

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
POGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH									
1	Pengelolaan Data dan Statistik Daerah	1.193.335.000	100	98,38%	100	100	100	0	

Sumber: BAPPEDA DIY, 2016

25. Urusan Kearsipan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
A	**PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN**	**708,265,800**	**100**	**88.72**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Pengelolaan Arsip Dinamis	415,966,500	100	85.88	100	100	100	0	Sisa Kontrak Pengadaan
2	Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan	292,299,300	100	92.75	100	100	100	0	
B	**PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH**	**141,000,000**	**100**	**88.75**	**100**	**97.00**	**100**	**-3.00**	
1	Pemindahan Arsip Instansi yang Digabung/ Dihapus/ Diubah Statusnya	141,000,000	100	88.75	100	97.00	100	-3.00	Ada 3 SKPD yg belum siap menyerahkan arsip statisnya ke bpad
C	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**	**620,837,300**	**100**	**92.73**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Promosi dan Sosialisasi Kearsipan	298,022,500	100	94.83	100	100	100	0	
2	Alih Media Arsip dan Digitalisasi Arsip Statis	233,582,500	100	88.67	100	100	100	0	Sisa lelang pengadaan
3	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)	89,232,300	100	96.32	100	100	100	0	

Sumber: BPAD DIY, 2016

26. Urusan Perpustakaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**3,532,179,550**	**100.00**	**73.91**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000	100.00	94.88	100	100	100	0	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,450,000,000	100.00	53.35	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pembayaran listrik; air; telepon dan Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet **Hambatan/ Masalah:** bon berdasarkan realisasi tagihan tiap bulan dan Pembangunan Gedung Perpusta-kaan baru selesai pada bulan Desember
1.3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	32,000,000	100.00	84.58	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** check up kesehatan 77 orang pada bulan September di Cito Belanja Perawatan dan Pengobatan Lokal **Hambatan/ Masalah:** review inspektorat **Solusi:** dikembalikan ke kas daerah
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15,000,000	100.00	84.40	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Pembayaran pjk kendaraan bermotor dan belanja jasa KIR di bawah pagu anggaran **Hambatan/ Masalah:** disesuaikan dengan tagihan Diseusiakan dengan jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan **Solusi:** Disesuiakan dengan jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan

26. Urusan Perpustakaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	69,154,400	100.00	99.34	100	100	100	0	
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	691,000,000	100.00	87.77	100	100	100	0	Sisa lelang jasa kebersihan kantor
1.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30,500,000	100.00	97.97	100	100	100	0	
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,750,000	100.00	95.67	100	100	100	0	
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	225,000,000	100.00	91.42	100	100	100	0	
1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	251,317,550	100.00	70.31	100	100	100	0	Ad cost Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	500,662,000	100.00	95.51	100	100	100	0	
1.12	Analisis Kebutuhan SDM UPTD Perpustakaan	49,500,000	100.00	98.87	100	100	100	0	
1.13	Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD	100,000,000	100.00	73.92	100	100	100	0	Efisiensi pada belanja pengada-an sarana.
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**8,213,965,100**	**100.00**	**93.43**	**100**	**100**	**100**	**0**	
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	408,000,000	100.00	83.33	100	100	100	0	Pembangunan Gedung Perpus-takaan baru selesai bln Desember
2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	500,000,000	100.00	99.72	100	100	100	0	
2.3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	75,450,000	100.00	28.71	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Proses Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor hingga November **Hambatan/ Masalah:** disesuaikan dengan kebutuh-an pemeliharaan pada perlengkap-an gedung kantor yg tertuang di DPA; item barang yang ada tidak rusak **Solusi:** memaksimalkan pemeliharaan; disesuaikan dengan realitas kerusakan barang

26. Urusan Perpustakaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	50,000,000	100.00	59.15	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** proses Pemeli-haraan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor hingga November **Hambatan/ Masalah:** disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan pada perlengkap-an gedung kantor yg tertuang di DPA; item barang yang ada tidak rusak **Solusi:** memaksimalkan pemeliharaan; disesuaikan dengan realitas kerusakan barang
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	15,000,000	100.00	100.00	100	100	100	0	
2.6	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	100,000,000	100.00	96.97	100	100	100	0	
2.7	Pengembangan Teknologi Informasi	100,000,000	100.00	76.14	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:** Rapat koordinasi kegiatan pengembangan web hingga bulan November **Hambatan/ Masalah:** Honor tim pelaksana kegiatan tidak dicairkan karena ada review dari inspektorat; **Solusi:** kembalikan ke kas daerah
2.8	Pembangunan Depo/ Gedung Arsip	4,975,585,000	100.00	95.62	100	100	100	0	
2.9	Pemeliharaan Jaringan Telepon dan Air	10,000,000	100.00	100.00	100	100	100	0	
2.10	Peresmian Layanan Perpustakaan di Gedung Baru	1,489,695,000	100.00	91.23	100	100	100	0	
2.11	Relokasi Layanan Perpustakaan	200,000,000	100.00	99.30	100	100	100	0	
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**1,008,891,450**	**100.00**	**90.21**	**100**	**100**	**100**	**0**	
3.1	Inventarisasi, Integrasi dan Pengelolaan Barang	30,000,000	100.00	77.24	100	100	100	0	**Penjelasan Realisasi:**

26. Urusan Perpustakaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Rapat dan perjalanan Dinas ke Jakarta Perpusnas, a/n Mulyanta dan Bambang Asmarajati tgl 26-27 Maret dan pelaksaaan kegiatan Inventarisasi, Integrasi dan Pengelolaan Barang hingga bulan November
3.2	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	94,649,200	100.00	88.20	100	100	100	0	
3.3	Pengembangan Kualitas S D M	133,434,250	100.00	92.40	100	100	100	0	
3.4	Pengembangan I S O	99,022,500	100.00	98.60	100	100	100	0	
3.5	Pengembangan Program Perpustakaan dan Kearsipan	151,785,500	100.00	88.57	100	100	100	0	AD COST sppd Luar Daerah
3.6	Promosi dan Publikasi Perpustakaan & Kear-sipan (Pajak Rokok)	500,000,000	100.00	89.62	100	100	100	0	Sisa lelang pengadaan
4	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**194,076,900**	**100.00**	**96.49**	**100**	**100**	**100**	**0**	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	11,000,000	100.00	98.41	100	100	100	0	
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	10,000,000	100.00	100.00	100	100	100	0	
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengem-bangan Data dan Informasi	142,935,000	100.00	95.97	100	100	100	0	
4.4	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	30,141,900	100.00	97.11	100	100	100	0	
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA**	**23,109,750,000**	**100.00**	**97.97**	**100**	**100**	**100**	**0**	
5.1	Pembangunan Gedung Perpustakaan	23,109,750,000	100.00	97.97	100	100	100	0	
6	**Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan**	**5,446,176,750**	**100.00**	**94.62**	**100**	**99.43**	**100**	**0**	
6.1	Pengelolaan Bahan Pustaka	1,557,605,000	100.00	97.10	100	100	100	0	
6.2	Kerjasama Perpustakaan	459,156,750	100.00	82.65	100	100	100	0	Ad cost SPPD Luar Daerah
6.3	Pengembangan Koleksi Peradaban Budaya Timur	308,290,000	100.00	92.49	100	100	100	0	

26. Urusan Perpustakaan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
6.4	Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan	3,121,125,000	100.00	95.35	100	99.00	100	0	
7	**Pengembangan Budaya Baca**	**3,046,949,350**	**100.00**	**94.44**	**100**	**100**	**100**	**0**	
7.1	Layanan Perpustakaan	2,788,232,500	100.00	94.18	100	100	100	0	

Sumber: BPAD DIY, 2016

27. Urusan Pariwisata

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1,228,995,000**	**100**	**89.19**	**100**	**100**	**98.29**	**1.71**	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,000,000	100	99.99	100	100	100	0	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	276,919,000	100	69.37	100	100	100	0	
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	6,200,000	100	44.1	100	100	100	0	
1.4	Penyediaaan Jasa Administrasi Keuangan	38,040,000	100	86.28	100	100	100	0	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	71,050,000	100	100	100	100	100	0	
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32,337,000	100	100	100	100	95	5	
1.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,000,000	100	100	100	100	95	5	
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listri/ Penerang-an Bangunan Kantor	17,000,000	100	100	100	100	90	10	
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,000,000	100	100	100	100	90	10	
1.1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,920,000	100	100	100	100	90	10	
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	49,995,000	100	68.82	100	100	95	5	
1.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	365,821,000	100	98.72	100	100	97	3	
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	308,713,000	100	93.82	100	100	100	0	
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**1,746,249,600**	**100**	**95.59**	**100**	**100**	**98.96**	**1.04**	
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	426,196,400	100	97.8	100	100	100	0	
2.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	359,893,000	100	92.78	100	100	100	0	
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	381,901,000	100	93.46	100	100	100	0	
2.4	Pengadaan Mebeleur	90,049,200	100	97.92	100	100	90	10	
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	231,100,000	100	99.59	100	100	100	0	
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	179,190,000	100	92.91	100	100	100	0	
2.7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	22,845,000	100	97.48	100	100	100	0	
2.8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	35,200,000	100	99.15	100	100	100	0	
2.9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	15,000,000	100	100	100	100	100	0	

27. Urusan Pariwisata

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2.1	Pemeliharaan Taman	4,875,000	100	93.85	100	100	100	0	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATAUR**	**110,000,000**	**100**	**99.55**	**100**	**100**	**100**	**0**	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000	100	100	100	100	100	0	
3.2	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	60,000,000	100	99.18	100	100	100	0	
4	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**144,086,000**	**100**	**90.77**	**100**	**100**	**97.34**	**2.66**	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	7,195,400	100	74.01	100	100	100	0	
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	15,290,000	100	96.4	100	100	100	0	
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	38,944,000	100	99.46	100	100	100	0	
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	82,656,600	100	87.09	100	100	100	0	
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA**	**5,441,145,000**	**100**	**91.07**	**100**	**100**	**100**	**0**	
5.1	Penyusunan Data Kepariwisataan	1,520,350,000	100	98.32	100	100		100	
5.2	Pemasaran dan Jejaring Kemitraan Pariwisata	3,920,795,000	100	88.26	100	100		100	
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**	**3,782,402,000**	**100**	**88.83**	**100**	**100**	**99.7**	**0.3**	
6.1	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulaan	3,782,402,000	100	88.83	100	100	100	0	
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN**	**4,197,255,000**	**100**	**99.26**	**100**	**100**	**100**	**0**	
7.1	Optimalisasi Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	897,000,000	100	97.36	100	100	100	0	
7.2	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	3,300,255,000	100	99.77	100	100	100	0	
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA**	**2,137,500,000**	**100**	**95.61**	**100**	**100**	**99.1**	**0.9**	
8.1	Fasilitasi Penyelenggara-an Event di Desa Wisata	2,137,500,000	100	95.61	100	100	100	0	
	Jumlah	**18,787,632,600**	**100**	**93.31**	**100**	**100**			

Sumber: Dispar DIY, 2016

28. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**2.592.548.600**	**100**	**83,60**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.525.000	100	99,99	100	100	100	0	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.166.400.000	100	66,85	100	100	100	0	Pembayaran tagihan sesuai dengan rekening, pembayaran internet dibiayai oleh LTMI
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	37.365.600	100	68,23	100	100	100	0	Belanja jasa KIR, STNK dan bea balik nama kendaraan roda 4 sisa anggaran merupakan efisiensi dari belanja jasa KIR dan bea balik nama kendaraan roda 4
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	111.406.500	100	90,63	100	100	100	0	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	124.880.000	100	100	100	100	100	0	
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	81.959.000	100	99,94	100	100	100	0	
1.7	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	66.946.000	100	99,99	100	100	100	0	
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	100	99,89	100	100	100	0	
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.250.000	100	100	100	100	100	0	
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.170.000	100	100	100	100	100	0	
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	70.730.000	100	99,72	100	100	100	0	
1.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	290.170.000	100	93,90	100	100	100	0	
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja *	538.185.500	100	99,29	100	100	100	0	
1.14	Penyediaan Retribusi Sampah	1.560.000	100	92,31	100	100	100	0	
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**4.689.880.998**	**100**	**98,77**	**100**	**100**	**100**	**0**	
2.1	Pembangunan Gedung kantor	2.082.642.000	100	99,88	100	100	100	0	
2.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	257.560.000	100	99,31	100	100	100	0	
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	208.700.000	100	99,67	100	100	100	0	
2.4	Pengadaan Mebeleur	231.137.000	100	98,97	100	100	100	0	

28. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	192.425.000	100	99,98	100	100	76,25	23,75	
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	511.875.000	100	98,32	100	100	100	0	
2.7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor *	30.200.000	100	98,69	100	100	100	0	
2.8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	28.970.000	100	99,05	100	100	100	0	
2.9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	6.000.000	100	100	100	100	100	0	
2.10	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung kantor	940.371.998	100	97,58	100	100	100	0	
3	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**303.000.000**	**100**	**98,39**	**100**	**100**	**100**	**0**	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD*	3.500.000	100	100	100	100	100	0	
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	29.500.000	100	98,20	100	100	100	0	
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	230.000.000	100	98,56	100	100	100	0	
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	40.000.000	100	92,44	100	100	100	0	
4	**PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT**	**439.248.900**	**100**	**97,83**	**100**	**100**	**100**	**0**	
4.1	Fasilitasi Perijinan Perikanan Tangkap dan Budidaya	89.249.200	100	96,31	100	100	100	0	
4.2	Peningkatan Wasdal SDI di PU dan Laut	200.000.000	100	96,93	100	100	100	0	
4.3	Pengelolaan SDI	149.999.700	100	99,93	100	100		100	
5	**PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM**	**50.000.000**	**100**	**97,50**	**100**	**100**	**100**	**0**	
5.1	Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	50.000.000	100	97,50	100	100	100	0	
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN**	**8.970.520.400**	**100**	**89,57**	**100**	**100**	**100**	**0**	
6.1	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan*	1.919.300.000	100	89,10	100	100	100	0	Efisiensi dari sisa lelang pengadaan barang/ bantuan hibah
6.2	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	150.000.000	100	97,81	100	100	100	0	

28. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
6.3	Pembinaan Mutu Benih dan Induk Perikanan	200.000.000	100	98,83	100	100	100	0	
6.4	Pelayanan & Pengendali-an Hama dan Penyakit Ikan	110.000.000	100	99,78	100	100	100	0	
6.5	Peningkatan Induk, bibit unggul budidaya air tawar	587.396.000	100	96,28	100	100	100	0	
6.6	Kaji terap teknologi pengolahan pakan ikan	100.000.000	100	99,86	100	100	100	0	
6.7	Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau dan Air Laut	797.237.900	100	93,05	100	100	100	0	
6.8	Pengembangan Sarana Prasarana Perbenihan (DAK)	5.106.586.500	100	87,41	100	100		100	Efisiensi sisa lelang pemba-ngunan fisik
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**	**32.018.155.200**	**100**	**90,00**	**100**	**100**	**80**	**20**	
7.1	Pengembangan Pelabuhan Perikanan	30.022.640.000	100	89,92	100	100	100	0	Efisiensi sisa lelang pembangunan fisik
7.2	Uji Coba Pengembangan Teknologi Alat Penangkapan Ikan	65.000.000	100	92,08	100	100	100	0	
7.3	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap*	1.221.620.500	100	93,91	100	100	90	10	
7.4	Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil	652.644.700	100	88,82	100	100	100	0	Efisiensi dari sisa anggaran sewa kamar, honor instruktur (fishing master), perjalanan dinas luar daerah.
7.5	Peningkatan Pelayanan Pelabuhan	56.250.000	100	55,34	100	100		100	Efisiensi dari sisa anggaran honor narsum, perjalanan dinas luar daerah dan bantuan transport nara sumber pusat.
8	**PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN**	**1.339.636.950**	**100**	**96,13**	**100**	**100**	**100**	**0**	
8.1	Gerakan Memasyarakat-kan Makan Ikan (Gemarikan)*	350.000.000	100	97,02	100	100	100	0	
8.2	Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	156.663.775	100	91,49	100	100	100	0	
8.3	Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	250.000.000	100	99,85	100	100	100	0	

28. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
8.4	Pengembangan Pola Kemitraan Antar Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	101.828.000	100	95,86	100	100	100	0	
8.5	Promosi Perikanan dan Kelautan/ Pameran	250.000.000	100	93,83	100	100	100	0	
8.6	Optimalisasi Pemasaran Produk Perikanan*	106.145.175	100	94,68	100	100	100	0	
8.7	Pengembangan Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan	125.000.000	100	98,09	100	100	100	0	
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR**	**374.000.000**	**100**	**98,81**	**100**	**100**	**100**	**0**	
9.1	Pengembangan Rekayasa Teknologi BAL Sundak	74.000.000	100	96,77	100	100	100	0	
9.2	Pengembangan Rekayasa Teknologi BAT	300.000.000	100	99,32	100	100	100	0	
10	**PROGRAM REHABILITASI EKOSISTEM DAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM**	**130.335.775**	**100**	**99,93**	**100**	**100**	**100**	**0**	
10.1	Peningkatan Stok Sumberdaya Perikanan	52.000.000	100	99,96	100	100	100	0	
10.2	Pengembangan Konservasi Ekosistem Sumberdaya Laut dan Pesisir	78.335.775	100	99,91	100	100	100	0	
11	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**343.620.400**	**100**	**97,48**	**100**	**100**	**100**	**0**	
11.1	Pengembangan Kelembagaan Penyuluh Swadaya	49.999.925	100	100	100	100	100	0	
11.2	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Penyuluh	51.956.250	100	91,18	100	100	100	0	
11.3	Pengembangan Jiwa Kebaharian pada Generasi Muda	65.647.925	100	99,97	100	100	100	0	
11.4	Penyelenggaraan Hari Nusantara	91.016.300	100	98,69	100	100	100	0	
11.5	Penguatan Kelembagaan Pembenih Ikan	35.000.000	100	92,20	100	100	100	0	
11.6	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	50.000.000	100	99,76	100	100	100	0	
	Jumlah	**51.250.947.223**	**100**	**90,82**	**100**	**100**	**100**		

Sumber: Dislautkan DIY, 2016

29. Urusan Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**1.989.843.316**	**100**	**92.96**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	100	100	100	100	100	0	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	715.861.500	100	87.49	100	100	100	0	Menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan telepon, listrik dan air
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	26.100.000	100	79.64	100	100	100	0	Efisiensi karena menyesuaikan dengan faktur pajak STNK
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	113.429.000	100	94.32	100	100	100	0	
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	331.796.000	100	99.67	100	100	100	0	
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	111.158.200	100	98.30	100	100	100	0	
1.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.993.150	100	90.49	100	100	100	0	
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pene-rangan Bangunan Kantor	34.000.000	100	92.80	100	100	100	0	
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.176.200	100	99.64	100	100	100	0	
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.800.000	100	96.47	100	100	100	0	
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	59.950.000	100	93.12	100	100	100	0	
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	349.790.000	100	98.15	100	100	100	0	
1.13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja	98.489.266	100	87.33	100	100	100	0	Efisiensi menyesuaikan hari kerja
1.14	Penyediaan Retribusi Sampah	4.500.000	100	89.00	100	100	100	0	Efisiensi karena ada selisih pembayaran retribusi sampah
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**12.494.465.988**	**100**	**91.62**	**100**	**100**	**100**	**0**	
2.1	Pembangunan Gedung Kantor	6.645.360.710	100	92.42	100	100	100	0	
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	490.096.000	100	91.80	100	100	100	0	
2.3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	181.925.000	100	94.42	100	100	100	0	
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	761.000.000	100	92.73	100	100	100	0	
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	50.000.000	100	99.12	100	100	100	0	
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	45.000.000	100	97.74	100	100	100	0	
2.7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	250.000.000	100	99.33	100	100	100	0	

29. Urusan Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
2.8	Pengelolaan Naskah DInas	55.631.000	100	91.69	100	100	100	0	
2.9	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor BPPTPH (DAK)	2.773.453.278	100	91.93	100	100	100	0	
210	Pembangunan/Rehabilitasi UPTD Proteksi Tanaman dan Sarana Pendukungnya (DAK)	460.000.000	100	82.39	100	100	100	0	Efisiensi karena ada sisa lelang pengada-an kendaraan bermotor roda 2
2.11	Pembangunan/Rehabilitasi/RenovasiUPTD Perbibitan dan Laboratorium Hewan dan Sarana Pendukungnya (DAK)	782.000.000	100	83.96	100	100	100	0	Efisiensi karena sisa lelang rehab bangunan laboratorium dan pengadaan alat laboratorium
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**19.559.400**	**100**	**99.86**	**100**	**100**	**100**	**0**	
3.1	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	19.559.400	100	99.86	100	100	100	0	
4	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**261.671.350**	**100**	**95.11**	**100**	**100**	**100**	**0**	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	4.095.000	100	98.22	100	100	100	0	
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	8.875.600	100	99.96	100	100	100	0	
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD Serta Pengembangan Data dan Informasi	209.222.250	100	95.44	100	100	100	0	
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	39.478.500	100	91.97	100	100	100	0	
5	**PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN**	**1.921.494.650**	**100**	**95.07**	**100**	**100**	**100**	**0**	
5.1	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	575.000.000	100	97.01	100	100	100	0	
5.2	Penyebarluasan Informasi Perbenihan	43.895.800	100	98.73	100	100	100	0	
5.3	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	227.269.100	100	95.36	100	100	100	0	
5.	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan	78.753.100	100	57.20	100	80	100	0	Efisiensi dalam belanja hibah barang/ jasa dari target 3 kelompok calon penerima hanya terealisasi 1 kelompok sedang-

29. Urusan Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
4									kan 2 kelompok tidak teregister dan tidak mendapat rekomendasi dari kabupaten
5.5	Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan	456.150.000	100	97.20	100	100	100	0	
5.6	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Pertanian	117.740.000	100	95.38	100	100	100	0	
5.7	Peningkatan Mutu Hasil Pertanian Standard Nasional Indonesia (TP, Hortikultura, Peternakan)	247.686.650	100	95.49	100	100	100	0	
5.8	Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pangan Olahan Hasil Pertanian	100.000.000	100	99.13	100	100	100	0	
5.9	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	75.000.000	100	95.47	100	100	100	0	
6	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN**	**6.864.571.900**	**100**	**97.04**	**100**	**100**	**100**	**0**	
6.1	Pengembangan Ternak Kambing	214.889.300	100	97.46	100	100	100	0	
6.2	Pengembangan Ternak Sapi Perah	83.962.600	100	98.36	100	100	100	0	
6.3	Pengembangan Ternak Sapi Potong	794.740.000	100	95.46	100	100	100	0	
6.4	Pengembangan Ternak Unggas	150.000.000	100	95.45	100	100	100	.0	
6.5	Pengembangan Produksi Semen Beku Sapi	1.495.320.000	100	97.08	100	100	100	0	
6.6	Pengembangan Pembibitan Ternak	2.691.600.000	100	97.98	100	100	100	0	
6.7	Penumbuhan HMT Di Lahan Marginal	150.000.000	100	96.92	100	100	100	0	
6.8	Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis	306.060.000	100	89.49	100	95	100	-5	Efisiensi dalam belanja bhn obat-obatan karena vaksin lentovet sudah tidak dijual dipasaran dan vaksin sejenis tidak ditemu-kan di pasaran
6.9	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Strategis (Pengujian Laboratorium)	554.490.000	100	97.67	100	100	100	0	
6.10	Pengawasan Lalu Lintas Ternak	236.170.000	100	98.01	100	100	100	0	
6.11	Pengembangan Bibit HMT di UPTD BPBPTDK	187.340.000	100	99.54	100	100	100	0	
7	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS S D M DAN KELEMBAGAAN PETANI**	**1.340.876.650**	**100**	**96.06**	**100**	**100**	**100**	**0**	
7.1	Diklat Agribisnis Peternakan	65.000.000	100	95.68	100	100	100	0	
7.2	Pengkajian Diklat	27.997.000	100	97.57	100	100	100	0	
7.3	Temu Teknis Teknologi Pertanian	40.000.000	100	96.93	100	100	100	0	

29. Urusan Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
7.4	Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan Bagi Petani	73.000.000	100	96.95	100	100	100	0	
7.5	Diklat Organik Farming	70.000.000	100	94.88	100	100	100	0	
7.6	Evaluasi Pasca Latihan dan Bimbingan Lanjutan	40.000.000	100	97.10	100	100	100	0	
7.7	Diklat Penangkaran Benih Padi, Bawang Merah, dan Buah-buahan Bagi Petani/ Penangkar	104.955.050	100	97.78	100	100	100	0	
7.8	Dukungan Praktek Lapangan & Penggunaan Laboratorium	100.000.000	100	99.26	100	100	100	0	
7.9	Diklat Integrated Farming	70.000.000	100	93.83	100	100	100	0	
7.10	Diklat Pemanfaatan Limbah Peternakan Sebagai Energi Alternatif	69.550.000	100	95.96	100	100	100	0	
7.11	Diklat Kewirausahaan Bagi Generasi Muda	209.099.950	100	96.68	100	100	100	0	
7.12	Apresiasi Perencanaan Diklat	10.000.000	100	99.38	100	100	100	0	
7.13	Diklat Budidaya dan Pengelolaan HMT	70.000.000	100	96.75	100	100	100	0	
7.14	Diklat Mitigasi dan Perubahan Iklim	70.000.000	100	96.40	100	100	100	0	
7.15	Penguatan Kelembagaan Tingkat Usaha	139.550.050	100	90.77	100	100	100	0	
7.16	Diklat Zoonosis	105.000.000	100	97.90	100	100	100	0	
7.17	Peningkatan Profesionalisme SDM Pertanian	76.724.600	100	94.68	100	100	100	0	
8	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN**	**4.170.936.825**	**100**	**87.12**	**100**	**100**	**100**	**0**	
8.1	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Parsipatif (Pendampingan Wismp)	100.000.000	100	76.52	100	100	100	0	Efisiensi dalam belanja makan dan minum harian umum (menyesuai-kan AWP WISMP)
8.2	Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan Sawah	179.607.900	100	90.86	100	100	100	0	
8.3	Pemberdayaan P3A dan Peningkatan Jalan Tersier	240.000.000	100	71.23	100	100	100	0	Efisiensi karena kegiatan lomba P3A tingkat nasional tidak jadi dilaksana-kan oleh Kementan sesuai surat dari Direktur Pengelolaan Air Irigasi Ditjen PSP Kementan Nomor: 63/IV.0.20/B.3.4/03/ 2015
8.4	Penanganan Lahan Pertanian Berkelanjutan	262.999.900	100	82.73	100	100	100	0	Efisiensi biaya sertifikat menyesuai-kan luasan di lapangan karena sebagian besar kepemilikan lahan kurang dari 500 m

29. Urusan Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
8.5	Pengembangan Padi Terpadu	228.276.900	100	89.23	100	100	100	0	Efisiensi karena sisa pengadaan belanja hibah barang/jasa
8.6	Pengembangan Alsin Tanaman Pangan	445.750.000	100	96.88	100	100	100	0	
8.7	Identifikasi Padi Hitam	13.855.300	100	92.29	100	100	100	0	
8.8	Pelayanan Sertifikasi Padi dan Palawija	66.300.000	100	97.16	100	100	100	0	
8.9	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	901.069.800	100	97.40	100	100	100	0	
8.10	Perbanyakan Benih Sumber di Tingkat Petani	143.102.850	100	15.40	100	80	100	-20	Pada saat pelak-sanaan kegiatan berupa penanaman padi di kelompok tani sudah mema-suki fase pembunga-an, keluar rekomen-dasi dari BPSBP yang menyatakan bahwa benih yang ditanam tidak lulus, karena ditemukan campur-an varietas lain (CVL) masing-masing 0,9 % (KT. Sri Rejeki I) dan 0,4 % (KT. Pule), sehingga rangkaian kegiatan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan.
8.11	Penyediaan Benih dan Pengembangan Jabal Kedelai	186.216.800	100	97.40	100	100	100	0	
8.12	Dukungan Sarana Produksi Budidaya Ubi Kayu	106.465.400	100	87.04	100	100	100	0	Efisiensi karena sisa pengadaan belanja hibah barang/ jasa
8.13	Bimbingan dan Dukungan Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi	449.697.200	100	79.91	100	100	100	0	Efisiensi disebabkan terjadi penurunan luas dan intensitas serangan OPT dan petani secara swadaya telah melakukan pengen-dalian preventif untuk mencegah terjadinya serangan OPT di lapangan
8.14	Pemberdayaan Petani Pemandu SLPHT	129.552.500	100	99.32	100	100	100	0	
8.15	SLPHT Berkelanjutan	175.000.000	100	96.55	100	100	100	0	
8.16	Analisa Standar dan Pengawasan Mutu Benih	82.190.000	100	96.74	100	100	100	0	
8.17	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (LOAN WISMP)	129.815.075	100	56.36	100	100	100	0	Efisiensi dalam belanja makan minum harian umum menyesuai-kan AWP WISMP
8.18	Observasi dan Identifikasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan	36.037.200	100	95.20	100	100	100	0	
8.19	Pengembangan Tanaman Pangan Terpadu	70.000.000	100	94.99	100	100	100	0	
8.20	Pengamatan dan Analisa Kehilangan Hasil Karena OPT Tanaman Pangan	25.000.000	100	87.41	100	100	100	0	Efisiensi menyesuaikan SHBJ

29. Urusan Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Tanaman Pangan	200.000.000	100	93.38	100	100	100	0	
9	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HOLTIKULTURA**	**1.803.726.600**	**100**	**88.20**	**100**	**100**	**100**	**0**	
9.1	Pengembangan GAP Hortikultura	128.401.200	100	91.41	100	100	100	0	
9.2	Pengembangan Hortikultura Terpadu	69.765.300	100	91.39	100	100	100	0	
9.3	Peningkatan Budidaya Hortikultura Di Lahan Pekarangan	108.802.100	100	97.18	100	100	100	0	
9.4	Dukungan Pengelolaan Lahan dan Air Untuk Pengembangan Buah Sayuran dan Tanaman Obat	196.675.000	100	97.45	100	100	100	0	
9.5	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	370.509.250	100	98.21	100	100	100	0	
9.6	Pengembangan Benih Sayuran di Tingkat Petani	60.976.600	100	98.77	100	100	100	0	
9.7	Sosialisasi Pengelolaan Lahan Pekarangan	50.000.000	100	92.52	100	100	100	0	
9.8	Pengembangan Buah, Sayur, dan Biofarmaka	432.621.600	100	82.08	100	100	100	0	Efisiensi menyesuai-kan spesifikasi sehingga ada selisih harga bibit durian
9.9	Dukungan Sarana Pengendalian OPT dan Brigade Proteksi Hortikultura	99.216.500	100	72.61	100	100	100	0	Efisiensi karena luas terserang dan intensitas serangan OPT pada tanaman hortikultura menurun dan petani telah melakukan pengendalian OPT secara swadaya dan mandiri sejak dini
9.10	Pengembangan Tanaman Hias	139.617.300	100	92.99	100	100	100	0	
9.11	Dukungan Sarana dan Prasarana Pengembang-an Buah, Sayur dan Biofarmaka	147.141.750	100	57.81	100	85	100	-15	Efisiensi belanja hibah barang/ jasa
10	**PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN**	**507,067,425**	**100.00**	**91.76**	**100.00**	**100.00**	**100**	**0**	
10.1	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan	67,795,400	100.00	99.57	100.00	100.00	100	0	
10.2	Sekolah Lapang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perkebunan/ SLPPHP (Cukai)	109,750,000	100.00	83.10	100.00	100.00	100	0	efisiensi penggunaan anggaran
10.3	Pengembangan Kelembagaan Petani Tembakau (Cukai)	50,500,000	100.00	93.99	100.00	100.00	100	0	
10.4	Pengembangan Komoditas Perkebunan Berbasis Kawasan	27,685,300	100.00	99.94	100.00	100.00	100	0	

29. Urusan Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
10.5	Pembinaan Pasca Panen Pengolahan Produk Perkebunan	104,548,000	100.00	99.92	100.00	100.00	100	0	
10.6	Promosi Atas Hasil Perkebunan	146,788,725	100.00	86.50	100.00	100.00	100	0	Sisa pembelian materi promosi, dan perjalanan dinas
11	**PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN**	**1,348,662,450**	**100.00**	**97.74**	**100.00**	**100.00**	**98.60**	**1.40**	
11.1	SL-PHT Tanaman Tembakau (Cukai)	172,627,650	100.00	98.71	100.00	100.00	80.00	20.00	
11.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Komoditas Perkebunan	96,951,500	100.00	99.77	100.00	100.00	100	0	
11.3	Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	82,728,000	100.00	99.82	100.00	100.00	100	0	
11.4	Pengembangan Tanaman Perkebunan Pada Lahan Marginal	18,935,000	100.00	98.91	100.00	100.00	100	0	
11.5	Peramalan, Pengamatan, Analisa dan Rekomendasi Pengendalian OPT Perkebunan	49,400,000	100.00	88.48	100.00	100.00	97.14	2.86	Sisa pembelian insektisida; Sisa perjalanan luar daerah
11.6	Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	150,000,000	100.00	98.30	100.00	100.00	100	0	
11.7	Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	173,091,000	100.00	99.54	100.00	100.00	100	0	
11.8	Dukungan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai)	70,733,000	100.00	88.61	100.00	100.00	100	0	efisiensi penggunaan anggaran
11.9	Perlindungan Perbenihan Varietas Unggul / Lokal (Cukai)	125,136,300	100.00	98.31	100.00	100.00	100	0	
11.10	Pelatihan Teknis Budidaya Perkebunan Sesuai GAP (Cukai)	130,791,500	100.00	98.55	100.00	100.00	100	0	
11.11	Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan	152,420,000	100.00	96.27	100.00	100.00	100	0	
11.12	Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu	106,322,100	100.00	99.15	100.00	100.00	100	0	
11.13	Intensifikasi Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal	19,526,400	100.00	99.99	100.00	100.00	100	0	
	JUMLAH	**32,722,876,554**	**100.00**	**93.65**	**100.00**	**99.85**	**99.5**		

Sumber: Distan DIY, 2016

30. Urusan Kehutanan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
A	**PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN**	**4,799,615,525**	**100**	**92.87**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	51,875,000	100	99.38	100	100	100	0	efisiensi penggunaan anggaran
2	Pengembangan Industri & Pemasaran Hasil Hutan	179,490,000	100	84.58	100	100	100	0	Efisiensi biaya pada Perjalanan Dinas luar kota (Tiket pesawat & peng-inapan) dan Sewa tempat pameran.
3	Optimalisasi Tegakan Kayu Putih	1.907.580.500	100	86,41	100	100	100	0	
4	Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Kehutanan	135,128,250	100	96.21	100	100	100	0	Sisa pembelian insektisida; dan Sisa perjalanan luar daerah
5	Pengolahan/ Penyulingan Minyak Kayu Putih	2,365,645,075	100	92.04	100	100	98	2.00	Sisa belanja tenaga kerja dan pengadaan barang.
6	Pengelolaan Hutan Terpadu	47,500,000	100	99.15	100	100	100	0	
7	Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Kehutanan	135,128,250	100	96.21	100	100	100	0	
8	Inventarisasi Tanaman Kehutanan	112,396,700	100	99.08	100	100	100	0	
B	**PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**	**4,758,106,450**	**100**	**90.49**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Pembinaan, Pengendali-an & Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	72,065,250	100	95.61	100	100	100	0	
2	Rehabilitasi Hutan Konservasi (DAK)	1,743,734,650	100	94.29	100	100	100	0	
3	Optimalisasi Peran Pesanggem Dalam Pengelolaan Hutan	62,228,800	100	99.83	100	100	100	0	
4	Optimalisasi Pembangunan dan Pengelolaan Tahura	2,781,240,000	100	87.85	100	100	100	0	Efisiensi sisa kegiatan antara lain: Honorarium harian non PNS Rp26.596.000; Belanja air Rp3.300.000; Belanja Publikasi Rp24.210.000; Jasa EO/ Atraksi kesenian Rp5.196.000; Belanja Cetak Rp18.220.000; Jasa Konsultasi Penelitian Rp27.759.000;Peng-adaan Rambu Penunjuk Arah Rp37.602.000; Pengadaan Kursi Kerja Rp,7.290.000; Pengadaan *Sound System* Rp18.223.400; Pengadaan Radio UHF Rp16.800.000;Peng-adaan Konstruksi Jalan

30. Urusan Kehutanan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
									Rp134.672.000; Pengadaan Jaringan Konstruksi air bersih Rp9.166.000; Pengadaan Instalasi Listrik Rp8.940.000
5	Rehabilitasi Lahan Pantai	98,837,750	100	93.87	100	100	100	0	
C	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN**	**1,908,845,975**	**100**	**90.45**	**100**	**98**	**100**	**-2.00**	
1	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	37,000,000	100	99.27	100	100	100	0	
3	Perlindungan Hutan	1,028,006,900	100	99.54	100	100	100	0	
4	Pengamanan Hutan	370,000,000	100	97.15	100	100	100	0	
5	Peningkatan SDM Pengaman Hutan	73,839,075	100	79.47	100	100	100	0	Ada sisa utk keg Biaya Jasa EO dlm rangka study banding ke Cepu Rp10.770.000 dan Sisa Honor Narasumber Rp4.260.000
6	Konservasi Sumber Mata Air	150,000,000	100	89.69	100	100	100	0	Terdapat efisieni harga bibit pagu Rp120.920.000 realisasi Rp105.490.000
7	Pengembangan Konservasi Alam Wana Lestari	250,000,000	100	84.23	100	93.00	100	-7.00	Dilaksanakan penilaian 8 kategori di 4 kabupaten 1 kota, namun dari 4 kabupaten tidak lengkap mengirim-kan keseluruhan kategori, sehingga dana hidangan seleksi, perjadin penilaian dan hadiah juara II dan III tidak seluruhnya terserap; Jambore dibatalkan berdasarkan surat dari kementerian kehutanan No.5.44/IX-LUH/2015 tanggal 6 Maret 2015 sehingga fisik dan keuangan tidak terserap.
D	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN**	**170,230,500**	**100**	**93.36**	**100**	**100**	**100**	**0**	
1	Penatausahaan dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan	119,955,500	100	90.68	100	100	100	0	Penerbit SKU tidak melaporkan
2	Audit Peredaran Hasil Hutan dan Industri Primer	50,275,000	100	99.76	100	100	100	0	
E	**PROGRAM PENATAAN KAWASAN HUTAN**	**1,703,257,625**	**100**	**97.36**	**100**	**100**	**95.46**	**4.54**	
1	Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan	399,455,100	100	94.45	100	100	100	0	
2	Pengembangan Hutan Tanaman	490,000,000	100	79.02	100	86	88.67	-2.67	

30. Urusan Kehutanan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
3	Orientasi dan Tata Batas Kawasan Hutan	101,220,900	100	92.86	100	100	100	0	
4	Penyusunan Rencana Teknik Tahunan	125,000,00	100	98,33	100	100	100	0	
5	Inventarisasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Hutan AB	58,677,700	100	94.52	100	100	75	25.00	
6	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	108,903,925	100	98.46	100	100	100	0	
7	Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan	420,000,000	100	98.56	100	100	100	0	
	Jumlah	**13,340,056,075**	**100**	**91.22**	**100**	**99.53**			

Sumber: Dishutbun DIY, 2016

31. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan**	**8.849.470.000**							
	1. Perencanaan Ketenagalistrikan	1.168.160.000	100	90,82	100	100	100	0	
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	7.520.750.000	100	93,93	100	100	100	0	
	3. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	160.560.000	100	97,80	100	100	100	0	
2	**Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan**	**3.181.880.000**							
	1. Perencanaan Energi Baru Terbarukan	297.120.000	100	99,81	100	100	100	0	
	2. Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan	1.989.800.000	100	83,81	100	100	100	0	Efisiensi dan sisa lelang
	3. Pembinaan dan Pengawasan Diversifikasi Energi	546.760.000	100	94,92	100	100	100	0	
	4. Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	348.200.000	100	92,55	100	100	100	0	
3	**Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pengelolaan, Pendayagunaan Air Tanah**	**6.115.070.000**							
	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemantauan Air Tanah	596.940.000	100	98,78	100	100	100	0	
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengambilan Air Tanah	3.389.830.000	100	95,68	100	100	100	0	
	3. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah	995.500.000	100	89,06	100	100	100	0	Sisa lelang
	4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Air Tanah	388.560.000	100	90,49	100	100	100	0	
	5. Perencanaan Pengelolaan Air Tanah	744.240.000	100	97,12	100	100	100	0	
4	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi**	**1.164.510.000**							
	1. Perencanaan Pelaksanaan Konservasi Energi	676.760.000	100	77,04	100	100	100	0	Efisiensi anggaran
	2. Pelaksanaan Audit Energi	487.750.000	100	91,80	100	100	100	0	

31. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
5	**Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Usaha Pertambangan**	**370.560.000**							
	1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Pertambangan	319.435.000	100	83,22	100	100	100	0	Sesuai kebutuhan
	2. Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Pertambangan	51.125.000	100	96,57	100	100	100	0	

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2016

32. Urusan Perindustrian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
I	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**1.125.699.500**	**100**	**89,38**	**100**	**100**	**93,45**	**6,55**	
1.	Peningkatan produksi IKM logam sandang dan aneka	446.699.500	100	93,36	100	100	-	100	
2.	Peningkatan produksi IKM agro dan kimia	325.000.000	100	96,68	100	100	-	100	
3.	Peningkatan kualitas produk IKM logam sandang dan aneka	194.600.000	100	61,94	100	100	-	100	- Sosialisasi Wajib Mainan Anak terda-pat Efisiensi sebesar Rp19.780.000 terdiri dari perlengkapan peserta Rp5.000.000 karena SBU/SBK tidak diperkenan-kan, transport narasumber Rp6.000.000 Akomodasi Rp1.700.000 dari pusat yang dikirim 1 orang, Sewa tempat Rp5.000.000, Konsumsi haraian Rp280.000 Honor Instruktur local Rp400.000 Serta Efisiensi Perjalanan Luar Daerah.
4.	Peningkatan kualitas produk IKM agro dan kimia	159.400.000	100	96,87	100	100	-	100	
II	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**	**719.937.500**	**100**	**99,03**	**100**	**100**	**100**	-	
1.	Perekayasaan dan pelayanan teknologi tepat guna	719.937.500	100	99,03	100	100	100	-	
III	**Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif**	**750.000.000**	**100**	**99,69**	**100**	**100**	**100**	-	
1.	Pengembangan industri kreatif	750.000.000	100	99,69	100	100	100	-	

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2016

33. Urusan Pedagangan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
I	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan**	**672.636.350**	**100**	**96,73**	**100**	**100**	**-**	**100**	
1.	Pengawasan dan penyuluhan kemetrologian	349.731.000	100	99,47	100	100	-	100	
2.	Perlindungan pasar domestik	322.905.350	100	93,77	100	100	-	100	
II	**Program peningkatan dan pengembangan ekspor**	**4.083.297.700**	**100**	**96,66**	**100**	**100**	100	-	
1.	Kerjasama & pemasaran produk ekspor	4.083.297.700	100	96,66	100	100	100	-	
III	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	2.576.835.500	100	85,32	100	95,25	100	-4.75	
1.	Pengelolaan dan pelayanan HAKI	366.305.000	100	89,55	100	95	100	-5.00	- Efisiensi sebesar Rp1.395.900 terdiri dari: Belanja penggandaan Rp1.500,-, SPPD Luar Daerah Rp1.194.000,- , LS Sertifikasi Pendaftaran Jogjamart Rp100.000,- , LS Iklan ke Media Rp100.000,-, Makan Minum harian umum Rp535.000,- Nara Sumber Edukasi Rp600.000,-, Pendaftaran Merek Kolektif Rp100.000,- SPPD Luar Daerah Gorontolo Rp6.389.000,-, Pemeriksaan substantif Paten (LS) Rp100.000,-
2	Pemasaran perdagangan dalam negeri	1.039.880.500	100	78,96	100	90	-	90	- Pameran gelar batik nusantara ada *saving display* sebesar Rp8.750.782,- - Untuk kegiatan PRJ ada efisiensi baju seragam Rp50.000,- bahan peraga Rp2.500,- SPPD luar Daerah Rp18.715.100,- - Pameran Icra efisiensi SPPD luar daerah Rp6.068.000 dan display Rp25.000,- - Untuk Pameran Gianyar Publikasi kurang dari penyelenggara, ada efisiensi SPPD luar daerah Rp4.645.000,- - Untk pameran Dekranas ada efisiensi sewa stand Rp11.594.600,- se

33. Urusan Perdagangan

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
.									wa sarana mobilitas Rp80.000,- SPPD luar daerah Rp2.565.000,- Display Rp60.000,- - Untuk pameran jambore PKKkarena waktu hanya 4 hari sehingga ada efisiensi pada Dispaly Rp50.000,- SPPD luar daerah Rp11.107.000,-.
3.	Pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri	1.028.200.000	100	88,22	100	100	-	100	-Ada efisiensi dari kegiatan JTH sebesar Rp23.833.600 terdiri dari Rp8.063.000,- perjalanan dalam & luar daerah dan hasil negosiasi pihak ke III Rp15.770.100,- -Efisiensi dari fasilitasi pemba-ngunan pasar tradisional sebesar Rp830.000,- dari perjalanan dalam dan luar daerah -Efisiensi dari pelatihan manaje-men usaha bagi PKL Rp572.000,- dari perjalanan dalam dan luar daerah - Efisiensi belanja hibah barang ke masyarakat (PKL) Rp94.288.500,- - Efisiensi fasilitasi dekranasda Rp1.568.100,- dari honor narasumber.
4.	Pelayanan pengembangan bisnis	142.450.000	100	99,94	100	100	100	-	

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2016

34. Urusan Ketransmigrasian

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun Sebelum-nya (%)	Tingkat Kemajuan (2015 dibanding-kan dengan 2014) (%)	Keterangan (Untuk Kinerja 2015, Capaian fisik tidak 100% dan Capaian Anggaran <90%)
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)			
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI**								
1	Penyelenggaraan Transmigrasi	3,395,512,750	100	**89.87**	100	100	87.14	12.86	
2	Pemberdayaan Transmigrasi	92,664,000	100	**99.85**	100	100	100	0	
	JUMLAH	**3,488,176,750**	**100**	**90.13**	**100**	**100**			

Sumber: Disnakertrans DIY, 2016

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) DIY

Kepatihan Danurejan Telp. 0274 - 562811
(Psw. 1209-1220, 1243-1246,1253), 511185 Fax. 0274 - 586712
website http://www.bappeda.jogjaprov.go.id
YOGYAKARTA Kode Pos 55213